Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pasuruan

LAPORAN DATA

Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan

Tahun 2022



TIM PENYUSUN

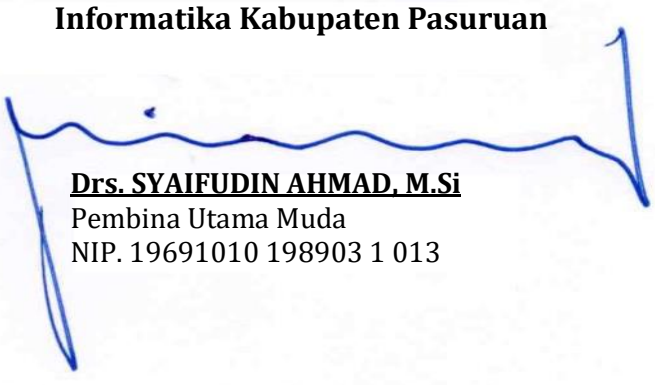
Pengarah/Director	:	Drs Syaifudin Ahmad, MSi
Kordinator Teknis	:	Juli Purwanto,SE.,MM
Naskah/Manuscript	:	Aulia Dwi Rahayu, S.Stat
Tata Letak/Layout	:	Eka Dimas Setiaji, S.Pd
Pengolah Data/Data Processor	:	Della Destylawati, S.Stat
Gambar Kulit/Cover Design	:	Eka Dimas Setiaji, S.Pd
Infografis/Infographics	:	Eka Dimas Setiaji, S.Pd
Penyunting/Editor	:	Rima Khuswatul Laili, A.Md.Stat.

KATA PENGANTAR

Laporan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Publikasi ini menampilkan berbagai macam data sektoral antara lain data sosial, kependudukan, pertanian, perekonomian, serta data sektoral lain yang disertai dengan interpretasi guna memudahkan dalam pemahaman.

Publikasi **Laporan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2022** merupakan publikasi yang diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan perbaikan secara bertahap. Mohon Masukan dan saran dari para pembaca untuk perbaikan publikasi yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan demi terwujudnya **Laporan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pasuruan Tahun 2022**, kami sampaikan terima kasih. Semoga kita dapat terus bekerja sama untuk meningkatkan mutu. Akhirnya kami berharap publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan data bagi para pengguna dan konsumen lain.

Pasuruan, Oktober 2022
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pasuruan



Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198903 1 013

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xxviii
I. KEADAAN GEOGRAFIS 1
1.1 Geografi dan Topografi 1
1.2 Luas Wilayah 2
1.3 Jumlah Desa/ Kelurahan 3
II. DINAS KESEHATAN 4
III. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 49
IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 74
V. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 108
VI. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 123
VII. DINAS TENAGA KERJA 138
VIII. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 161
IX. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 185
X. DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 197
XI. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 212
XII. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 223
XIII. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 235
XIV. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 254
XV. DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI 306
XVI. DINAS PERHUBUNGAN 323
XVII. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 331
XVIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 344
XIX. DINAS PARIWISATA 355
XX. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 363
XXI. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH 375
XXII. DINAS SOSIAL 384
XXIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 399

XXIV. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 408
XXV. DINAS PERIKANAN 527
XXVI. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA534
XXVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU...545
XXVIII. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.....555
XXIX. INSPEKTORAT.....565
XXX. SEKRETARIAT DPRD 571
XXXI. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.....574
XXXII. BAGIAN HUKUM.....580
XXXIII. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN.....583
XXXIV. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN.....587
XXXV. BAGIAN PEREKONOMIAN.....591
XXXVI. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 594
XXXVII. BAGIAN ORGANISASI 598
XXXVIII. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN 603
XXXIX. BAGIAN UMUM.....606
XL. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 620
XLI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 623

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkn Kecamatan 2
Tabel 1. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan 3
Tabel 2. 1 Balita Gizi Buruk..... 7
Tabel 2. 2 Posyandu Balita..... 7
Tabel 2. 3 Penanganan Penderita HIV AIDS..... 8
Tabel 2. 4 Angka Kematian Ibu 8
Tabel 2. 5 Angka Kematian Bayi 9
Tabel 2. 6 Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat..... 9
Tabel 2. 7 Angka Prevalensi Kusta 10
Tabel 2. 8 Angka Harapan Hidup 11
Tabel 2. 9 Desa Siaga..... 11
Tabel 2. 10 Puskesmas atau RSUD yang Terakreditasi 12
Tabel 2. 11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas..... 12
Tabel 2. 12 Desa Siaga Aktif..... 13
Tabel 2. 13 Puskesmas Ber-Akreditasi..... 13
Tabel 2. 14 Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pasuruan..... 14
Tabel 2. 15 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes 15
Tabel 2. 16 Cakupan Kunjungan Bayi 15
Tabel 2. 17 Cakupan Pelayanan Balita 16
Tabel 2. 18 Balita Stunting..... 17
Tabel 2. 19 Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Mendapat Perawatan 17
Tabel 2. 20 Penyakit Menular Wabah yang Dilakukan PE..... 18
Tabel 2. 21 Desa UCI..... 19
Tabel 2. 22 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit TBC 19
Tabel 2. 23 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penyakit DBD..... 20
Tabel 2. 24 Rumah Tangga Sehat..... 21
Tabel 2. 25 Kualitas Kesehatan Lingkungan yang Memenuhi Syarat..... 21
Tabel 2. 26 Screening Usia Lanjut (> 65th) Sesuai Standart..... 22
Tabel 2. 27 Pemeriksaan Kesehatan Penduduk Usia > 15 Tahun yang Diperiksa dalam Satu Tahun 23
Tabel 2. 28 Ketersediaan Obat dan Perbekalan Obat..... 24
Tabel 2. 29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar..... 24
Tabel 2. 30 Penduduk Miskin yang Dibiayai Jaminan Kesehatan 25
Tabel 2. 31 Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan..... 26
Tabel 2. 32 Rumah Tangga / KK yang Menggunakan Jamban Sehat 26
Tabel 2. 33 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart 27
Tabel 2. 34 Mutu pelayanan kesehatan sesuai standart..... 28

Tabel 2. 35 Nilai Hasil Kinerja Puskesmas 28
Tabel 2. 36 Persentase sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart.... 29
Tabel 2. 37 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Bangil..... 29
Tabel 2. 38 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersusun Sesuai Standar30
Tabel 2. 39 Hasil PKP UKP..... 31
Tabel 2. 40 Hasil PKP UKM..... 31
Tabel 2. 41 Indeks Kesehatan..... 32
Tabel 2. 42 Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk 32
Tabel 2. 43 RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi 33
Tabel 2. 44 Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar 33
Tabel 2. 45 Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Persalinan Sesuai Standar 34
Tabel 2. 46 Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar 35
Tabel 2. 47 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 36
Tabel 2. 48 Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 37
Tabel 2. 49 Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 37
Tabel 2. 50 Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 38
Tabel 2. 51 Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39
Tabel 2. 52 Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 40
Tabel 2. 53 ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar 41
Tabel 2. 54 Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar 42
Tabel 2. 55 Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar 43
Tabel 2. 56 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Standar..... 44
Tabel 2. 57 Penduduk Yang Memanfaatkan Puskesmas 45
Tabel 2. 58 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 45
Tabel 2. 59 Rasio Dokter persatuan penduduk..... 46
Tabel 2. 60 Bed Accupancy Rate (BOR) 46
Tabel 2. 61 Nett Dead Rate (NDR) 47
Tabel 2. 62 Penduduk Yang Memanfaatkan Rumah Sakit 47
Tabel 3. 1 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI 52

Tabel 3. 2 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs 52
Tabel 3. 3 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI 53
Tabel 3. 4 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs 54
Tabel 3. 5 Jumlah Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs 54
Tabel 3. 6 Rata - Rata Lama Sekolah 55
Tabel 3. 7 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar 55
Tabel 3. 8 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP 56
Tabel 3. 9 Rasio Guru Per Murid Jenjang SD/MI 56
Tabel 3. 10 Rasio Guru Per Murid Jenjang SMP/MTs 56
Tabel 3. 11 Angka Putus Sekolah SMP/Mts dan Angka Putus Sekolah SD/MI 56
Tabel 3. 12 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs 57
Tabel 3. 13 Angka Melanjutkan 57
Tabel 3. 14 APK PAUD 58
Tabel 3. 15 Peningkatan Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Anak Usia Dini dan RPL Berkondisi Baik 58
Tabel 3. 16 Guru PAUD yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Mengajar 59
Tabel 3. 17 Peningkatan Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Dasar dan RPL Berkondisi Baik 59
Tabel 3. 18 Guru SD/SMP yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Mengajar 60
Tabel 3. 19 Persentase Kenaikan Guru SD dan SMP yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Mengajar 60
Tabel 3. 20 Angka Pendidikan yang Ditamatkan 60
Tabel 3. 21 Tutor dan Penyelenggara/Pengelola PNF yang Bersertifikat 61
Tabel 3. 22 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjadi Rujukan TUK Meningkat 61
Tabel 3. 23 Persentase Guru Berpendidikan S1/D.IV 62
Tabel 3. 24 Guru dan Tenaga Kependidikkan (GTK) yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Meningkatkan Kompetensi 63
Tabel 3. 25 Rasio kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikkan (GTK) terhadap Lembaga 64
Tabel 3. 26 APM TPQ 64
Tabel 3. 27 APM Madrasah Diniyah (Madin) 65
Tabel 3. 28 Guru TPQ/Madin yang Bersertifikat 65
Tabel 3. 29 TPQ yang Berstandar 66
Tabel 3. 30 Madin yang Berstandar 66
Tabel 3. 31 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD 66
Tabel 3. 32 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar 67

Tabel 3. 33 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama 68
Tabel 3. 34 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan 69
Tabel 3. 35 Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 70
Tabel 3. 36 SD/MI dan SMP/MTs Berakreditasi Minimal B 71
Tabel 3. 37 Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Melaksanakan Kurikulum Satuan Pendidikan SD/MI 71
Tabel 3. 38 Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Melaksanakan Kurikulum Satuan Pendidikan SMP/Mts 71
Tabel 3. 39 Jumlah Satuan Pendidikan PAUD dan Pedidikan Nonformal/Kesetaraan 72
Tabel 3. 40 Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin 72
Tabel 3. 41 Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 72
Tabel 3. 42 Guru yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi di Seluruh Tingkatan 73
Tabel 3. 43 Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi di Seluruh Tingkatan 73
Tabel 4. 1 Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP 77
Tabel 4. 2 Kepemilikan Akta Kelahiran 77
Tabel 4. 3 Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan 77
Tabel 4. 4 Kepemilikan Akta Perceraian Berdasarkan Kecamatan 78
Tabel 4. 5 Penerbitan Akta Perkawinan 80
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan Berdasarkan Kecamatan 80
Tabel 4. 7 Kepemilikan E-KTP 81
Tabel 4. 8 Kepemilikan KK 81
Tabel 4. 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun 2020) 81
Tabel 4. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin dan Kelompok Usia 82
Tabel 4. 11 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020 83
Tabel 4. 12 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021 83
Tabel 4. 13 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022 84
Tabel 4. 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2020) 86
Tabel 4. 15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2021) 87
Tabel 4. 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2022) 88

Tabel 4. 17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020 90
Tabel 4. 18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022 91
Tabel 4. 19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021 92
Tabel 4. 20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022 93
Tabel 4. 21 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga (Tahun 2020) 95
Tabel 4. 22 Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2020-2022 97
Tabel 4. 23 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Tahun 2020 99
Tabel 4. 24 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Tahun 2022 101
Tabel 4. 25 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020 102
Tabel 4. 26 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan 103
Tabel 4. 27 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawianan, Jenis Kelamin, dan Kecamatan Tahun 2021 103
Tabel 4. 28 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kecamatan Tahun 2022 104
Tabel 4. 29 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenis Disabilitas Tahun 2022 106
Tabel 5. 1 Jumlah Usaha Mikro 111
Tabel 5. 2 Jumlah Koperasi Berkualitas 113
Tabel 5. 3 Jumlah Koperasi Aktif 114
Tabel 5. 4 Jumlah KOPPONTREN Aktif 118
Tabel 5. 5 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi 118
Tabel 5. 6 Masyarakat yang Berkoperasi 119
Tabel 5. 7 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi 120
Tabel 5. 8 Peningkatan Volume Usaha Koperasi 120
Tabel 5. 9 Peningkatan Omset Usaha Mikro 121
Tabel 5. 10 Koperasi yang Bersertifikat NIK 121
Tabel 5. 11 KSP/USP yang Sehat 121
Tabel 5. 12 Penumbuhan Wirausaha Baru 122
Tabel 6. 1 Jumlah DAS di Kabupaten Pasuruan 126
Tabel 6. 2 Jumlah Sumber Air yang Dapat Dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan 126
Tabel 6. 3 Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 126
Tabel 6. 4 Kinerja Pengelolaan Persampahan 126
Tabel 6. 5 Luas RTH yang Dikelola 127
Tabel 6. 6 Jumlah Instrumen-instrumen Pencegahan Pencemaran da-tau Kerusakan Lingkungan Hidup 127
Tabel 6. 7 Pelaku Usaha yang Diawasi yang Telah Memiliki Ijin Lingkungan 128
Tabel 6. 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 129
Tabel 6. 9 Indeks Kualitas Air (IKA) 129

Tabel 6. 10 Indeks Kualitas Udara (IKU) 130
Tabel 6. 11 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 130
Tabel 6. 12 Nilai TPA (Program Adipura) 131
Tabel 6. 13 Luas Cakupan Permukiman yang Dilayani Pengangkutan Sampah 131
Tabel 6. 14 Persentase TPA Baru 132
Tabel 6. 15 Tersedianya TPS 132
Tabel 6. 16 Tersedianya TPST 133
Tabel 6. 17 Kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan Sesuai Peraturan Perundangan Penegakan Hukum Lingkungan 133
Tabel 6. 18 Ruang Luas Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan 133
Tabel 6. 19 Penurunan Tingkat Pencemaran 134
Tabel 6. 20 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 134
Tabel 6. 21 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 135
Tabel 6. 22 Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 135
Tabel 6. 23 Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup 135
Tabel 6. 24 Persentase Usaha dan/ Kegiatan yang Telah Memiliki Persetujuan Lingkungan 135
Tabel 6. 25 Persentase Sungai yang Tidak Tercemar 136
Tabel 6. 26 Persentase Lokasi Pemantauan Kualitas Udara yang Tidak Tercemar 136
Tabel 6. 27 Persentase Penurunan Lahan Kritis di Wilayah Kabupaten Pasuruan 136
Tabel 6. 28 Persentase Peningkatan Luasan RTH Publik 136
Tabel 6. 29 Persentase Pengelolaan Kegiatan Usaha Pengumpulan Limbah B3 yang Memenuhi Persyaratan Teknis 136
Tabel 6. 30 Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ Kegiatan ..136
Tabel 6. 31 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 136
Tabel 6. 32 Persentase Sekolah/Ponpes yang Berwawasan Lingkungan 137
Tabel 6. 33 Persentase Perusahaan Berwawasan Lingkungan (Proper) 137
Tabel 6. 34 Persentase Sekolah / Madrasah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata) 137
Tabel 6. 35 Persentase Capaian Target Pengurangan Sampah Terhadap JAKSTRADA 137
Tabel 6. 36 Persentase Capaian Target Penanganan Sampah Terhadap JAKSTRADA 137
Tabel 7. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 141
Tabel 7. 2 Rasio Penduduk yang Bekerja 142
Tabel 7. 3 Rasio Kesempatan Kerja 143

Tabel 7. 4 Data Tenaga yang Mendapat Pelatihan Kerja 144
Tabel 7. 5 Pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja 144
Tabel 7. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka 145
Tabel 7. 7 Persentase Penduduk yang Bekerja 146
Tabel 7. 8 Kenaikan pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis.....147
Tabel 7. 9 Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaikan.....147
Tabel 7. 10 Total Peserta Pelatihan 148
Tabel 7. 11 Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi.....149
Tabel 7. 12 Tercapainya Nilai SAKIP.....150
Tabel 7. 13 Jumlah Kunjungan ke Lokasi Transmigrasi 150
Tabel 7. 14 Jumlah Calon Transmigrasi yang Dilatih 151
Tabel 7. 15 Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja.....152
Tabel 7. 16 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 152
Tabel 7. 17 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan).....153
Tabel 7. 18 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota 154
Tabel 7. 19 Jumlah Kerjasama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi (Komulatif) 155
Tabel 7. 20 Persentase Kawasan Transmigrasi yang Termonitor 155
Tabel 7. 21 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja.....156
Tabel 7. 22 Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun.....157
Tabel 7. 23 Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun.....157
Tabel 7. 24 Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB).....158
Tabel 7. 25 Persentase Pelayanan Administrasi Kantor.....159
Tabel 7. 26 Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja.....159
Tabel 8. 1 Revitalisasi Pasar Daerah.....164
Tabel 8. 2 Kinerja Layanan Metrologi Legal 164
Tabel 8. 3 Penerbitan Surat Keterangan Asal 165
Tabel 8. 4 Penyelenggaraan Pameran Dagang.....167
Tabel 8. 5 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal.....167
Tabel 8. 6 Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik 168
Tabel 8. 7 Rasio Pelayanan Tera/Tera Ulang yang Diterbitkan Terhadap Seluruh Pengajuan 169
Tabel 8. 8 Meningkatnya Pengelolaan Pasar (Jumlah Pengelolaan Pasar)....169
Tabel 8. 9 Peningkatan Ketertiban PKL dan Asongan 170

Tabel 8. 10 Persentase Peningkatan IKM yang Terbina 170
Tabel 8. 11 Persentase IKM yang Terfasilitasi.....171
Tabel 8. 12 Jumlah Industri Kecil dan Menengah 172
Tabel 8. 13 Indeks Daya Beli 173
Tabel 8. 14 Nilai Transaksi Perdagangan.....173
Tabel 8. 15 Persentase Alat Ukur yang Terstandarisasi 174
Tabel 8. 16 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 174
Tabel 8. 17 Nilai Produksi Sektor Industri.....175
Tabel 8. 18 Perkembangan Industri Kecil Menengah Besar 176
Tabel 8.19 Peningkatan Pengawasan Terhadap Peralatan dan Sarana 179
Tabel 8.20 Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten.....179
Tabel 8. 21 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP.....180
Tabel 8. 22 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait.....180
Tabel 8. 23 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait.....181
Tabel 8. 24 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini.....181
Tabel 8.25 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP).....181
Tabel 8. 26 Kinerja Realisasi Pupuk 182
Tabel 8. 27 Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku 182
Tabel 8. 28 Persentase Peningkatan Hak Sewa Tempat Pasar dan Pusat Perbelanjaan yang Menjadi Kewenangan 183
Tabel 8. 29 Persentase Perusahaan Eksportir yang Dibina 184
Tabel 8. 30 Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.....184
Tabel 8. 31 Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting yang Harganya Stabil.....184
Tabel 8. 32 Persentase Nilai Ekspor.....184
Tabel 8. 33 Persentase Layanan Tera Tera Ulang Terhadap Potensi UTTP di Kabupaten.....184
Tabel 9. 1 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan.....187
Tabel 9. 2 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Terhadap Masyarakat dan Badan Usaha 188

Tabel 9. 3 Pelanggaran Peraturan Daerah 188
Tabel 9. 4 Gangguan Tibumtranmas yang Ditangani 189
Tabel 9. 5 Persentase pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat 189
Tabel 9. 6 Anggota Linmas yang Teregister KTA 190
Tabel 9. 7 Penanggulangan Kejadian Kebakaran 190
Tabel 9. 8 Penanganan Peristiwa Kebakaran 191
Tabel 9. 9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 192
Tabel 9. 10 Penegakan Peraturan Daerah 192
Tabel 9. 11 Penegakan Peraturan Daerah 192
Tabel 9. 12 Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang Dilatih 193
Tabel 9. 13 Sosialisasi di Bidang Cukai 193
Tabel 9. 14 Pemberantasan Barang Ilegal 194
Tabel 9. 15 Penanganan Keamanan Lingkungan 194
Tabel 9. 16 Perda dan Perkada yang Ditegakkan 195
Tabel 9. 17 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 195
Tabel 9. 18 Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran 196
Tabel 10. 1 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan 200
Tabel 10. 2 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Primer) 200
Tabel 10. 3 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Sekunder) 200
Tabel 10. 4 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Tersier) 201
Tabel 10. 5 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Pembuang) 202
Tabel 10. 6 Rasio Jaringan Irigasi 202
Tabel 10. 7 Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik 203
Tabel 10. 8 Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada 204
Tabel 10. 9 Penanganan Darurat Bencana Banjir 204
Tabel 10. 10 Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan Embung 205
Tabel 10. 11 Jumlah Volume Ketersediaan Air Baku 205
Tabel 10. 12 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dibutuhkan 205
Tabel 10. 13 Rekomendasi Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang 206
Tabel 10. 14 Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 206
Tabel 10. 15 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang 207
Tabel 10. 16 Menurunnya luas daerah genangan banjir 207
Tabel 10. 17 Indeks Ketahanan Air 208

Tabel 10. 18 Ketersediaan & Pemenuhan Air Baku 209
Tabel 10. 19 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 209
Tabel 10. 20 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.....210
Tabel 10. 21 Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi. 210
Tabel 10. 22 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal 211
Tabel 10. 23 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 211
Tabel 11. 1 IKM Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi.....215
Tabel 11. 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - (penilaan KemenPAN-RB).....215
Tabel 11. 3 OPD yang Menerapkan e-Gov.....216
Tabel 11. 4 Peningkatan Kerjasama dengan Media 216
Tabel 11. 5 Pemanfaatan Saluran Media Komunikasi Publik.....216
Tabel 11. 6 Aplikasi Informatika OPD yang Terintegrasi.....216
Tabel 11. 7 Ketersediaan Data Statistik Sektoral 217
Tabel 11. 8 Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan.....217
Tabel 11. 9 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.....218
Tabel 11. 10 Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Daerah.....219
Tabel 11. 11 Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.....219
Tabel 11. 12 Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo.....220
Tabel 11. 13 Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi 221
Tabel 11. 14 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 221
Tabel 11. 15 Website Milik Pemerintah Daerah 222
Tabel 12. 1 Jumlah Produksi Peternakan.....225
Tabel 12. 2 Jumlah Populasi Ternak.....228
Tabel 12. 3 Rasio Ketersediaan Pangan Dibanding Dengan Kebutuhan Bahan Pangan 234
Tabel 12. 4 Peningkatan Produksi Peternakan 234
Tabel 13. 1 Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan.....238
Tabel 13. 2 Rumah Tidak Layak Huni 238

Tabel 13. 3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan 238
Tabel 13. 4 Indeks Permukiman Layak Huni 239
Tabel 13. 5 RT yang Terlayani Air Bersih 239
Tabel 13. 6 Persentase RT yang Terlayani Sanitasi.....240
Tabel 13. 7 Pengurangan Kawasan Kumuh 241
Tabel 13. 8 Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh Menurut Kecamatan 241
Tabel 13. 9 Rumah Layak Huni 243
Tabel 13. 10 Persentase Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan 243
Tabel 13. 11 Bangunan Gedung yang Terstandarisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) 244
Tabel 13. 12 Jalan lingkungan perkotaan yang ditangani.....245
Tabel 13. 13 Penanganan Rumah Akibat Bencana Alam/ Sosial.....245
Tabel 13. 14 Pengembangan Rumah Swadaya.....246
Tabel 13. 15 Persentase Pengembangan Rumah Swadaya Menurut Kecamatan 246
Tabel 13. 16 Tersedianya Infrastruktur Permukiman 247
Tabel 13. 17 Bangunan Gedung yang Dibangun/Direhab 248
Tabel 13. 18 Capaian Lingkungan Permukiman yang Layak Huni 248
Tabel 13. 19 Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 249
Tabel 13. 20 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.....249
Tabel 13. 21 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 250
Tabel 13. 22 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani.....250
Tabel 13. 23 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) .251
Tabel 13. 24 Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 252
Tabel 13. 25 Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan 253
Tabel 13. 26 Persentase tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.....253
Tabel 13. 27 Prosentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah.....253
Tabel 13. 28 Persentase tercapainya pengembangan kawasan permukiman 253
Tabel 14. 1 PDRB Subsektor Pertanian.....256
Tabel 14. 2 PDRB Subsektor Perkebunan.....256
Tabel 14. 3 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 257
Tabel 14. 4 Jumlah Produk Hasil Pertania-gribisnis yang Terstandarisasi...258

Tabel 14. 5 Jumlah Petani Tembakau yang Terlatih 259
Tabel 14. 6 Produktivitas Perkebunan 259
Tabel 14. 7 Mitra Perusahaan Produktivitas Tebu 260
Tabel 14. 8 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kelapa 261
Tabel 14. 9 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kopi 262
Tabel 14. 10 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Cengkeh 263
Tabel 14. 11 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kapuk Randu 264
Tabel 14. 12 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kapuk Kenanga 265
Tabel 14. 13 Produksi Perkebunan 266
Tabel 14. 14 Mitra Perusahaan Produksi Tebu (Ton) 266
Tabel 14. 15 Non Mitra Perusahaan Produksi Kelapa (Ton) 267
Tabel 14. 16 Non Mitra Perusahaan Produksi Kopi (Ton) 268
Tabel 14. 17 Non Mitra Perusahaan Produksi Cengkeh (Ton) 269
Tabel 14. 18 Non Mitra Perusahaan Produksi Kapuk Randu (Ton) 270
Tabel 14. 19 Non Mitra Perusahaan Produksi Kenanga (Ton) 271
Tabel 14. 20 Luas Panen Perkebunan 272
Tabel 14. 21 Mitra Perusahaan Luas Panen Tebu (Ha) 272
Tabel 14. 22 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kelapa (Ha) 273
Tabel 14. 23 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kopi (Ha) 274
Tabel 14. 24 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Cengkeh (Ha) 275
Tabel 14. 25 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kapuk Randu (Ha) 276
Tabel 14. 26 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kenanga (Ha) 277
Tabel 14. 27 Produktivitas Tanaman Pangan Padi per Hektar 278
Tabel 14. 28 Produktivitas Tanaman Pangan Jagung per Hektar 279
Tabel 14. 29 Produktivitas Tanaman Pangan Kedelai per Hektar 280
Tabel 14. 30 Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun 281
Tabel 14. 31 Produktivitas Tanaman Hortikultura Kentang per Hektar 282
Tabel 14. 32 Produktivitas Tanaman Hortikultura Paprika per Hektar 283
Tabel 14. 33 Produktivitas Tanaman Hortikultura Durian per Hektar 284
Tabel 14. 34 Produktivitas Tanaman Hortikultura Mangga per Hektar 285
Tabel 14. 35 Produktivitas Tanaman Hortikultura Apel per Hektar 286
Tabel 14. 36 Produktivitas Tanaman Hortikultura Bunga Sedap Malam per Hektar 287
Tabel 14. 37 Produktivitas Tanaman Hortikultura Krisan per Hektar 288
Tabel 14. 38 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi 289
Tabel 14. 39 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jagung 290
Tabel 14. 40 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kedelai 291
Tabel 14. 41 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kentang 292
Tabel 14. 42 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Paprika 293
Tabel 14. 43 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Durian 293
Tabel 14. 44 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Mangga 294

Tabel 14. 45 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Apel 295
Tabel 14. 46 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bunga Sedap Malam 296
Tabel 14. 47 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Krisan 297
Tabel 14. 48 Jumlah Produksi Perkebunan Mitra Perusahaan Tebu 298
Tabel 14. 49 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kelapa .. 299
Tabel 14. 50 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kopi 300
Tabel 14. 51 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Cengkeh 301
Tabel 14. 52 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kapuk Randu 302
Tabel 14. 53 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kenanga 303
Tabel 14. 54 Persentase Penyediaan Sarana Pertanian 304
Tabel 14. 55 Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian 304
Tabel 14. 56 Persentase Serangan OPT yang Dapat Ditanggulangi 304
Tabel 14. 57 Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Izin Usaha 305
Tabel 15. 1 Indeks Aksesibilitas Wilayah 308
Tabel 15. 2 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang 308
Tabel 15. 3 Persentase Infrastruktur Pendukung Jalan dalam Kondisi Baik 309
Tabel 15. 4 Panjang Jaringan Jalan Keseluruhan 313
Tabel 15. 5 Persentase Panjang Jaringan Jalan Berkategori Rusak yang Dilakukan Pemeliharaan 314
Tabel 15. 6 Panjang Jalan Berdasarkan Material Aspal (Km) 314
Tabel 15. 7 Panjang Jalan Berdasarkan Material Berbatu (Km) 315
Tabel 15. 8 Panjang Jalan Berdasarkan Material Hotmix (Aspal Beton) 316
Tabel 15. 9 Panjang Jalan Berdasarkan Material Cor Beton 316
Tabel 15. 10 Panjang Jalan Berdasarkan Material Kerikil 317
Tabel 15. 11 Panjang Jalan Berdasarkan Material Tanah 318
Tabel 15. 12 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Baik) 319
Tabel 15. 13 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Sedang) 320
Tabel 15. 14 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Rusak Ringan) 321
Tabel 15. 15 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Rusak Berat) 322
Tabel 16. 1 Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum 326
Tabel 16. 2 Penurunan Angka Kecelakaan 326
Tabel 16. 3 Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 327
Tabel 16. 4 Fasilitas LLAJ yang Terpasang 328
Tabel 16. 5 Sarana dan Prasarana Perhubungan 329
Tabel 16. 6 Jumlah Kendaraan yang Uji 329
Tabel 16. 7 Kendaraan Izin Trayek 329

Tabel 16. 8 Jumlah Terminal 330
Tabel 16. 9 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum 330
Tabel 16. 10 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan 330
Tabel 17. 1 Klub Olahraga 334
Tabel 17. 2 Gedung Olahraga 334
Tabel 17. 3 Pemuda Berprestasi 335
Tabel 17. 4 Jumlah Organisasi Pemuda Aktif 336
Tabel 17. 5 Jumlah Atlet Berprestasi 336
Tabel 17. 6 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi 337
Tabel 17. 7 Organisasi Kepemudaan yang Dibina 338
Tabel 17. 8 Pemuda yang Aktif Berwirausaha 338
Tabel 17. 9 Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan 338
Tabel 17. 10 Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas 339
Tabel 17. 11 Kualitas Organisasi Pemuda 339
Tabel 17. 12 Pemuda Mandiri 339
Tabel 17. 13 Olahraga Pemasalan 339
Tabel 17. 14 Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 340
Tabel 17. 15 Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 341
Tabel 17. 16 Jumlah Atlet yang Dibina 341
Tabel 17. 17 Jumlah Pemuda yang Dibina 342
Tabel 17. 18 Atlet Berprestasi yang Dibina 343
Tabel 17. 19 Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif 343
Tabel 18. 1 KDRT 347
Tabel 18. 2 Jumlah Peserta KB Aktif 347
Tabel 18. 3 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 348
Tabel 18. 4 Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I 349
Tabel 18. 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 350
Tabel 18. 6 Anggaran yang Responsif Gender 351
Tabel 18. 7 Kekerasan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan 351
Tabel 18. 8 Peningkatan Jumlah Akseptor KB Baru 352
Tabel 18. 9 mCPR 353
Tabel 18. 10 Dokumen PPRG Yang Disampaikan 354
Tabel 19. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan 358
Tabel 19. 2 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Terstandarisasi 358
Tabel 19. 3 Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi 358
Tabel 19. 4 Jumlah Masyarakat/Pelaku yang Mengikuti Pembinaan Kepariwisataan 358
Tabel 19. 5 Jumlah Seni dan Budaya yang Terpelihara 359
Tabel 19. 6 Pelestarian Dan Pengembangan Kelompok Seni Budaya 359
Tabel 19. 7 Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya 360

Tabel 19. 8 Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional....360
Tabel 19. 9 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan....361
Tabel 19. 10 Karya Budaya yang Direvitalisasi....361
Tabel 19. 11 Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi....362
Tabel 20. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan....366
Tabel 20. 2 Pengunjung Perpustakaan Menurut Layanan....366
Tabel 20. 3 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan....367
Tabel 20. 4 Perpustakaan yang Terakreditasi A....368
Tabel 20. 5 Perpustakaan yang Memenuhi Standar Minimal....368
Tabel 20. 6 Kategori Pengelolaan Arsip Statis....368
Tabel 20. 7 Persentase Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsi Daerah....368
Tabel 20. 8 Persentase Arsip Daerah Tersimpan Dalam Keadaan Baik....369
Tabel 20. 9 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku....370
Tabel 20. 10 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat....370
Tabel 20. 11 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat....370
Tabel 20. 12 Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip....370
Tabel 20. 13 Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan Dalam SIKN Melalui JIKN....371
Tabel 20. 14 Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah....371
Tabel 20. 15 Jumlah Judul Buku....372
Tabel 20. 16 Jumlah Koleksi Buku....373
Tabel 20. 17 Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan....373
Tabel 20. 18 Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban....374
Tabel 21. 1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai dengan Regulasi....378
Tabel 21. 2 Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik....379
Tabel 21. 3 Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik....379
Tabel 21. 4 Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik....380
Tabel 21. 5 Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik....380
Tabel 21. 6 Persentase Kesuaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan....381
Tabel 21. 7 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti....381
Tabel 21. 8 Nilai SAKIP Perencanaan....381

Tabel 21. 9 Indeks Kesalehan Sosial....382
Tabel 21. 10 Indeks Williamson....382
Tabel 21. 11 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA....383
Tabel 21. 12 Prosentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prsasarana Wilayah dan Tata Ruang yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Baik....383
Tabel 21. 13 Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan....383
Tabel 22. 1 Persentase Jumlah PMKS....386
Tabel 22. 2 Persentase Penanganan PMKS....386
Tabel 22. 3 Persentase Pilar-Pilar yang Aktif dalam Penanganan PMKS....387
Tabel 22. 4 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial....387
Tabel 22. 5 Jumlah PMKS yang Tertangani....388
Tabel 22. 6 Persentase PMKS Skala yang Memproleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya....388
Tabel 22. 7 Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Graduasi....389
Tabel 22. 8 Persentase PMKS yang Direhabilitasi....390
Tabel 22. 9 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Darurat....391
Tabel 22. 10 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) 392
Tabel 22. 11 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota....393
Tabel 22. 12 Angka Kemiskinan....393
Tabel 22. 13 Persentase PMKS yang Dibina....394
Tabel 22. 14 Persentase PMKS yang Berdaya....395
Tabel 22. 15 Jumlah Penduduk Miskin....395
Tabel 22. 16 Persentase Penduduk Miskin....396
Tabel 22. 17 Garis Kemiskinan....396
Tabel 22. 18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)....397
Tabel 22. 19 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)....397
Tabel 22. 20 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)....398
Tabel 23. 1 Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan....401
Tabel 23. 2 Jumlah sarana prasarana pasar desa....401
Tabel 23. 3 Binaan Lembaga Masyarakat....401
Tabel 23. 4 Binaan Kelompok Masyarakat....401
Tabel 23. 5 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif....401
Tabel 23. 6 Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif (BUMDES)....402

Tabel 23. 7 Kinerja Desa yang Baik (Persentase Pemerintah Desa yang berkualitas) 403
Tabel 23. 8 Persentase Partisipasi Masyarakat 403
Tabel 23. 9 Desa Mandiri 404
Tabel 23. 10 Pengentasan Desa Tertinggal 405
Tabel 23. 11 Peningkatan Status Desa Mandiri 405
Tabel 23. 12 Jumlah Desa Maju 406
Tabel 23. 13 Prosentase Desa Yang Sarana Prasarananya Difasilitasi 406
Tabel 23. 14 Prosentase Desa Yang Membentuk Kerjasama 406
Tabel 23. 15 Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi Perencanaan Dan Perkembangan Desa 406
Tabel 23. 16 Prosentase Desa Yang Memiliki BUMDES Bermitra Dan Profil Desa Yang Update 407
Tabel 23. 17 Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa 407
Tabel 23. 18 Prosentase Desa Tertib Administrasi Keuangan Desa Yang Akuntabel 407
Tabel 23. 19 Prosentase Lembaga Ekonomi Perdesaan Yang Meningkat Volume Usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) Dan Pemanfaatan TTG 407
Tabel 24. 1 Jumlah Aset Lancar 499
Tabel 24. 2 Jumlah Investasi Jangka Panjang 503
Tabel 24. 3 Jumlah Aset Tetap 504
Tabel 24. 4 Jumlah Aset Lainnya 507
Tabel 24. 5 Jumlah Aset Keseluruhan 510
Tabel 24. 6 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 511
Tabel 24. 7 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 512
Tabel 24. 8 Jumlah Kewajiban Keseluruhan 512
Tabel 24. 9 Jumlah Ekuitas Dana 512
Tabel 24. 10 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana 513
Tabel 24. 11 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 514
Tabel 24. 12 Jumlah Dana Perimbangan 516
Tabel 24. 13 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 517
Tabel 24. 14 Pendapatan Total 518
Tabel 24. 15 Jumlah Belanja Tidak Langsung 519
Tabel 24. 16 Surplus/Defisit 521
Tabel 24. 17 Penerimaan Pembiayaan Daerah 522
Tabel 24. 18 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 523
Tabel 24. 19 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 524
Tabel 24. 20 Pembiayaan Netto 525
Tabel 24. 21 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 525
Tabel 25. 1 PDRB sub sektor perikanan 529

Tabel 25. 2 Produksi Perikanan.....529
Tabel 25. 3 Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Mandiri 530
Tabel 25. 4 Produksi Perikanan Tangkap 531
Tabel 25. 5 Produksi Perikanan Budidaya 531
Tabel 25. 6 Nilai Omzet Pelaku Usaha Perikanan (Rp,) 532
Tabel 25. 7 Peserta Pelatihan Perikanan yang Menjadi Wirausaha Baru 532
Tabel 26. 1 Jumlah ASN Yang Mengikuti Dan Lulus Ujian.....536
Tabel 26. 2 Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) 538
Tabel 26. 3 Pegawai Yang Lulus Diklat Assesment Jabatan 539
Tabel 26. 4 ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3 540
Tabel 26. 5 Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian Ijazah 541
Tabel 26. 6 Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Struktural Dan Jumlah Seluruh Pegawai Struktural.....542
Tabel 26. 7 Peserta Diklat Aparatur Berpredikat Sangat Memuaskan 543
Tabel 27. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Terpadu (GPP) 547
Tabel 27. 2 Persentase Nilai Investasi yang Terealisasi 547
Tabel 27. 3 Peningkatan Nilai Investasi yang Ditanamkan di Daerah 548
Tabel 27. 4 Jumlah Investasi Berskala Nasional PMDN (Unit) 549
Tabel 27. 5 Jumlah Penyelesaian Izin 549
Tabel 27. 6 Jumlah Penyelesaian Izin Prinsip.....550
Tabel 27. 7 Persentase Izin yang Diterbitkan 550
Tabel 27. 8 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota 551
Tabel 27. 9 Persentase Kepuasan Investor Terhadap Pengembangan Iklim Penanaman Modal 552
Tabel 27. 10 Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal.....552
Tabel 27. 11 Persentase Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal.....553
Tabel 27. 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal.....553
Tabel 27. 13 Persentase Perusahaan yang Melakukan LKPM.....554
Tabel 27. 14 Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal 554
Tabel 28. 1 Presentase Pengurangan Resiko Bencana 558
Tabel 28. 2 Korban Bencana Alam yang Dievakuasi dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat.....558
Tabel 28. 3 Indeks Resiko Bencana.....559
Tabel 28. 4 Desa Tangguh Bencana 560
Tabel 28. 5 Korban yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 560
Tabel 28. 6 Persentase Usulan Pemulihan Daerah Terdampak yang Ditindaklanjuti 561

Tabel 28. 7 Indeks Ketahanan Daerah.....562
Tabel 28. 8 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Sosialisasi).....562
Tabel 28. 9 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Pelatihan, Destana, Gladi).....563
Tabel 28. 10 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.....564
Tabel 29. 1 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS).....568
Tabel 29. 2 Opini BPK.....568
Tabel 29. 3 Indeks Persepsi Korupsi.....568
Tabel 29. 4 Nilai Sakip OPD (Inspektorat).....569
Tabel 29. 5 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....569
Tabel 29. 6 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....569
Tabel 29. 7 Persentase terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai.....570
Tabel 29. 8 Indeks Kepuasan Masyarakat.....570
Tabel 30. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD.....573
Tabel 31. 1 Terwujudnya Kegiatan Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Bantuan Sosial Keagamaan.....576
Tabel 31. 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya yang Dilaksanakan.....576
Tabel 31. 3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Ibadah haji.....577
Tabel 31. 4 Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan MTQ.....577
Tabel 31. 5 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Administratif Sosial Budaya.577
Tabel 31. 6 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepada Lembaga Penerima Hibah / Bantuan Sosial.....577
Tabel 31. 7 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi kesejahteraan Rakyat.....578
Tabel 31. 8 Jumlah Laporan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam.....578
Tabel 31. 9 Jumlah Laporan Kegiatan Hari Santri.....578
Tabel 31. 10 Jumlah Laporan Kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad.....578
Tabel 31. 11 Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Hibah.....578
Tabel 31. 12Prosentase Hibah per Tahun.....578
Tabel 32. 1 Persentase Produk Kebijakan Daerah Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Kebutuhan.....582
Tabel 33. 1 Kegiatan yang Tertib Administrasi.....585
Tabel 33. 2 Tersedianya Kebijakan dan Data Pembangunan.....585

Tabel 33. 3 Meningkatnya Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan OPD 585
Tabel 33. 4 Jumlah Proyek yang Dimonitoring 585
Tabel 33. 5 Terlaksana dan Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Paket Proyek Fisik 586
Tabel 33. 6 OPD yang Realisasi Keuangan dan Kemajuan Fisik Pertribulan Sesuai Rencana 586
Tabel 33. 7 Terlaksananya TEPRA dan Tersedianya Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran OPD 586
Tabel 34. 1 Hasil Evaluasi IKK yang Ditindaklanjuti 589
Tabel 34. 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 589
Tabel 34. 3 Penetapan dan Penegasan Batas Daerah 589
Tabel 34. 4 Rupabumi yang dibakukan 590
Tabel 34. 5 Jumlah Penyusunan LPPD 590
Tabel 35. 1 Kebijakan Perekonomian yang Ditindak Lanjuti 593
Tabel 35. 2 Fasilitasi Pemanfaatan DBHCHT 593
Tabel 35. 3 Fasilitasi Pengelolaan Potensi Daerah, Perekonomian Rakyat, dan BUMD 593
Tabel 36. 1 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berhasil Ditenderkan 596
Tabel 36. 2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif 596
Tabel 36. 3 Rasio Nilai Belanja Langsung yang Melalui Pengadaan 597
Tabel 37. 1 Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu 600
Tabel 37. 2 Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 600
Tabel 37. 3 Perangkat Daerah yang Mempunyai Standar Pelayanan 601
Tabel 37. 4 LKJIP OPD yang Berkualitas 601
Tabel 37. 5 Kelembagaan OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Sesuai Dengan Perundang-Undangan 602
Tabel 38. 1 Persentase Jumlah Realisasi Anggaran 605
Tabel 38. 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 605
Tabel 39. 1 Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 608
Tabel 39. 2 Persentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga 608
Tabel 39. 3 Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor 609
Tabel 39. 4 Presentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 609
Tabel 39. 5 Presentase Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu 610
Tabel 39. 6 Presentase Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 610
Tabel 39. 7 Presentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasonal Atau Lapangan 611
Tabel 39. 8 Presentase Pemenuhan Pengadaan Mebel 611

Tabel 39. 9 Presentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 611
Tabel 39. 10 Presentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 611
Tabel 39. 11 Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik 611
Tabel 39. 12 Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor612
Tabel 39. 13 Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.....612
Tabel 39. 14 Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan613
Tabel 39. 15 Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.....614
Tabel 39. 16 Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Mebel 614
Tabel 39. 17 Presentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.....615
Tabel 39. 18 Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.....615
Tabel 39. 19 Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 616
Tabel 39. 20 Presentase Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....617
Tabel 39. 21 Presentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 617
Tabel 39. 22 Presentase Pemenuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....617
Tabel 39. 23 Presentase Pemenuhan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....618
Tabel 39. 24 Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 618
Tabel 39. 25 Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah.....618
Tabel 39. 26 Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 619
Tabel 40. 1 Persentase Peningkatan Pelayanan di Bidang Keprotokolan.....622
Tabel 40. 2 Jumlah Kegiatan Keprotokolan yang Terfasilitasi.....622
Tabel 40. 3 Jumlah Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang Terfasilitasi.....622
Tabel 40. 4 Jumlah Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang Terfasilitasi 622
Tabel 41. 1 Persentase Konflik SARA.....627
Tabel 41. 2 Persentase Penurunan Konflik Sosial 627

Tabel 41. 3 Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah.....628
Tabel 41. 4 Persentase Konflik yang Dapat Diselesaikan Melalui Musyawarah Mufakat.....628
Tabel 41. 5 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba/Minuman Keras (kali)..629
Tabel 41. 6 Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terbina.....629
Tabel 41. 7 Persentase Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Konflik yang Terfasilitasi.....630
Tabel 41. 8 Persentase Arsip Daerah Tersimpan Dalam Keadaan Baik.....631
Tabel 41. 9 Persentase peserta sosialisasi yang memahami deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat.....631
Tabel 41. 10 Persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.....632
Tabel 41. 11 Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.....633
Tabel 41. 12 Persentase peserta yang memahami arti dan makna adanya toleransi antar umat beragama dan antar etnis.....633
Tabel 41. 13 Persentase konflik Sosial Politik yang tertangani.....634
Tabel 41. 14 Persentase organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi.....634

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan 3
Gambar 2. 1 Balita Gizi Buruk (Orang) 7
Gambar 2. 2 Rasio Posyandu terhadap Satuan Balita 7
Gambar 2. 3 Penanganan Penderita HIV AIDS (Kasus) 8
Gambar 2. 4 Jumlah Ibu yang Melahirkan Mati dan Jumlah Bayi Lahir Hidup . 8
Gambar 2. 5 Angka Kematian Bayi 9
Gambar 2. 6 Persentase Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat 10
Gambar 2. 7 Persentase Angka Prevalensi Kusta (Per-100.000 Penduduk) .. 10
Gambar 2. 8 Angka Harapan Hidup 11
Gambar 2. 9 Persentase Desa siaga 11
Gambar 2. 10 Puskesmas atau RSUD yang Terakreditasi 12
Gambar 2. 11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 13
Gambar 2. 12 Persentase Desa Siaga Aktif 13
Gambar 2. 13 Persentase Puskesmas Ber-Akreditasi 14
Gambar 2. 14 Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pasuruan 14
Gambar 2. 15 Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes 15
Gambar 2. 16 Cakupan Kunjungan Bayi 16
Gambar 2. 17 Persentase cakupan pelayanan balita 16
Gambar 2. 18 Persentase Balita Stunting 17
Gambar 2. 19 Persentase Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Mendapat Perawatan 18
Gambar 2. 20 Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan PE 18
Gambar 2. 21 Persentase Desa UCI 19
Gambar 2. 22 Persentase Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penyakit TBC 20
Gambar 2. 23Persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD 20
Gambar 2. 24 Persentase rumah tangga sehat 21
Gambar 2. 25 Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan Yang Memenuhi Syarat 22
Gambar 2. 26 Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart 22
Gambar 2. 27 Persentase pemeriksaan kesehatan Penduduk usia > 15 tahun yang diperiksa dalam satu tahun 23
Gambar 2. 28 Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat 24
Gambar 2. 29 Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar 25
Gambar 2. 30 Persentase penduduk miskin dibiayai jaminan Kesehatan 25
Gambar 2. 31 Persentase penduduk miskin dibiayai jaminan Kesehatan 26

Gambar 2. 32 Persentase Rumah Tangga / KK yang menggunakan jamban sehat 27
Gambar 2. 33 Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart 27
Gambar 2. 34 Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart 28
Gambar 2. 35 Rata rata Nilai Hasil Kinerja Puskesmas 29
Gambar 2. 36 Persentase sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart 29
Gambar 2. 37 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Bangil 30
Gambar 2. 38 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersusun Sesuai Standar 30
Gambar 2. 39 Persentase Hasil PKP UKP 31
Gambar 2. 40 Persentase hasil PKP UKM 31
Gambar 2. 41 Indeks Kesehatan 32
Gambar 2. 42 Persentase Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk 32
Gambar 2. 43 Persentase Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi 33
Gambar 2. 44 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar 34
Gambar 2. 45 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Persalinan Sesuai Standar 35
Gambar 2. 46 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 36
Gambar 2. 47 Persentase Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 36
Gambar 2. 48 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 37
Gambar 2. 49 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 38
Gambar 2. 50 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar 39
Gambar 2. 51 Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 40
Gambar 2. 52 Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41
Gambar 2. 53 Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar 42
Gambar 2. 54 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar 43
Gambar 2. 55 Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar 44

Gambar 2. 56 Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Standar 44
Gambar 2. 57 Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Puskesmas 45
Gambar 2. 58 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 46
Gambar 2. 59 Rasio Dokter persatuan penduduk 46
Gambar 2. 60 Bed Accupancy Rate (BOR) 47
Gambar 2. 61 Nett Dead Rate (NDR) 47
Gambar 2. 62 Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Rumah Sakit 48
Gambar 3. 1 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI 52
Gambar 3. 2 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs 53
Gambar 3. 3 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI 53
Gambar 3. 4 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs 54
Gambar 3. 5 Jumlah Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs 54
Gambar 3. 6 Rata - Rata Lama Sekolah 55
Gambar 3. 7 Angka Putus Sekolah SMP/Mts dan Angka Putus Sekolah SD/MI 57
Gambar 3. 8 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA /SMK 58
Gambar 3. 9 APK PAUD 58
Gambar 3. 10 Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan anak usia dini dan RPL berkondisi baik 59
Gambar 3. 11 Persentase Guru PAUD yang bersertifikat dan terlatih untuk mengajar 59
Gambar 3. 12 Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan dasar dan RPL berkondisi baik 60
Gambar 3. 13 Persentase angka pendidikan yang ditamatkan 61
Gambar 3. 14 Persentase Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat 61
Gambar 3. 15 Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang Pendidikan PAUD 62
Gambar 3. 16 Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang Pendidikan SD/MI 63
Gambar 3. 17 Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang Pendidikan SMP/MTs 63
Gambar 3. 18 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikkan (GTK) yang bersertifikat dan terlatih untuk meningkatkan kompetensi 64
Gambar 3. 19 APM TPQ 65
Gambar 3. 20 APM Madrasah Diniyah (Madin) 65
Gambar 3. 21 Persentase Guru TPQ/Madin yang bersertifikat 66

Gambar 3. 22 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD 67
Gambar 3. 23 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar 68
Gambar 3. 24 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama 69
Gambar 3. 25 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan 70
Gambar 3. 26 Jumlah Satuan Pendidikan PAUD dan Pedidikan Nonformal/Kesetaraan 72
Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran 77
Gambar 4. 2 Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan 78
Gambar 4. 3 Kepemilikan Akta Perceraian Berdasarkan Kecamatan 79
Gambar 4. 4 Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan 80
Gambar 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 82
Gambar 4. 6 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 84
Gambar 4. 7 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 85
Gambar 4. 8 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 85
Gambar 4. 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022 89
Gambar 4. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021 95
Gambar 4. 11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022 95
Gambar 4. 12 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Tahun 2020) 96
Gambar 4. 13 Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2020-2022 98
Gambar 4. 14 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Lainnya Tahun 2020 100
Gambar 4. 15 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin Tahun 2020-2022 103
Gambar 4. 16 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2021 104
Gambar 4. 17 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2022 105
Gambar 4. 18 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenis Disabilitas Tahun 2022 107
Gambar 5. 1 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2017 111
Gambar 5. 2 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2018 112
Gambar 5. 3 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2019 112
Gambar 5. 4 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2020 113
Gambar 5. 5 Jumlah Koperasi Aktif 115
Gambar 5. 6 Jumlah Koperasi Aktif 116

Gambar 5. 7 Jumlah Koperasi Aktif 116
Gambar 5. 8 Jumlah Koperasi Aktif 117
Gambar 5. 9 Jumlah Koperasi Aktif 117
Gambar 5. 10 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi 119
Gambar 5. 11 Persentase masyarakat yang berkoperasi 119
Gambar 5. 12 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi 120
Gambar 5. 13 Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi 121
Gambar 5. 14 Persentase KSP/USP yang sehat 122
Gambar 6. 1 Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 126
Gambar 6. 2 Kinerja Pengelolaan Persampahan 127
Gambar 6. 3 Jumlah Instrumen-instrumen Pencegahan Pencemaran da-tau Kerusakan Lingkungan Hidup 128
Gambar 6. 4 Pelaku Usaha yang Diawasi yang Telah Memiliki Ijin Lingkungan 128
Gambar 6. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 129
Gambar 6. 6 Indeks Kualitas Air (IKA) 129
Gambar 6. 7 Indeks Kualitas Udara (IKU) 130
Gambar 6. 8 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 130
Gambar 6. 9 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 131
Gambar 6. 10 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 131
Gambar 6. 11 Tersedianya TPS 132
Gambar 6. 12 ndeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 133
Gambar 6. 13 Ruang Luas Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan 134
Gambar 6. 14 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 135
Gambar 7. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 141
Gambar 7. 2 Rasio Penduduk yang Bekerja 142
Gambar 7. 3 Rasio Kesempatan Kerja 143
Gambar 7. 4 Data Tenaga yang Mendapat Pelatihan Kerja 144
Gambar 7. 5 Jumlah Peserta Pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja 145
Gambar 7. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka 146
Gambar 7. 7 Persentase Penduduk yang Bekerja 147
Gambar 7. 8 Jumlah Kasus yang Terlayani dan Total Kasus 148
Gambar 7. 9 Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi 150
Gambar 7. 10 Tercapainya Nilai SAKIP 150
Gambar 7. 11 Jumlah Kunjungan ke Lokasi Transmigrasi 151
Gambar 7. 12 Jumlah Calon Transmigrasi yang Dilatih 151
Gambar 7. 13 Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja 152
Gambar 7. 14 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 153

Gambar 7. 15 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) 154
Gambar 7. 16 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota 155
Gambar 7. 17 Jumlah Kerjasama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi (Komulatif) 155
Gambar 7. 18 Persentase Kawasan Transmigrasi yang Termonitor 156
Gambar 7. 19 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja 157
Gambar 7. 20 Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun 157
Gambar 7. 21 Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun 158
Gambar 7. 22 Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 159
Gambar 7. 23 Persentase Pelayanan Administrasi Kantor 159
Gambar 7. 24 Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja 160
Gambar 8. 1 Revitalisasi Pasar Daerah 164
Gambar 8. 2 Jumlah UTTP (Unit) 165
Gambar 8. 3 Retribusi (Rp) 165
Gambar 8. 4 Penerbitan Surat Keterangan Asal 166
Gambar 8. 5 Jumlah Negara Tujuan 166
Gambar 8. 6 Nilai Ekspor Non Migas US $ Dalam Juta (Juta) 166
Gambar 8. 7 Jumlah Pameran Dagang Nasional dan Lokal 167
Gambar 8. 8 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal 168
Gambar 8. 9 Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik 168
Gambar 8. 10 Rasio Pelayanan Tera/Tera Ulang yang Diterbitkan Terhadap Seluruh Pengajuan 169
Gambar 8. 11 Meningkatnya Pengelolaan Pasar (Jumlah Pengelolaan Pasar) 170
Gambar 8. 12 Persentase Peningkatan IKM yang Terbina 170
Gambar 8. 13 Persentase Peningkatan IKM yang Terbina 171
Gambar 8.14 Persentase IKM yang Terfasilitasi 171
Gambar 8. 15 Jumlah Industri Kecil dan Menengah 172
Gambar 8. 16 Indeks Daya Beli 173
Gambar 8. 17 Nilai Transaksi Perdagangan 173
Gambar 8. 18 Persentase alat Ukur yang Terstandarisasi 174
Gambar 8. 19 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri 175
Gambar 8. 20 Nilai Produksi Sektor Industri (Juta Rupiah) 175
Gambar 8. 21 Jumlah Industri Kecil Menengah Besar 177
Gambar 8. 22 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah Besar 177
Gambar 8. 23 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah Besar 178

Gambar 8. 24 Peningkatan Pengawasan Terhadap Peralatan dan Sarana 179
Gambar 8. 25 Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten 179
Gambar 8. 26 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP 180
Gambar 8. 27 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait 180
Gambar 8. 28 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (%) 181
Gambar 8. 29 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP) 182
Gambar 8. 30 Kinerja Realisasi Pupuk 182
Gambar 8. 31 Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku 183
Gambar 8. 32 Jumlah UTTP 183
Gambar 9. 1 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan 187
Gambar 9. 2 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Terhadap Masyarakat dan Badan Usaha 188
Gambar 9. 3 Persentase penindakan pelanggaran peraturan daerah 189
Gambar 9. 4 Persentase gangguan tibumtranmas yang ditangani 189
Gambar 9. 5 Persentase pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat 190
Gambar 9. 6 Persentase anggota linmas yang teregister KTA 190
Gambar 9. 7 Penanggulangan Kejadian Kebakaran 191
Gambar 9. 8 Persentase penanganan kejadian kebakaran 191
Gambar 9. 9 Persentase Penegakan Perda 192
Gambar 9. 10 Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan 193
Gambar 9. 11 Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi di bidang cukai 194
Gambar 9. 12 Persentase penanganan keamanan lingkungan 194
Gambar 9. 13 Perda dan Perkada yang Ditegakkan 195
Gambar 9. 14 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 196
Gambar 9. 15 Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran 196
Gambar 10. 1 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Primer) Tahun 2021 200
Gambar 10.2 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Sekunder) Tahun 2021 201

Gambar 10.3 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Tersier) Tahun 2021 201
Gambar 10.4 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Pembuang) 202
Gambar 10.5 Rasio Jaringan Irigasi 203
Gambar 10.6 Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 203
Gambar 10.7 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada 204
Gambar 10.8 Persentase penanganan darurat banjir 204
Gambar 10.9 Jumlah Volume Ketersediaan Air Baku 205
Gambar 10.10 Persentase penyusunan dokumen rencana tata ruang yang dibutuhkan 206
Gambar 10.11 Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik 207
Gambar 10.12 Menurunnya luas daerah genangan banjir 208
Gambar 10.13 Indeks ketahanan air 208
Gambar 10.14 Persentase ketersediaan & pemenuhan air baku 209
Gambar 10. 15 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan. 210
Gambar 10. 16 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal 211
Gambar 11. 1 IKM Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi 215
Gambar 11. 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - (penilaan KemenPAN-RB) 216
Gambar 11. 3 Persentase Ketersediaan data statistik sektoral 217
Gambar 11. 4 Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan 218
Gambar 11. 5 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah 218
Gambar 11. 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Daerah 219
Gambar 11. 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah 220
Gambar 11. 8 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo ..220
Gambar 11. 9 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi 221
Gambar 11. 10 Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 222

Gambar 12. 1 Jumlah Produksi Peternakan 227

Gambar 12. 2 Jumlah Popolasi Ternak Besar dan Kecil 233
Gambar 12. 3 Jumlah Popolasi Ternak Unggas 234
Gambar 13. 1 Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan 238
Gambar 13. 2 Persentase RT yang Terlayani Air Bersih 239
Gambar 13. 3 Persentase RT yang Terlayani Air Bersih 240
Gambar 13. 4 Persentase RT yang Terlayani Sanitasi 241
Gambar 13. 5 Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh 241
Gambar 13. 6 Persentase pengurangan kawasan kumuh Menurut Tahun 2019-2020 242
Gambar 13. 7 Persentase Rumah Layak Huni Menurut Tahun 2020 244
Gambar 13. 8 Persentase Bangunan Gedung yang Terstandarisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) 244
Gambar 13. 9 Persentase Penanganan Rumah Akibat Bencana Alam/ Sosial 245
Gambar 13. 10 Persentase Pengembangan Rumah Swadaya 246
Gambar 13. 11 Persentase Pengembangan Rumah Swadaya 247
Gambar 13. 12 Persentase Tersedianya Infrastruktur Permukiman 248
Gambar 13. 13 Persentase Capaian Lingkungan Permukiman yang Layak Huni 249
Gambar 13. 14 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman 249
Gambar 13. 15 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 250
Gambar 13. 16 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 251
Gambar 13. 17 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 252
Gambar 13. 18 Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 252
Gambar 13. 19 Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan 253
Gambar 14. 1 PDRB Subsektor Pertanian 256
Gambar 14. 2 PDRB Subsektor Perkebunan 256
Gambar 14. 3 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%) 258
Gambar 14. 4 Jumlah Produk Hasil Pertania-gribisnis yang Terstandarisasi 259
Gambar 14. 5 Produktivitas Perkebunan 259
Gambar 14. 6 Mitra Perusahaan Produktivitas Tebu (Kg/Ha) 260
Gambar 14. 7 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kelapa (Kg/Ha) 261
Gambar 14. 8 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kopi (Kg/Ha) 262
Gambar 14. 9 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Cengkeh (Kg/Ha) 263

Gambar 14. 10 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kapuk Randu (Kg/Ha) 264
Gambar 14. 11 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kenanga (Kg/Ha) 265
Gambar 14. 12 Produksi Perkebunan 266
Gambar 14. 13 Mitra Perusahaan Produksi Tebu (Ton) 267
Gambar 14. 14 Non Mitra Perusahaan Produksi Kelapa (Ton) 268
Gambar 14. 15 Non Mitra Perusahaan Produksi Kopi (Ton) 269
Gambar 14. 16 Non Mitra Perusahaan Produksi Cengkeh (Ton) 270
Gambar 14. 17 Non Mitra Perusahaan Produksi Kapuk Randu (Ton) 271
Gambar 14. 18 Non Mitra Perusahaan Produksi Kenanga (Ton) 272
Gambar 14. 19 Luas Panen Perkebunan 272
Gambar 14. 20 Mitra Perusahaan Luas Panen Tebu (Ha) 273
Gambar 14. 21 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kelapa (Ha) 274
Gambar 14. 22 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kopi (Ha) 275
Gambar 14. 23 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Cengkeh (Ha) 276
Gambar 14. 24 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kapuk Randu (Ha) 277
Gambar 14. 25 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kenanga (Ha) 278
Gambar 14. 26 Produktivitas Tanaman Pangan Padi per Hektar 279
Gambar 14. 27 Produktivitas Tanaman Pangan Jagung per Hektar 280
Gambar 14. 28 Produktivitas Tanaman Pangan Kedelai per Hektar 281
Gambar 14. 29 Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun 281
Gambar 14. 30 Produktivitas Tanaman Hortikultura Kentang per Hektar 282
Gambar 14. 31 Produktivitas Tanaman Hortikultura Paprika per Hektar 283
Gambar 14. 32 Produktivitas Tanaman Hortikultura Durian per Hektar 284
Gambar 14. 33 Produktivitas Tanaman Hortikultura Mangga per Hektar 285
Gambar 14. 34 Produktivitas Tanaman Hortikultura Apel per Hektar 286
Gambar 14. 35 Produktivitas Tanaman Hortikultura Bunga Sedap Malam per Hektar 287
Gambar 14. 36 Produktivitas Tanaman Hortikultura Krisan per Hektar 288
Gambar 14. 37 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi 289
Gambar 14. 38 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jagung 290
Gambar 14. 39 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kedelai 291
Gambar 14. 40 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kentang 292
Gambar 14. 41 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Durian 294
Gambar 14. 42 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Mangga 295
Gambar 14. 43 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Apel 296
Gambar 14. 44 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bunga Sedap Malam 297
Gambar 14. 45 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Krisan 298
Gambar 14. 46 Jumlah Produksi Perkebunan Mitra Perusahaan Tebu 299

Gambar 14. 47 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kelapa 300
Gambar 14. 48 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kopi 301
Gambar 14. 49 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Cengkeh 302
Gambar 14. 50 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kapuk Randu 303
Gambar 14. 51 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kenanga 304
Gambar 15. 1 Indeks Aksesibilitas Wilayah 308
Gambar 15. 2 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang 309
Gambar 15. 3 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang (Km) 309
Gambar 15. 4 Persentase Infrastruktur Pendukung Jalan dalam Kondisi Baik 311
Gambar 15. 5 Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik 311
Gambar 15. 6 Persentase Drainasi dalam Kondisi Baik 311
Gambar 15. 7 Persentase Kondisi Turap / Talud / Bronjong dalam Kondisi Baik 312
Gambar 15. 8 Persentase Lampu Penerangan Jalan / Fasilitas Umum 312
Gambar 15. 9 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik 313
Gambar 15. 10 Panjang Jaringan Jalan Keseluruhan 313
Gambar 15. 11 Panjang Jalan Berdasarkan Material Aspal (Km) 315
Gambar 15. 16 Panjang Jalan Berdasarkan Material Tanah 318
Gambar 15. 17 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Baik) 319
Gambar 15. 18 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Sedang) 320
Gambar 15. 19 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Rusak Ringan) 321
Gambar 15. 20 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Rusak Berat) 322
Gambar 16. 1 Persentase wilayah yang terkoneksi angkutan umum 326
Gambar 16. 2 Penurunan Angka Kecelakaan 327
Gambar 16. 3 Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 328
Gambar 16. 4 Persentase Fasilitas LLAJ yang Terpasang 328
Gambar 16. 6 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum 330
Gambar 17. 1 Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk 334
Gambar 17. 2 Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk 335
Gambar 17. 3 Jumlah Pemuda Prestasi (atlet dan non atlet) 335
Gambar 17. 4 Jumlah Atlet Berprestasi 337
Gambar 17. 5 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi 337
Gambar 17. 6 Persentase olahraga pemasalan 340

Gambar 17. 7 Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri 340
Gambar 17. 8 Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 341
Gambar 17. 9 Jumlah Atlet yang Dibina 342
Gambar 17. 10 Jumlah Atlet yang Dibina 342
Gambar 18. 1 Persentase Rasio KDRT 347
Gambar 18. 2 Jumlah Peserta KB Aktif 348
Gambar 18. 3 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 349
Gambar 18. 4 Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I 350
Gambar 18. 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) 350
Gambar 18. 6 Persentase Anggaran yang Responsif Gender 351
Gambar 18. 7 Jumlah Kekerasan Perempuan yang Terselesaikan 352
Gambar 18. 8 Jumlah Kekerasan Anak yang Terselesaikan 352
Gambar 18. 9 Peningkatan Jumlah Akseptor KB Baru 353
Gambar 18. 10 Jumlah Pasangan Usia Subur 353
Gambar 18. 11 Persentase Dokumen PPRG Yang Disampaikan 354
Gambar 19. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan 358
Gambar 19. 2 Jumlah Seni dan Budaya yang Terpelihara 359
Gambar 19. 3 Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dilestarikan 359
Gambar 19. 4 Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya 360
Gambar 19. 5 Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional 360
Gambar 19. 6 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ..361
Gambar 19. 7 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi 361
Gambar 19. 8 Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi 362
Gambar 20. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan .366
Gambar 20. 2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Layanan 367
Gambar 20. 3 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan 367
Gambar 20. 4 Persentase Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah 369
Gambar 20. 5 Arsip Daerah Tersimpan dalam Keadaan Baik 369
Gambar 20. 6 Pengelolaan Arsip Unit Kerja Secara Baku 370
Gambar 20. 7 Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip.....371
Gambar 20. 8 Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 372
Gambar 20. 9 Jumlah Judul Buku 372
Gambar 20. 10 Jumlah Koleksi Buku 373
Gambar 20. 11 Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 374
Gambar 20. 12 Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban 374

Gambar 21. 1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Dengan Regulasi.....378
Gambar 21. 2 Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik.....379
Gambar 21. 3 Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik.....380
Gambar 21. 4 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti.....381
Gambar 21. 5 Nilai SAKIP Perencanaan.....381
Gambar 21. 6 Indeks Kesalehan Sosial.....382
Gambar 21. 7 Indeks Williamson.....382
Gambar 22. 1 Persentase Penanganan PMKS.....386
Gambar 22. 2 Jumlah PMKS yang Tertangani.....388
Gambar 22. 3 Jumlah PMKS yang Memproleh Bantuan Sosial Skala yang Memproleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya.....389
Gambar 22. 4 Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Graduasi.....390
Gambar 22. 5 Persentase PMKS yang Direhabilitasi.....391
Gambar 22. 6 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Darurat.....392
Gambar 22. 7 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM).....393
Gambar 22. 8 Angka Kemiskinan.....394
Gambar 22. 9 Persentase PMKS yang Dibina.....395
Gambar 22. 10 Jumlah Penduduk Miskin.....396
Gambar 22. 11 Persentase Penduduk Miskin.....396
Gambar 22. 12 Garis Kemiskinan.....397
Gambar 22. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).....397
Gambar 22. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....398
Gambar 22. 15 Tingkat pengangguran terbuka (TPT).....398
Gambar 23. 1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif.....402
Gambar 23. 2 Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif (BUMDES).....402
Gambar 23. 3 Persentase Kinerja Desa yang Baik (Persentase Pemerintah Desa yang Berkualitas).....403
Gambar 23. 4 Persentase Partisipasi Masyarakat.....404
Gambar 23. 5 Persentase Desa Mandiri.....404
Gambar 23. 6 Peningkatan Status Desa Mandiri.....405
Gambar 23. 7 Jumlah Desa Maju.....406

Gambar 24. 1 Jumlah Aset Lancar....502
Gambar 24. 2 Jumlah Investasi Jangka Panjang....504
Gambar 24. 3 Jumlah Aset Tetap....506
Gambar 24. 4 Jumlah Aset Lainnya....509
Gambar 24. 5 Jumlah Aset Keseluruhan....510
Gambar 24. 6 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek....511
Gambar 24. 7 Jumlah Ekuitas Dana....513
Gambar 24. 8 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana....514
Gambar 24. 9 Jumlah Pendapatan Asli Daerah....515
Gambar 24. 10 Jumlah Dana Perimbangan....516
Gambar 24. 11 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah....518
Gambar 24. 12 Pendapatan Total....519
Gambar 24. 13 Jumlah Belanja Tidak Langsung....520
Gambar 24. 14 Surplus/Defisit....521
Gambar 24. 15 Penerimaan Pembiayaan Daerah....522
Gambar 24. 16 Pengeluaran Pembiayaan Daerah....523
Gambar 24. 17 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan....524
Gambar 24. 18 Pembiayaan Netto....525
Gambar 24. 19 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)....526
Gambar 25. 1 PDRB sub sektor perikanan (Dalam Milyar Rupiah)....529
Gambar 25. 2 Jumlah Produksi Perikanan (Dalam Ton)....530
Gambar 25. 3 Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Mandiri....530
Gambar 25. 4 Persentase Produksi Perikanan Tangkap....531
Gambar 25. 5 Persentase Produksi Perikanan Budidaya....532
Gambar 25. 6 Persentase peserta pelatihan perikanan yang menjadi wirausaha baru....533
Gambar 26. 1 Jumlah ASN Yang Mengikuti Dan Lulus Ujian....537
Gambar 26. 2 Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK I....537
Gambar 26. 3 Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK II....537
Gambar 26. 4 Jumlah ASN yang lulus mengikuti Ujian PI....538
Gambar 26. 5 Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara)....538
Gambar 26. 6 Jumlah Pegawai Yang Lulus Diklat Assesment Jabatan....539
Gambar 26. 7 Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Ijazah Setara S1/S2/S3....541
Gambar 26. 8 Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian Ijazah....542
Gambar 26. 9 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural....543
Gambar 26. 10 Peserta Diklat Aparatur Berpredikat Sangat Memuaskan....544

Gambar 27. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Terpadu (GPP) 547
Gambar 27. 2 Persentase Nilai Investasi yang Terealisasi 548
Gambar 27. 3 Target dan Realisasi Nilai Investasi 548
Gambar 27. 4 Peningkatan Nilai Investasi yang Ditanamkan di Daerah 549
Gambar 27. 5 Jumlah Investasi Berskala Nasional PMDN (Unit) 549
Gambar 27. 6 Jumlah Penyelesaian Izin 550
Gambar 27. 7 Persentase Izin yang Diterbitkan 550
Gambar 27. 8 Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dan Jumlah Permohonan Izin 551
Gambar 27. 9 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota 551
Gambar 27. 10 Persentase Kepuasan Investor Terhadap Pengembangan Iklim Penanaman Modal 552
Gambar 27. 11 Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal 552
Gambar 27. 12 Persentase Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal 553
Gambar 27. 13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal 553
Gambar 27. 14 Persentase Perusahaan yang Melakukan LKPM 554
Gambar 27. 15 Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal 554
Gambar 28. 1 Persentase Pengurangan Resiko Bencana 558
Gambar 28. 2 Persentase Korban Bencana Alam yang Dievakuasi dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat 559
Gambar 28. 3 Indeks Resiko Bencana 559
Gambar 28. 4 Persentase Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk Dikawasan Rawan Bencana 560
Gambar 28. 5 Persentase Korban yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar 561
Gambar 28. 6 Persentase Usulan Pemulihan Daerah Terdampak yang Ditindaklanjuti 561
Gambar 28. 7 Indeks Ketahanan Daerah 562
Gambar 28. 8 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Sosialisasi) 563
Gambar 28. 9 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 564
Gambar 29. 1 Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS) 568
Gambar 29. 2 Nilai Sakip OPD (Inspektorat) 569
Gambar 29. 3 Indeks Kepuasan Masyarakat 570
Gambar 30. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD 573

Gambar 31. 1 Terwujudnya Kegiatan Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Bantuan Sosial Keagamaan 576
Gambar 31. 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya yang Dilaksanakan 576
Gambar 31. 3 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepada Lembaga Penerima Hibah / Bantuan Sosial 577
Gambar 31. 4 Prosentase Hibah per Tahun 579
Gambar 32. 1 Jumlah Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Penyebarluasan Informasi Hukum 582
Gambar 30. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD 573
Gambar 33. 1 Kegiatan yang Tertib Administrasi 585
Gambar 33. 2 Jumlah Proyek yang Dimonitoring 586
Gambar 34. 1 Persentase Hasil Evaluasi IKK yang Ditindaklanjuti 589
Gambar 36. 1 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif 597
Gambar 36. 2 Rasio Nilai Belanja Langsung yang Melalui Pengadaan 597
Gambar 36. 1 Persentase dan Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan 596
Gambar 37. 2 Persentase pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu 600
Gambar 37. 3 Persentase Perangat Desa Yang Mempunyai Standar Pelayanan 601
Gambar 37. 4 LKJIP OPD yang Berkualitas 602
Gambar 38. 1 Persentase Jumlah Realisasi Anggaran 605
Gambar 39. 1 Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 608
Gambar 39. 2 Persentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga 608
Gambar 39. 3 Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor 609
Gambar 39. 4 Presentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan ... 609
Gambar 39. 5 Presentase Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu 610
Gambar 39. 6 Presentase Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 610
Gambar 39. 7 Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik 612
Gambar 39. 8 Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 612
Gambar 39. 9 Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 613
Gambar 39. 10 Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 613

Gambar 39. 11 Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 614
Gambar 39. 12 Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Mebel 614
Gambar 39. 13 Presentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.....615
Gambar 39. 14 Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 616
Gambar 39. 15 Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 616
Gambar 39. 16 Presentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 617
Gambar 39. 17 Presentase Pemenuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....618
Gambar 41. 1 Persentase konflik SARA 627
Gambar 41. 2 Persentase Penurunan Konflik Sosial 627
Gambar 41. 3 Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah.....628
Gambar 41. 4 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba/Minuman Keras (kali)629
Gambar 41. 5 Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terbina 630
Gambar 41. 6 Persentase Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Konflik yang Terfasilitasi 630
Gambar 41. 7 Persentase peserta sosialisasi yang memahami deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat 631
Gambar 41. 8 Persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan 632
Gambar 41. 9 Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.....633
Gambar 41. 10 Persentase peserta yang memahami arti dan makna adanya toleransi antar umat beragama dan antar etnis.....634
Gambar 41. 11 Persentase organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi.....634



KEADAAN GEOGRAFIS

I. KEADAAN GEOGRAFIS

1.1 Geografi dan Topografi

Secara umum, wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki 24 Kecamatan, yang terbagi habis menjadi 365 desa/kelurahan dengan luas wilayah sebesar 1,474,02 Km^2. Kabupaten Pasuruan terletak antara 112° 35' 30" hingga 113° 06' 30" Bujur Timur dan 7° 32' 30" hingga 7° 57' 30" Lintang Selatan. Dengan batas wilayah sebagaimana Permendagri Nomor 47 tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu

Kondisi topografi Wilayah Kabupaten Pasuruan terkait erat dengan kondisi ketinggian dan kelerengan. Berdasarkan tingkat kelerengan, Wilayah Kabupaten Pasuruan dapat dibagi menjadi 7 yaitu:

a) Kelerengan 0 – 2%: antara lain seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling,
b) Kelerengan 2 – 5%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling,

c) Kelerengan 5 – 8%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok,

d) Kelerengan 8 – 15%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati

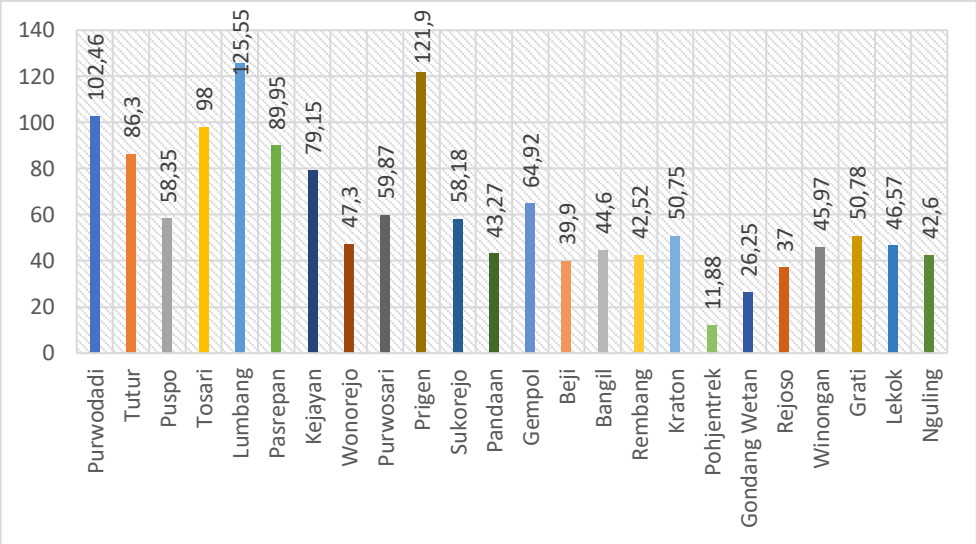
e) Kelerengan 15 – 25%: antara lain adalah sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji,

f) Kelerengan 25 – 45%: antara lain sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol,

1.2 Luas Wilayah

Tabel 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkn Kecamatan

Kecamatan	Luas Daratan (Km^2)	Kecamatan	Luas Daratan (Km^2)
Purwodadi	102,46	Gempol	64,92
Tutur	86,3	Beji	39,9
Puspo	58,35	Bangil	44,6
Tosari	98	Rembang	42,52
Lumbang	125,55	Kraton	50,75
Pasrepan	89,95	Pohjentrek	11,88
Kejayan	79,15	Gondang Wetan	26,25
Wonorejo	47,3	Rejoso	37
Purwosari	59,87	Winongan	45,97
Prigen	121,9	Grati	50,78
Sukorejo	58,18	Lekok	46,57
Pandaan	43,27	Nguling	42,6



Gambar 1. 1 Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan

1.3 Jumlah Desa/ Kelurahan

Tabel 1. 2 Jumlah Desa/Kelurahan Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Jumlah	Kecamatan	Jumlah
Purwodadi	13	Gempol	15
Tutur	12	Beji	14
Puspo	7	Bangil	15
Tosari	8	Rembang	17
Lumbang	12	Kraton	25
Pasrepan	17	Pohjentrek	9
Kejayan	25	Gondang Wetan	20
Wonorejo	15	Rejoso	16
Purwosari	15	Winongan	18
Prigen	14	Grati	15
Sukorejo	19	Lekok	11
Pandaan	18	Nguling	15

DINAS KESEHATAN

DESKRIPSI

Balita gizi buruk merupakan kondisi dimana anak usia di bawah lima tahun saat dilakukan pengukuran berat badan menurut tinggi badan da-tau umur dibandingkan standar memiliki nilai yang sangat rendah. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 0,04% dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga pada akhir tahun 2021 memiliki persentase sebesar 0,03%. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa semakin kecil persentase jumlah balita gizi buruk, mengindikasikan semakin sedikit pula balita yang memiliki konsumsi energi dan protein yang rendah dalam makanan sehari-hari.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan yang disebabkan karena kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Pada tahun 2017, AKI berada pada nilai 83,38 per-100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga pada tahun 2021 berada pada nilai 8,34 per-100.000 kelahiran hidup. Nilai tersebut mengindikasikan semakin kecil nilai AKI, maka semakin tinggi derajat kesehatan reproduksi masyarakat.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu. Pada tahun 2017, AKB berada pada nilai 13 per-1000 kelahiran hidup dan terus mengalami penurunan hingga pada akhir tahun 2021 berada pada nilai 5,30 per-1000 kelahiran hidup. Penurunan nilai AKB tersebut mengindikasikan bahwa semakin kecil nilai AKB, maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

Kesehatan reproduksi, pencegahan, dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian juga telah tercapai dengan penurunan nilai AKB ini.

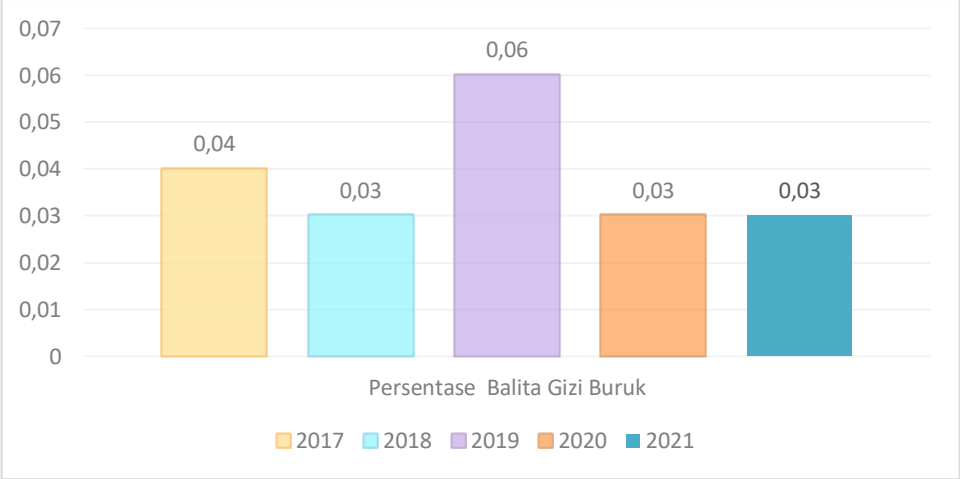
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan seseorang dapat bertahan hidup sejak lahir. Pada tahun 2017, nilai AHH di Kabupaten Pasuruan sebesar 70,80 tahun dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga pada tahun 2021 berada pada nilai 70,25 tahun. Nilai tersebut mengartikan bahwa pada tahun 2021, rata-rata bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai 70,25 tahun.

Balita Stunting adalah anak usia di bawah lima tahun yang memiliki kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan menggunakan standar WHO tahun 2005. Pada tahun 2017, persentase balita stunting di Kabupaten Pasuruan sebesar 24,4% dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga pada akhir tahun 2021 berada pada persentase 18,1%. Nilai tersebut mengindikasikan, semakin kecil persentase balita stunting, maka semakin baik latar belakang sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 1 Balita Gizi Buruk

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Balita Gizi Buruk	0,04	0,03	0,06	0,03	0,03	%
Jumlah Balita Gizi Buruk	44	41	40	41	13	Orang
Jumlah Balita	121.781	119.214	70.910	117.832	118.395	Orang

Sumber: Dinas Kesehatan



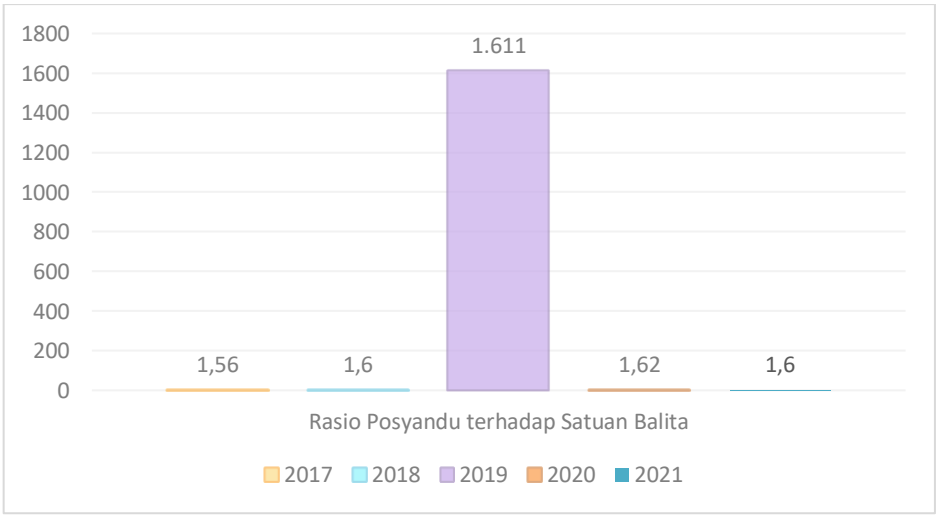
Gambar 2. 1 Balita Gizi Buruk (Orang)

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 2 Posyandu Balita

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rasio Posyandu terhadap Satuan Balita	1,56	1,60	1.611	1,62	1,60	
Jumlah Posyandu Balita	1.898	1.907	1.909	1.911	1.917	Unit

Sumber: Dinas Kesehatan



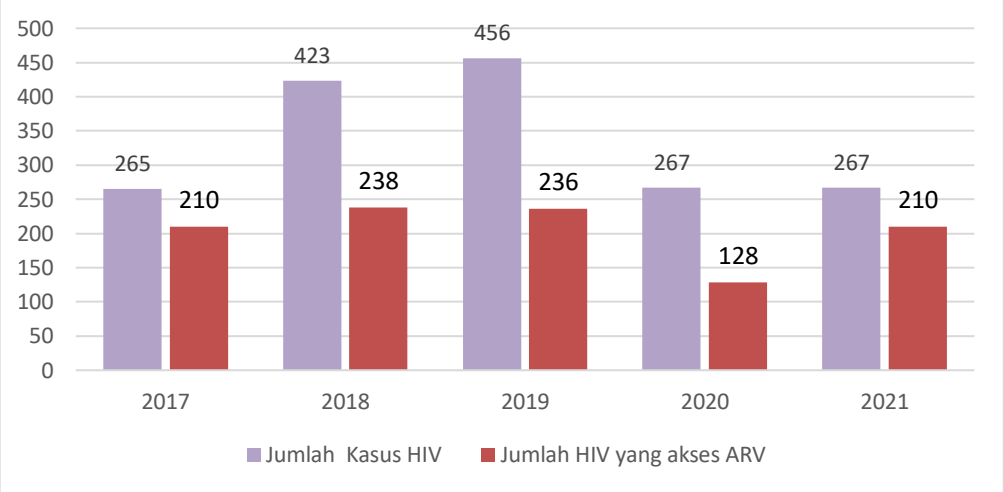
Gambar 2. 2 Rasio Posyandu terhadap Satuan Balita

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 3 Penanganan Penderita HIV AIDS

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Penanganan Penderita HIV AIDS	79,25	56,26	51,75	47,94	106,07	%
Jumlah Kasus HIV	265	423	456	267	267	Kasus
Jumlah HIV yang akses ARV	210	238	236	128	210	kasus

Sumber: Dinas Kesehatan



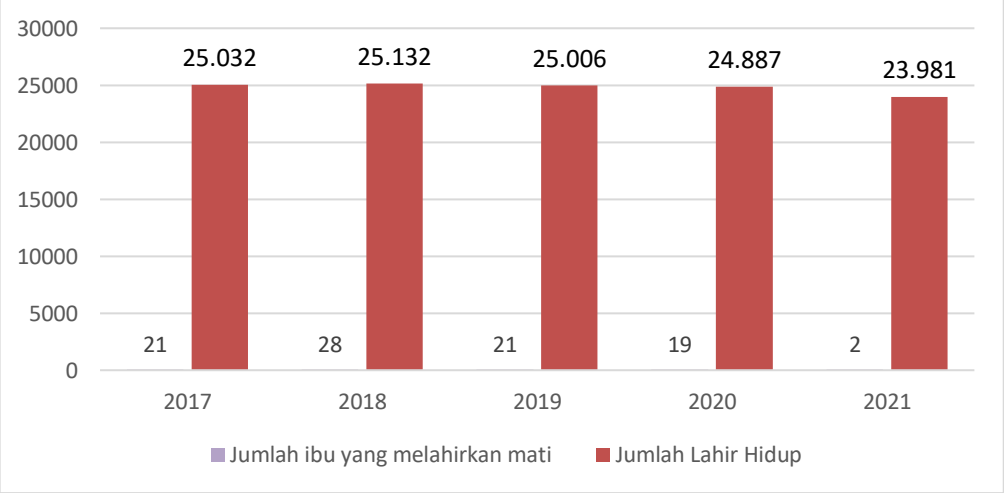
Gambar 2. 3 Penanganan Penderita HIV AIDS (Kasus)

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 4 Angka Kematian Ibu

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Kematian Ibu	83,89	111,41	83,98	76,35	8,34	%
Jumlah ibu yang melahirkan mati	21	28	21	19	2	Ibu
Jumlah Lahir Hidup	25.032	25.132	25.006	24.887	23.981	Bayi

Sumber: Dinas Kesehatan



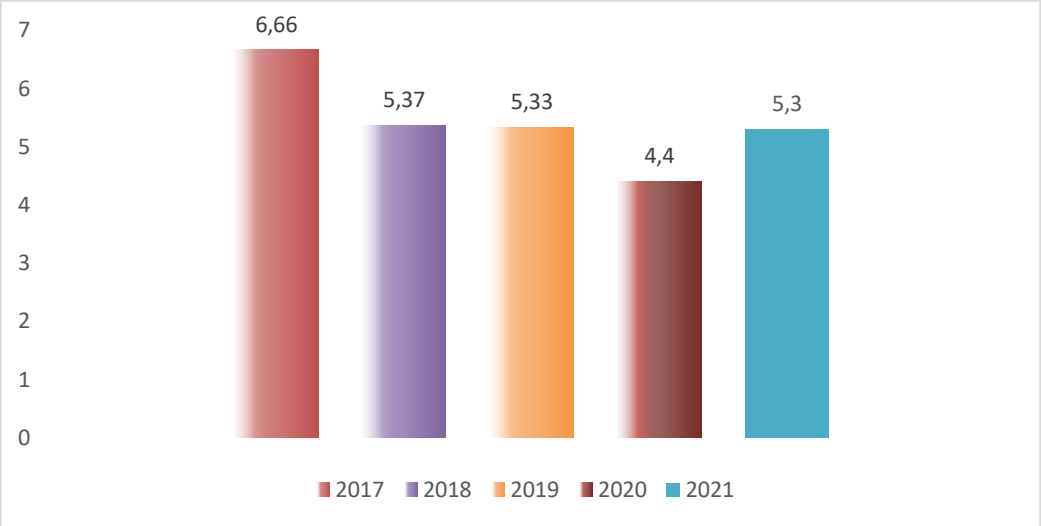
Gambar 2. 4 Jumlah Ibu yang Melahirkan Mati dan Jumlah Bayi Lahir Hidup

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 5 Angka Kematian Bayi

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Kematian Bayi	0,54	0,63	0,46	0,16	5,30	Per-1000 Kelahiran Hidup
Jumlah bayi meninggal	13	15	11	4	129	Bayi
Jumlah lahir hidup	24.058	23.935	23.815	24.838	24.195	Bayi

Sumber: Dinas Kesehatan



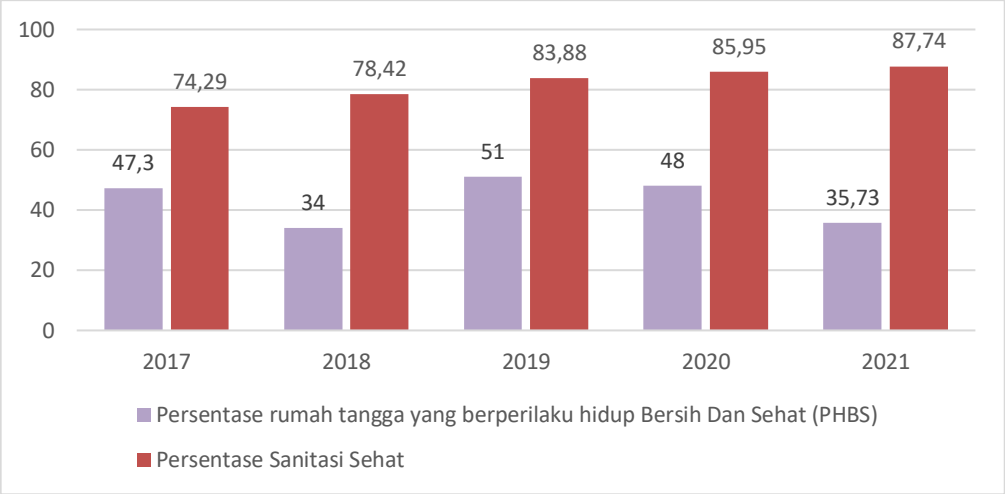
Gambar 2. 5 Angka Kematian Bayi

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 6 Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	47,30	34	51	48	35,73	%
Jumlah Rumah Tangga yang Ber-PHBS	25.128	20.064	49.196	43.706	9.222	Rumah Tangga
Jumlah Rumah Tangga (yang dikaji)	53.124	59.594	94.026	84.864	25.808	Rumah Tangga
Persentase Sanitasi Sehat	74,29	78,42	83,88	85,95	87,74	%
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi sehat	1.192.603	350.217	384.931	399.248	409.123	Rumah Tangga
Jumlah Rumah Tangga	1.605.306	446.587	458.915	464.489	466.277	Rumah Tangga

Sumber: Dinas Kesehatan



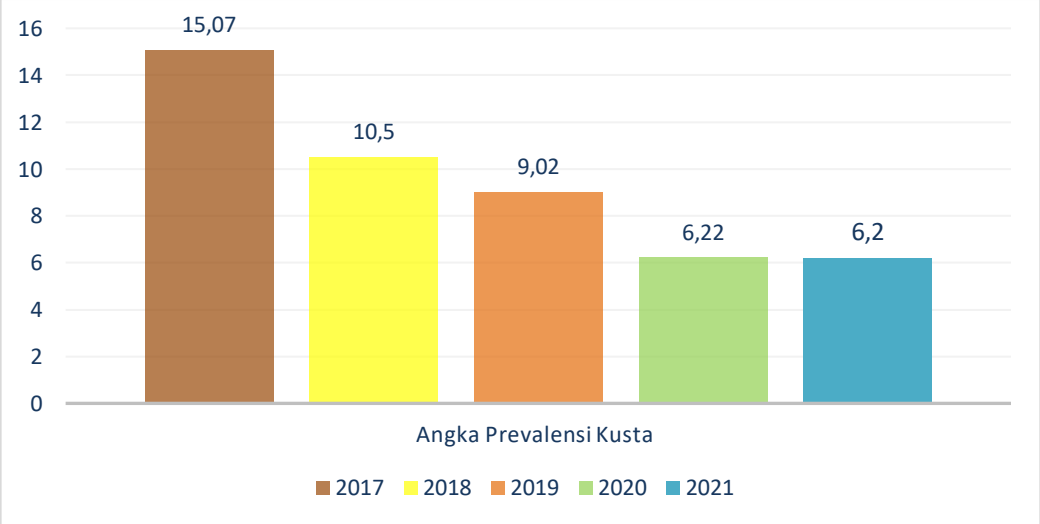
Gambar 2. 6 Persentase Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 7 Angka Prevalensi Kusta

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Prevalensi Kusta	1,5	1,0	1,0	0,6	0,6	Per-100.000 Penduduk
Jumlah orang yang menderita penyakit kusta selama satu jangka waktu tertentu	242	161	157	102	96	Orang
Jumlah Populasi	1.605.307	1.616.578	1.627.396	1.637.682	1.650.256	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



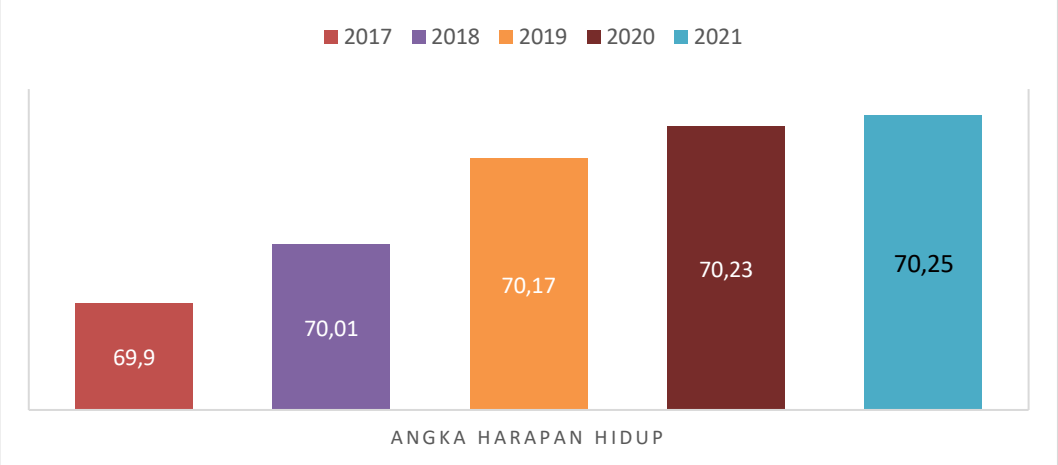
Gambar 2. 7 Persentase Angka Prevalensi Kusta (Per-100.000 Penduduk)

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 8 Angka Harapan Hidup

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Harapan Hidup	70,80	70,97	70,17	70,23	70,25	Tahun

Sumber: Dinas Kesehatan



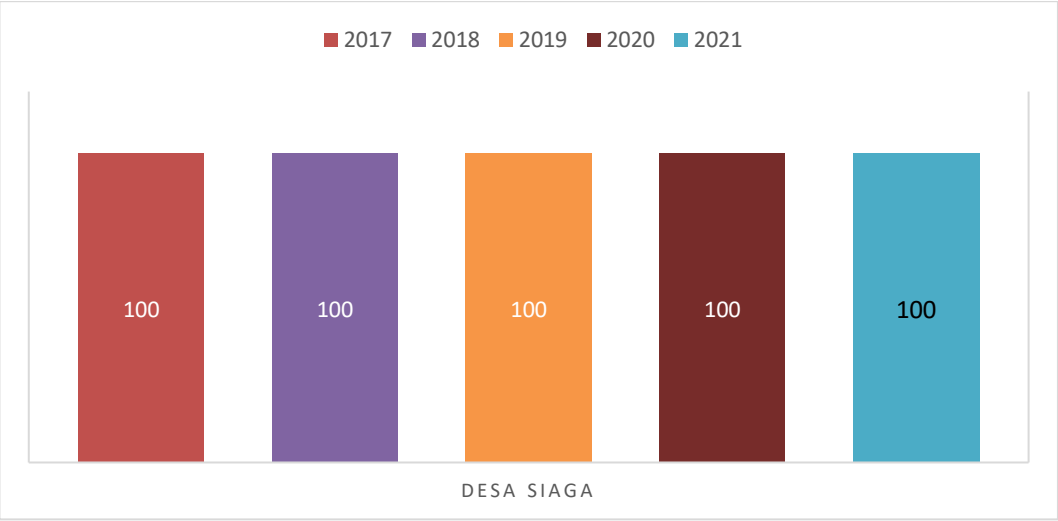
Gambar 2. 8 Angka Harapan Hidup

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 9 Desa Siaga

Desa Siaga	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Desa siaga	100	100	100	100	100	%
Jumlah Desa Siaga	365	365	365	365	365	Desa
Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	365	365	365	365	365	Desa

Sumber: Dinas Kesehatan



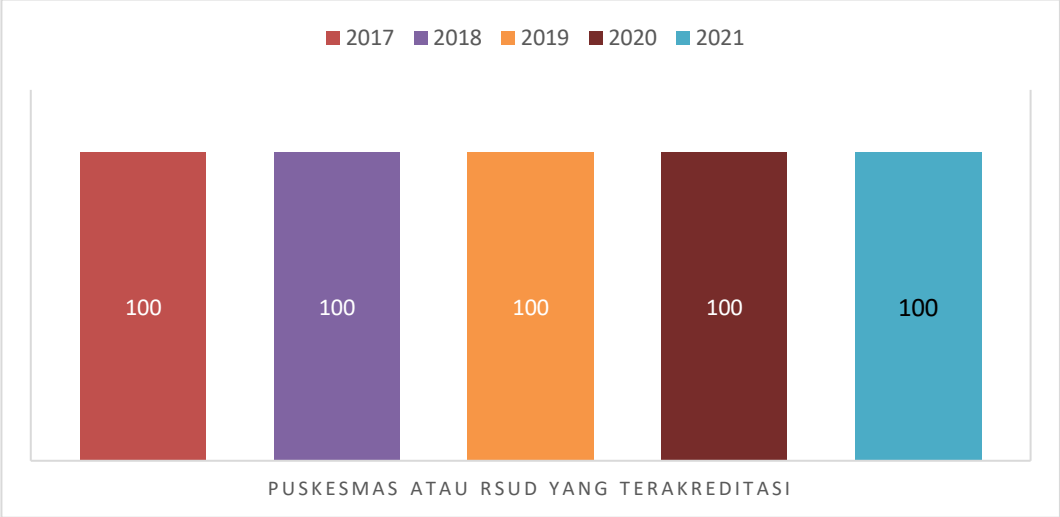
Gambar 2. 9 Persentase Desa siaga

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 10 Puskesmas atau RSUD yang Terakreditasi

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase akreditasi Puskesmas dan RSUD strata madya	100	100	100	100	100	%
Jumlah Puskesmas atau RSUD yang terakreditasi	34	34	34	34	34	Puskesmas
Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas	34	34	34	34	34	Pelayanan

Sumber: Dinas Kesehatan



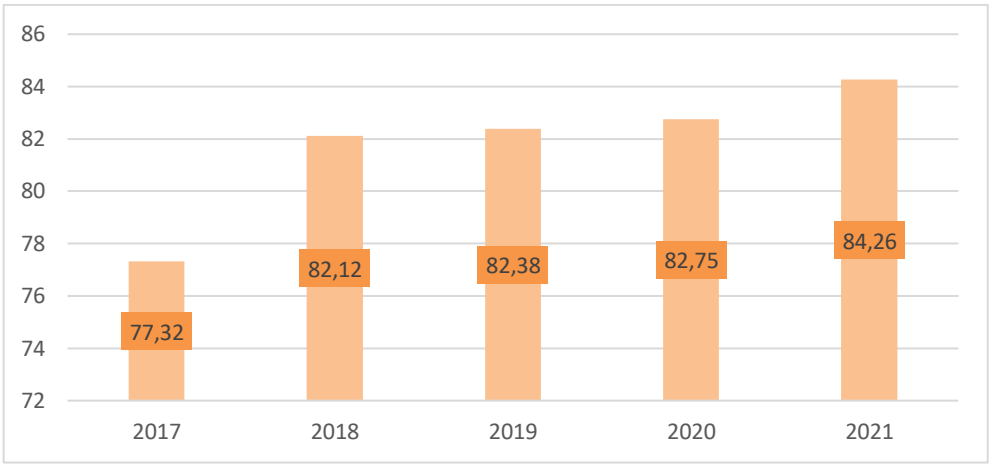
Gambar 2. 10 Puskesmas atau RSUD yang Terakreditasi

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan Kesehatan di Puskesmas	77,32	82,12	82,38	82,75	84,26	%
Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat	80	2.710	2.730	2.731	2.865	Nilai
Jumlah pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12	12	12	12	12	Pelayanan

Sumber: Dinas Kesehatan



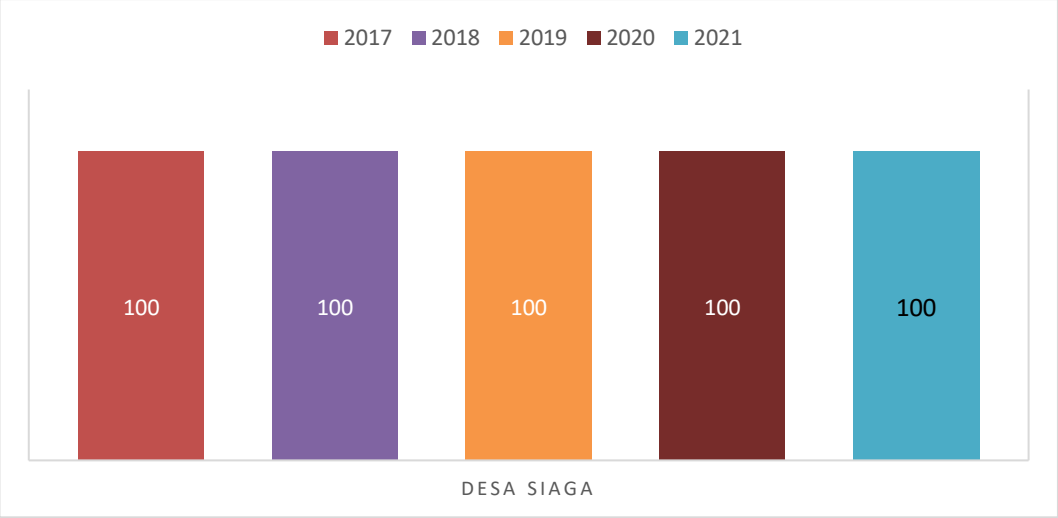
Gambar 2. 11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 12 Desa Siaga Aktif

Desa Siaga Aktif	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Desa Siaga Aktif	100	100	100	100	100	%
Jumlah Desa Siaga Aktif	365	365	365	365	365	Desa
Jumlah Desa	365	365	365	365	365	Desa

Sumber: Dinas Kesehatan



Gambar 2. 12 Persentase Desa Siaga Aktif

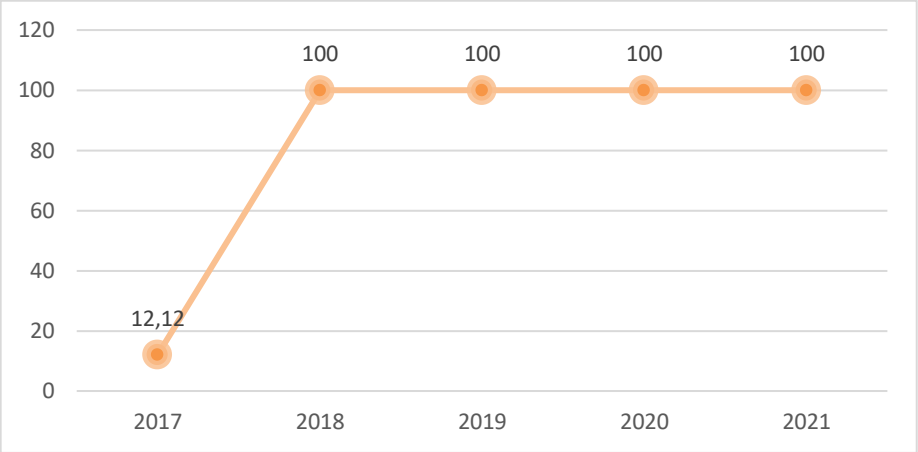
Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 13 Puskesmas Ber-Akreditasi

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Puskesmas Ber-Akreditasi	12,12	100	100	100	100	%
Jumlah Puskesmas Berakreditasi	4	33	33	33	33	Puskesmas

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Puskesmas keseluruhan	33	33	33	33	33	Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan



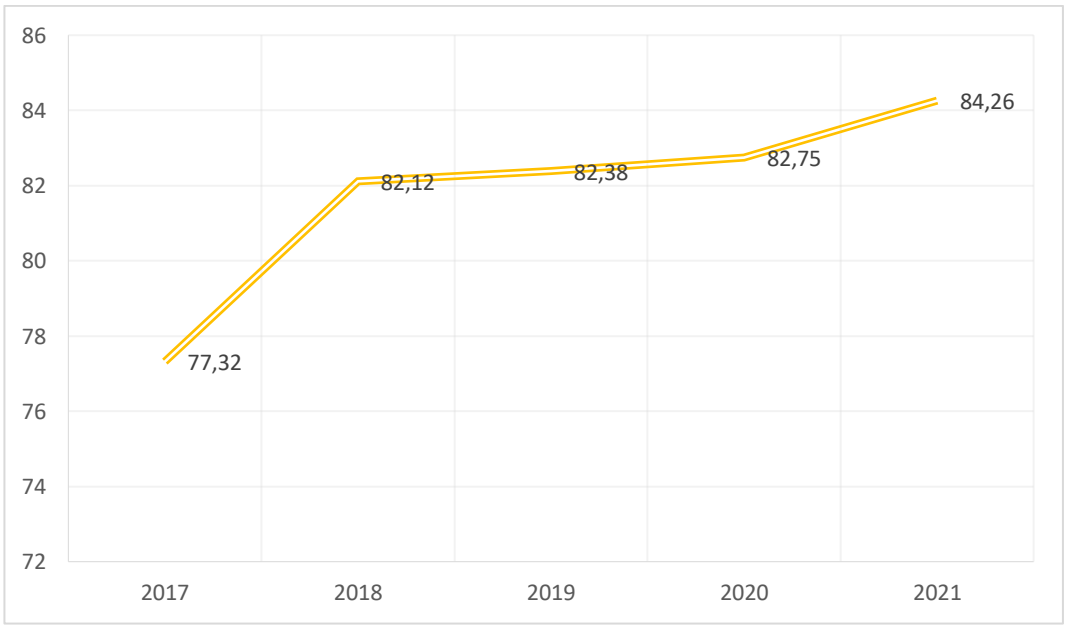
Gambar 2. 13 Persentase Puskesmas Ber-Akreditasi

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 14 Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pasuruan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pasuruan	77,32	82,12	82,38	82,75	84,26	Indeks

Sumber: Dinas Kesehatan



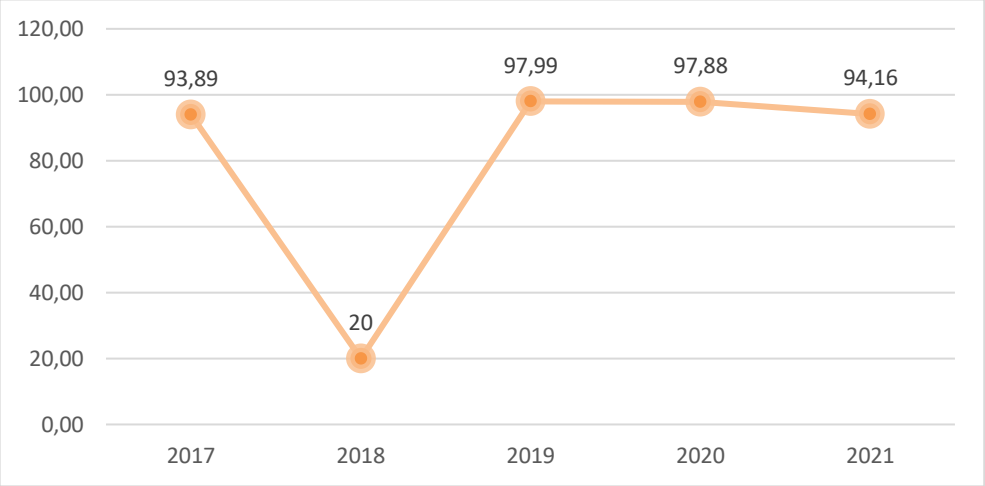
Gambar 2. 14 Nilai IKM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Pasuruan

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 15 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase cakupan pertolongan persalinan oleh nakes	93,89	20,00	97,99	97,88	94,16	%
Banyaknya persalinan yang ditolong oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan	4.995	1.053	5.218	5.128	4.731	Persalinan
Jumlah persalinan seluruhnya pada periode yang sama	5.320	5.266	5.239	5.239	5.025	Persalinan

Sumber: Dinas Kesehatan



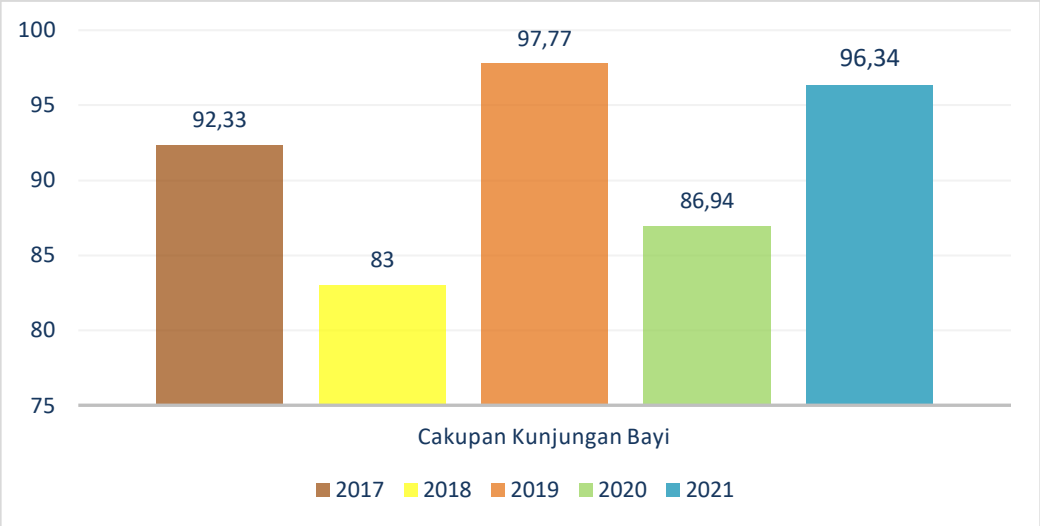
Gambar 2. 15 Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 16 Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan Kunjungan Bayi	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Cakupan kunjungan bayi	92,33	83	97,77	86,94	96,34	%
Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	23.113	20.876	23.145	20.477	23.310	Anak
Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup	25.032	25.152	23.673	23.552	24.195	Anak

Sumber: Dinas Kesehatan



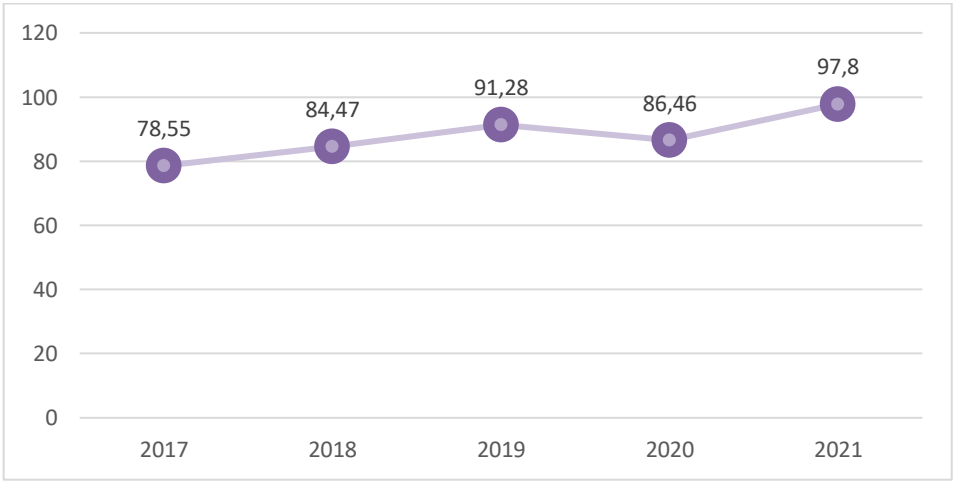
Gambar 2. 16 Cakupan Kunjungan Bayi

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 17 Cakupan Pelayanan Balita

Cakupan Pelayanan Balita	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase cakupan pelayanan balita	78,55	84,47	91,28	86,46	97,8	%
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan sesuai standar pada waktu tertentu	76.089	38.772	108.156	101.881	91.878	Anak
Jumlah seluruh anak balita pada waktu tertentu	96.872	45.901	118.492	117.832	93.938	Anak

Sumber: Dinas Kesehatan



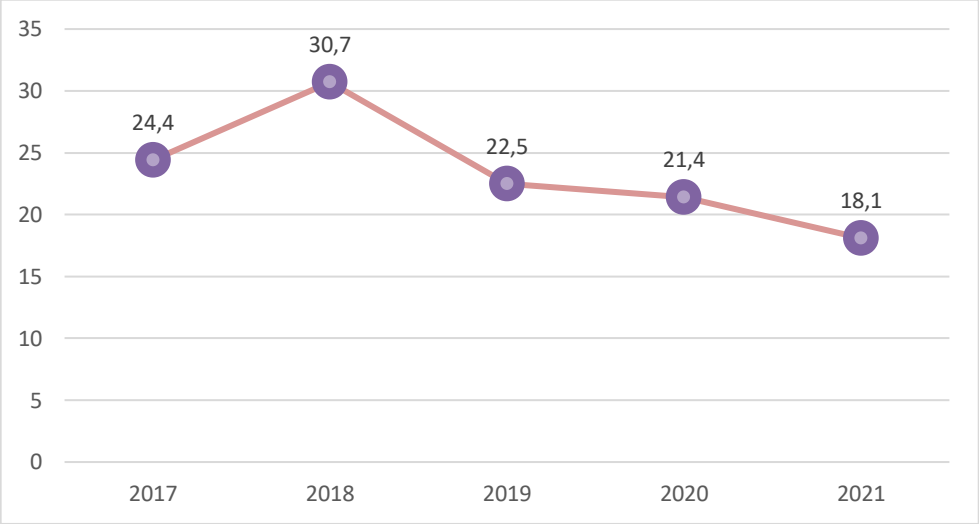
Gambar 2. 17 Persentase cakupan pelayanan balita

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 18 Balita Stunting

Balita Stunting	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase balita Stunting	24,4	30,70	22,5	21,4	18,1	%
Jumlah balita stunting	23.453	29.889	18.678	10.942	12.719	Balita
Jumlah balita yang diukur panjang atau tinggi badan	96.117	97.358	82.963	50.872	70.267	Balita

Sumber: Dinas Kesehatan



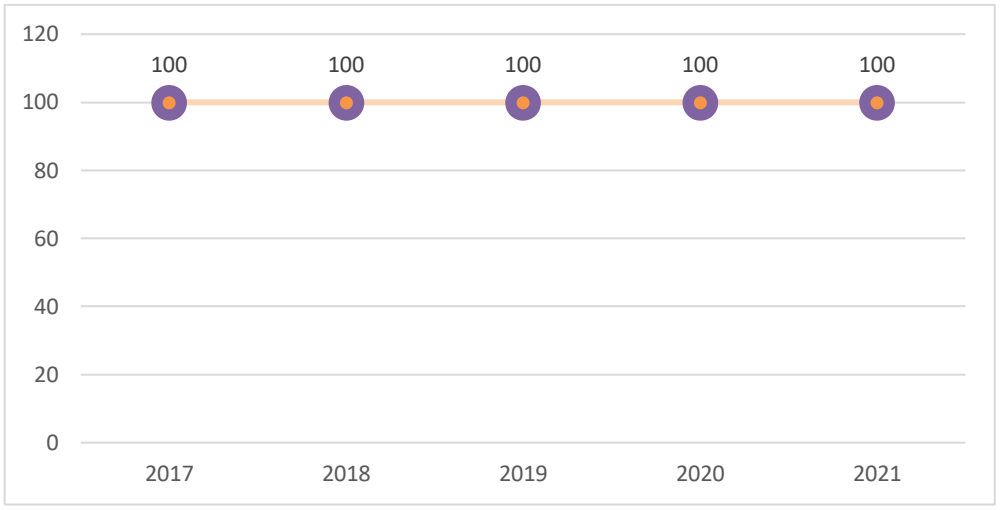
Gambar 2. 18 Persentase Balita Stunting

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 19 Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Mendapat Perawatan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	100	100	100	100	100	%
Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan dan mendapat perawatan	44	41	40	34	31	Balita
Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan	44	41	40	34	31	Balita

Sumber: Dinas Kesehatan

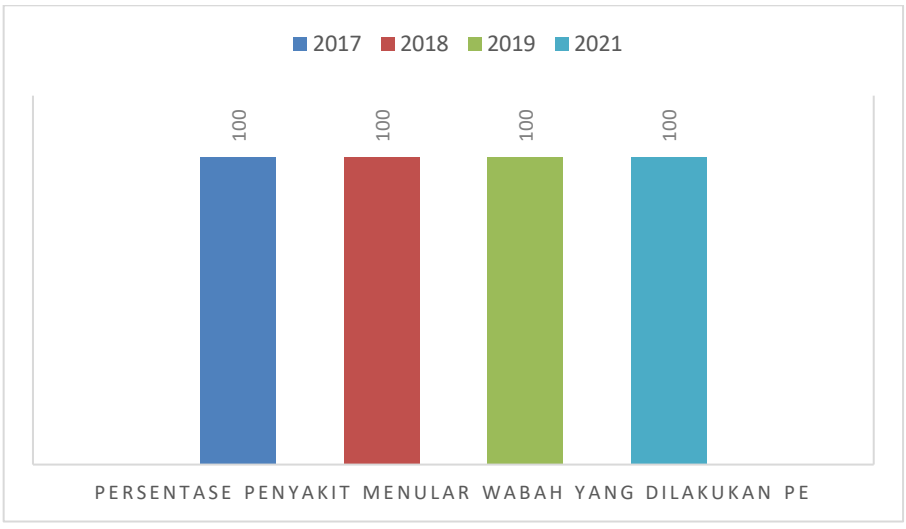


Gambar 2. 19 Persentase Balita Gizi Buruk yang Ditemukan dan Mendapat Perawatan
Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 20 Penyakit Menular Wabah yang Dilakukan PE

Elemen	2017	2018	2019	2021	Satuan
Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan PE	100	100	100	100	%
Jumlah penyakit menular wabah yang dilakukan PE	55	23	190	6,313	Penyakit
Jumlah penyakit menular wabah	55	23	190	6,313	Penyakit

Sumber: Dinas Kesehatan

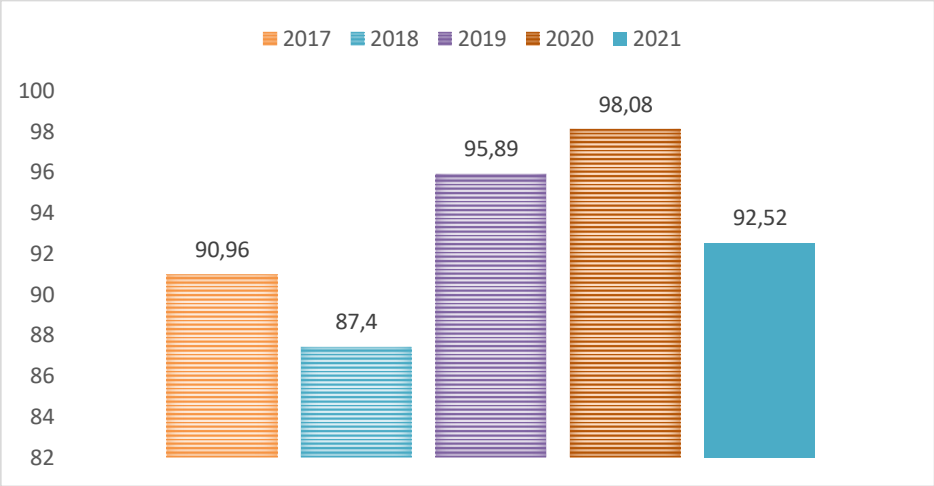


Gambar 2. 20 Persentase penyakit menular wabah yang dilakukan PE
Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 21 Desa UCI

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Desa UCI	90,96	87,40	95,89	98,08	92,52	%
Jumlah Desa UCI	332	319	350	358	334	Desa
Jumlah desa keseluruhan	365	365	365	365	365	Desa

Sumber: Dinas Kesehatan



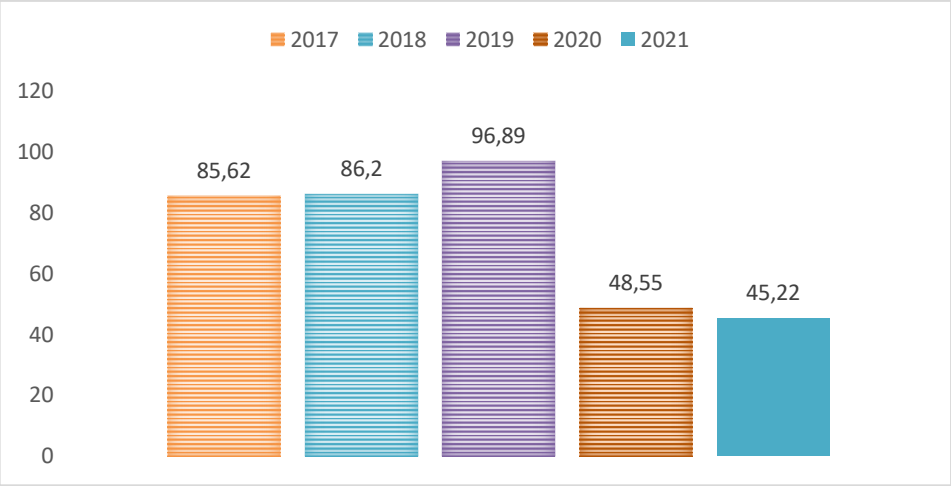
Gambar 2. 21 Persentase Desa UCI

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 22 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit TBC

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC	85,62	86,20	96,89	48,55	45,22	%
Jumlah penderita TBC yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	2.406	2.836	3.181	1.823	1.698	Orang
Jumlah perkiraan penderita TBC di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	2.781	3.290	3.283	3.755	3.755	Orang

Sumber: Dinas Kesehatan



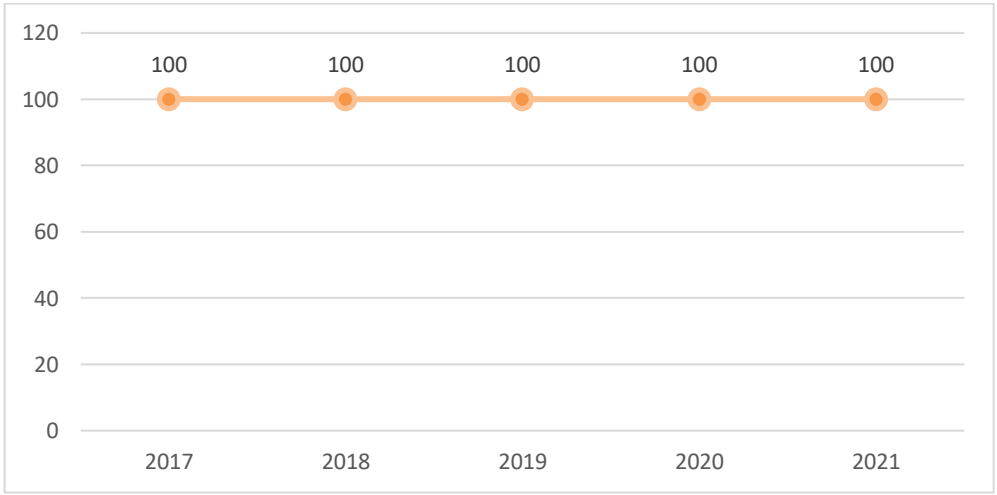
Gambar 2. 22 Persentase Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penyakit TBC

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 23 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penyakit DBD

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	100	100	100	100	100	%
Jumlah penderita DBD yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	191	191	190	119	163	Orang
Jumlah perkiraan penderita DBD di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	191	191	190	119	163	Orang

Sumber: Dinas Kesehatan



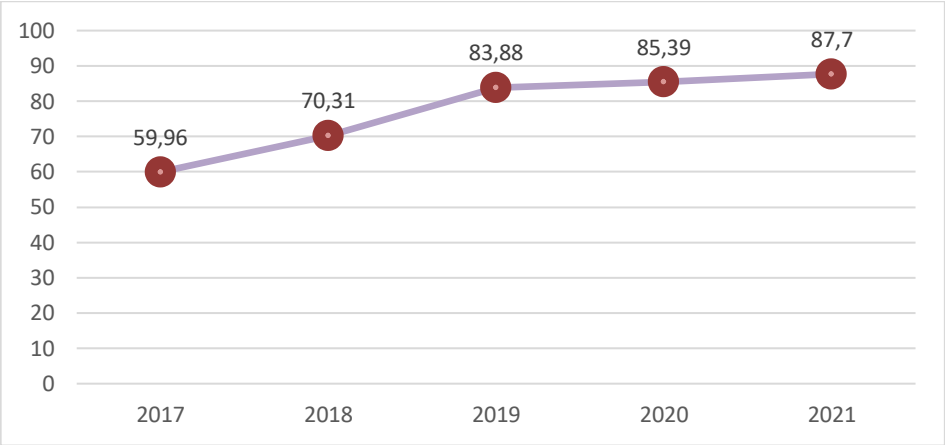
Gambar 2. 23Persentase cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 24 Rumah Tangga Sehat

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase rumah tangga sehat	59,96	70,31	83,88	85,39	87,70	%
Jumlah rumah tangga sehat di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu	45.609	68.097	384.931	392.622	409.123	Rumah
Jumlah rumah tangga yang disurvei pada kurun waktu yang sama	76.065	93.393	458.915	464.480	466.277	Rumah

Sumber: Dinas Kesehatan



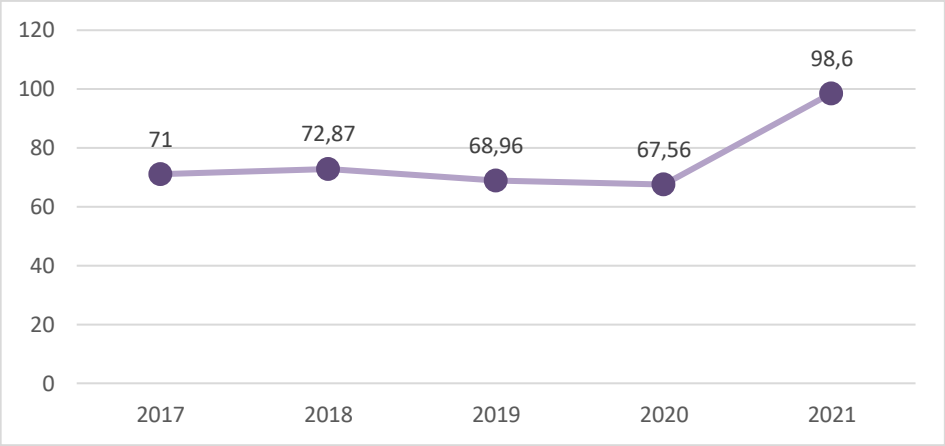
Gambar 2. 24 Persentase rumah tangga sehat

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 25 Kualitas Kesehatan Lingkungan yang Memenuhi Syarat

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	71,00	72,87	68,96	67,56	98,60	%
Jumlah kualitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat	212,99	218,60	206,87	202,69	360	Nilai
Jumlah kualitas kesehatan lingkungan keseluruhan	-	-	-	-	365	Nilai

Sumber: Dinas Kesehatan



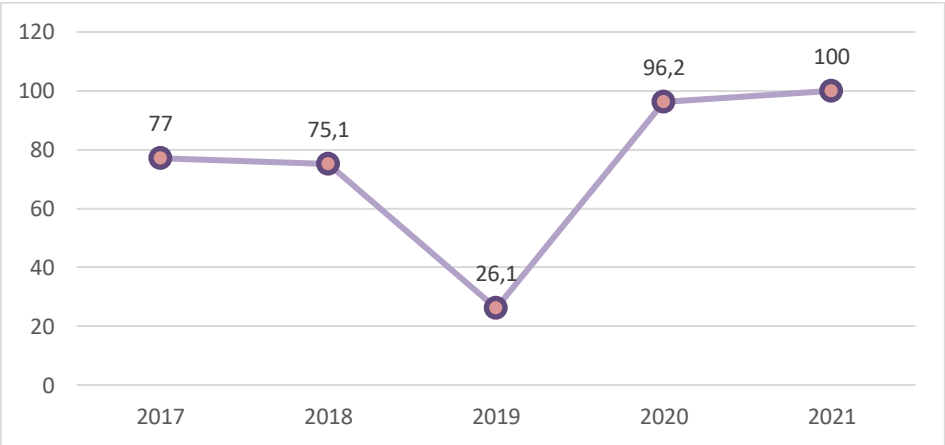
Gambar 2. 25 Persentase Kualitas Kesehatan Lingkungan Yang Memenuhi Syarat

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 26 Screening Usia Lanjut (> 65th) Sesuai Standart

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart	77,0	75,1	26,1	96,2	100	%
Jumlah pengunjung berusia >65th yang mendapat screening kesehatan minimal 1 kali satu tahun	112.803	114.729	41.582	143.277	183.349	Orang
Jumlah semua penduduk usia >65th yang ada di wilayah tertentu dalam satu tahun	146.513	152.813	159.396	148.978	183,349	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



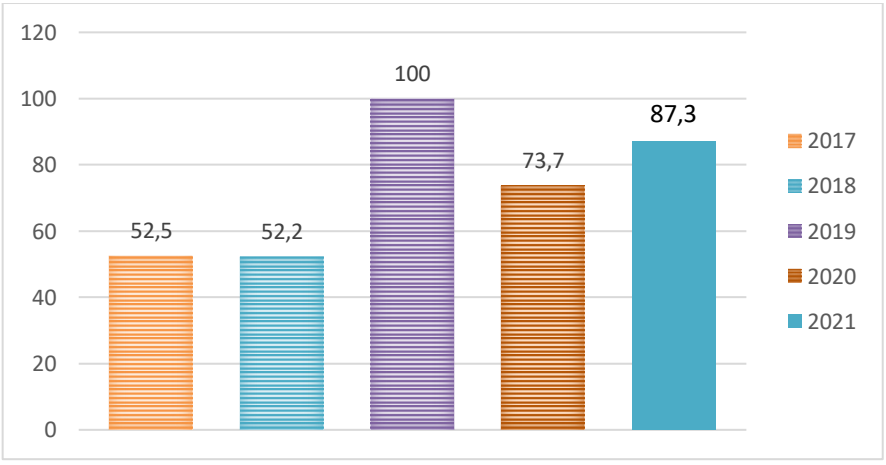
Gambar 2. 26 Persentase screening usia lanjut (> 65th) sesuai standart

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 27 Pemeriksaan Kesehatan Penduduk Usia > 15 Tahun yang Diperiksa dalam Satu Tahun

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pemeriksaan kesehatan Penduduk usia > 15 tahun yangg diperiksa dalam satu tahun	52,5	52,2	100	73,7	87,30	%
Jumlah Penduduk usia > 15 thn yang diperiksa dalam satu tahun	163.382	599.024	1.090.652	857.852	1.028,338	Orang
Jumlah penduduk usia >15 thn	311.168	1.148.008	1.090.502	1.164.066	1.178.472	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



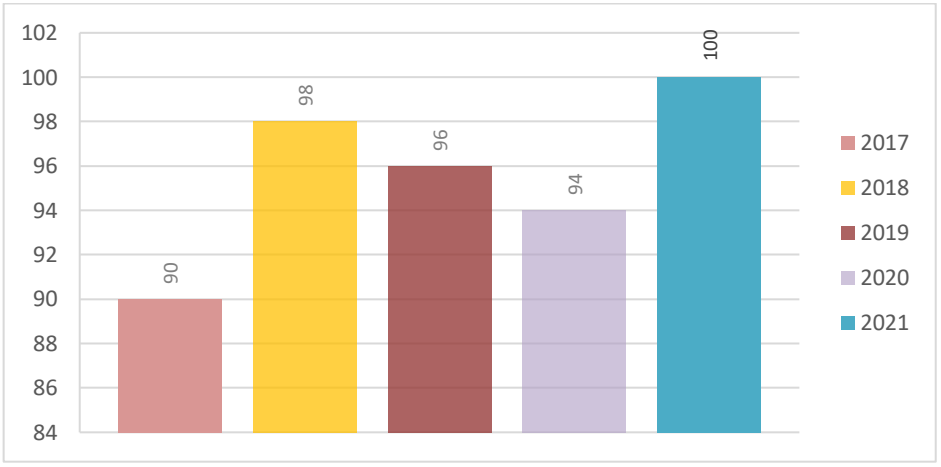
Gambar 2. 27 Persentase pemeriksaan kesehatan Penduduk usia > 15 tahun yang diperiksa dalam satu tahun

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 28 Ketersediaan Obat dan Perbekalan Obat

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat	90	98	96	94	100	%
Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan obat	7.122	7.753	7.623	14.843	33	Unit
Jumlah kebutuhan obat	7.920	7.920	7.920	15.840	33	Unit

Sumber: Dinas Kesehatan



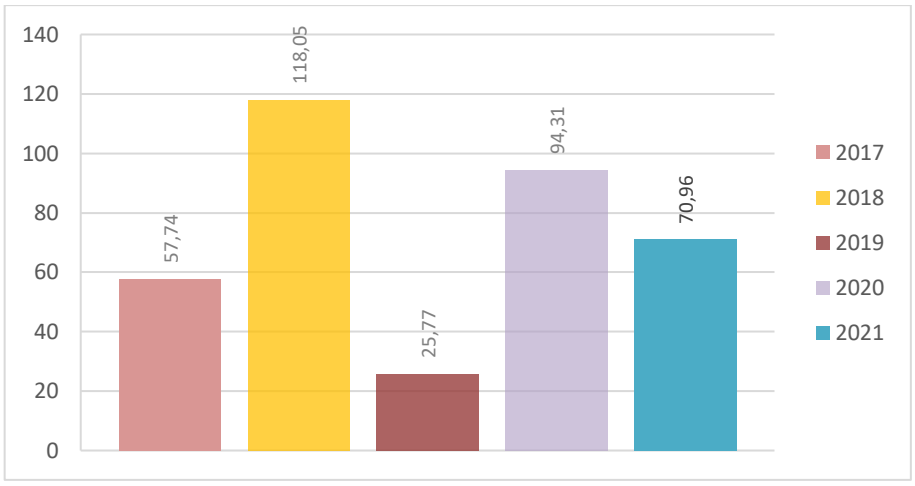
Gambar 2. 28 Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar	57,74	118,05	25,77	94,31	70,96	%
Jumlah penduduk yang mengunjungi tempat pelayanan kesehatan dasar	926.912	1.908.336	419.407	1.544.435	1.170.979	Orang
Jumlah penduduk di wilayah tersebut	1.605.307	1.616.578	1.627.396	1.637.682	1.650.256	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



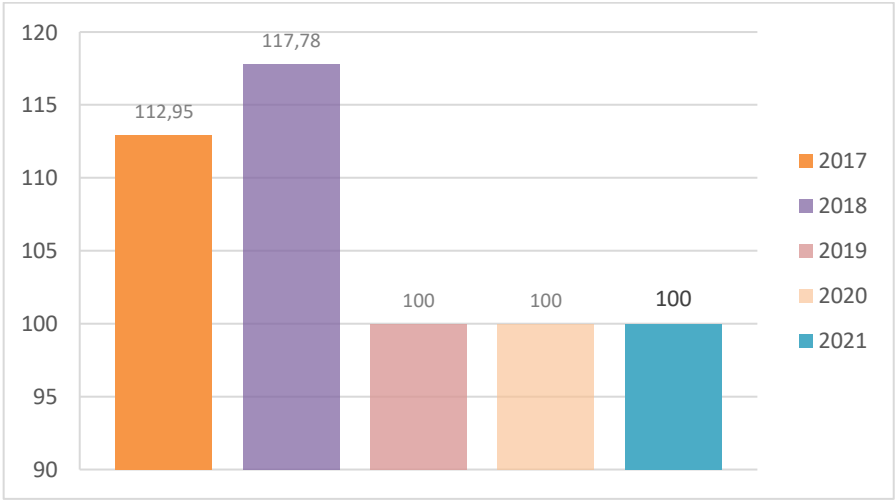
Gambar 2. 29 Persentase cakupan pelayanan kesehatan dasar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 30 Penduduk Miskin yang Dibiayai Jaminan Kesehatan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penduduk miskin dibiayai jaminan Kesehatan	112,95	84,91	100	100	100	%
Jumlah penduduk miskin yang dibiayai jaminan kesehatan	699.619	646.942	712.344	750.702	756.586	Orang
Jumlah penduduk miskin	619.403	761.959	712.344	750.702	854.796	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



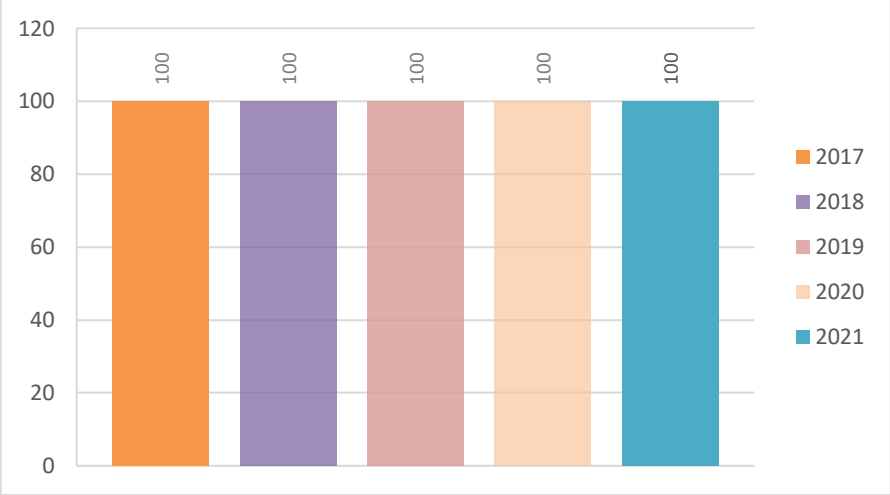
Gambar 2. 30 Persentase penduduk miskin dibiayai jaminan Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 31 Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Ketersediaan obat dan Perbekalan kesehatan	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Kesehatan



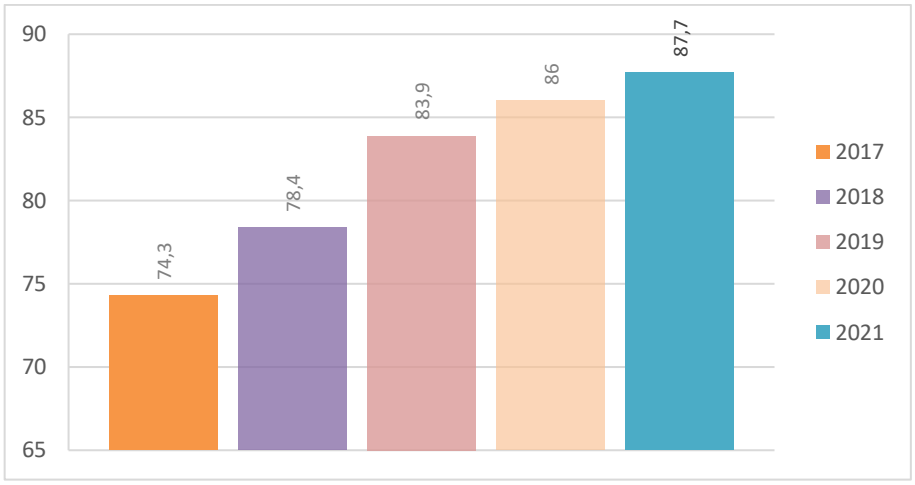
Gambar 2. 31 Persentase penduduk miskin dibiayai jaminan Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 32 Rumah Tangga / KK yang Menggunakan Jamban Sehat

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Rumah Tangga / KK yang menggunakan jamban sehat	74,3	78,4	83,9	86,0	87,70	%
Jumlah rumah tangga atau KK yang menggunakan jamban sehat pada waktu tertentu	326.370	350.217	384.931	399.248	409.123	Rumah
Jumlah rumah tangga atau KK pada waktu tertentu	439.338	446.587	458.915	464.489	466.277	Rumah

Sumber: Dinas Kesehatan



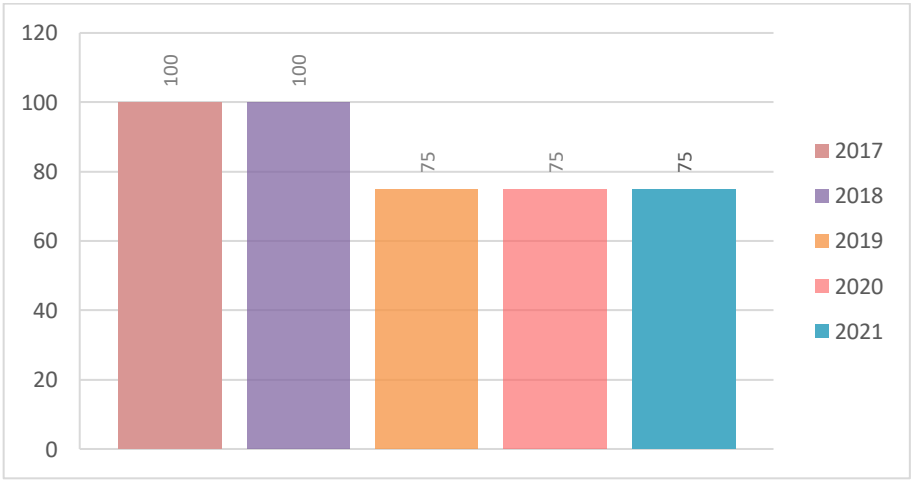
Gambar 2. 32 Persentase Rumah Tangga / KK yang menggunakan jamban sehat

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 33 Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart	100	100	75	75	75	%
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standart	106	106	79	79	79	Unit
Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang ada	106	106	106	106	106	Unit

Sumber: Dinas Kesehatan



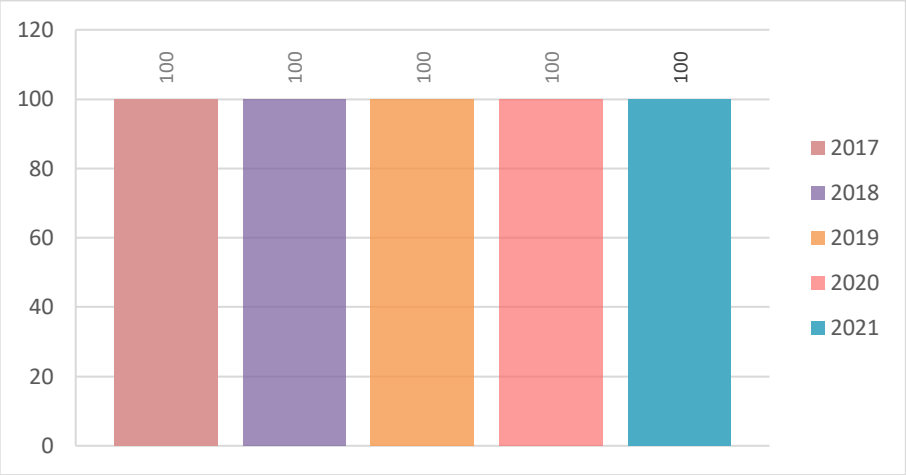
Gambar 2. 33 Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 34 Mutu pelayanan kesehatan sesuai standart

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase mutu pelayanan kesehatan sesuai standart	100	100	100	100	100	%
Jumlah mutu pelayanan kesehatan sesuai standart	12	12	12	12	12	Nilai
Jumlah mutu pelayanan kesehatan	12	12	12	12	12	Nilai

Sumber: Dinas Kesehatan



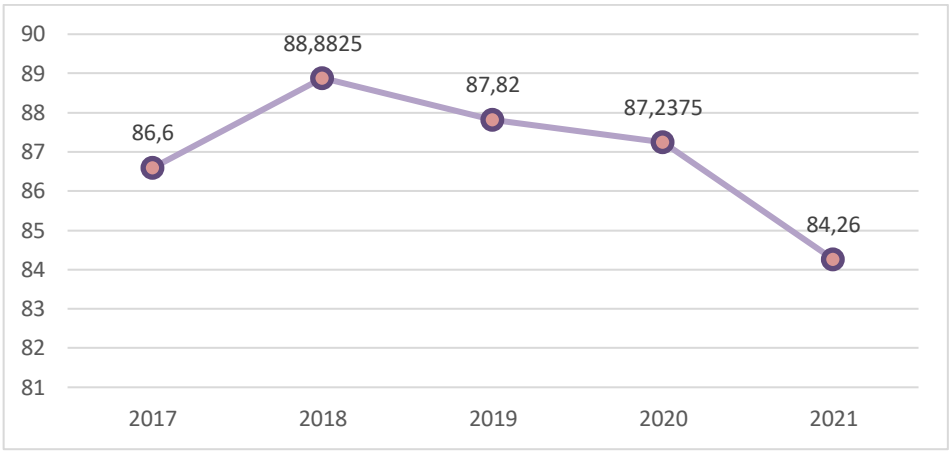
Gambar 2. 34 Persentase sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan sesuai standart

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 35 Nilai Hasil Kinerja Puskesmas

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rata rata nilai hasil kinerja puskesmas	86,6	88,88	87,82	87,24	84,26	%
Jumlah nilai hasil kinerja puskesmas	346	355,53	351,28	348,95	2.865	Nilai
Jumlah puskesmas	33	33	33	33	33	Nilai

Sumber: Dinas Kesehatan



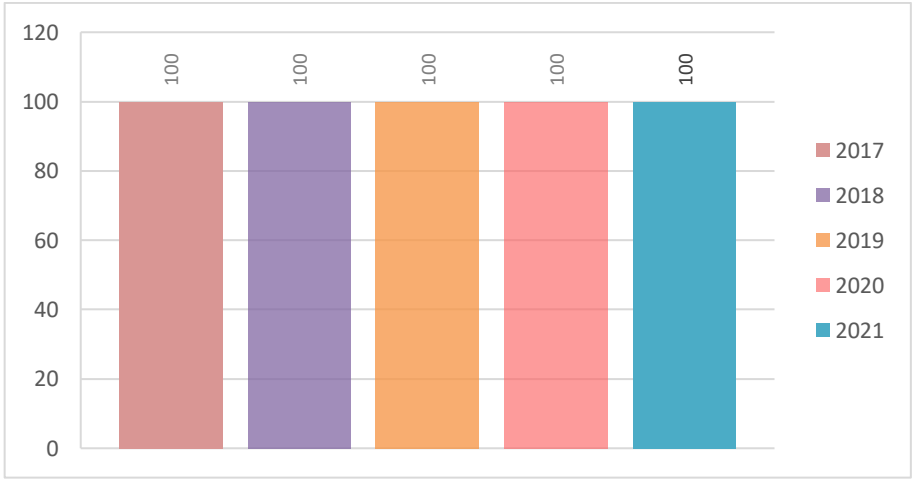
Gambar 2. 35 Rata rata Nilai Hasil Kinerja Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 36 Persentase sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Kesehatan



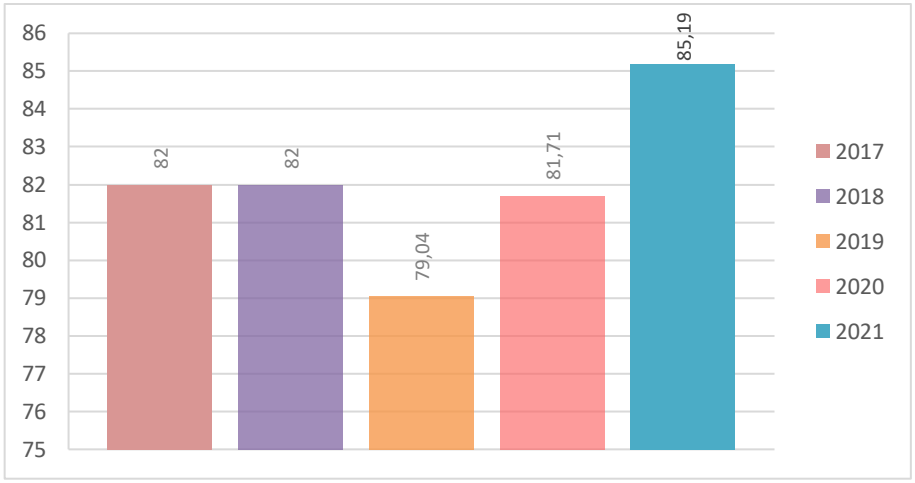
Gambar 2. 36 Persentase sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 37 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Bangil

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Bangil	82	82	79,04	81,71	85,19	Indeks
Total persepsi per unsur	656	656	632,29	653,68	3,41	Nilai
Total unsur	8	8	8	8	9	Nilai

Sumber: Dinas Kesehatan



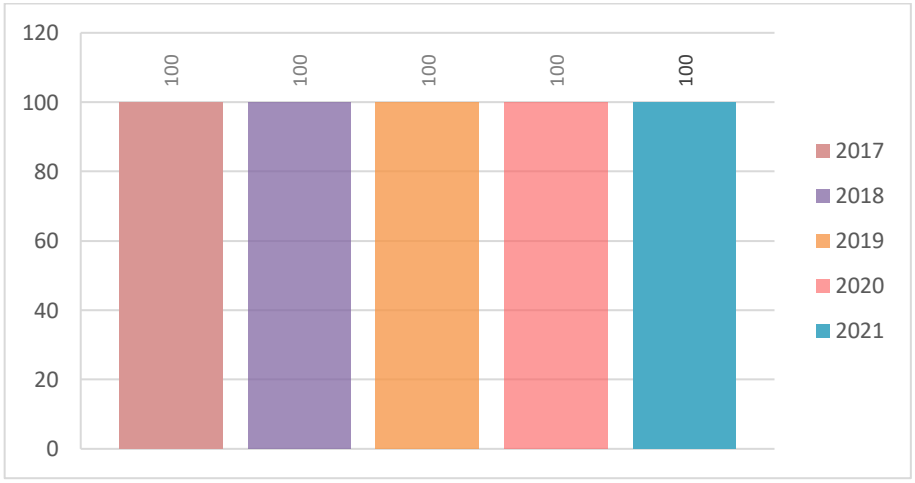
Gambar 2. 37 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Bangil

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 38 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersusun Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase dokumen perencanaan dan anggaran tersusun sesuai standar	100	100	100	100	100	%
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun sesuai standart	7	7	7	7	7	Dokumen
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	7	7	7	7	7	Dokumen

Sumber: Dinas Kesehatan



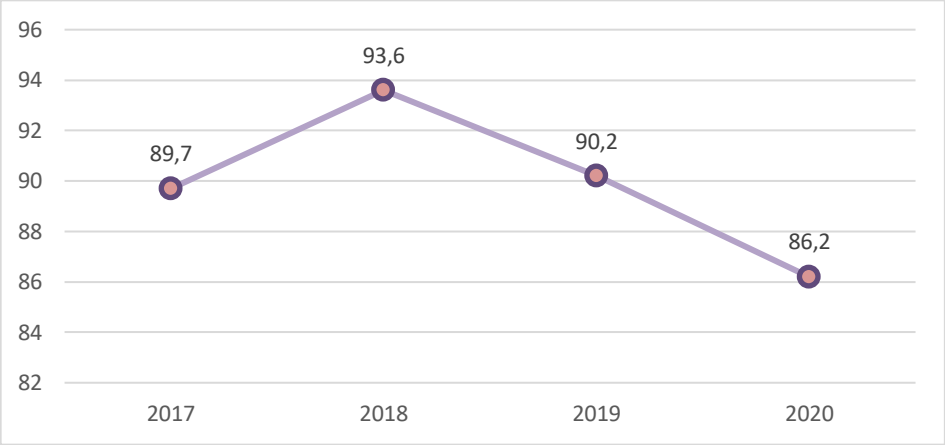
Gambar 2. 38 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tersusun Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 39 Hasil PKP UKP

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase hasil PKP UKP	89,7	93,6	90,2	86,2	%
Jumlah hasil PKP UKP	215,2	224,6	216,55	206,88	Kegiatan
Jumlah hasil PKP	240	240	240	240	Kegiatan

Sumber: Dinas Kesehatan



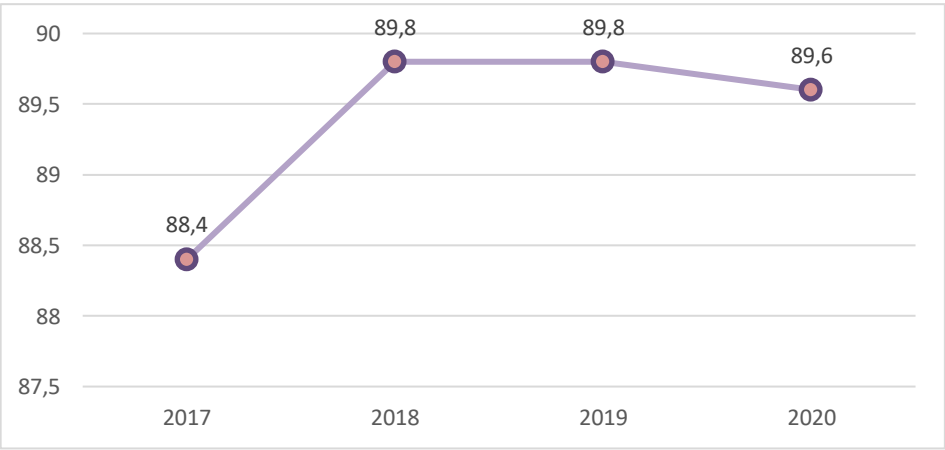
Gambar 2. 39 Persentase Hasil PKP UKP

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 40 Hasil PKP UKM

Hasil PKP UKM	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase hasil PKP UKM	88,4	89,8	89,8	89,6	%
Jumlah hasil PKP UKM	1397,19	1418,84	1418,05	1414,89	Kegiatan
Jumlah hasil PKP	1580	1580	1580	1580	Kegiatan

Sumber: Dinas Kesehatan



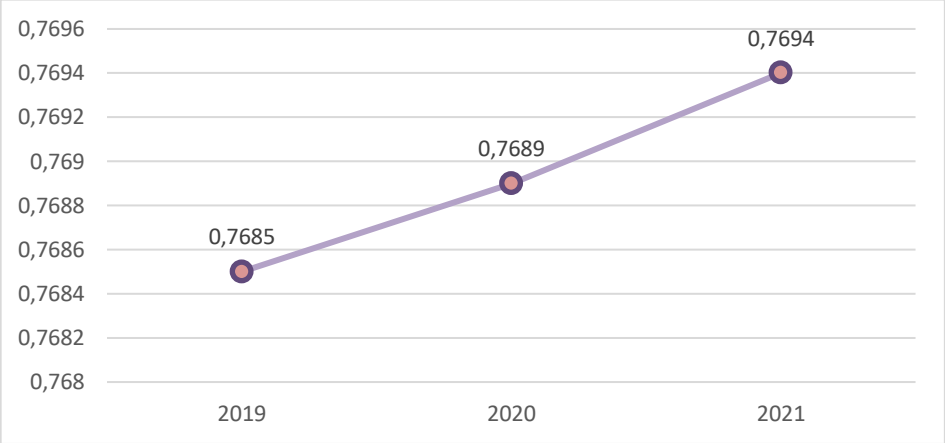
Gambar 2. 40 Persentase hasil PKP UKM

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 41 Indeks Kesehatan

	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kesehatan	0,7685	0,7689	0,7694	%

Sumber: Dinas Kesehatan



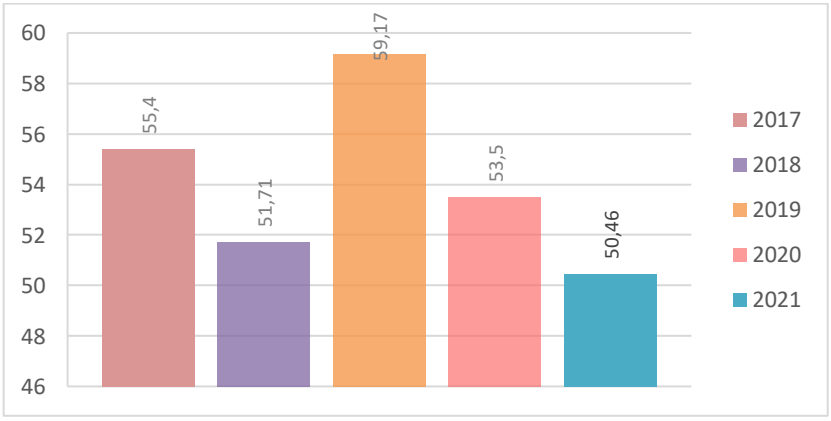
Gambar 2. 41 Indeks Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 42 Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	55,40	51,71	59,17	53,50	50,46	%
Jumlah daya tampung rumah saki rujukan	779	843	955	1.061	1.122	bed
Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	1.605.307	1.616.578	1.627.396	1.637.682	1.650.256	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



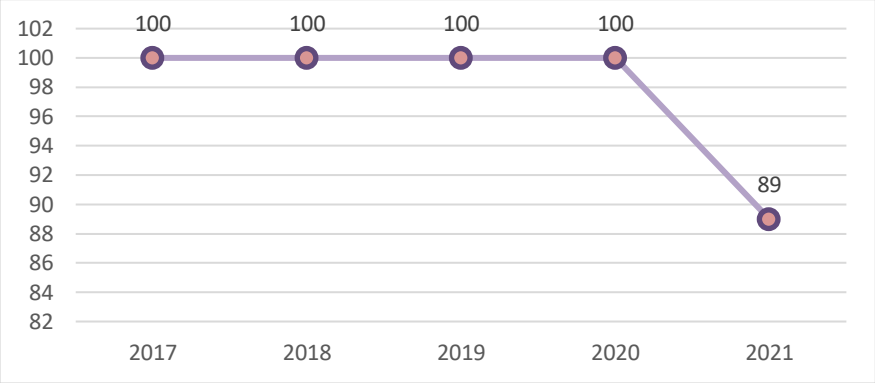
Gambar 2. 42 Persentase Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 43 RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	100	100	100	89	%
Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	8	8	8	8	8	RS
Jumlah RS di Kabupaten/Kota	8	8	8	8	9	RS

Sumber: Dinas Kesehatan

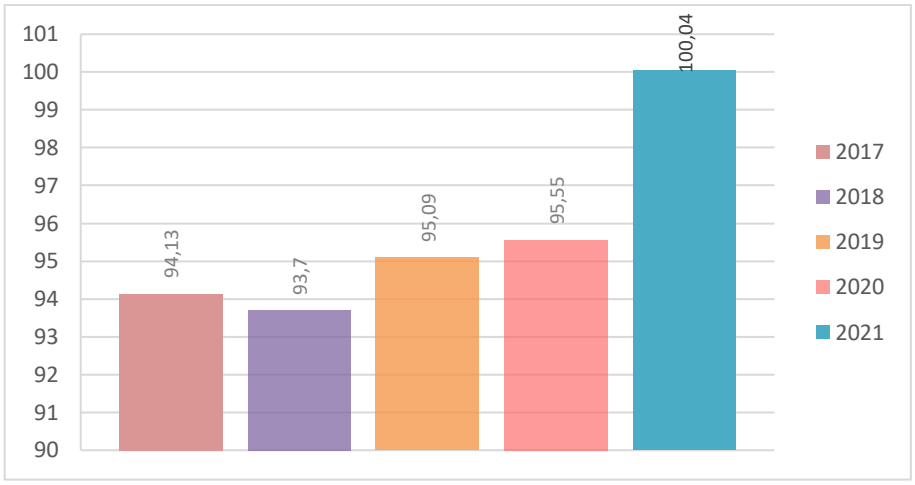


Gambar 2. 43 Persentase Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi
Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 44 Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	94,13	93,70	95,09	95,55	100,04	%
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	24.\911	24.671	24.911	24.911	25.134	Jiwa
Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota	26.464	26.329	26.197	26.071	25.123	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



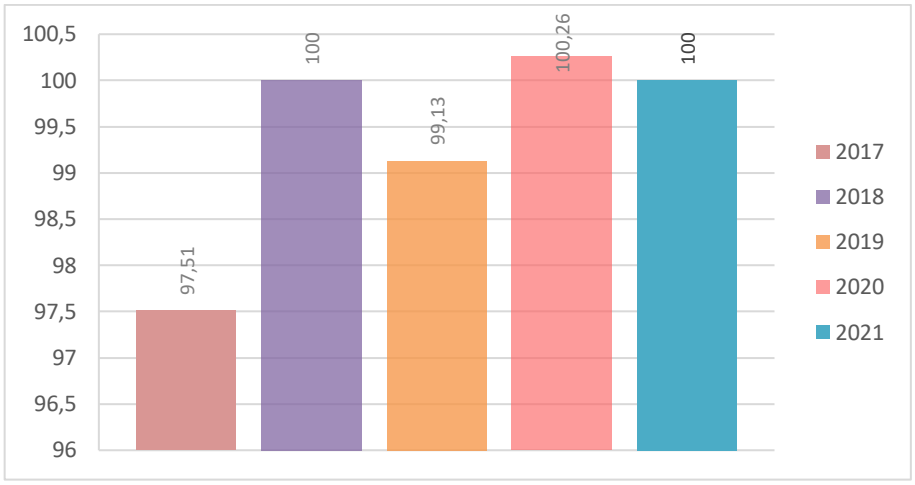
Gambar 2. 44 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 45 Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Persalinan Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu persalinan sesuai standar	97,51	100	99,13	100,26	100	%
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu persalinan sesuai standar	24.632	25.132	24.789	24.951	23.967	Jiwa
Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota	25.261	25.132	25.006	24.887	23.981	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



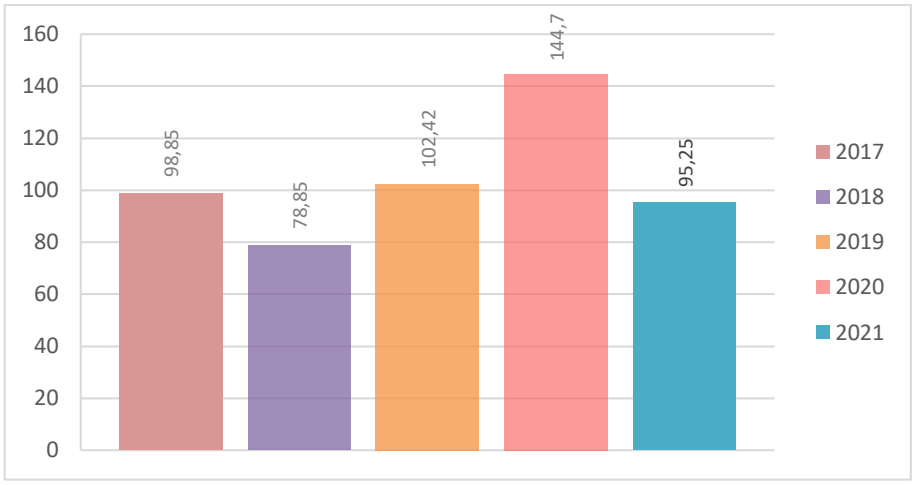
Gambar 2. 45 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Persalinan Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 46 Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	98,85	78,85	102,42	144,70	95,25	%
Jumlah bayi baru lahir yang dapat layanan kesehatan sesuai standar	24.638	18.769	24.392	36.510	23.045	Jiwa
Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota	24.924	23.804	23.815	25.232	24.195	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



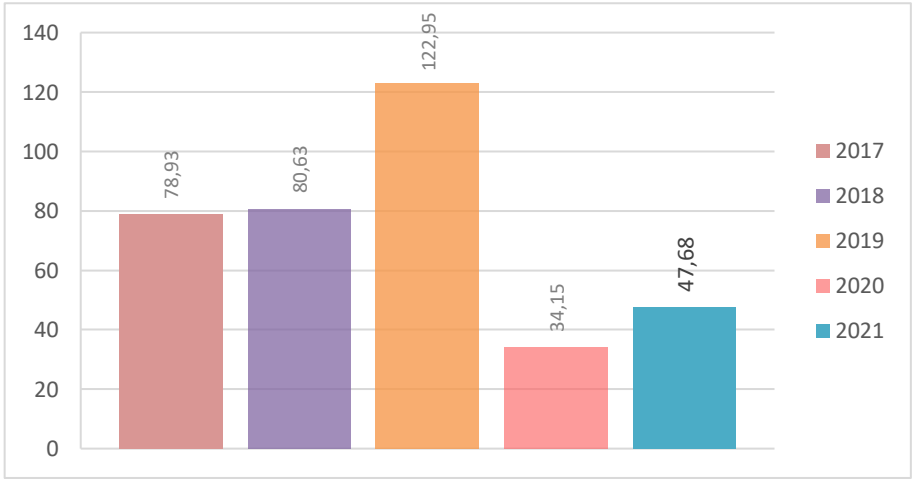
Gambar 2. 46 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 47 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	78,93	80,63	122,95	34,15	47,68	%
Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	96.117	96.117	145.688	40.235	56.448	Jiwa
Jumlah balita di Kabupaten/Kota	121.781	119.214	118.492	117.832	118.395	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



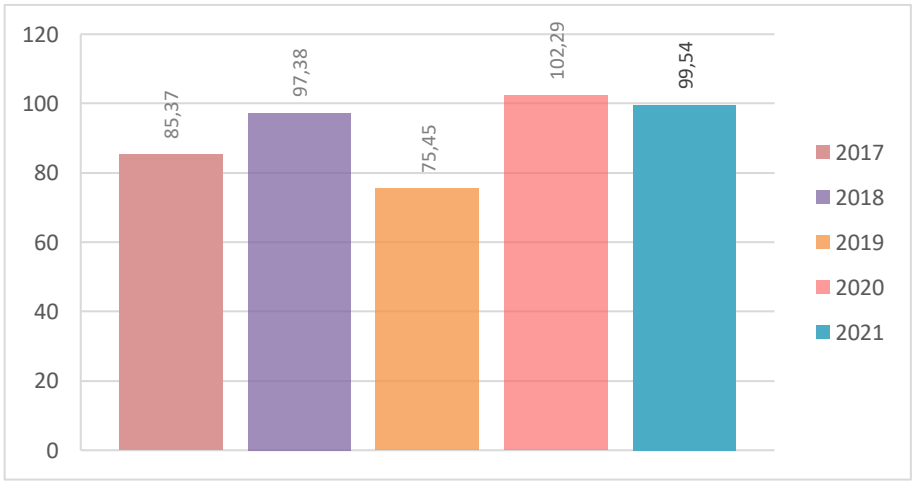
Gambar 2. 47 Persentase Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 48 Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8,37	97,38	75,45	102,29	99,54	%
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	22.662	26.320	177.131	192.281	217.563	Jiwa
Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota	26.546	27.029	234.779	187.980	218.566	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



Gambar 2. 48 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

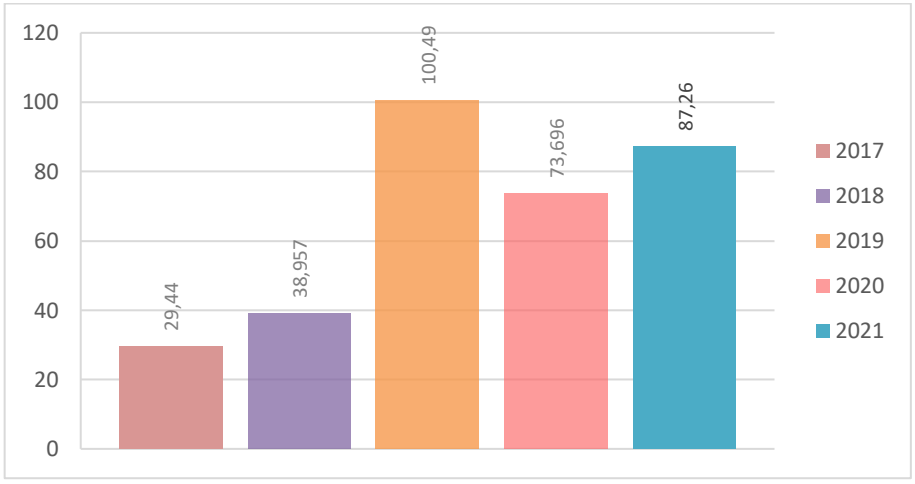
Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 49 Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	29,44	38,95	100,49	73,69	87,26	%

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	335.346	447.229	1.095.885	857.872	1.028.338	Jiwa
Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Di Kabupaten/Kota	1.138.930	1.148.008	1.090.503	1.164.066	1.178.472	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



Gambar 2. 49 Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

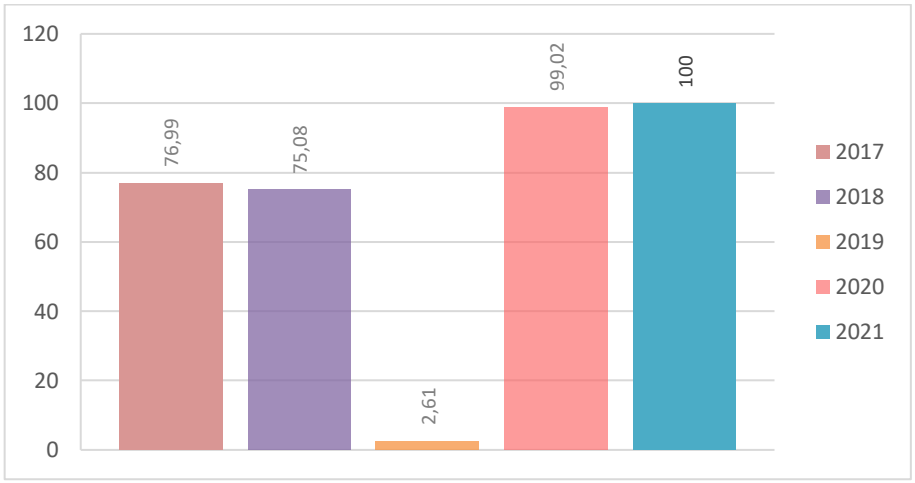
Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 50 Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76,99	75,08	2,61	99,02	100	%
Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	112.803	114.729	41.582	164.508	183.349	Jiwa
Jumlah warga negara usia 60	146.513	152.813	159.396	166.139	183.349	Jiwa

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
tahun di Kabupaten/Kota						

Sumber: Dinas Kesehatan



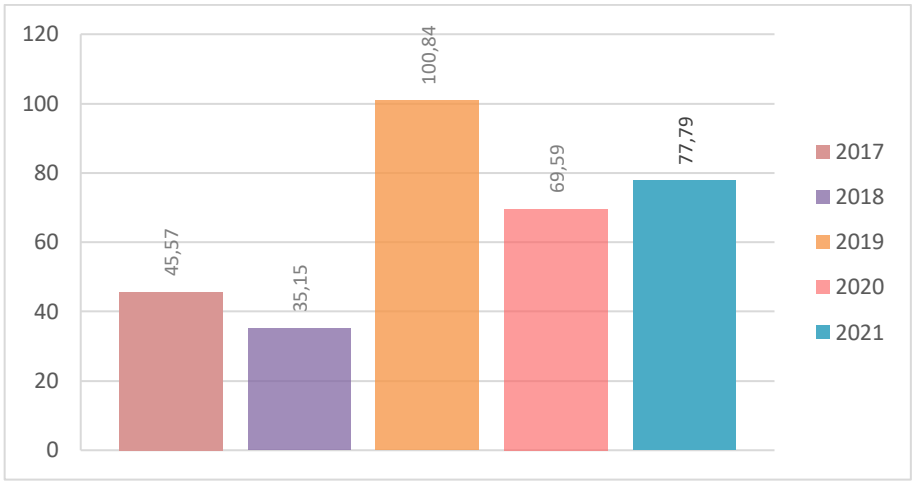
Gambar 2. 50 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 51 Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45,57	35,15	100,84	69,59	77,79	%
Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	210.560	210.560	398.087	293.260	331.857	Jiwa
Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota	462.029	599.024	394.762	421.390	426.605	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



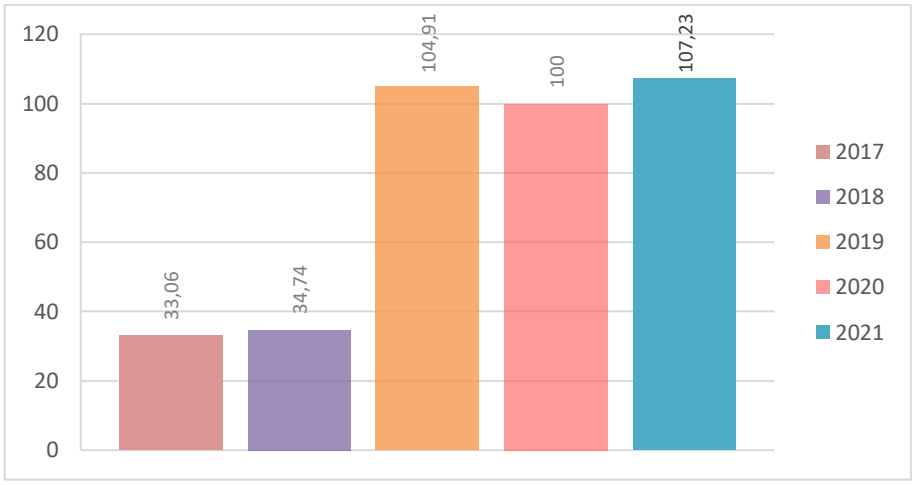
Gambar 2. 51 Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 52 Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33,06	34,74	104,91	100	107,23	%
Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	36.617	36.617	27.336	5.586	30.326	Jiwa
Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	110.766	105.389	26.057	5.586	28.282	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



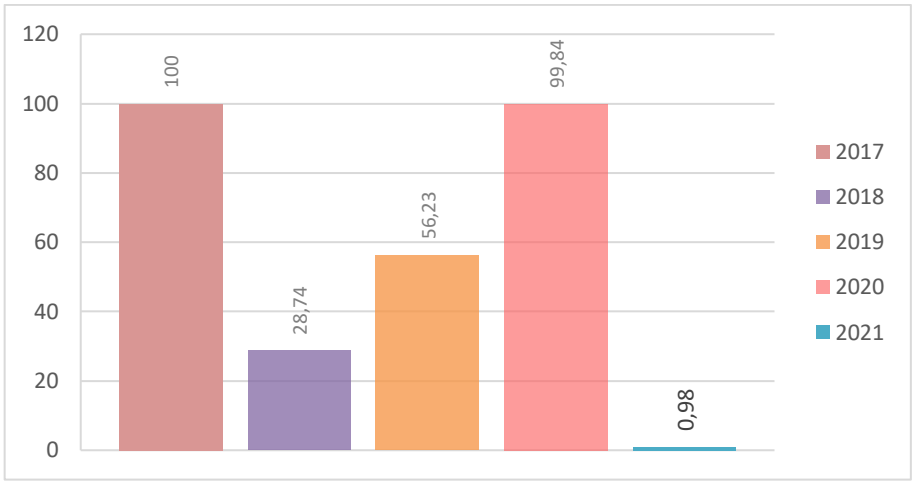
Gambar 2. 52 Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 53 ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	28,74	56,23	99,84	0,98	%
Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	3.039	3.108	3.079	Jiwa
Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	100	348	5.405	3.113	3.136	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



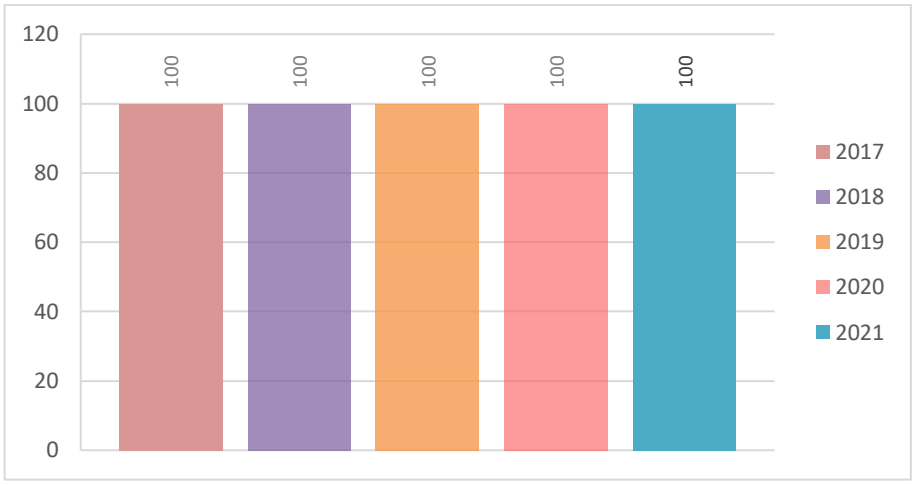
Gambar 2. 53 Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 54 Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	%
Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	2.393	2.735	3.181	2.655	12.734	Jiwa
Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	2.393	2.735	3.181	2.655	12.734	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



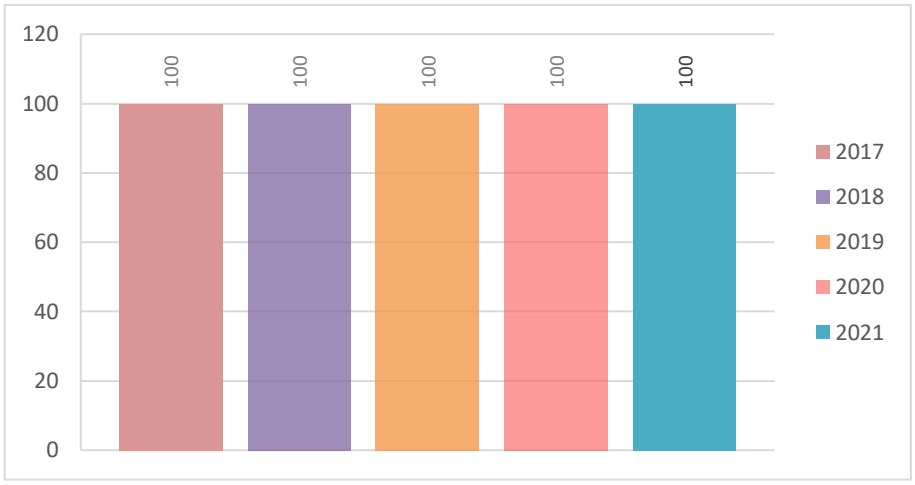
Gambar 2. 54 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 55 Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	%
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteki dini HIV sesuai standar	150	423	423	267	267	Jiwa
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	150	423	423	267	267	Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan



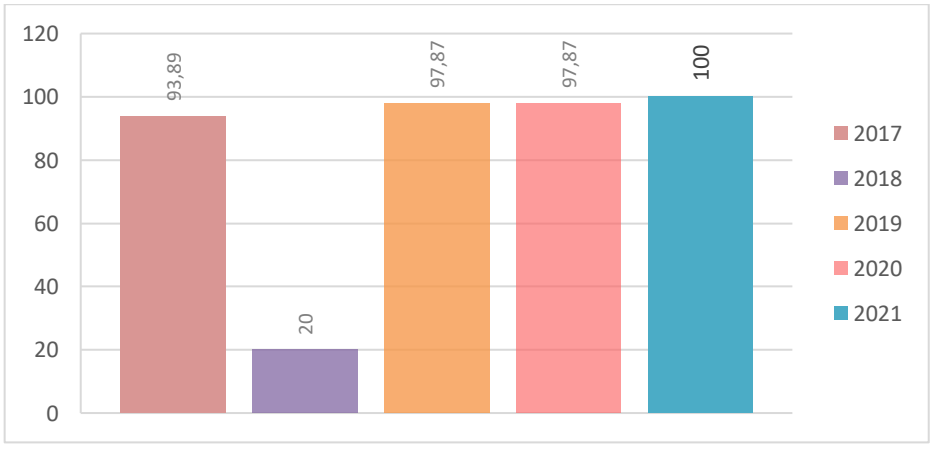
Gambar 2. 55 Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 56 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Standar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	93,89	20,00	97,87	97,87	100	%
Jumlah penanganan komplikasi kebidanan	4.995	1.053	5.128	5.128	5.021	Orang
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	5.320	5.266	5.239	5.239	5.021	Orang

Sumber: Dinas Kesehatan



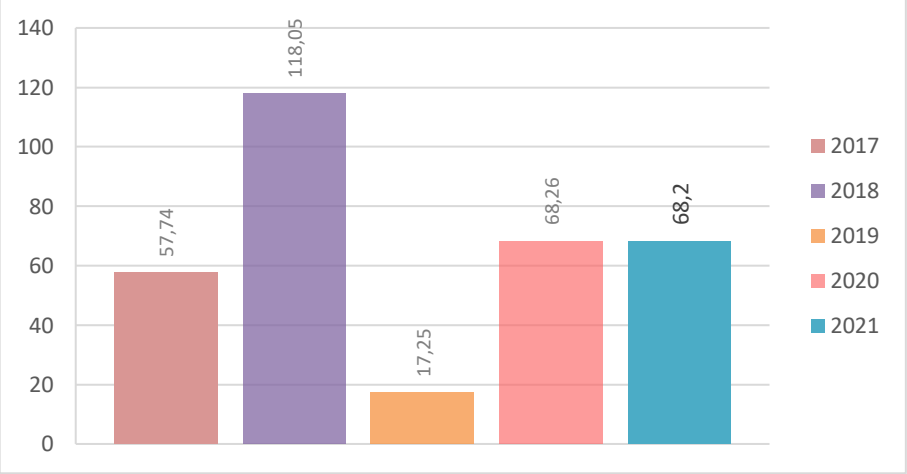
Gambar 2. 56 Persentase Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Standar

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 57 Penduduk Yang Memanfaatkan Puskesmas

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	57,74	118,05	17,25	68,26	68,20	%
Jumlah Penduduk yang memanfaatkan puskesmas	926.912	1.908.336	417.862	1.117.946	1.125.417	Orang
Jumlah keseluruhan penduduk	1.605.307	1.616.578	2.422.850	1.637.682	1.650.256	Orang

Sumber: Dinas Kesehatan



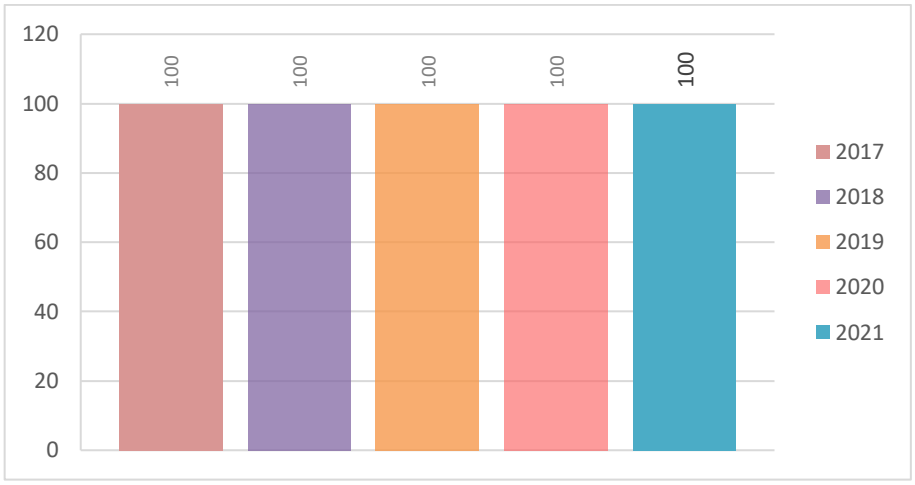
Gambar 2. 57 Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 58 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Kesehatan

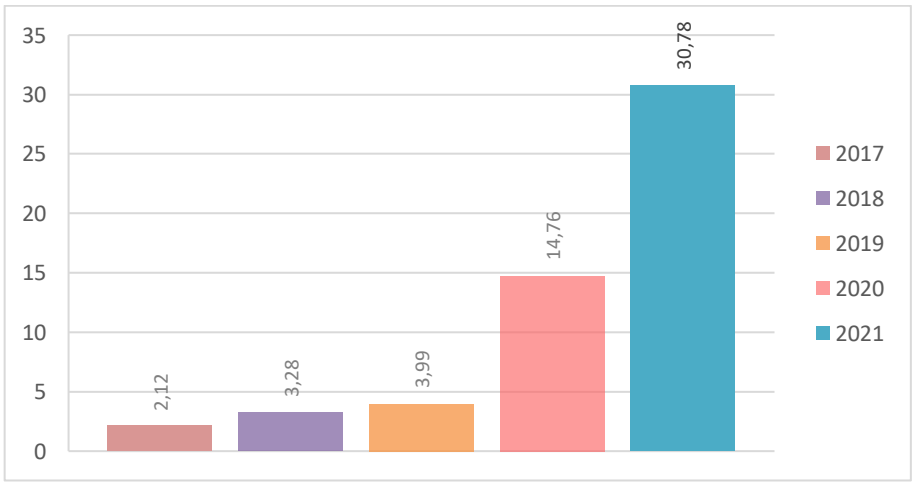


Gambar 2. 58 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 59 Rasio Dokter persatuan penduduk

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rasio Dokter persatuan penduduk	2,12	3,28	3,99	14,76	30,78	Rasio

Sumber: Dinas Kesehatan



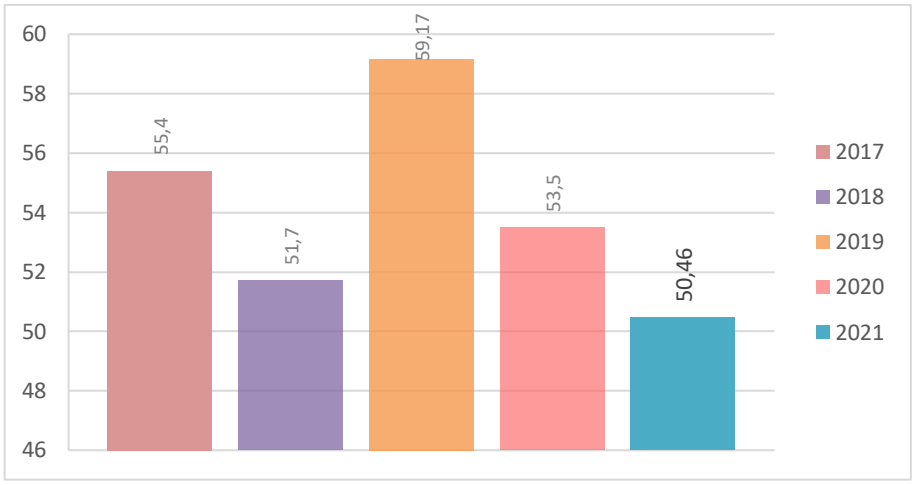
Gambar 2. 59 Rasio Dokter persatuan penduduk

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 60 Bed Accupancy Rate (BOR)

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bed Accupancy Rate (BOR)	55,4	51,7	59,17	53,50	50,46	%

Sumber: Dinas Kesehatan



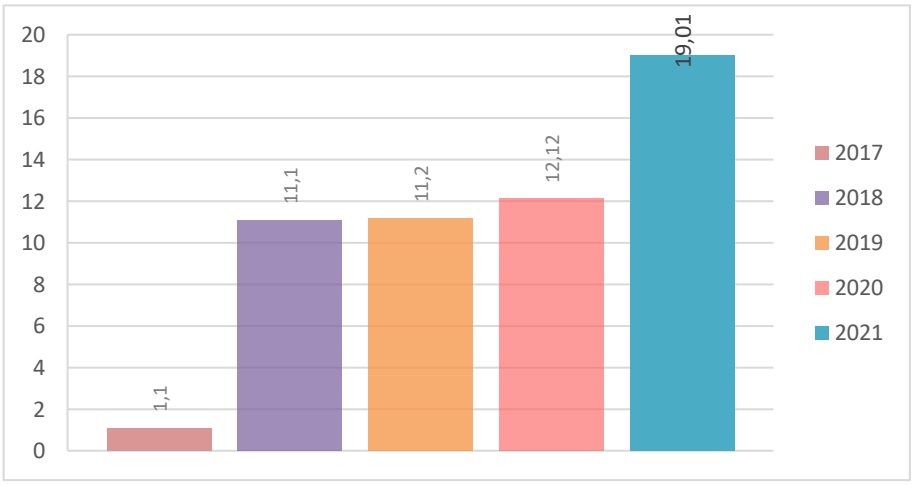
Gambar 2. 60 Bed Accupancy Rate (BOR)

Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 61 Nett Dead Rate (NDR)

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Nett Dead Rate (NDR)	1.1	11,1	11,2	12,12	19.01	%

Sumber: Dinas Kesehatan



Gambar 2. 61 Nett Dead Rate (NDR)

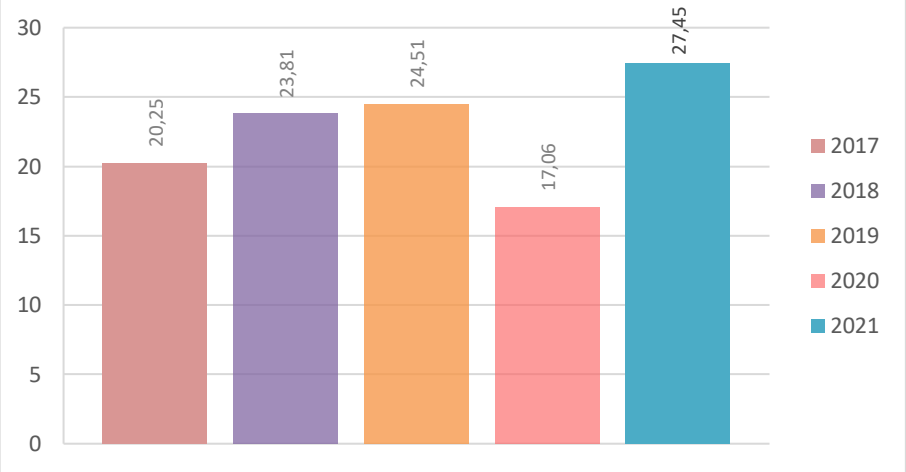
Sumber: Dinas Kesehatan

Tabel 2. 62 Penduduk Yang Memanfaatkan Rumah Sakit

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penduduk yang memanfaatkan Rumah Sakit	20,25	23,81	24,51	17,06	27,45	%

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Penduduk yang memanfaatkan rumah sakit	325.085	384.902	398.846	416.199	453.020	Orang
Jumlah keseluruhan penduduk	1.605.307	1.616.578	1.627.396	2.438.909	1.650.256	Orang

Sumber: Dinas Kesehatan



Gambar 2. 62 Persentase Penduduk Yang Memanfaatkan Rumah Sakit

Sumber: Dinas Kesehatan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DESKRIPSI

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tingkat PAUD, diperoleh nilai APK sebesar 99,63% pada tahun 2017. Kemudian nilai tersebut mengalami perubahan secara fluktuatif hingga mencapai 91,74% pada tahun 2020. Hal tersebut juga terjadi pada nilai APK di tingkat SD/MI dan tingkat SMP/Mts. Nilai APK yang mendekati 100% menandakan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Nilai APM yang diperoleh tingkat SD/MI tahun 2017 sebesar 90,27%. Kemudian nilai tersebut mengalami perubahan secara fluktuatif hingga mencapai 94,24% pada tahun 2020. Hal tersebut juga terjadi pada nilai APM di tingkat SMP/Mts. Nilai APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani disebut dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Nilai RLS Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 6,82 tahun. Nilai tersebut mengalami peningkatan

hingga mencapai 8,02 tahun pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah, yang mana jika semakin tinggi angka lamanya bersekolah, maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk.

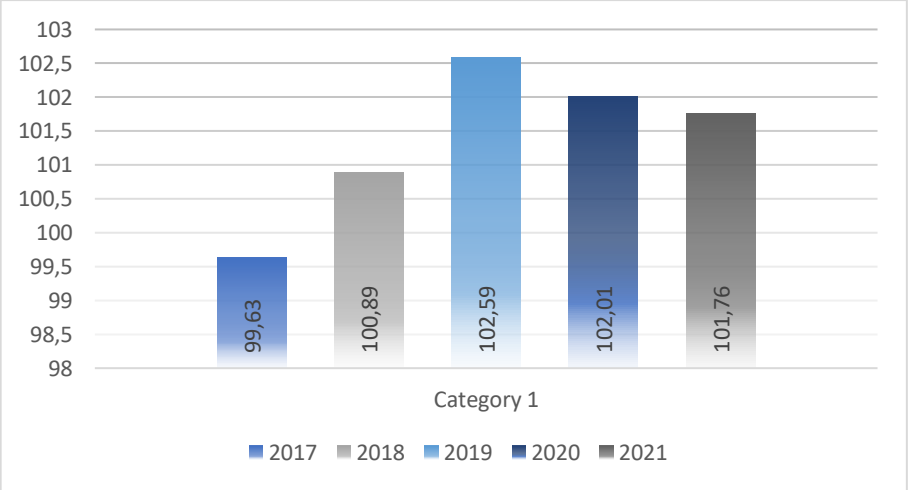
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah merupakan perbandingan antara jumlah sekolah tingkat tertentu dengan jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Pada tingkat pendidikan dasar rasio yang diperoleh di tahun 2021 adalah 1:215, artinya rata-rata daya tampung per sekolah di Kabupaten Pasuruan sebesar 215 siswa. Sedangkan pada tingkat SMP di tahun 2021 diperoleh rasio sebesar 1:434, yang artinya rata-rata daya tampung per sekolah di Kabupaten Pasuruan sebesar 434 siswa.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai harapan lama sekolah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 11,81 tahun. Nilai tersebut mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai nilai 12,41 di tahun 2020. Nilai harapan lama sekolah menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Tabel 3. 1 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI	99,63	100,89	102,59	102,01	101,76	%
Jumlah penduduk 7-12 th	154.418	155.054	152.591	155.006	155.277	Jiwa
Jumlah Siswa SD	157.808	156.566	156.545	158.263	158.006	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



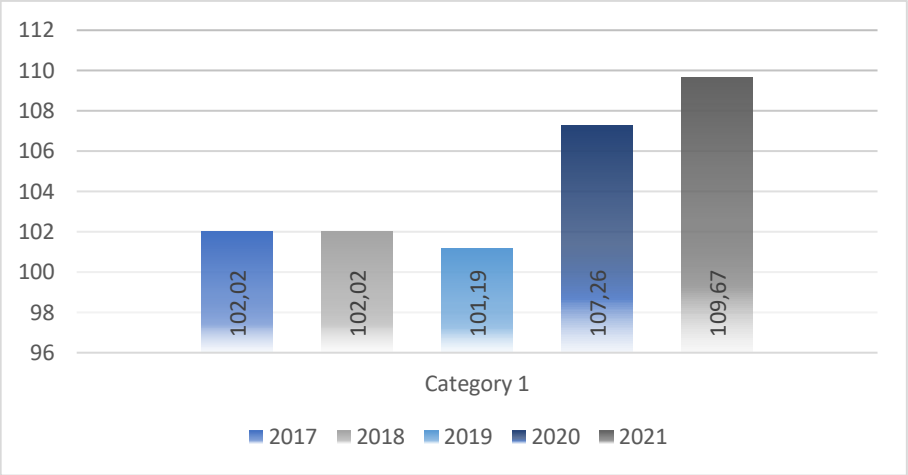
Gambar 3. 1 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 2 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs	102,02	102,02	101,19	107,26	109,67	%
Jumlah penduduk 13-15 th	70.156	69.950	67.908	68.161	69.077	Jiwa
Jumlah Siswa SMP/MTs	72.834	71.364	68.719	73.110	75.758	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

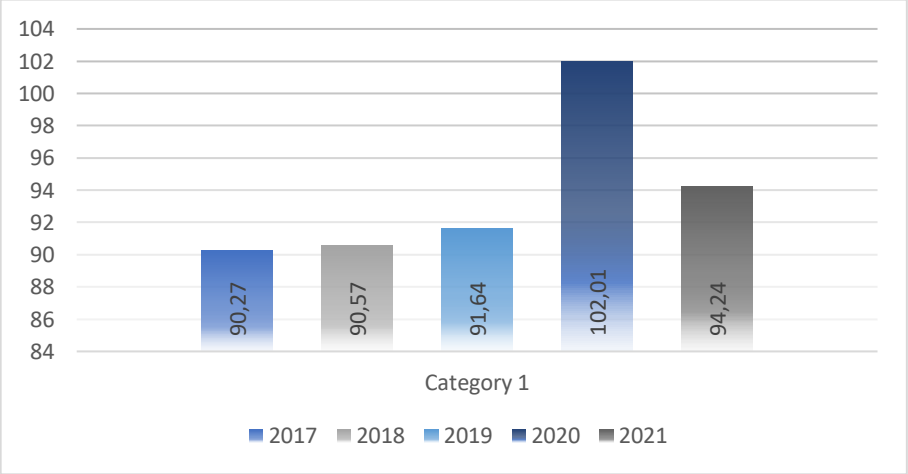


Gambar 3. 2 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 3 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI	90,27	90,57	91,64	102,01	94,24	%
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	154.418	155.054	152.591	155.006	155,277	Jiwa
Jumlah siswa SD usia 7-12 th	139.396	140.437	139.839	145.404	146,335	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

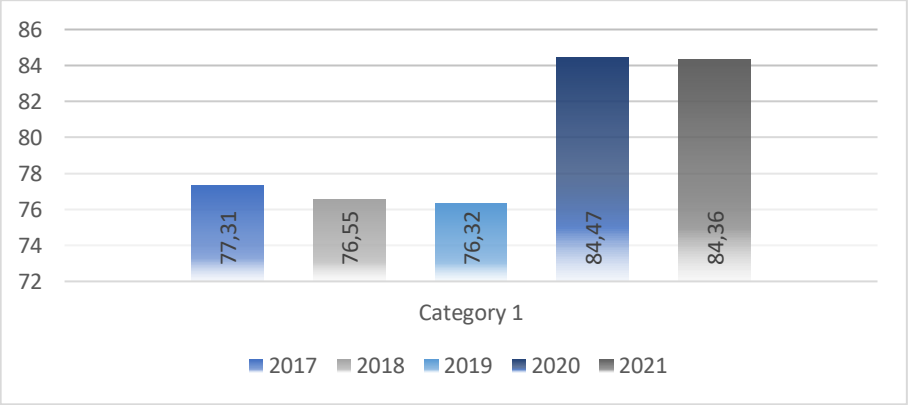


Gambar 3. 3 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 4 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs	77,31	76,55	76,32	84,47	84,36	%
Jumlah penduduk 13-15 tahun	70.156	69.950	67.908	68.161	69.077	Jiwa
Jumlah siswa SMP 13-15 tahun	54.240	53.548	51.826	57.574	58.272	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

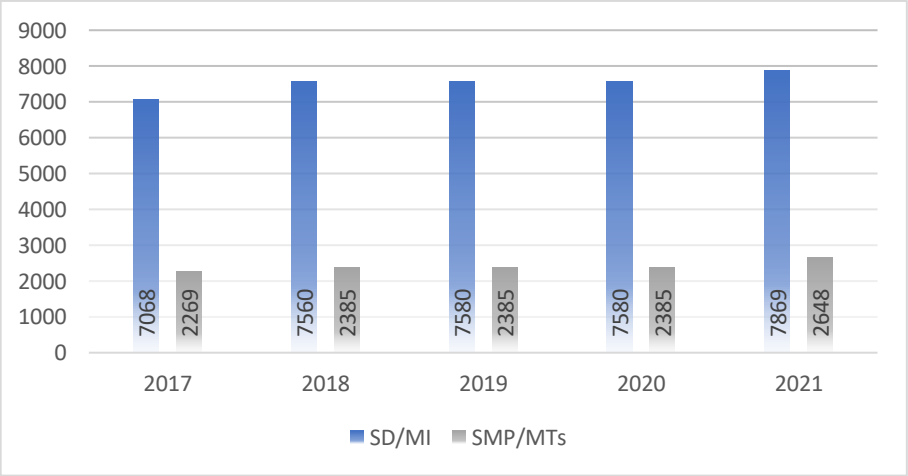


Gambar 3. 4 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs

Tabel 3. 5 Jumlah Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs

Jumlah Ruang Kelas	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
SD/MI	7.068	7.560	7.580	7.580	7.869	Ruang Kelas
SMP/MTs	2.269	2.385	2.385	2.385	2.648	Ruang Kelas

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

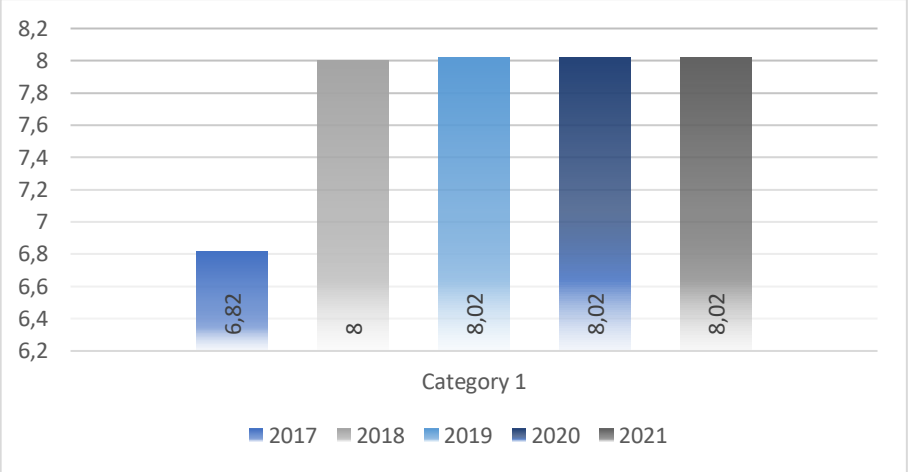


Gambar 3. 5 Jumlah Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs

Tabel 3. 6 Rata - Rata Lama Sekolah

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rata - Rata Lama Sekolah	6,82	8	8,02	8,02	8,02	Tahun

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 6 Rata - Rata Lama Sekolah

Tabel 3. 7 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	1 : 216	1 : 217	1 : 213	1 : 215	1 : 215	
Jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar	714	716	718	720	723	Sekolah
jumlah penduduk usia pendidikan dasar	154.418	155.054	152.591	155.006	155.277	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 8 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah SMP

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP	1 : 474	1 : 460	1 : 435	1 : 434	1 : 434	
Jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah	148	152	156	157	159	Sekolah
Jumlah penduduk usia pendidikan menengah	70.156	69.950	67.908	68.161	69.077	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 9 Rasio Guru Per Murid Jenjang SD/MI

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rasio Guru Per Murid Jenjang SD/MI	1 : 17	1 : 17	1 : 19	1 : 19	1 : 18	
Jumlah Murid SD/MI	123.265	122.534	121.840	119.783	118.525	Anak
Jumlah Guru SD/MI	7.439	7.265	6.446	6.473	6.615	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 10 Rasio Guru Per Murid Jenjang SMP/MTs

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rasio Guru Per Murid Jenjang SMP/MTs	1 : 16	1 : 16	1 : 17	1 : 16	1 : 16	
Jumlah Murid SMP/MTs	40.974	40.978	41.175	41.294	41.253	Anak
Jumlah Guru SMP/MTs	2.538	2.601	2.451	2.565	2.534	Orang

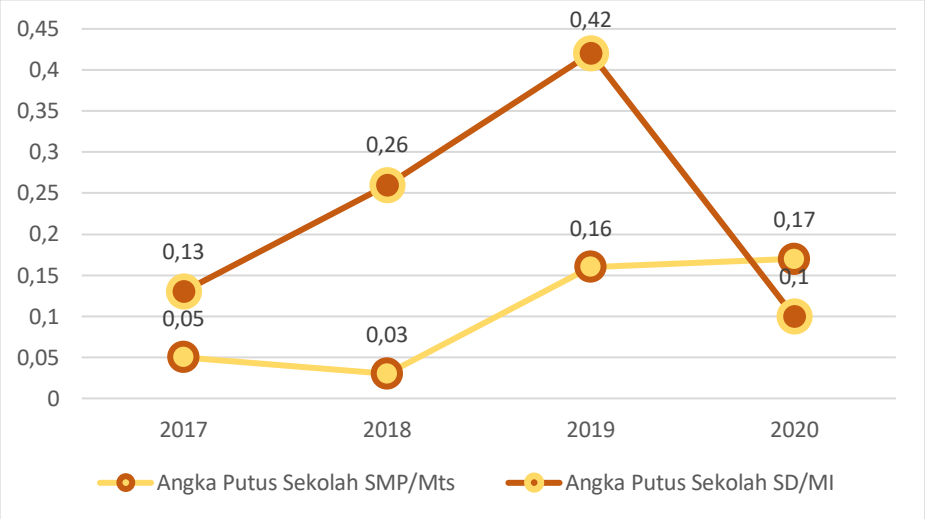
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 11 Angka Putus Sekolah SMP/Mts dan Angka Putus Sekolah SD/MI

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Putus Sekolah SMP/Mts	0,13	0,26	0,42	0,10	-	%
Jumlah Siswa Putus Sekolah SMP/Mts	97	188	288	70	28	Orang
Jumlah Siswa SMP/Mts	72.834	71.364	68.719	73.110	75.758	Orang
Angka Putus Sekolah SD/MI	0,05	0,03	0,16	0,17	-	%

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Siswa Putus Sekolah SD/MI	74	52	258	274	104	Orang
Jumlah Siswa SD/MI	157.808	156.566	156.545	158.263	158.006	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 7 Angka Putus Sekolah SMP/Mts dan Angka Putus Sekolah SD/MI

Tabel 3. 12 Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs

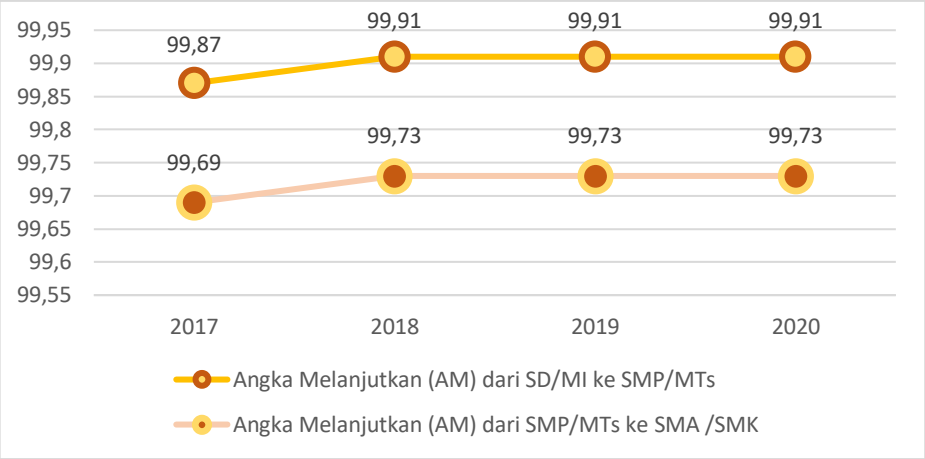
Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Angka Lulusan SD/MI	100	100	100	100	%
Angka Lulusan SMP/Mts	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 13 Angka Melanjutkan

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99,87	99,91	99,91	99,91	%
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA /SMK	99,69	99,73	99,73	99,73	%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

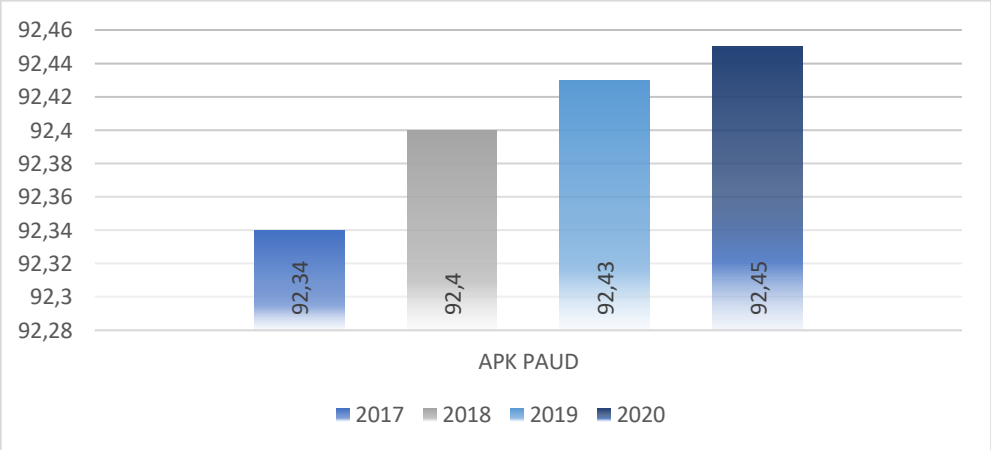


Gambar 3. 8 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA /SMK

Tabel 3. 14 APK PAUD

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
APK PAUD	99,63	64,20	60,33	91,74	-	%
Jumlah Penduduk Usia 3-5 Tahun / 3-6 Tahun	65.204	64.519	65.204	63.243	62.669	Jiwa
Jumlah Murid PAUD	64.964	41.420	39.339	58.022	57.330	Anak

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

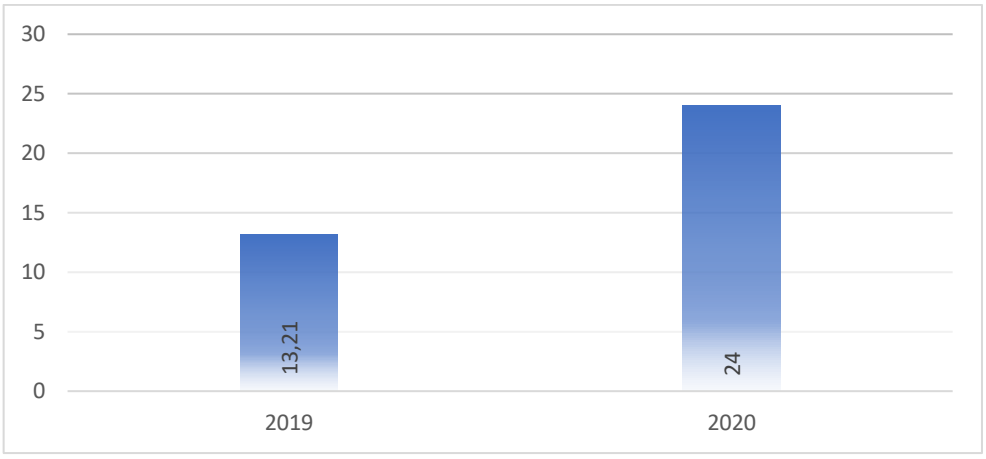


Gambar 3. 9 APK PAUD

Tabel 3. 15 Peningkatan Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Anak Usia Dini dan RPL Berkondisi Baik

Elemen	2019	2020	Satuan
Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan anak usia dini dan RPL berkondisi baik	13,21	24	%
Jumlah ruang kelas	2.525	2.909	Ruang Kelas

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

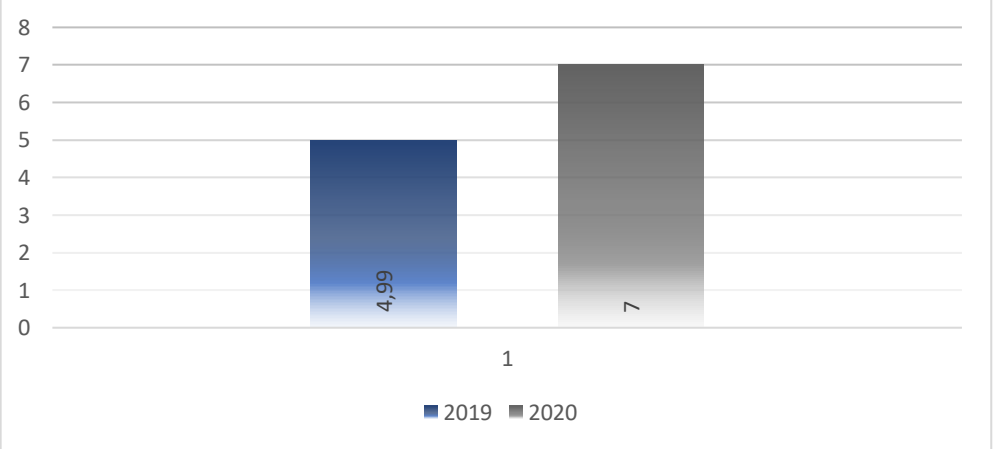


Gambar 3. 10 Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan anak usia dini dan RPL berkondisi baik

Tabel 3. 16 Guru PAUD yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Mengajar

ELemen	2019	2020	Satuan
Persentase Guru Paud yang bersertifikat dan terlatih untuk mengajar	4,99	7	%
Guru PAUD yang bersertifikat	163	228	Orang
Guru PAUD	3.258	3.258	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

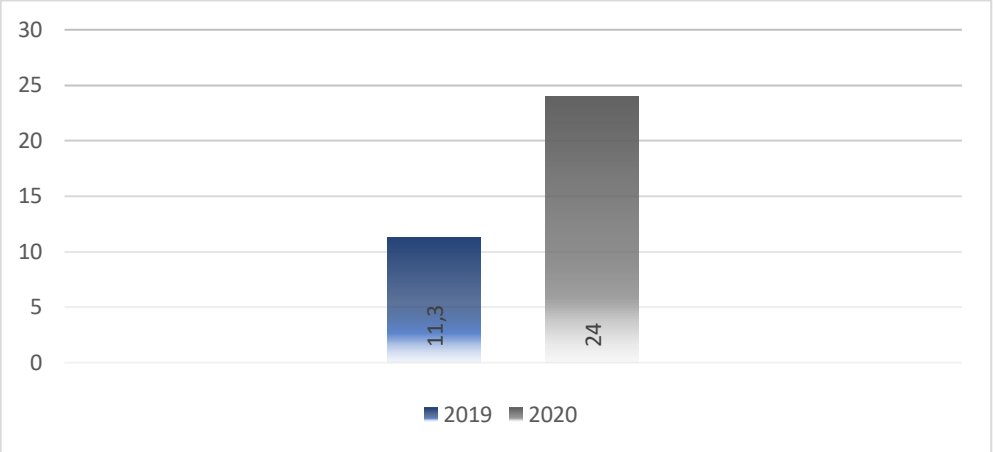


Gambar 3. 11 Persentase Guru PAUD yang bersertifikat dan terlatih untuk mengajar

Tabel 3. 17 Peningkatan Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Dasar dan RPL Berkondisi Baik

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan dasar dan RPL berkondisi baik	-	-	11,30	24	%
Jumlah ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs	9.337	9.965	9.965	9.965	Ruang Kelas

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 12 Persentase peningkatan jumlah ruang kelas pendidikan dasar dan RPL berkondisi baik

Tabel 3. 18 Guru SD/SMP yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Mengajar

Elemen	2020	Satuan
Persentase Guru SD/MI yang bersertifikat	7,15	%
Guru SD/MI yang bersertifikat	749	Orang
Guru SD/MI	10.479	Orang
Persentase Guru SMP/ MTs yang bersertifikat	4,74	%
Guru SMP/ MTs yang bersertifikat	239	Orang
Guru SMP/ MTs	5.040	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 19 Persentase Kenaikan Guru SD dan SMP yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Mengajar

Elemen	2020	Satuan
Persentase kenaikan Guru SD yang bersertifikat dan terlatih untuk mengajar	5	%
Persentase kenaikan Guru SMP yang bersertifikat dan terlatih untuk mengajar	2	%

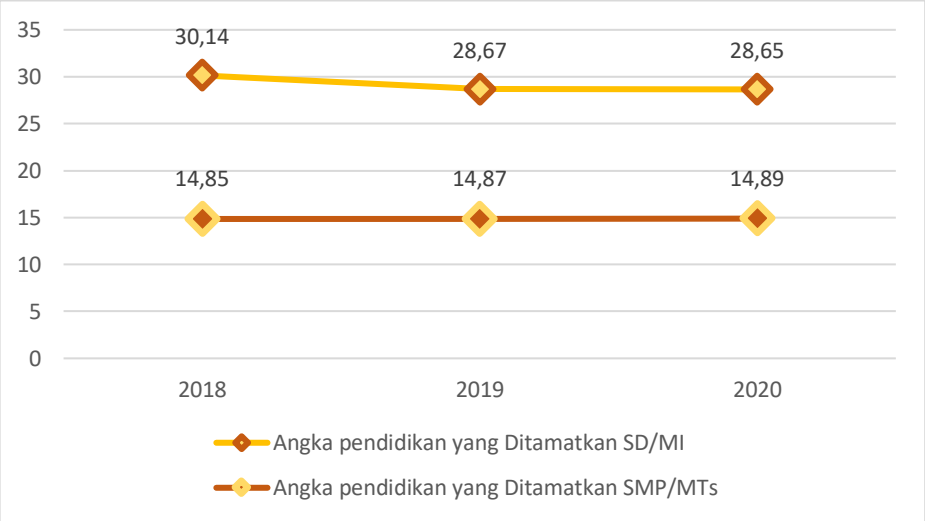
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 20 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Elemen	2018	2019	2020	Satuan
SD/MI	30,14	28,67	28,65	%
Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas	-	-	-	Jiwa
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat SD/ Sederajat	-	-	-	Orang
SMP/MTs	14,85	14,87	14,89	%
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	-	-	-	Jiwa

Elemen	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang tamat SMP/ MTs	-	-	-	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

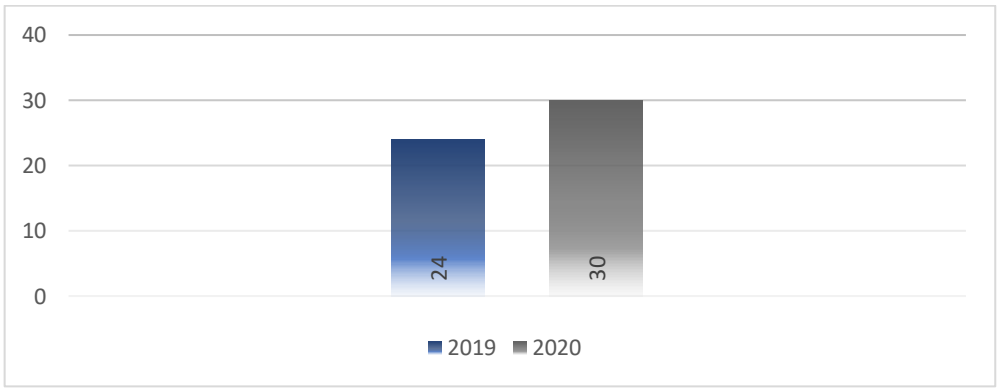


Gambar 3. 13 Persentase angka pendidikan yang ditamatkan

Tabel 3. 21 Tutor dan Penyelenggara/Pengelola PNF yang Bersertifikat

	2019	2020	Satuan
Persentase Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat	24	30	%
Jumlah Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat	238	298	Orang
Jumlah keseluruhan Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF	992	992	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 14 Persentase Tutor dan penyelenggara/pengelola PNF yang bersertifikat

Tabel 3. 22 Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjadi Rujukan TUK Meningkat

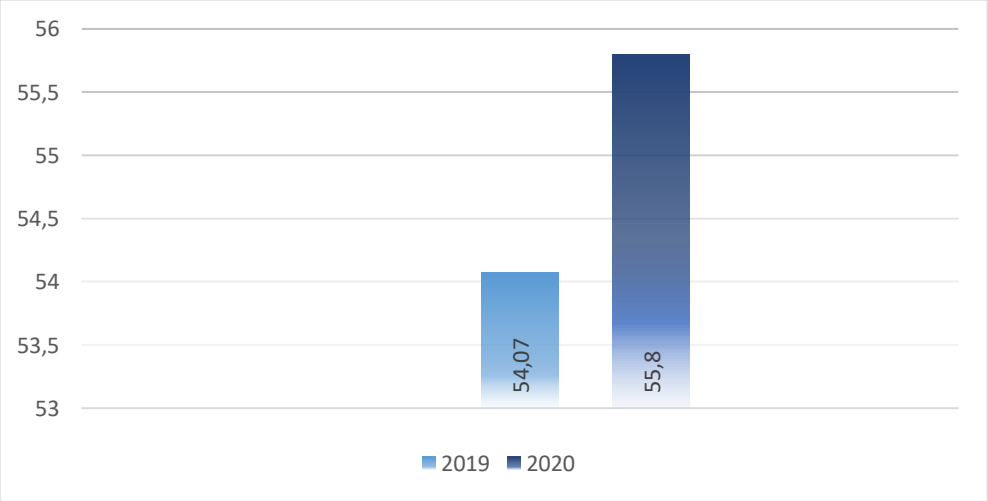
	2019	2020	Satuan
Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjadi Rujukan TUK Meningkat	2	2	%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

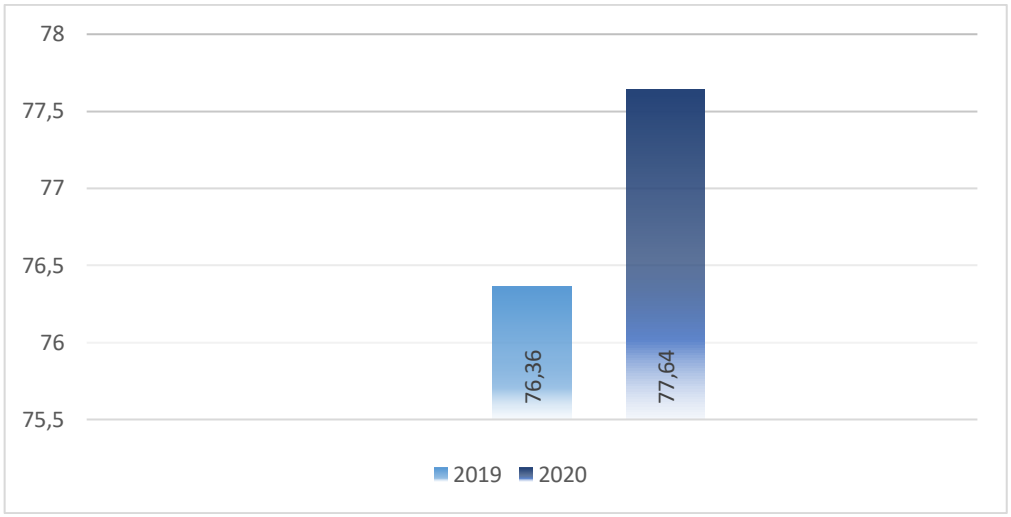
Tabel 3. 23 Persentase Guru Berpendidikan S1/D.IV

	2019	2020	Satuan
Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan PAUD	54,07	55,80	%
Guru berpendidikan S1 atau D.IV jenjang pendidikan PAUD	1.792	2.007	Orang
Persentase peningkatan guru berpendidikan S1/D.IV	0,00	0,01	
Jumlah Keseluruhan guru pada jenjang pendidikan PAUD	3.314	3.597	Orang
Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan SD/MI	76,36	77,64	%
Guru berpendidikan S1 atau D.IV jenjang pendidikan SD/MI	6.090	5.936	Orang
Persentase peningkatan guru berpendidikan S1/D.IV	0,05	0,01	
Jumlah Keseluruhan guru pada jenjang pendidikan SD/ MI	7.975	7.646	Orang
Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang pendidikan SMP/MTs	67,00	68,57	%
Guru berpendidikan S1 atau D.IV Jenjang pendidikan SMP/MTs	1.525	1.588	Orang
Persentase peningkatan guru berpendidikan S1/D.IV	0,02	0,01	
Jumlah Keseluruhan guru pada jenjang pendidikan SMP/ MTs	2.276	2.316	Orang

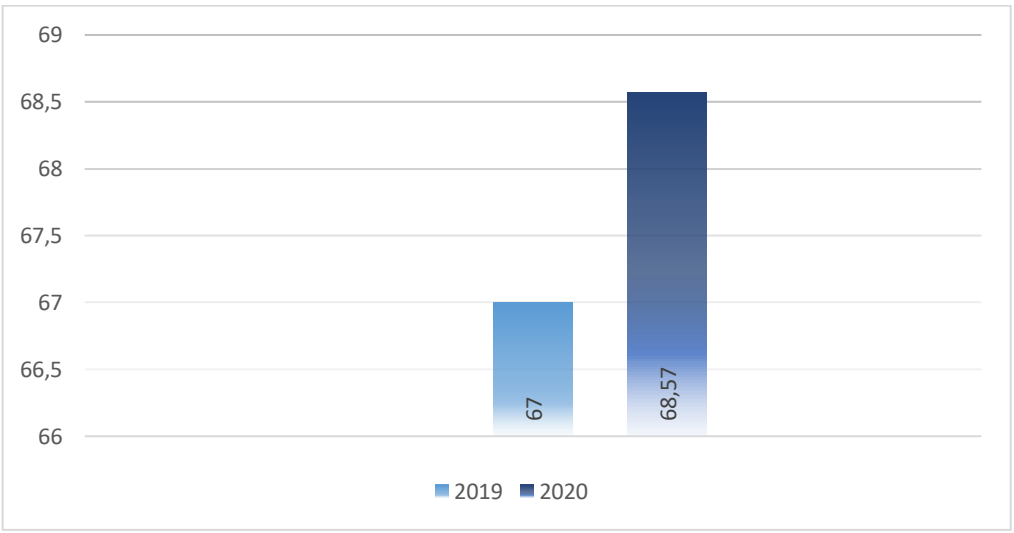
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 15 Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang Pendidikan PAUD



Gambar 3. 16 Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang Pendidikan SD/MI

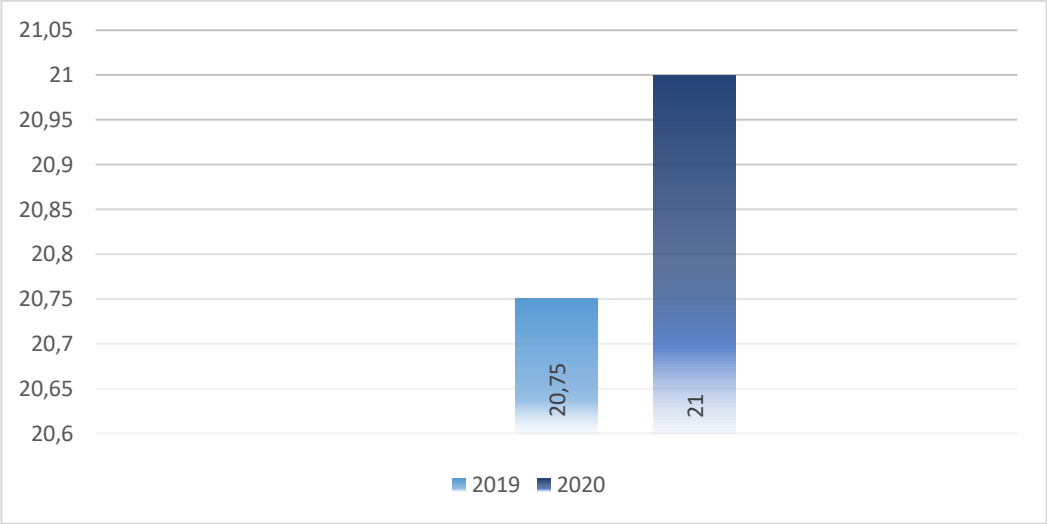


Gambar 3. 17 Persentase guru berpendidikan S1/D.IV pada jenjang Pendidikan SMP/MTs

Tabel 3. 24 Guru dan Tenaga Kependidikkan (GTK) yang Bersertifikat dan Terlatih untuk Meningkatkan Kompetensi

	2019	2020	Satuan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikkan (GTK) yang bersertifikat dan terlatih untuk meningkatkan kompetensi	20,75	21	%
Jumlah Guru dan GTK yang bersertifikat	2.171	2.137	Orang
Jumlah keseluruhan guru dan GTK	10.463	10.178	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 18 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikkan (GTK) yang bersertifikat dan terlatih untuk meningkatkan kompetensi

Tabel 3. 25 Rasio kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikkan (GTK) terhadap Lembaga

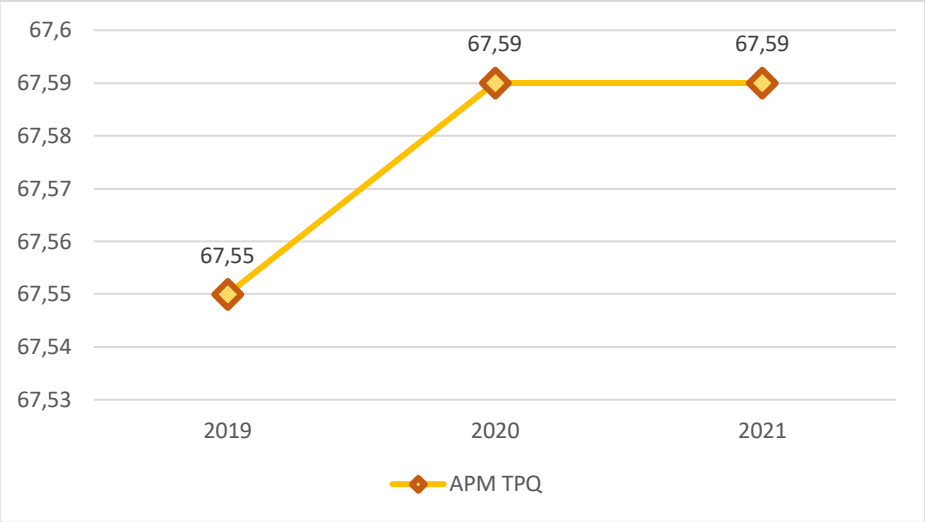
Rasio kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikkan (GTK) terhadap Lembaga	2019	2020	Satuan
PAUD Formal	1 : 5	1 : 5	%
Jumlah guru dan GTK Paud Formal N	212	216	Orang
Jumlah lembaga PAUD Formal N	4	4	Lembaga
SD	1 : 12	1 : 12	%
Jumlah guru dan GTK SD N	7.975	7.646	Orang
Jumlah lembaga SD N	657	657	Lembaga
SMP	1 : 21	1 : 21	%
Jumlah guru dan GTK SMP N	2.276	2.316	Orang
Jumlah lembaga SMPN	63	63	Lembaga

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 26 APM TPQ

	2019	2020	2021	Satuan
APM TPQ	67,55	67,59	67,59	%
Jumlah Murid TPQ	164.196	164.294	-	Anak
Jumlah Penduduk	243.074	243.074	-	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

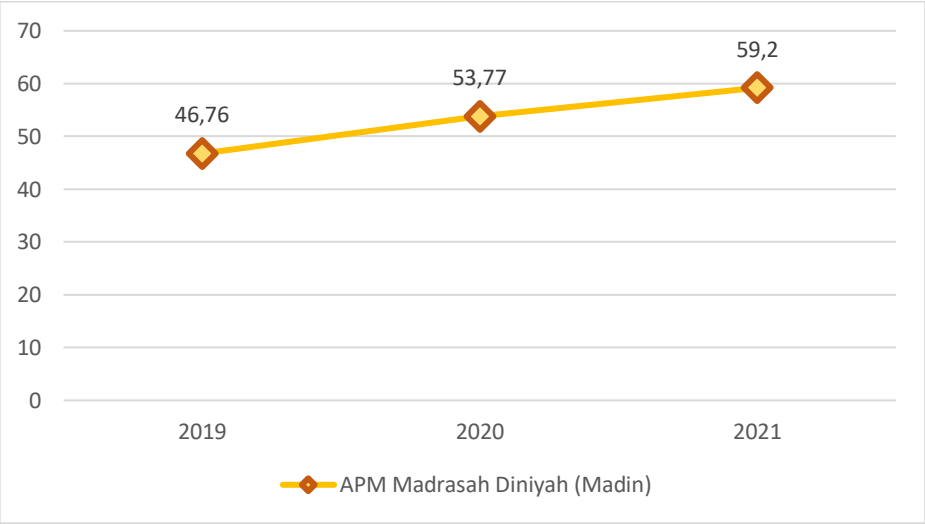


Gambar 3. 19 APM TPQ

Tabel 3. 27 APM Madrasah Diniyah (Madin)

	2019	2020	2021	Satuan
APM Madrasah Diniyah (Madin)	46,76	53,77	59,20	%
Jumlah Murid Madin	170.778	196.380	-	Anak
Jumlah Penduduk	365.223	365.223	-	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

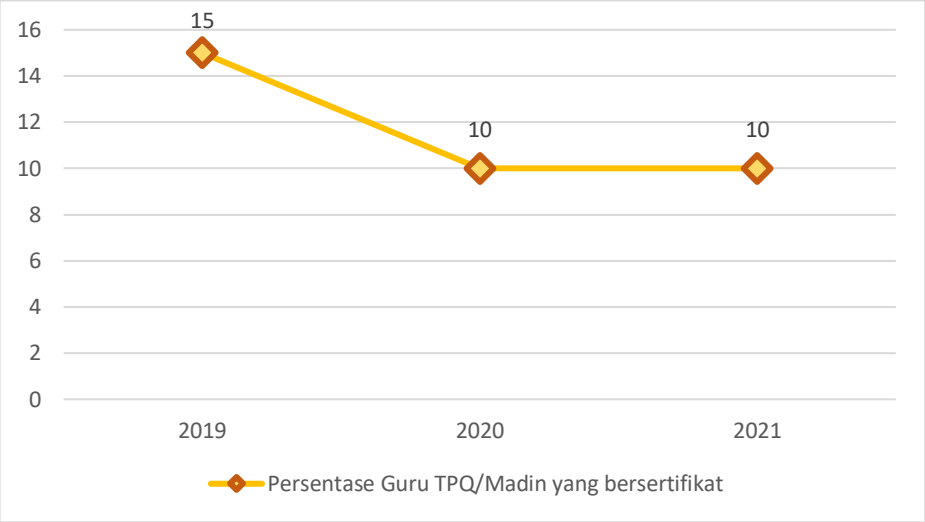


Gambar 3. 20 APM Madrasah Diniyah (Madin)

Tabel 3. 28 Guru TPQ/Madin yang Bersertifikat

	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Guru TPQ/Madin yang bersertifikat	15	10	10	%
Guru TPQ atau Madin yang bersertifikat	3.287	2.192	-	Orang
Jumlah Guru TPQ atau Madin	21.918	21.918	-	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 21 Persentase Guru TPQ/Madin yang bersertifikat

Tabel 3. 29 TPQ yang Berstandar

	2019	2020	2021	Satuan
Rasio TPQ yang berstandar	2 : 1	2 : 1	2 : 1	%
Jumlah TPQ berstandar	48	48	-	TPQ
Jumlah Keseluruhan TPQ	1.289	1.289	-	TPQ

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 30 Madin yang Berstandar

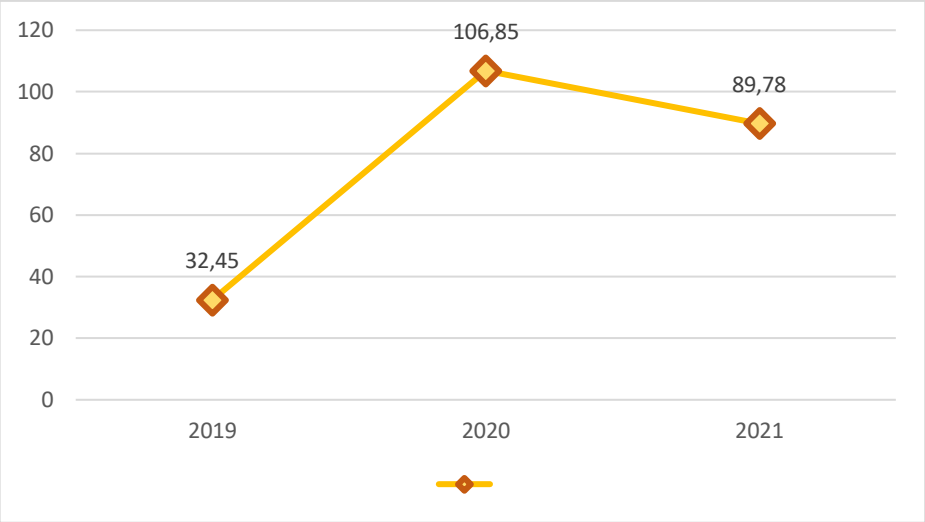
	2019	2020	2021	Satuan
Rasio Madin yang berstandar	2 : 1	2 : 1	2 : 1	%
Jumlah Madin berstandar	48	48	-	Madin
Jumlah keseluruhan Madin	1.507	1.507	-	Madin

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 31 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	32,45	106,85	89,78	%
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	25.348	27.658	46.231	Jiwa
Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	78.109	25.885	51.496	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

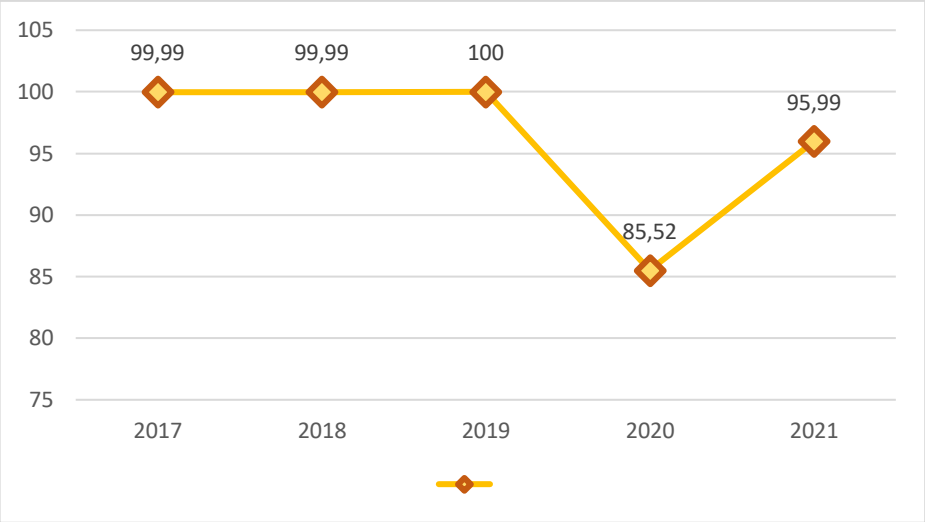


Gambar 3. 22 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD

Tabel 3. 32 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,99	99,99	100,00	85,52	95,99	%
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	157.599	157.599	161.921	113.986	148.823	Jiwa
Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yg bersangkutan	157.610	157.610	161.921	133.284	155.034	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

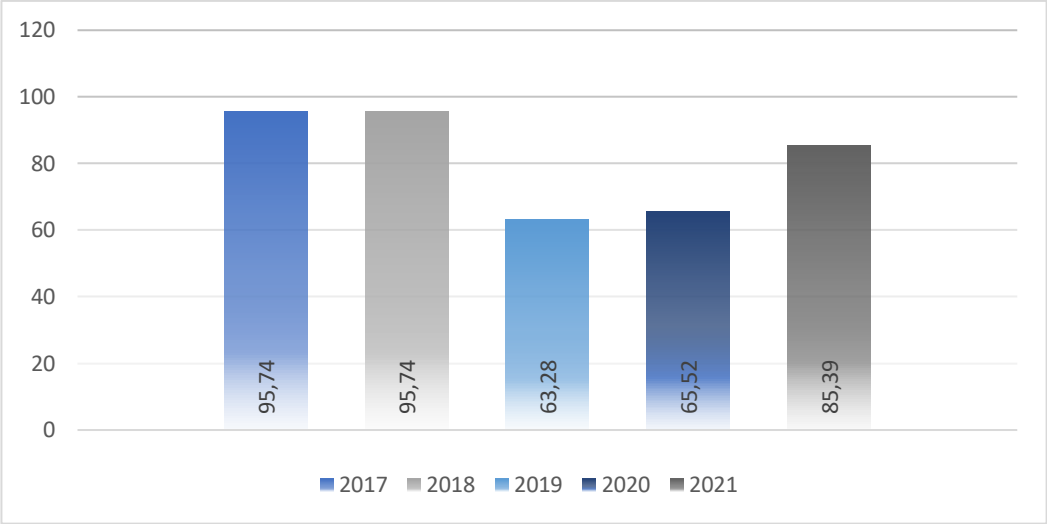


Gambar 3. 23 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar

Tabel 3. 33 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,74	95,74	63,28	65,52	85,39	%
Jumlah anak usia 13-15 th yg sudah tamat/sedang belajar di sekolah menengah pertama	78.025	78.025	53.415	35.034	63.716	Jiwa
Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kab yg bersangkutan	81.493	81.493	84.408	53.469	74.618	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

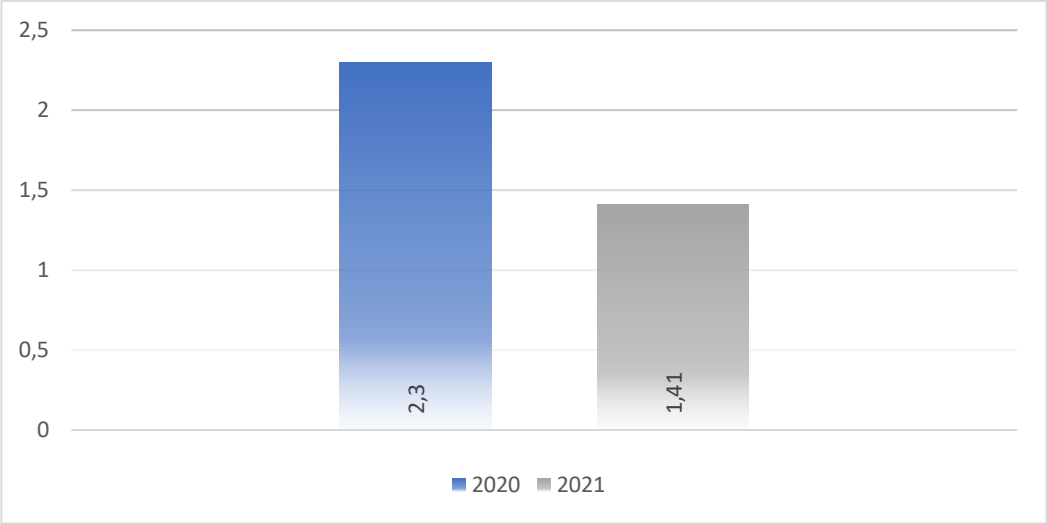


Gambar 3. 24 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama

Tabel 3. 34 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Elemen	2020	2021	Satuan
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2,30	1,41	%
Jumlah anak usia 7-18 th yg belum menyelesaikan PD & menengah yg sudah tamat/sedang belajar di PK	866	1041	Jiwa
Jumlah anak usia 7-18 th yang belum menyelesaikan PK & menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	37.733	73.901	Jiwa

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 25 Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Tabel 3. 35 Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Beji	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Gempol	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Gondang Wetan	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Grati	2	2	2	2	2	PKBM
Kecamatan Kejayan	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Kraton						PKBM
Kecamatan Lekok	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Lumbang	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Nguling	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Pandaan	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Pasrepan	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Pohjentrek	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Prigen	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Purwodadi	2	2	2	2	2	PKBM
Kecamatan Purwosari	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Puspo	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Rejoso	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Rembang	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Sukorejo	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Tosari	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Tutur	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Winongan	1	1	1	1	1	PKBM
Kecamatan Wonorejo	1	1	1	1	1	PKBM

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah	25	25	25	25	25	PKBM

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 36 SD/MI dan SMP/MTs Berakreditasi Minimal B

Elemen	2020	2021	Satuan
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	92,06	91,94	%
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	80,13	79,49	%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 37 Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Melaksanakan Kurikulum Satuan Pendidikan SD/MI

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan SD/MI	100	100	100	100	100	%
Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan SD/MI	714	716	718	720	-	Unit
Jumlah satuan pendidikan SD/MI	714	716	718	720	-	Unit

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 38 Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Melaksanakan Kurikulum Satuan Pendidikan SMP/Mts

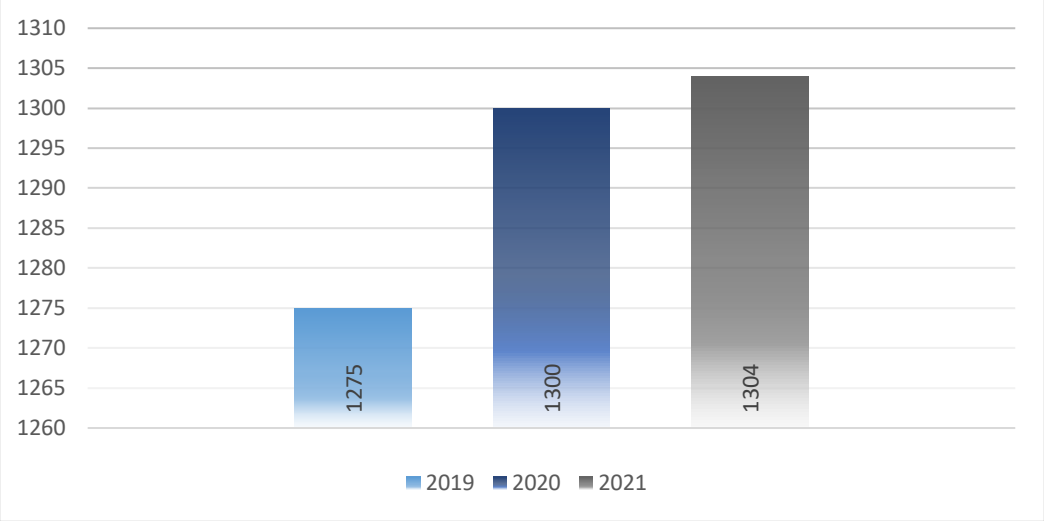
Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan SMP/MTs	100	100	100	100	100	%
Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan dan melaksanakan kurikulum satuan pendidikan SMP/MTs	148	152	156	157	159	Unit
Jumlah satuan pendidikan SMP/MTs	148	152	156	157	159	Unit

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 39 Jumlah Satuan Pendidikan PAUD dan Pedidikan Nonformal/Kesetaraan

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah satuan pendidikan PAUD dan pedidikan nonformal/kesetaraan	1.275	1.300	1.304	unit

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3. 26 Jumlah Satuan Pendidikan PAUD dan Pedidikan Nonformal/Kesetaraan

Tabel 3. 40 Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Persentase satuan pendidikan yang memiliki izin	100	100	100	%
Jumlah satuan pendidikan yang memiliki izin	2.442	2.199	2.206	Unit
Jumlah satuan pendidikan	2.442	2.199	2.206	Unit

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 41 Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Memiliki Izin

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin	100	100	100	%
Jumlah satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan yang memiliki izin	1.275	1.300	1.304	Unit
Jumlah satuan pendidikan PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan	1.275	1.300	1.304	Unit

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 42 Guru yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi di Seluruh Tingkatan

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Guru seluruh tingkatan	17.194	10.093	11.915	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 3. 43 Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Peningkatan Kompetensi di Seluruh Tingkatan

Elemen	2020	2021	Satuan
Jumlah tenaga kependidikan di seluruh tingkatan	2.007	4.126	Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DESKRIPSI

Jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami tren meningkat disetiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan sebesar 1.603.550 jiwa dimana 801.867 berjenis kelamin laki-laki dan 801.683 berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk di Kabupaten Pasuruan meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.606.807 jiwa dimana 801.711 berjenis kelamin laki-laki dan 805.096 berjenis kelamin perempuan. Piramida penduduk di Kabupaten Pasuruan termasuk dalam tipe ekspansif. Ini tercermin dari pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Mayoritas penduduk di Kabupaten Pasuruan berpendidikan tamat SD/Sederajat. Jumlah penduduk yang tidak bersekolah dari tahun 2020 hingga 2022 cukup banyak. Jika dilihat dari agama yang dianut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Pasuruan menganut agama islam. Kemudian diikuti penduduk yang beragama Kristen, Hindu dan Katolik.

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 539.305 Kepala Keluarga, meningkat disetiap tahunnya menjadi 550.407 pada tahun 2022. Mayoritas Kepala Keluarga di Kabupaten Pasuruan berstatus kawin.

Di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 jumlah penduduk disabilitas ada sebanyak 885 orang dimana paling banyak penduduk yang disabilitas.

mental/jiwa sebanyak 551 orang dimana 352 berjenis kelamin laki-laki dan 199 orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4. 1 Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP

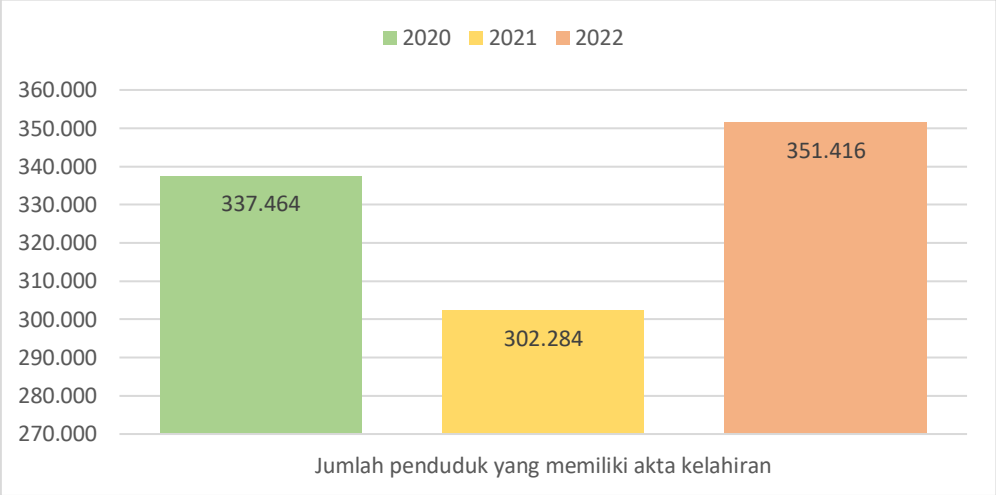
Penduduk Wajib KTP yang Memiliki E-KTP	2020	Satuan
Persentase Penduduk Wajib KTP yang memiliki E-KTP	52,08	%
Jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki E-KTP	615.866	Orang
Jumlah seluruh penduduk wajib E-KTP	1.182.431	Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 2 Kepemilikan Akta Kelahiran

	2020	2021	2022	Satuan
Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran	337.464	302.284	351.416	Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Kelahiran

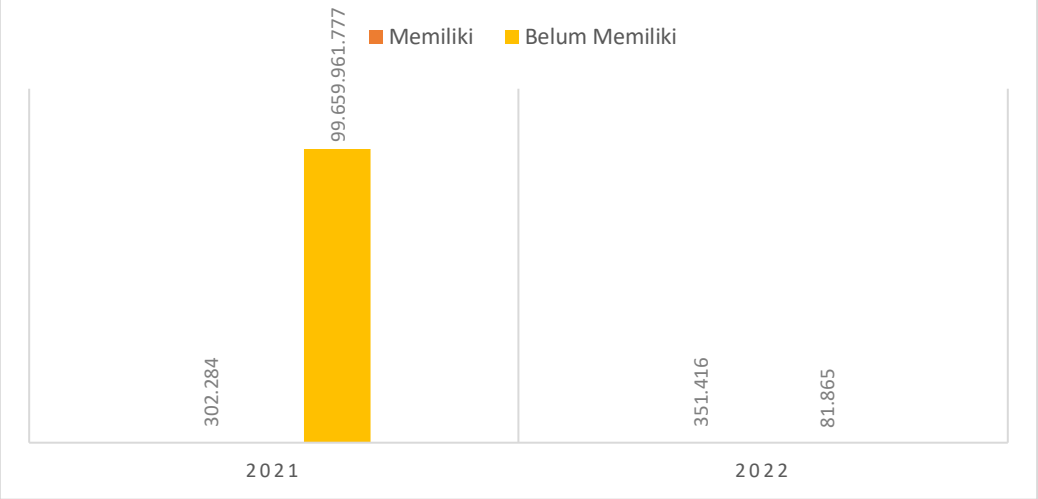
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 3 Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan

Wilayah	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Memiliki	Belum Memiliki	Memiliki	Belum Memiliki
Purwodadi	13.323	49.830.040.235	15.032	3.138
Tutur	9.522	24.915.017.946	10.730	2.125
Puspo	3.878	12.457.507.523	4.363	2.418
Lumbang	6.144	6.228.752.394	6.930	1.523
Pasrepan	9.130	3.114.375.146	10.536	2.688
Kejayan	12.462	1.557.185.742	14.338	3.144
Wonorejo	12.052	778.590.586	14.001	2.510
Purwosari	18.015	389.293.298	19.654	2.952
Sukorejo	17.159	194.644.674	19.720	3.576
Prigen	17.626	97.319.585	19.844	3.022
Pandaan	21.091	48.657.462	24.793	4.916

Wilayah	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Memiliki	Belum Memiliki	Memiliki	Belum Memiliki
Gempol	23.014	24.324.851	27.085	6.933
Beji	15.265	12.157.431	18.307	5.764
Bangil	14.516	6.074.676	17.339	5.954
Rembang	12.909	3.033.267	15.180	3.846
Kraton	16.030	1.513.860	19.949	4.679
Pohjentrek	6.244	753.018	7.228	1.530
Gondangwetan	10.349	375.377	12.282	3.876
Winongan	9.236	185.060	10.568	2.182
Grati	15.312	90.938	18.320	3.047
Nguling	12.241	42.732	14.021	2.743
Lekok	14.284	19.318	16.894	5.962
Rejoso	9.335	5.640	10.795	2.598
Tosari	3.147	1.018	3.507	739
Jumlah	302.284	99.659.961.777	351.416	81.865

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 2 Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kecamatan

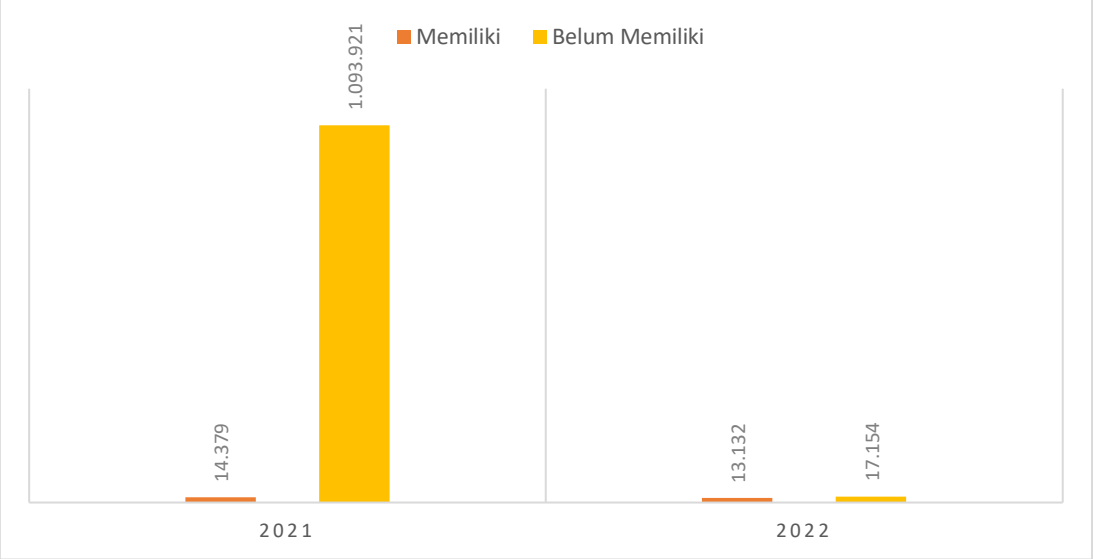
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 4 Kepemilikan Akta Perceraian Berdasarkan Kecamatan

Wilayah	2021		2022	
	Memiliki	Belum Memiliki	Memiliki	Belum Memiliki
Purwodadi	753	573	725	650
Tutur	387	476	400	544
Puspo	150	190	136	254
Lumbang	197	248	213	270
Pasrepan	315	474	295	536
Kejayan	417	465	367	583

Wilayah	2021		2022	
	Memiliki	Belum Memiliki	Memiliki	Belum Memiliki
Wonorejo	470	482	484	550
Purwosari	959	802	963	905
Sukorejo	890	805	883	921
Prigen	1.207	1.127	1.082	1.454
Pandaan	1.321	904	1.124	1.210
Gempol	1.678	1.351	1.584	1.698
Beji	908	843	587	1.334
Bangil	872	545.177	583	1.377
Rembang	351	272.091	320	592
Kraton	535	135.803	385	763
Pohjentrek	245	67.627	244	166
Gondangwetan	454	33.743	428	428
Winongan	378	16.687	381	496
Grati	563	8.120	596	743
Nguling	402	3.706	382	639
Lekok	425	1.581	446	548
Rejoso	415	543	438	367
Tosari	87	103	86	126
Kab. Pasuruan	14.379	1.093.921	13.132	17.154

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



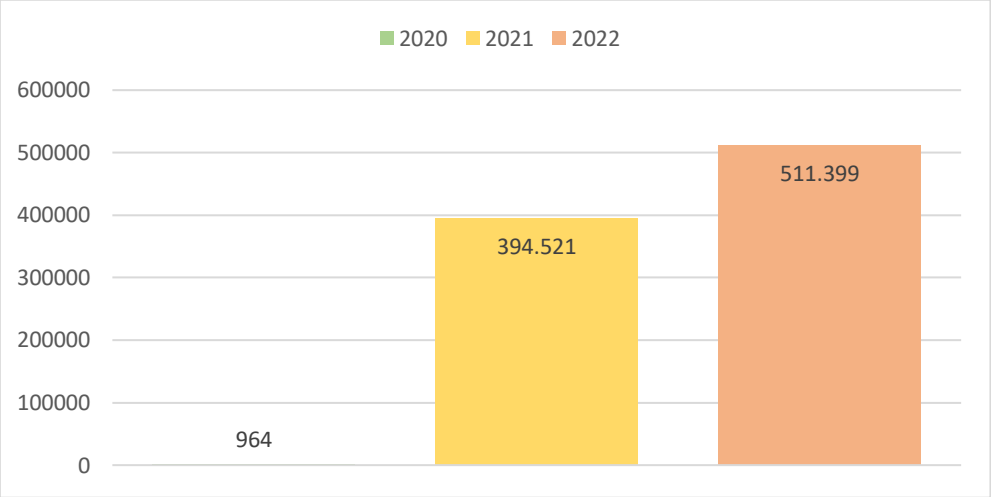
Gambar 4. 3 Kepemilikan Akta Perceraian Berdasarkan Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 5 Penerbitan Akta Perkawinan

Penerbitan Akta Perkawinan	2020	2021	2022	Satuan
Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan	964	394.521	511.399	Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 4 Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	2020		2021	
	Memiliki	Belum Memiliki	Memiliki	Belum Memiliki
Purwodadi	16.591	161.743.265.157	14.829	23.158
Tutur	13.375	80.871.623.467	12.228	18.740
Puspo	6.952	40.435.804.672	5.400	10.671
Lumbang	8.625	20.217.898.583	8.056	13.520
Pasrepan	10.764	10.108.943.678	7.864	20.332
Kejayan	14.850	5.054.463.913	11.465	23.297
Wonorejo	15.450	2.527.223.295	14.461	16.074
Purwosari	19.946	1.263.605.141	18.770	25.722
Sukorejo	21.089	631.792.013	19.662	25.431
Prigen	21.464	315.885.740	15.908	29.845
Pandaan	28.790	157.932.328	20.775	34.834
Gempol	33.354	78.954.650	26.965	38.242
Beji	22.456	39.464.026	12.654	31.794
Bangil	20.177	19.722.054	11.081	27.711
Rembang	15.102	9.852.674	11.131	23.204
Kraton	20.006	4.917.840	14.841	28.936
Pohjentrek	8.000	2.448.372	7.426	7.850

Kecamatan	2020		2021	
	Memiliki	Belum Memiliki	Memiliki	Belum Memiliki
Gondangwetan	14.253	1.221.065	11.736	15.803
Winongan	14.506	604.673	11.922	10.854
Grati	18.539	298.486	17.623	24.414
Nguling	14.560	138.594	13.756	19.625
Lekok	17.533	60.800	16.627	23.125
Rejoso	13.787	20.124	12.802	11.018
Tosari	4.352	5.586	3.867	7.199
Jumlah	**394.521**	**323.486.146.931**	**321.849**	**511.399**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 7 Kepemilikan E-KTP

Kepemilikan E-KTP	2020	Satuan
Persentase Kepemilikan E-KTP	52,08	%
Jumlah penduduk yang memiliki E-KTP	615.866	Orang
Jumlah penduduk wajib E-KTP	1.182.431	Orang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 8 Kepemilikan KK

Kepemilikan KK	2020	Satuan
Jumlah KK	539.305	Keluarga

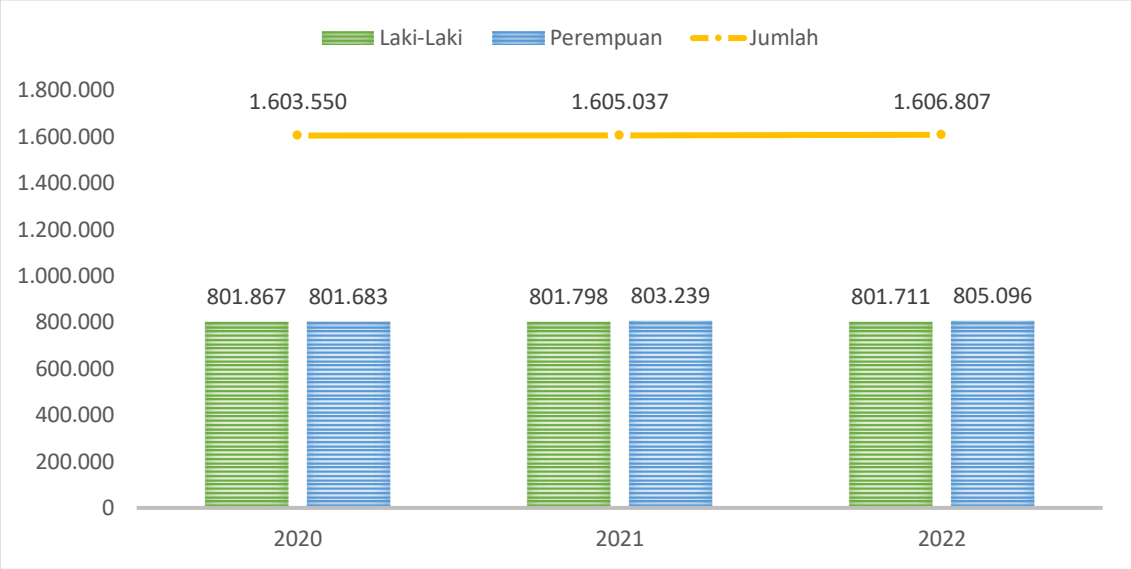
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Tahun 2020)

Kecamatan	2020		2021		2022		Satuan
	L	P	L	P	L	P	
Purwodadi	35.458	34.691	35.323	34.515	35.380	34.794	Jiwa
Tutur	27.336	26.592	27.201	26.628	27.238	26.882	Jiwa
Puspo	13.821	13.827	13.800	13.880	13.688	13.855	Jiwa
Lumbang	17.510	17.644	17.458	17.682	17.447	17.759	Jiwa
Pasrepan	25.662	26.093	25.600	26.196	25.553	26.344	Jiwa
Kejayan	32.237	33.198	32.327	33.329	32.234	33.344	Jiwa
Wonorejo	29.527	30.134	29.572	30.327	29.617	30.458	Jiwa
Purwosari	42.266	41.870	42.409	42.065	42.614	42.245	Jiwa
Sukorejo	43.573	43.776	43.573	43.811	43.562	43.869	Jiwa
Prigen	44.377	43.313	44.296	43.358	44.288	43.460	Jiwa
Pandaan	54.917	54.874	55.489	55.397	55.500	55.389	Jiwa
Gempol	64.984	64.003	65.025	64.107	64.881	64.016	Jiwa
Beji	43.624	43.233	43.911	43.691	44.010	43.874	Jiwa
Bangil	41.917	42.150	41.740	42.027	41.633	41.849	Jiwa
Rembang	32.578	33.702	32.765	34.006	32.892	34.196	Jiwa
Kraton	43.611	43.380	43.435	43.201	43.457	43.369	Jiwa
Pohjentrek	15.544	15.223	15.674	15.347	15.650	15.328	Jiwa
Gondang Wetan	28.396	27.924	28.387	27.910	28.453	28.059	Jiwa
Winongan	22.546	22.633	22.561	22.601	22.512	22.634	Jiwa
Grati	39.857	40.122	39.562	40.065	39.506	40.157	Jiwa

Kecamatan	2020		2021		2022		Satuan
	L	P	L	P	L	P	
Nguling	30.787	31.638	30.596	31.591	30.563	31.618	Jiwa
Lekok	37.955	38.795	37.792	38.691	37.703	38.660	Jiwa
Rejoso	23.957	23.459	23.974	23.529	24.074	23.634	Jiwa
Tosari	9.427	9.409	9.328	9.285	9.256	9.303	Jiwa
Jumlah	801.867	801.683	801.798	803.239	801.711	805.096	Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin dan Kelompok Usia

Usia	2020		2021		2022		Satuan
	L	P	L	P	L	P	
0-4 Tahun	44.005	41.685	48.701	46.102	56.245	53.394	Jiwa
5-9 Tahun	67.517	62.380	67.436	62.399	67.847	62.779	Jiwa
10-14 Tahun	64.898	60.740	68.877	64.360	66.638	62.428	Jiwa
15-19 Tahun	63.585	59.962	55.852	52.877	54.264	52.021	Jiwa
20-24 Tahun	65.912	61.919	65.947	63.193	64.347	62.294	Jiwa
25-29 Tahun	63.135	60.269	63.593	60.671	63.802	60.677	Jiwa
30-34 Tahun	58.843	58.312	59.392	58.633	59.538	58.828	Jiwa
35-39 Tahun	63.995	65.567	61.911	62.660	62.325	63.295	Jiwa
40-44 Tahun	61.076	65.141	62.259	65.929	62.439	66.035	Jiwa
45-49 Tahun	58.239	62.472	57.037	61.760	57.049	61.733	Jiwa
50-54 Tahun	54.599	57.140	55.800	58.071	55.335	57.649	Jiwa
55-59 Tahun	45.556	48.868	45.426	49.434	44.810	48.913	Jiwa
60-64 Tahun	36.626	37.813	37.146	38.563	36.560	37.986	Jiwa
65+ Tahun	51.046	56.393	801.860	803.177	801.711	805.096	Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 11 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
0-4 Tahun	44.005	41.685	85.690	94,73
5-9 Tahun	67.517	62.380	129.897	92,39
10-14 Tahun	64.898	60.740	125.638	93,59
15-19 Tahun	63.585	59.962	123.547	94,30
20-24 Tahun	65.912	61.919	127.831	93,94
25-29 Tahun	63.135	60.269	123.404	95,46
30-34 Tahun	58.843	58.312	117.155	99,10
35-39 Tahun	63.995	65.567	129.562	102,46
40-44 Tahun	61.076	65.141	126.217	106,66
45-49 Tahun	58.239	62.472	120.711	107,27
50-54 Tahun	54.599	57.140	111.739	104,65
55-59 Tahun	45.556	48.868	94.424	107,27
60-64 Tahun	36.626	37.813	74.439	103,24
65+ Tahun	51.046	56.393	107.439	110,47

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 12 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2021

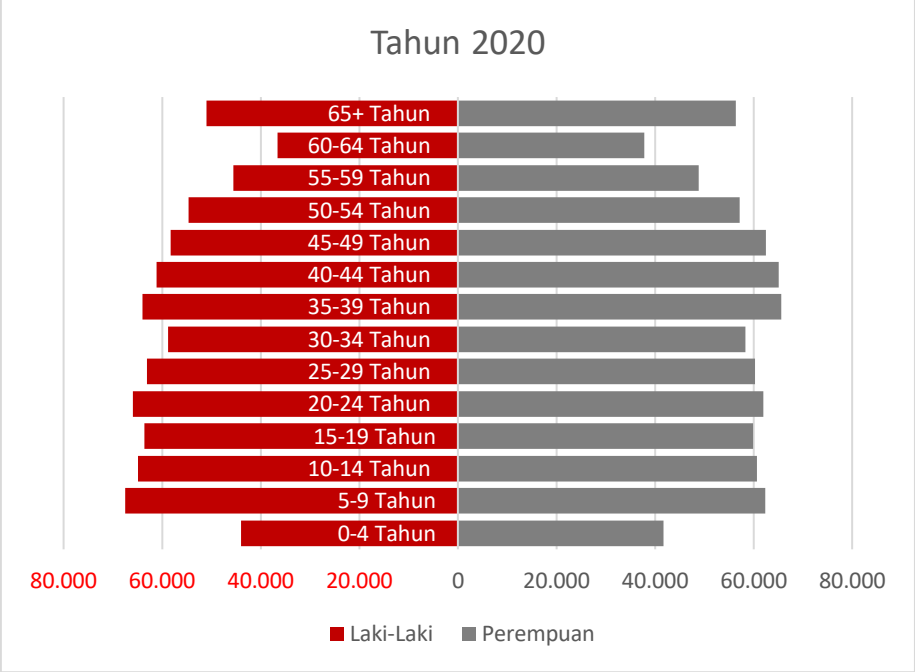
Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
0-4 Tahun	48.701	46.102	94.803	94,66
5-9 Tahun	67.436	62.399	129.835	92,53
10-14 Tahun	68.877	64.360	133.237	93,44
15-19 Tahun	55.852	52.877	108.729	94,67
20-24 Tahun	65.947	63.193	129.140	95,82
25-29 Tahun	63.593	60.671	124.264	95,41
30-34 Tahun	59.392	58.633	118.025	98,72
35-39 Tahun	61.911	62.660	124.571	101,21
40-44 Tahun	62.259	65.929	128.188	105,89
45-49 Tahun	57.037	61.760	118.797	108,28
50-54 Tahun	55.800	58.071	113.871	104,07
55-59 Tahun	45.426	49.434	94.860	108,82
60-64 Tahun	37.146	38.563	75.709	103,81
65+ Tahun	52.483	58.525	111.008	111,51

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 13 Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022

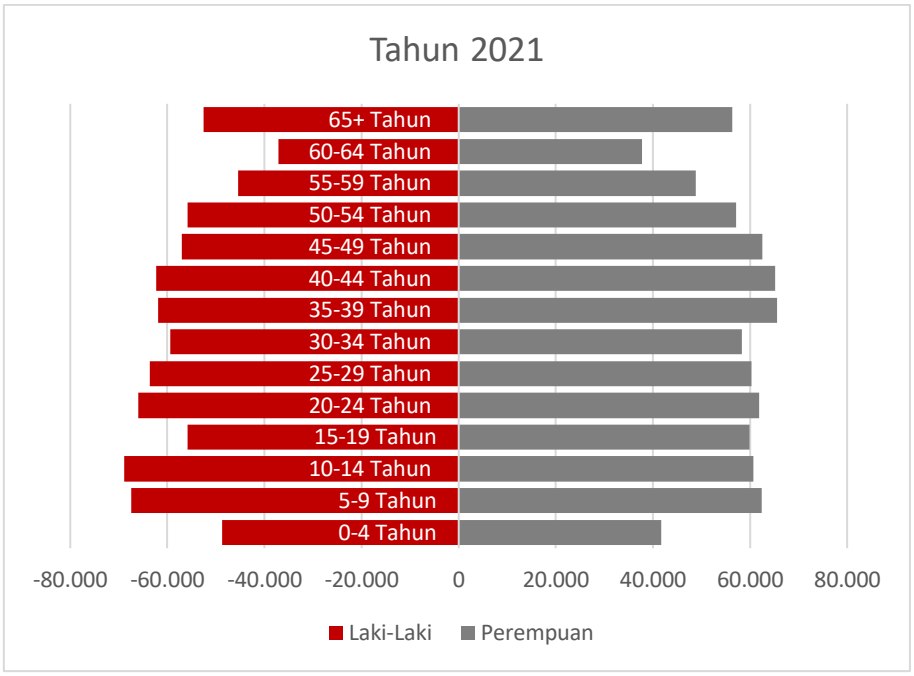
Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
0-4 Tahun	56.245	53.394	109.639	94,93
5-9 Tahun	67.847	62.779	130.626	92,53
10-14 Tahun	66.638	62.428	129.066	93,68
15-19 Tahun	54.264	52.021	106.285	95,87
20-24 Tahun	64.347	62.294	126.641	96,81
25-29 Tahun	63.802	60.677	124.479	95,10
30-34 Tahun	59.538	58.828	118.366	98,81
35-39 Tahun	62.325	63.295	125.620	101,56
40-44 Tahun	62.439	66.035	128.474	105,76
45-49 Tahun	57.049	61.733	118.782	108,21
50-54 Tahun	55.335	57.649	112.984	104,18
55-59 Tahun	44.810	48.913	93.723	109,16
60-64 Tahun	36.560	37.986	74.546	103,90
65+ Tahun	50.512	57.064	107.576	112,97

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



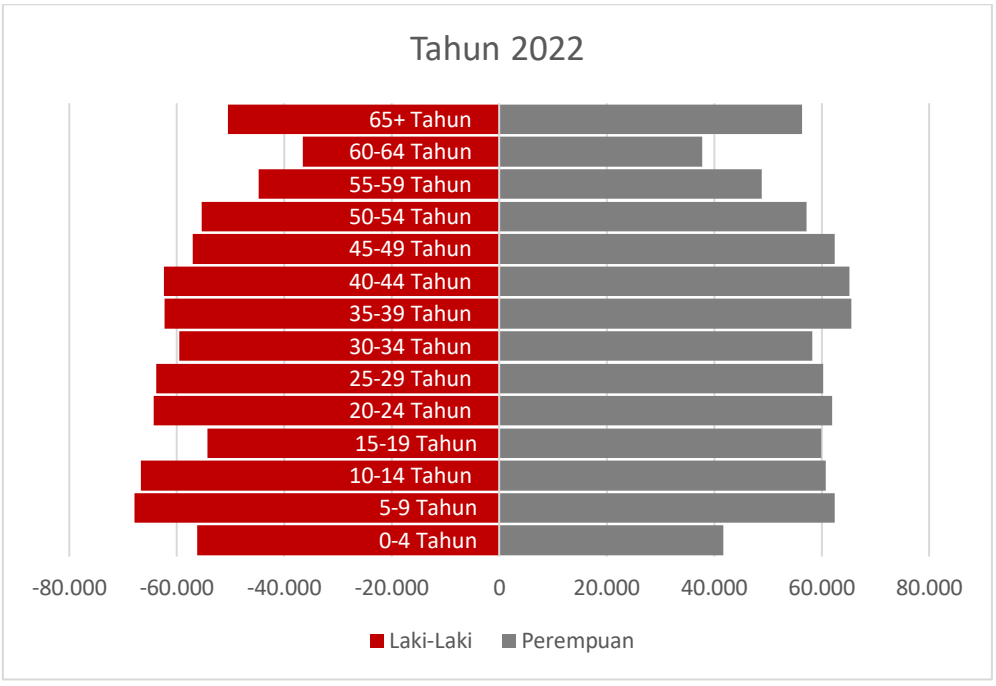
Gambar 4. 6 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 7 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 8 Piramida Penduduk Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2020)

Kecamatan	Tidak Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	D-1/D-2	Akademi/ D-3	D-4/ S-1	S-2	S-3
Purwodadi	316.699	10.621	25.796	10.278	9.053	81	228	1.224	59	3
Tutur	12.806	8.030	24.577	6.664	5.236	62	154	819	36	7
Puspo	8.343	8.013	11.791	1.865	1.152	19	61	200	9	2
Lumbang	4.536	6.785	17.531	2.983	1.211	33	53	218	7	1
Pasrepan	6.332	10.132	23.256	3.634	2.109	29	83	322	12	3
Kejayan	12.175	13.232	25.501	6.621	5.686	70	166	672	24	6
Wonorejo	13.457	11.560	22.774	6.978	5.454	64	175	879	38	8
Purwosari	11.731	12.920	22.657	14.146	14.672	117	400	2.112	95	10
Sukorejo	17.007	13.585	22.908	14.440	16.219	109	407	2.190	99	7
Prigen	17.385	12.883	23.516	15.307	17.745	143	353	2.035	80	4
Pandaan	15.624	13.879	19.660	18.829	29.104	213	1.029	4.990	214	11
Gempol	21.862	21.348	20.755	22.629	33.399	219	791	3.811	194	5
Beji	25.836	10.049	16.859	15.903	24.280	183	618	3.070	130	5
Bangil	15.760	10.540	13.794	13.010	25.187	180	773	4.829	180	18
Rembang	15.556	13.650	20.389	7.984	8.013	65	212	728	30	2
Kraton	15.207	16.282	33.893	9.306	9.072	77	207	1.221	54	7
Pohjentrek	16.872	4.972	10.100	3.863	4.692	42	164	726	37	2
Gondang Wetan	6.169	9.793	16.860	8.453	8.318	107	292	1.496	77	4
Winongan	10.920	7.223	19.247	5.227	4.181	52	164	570	24	1
Grati	8.490	12.236	29.833	9.141	10.146	75	394	1.797	57	7
Nguling	16.293	11.804	23.526	6.934	5.134	65	166	716	44	5
Lekok	14.031	13.194	36.451	5.298	3.293	37	86	469	17	9
Rejoso	17.896	7.599	16.037	6.572	6.603	86	188	910	45	3
Tosari	9.373	3.402	8.479	2.484	1.143	27	42	215	6	
Jumlah	630.360	263.732	506.190	218.549	251.102	2.155	7.206	36.219	1.568	130

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2021)

Kecamatan	Tidak/Blm Sekolah		Belum Tamat SD/Sederajat		Tamat SD/Sederajat		Tamat SLTP/Sederajat		Tamat SLTA/Sederajat		Diploma I/II		Akademi/Diploma III/Sarjana Muda		Diploma IV/Strata I		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Purwodadi	6.952	6.503	4.716	4.764	12.177	13.361	5.409	4.862	5.312	4.091	33	47	94	140	584	723	44	23	2	1
Tutur	4.626	4.457	3.543	3.582	12.136	12.259	3.425	3.246	2.958	2.469	28	34	63	93	394	473	24	14	4	1
Puspo	2.347	2.245	3.539	3.912	6.017	6.175	1.026	903	727	485	9	11	25	41	104	104	6	2	-	2
Lumbang	3.217	3.290	3.030	3.263	8.531	9.081	1.661	1.419	837	470	20	13	23	32	134	113	4	1	1	-
Pasrepan	6.078	6.420	4.618	5.107	11.135	12.109	2.178	1.464	1.361	852	15	15	30	53	174	171	10	3	1	2
Kejayan	7.032	7.234	5.800	6.710	11.497	13.904	3.925	2.704	3.608	2.228	30	35	60	125	352	380	19	7	4	2
Wonorejo	6.067	5.863	5.196	5.931	10.160	12.596	4.062	3.002	3.520	2.273	25	39	66	119	448	485	25	15	3	4
Purwosari	9.269	8.582	5.792	6.160	10.329	12.223	7.248	6.804	8.416	6.743	42	73	176	236	1.055	1.208	72	33	10	3
Sukorejo	9.267	8.902	5.931	6.489	10.259	12.566	7.324	6.955	9.440	7.304	36	72	177	235	1.072	1.239	62	46	5	3
Prigen	8.299	7.895	5.691	5.972	11.068	12.466	7.672	7.507	10.249	8.071	57	88	137	222	1.065	1.104	53	33	5	-
Pandaan	11.446	10.877	6.250	6.751	8.789	10.980	9.305	9.483	16.492	13.674	77	136	467	594	2.528	2.789	130	110	5	3
Gempol	13.595	12.719	9.289	10.820	9.471	11.111	11.137	11.184	19.132	15.370	76	135	320	530	1.874	2.156	126	81	5	1
Beji	8.292	7.847	4.673	4.707	7.315	9.477	7.643	8.116	14.136	11.100	66	115	230	413	1.467	1.857	86	55	3	4
Bangil	8.056	7.518	4.739	5.001	5.823	7.901	6.169	6.565	14.010	11.799	74	105	331	465	2.410	2.587	111	83	17	3
Rembang	7.620	8.077	5.939	7.098	9.153	11.232	4.470	3.566	5.062	3.416	31	35	100	131	363	438	26	12	1	1
Kraton	8.863	8.448	7.063	7.828	15.376	18.478	5.406	3.923	5.932	3.633	34	41	88	135	623	697	46	15	4	3
Pohjentrek	3.341	3.263	2.277	2.340	4.645	5.444	2.077	1.743	2.865	1.998	15	26	74	93	358	422	21	17	1	1
Gondang Wetan	5.829	5.384	4.403	4.704	7.561	9.399	4.456	3.930	5.188	3.394	45	60	129	168	720	842	54	27	2	2
Winongan	4.046	3.880	3.037	3.291	8.853	10.991	3.242	2.191	2.990	1.778	17	36	65	100	295	327	15	7	1	-
Grati	8.344	8.431	5.460	5.917	13.551	16.058	4.950	4.086	6.210	4.174	29	37	147	262	835	1.070	29	30	7	-
Nguling	6.806	7.330	5.257	5.704	10.848	12.953	3.864	3.011	3.332	2.018	30	34	69	111	365	406	23	20	2	4
Lekok	9.108	9.515	5.965	6.396	17.206	18.924	3.042	2.235	2.170	1.270	14	23	31	58	239	261	14	4	3	5
Rejoso	4.808	4.458	3.364	3.680	7.324	8.718	3.574	3.040	4.332	2.866	29	51	72	124	439	573	28	18	4	1
Tosar	1.533	1.463	1.455	1.441	4.380	4.293	1.202	1.312	644	589	10	18	14	25	86	143	4	1	-	-
Total	164.841	160.601	117.027	127.568	233.604	272.699	114.467	103.251	148.923	112.065	842	1.279	2.988	4.505	17.984	20.568	1.032	657	90	46

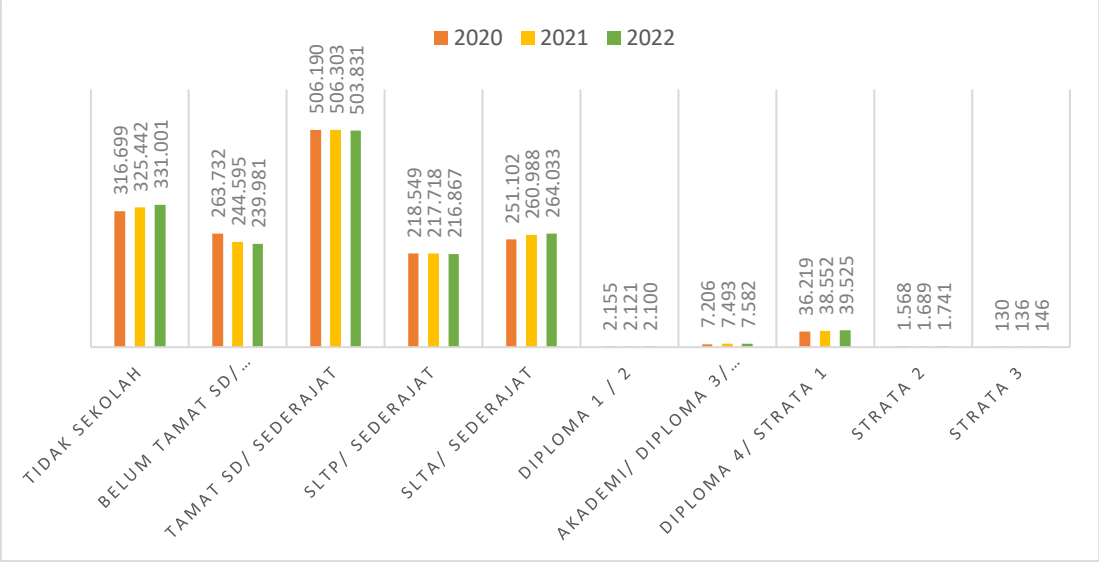
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2022)

Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah		Belum Tamat SD/Sederajat		Tamat SD/Sederajat		SLTP/Sederajat		SLTA/Sederajat		Diploma I/II		Akademi/ Diploma III/S.Muda		Diploma IV/Strata		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Purwodadi	7.112	6.723	4.593	4.747	12.149	13.361	5.388	4.893	5.368	4.117	35	48	94	146	597	732	42	25	2	2
Tutur	4.757	4.590	3.485	3.550	12.089	12.323	3.412	3.298	2.980	2.475	29	36	57	95	399	500	26	14	4	1
Puspo	2.364	2.296	3.462	3.851	5.973	6.152	1.004	905	744	486	9	12	26	41	101	108	5	2	0	2
Lumbang	3.282	3.361	2.948	3.216	8.522	9.108	1.676	1.424	835	482	20	13	23	33	136	121	4	1	1	0
Pasrepan	6.248	6.598	4.475	5.041	11.039	12.103	2.166	1.487	1.389	860	15	14	33	55	175	180	10	4	3	2
Kejayan	7.155	7.402	5.665	6.581	11.388	13.862	3.908	2.672	3.643	2.266	31	35	57	126	364	389	20	7	3	4
Wonorejo	6.180	5.966	5.112	5.879	10.111	12.598	4.072	3.009	3.566	2.324	25	39	69	122	453	499	26	18	3	4
Purwosari	9.483	8.769	5.703	6.113	10.267	12.150	7.269	6.787	8.508	6.831	44	77	179	238	1.074	1.238	76	38	11	4
Sukorejo	9.429	8.985	5.798	6.407	10.129	12.515	7.299	6.955	9.535	7.399	37	75	178	233	1.086	1.247	66	50	5	3
Prigen	8.488	8.059	5.564	5.876	10.953	12.393	7.618	7.474	10.329	8.157	58	89	143	227	1.077	1.153	53	32	5	0
Pandaan	11.645	11.020	6.171	6.635	8.614	10.846	9.191	9.409	16.639	13.778	79	139	461	602	2.564	2.842	131	115	5	3
Gempol	13.774	12.895	9.012	10.544	9.301	10.961	10.989	11.091	19.349	15.545	72	131	326	538	1.927	2.229	124	81	7	1
Beji	8.314	7.924	4.558	4.648	7.322	9.430	7.637	8.083	14.284	11.242	65	112	232	424	1.508	1.953	87	53	3	5
Bangil	8.124	7.541	4.663	4.907	5.793	7.792	6.017	6.471	14.073	11.827	67	100	328	472	2.437	2.652	114	84	17	3
Rembang	7.776	8.209	5.841	7.039	9.124	11.252	4.463	3.562	5.159	3.501	30	36	101	135	370	449	27	12	1	1
Kraton	8.939	8.574	6.902	7.653	15.340	18.540	5.397	3.985	6.063	3.689	33	39	92	139	638	732	49	15	4	3
Pohjentrek	3.384	3.321	2.202	2.297	4.596	5.383	2.083	1.726	2.911	2.031	15	27	72	92	362	431	24	19	1	1
Gondangwetan	5.978	5.536	4.262	4.579	7.551	9.392	4.459	3.913	5.251	3.488	42	58	125	181	727	879	56	31	2	2
Winongan	4.156	3.987	2.998	3.238	8.747	10.902	3.199	2.223	3.012	1.810	16	32	64	101	303	334	16	7	1	0
Grati	8.425	8.545	5.357	5.824	13.453	16.010	4.915	4.095	6.293	4.242	28	36	141	265	853	1.106	33	34	8	0
Nguling	6.932	7.420	5.139	5.654	10.813	12.923	3.819	3.011	3.373	2.021	28	33	67	116	368	418	22	18	2	4
Lekok	9.317	9.722	5.789	6.236	17.042	18.846	3.053	2.204	2.187	1.299	14	22	31	58	252	265	15	4	3	4
Rejoso	4.862	4.483	3.315	3.637	7.247	8.712	3.589	3.043	4.471	2.959	29	49	77	128	452	603	28	18	4	2
Tosari	1.505	1.446	1.399	1.416	4.377	4.337	1.204	1.320	653	589	9	18	13	26	92	150	4	1	0	0

Kecamatan	Tidak/Belum Sekolah		Belum Tamat SD/Sederajat		Tamat SD/Sederajat		SLTP/Sederajat		SLTA/Sederajat		Diploma I/II		Akademi/ Diploma III/S.Muda		Diploma IV/Strata		Strata II		Strata III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Kab. Pasuruan	167.629	163.372	114.413	125.568	231.940	271.891	113.827	103.040	150.615	113.418	830	1.270	2.989	4.593	18.315	21.210	1.058	683	95	51

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2020

Kecamatan	Belum/ Tidak Bekerja	Urus Rumah Tangga	Pelajar/ Mahasiswa	PNS/ TNI/Polri/ Pensiunan	Petani/ Peternak/ Nelayan	Buruh Tani/ Ternak/ Nelayan	Perdagangan/ Industri/ Konstruksi/ Transportasi	Buruh Harian Lepas	Karyawan Swasta/ BUMN/ BUMD/ Honorer	Dokter/ Bidan/ Perawa/ Apoteker / Psikolog	Guru/ Dosen	PRT	Tukang Batu/ Kayu	Pedagang/ Wiraswasta	Kepala/ Perangkat Desa	Lainnya
Purwodadi	15.435	11.331	9.789	778	8.919	734	55	268	19.434	39	421	31	31	2.718	43	
Tutur	9.794	4.952	7.215	352	19.312	181	46	30	2.634	19	324	16	7	8.988	17	
Puspo	5.632	6.742	3.312	208	7.943	54	11	22	549	4	49	4	8	3.078	14	
Lumbang	7.608	1.942	3.306	164	17.829	249	23	35	800	9	165	3	13	2.901	56	
Pasrepan	14.244	5.353	5.139	179	14.764	541	105	190	1.278	24	155	27	72	9.575	28	
Kejayan	14.048	9.158	10.355	453	13.833	1.773	94	599	11.029	45	338	17	75	3.449	49	
Wonorejo	13.168	7.283	10.014	410	10.500	1.204	35	772	11.254	38	440	10	12	4.374	74	
Purwosari	19.063	6.267	12.226	999	9.108	421	65	184	29.164	52	620	15	43	5.736	54	
Sukorejo	19.246	9.605	13.651	631	9.152	263	49	232	23.775	63	649	12	12	9.852	83	
Prigen	17.610	8.398	13.590	660	5.674	84	38	97	35.171	51	551	13	24	5.637	19	
Pandaan	25.585	12.788	16.963	1.491	3.888	666	79	336	38.032	152	1.130	26	37	8.364	68	
Gempol	28.873	13.477	21.406	1.805	3.168	444	204	302	40.061	186	1.052	20	18	17.775	31	
Beji	16.866	8.140	16.667	1.532	2.768	325	66	76	33.358	161	901	6	53	5.812	22	
Bangil	17.695	14.700	16.345	2.213	1.010	123	102	219	17.811	157	1.348	23	48	11.878	28	
Rembang	15.465	9.436	10.668	342	7.516	2.409	133	1.010	13.126	56	463	15	103	5.134	80	
Kraton	20.084	16.856	15.432	622	8.497	512	210	363	16.653	47	564	51	156	6.725	91	
Pohjentrek	7.088	6.431	5.569	394	754	311	98	166	7.557	16	267	19	207	1.789	49	
Gondang Wetan	13.593	11.206	9.637	1.087	2.225	1.531	71	317	7.209	42	367	76	309	8.085	63	
Winongan	9.946	8.460	7.467	448	6.724	974	48	312	7.201	39	205	14	94	3.113	61	
Grati	18.758	17.058	11.817	1.206	5.802	838	66	646	14.370	92	579	43	271	7.716	45	
Nguling	15.285	9.733	8.156	484	8.994	1.438	108	638	3.246	53	288	63	195	13.520	73	
Lekok	21.971	15.353	10.991	209	11.943	3.939	94	1.268	2.278	15	268	155	69	8.042	54	
Rejoso	12.274	9.180	6.915	512	2.224	1.611	83	877	9.892	32	369	41	370	2.759	79	
Tosari	3.382	179	2.267	108	11.622	14	10	9	192	6	98	0	0	942	3	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022

Kecamatan	Belum/Tidak Bekerja		Aparatur/Pejabat Negara		Tenaga Pengajar		Wiraswasta		Pertanian/Peternakan		Nelayan		Agama& Kepercayaan		Pelajar/ Mahasiswa		Tenaga Kesehatan		Pensiunan		Lainnya	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Purwodadi	8.379	7.680	421	178	132	304	16.215	6.858	5.177	4.063	2	1	4	2	4.871	3.953	11	31	144	80	24	11.644
Tutur	5.397	5.131	161	124	94	226	7.726	4.290	10.306	8.843	1	1	4	1	3.483	2.974	3	17	47	25	16	5.250
Puspo	2.829	2.650	109	49	21	33	3.005	770	5.984	1.927	2	0	0	0	1.673	1.379	2	2	43	20	20	7.025
Lumbang	3.956	3.556	151	30	71	95	3.114	918	8.355	9.583	2	0	3	0	1.745	1.312	2	7	39	12	9	2.246
Pasrepan	7.404	6.428	120	33	63	95	8.154	3.504	7.119	8.166	5	1	5	3	2.633	2.140	4	22	21	23	25	5.929
Kejayan	7.655	7.166	291	102	127	222	11.853	3.793	6.850	8.549	20	2	12	1	5.320	3.719	8	39	63	41	35	9.710
Wonorejo	7.199	6.533	252	96	166	272	11.716	5.110	5.007	6.539	8	0	3	1	5.165	3.939	9	29	74	49	18	7.890
Purwosari	10.627	9.505	549	305	235	419	20.499	15.418	4.326	4.824	1	1	0	0	6.219	5.099	10	47	142	64	6	6.563
Sukorejo	10.467	9.508	416	179	220	460	21.244	12.982	4.037	4.957	2	3	4	2	7.055	5.732	15	51	82	45	20	9.950
Prigen	9.493	8.887	373	160	199	378	24.627	16.660	2.594	2.891	2	1	8	1	6.848	5.748	11	50	109	45	24	8.639
Pandaan	13.707	12.620	813	462	385	825	29.252	18.556	2.216	2.098	2	0	6	3	8.823	7.534	45	123	208	144	43	13.024
Gempol	15.420	14.248	1.130	411	349	762	35.170	23.691	1.590	1.825	4	1	3	2	10.911	9.067	35	167	232	86	37	13.756
Beji	8.969	8.500	1.083	322	313	661	23.592	16.579	1.261	1.574	116	1	6	0	8.485	7.459	21	157	155	81	9	8.540
Bangil	9.267	8.558	1.033	590	473	918	21.279	8.857	647	376	44	0	4	4	8.374	7.123	40	134	362	339	110	14.950
Rembang	8.320	7.951	290	77	160	300	13.887	6.369	4.507	5.124	31	4	17	6	5.594	4.249	12	52	46	31	28	10.033
Kraton	10.546	9.722	430	156	235	353	19.027	5.415	2.879	3.690	2.054	117	11	3	8.170	6.069	12	48	60	58	33	17.738
Pohjentrek	3.900	3.612	253	103	86	179	7.947	1.953	414	602	17	1	8	1	2.947	2.155	4	15	62	30	12	6.677
Gondangwetan	7.287	6.407	564	318	134	254	13.213	3.399	1.769	1.792	24	1	11	2	5.185	4.043	15	39	146	93	105	11.711
Winongan	4.844	4.469	277	124	72	133	9.318	1.842	3.567	3.791	20	2	8	1	4.321	3.339	6	33	66	38	13	8.862
Grati	9.877	9.184	598	373	161	444	18.814	4.633	3.400	3.072	24	1	2	1	6.154	4.677	30	82	176	94	270	17.596
Nguling	7.849	7.294	343	134	100	195	12.149	5.777	4.206	4.541	1.409	54	4	0	4.387	3.373	17	49	49	41	50	10.160
Lekok	11.369	10.469	162	52	106	168	9.098	3.177	6.060	4.208	5.322	149	7	0	5.495	4.268	3	12	30	6	51	16.151

Kecamatan	Belum/Tidak Bekerja		Aparatur/Pejabat Negara		Tenaga Pengajar		Wiraswasta		Pertanian/Peternakan		Nelayan		Agama& Kepercayaan		Pelajar/ Mahasiswa		Tenaga Kesehatan		Pensiunan		Lainnya	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Rejoso	6.437	5.766	351	164	109	298	11.310	3.178	1.896	1.604	91	13	8	1	3.759	2.928	14	33	78	24	21	9.625
Tosari	1.686	1.629	59	34	28	78	660	502	5.709	5.880	0	0	0	0	1.103	979	1	6	8	7	2	188

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 19 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021

Kecamatan	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		Konghuchu		Kepercayaan	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Purwodadi	35.065	34.245	210	216	41	40	3	7	4	7	0	0	0	0
Tutur	25.862	25.300	228	230	39	27	1.071	1.071	1	0	0	0	0	0
Puspo	13.351	13.400	11	7	1	0	436	473	1	0	0	0	0	0
Lumbang	17.447	17.662	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0
Pasrepan	25.564	26.156	9	15	6	10	0	2	6	5	0	0	0	0
Kejayan	32.275	33.265	24	23	3	7	1	1	0	0	0	0	0	0
Wonorejo	29.445	30.174	48	56	1	3	0	0	3	6	0	0	0	0
Purwosari	42.104	41.718	123	144	46	61	10	12	8	9	0	0	0	0
Sukorejo	43.015	43.232	241	265	139	131	22	19	16	10	2	3	0	0
Prigen	43.464	42.507	379	416	58	54	7	7	17	10	1	1	0	0
Pandaan	54.416	54.236	749	779	446	480	34	22	57	50	2	1	0	0
Gempol	64.694	63.772	534	608	179	197	33	27	18	25	0	1	0	0
Beji	43.663	43.401	101	85	46	57	22	19	4	3	0	0	0	0
Bangil	41.646	41.917	176	211	35	41	6	6	20	23	0	0	0	0
Rembang	32.733	33.980	33	40	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Kraton	43.337	43.088	31	24	20	23	9	8	3	2	0	0	2	2
Pohjentrek	15.569	15.238	64	78	22	29	1	0	12	9	0	0	0	0
Gondang Wetan	28.349	27.865	70	71	30	36	2	2	1	3	0	0	1	0
Winongan	22.498	22.525	4	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Grati	39.499	39.996	61	65	15	10	3	3	6	5	0	0	0	0
Nguling	30.534	31.552	39	45	20	16	0	0	3	4	0	0	10	11

Kecamatan	Islam		Kristen		Katolik		Hindu		Budha		Konghuchu		Kepercayaan	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Lekok	37.764	38.640	29	22	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejoso	23.808	23.354	26	37	12	14	0	0	3	6	0	0	0	0
Tosari	3.378	3.285	151	165	1	4	5.795	5.831	3	0	0	0	0	0

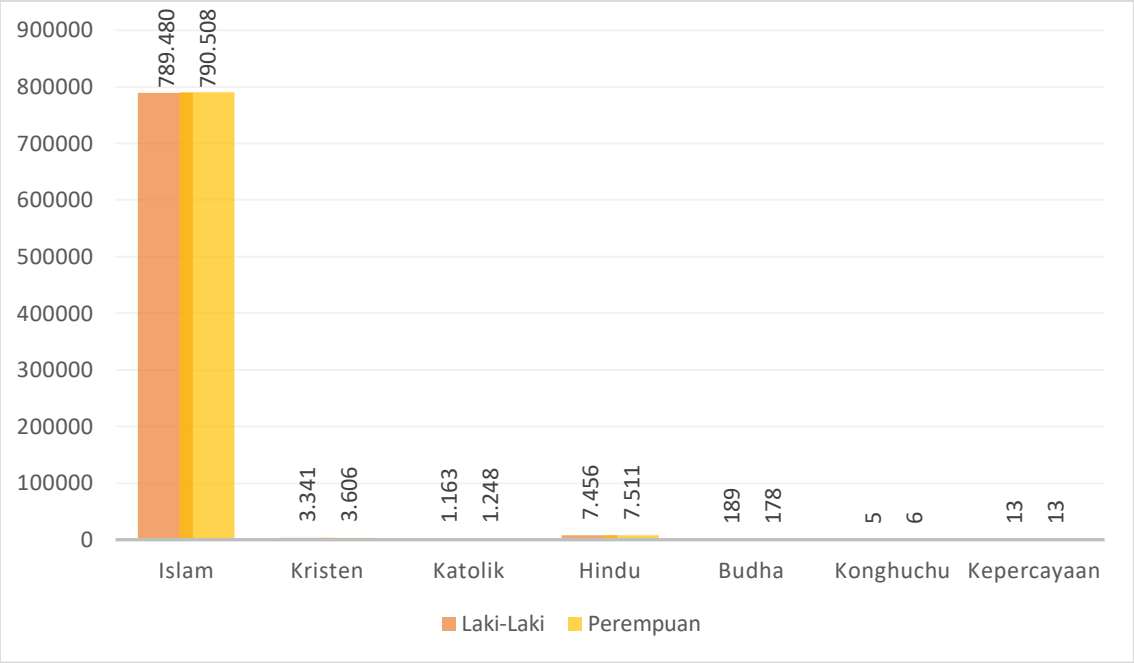
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022

Kecamatan	Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Khonghuchu		Kepercayaan	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Purwodadi	35.126	34.527	206	218	42	38	3	7	3	4	0	0	0	0
Tutur	25.894	25.527	223	234	40	27	1.080	1.094	1	0	0	0	0	0
Puspo	13.241	13.380	10	7	1	0	435	468	1	0	0	0	0	0
Lumbang	17.445	17.754	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0
Pasrepan	25.534	26.312	9	15	6	10	0	2	4	5	0	0	0	0
Kejayan	32.208	33.313	22	23	3	7	1	1	0	0	0	0	0	0
Wonorejo	29.566	30.391	47	56	1	4	0	0	3	7	0	0	0	0
Purwosari	42.417	42.011	124	145	52	68	13	12	8	9	0	0	0	0
Sukorejo	43.142	43.439	247	268	135	129	21	20	15	10	2	3	0	0
Prigen	43.836	42.976	368	410	57	54	7	7	19	12	1	1	0	0
Pandaan	54.223	54.058	742	778	443	480	33	22	56	50	2	1	1	0
Gempol	64.115	63.156	534	611	182	197	32	27	18	24	0	1	0	0
Beji	43.842	43.711	97	84	47	56	20	20	4	3	0	0	0	0
Bangil	41.400	41.569	175	211	35	41	6	6	17	22	0	0	0	0
Rembang	32.858	34.154	33	40	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
Kraton	43.395	43.314	32	26	16	17	9	9	3	2	0	0	2	1
Pohjentrek	15.552	15.212	63	78	22	29	1	0	12	9	0	0	0	0
Gondangwetan	28.348	27.942	72	74	29	38	2	2	1	3	0	0	1	0
Winongan	22.506	22.629	4	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Grati	39.423	40.070	61	69	14	10	3	3	5	5	0	0	0	0

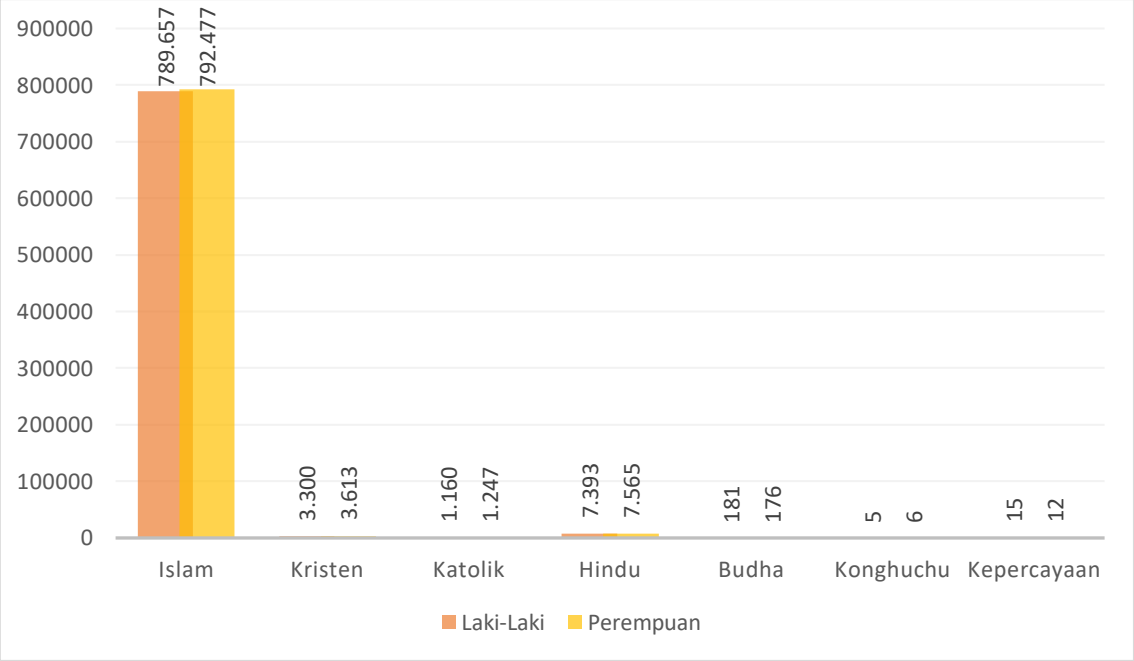
Kecamatan	Islam		Kristen		Katholik		Hindu		Budha		Khonghuchu		Kepercayaan	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Nguling	30.497	31.548	34	40	19	15	0	0	2	4	0	0	11	11
Lekok	37.676	38.636	25	22	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejoso	24.034	23.576	25	37	12	15	0	0	3	6	0	0	0	0
Tosari	3.379	3.272	147	163	1	4	5.726	5.864	3	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022

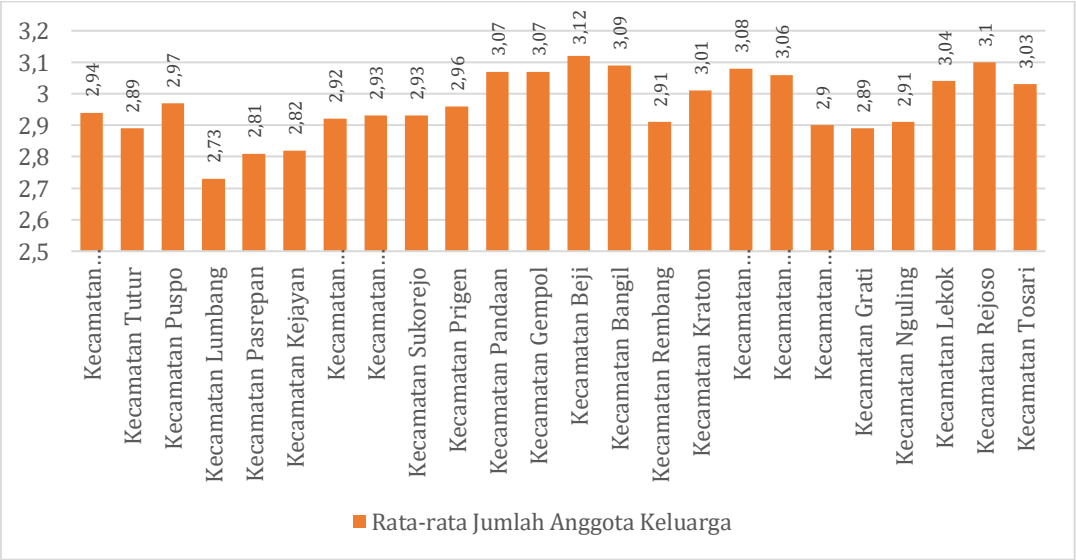
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 21 Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga (Tahun 2020)

Kecamatan	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	Satuan
Purwodadi	2,94	Jiwa

Kecamatan	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	Satuan
Tutur	2,89	Jiwa
Puspo	2,97	Jiwa
Lumbang	2,73	Jiwa
Pasrepan	2,81	Jiwa
Kejayan	2,82	Jiwa
Wonorejo	2,92	Jiwa
Purwosari	2,93	Jiwa
Sukorejo	2,93	Jiwa
Prigen	2,96	Jiwa
Pandaan	3,07	Jiwa
Gempol	3,07	Jiwa
Beji	3,12	Jiwa
Bangil	3,09	Jiwa
Rembang	2,91	Jiwa
Kraton	3,01	Jiwa
Pohjentrek	3,08	Jiwa
Gondang Wetan	3,06	Jiwa
Winongan	2,90	Jiwa
Grati	2,89	Jiwa
Nguling	2,91	Jiwa
Lekok	3,04	Jiwa
Rejoso	3,10	Jiwa
Tosari	3,03	Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



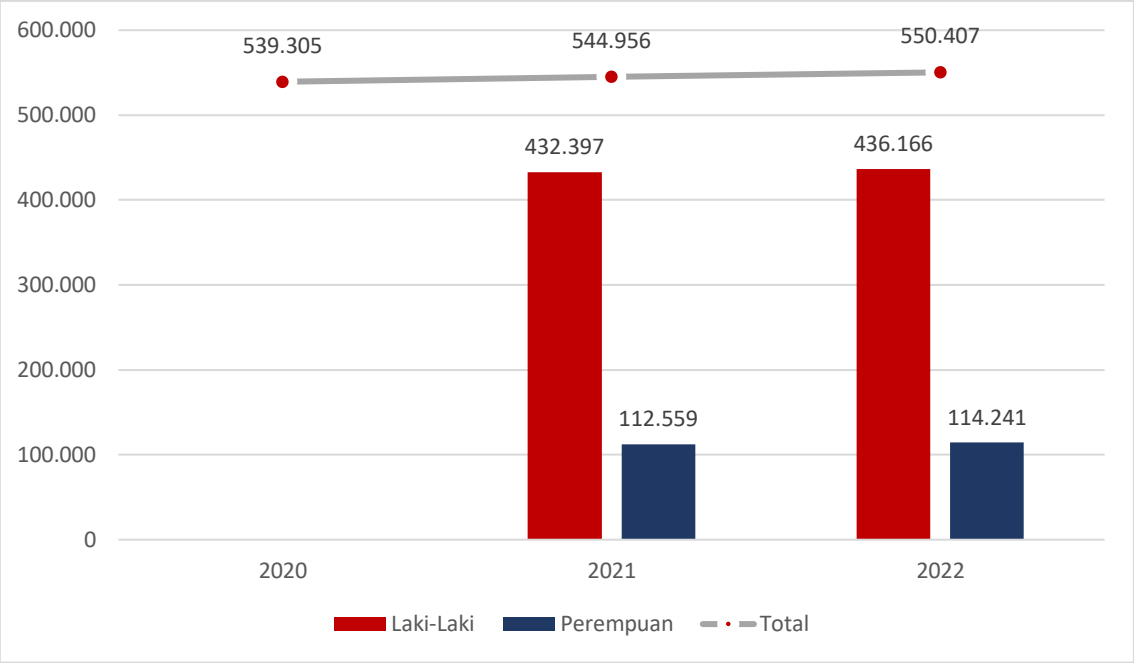
Gambar 4. 12 Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga (Tahun 2020)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 22 Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2020-2022

Kecamatan	2020	2021		2022	
		L	P	L	P
Purwodadi	23.872	19.535	4.480	19.772	4.510
Tutur	18.677	15.625	3.230	15.904	3.213
Puspo	9.299	7.861	1.528	7.981	1.547
Lumbang	12.878	10.749	2.314	10.868	2.327
Pasrepan	18.441	14.319	4.439	14.556	4.508
Kejayan	23.227	17.788	5.764	18.007	5.797
Wonorejo	20.416	15.591	5.089	15.818	5.131
Purwosari	28.667	23.459	5.519	23.733	5.617
Sukorejo	29.847	23.619	6.351	23.761	6.438
Prigen	29.580	24.325	5.650	24.470	5.748
Pandaan	35.819	29.707	6.977	29.778	7.207
Gempol	41.963	34.459	8.117	34.491	8.441
Beji	27.813	23.319	5.112	23.523	5.258
Bangil	27.195	21.064	6.293	21.072	6.430
Rembang	22.786	17.394	5.696	17.598	5.744
Kraton	28.915	22.606	6.411	22.842	6.472
Pohjentrek	10.000	8.005	2.118	8.075	2.147
Gondang Wetan	18.422	14.415	4.050	14.606	4.106
Winongan	15.605	12.054	3.594	12.107	3.633
Grati	27.659	21.927	5.902	22.104	5.983
Nguling	21.451	16.832	4.630	16.967	4.628
Lekok	25.274	20.112	5.338	20.328	5.369
Rejoso	15.290	12.500	2.957	12.620	3.006
Tosari	6.209	5.132	1.000	5.185	981
Jumlah	539.305	432.397	112.559	436.166	114.241

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 13 Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2020-2022

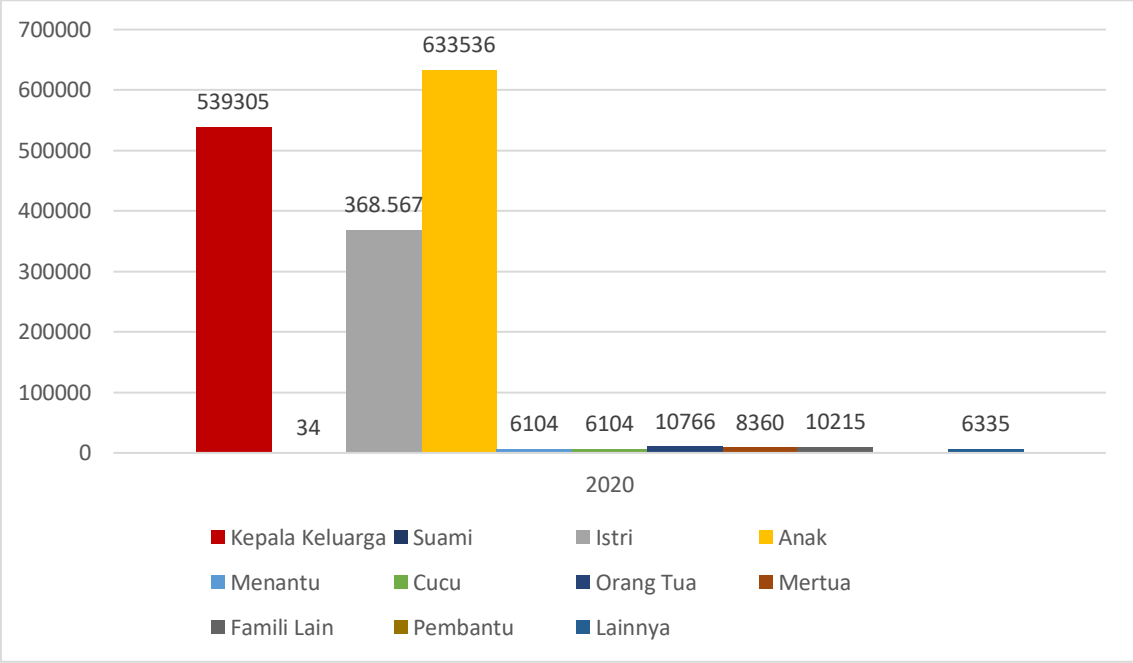
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 23 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Tahun 2020

Kecamatan	Kepala Keluarga	Suami	Istri	Anak	Menantu	Cucu	Orang Tua	Mertua	Famili Lain	Pembantu	Lainnya
Purwodadi	23.872	0	16.717	26.731	327	327	492	368	347	0	266
Tutur	18.677	1	13.268	19.158	365	365	513	382	325	1	199
Puspo	9.299	0	6.734	9.842	270	270	253	210	237	0	123
Lumbang	12.878	0	9.265	11.227	295	295	262	262	169	0	112
Pasrepan	18.441	2	12.084	19.108	141	141	353	215	385	1	276
Kejayan	23.227	1	15.136	24.931	137	137	416	280	338	0	276
Wonorejo	20.416	1	13.192	23.450	225	225	401	254	396	0	372
Purwosari	28.667	2	20.192	32.892	172	172	443	329	376	0	303
Sukorejo	29.847	2	19.835	34.186	370	370	698	481	500	2	330
Prigen	29.580	1	20.371	33.850	473	473	705	539	551	2	333
Pandaan	35.819	4	25.317	44.786	356	356	751	507	784	8	357
Gempol	41.963	9	29.335	52.677	670	670	818	632	863	4	385
Beji	27.813	0	19.922	35.985	317	317	558	530	536	0	299
Bangil	27.195	1	17.656	36.455	171	171	361	287	767	6	364
Rembang	22.786	2	14.755	26.117	214	214	413	256	275	0	650
Kraton	28.915	1	19.116	35.872	208	208	564	451	636	0	278
Pohjentrek	10.000	0	6.832	13.016	36	36	188	140	189	0	148
Gondang Wetan	18.422	0	12.308	23.826	120	120	319	219	357	2	151
Winongan	15.605	1	10.247	17.983	66	66	276	145	269	0	105
Grati	27.659	0	19.235	30.773	116	116	415	359	448	0	289

Kecamatan	Kepala Keluarga	Suami	Istri	Anak	Menantu	Cucu	Orang Tua	Mertua	Famili Lain	Pembantu	Lainnya
Nguling	21.451	2	14.418	23.264	541	541	414	440	426	0	164
Lekok	25.274	0	17.477	31.468	152	152	375	380	498	1	213
Rejoso	15.290	0	10.831	19.697	123	123	345	251	304	0	146
Tosari	6.209	4	4.324	6.242	239	239	433	443	239	0	196

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 14 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Lainnya Tahun 2020

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 24 Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Tahun 2022

Kecamatan	Kepala Keluarga	Suami	Istri	Anak	Menantu	Cucu	Orang Tua	Mertua	Famili Lain	Pembantu	Lainnya
Purwodadi	23.872	0	16.717	26.731	327	327	492	368	347	0	266
Tutur	18.677	1	13.268	19.158	365	365	513	382	325	1	199
Puspo	9.299	0	6.734	9.842	270	270	253	210	237	0	123
Lumbang	12.878	0	9.265	11.227	295	295	262	262	169	0	112
Pasrepan	18.441	2	12.084	19.108	141	141	353	215	385	1	276
Kejayan	23.227	1	15.136	24.931	137	137	416	280	338	0	276
Wonorejo	20.416	1	13.192	23.450	225	225	401	254	396	0	372
Purwosari	28.667	2	20.192	32.892	172	172	443	329	376	0	303
Sukorejo	29.847	2	19.835	34.186	370	370	698	481	500	2	330
Prigen	29.580	1	20.371	33.850	473	473	705	539	551	2	333
Pandaan	35.819	4	25.317	44.786	356	356	751	507	784	8	357
Gempol	41.963	9	29.335	52.677	670	670	818	632	863	4	385
Beji	27.813	0	19.922	35.985	317	317	558	530	536	0	299
Bangil	27.195	1	17.656	36.455	171	171	361	287	767	6	364
Rembang	22.786	2	14.755	26.117	214	214	413	256	275	0	650
Kraton	28.915	1	19.116	35.872	208	208	564	451	636	0	278
Pohjentrek	10.000	0	6.832	13.016	36	36	188	140	189	0	148
Gondang Wetan	18.422	0	12.308	23.826	120	120	319	219	357	2	151
Winongan	15.605	1	10.247	17.983	66	66	276	145	269	0	105
Grati	27.659	0	19.235	30.773	116	116	415	359	448	0	289
Nguling	21.451	2	14.418	23.264	541	541	414	440	426	0	164
Lekok	25.274	0	17.477	31.468	152	152	375	380	498	1	213
Rejoso	15.290	0	10.831	19.697	123	123	345	251	304	0	146
Tosari	6.209	4	4.324	6.242	239	239	433	443	239	0	196
Jumlah	539.305	34	368.567	633.536	6.104	6.104	10.766	8.360	10.215	27	6.335

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 25 Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

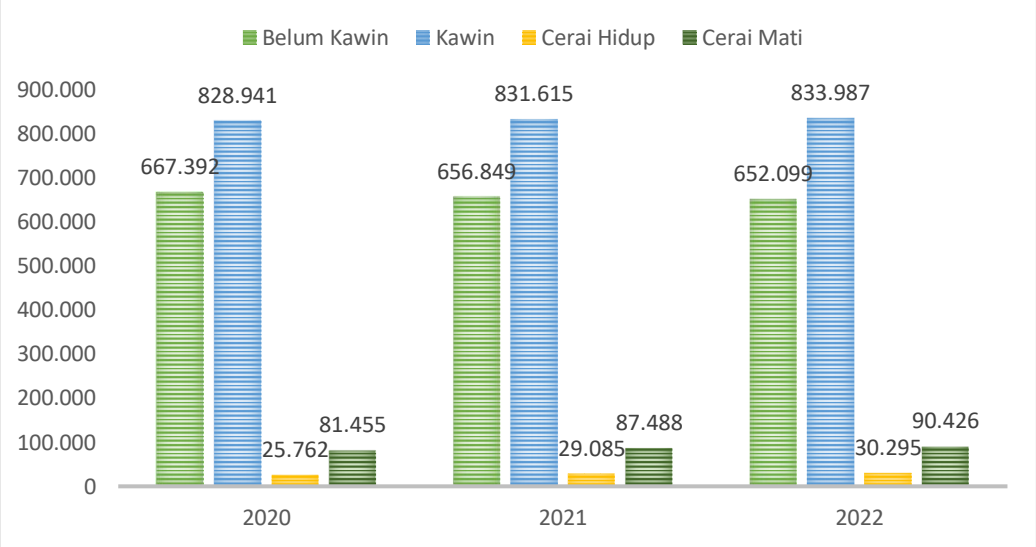
Kecamatan	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Purwodadi	5.565	5.240	5.398	5.345	5.013	5.545	5.578	5.175	4.690	4.525	3.467	2.327	1.445	1.744
Tutur	3.729	3.761	4.121	3.886	4.026	4.605	4.094	4.283	4.123	3.689	2.936	1.851	1.216	1.396
Puspo	2.071	2.086	2.191	1.975	2.109	2.311	2.126	1.968	2.015	1.830	1.510	924	585	612
Lumbang	2.426	2.359	2.524	2.430	2.696	2.864	2.966	2.874	2.729	2.314	1.830	1.212	743	826
Pasrepan	3.736	4.029	4.388	3.970	3.791	4.123	4.019	3.966	3.534	2.948	2.668	1.680	1.011	1.075
Kejayan	4.990	4.738	5.351	4.961	4.603	4.872	5.028	4.973	4.782	3.953	3.230	2.010	1.354	1.482
Wonorejo	4.692	4.499	4.884	4.660	4.147	4.469	4.613	4.343	4.175	3.532	2.981	1.716	1.188	1.229
Purwosari	6.484	6.153	6.440	6.676	6.268	6.793	6.477	6.383	5.836	5.188	3.916	2.597	1.530	1.696
Sukorejo	6.862	6.577	6.731	6.694	6.443	7.220	6.726	6.771	6.349	5.237	4.040	2.574	1.580	1.837
Prigen	6.794	6.495	6.460	6.661	6.843	7.545	6.840	6.464	6.036	5.378	4.378	2.888	1.538	1.741
Pandaan	8.816	8.368	8.761	8.139	7.720	9.108	8.941	8.829	8.072	6.596	4.897	3.316	1.827	1.659
Gempol	10.331	10.459	10.476	10.155	9.157	10.244	10.508	10.564	9.753	7.566	5.510	3.546	1.845	2.026
Beji	6.929	6.953	6.904	7.098	6.418	7.157	7.174	7.039	6.313	4.879	3.499	2.104	1.100	1.085
Bangil	6.818	6.873	6.766	6.483	6.021	6.953	6.588	6.078	5.659	4.928	3.835	2.479	1.349	1.311
Rembang	5.360	5.056	5.112	5.222	4.950	5.176	5.248	4.838	4.594	3.570	2.920	1.819	1.222	1.357
Kraton	7.123	7.012	7.156	6.916	6.182	6.875	6.889	6.336	5.781	4.831	3.695	2.420	1.477	1.658
Pohjentrek	2.530	2.431	2.504	2.403	2.259	2.355	2.331	2.286	2.121	1.644	1.377	862	540	554
Gondang Wetan	4.559	4.550	4.804	4.265	3.838	4.326	4.346	4.189	3.713	3.181	2.478	1.626	970	1.137
Winongan	3.600	3.528	3.546	3.352	3.165	3.467	3.550	3.059	2.928	2.762	2.159	1.426	903	1.093
Grati	5.981	6.173	6.296	6.129	5.913	6.650	6.189	5.842	5.457	4.486	3.844	2.468	1.522	1.744
Nguling	4.685	4.440	4.911	4.750	4.668	5.159	4.979	4.551	4.020	3.654	3.031	1.936	1.285	1.367
Lekok	6.482	6.434	6.880	6.208	6.168	6.305	5.889	5.114	4.486	3.589	3.040	1.655	1.198	1.242
Rejoso	3.794	3.941	3.794	3.696	3.402	3.624	3.557	3.499	3.191	2.815	2.096	1.373	845	917
Tosari	1.281	1.392	1.433	1.330	1.355	1.816	1.561	1.287	1.382	1.329	1.102	756	366	397
Jumlah	125.638	123.547	127.831	123.404	117.155	129.562	126.217	120.711	111.739	94.424	74.439	47.565	28.639	31.185

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 26 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan

Status Kawin	2020	2021	2022	Satuan
Belum Kawin	667.392	656.849	652.099	Jiwa
Kawin	828.941	831.615	833.987	Jiwa
Cerai Hidup	25.762	29.085	30.295	Jiwa
Cerai Mati	81.455	87.488	90.426	Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 15 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin Tahun 2020-2022

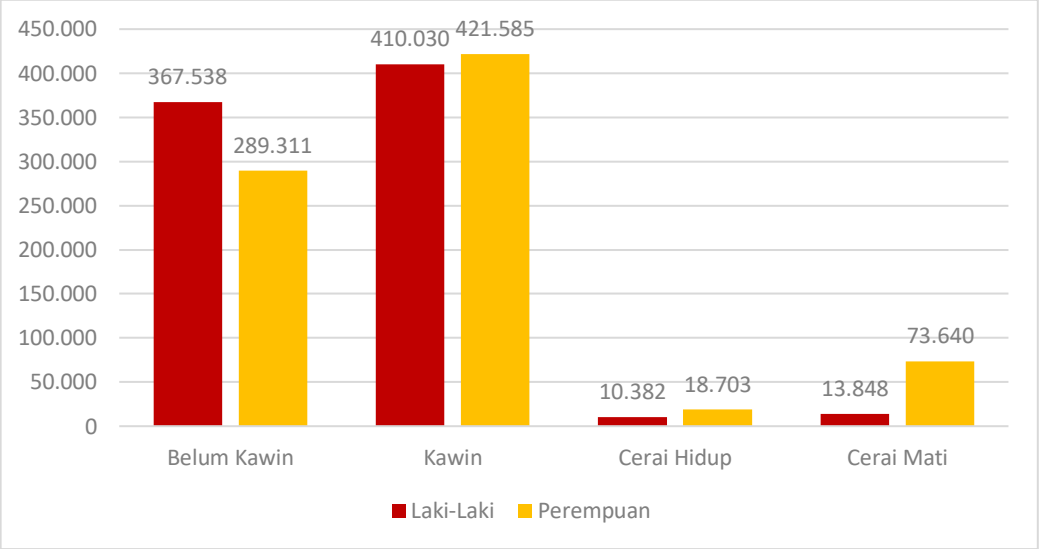
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 27 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawianan, Jenis Kelamin, dan Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Purwodadi	15.547	11.824	18.662	19.051	540	802	574	2.838
Tutur	11.199	8.435	15.158	15.504	335	567	509	2.122
Puspo	5.614	4.397	7.876	8.083	118	266	192	1.134
Lumbang	6.417	5.024	10.610	10.894	153	314	278	1.450
Pasrepan	11.234	8.744	13.681	14.215	252	548	433	2.689
Kejayan	14.591	11.269	16.899	17.617	330	560	507	3.883
Wonorejo	13.899	10.791	14.851	15.447	309	673	513	3.416
Purwosari	18.977	15.018	21.917	22.462	715	1.074	800	3.511
Sukorejo	19.821	15.643	22.240	22.845	695	1.036	817	4.287
Prigen	19.719	15.365	22.722	23.065	874	1.581	981	3.347
Pandaan	25.815	21.012	27.685	28.250	921	1.324	1.068	4.811
Gempol	30.436	24.142	32.456	33.279	1.056	2.137	1.077	4.549
Beji	20.573	16.657	21.981	22.453	586	1.227	771	3.354
Bangil	20.898	17.112	19.332	19.717	690	1.222	820	3.976
Rembang	15.364	12.514	16.637	17.422	276	596	488	3.474
Kraton	20.979	16.068	21.379	22.126	364	735	713	4.272

Kecamatan	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Pohjentrek	7.722	5.843	7.518	7.765	149	238	285	1.501
Gondang Wetan	14.087	10.554	13.478	13.903	304	520	518	2.933
Winongan	10.627	7.957	11.265	11.565	278	567	391	2.512
Grati	17.767	13.966	20.695	21.284	453	830	647	3.985
Nguling	13.367	10.843	16.432	16.988	326	651	471	3.109
Lekok	17.770	14.588	19.333	20.064	299	628	390	3.411
Rejoso	11.523	8.740	11.762	12.029	299	461	390	2.299
Tosari	3.592	2.805	5.461	5.557	60	146	215	777
Jumlah	367.538	289.311	410.030	421.585	10.382	18.703	13.848	73.640

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



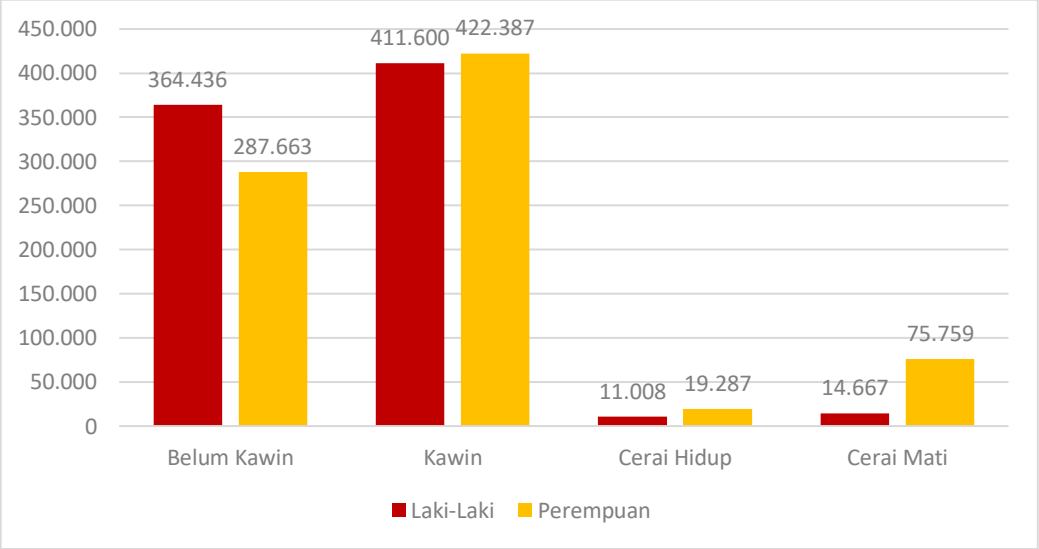
Gambar 4. 16 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2021

Tabel 4. 28 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan, Jenis Kelamin, dan Kecamatan Tahun 2022

Wilayah	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Purwodadi	15.402	11.864	18.814	19.209	557	819	607	2.902
Tutur	10.993	8.409	15.355	15.642	351	593	539	2.238
Puspo	5.401	4.261	7.963	8.155	118	272	206	1.167
Lumbang	6.287	4.975	10.702	10.964	163	322	295	1.498
Pasrepan	10.979	8.636	13.849	14.385	268	564	457	2.759
Kejayan	14.296	11.022	17.056	17.747	349	602	533	3.973
Wonorejo	13.745	10.713	14.999	15.556	343	691	530	3.498
Purwosari	18.959	15.025	22.030	22.483	756	1.112	869	3.625
Sukorejo	19.701	15.559	22.275	22.835	732	1.072	854	4.403
Prigen	19.601	15.340	22.718	23.044	928	1.608	1.041	3.468
Pandaan	25.845	20.994	27.560	28.064	969	1.365	1.126	4.966

Wilayah	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Gempol	30.355	24.138	32.240	32.988	1.115	2.167	1.171	4.723
Beji	20.530	16.718	22.027	22.429	632	1.289	821	3.438
Bangil	20.829	16.979	19.247	19.556	706	1.254	851	4.060
Rembang	15.308	12.475	16.789	17.570	297	615	498	3.536
Kraton	20.782	15.925	21.546	22.268	389	759	740	4.417
Pohjentrek	7.637	5.763	7.542	7.744	161	249	310	1.572
Gondangwetan	13.991	10.524	13.588	13.966	322	534	552	3.035
Winongan	10.520	7.910	11.255	11.560	301	576	436	2.588
Grati	17.559	13.895	20.778	21.330	481	858	688	4.074
Nguling	13.252	10.770	16.458	16.982	348	675	505	3.191
Lekok	17.450	14.284	19.526	20.280	329	667	398	3.429
Rejoso	11.526	8.727	11.803	12.033	327	478	418	2.396
Tosari	3.488	2.757	5.480	5.597	66	146	222	803
Jumlah	364.436	287.663	411.600	422.387	11.008	19.287	14.667	75.759

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 17 Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2022

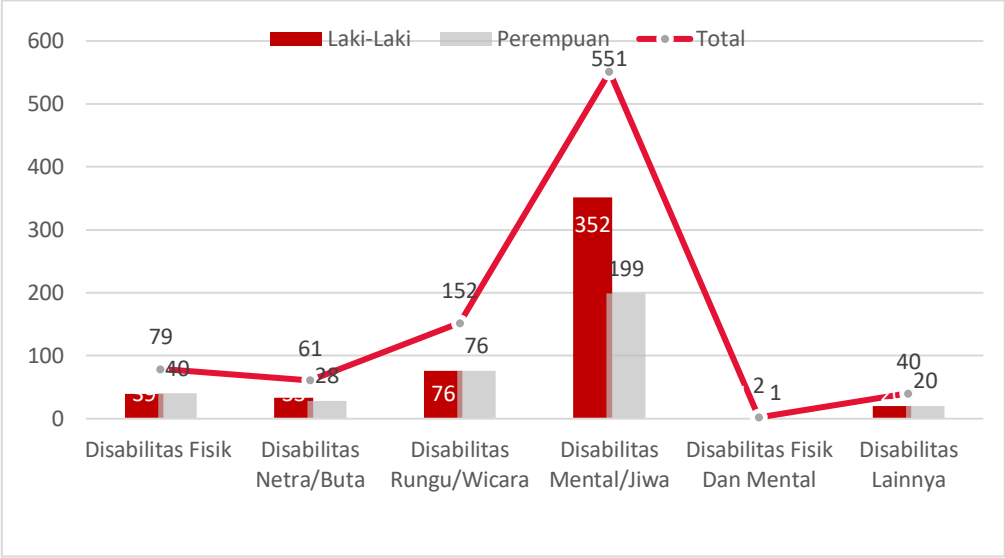
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 4. 29 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenis Disabilitas Tahun 2022

Kecamatan	Disabilitas Fisik		Disabilitas Netra/ Buta		Disabilitas Rungu/Wicara		Disabilitas Mental/Jiwa		Disabilitas Fisik Dan Mental		Disabilitas Lainnya	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Purwodadi	4	1	1	0	2	4	8	8	-	-	-	-
Tutur	3	0	1	0	1	2	1	3	-	-	0	1
Puspo	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Lumbang	-	-	10	12	-	-	2	0	-	-	0	1
Pasrepan	1	2	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-
Kejayan	2	1	0	1	0	2	8	2	-	-	-	-
Wonorejo	-	-	2	0	4	7	4	0	-	-	-	-
Purwosari	3	0	1	1	8	7	15	8	-	-	1	0
Sukorejo	2	2	0	2	7	9	24	18	-	-	-	-
Prigen	2	4	-	-	6	3	26	11	-	-	-	-
Pandaan	2	4	2	1	5	6	48	15	-	-	0	1
Gempol	2	8	4	0	7	9	45	26	-	-	-	-
Beji	3	3	0	4	5	6	31	20	-	-	-	-
Bangil	0	3	2	2	2	2	33	13	-	-	-	-
Rembang	-	-	0	1	3	0	5	6	-	-	13	14
Kraton	3	2	1	1	2	2	14	4	1	0	-	-
Pohjentrek	2	1	-	-	3	0	5	7	-	-	1	0
Gondangwetan	2	1	3	0	5	3	12	10	-	-	1	1
Winongan	2	2	2	1	2	0	14	6	-	-	0	1
Grati	3	1	1	1	4	6	25	21	0	1	2	0
Nguling	-	-	-	-	3	0	5	3	-	-	1	0

Kecamatan	Disabilitas Fisik		Disabilitas Netra/ Buta		Disabilitas Rungu/Wicara		Disabilitas Mental/Jiwa		Disabilitas Fisik Dan Mental		Disabilitas Lainnya	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Lekok	0	3	0	1	2	4	8	6	-	-	1	1
Rejoso	2	2	2	0	4	3	13	6	-	-	-	-
Tosari	1	0	1	0	-	-	0	1	-	-	-	-
Kab. Pasuruan	39	40	33	28	76	76	352	199	1	1	20	20

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Gambar 4. 18 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jenis Disabilitas Tahun 2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

DESKRIPSI

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang telah diatur. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Pada tahun 2017 tercatat bahwa di Kabupaten Pasuruan terdapat 245.345 usaha mikro. Terjadi perubahan secara fluktuatif pada jumlahnya,sehingga pada tahun 2021 Kabupaten Pasuruan memiliki 232.285 usaha mikro.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota tiga tahun berturut-turut dan atau melaksanakan kegiatan usaha. Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pata tahun 2017 terdapat 957 unit koperasi aktif di Kabupaten Pasuruan. Jumlah tersebut meningkat hingga menjadi 1.027 unit koperasi aktif pada tahun 2021. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa koperasi aktif di Kabupaten Pasuruan semakin banyak.

KOPPONTREN merupakan kependekan dari Koperasi Pondok Pesantren. Pada tahun 2017, jumlah KOPPONTREN di Kabupaten Pasuruan sebanyak 59 unit. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga menjadi 61 unit di tahun 2021.

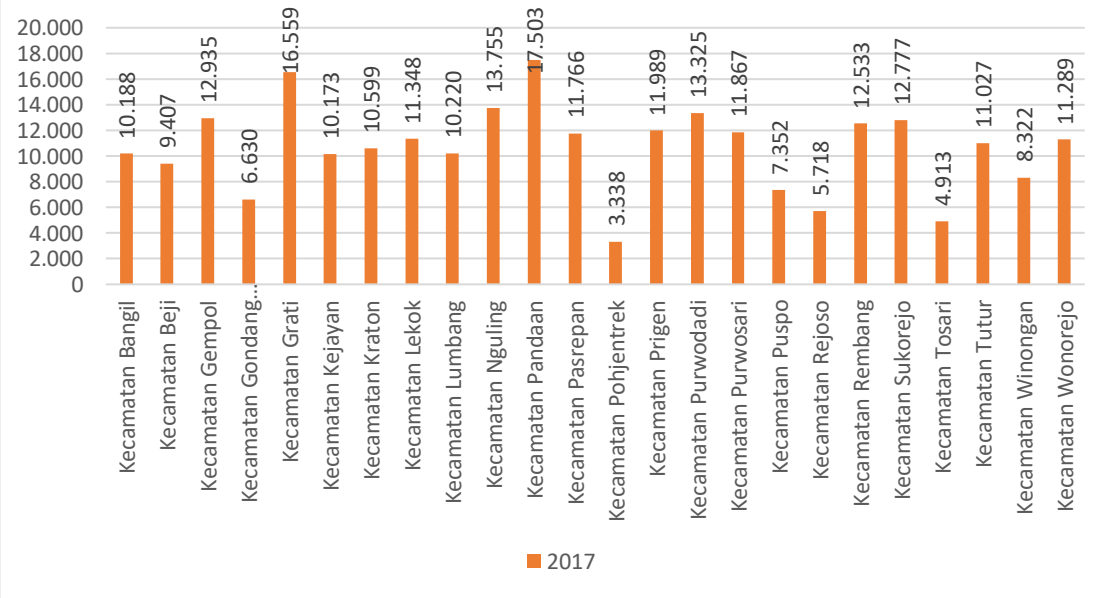
omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual. Jumlah omzet usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.295.048.000.000,00. Setiap tahun jumlah omzet yang dihasilkan selalu mengalami peningkatan. Hingga pada

tahun 2021, jumlah omzet usaha mikro dan koperasi sebesar Rp 1.741.594.266.252,00.

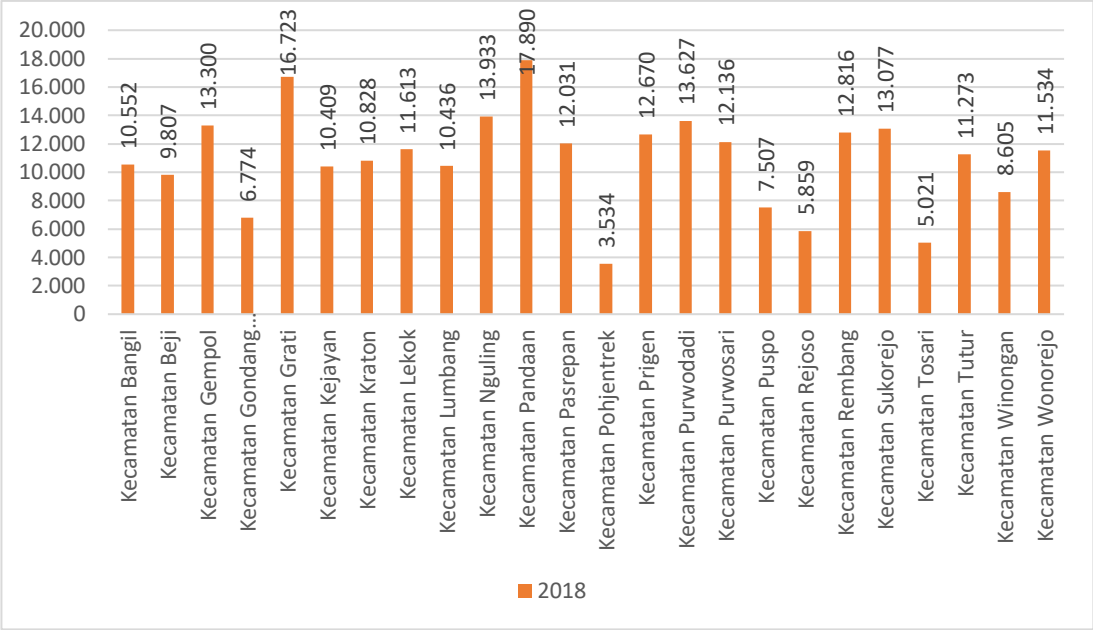
Tabel 5. 1 Jumlah Usaha Mikro

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	10.188	10.552	10.552	10.552	10.552	Unit
Beji	9.407	9.807	9.807	9.807	9.807	Unit
Gempol	12.935	13.300	9.102	9.300	9.300	Unit
Gondang Wetan	6.630	6.774	6.774	6.774	6.774	Unit
Grati	16.559	16.723	4.579	13.138	13.138	Unit
Kejayan	10.173	10.409	10.409	10.409	10.409	Unit
Kraton	10.599	10.828	10.828	10.828	10.828	Unit
Lekok	11.348	11.613	11.613	11.613	11.613	Unit
Lumbang	10.220	10.436	10.436	10.436	10.436	Unit
Nguling	13.755	13.933	6.528	13.933	13.933	Unit
Pandaan	17.503	17.890	8.960	17.890	17.890	Unit
Pasrepan	11.766	12.031	12.031	12.031	12.031	Unit
Pohjentrek	3.338	3.534	3.534	3.534	3.534	Unit
Prigen	11.989	12.670	9.848	11.250	11.250	Unit
Purwodadi	13.325	13.627	5.346	7.565	7.565	Unit
Purwosari	11.867	12.136	8.978	12.136	12.136	Unit
Puspo	7.352	7.507	7.507	7.507	7.507	Unit
Rejoso	5.718	5.859	5.859	5.859	5.859	Unit
Rembang	12.533	12.816	8.655	8.655	8.685	Unit
Sukorejo	12.777	13.077	13.077	13.077	13.077	Unit
Tosari	4.913	5.021	6.021	5.021	5.021	Unit
Tutur	11.027	11.273	11.273	11.273	11.273	Unit
Winongan	8.322	8.605	8.605	8.605	8.685	Unit
Wonorejo	11.289	11.534	11.534	11.534	11.534	Unit
Jumlah	**245.345**	**251.403**	**201.304**	**232.175**	**232.285**	**Unit**

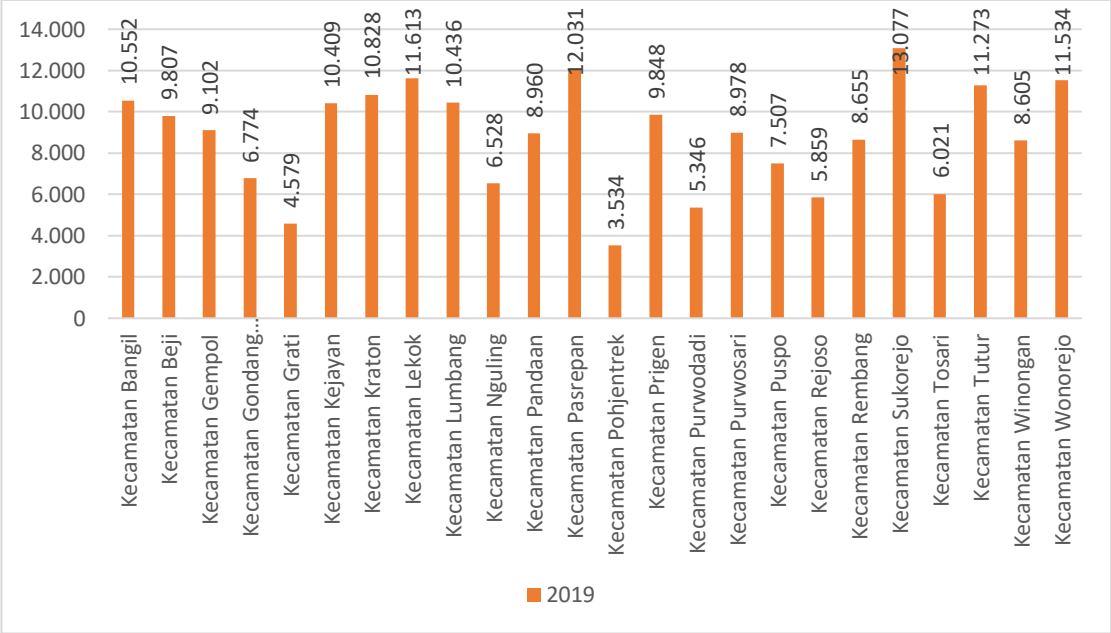
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



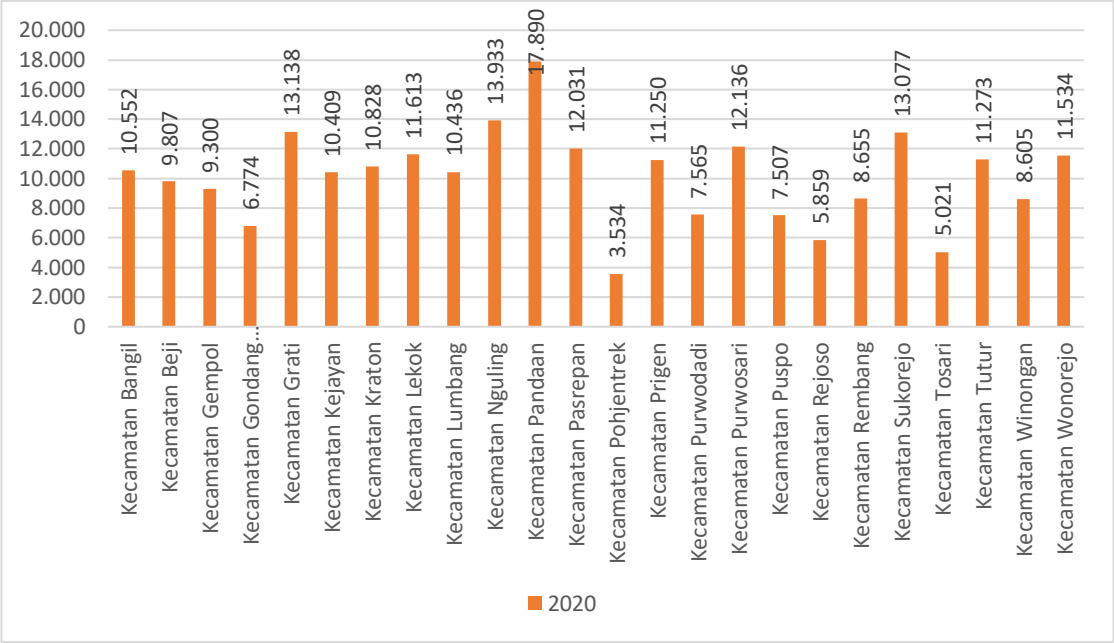
Gambar 5. 1 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2017



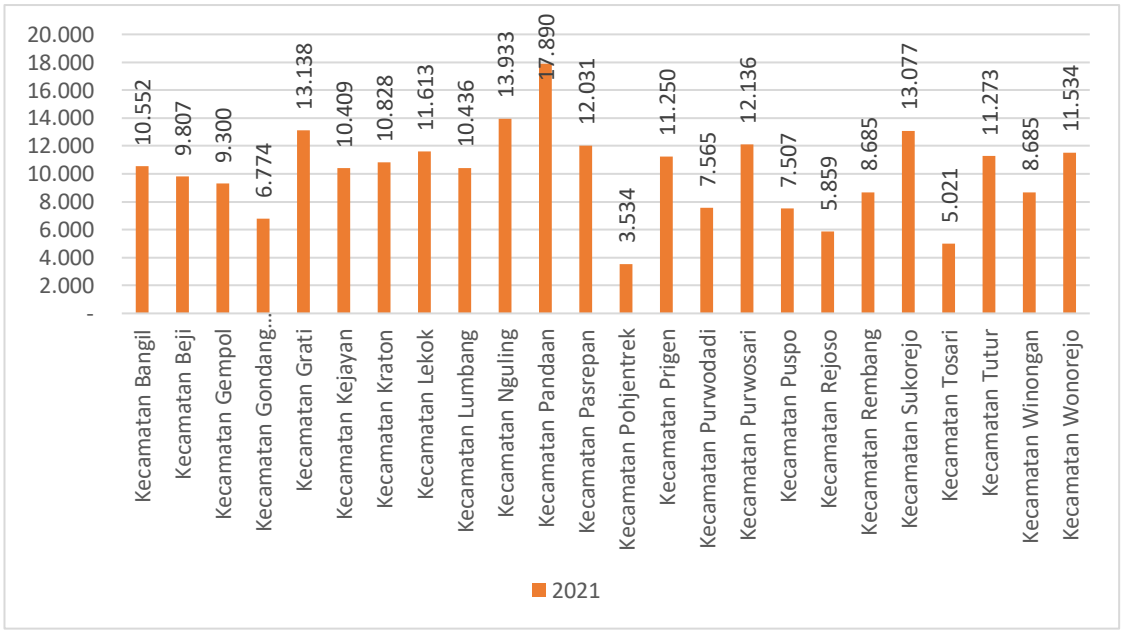
Gambar 5. 2 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2018



Gambar 5. 3 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2019



Gambar 5. 4 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2020



Gambar 5. 5 Jumlah Usaha Mikro Tahun 2021

Tabel 5. 2 Jumlah Koperasi Berkualitas

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	0	7	1	2	2	Unit
Kecamatan Beji	3	2	0	2	4	Unit
Kecamatan Gempol	2	3	0	3	2	Unit
Kecamatan Gondang Wetan	3	0	0	1	1	Unit
Kecamatan Grati	0	0	0	2	2	Unit

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Kejayan	1	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Kraton	1	1	0	0	2	Unit
Kecamatan Lekok	1	0	0	0	2	Unit
Kecamatan Lumbang	0	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Nguling	0	0	0	2	2	Unit
Kecamatan Pandaan	7	5	0	6	4	Unit
Kecamatan Pasrepan	0	0	0	0	1	Unit
Kecamatan Pohjentrek	1	0	0	1	1	Unit
Kecamatan Prigen	3	1	0	0	0	Unit
Kecamatan Purwodadi	1	1	0	5	2	Unit
Kecamatan Purwosari	2	2	1	0	3	Unit
Kecamatan Puspo	2	0	0	2	0	Unit
Kecamatan Rejoso	1	1	0	0	2	Unit
Kecamatan Rembang	0	0	0	1	0	Unit
Kecamatan Sukorejo	1	1	0	4	1	Unit
Kecamatan Tosari	1	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Tutur	0	0	0	0	1	Unit
Kecamatan Winongan	0	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Wonorejo	0	0	0	3	0	Unit
JUMLAH	**30**	**24**	**2**	**34**	**32**	Unit

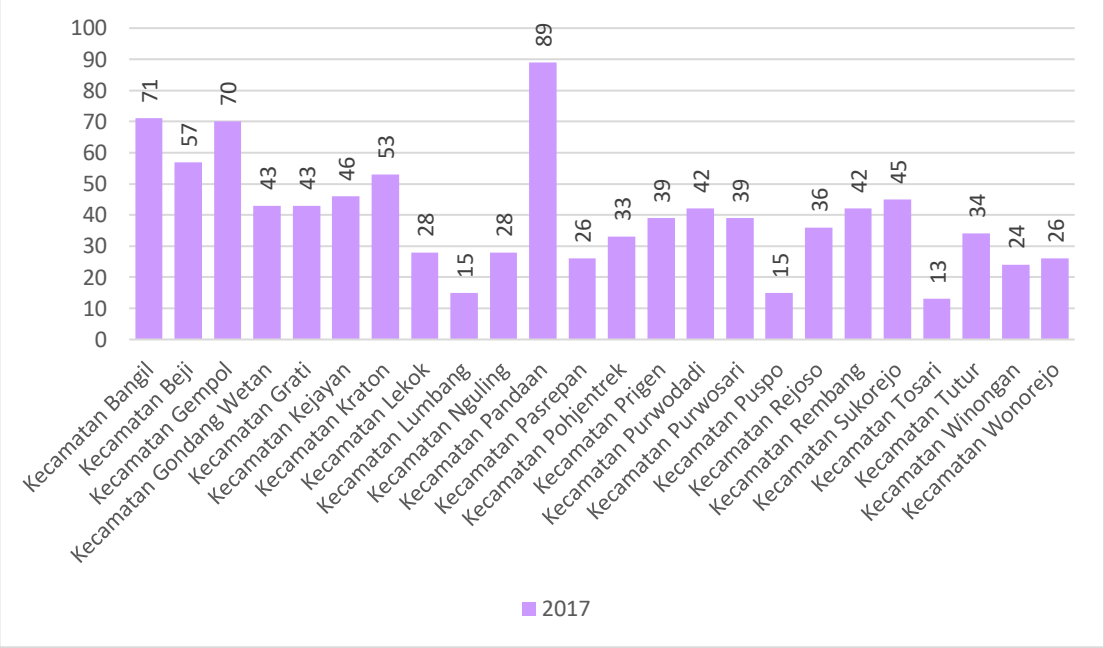
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5. 3 Jumlah Koperasi Aktif

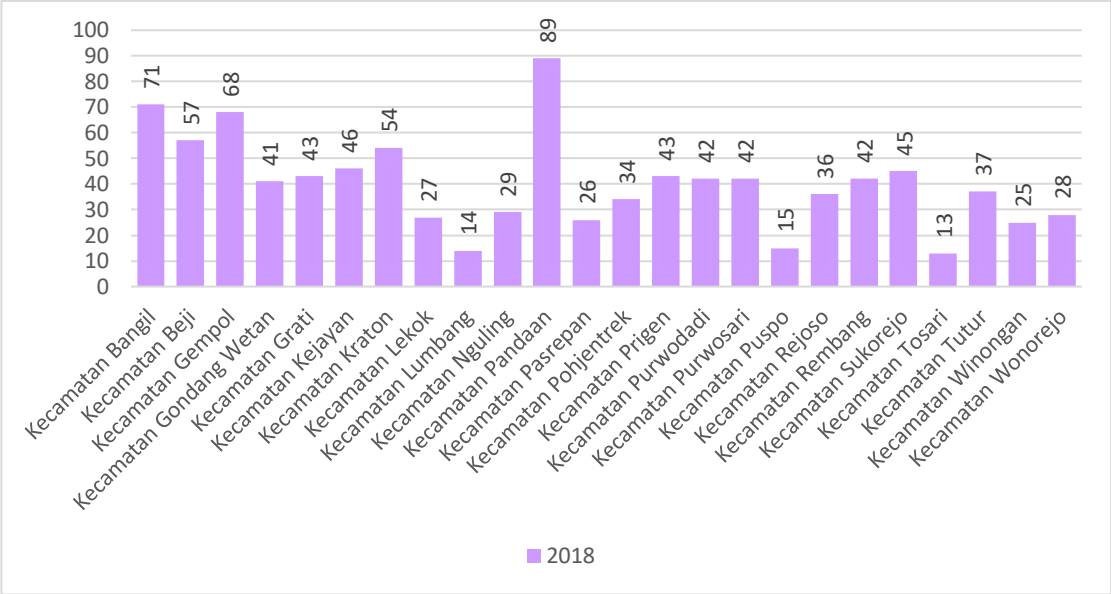
Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	71	71	72	74	79	Unit
Kecamatan Beji	57	57	58	60	62	Unit
Kecamatan Gempol	70	68	70	69	71	Unit
Kecamatan Gondang Wetan	43	41	42	42	48	Unit
Kecamatan Grati	43	43	43	44	45	Unit
Kecamatan Kejayan	46	46	41	42	43	Unit
Kecamatan Kraton	53	54	51	52	53	Unit
Kecamatan Lekok	28	27	29	29	30	Unit
Kecamatan Lumbang	15	14	16	16	16	Unit
Kecamatan Nguling	28	29	29	34	36	Unit
Kecamatan Pandaan	89	89	92	88	91	Unit
Kecamatan Pasrepan	26	26	23	23	25	Unit
Kecamatan Pohjentrek	33	34	34	35	37	Unit
Kecamatan Prigen	39	43	44	47	50	Unit
Kecamatan Purwodadi	42	42	43	45	50	Unit
Kecamatan Purwosari	39	42	42	42	47	Unit

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Puspo	15	15	15	15	16	Unit
Kecamatan Rejoso	36	36	36	36	38	Unit
Kecamatan Rembang	42	42	32	37	42	Unit
Kecamatan Sukorejo	45	45	44	44	46	Unit
Kecamatan Tosari	13	13	9	9	9	Unit
Kecamatan Tutur	34	37	37	38	39	Unit
Kecamatan Winongan	24	25	20	19	21	Unit
Kecamatan Wonorejo	26	28	28	30	33	Unit
JUMLAH	**957**	**967**	**950**	**970**	**1.027**	**Unit**

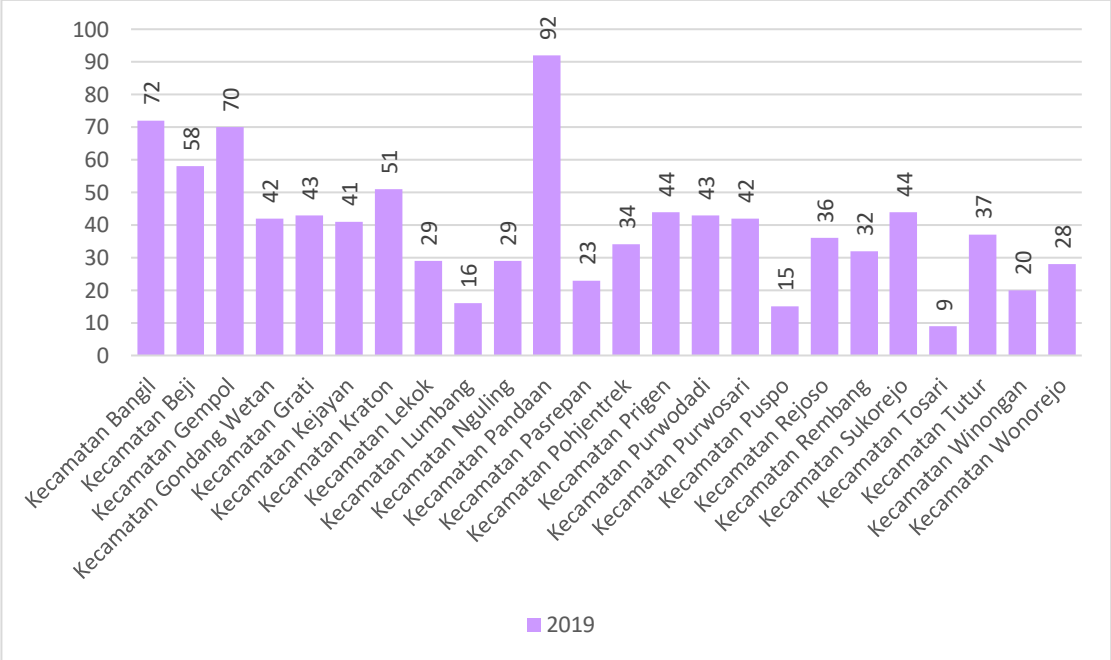
Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



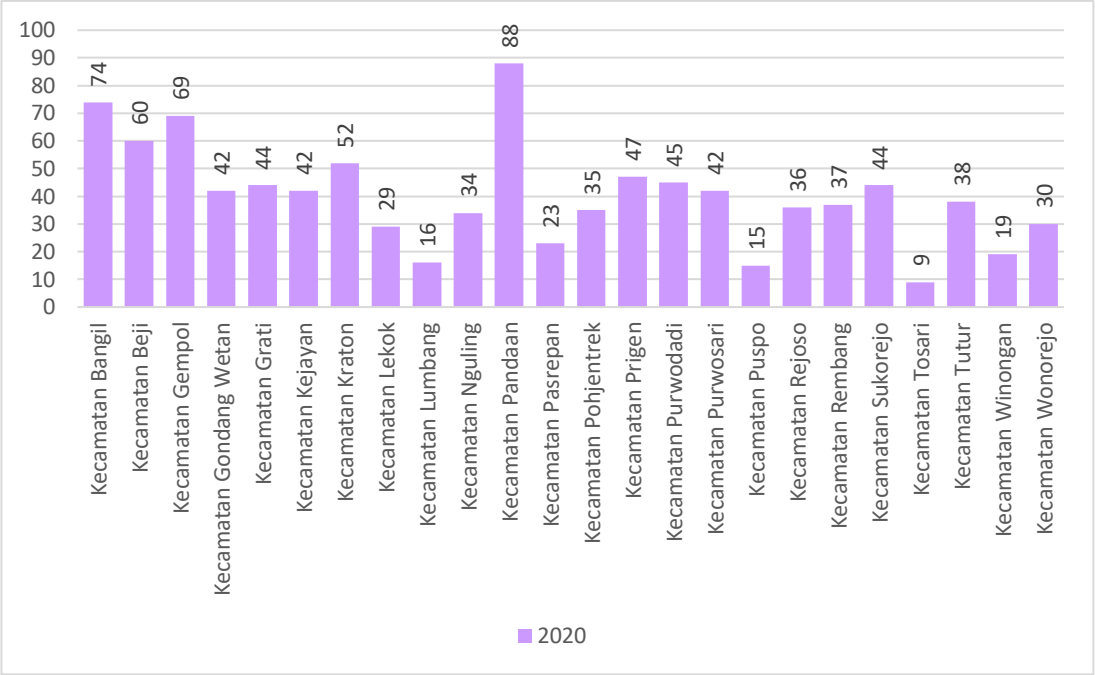
Gambar 5. 5 Jumlah Koperasi Aktif



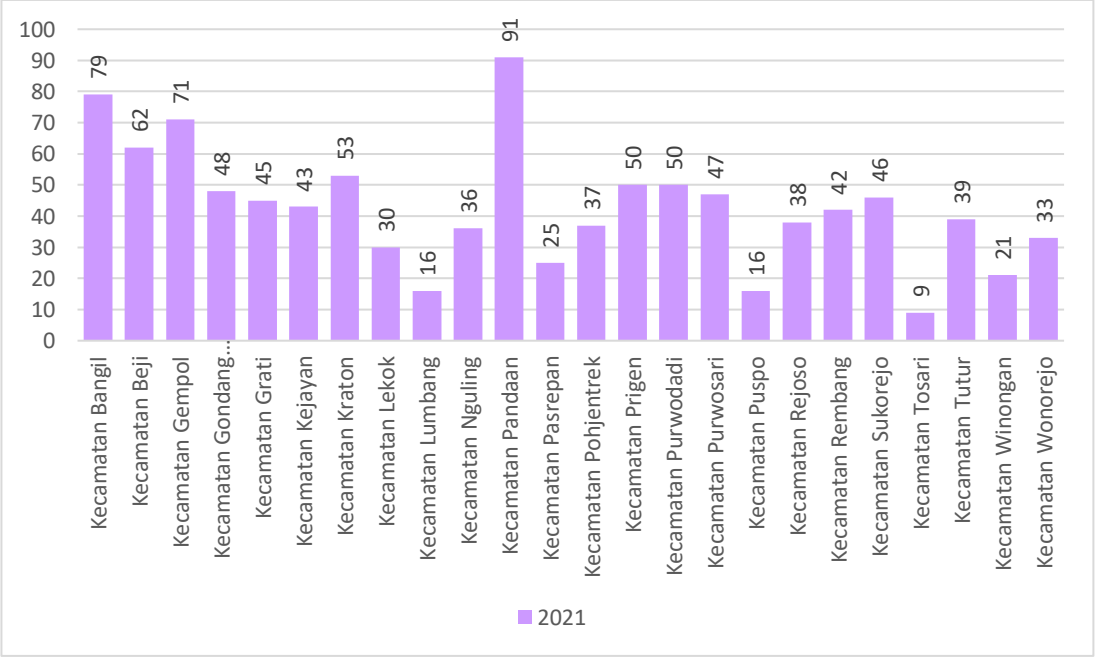
Gambar 5. 6 Jumlah Koperasi Aktif



Gambar 5. 7 Jumlah Koperasi Aktif



Gambar 5. 8 Jumlah Koperasi Aktif



Gambar 5. 9 Jumlah Koperasi Aktif

Tabel 5. 4 Jumlah KOPPONTREN Aktif

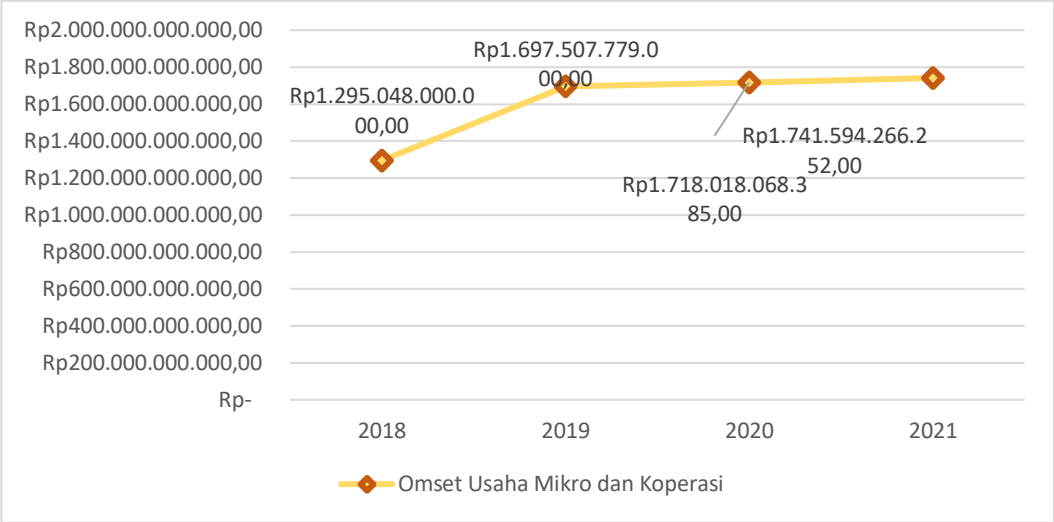
Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	12	12	12	11	11	Unit
Kecamatan Beji	2	3	3	3	3	Unit
Kecamatan Gempol	4	4	4	4	4	Unit
Kecamatan Gondang Wetan	8	7	7	7	7	Unit
Kecamatan Grati	0	1	1	1	1	Unit
Kecamatan Kejayan	2	2	2	2	2	Unit
Kecamatan Kraton	5	5	5	5	5	Unit
Kecamatan Lekok	2	2	2	2	2	Unit
Kecamatan Lumbang	0	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Nguling	2	2	2	2	2	Unit
Kecamatan Pandaan	2	2	2	2	2	Unit
Kecamatan Pasrepan	2	2	2	2	2	Unit
Kecamatan Pohjentrek	2	2	2	2	2	Unit
Kecamatan Prigen	1	2	2	2	2	Unit
Kecamatan Purwodadi	1	1	1	1	1	Unit
Kecamatan Purwosari	1	1	1	1	1	Unit
Kecamatan Puspo	0	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Rejoso	0	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Rembang	8	8	8	8	8	Unit
Kecamatan Sukorejo	2	3	3	3	3	Unit
Kecamatan Tosari	0	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Tutur	0	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Winongan	0	0	0	0	0	Unit
Kecamatan Wonorejo	3	3	3	3	3	Unit
JUMLAH	**59**	**62**	**62**	**61**	**61**	**Unit**

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5. 5 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Omset Usaha Mikro dan Koperasi	1.295.048.000.000	1.697.507.779.000	1.718.018.068.385	1.741.594.266.252	Rupiah

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

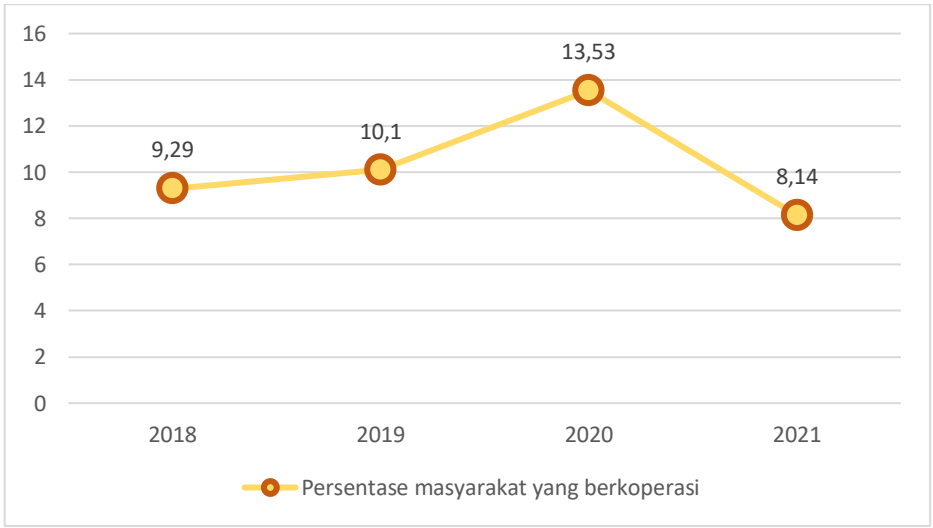


Gambar 5. 10 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi

Tabel 5. 6 Masyarakat yang Berkoperasi

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase masyarakat yang berkoperasi	9,29%	10,10%	13,53%	8,14%	%
Masyarakat yang berkoperasi	105.028	189.161	166.756	97.017	Orang
Total masyarakat	1.130.066	1.873.607	1.232.908	119.084	Orang

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Gambar 5. 11 Persentase masyarakat yang berkoperasi

Tabel 5. 7 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi

	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi	17.453.000.000	392.578.779	20.510.289.381	23.576.198.252	Rupiah

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

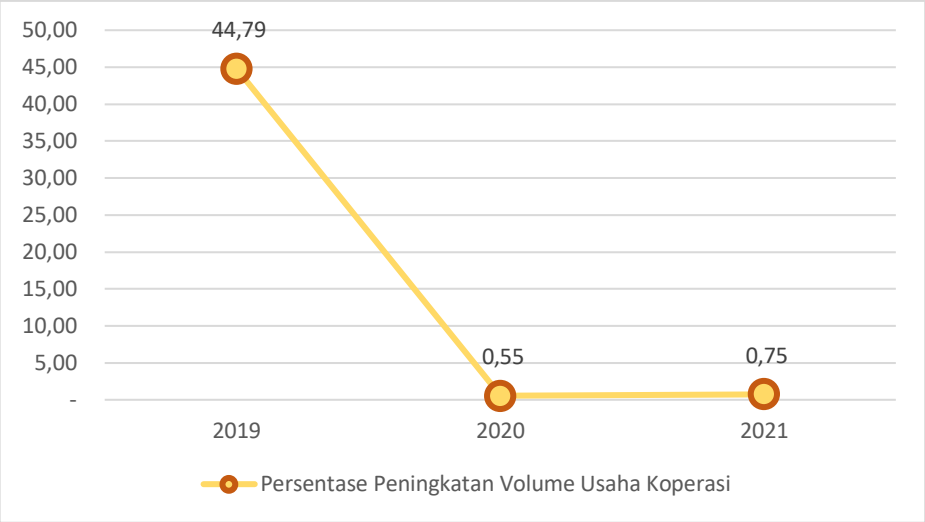


Gambar 5. 12 Jumlah Omset Usaha Mikro dan Koperasi

Tabel 5. 8 Peningkatan Volume Usaha Koperasi

Peningkatan Volume Usaha Koperasi	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	-	44.79	0.55	0.75	%
Peningkatan Volume Usaha Koperasi (N)	846.529.000.000	1.225.688.970.000	1.232.430.259.385	1.241.673.486.298	Rupiah

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Gambar 5. 13 Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

Tabel 5. 9 Peningkatan Omset Usaha Mikro

Peningkatan Omset Usaha Mikro	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	-	2,93%	2,92%	2,95%	Persen
Peningkatan Omset Usaha Mikro (N)	58.400.000.000	471.818.800.000	485.587.800.000	-	Rupiah

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5. 10 Koperasi yang Bersertifikat NIK

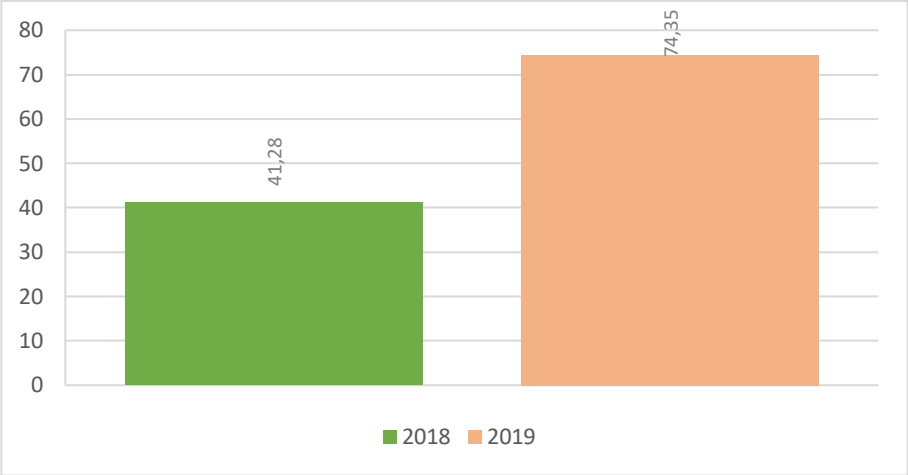
Koperasi yang Bersertifikat NIK	2019	2020	Satuan
Persentase Koperasi Yang bersertifikat NIK	31,56	29,09	%
Koperasi Yang bersertifikat NIK	302	315	Unit
Total Koperasi	957	1083	Unit

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5. 11 KSP/USP yang Sehat

KSP/USP yang sehat	2018	2019	2020	Satuan
Persentase KSP/USP yang sehat	41,28	74,35	-	%
KSP/USP yang sehat	123	200	71	Unit
Total KSP atau USP	298	269	-	Unit

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Gambar 5. 14 Persentase KSP/USP yang sehat

Tabel 5. 12 Penumbuhan Wirausaha Baru

Penumbuhan Wirausaha Baru	2019	2020	Satuan
Persentase Penumbuhan Wirausaha Baru	0,16	0,10	%
Penumbuhan wirausaha baru	330	220	Unit
Total wirausaha	211.856	211.856	Unit

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DESKRIPSI

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Pada tahun 2018 nilai IKLH Kabupaten Pasuruan sebesar 57,10. Nilai tersebut mengalami penurunan dan juga peningkatan, hingga pada tahun 2021 nilai IKLH Kabupaten Pasuruan sebesar 63,13. Dari tahun 2017 hingga 2021, nilai IKU Kabupaten Pasuruan berada pada rentan nilai $50 \leq x \leq 70$ yang artinya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pasuruan berada pada kategori sedang.

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pada tahun 2018 nilai IKA Kabupaten Pasuruan sebesar 50. Kemudian terjadi perubahan, hingga pada tahun 2021 nilai IKA menjadi 53,57. Nilai IKA Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018 hingga 2021 berada pada rentan $50 \leq x \leq 70$. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Pasuruan berada pada kategori sedang.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKU Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 82,25. Nilai tersebut mengalami perubahan hingga menjadi 82,96 pada tahun 2021. Dari tahun 2017 hingga 2021, nilai IKU

Kabupaten Pasuruan berada pada rentan nilai 70≤x≤90 yang artinya kualitas udara Kabupaten Pasuruan berada pada kategori baik.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Pada tahun 2017 nilai IKTL Kabupaten Pasuruan sebesar 43,57. Kemudian terjadi perubahan, hingga pada tahun 2021 nilai IKTL menjadi 42,89. Nilai IKTL Kabupaten Pasuruan dari tahun 2017 hingga 2021 berada pada rentan 25≤x≤50. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas tutupan lahan di Kabupaten Pasuruan berada pada kategori kurang

Tabel 6. 1 Jumlah DAS di Kabupaten Pasuruan

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah DAS di Kabupaten Pasuruan	9	9	9	9	DAS

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 2 Jumlah Sumber Air yang Dapat Dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan

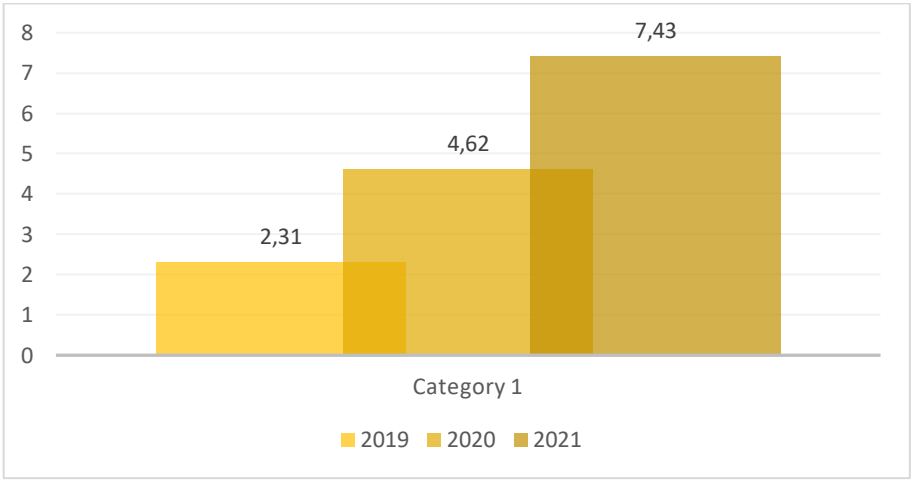
Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Sumber Air yang Dapat Dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Pasuruan	3	3	3	3	Unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 3 Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan	2,31	4,62	7,43	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

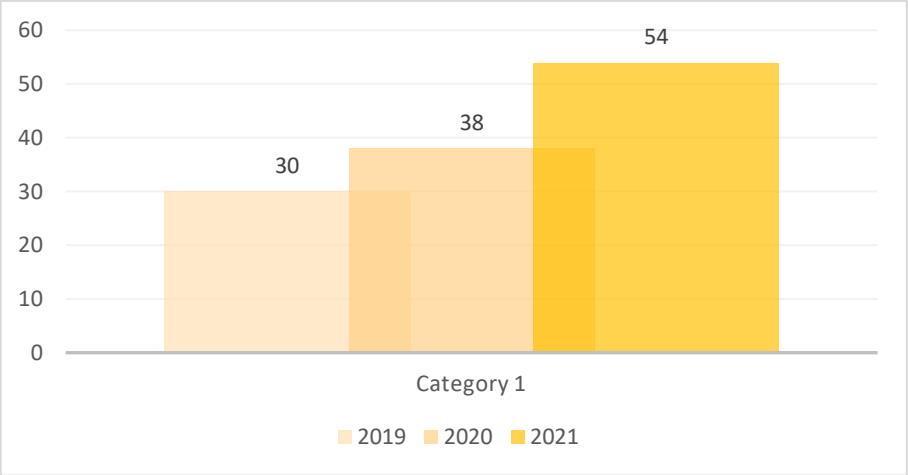


Gambar 6. 1 Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 6. 4 Kinerja Pengelolaan Persampahan

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
persentase kinerja pengelolaan persampahan	30	38	54	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 6. 2 Kinerja Pengelolaan Persampahan

Tabel 6. 5 Luas RTH yang Dikelola

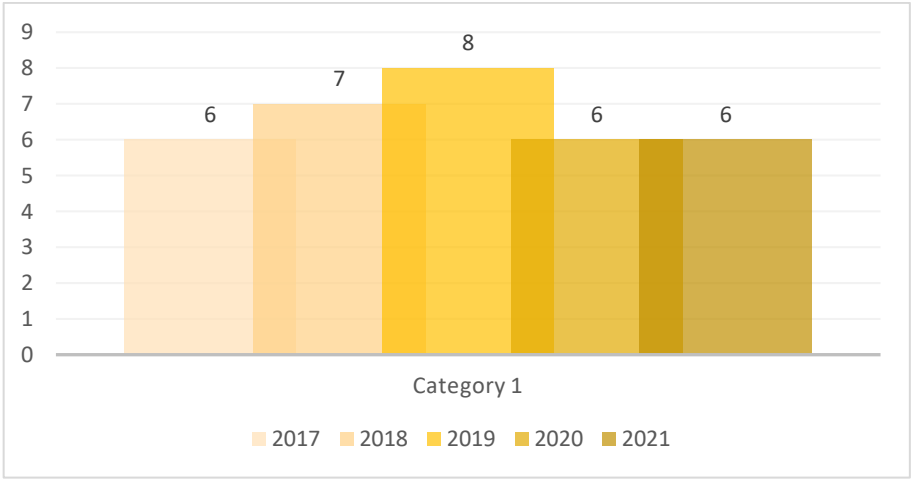
Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	75,80	91,57	91,7	91,57	91,57	%
Kecamatan Beji	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	%
Kecamatan Gempol	1,04	1,60	2,19	2,19	2,19	%
Kecamatan Grati	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	%
Kecamatan Nguling	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	%
Kecamatan Pandaan	0,50	1,28	1,70	1,70	1,70	%
Kecamatan Prigen	-	0,78	0,78	0,78	0,78	%
Kecamatan Purwodadi	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	%
Kecamatan Purwosari	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	%
Kecamatan Rembang	-	0,16	0,16	0,16	0,16	%
Kecamatan Wonorejo	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 6 Jumlah Instrumen-instrumen Pencegahan Pencemaran da-tau Kerusakan Lingkungan Hidup

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah instrumen-instrumen pencegahan pencemaran da-tau kerusakan lingkungan hidup	6 (KLHS + TATA RUANG +AMDAL + UKL-UPL + PERIJINAN + ANGGARAN)	7 (KLHS + TATA RUANG + AMDAL + UKL-UPL + PERIJINAN + ANGGARAN + PERBUB	8 (KLHS + TATA RUANG + AMDAL + UKL-UPL + PERIJINAN + ANGGARAN + PERBUB + RPPLH + DDDT)	6 (KLHS + TATA RUANG +AMDAL + UKL-UPL + PERIJINAN + ANGGARAN)	6 (KLHS + TATA RUANG +AMDAL + UKL-UPL + PERIJINAN + ANGGARAN)	Dokumen

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

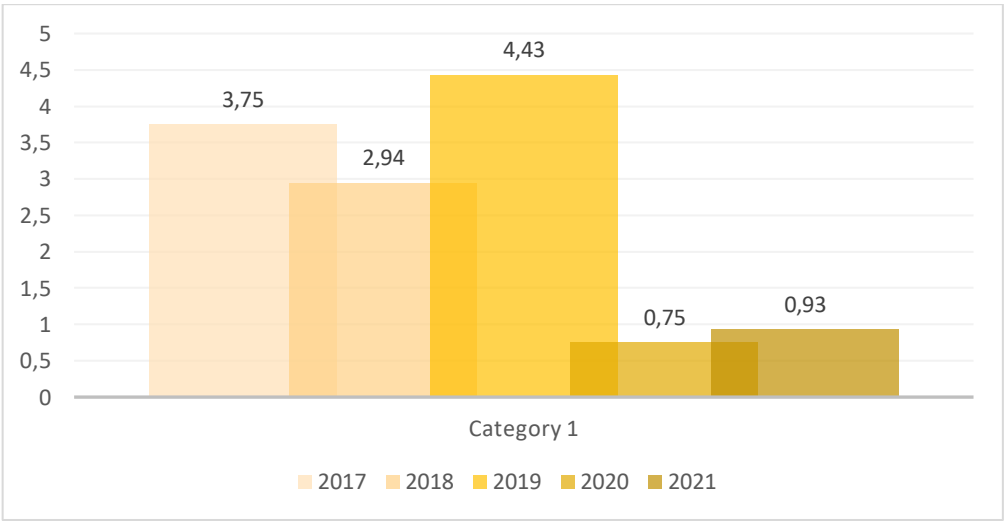


Gambar 6. 3 Jumlah Instrumen-instrumen Pencegahan Pencemaran da-tau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tabel 6. 7 Pelaku Usaha yang Diawasi yang Telah Memiliki Ijin Lingkungan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pelaku usaha/kegiatan yg diawasi yg telah memiliki ijin lingkungan	3,75	2,94	4,43	0,75	0,93	%
Pelaku usaha yang diawasi yang telah memiliki ijin lingkungan	42	35	56	10	14	Orang
Total pelaku usaha yang telah memiliki izin lingkungan	1121	1192	1263	1330	1509	Orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

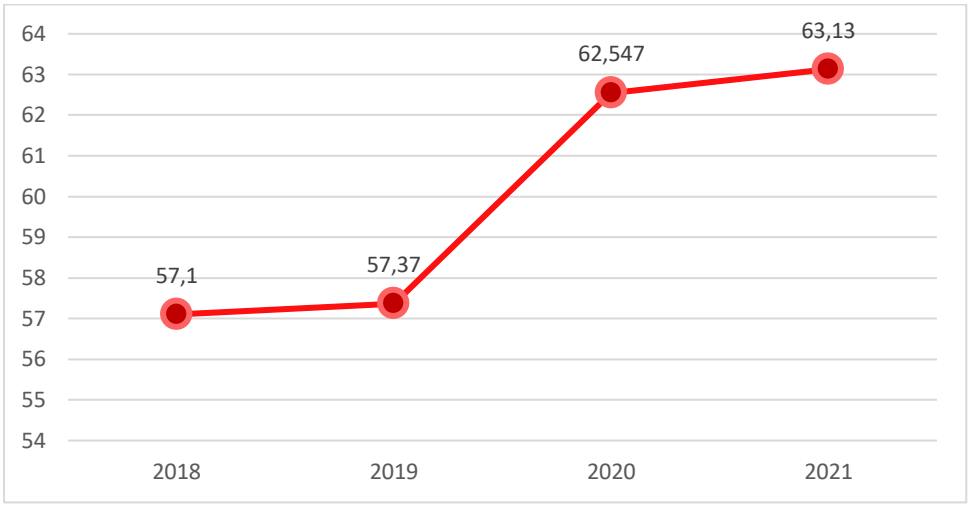


Gambar 6. 4 Pelaku Usaha yang Diawasi yang Telah Memiliki Ijin Lingkungan

Tabel 6. 8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,10	57,37	62,547	63,13	Nilai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

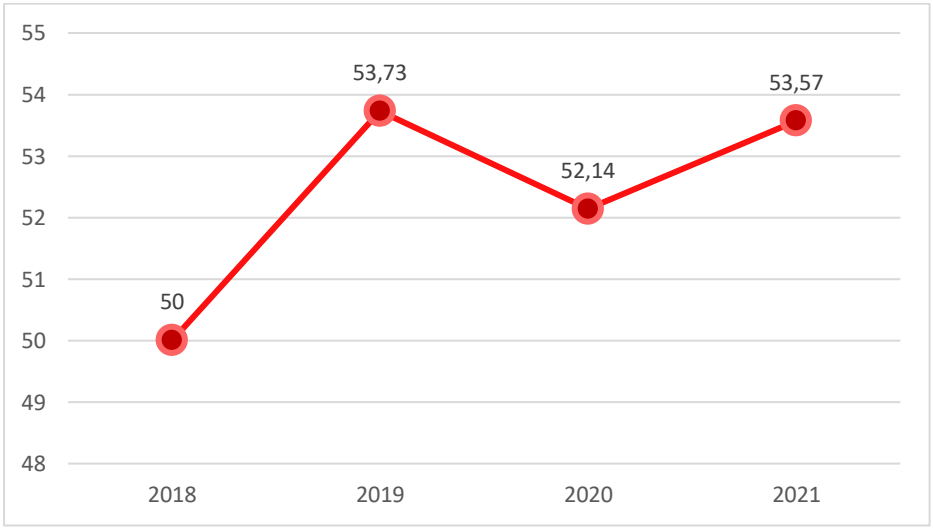


Gambar 6. 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tabel 6. 9 Indeks Kualitas Air (IKA)

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kualitas Air (IKA)	50	53,73	52,14	53,57	Nilai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

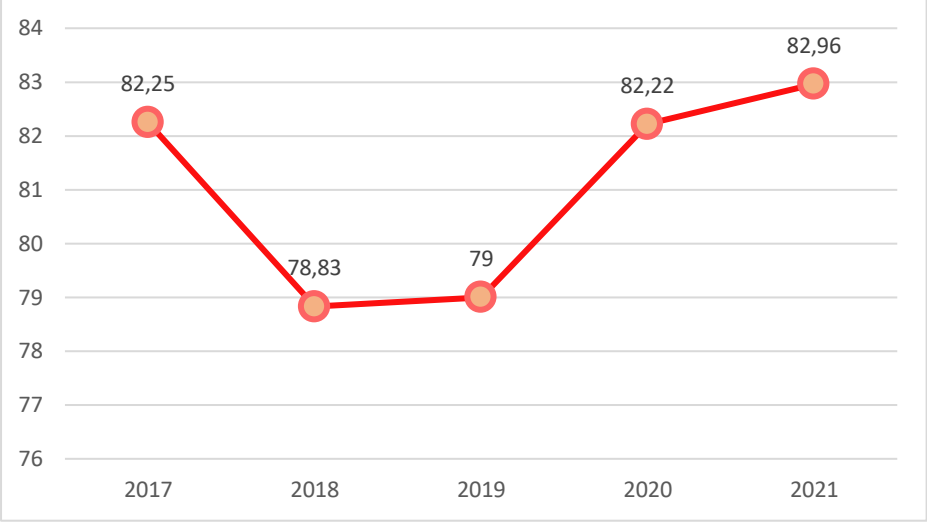


Gambar 6. 6 Indeks Kualitas Air (IKA)

Tabel 6. 10 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,25	78,83	79	82,22	82,96	Nilai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

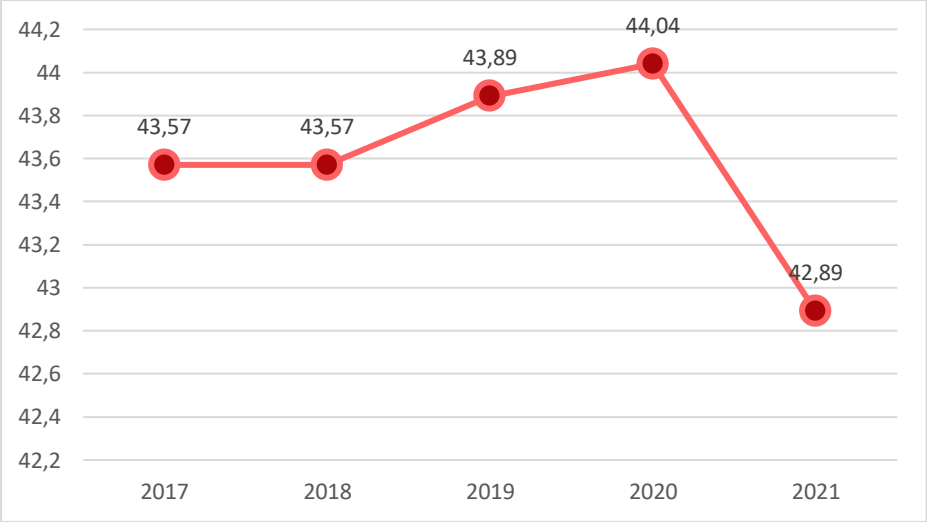


Gambar 6. 7 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Tabel 6. 11 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	43,57	43,57	43,89	44,04	42,89	Nilai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

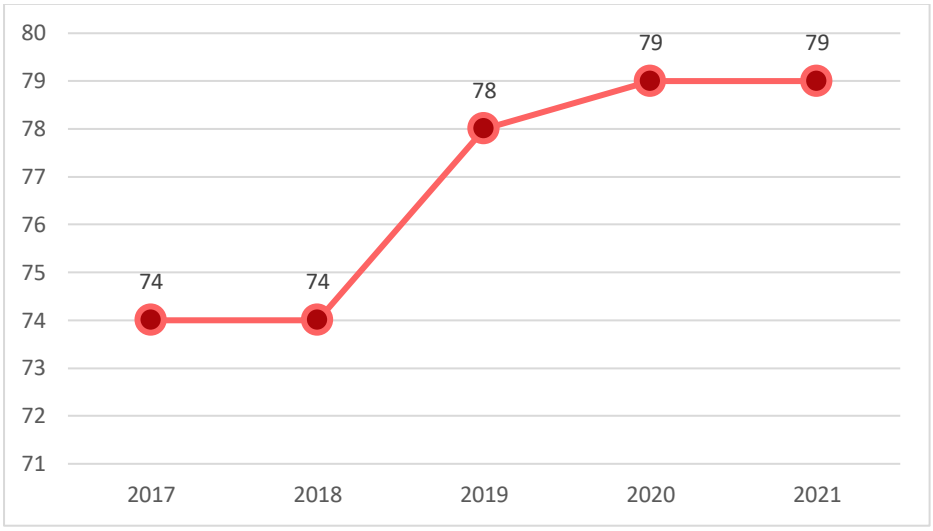


Gambar 6. 8 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tabel 6. 12 Nilai TPA (Program Adipura)

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Nilai TPA (Program Adipura)	74	74	78	79	79	Nilai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

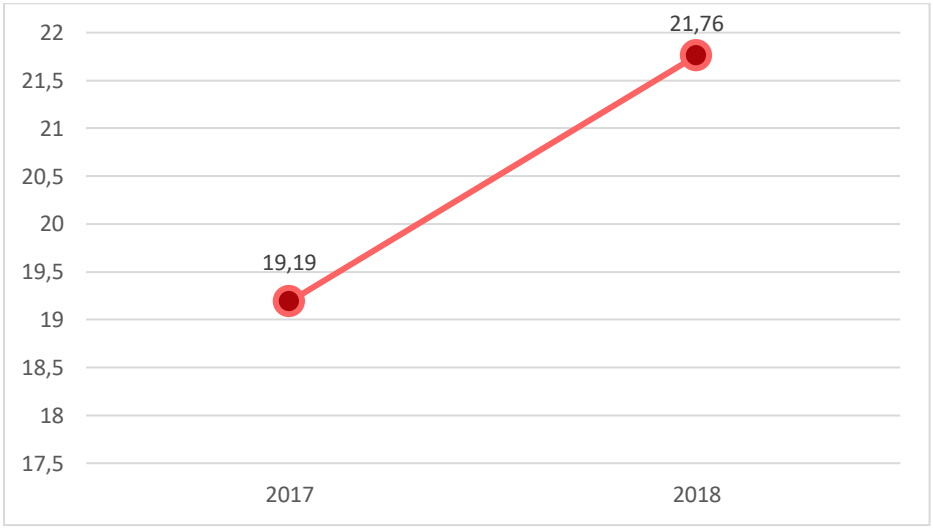


Gambar 6. 9 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tabel 6. 13 Luas Cakupan Permukiman yang Dilayani Pengangkutan Sampah

Elemen	2017	2018	Satuan
Persentase luas cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah	19,19	21,76	%
Cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah	684,8	776,7	
Luas cakupan permukiman	3.569	3.569	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 6. 10 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tabel 6. 14 Persentase TPA Baru

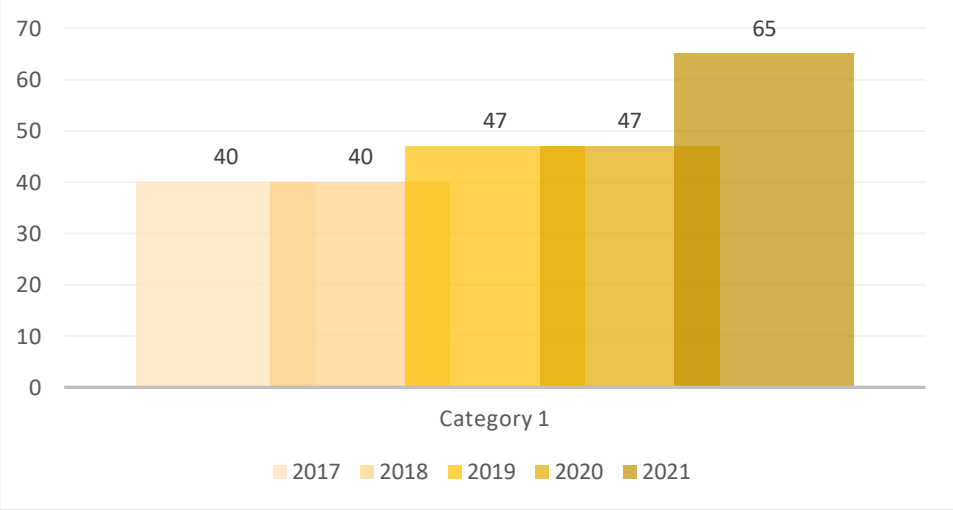
Elemen	2017	Satuan
Persentase terbangunnya TPA baru	70	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 15 Tersedianya TPS

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	9	9	9	9	9	Unit
Kecamatan Beji	2	2	3	3	4	Unit
Kecamatan Gempol	4	4	4	4	7	Unit
Kecamatan Gondang Wetan	1	1	1	1	2	Unit
Kecamatan Kejayan	-	-	-	-	2	Unit
Kecamatan Kraton	1	1	1	1	2	Unit
Kecamatan Lekok	2	2	2	2	2	Unit
Kecamatan Lumbang	-	-	-	-	1	Unit
Kecamatan Nguling	1	1	1	1	1	Unit
Kecamatan Pandaan	4	4	4	4	7	Unit
Kecamatan Pasrepan	1	1	1	1	1	Unit
Kecamatan Pohjentrek	2	2	3	3	3	Unit
Kecamatan Prigen	2	2	5	5	6	Unit
Kecamatan Purwodadi	2	2	2	2	3	Unit
Kecamatan Purwosari	2	2	3	3	4	Unit
Kecamatan Puspo	-	-	1	1	1	Unit
Kecamatan Rejoso	1	1	1	1	1	Unit
Kecamatan Sukorejo	5	5	5	5	7	Unit
Kecamatan Tosari	1	1	1	1	1	Unit
Kecamatan Tutur	-	-	-	-	1	Unit
Jumlah TPS	**40**	**40**	**47**	**47**	**65**	**Unit**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 6. 11 Tersedianya TPS

Tabel 6. 16 Tersedianya TPST

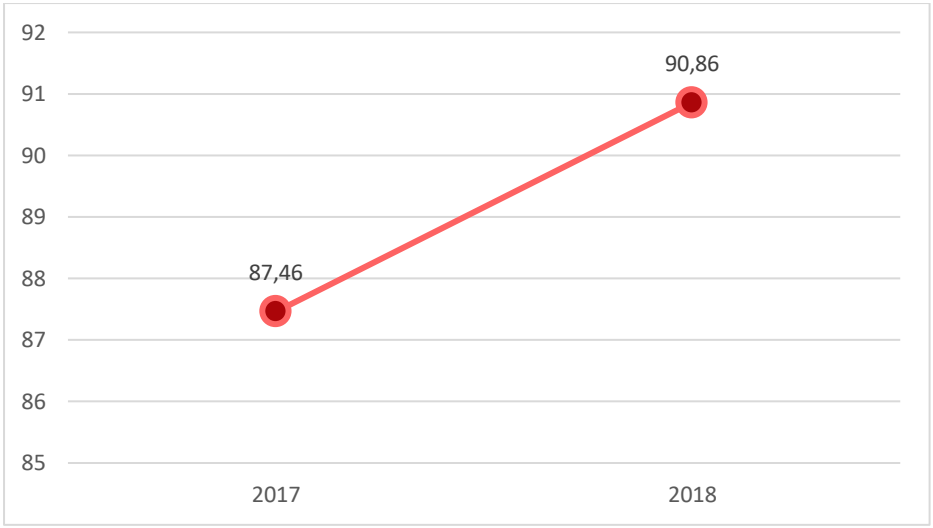
Kecamatan	2021	Satuan
Kecamatan Lekok	1	Unit
Kecamatan Nguling	1	Unit
Jumlah TPST	**2**	**Unit**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 17 Kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Ijin Lingkungan Sesuai Peraturan Perundangan Penegakan Hukum Lingkungan

Elemen	2017	2018	Satuan
Persentase kepemilikan dokumen lingkungan dan ijin lingkungan sesuai peraturan perundangan penegakan hukum lingkungan	87,46	90,86	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

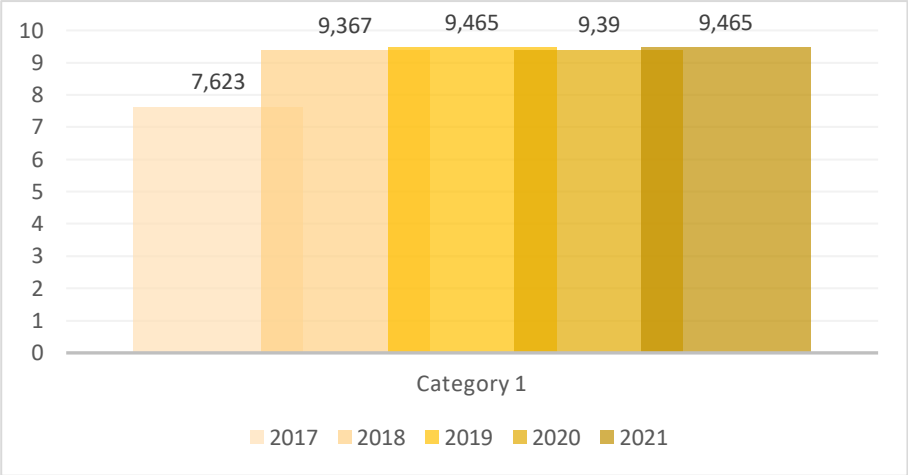


Gambar 6. 12 ndeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Tabel 6. 18 Ruang Luas Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	7,323	8,846	8,846	8,846	8,846	Ha
Kecamatan Beji	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	Ha
Kecamatan Gempol	0,100	0,155	0,212	0,212	0,212	Ha
Kecamatan Grati	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	Ha
Kecamatan Nguling	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	Ha
Kecamatan Pandaan	0,048	0,124	0,164	0,164	0,164	Ha
Kecamatan Prigen	-	0,075	0,075	-	0,075	Ha
Kecamatan Purwodadi	0,010	0,01	0,010	0,010	0,010	Ha
Kecamatan Purwosari	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	Ha
Kecamatan Rembang	-	0,016	0,016	0,016	0,016	Ha
Kecamatan Wonorejo	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	Ha
Jumlah	**7,623**	**9,367**	**9,465**	**9,390**	**9,465**	Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 6. 13 Ruang Luas Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan

Tabel 6. 19 Penurunan Tingkat Pencemaran

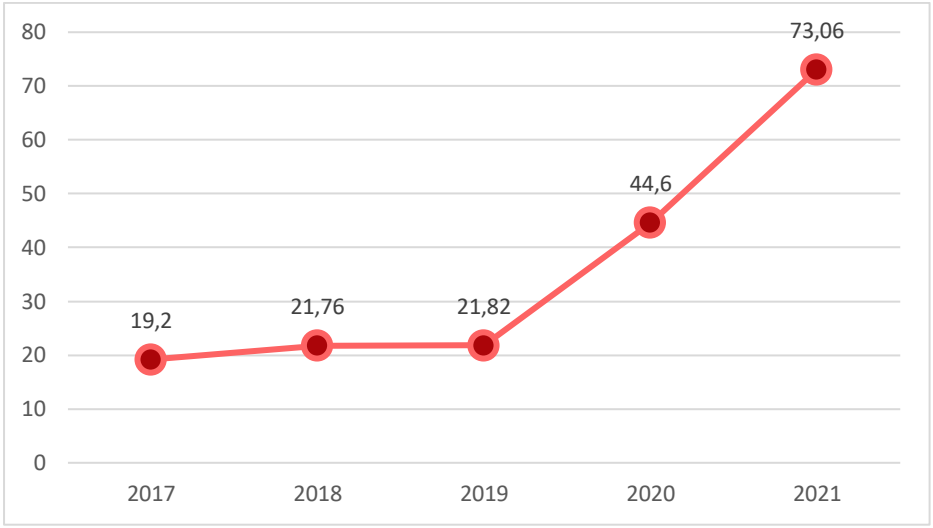
Elemen	2017	2018	Satuan
Air	77,78	66,67	%
Udara	100	100	%
Limbah Cair	100	100	%
Limbah Padat	100	100	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 20 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	19,20	21,76	21,82	44,60	73,06	%
Total volume sampah yang dapat ditangani	923,7	1060	4695	95378 ,072	15342 1,26	
Total volume timbunan sampah Kab/Kota	4811	4870, 5	10242 9,3	21383 9,83	210,0 07,03	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 6. 14 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

Tabel 6. 21 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

Elemen	2019	2021	Satuan
Ketaatan penanggung jawab usaha da-tau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	70	53,33	%
Jumlah penanggungjawab usaha da-tau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	35	8	Lembaga
Usaha da-tau kegiatan dilakukan pemeriksaan	50	15	Lembaga

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 22 Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Elemen	2021	Satuan
Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 23 Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup

Elemen	2021	Satuan
Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	85	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 24 Persentase Usaha dan/ Kegiatan yang Telah Memiliki Persetujuan Lingkungan

Elemen	2021	Satuan
Persentase usaha dan/ kegiatan yang telah memiliki persetujuan lingkungan	72	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 25 Persentase Sungai yang Tidak Tercemar

Elemen	2021	Satuan
Persentase sungai yang tidak tercemar	30	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 26 Persentase Lokasi Pemantauan Kualitas Udara yang Tidak Tercemar

Elemen	2021	Satuan
Persentase lokasi pemantauan kualitas udara yang tidak tercemar	75	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 27 Persentase Penurunan Lahan Kritis di Wilayah Kabupaten Pasuruan

Elemen	2021	Satuan
Persentase penurunan lahan kritis di wilayah Kabupaten Pasuruan	20	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 28 Persentase Peningkatan Luasan RTH Publik

Elemen	2021	Satuan
Persentase peningkatan luasan RTH publik	0,05	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 29 Persentase Pengelolaan Kegiatan Usaha Pengumpulan Limbah B3 yang Memenuhi Persyaratan Teknis

Elemen	2021	Satuan
Persentase pengelolaan kegiatan usaha pengumpulan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis	100	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 30 Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/ Kegiatan

Elemen	2021	Satuan
Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/ kegiatan	50	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 31 Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Elemen	2021	Satuan
Persentase lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	13	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 32 Persentase Sekolah/Ponpes yang Berwawasan Lingkungan

Elemen	2021	Satuan
Persentase sekolah/ponpes yang berwawasan lingkungan	19	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 33 Persentase Perusahaan Berwawasan Lingkungan (Proper)

Elemen	2021	Satuan
Persentase perusahaan berwawasan lingkungan (proper)	20	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 34 Persentase Sekolah / Madrasah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)

Elemen	2021	Satuan
Persentase sekolah / madrasah berwawasan lingkungan (adiwiyata)	23	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 35 Persentase Capaian Target Pengurangan Sampah Terhadap JAKSTRADA

Elemen	2021	Satuan
Persentase capaian target pengurangan sampah terhadap JAKSTRADA	100	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 6. 36 Persentase Capaian Target Penanganan Sampah Terhadap JAKSTRADA

Elemen	2021	Satuan
Persentase capaian target penanganan sampah terhadap JAKSTRADA	100	%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

DINAS TENAGA KERJA

DESKRIPSI

Angkatan Kerja adalah penduduk yang berusia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 66,61% dan mengalami peningkatan secara fluktuatif hingga tahun 2021 sebesar 69,03%. Persentase tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin tinggi pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian di Kabupaten Pasuruan.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh dan membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 95,03% dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga akhir tahun 2021 sebesar 93,97%. Nilai tersebut menunjukkan semakin rendah persentase rasio penduduk yang bekerja, maka semakin rendah jumlah angkatan kerja dan semakin sedikit pula jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Pada tahun 2017, TKK di Kabupaten Pasuruan sebesar 95,03 dan mengalami

kenaikan secara fluktuatif hingga tahun 2021 sebesar 93,37%. Nilai tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai TKK, maka kesempatan kerja semakin tinggi dan semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pasuruan.

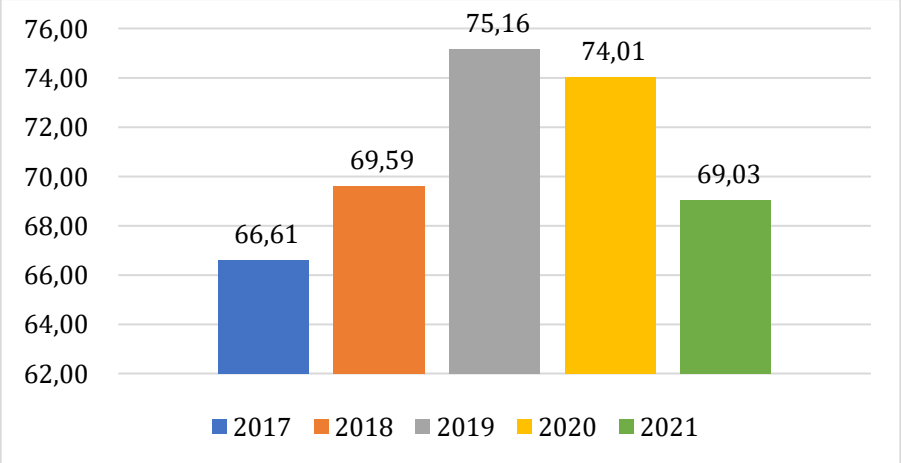
Penganggur terbuka adalah, (1) penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (2) penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (3) penduduk yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan (4) penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017, TPT di Kabupaten Pasuruan sebesar 4,97% dan mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 6,03%. Nilai tersebut menunjukkan semakin tinggi persentase TPT, maka semakin rendah kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan/terserap.

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pada tahun 2017, tercapainya nilai SAKIP di Kabupaten Pasuruan sebesar 62,25 nilai dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 75,54% nilai. Hal tersebut menunjukkan, semakin tinggi nilai SAKIP maka semakin baik pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 7. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

		Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah penduduk usia kerja (PUK)	Jumlah angkatan kerja
Satuan		%	Orang	Orang
2017	Laki-Laki	-	603.213	6.851
	Perempuan	-	626.891	5.544
	Total	66,61	1.230.104	12.395
2018	Laki-Laki	-	609.390	9.624
	Perempuan	-	633.003	7.379
	Total	69,59	1.242.393	17.003
2019	Laki-Laki	-	567.848	5.560
	Perempuan	-	577.760	5.913
	Total	75,16	1.145.608	11.473
2020	Laki-Laki	-	583.570	2.703
	Perempuan	-	590.244	1.530
	Total	74,01	1.173.814	4.233
2021	Laki-Laki	-	636.213	2.976
	Perempuan	-	658.566	2.487
	Total	69,03	1.294.779	5.463

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



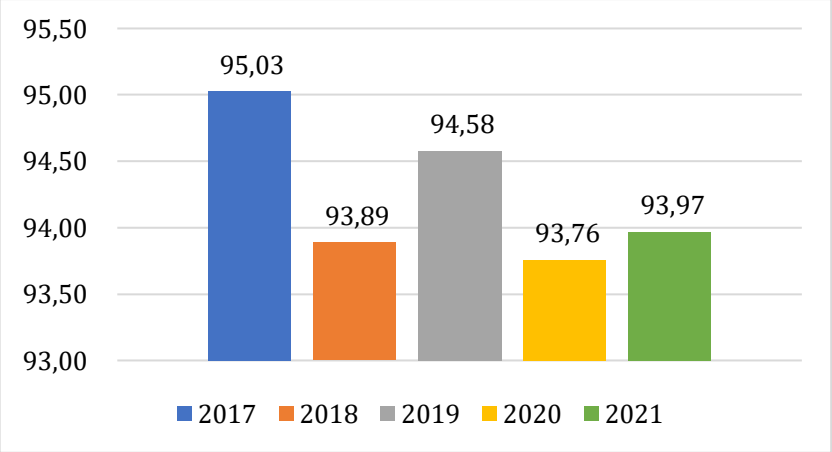
Gambar 7. 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 2 Rasio Penduduk yang Bekerja

		Rasio penduduk yang bekerja	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja	Jumlah Angkatan kerja
Satuan		%	Orang	Orang
2017	Laki-Laki	-	479.076	511.142
	Perempuan	-	299.487	308.180
	Total	95,03	778.563	819.322
2018	Laki-Laki	-	478.680	515.495
	Perempuan	-	333.030	349.035
	Total	93,89	811.710	864.530
2019	Laki-Laki	-	502.310	532.331
	Perempuan	-	312.122	328.754
	Total	94,58	814.432	861.085
2020	Laki-Laki	-	499.023	538.123
	Perempuan	-	315.591	330.672
	Total	93,76	814.614	868.795
2021	Laki-Laki	-	506.423	544.528
	Perempuan	-	333.438	349.198
	Total	93,97	839.861	893.726

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



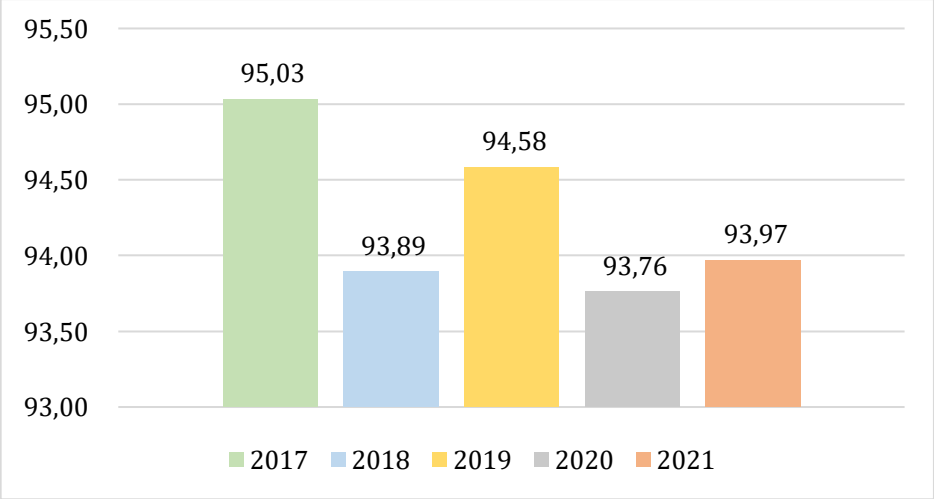
Gambar 7. 2 Rasio Penduduk yang Bekerja

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 3 Rasio Kesempatan Kerja

		Rasio Kesempatan Kerja	Jumlah penduduk usia kerja	Jumlah penduduk usisa kerja > 15 thn
Satuan		%	Jiwa	Jiwa
2017	Laki-Laki	-	603.213	511.142
	Perempuan	-	626.891	308.180
	Total	95,03	1.230.104	819.322
2018	Laki-Laki	-	609.390	515.495
	Perempuan	-	633.003	349.035
	Total	93,89	1.242.393	864.530
2019	Laki-Laki	-	567.848	532.331
	Perempuan	-	577.760	328.754
	Total	94,58	1.145.608	861.085
2020	Laki-Laki	-	583.570	538.123
	Perempuan	-	590.244	330.672
	Total	93,76	1.173.814	868.795
2021	Laki-Laki	-	636.213	544.528
	Perempuan	-	658.566	349.198
	Total	93,97	1.294.779	893.726

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



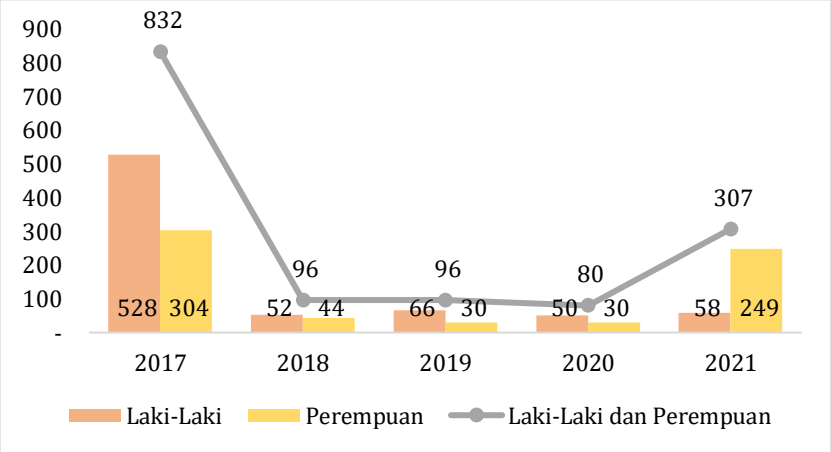
Gambar 7. 3 Rasio Kesempatan Kerja

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 4 Data Tenaga yang Mendapat Pelatihan Kerja

		Data Tenaga yang mendapat Pelatihan Kerja	Pelatihan Berbasis Masyarakat
Satuan		Orang	Orang
2017	Laki-Laki	528	-
	Perempuan	304	-
	Total	832	200
2018	Laki-Laki	52	-
	Perempuan	44	-
	Total	96	100
2019	Laki-Laki	66	-
	Perempuan	30	-
	Total	96	160
2020	Laki-Laki	50	-
	Perempuan	30	-
	Total	80	120
2021	Laki-Laki	58	-
	Perempuan	249	-
	Total	307	52

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



Gambar 7. 4 Data Tenaga yang Mendapat Pelatihan Kerja

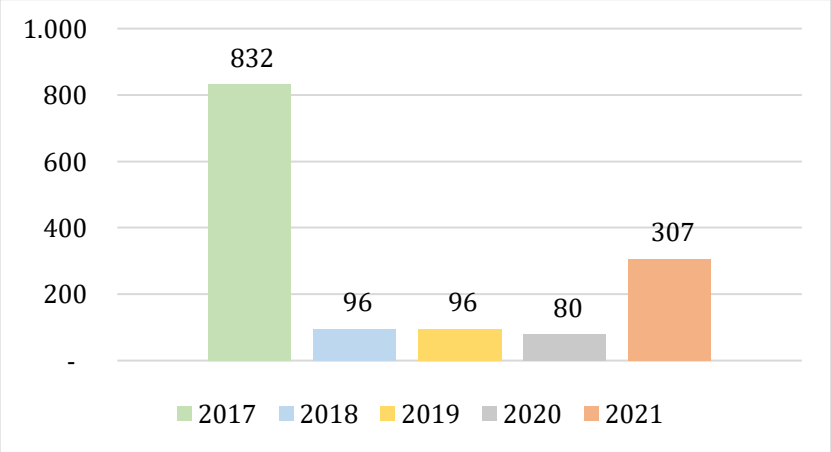
Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 5 Pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja

Pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Teknologi Mekanik	80	16	16	-	-	Orang
Listrik	80	16	-	16	-	Orang
Otomotif R2	80	-	16	16	58	Orang

Pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Otomotif R4	80	-	16	-	-	Orang
Aneka Kejuruan	64	-	-	-	48	Orang
Batik	64	-	-	-	35	Orang
Tata Rias	-	-	-	-	68	Orang
Bordir	80	16	16	-	16	Orang
Menjahit	80	16	16	16	64	Orang
Las	80	16	16	16	-	Orang
Sablon	64	-	-	-	18	Orang
Komputer	80	16	-	16	-	Orang
Jumlah	832	96	96	80	307	**Orang**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



Gambar 7. 5 Jumlah Peserta Pelatihan di UPT LKD Dinas Tenaga Kerja

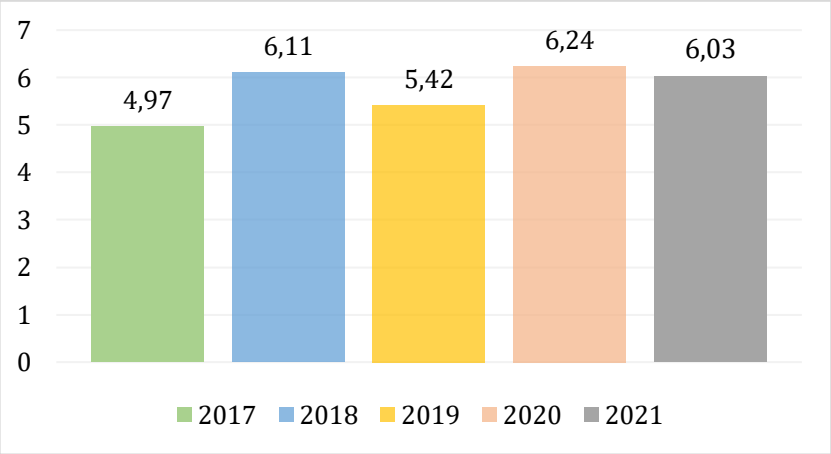
Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka

		Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran	Jumlah angkatan kerja
Satuan		**%**	**Orang**	**Orang**
2017	Laki-Laki	-	32.066	511.142
	Perempuan	-	8.693	308.180
	Total	4,97	40.759	819.322
2018	Laki-Laki	-	36.815	515.495
	Perempuan	-	16.005	349.035
	Total	6,11	52.820	864.530
2019	Laki-Laki	-	36.815	532.331
	Perempuan	-	16.005	328.754
	Total	5,42	46.653	861.085
2020	Laki-Laki	-	36.815	538.123
	Perempuan	-	16.005	330.672
	Total	6,24	54.181	868.795

		Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran	Jumlah angkatan kerja
Satuan		%	Orang	Orang
2021	Laki-Laki	-	38.105	544.528
	Perempuan	-	15.760	349.198
	Total	6,03	53.865	893.726

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



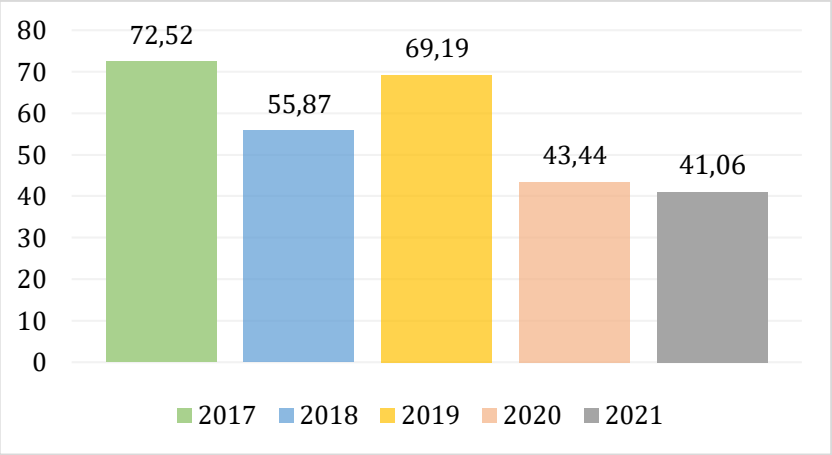
Gambar 7. 6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 7 Persentase Penduduk yang Bekerja

		Persentase Penduduk yang bekerja	Penduduk yang bekerja	Total penduduk Angkatan Kerja/Usia Produktif
Satuan		%	Orang	Orang
2017	Laki-Laki	-	479.076	-
	Perempuan	-	299.487	-
	Total	72,52	778.563	545.750
2018	Laki-Laki	-	478.680	-
	Perempuan	-	333.030	-
	Total	55,87	811.710	601.626
2019	Laki-Laki	-	502.310	-
	Perempuan	-	312.122	-
	Total	69,19	814.432	647.943
2020	Laki-Laki	-	499.023	-
	Perempuan	-	315.591	-
	Total	43,44	814.614	642.995
2021	Laki-Laki	-	506.423	-
	Perempuan	-	333.438	-
	Total	41,06	839.861	616.939

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



Gambar 7. 7 Persentase Penduduk yang Bekerja

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 8 Kenaikan pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis

		Kenaikan pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis
	Jenis Kelamin	Orang
2017	Laki-Laki	479.076
	Perempuan	299.487
	Total	778.563
2018	Laki-Laki	478.680
	Perempuan	333.030
	Total	811.710
2019	Laki-Laki	502.310
	Perempuan	312.122
	Total	814.432
2020	Laki-Laki	499.023
	Perempuan	315.591
	Total	814.614
2021	Laki-Laki	506.423
	Perempuan	333.438
	Total	839.861

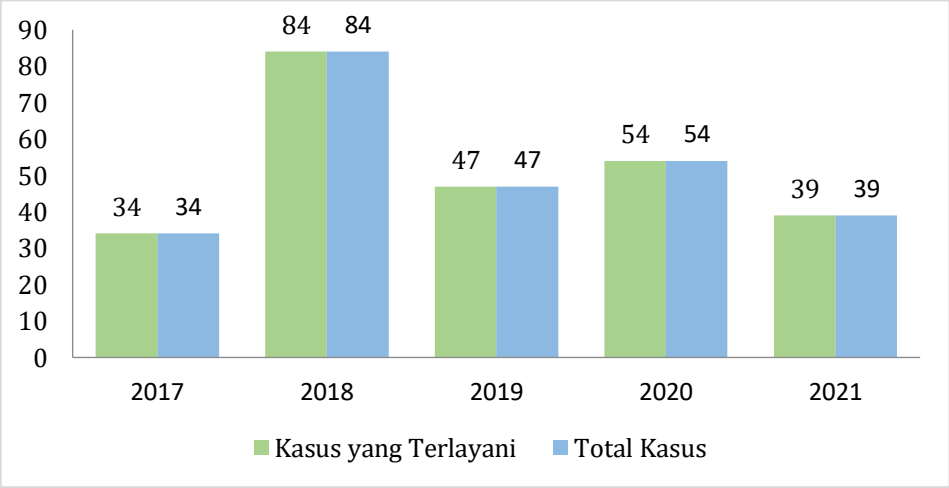
Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 9 Persentase Penanganan Kasus Hubungan Industrial yang Diselesaika-njuran

		Persentase penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaika-njuran	**Kasus yang terlayani**	**Total kasus**
Satuan		**%**	**Kasus**	**Kasus**
2017	Laki-Laki	29	34	34
	Perempuan	-	-	-
	Total	0,85	-	-

		Persentase penanganan kasus hubungan industrial yang diselesaika-njuran	Kasus yang terlayani	Total kasus
Satuan		%	Kasus	Kasus
2018	Laki-Laki	51	84	84
	Perempuan	-	-	-
	Total	0,61	84	84
2019	Laki-Laki	18	47	47
	Perempuan	-	-	-
	Total	0,38	47	47
2020	Laki-Laki	36	54	54
	Perempuan	-	-	-
	Total	0,67	54	54
2021	Laki-Laki	28	39	39
	Perempuan	-	-	-
	Total	0,72	39	39

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



Gambar 7. 8 Jumlah Kasus yang Terlayani dan Total Kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 10 Total Peserta Pelatihan

		Total peserta pelatihan
Satuan		Orang
2017	Laki-Laki	528
	Perempuan	304
	Total	832
2018	Laki-Laki	52
	Perempuan	44
	Total	96
2019	Laki-Laki	66
	Perempuan	30

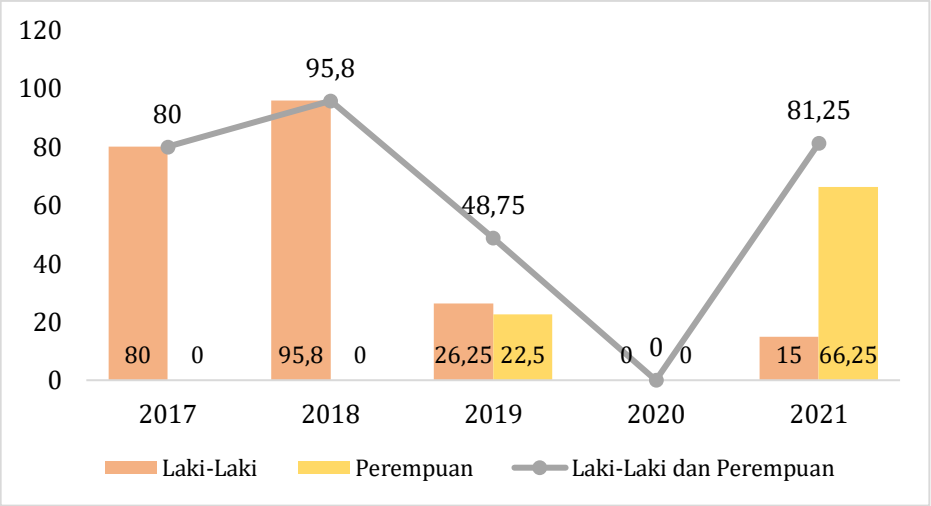
		Total peserta pelatihan
Satuan		Orang
	Total	96
2020	Laki-Laki	50
	Perempuan	30
	Total	80
2021	Laki-Laki	58
	Perempuan	249
	Total	307

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 11 Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi

		Persentase Peserta Pelatihan yang lulus uji Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti uji kompetensi
Satuan		%	Orang	Orang
2017	Laki-Laki	80	128	160
	Perempuan	-	-	-
	Total	80	128	160
2018	Laki-Laki	95,8	46	48
	Perempuan	-	-	-
	Total	95,8	46	48
2019	Laki-Laki	26,25	21	50
	Perempuan	22,5	18	30
	Total	48,75	39	80
2020	Laki-Laki	-	-	-
	Perempuan	-	-	-
	Total	-	-	-
2021	Laki-Laki	15	12	16
	Perempuan	66,25	53	64
	Total	81,25	65	80

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



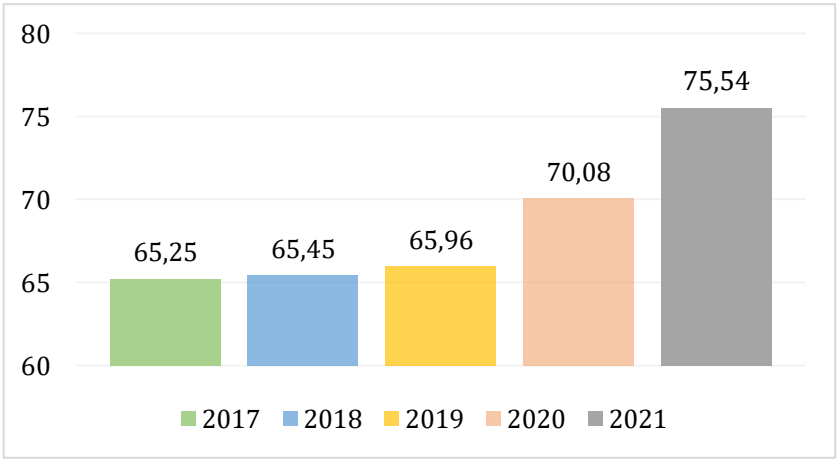
Gambar 7. 9 Persentase Peserta Pelatihan yang Lulus Uji Kompetensi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 12 Tercapainya Nilai SAKIP

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Tercapainya nilai SAKIP	65,25	65,45	65,96	70,08	75,54	Nilai

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



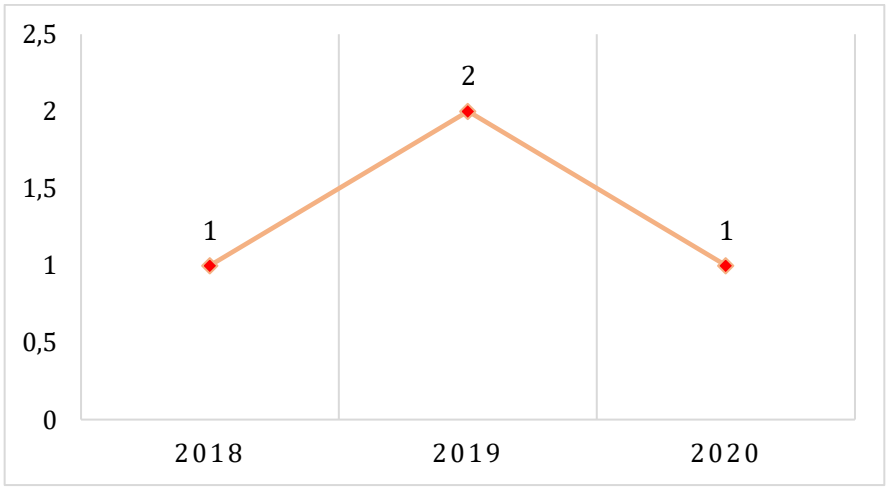
Gambar 7. 10 Tercapainya Nilai SAKIP

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 13 Jumlah Kunjungan ke Lokasi Transmigrasi

	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Kunjungan ke lokasi transmigrasi	1	2	1	Kali

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



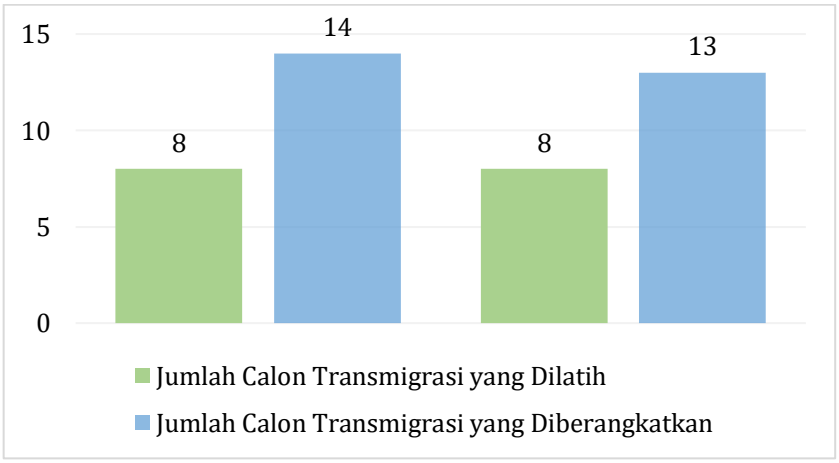
Gambar 7. 11 Jumlah Kunjungan ke Lokasi Transmigrasi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 14 Jumlah Calon Transmigrasi yang Dilatih

	2018	2019	Satuan
Jumlah Calon Transmigrasi yang Dilatih	8	8	Orang
Jumlah Calon Transmigrasi yang Diberangkatkan	14	13	Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



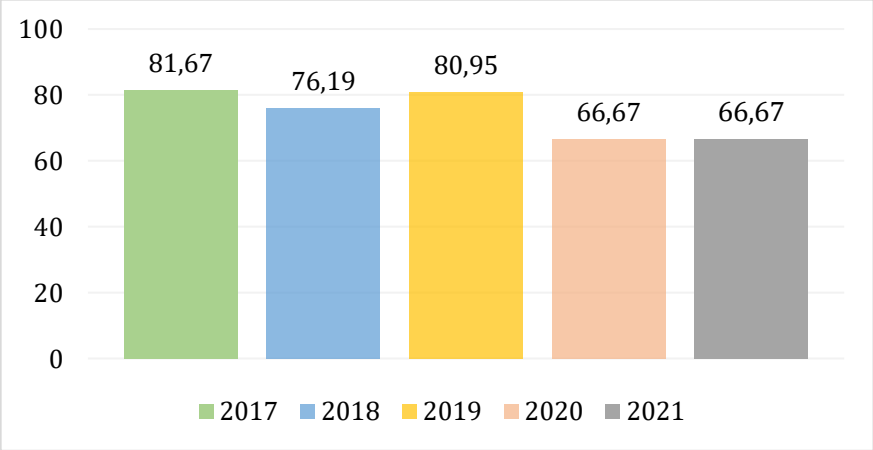
Gambar 7. 12 Jumlah Calon Transmigrasi yang Dilatih

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 15 Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	81,67	76,19	80,95	66,67	66,67	%
Jumlah kegiatan keseluruhan yg dilaksanakan mengacu ke RTKD	49	64	34	14	12	Kegiatan
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota	60	84	42	21	18	Kegiatan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



Gambar 7. 13 Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

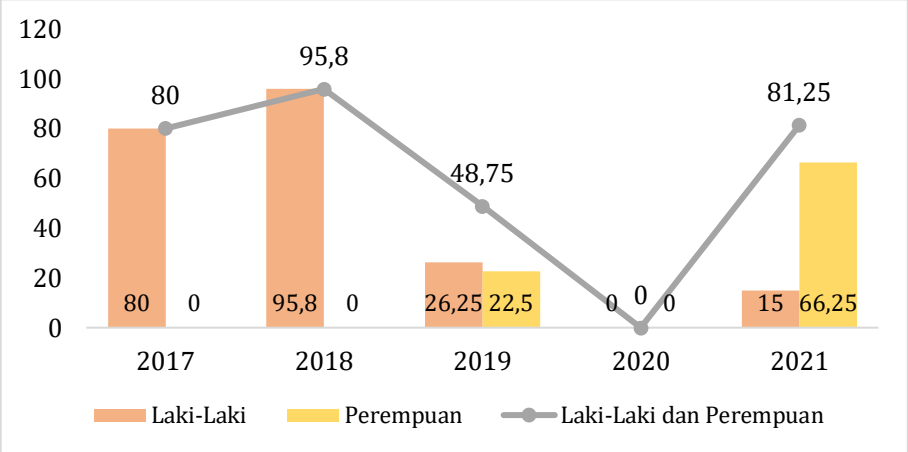
Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 16 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja keseluruhan
Satuan		**%**	**Orang**	**Orang**
2017	Laki-Laki	80	128	528
	Perempuan	0	0	304
	Total	80	128	832
2018	Laki-Laki	95,8	46	52
	Perempuan	0	0	44
	Total	95,8	46	96
2019	Laki-Laki	26,25	21	66
	Perempuan	22,5	18	30

		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja keseluruhan
Satuan		%	Orang	Orang
	Total	48,75	39	96
2020	Laki-Laki	-	-	50
	Perempuan	-	-	30
	Total	-	-	80
2021	Laki-Laki	15	12	58
	Perempuan	66,25	53	249
	Total	81,25	65	307

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



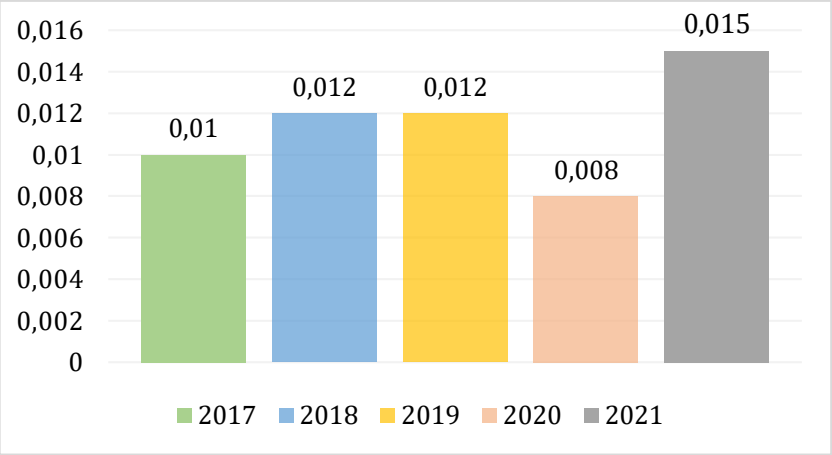
Gambar 7. 14 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 17 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,01	0,012	0,012	0,008	0,015	%
Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yg layak	99	105	94	83	113	Perusahaan
Jumlah perusahaan	1277	1277	1277	1277	1277	Perusahaan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



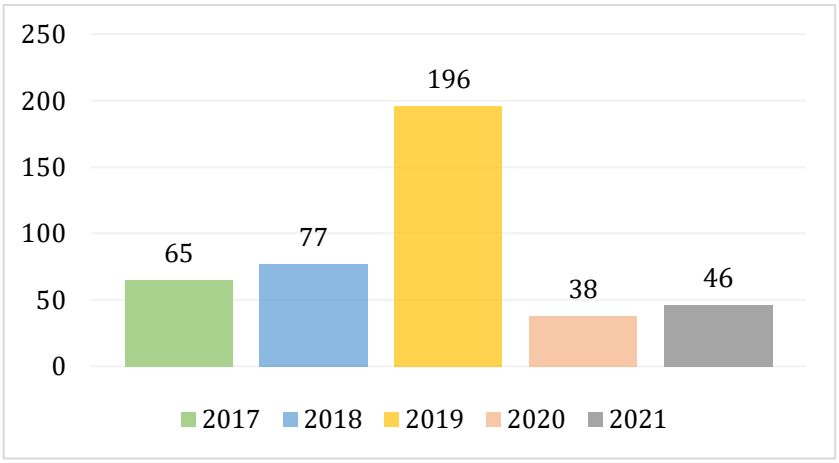
Gambar 7. 15 Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 18 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota

		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang mendaftar
Satuan		%	Orang	Orang
2017	Laki-Laki	-	4.419	6.851
	Perempuan	-	4.570	5.544
	Total	65	8.989	12.395
2018	Laki-Laki	-	4.071	9.624
	Perempuan	-	5.428	7.379
	Total	77	9.499	17.003
2019	Laki-Laki	-	3.433	5.560
	Perempuan	-	4.505	5.913
	Total	196	7.938	11.473
2020	Laki-Laki	-	1.011	2.703
	Perempuan	-	828	1.530
	Total	38	1.839	4.233
2021	Laki-Laki	-	1.157	2.976
	Perempuan	-	1.086	2.487
	Total	46	2.243	5.463

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



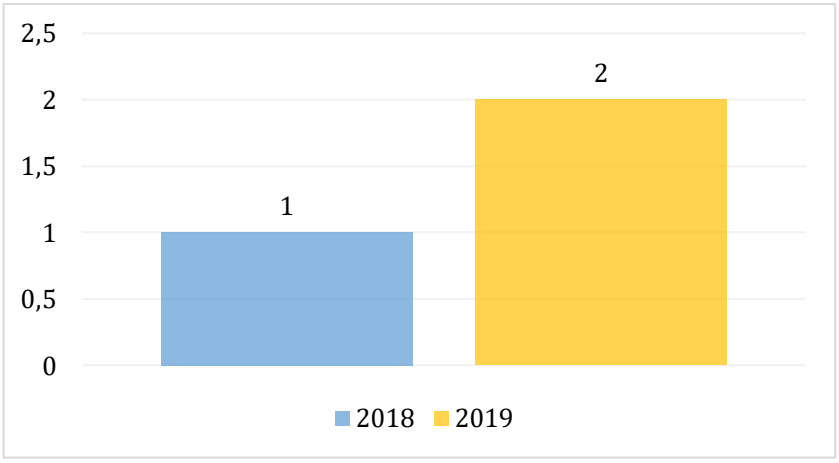
Gambar 7. 16 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 19 Jumlah Kerjasama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi (Komulatif)

	2018	2019	Satuan
Jumlah Kerjasama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi (Komulatif)	1	2	Lokasi
Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	14	13	KK

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



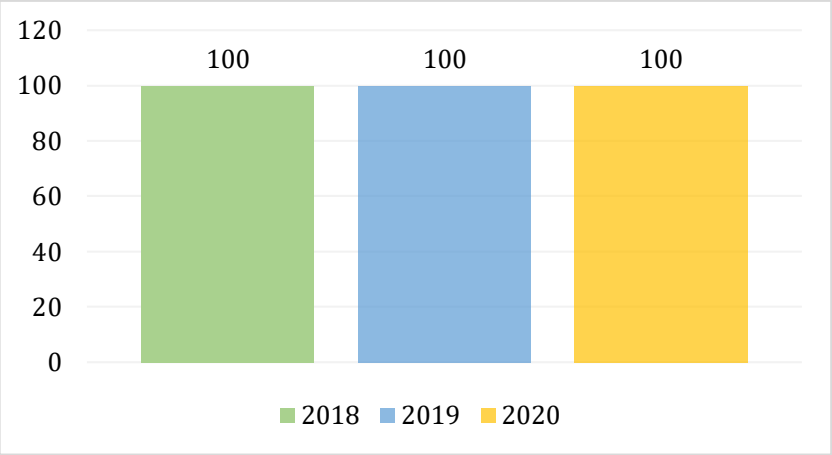
Gambar 7. 17 Jumlah Kerjasama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi (Komulatif)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 20 Persentase Kawasan Transmigrasi yang Termonitor

	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Kerjasama Antar Daerah Kawasan Transmigrasi (Komulatif)	100	100	100	%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



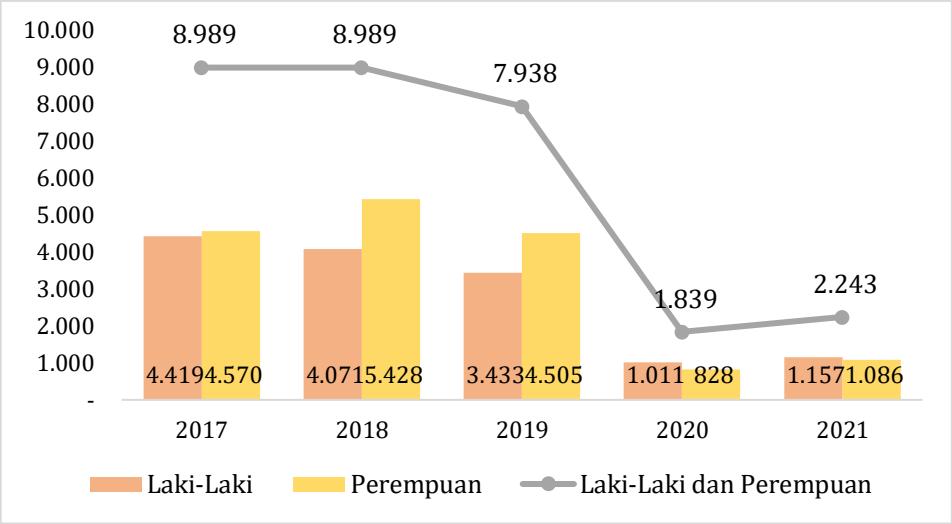
Gambar 7. 18 Persentase Kawasan Transmigrasi yang Termonitor

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 21 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja

	Jenis Kelamin	Jumlah penempatan tenaga kerja
2017	Laki-Laki	4.419
	Perempuan	4.570
	Total	8.989
2018	Laki-Laki	4.071
	Perempuan	5.428
	Total	9.499
2019	Laki-Laki	3.433
	Perempuan	4.505
	Total	7.938
2020	Laki-Laki	1.011
	Perempuan	828
	Total	1.839
2021	Laki-Laki	1.157
	Perempuan	1.086
	Total	2.243

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



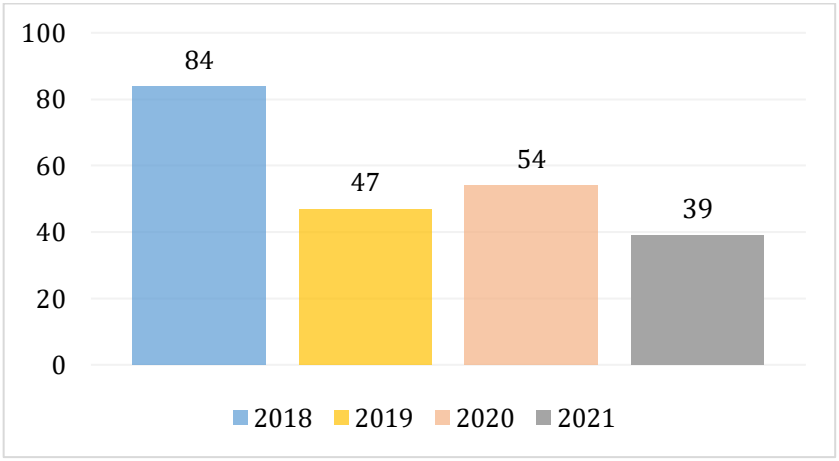
Gambar 7. 19 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 22 Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun	84	47	54	39	Kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



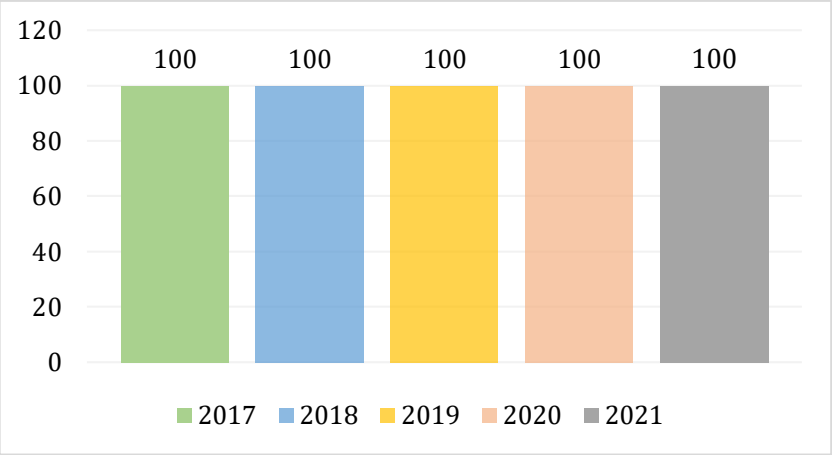
Gambar 7. 20 Jumlah Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 23 Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



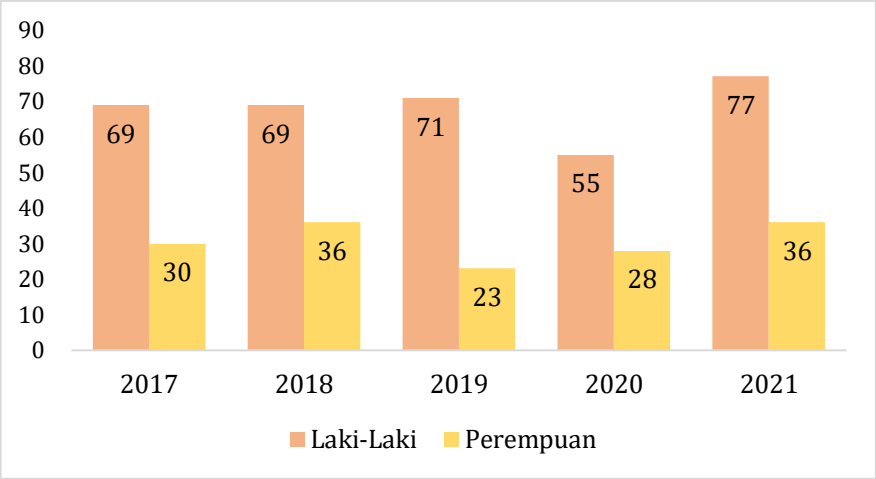
Gambar 7. 21 Persentase Perencanaan Tenaga Kerja yang Disusun

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 24 Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

		Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
	Jenis Kelamin	Satuan (%)
2017	Laki-Laki	69
	Perempuan	30
	Total	2.070
2018	Laki-Laki	69
	Perempuan	36
	Total	2.484
2019	Laki-Laki	71
	Perempuan	23
	Total	1.633
2020	Laki-Laki	55
	Perempuan	28
	Total	1.540
2021	Laki-Laki	77
	Perempuan	36
	Total	2.772

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



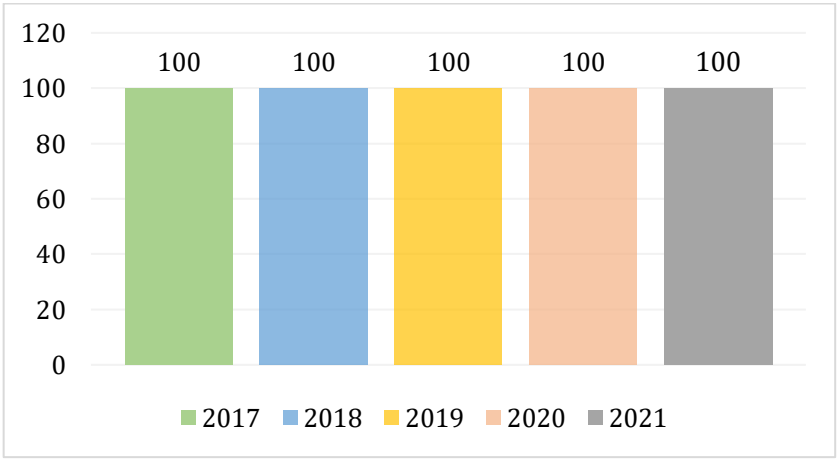
Gambar 7. 22 Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 25 Persentase Pelayanan Administrasi Kantor

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pelayanan administrasi kantor	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



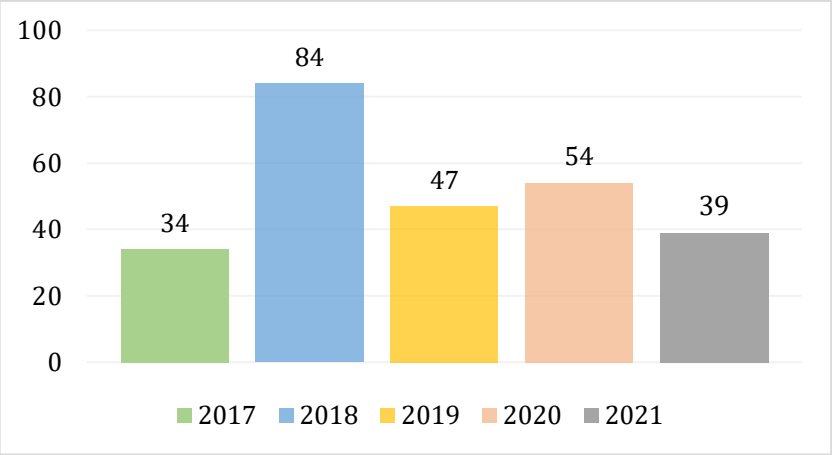
Gambar 7. 23 Persentase Pelayanan Administrasi Kantor

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

Tabel 7. 26 Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pelayanan administrasi kantor	34	84	47	54	39	Kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja



Gambar 7. 24 Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja

Sumber: Dinas Tenaga Kerja

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DESKRIPSI

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Sedangkan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah. Pada tahun 2017, di Kabupaten Pasuruan sebanyak 5794 dan terus mengalami peningkatan jumlah hingga akhir tahun 2021 sebanyak 7.978 IKM. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah IKM, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan sertifikat asal barang, yang mana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor. SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, da-tau diolah di Indonesia. Pada tahun 2017, penerbitan SKA di Kabupaten Pasuruan berjumlah 2.860 dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga tahun 2021 sebanyak 2.675 SKA. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah SKA yang diterbitkan, maka semakin tinggi pula nilai ekspor non migas (US$ dalam juta).

Industri adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan/pembuatan bahan baku da-tau barang jadi menjadi barang

dengan nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pada tahun 2017, pertumbuhan PDRB sektor industri di Kabupaten Pasuruan sebesar 5,71% dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga tahun 2021 sebesar 5,27%. Nilai tersebut menunjukkan semakin rendah persentase, maka semakin lambat pertumbuhan PDRB sektor industri di Kabupaten Pasuruan.

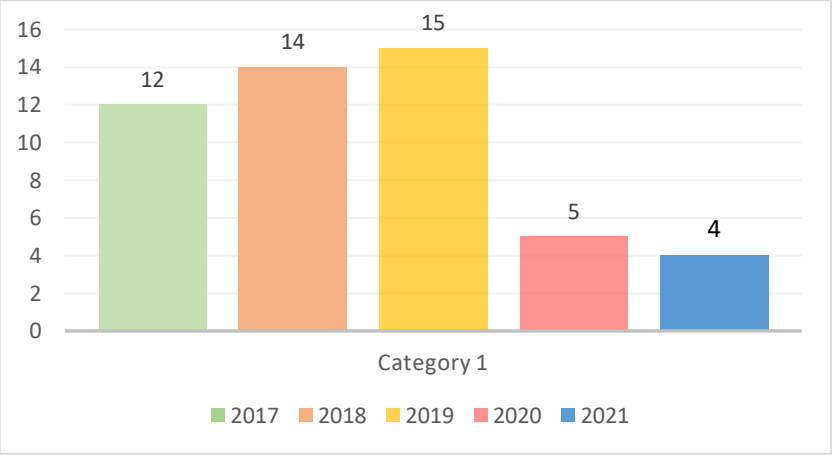
Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kegiatan. Nilai produksi sektor industri di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar Rp54.696.836,50 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar Rp65.160.420,00. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diproduksi di Kabupaten Pasuruan.

Tenaga kerja adalah orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsungd alam proses produksi barang/jasa. Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan sebanyak 2.584 orang dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 mencapai 2.638 orang. Nilai tersebut menunjukkan semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak pula produksi barang atau jasa yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 8. 1 Revitalisasi Pasar Daerah

Tahun	Jumlah	Satuan
2017	12	Unit
2018	14	Unit
2019	15	Unit
2020	5	Unit
2021	4	Unit

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



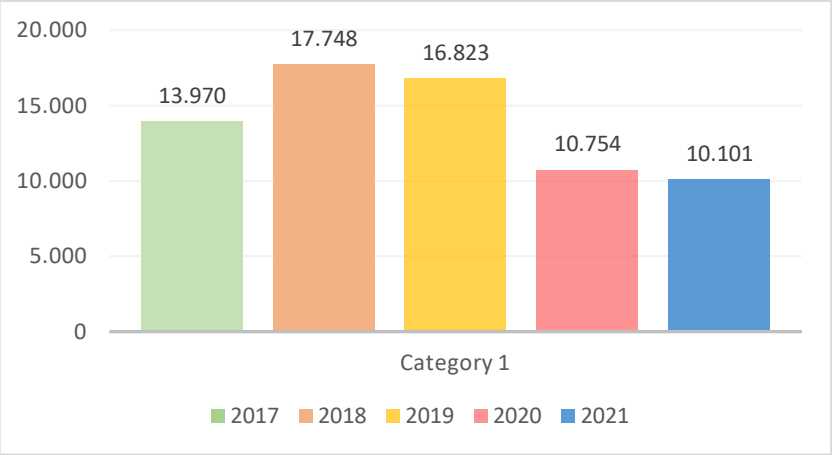
Gambar 8. 1 Revitalisasi Pasar Daerah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 2 Kinerja Layanan Metrologi Legal

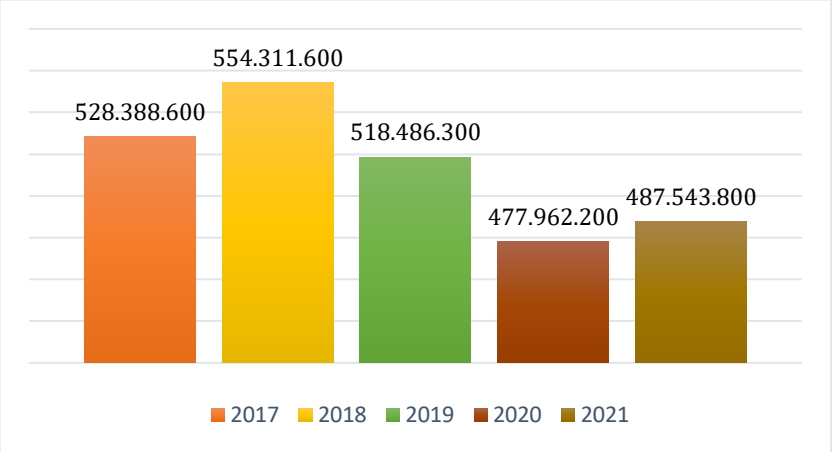
Tahun	Jumlah UTTP (Unit)	Retribusi (Rp,)
2017	13.970	528.388.600
2018	17.748	554.311.600
2019	16.823	518.486.300
2020	10.754	477.962.200
2021	10.101	487.543.800

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Gambar 8. 2 Jumlah UTTP (Unit)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



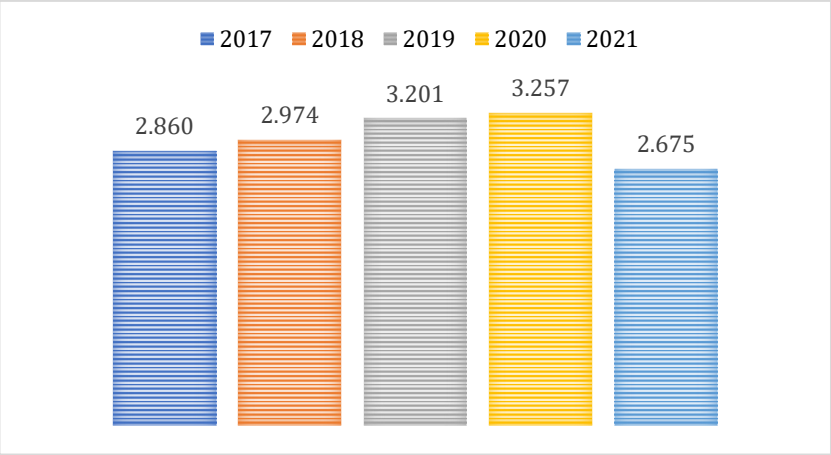
Gambar 8. 3 Retribusi (Rp)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 3 Penerbitan Surat Keterangan Asal

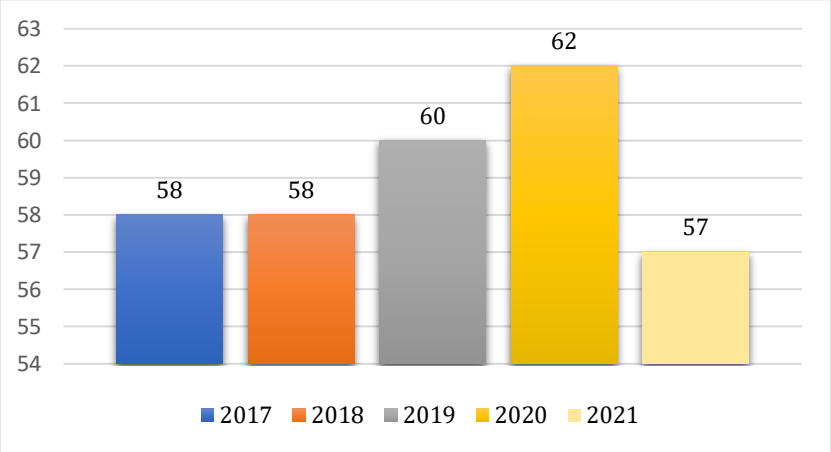
Tahun	Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Negara Tujuan (Satuan)	Nilai Ekspor Non Migas US $ Dalam Juta (Juta)
2017	2.860	58	14.051.576
2018	2.974	58	13.940.838
2019	3.201	60	10.209.881
2020	3.257	62	10.821.645
2021	2.675	57	123.258.895

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



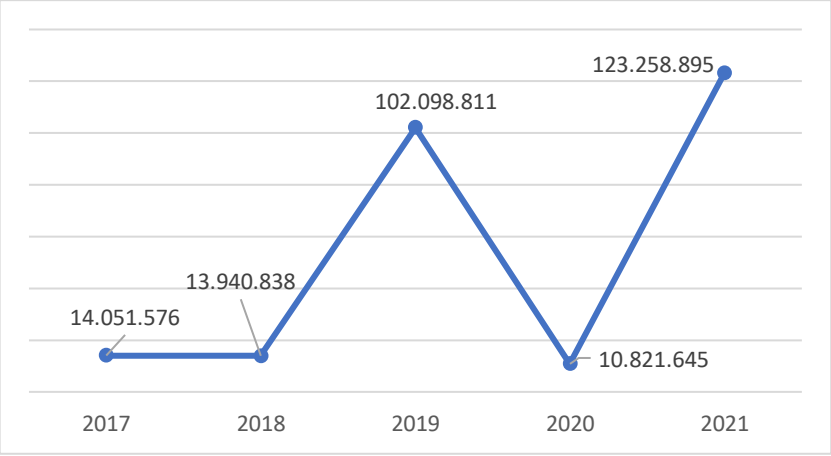
Gambar 8. 4 Penerbitan Surat Keterangan Asal

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Gambar 8. 5 Jumlah Negara Tujuan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



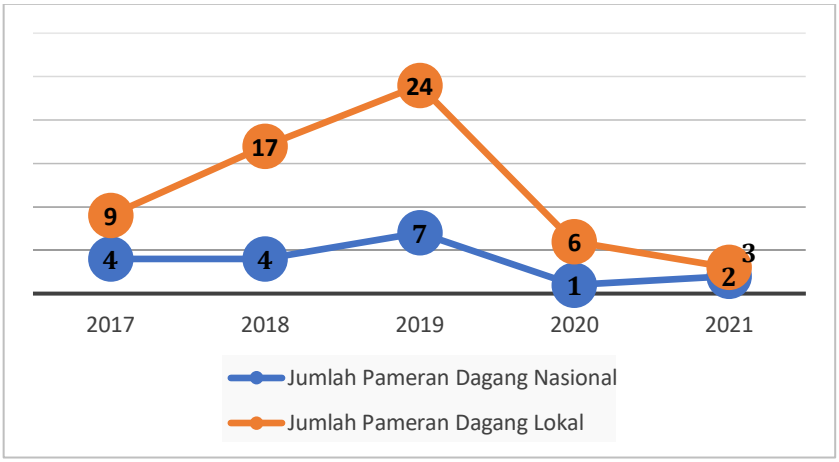
Gambar 8. 6 Nilai Ekspor Non Migas US $ Dalam Juta (Juta)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 4 Penyelenggaraan Pameran Dagang

Tahun	Jumlah Pameran Dagang Nasional (Kali)	Jumlah Pameran Dagang Lokal (Kali)
2017	4	9
2018	4	17
2019	7	24
2020	1	6
2021	2	3

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Gambar 8. 7 Jumlah Pameran Dagang Nasional dan Lokal

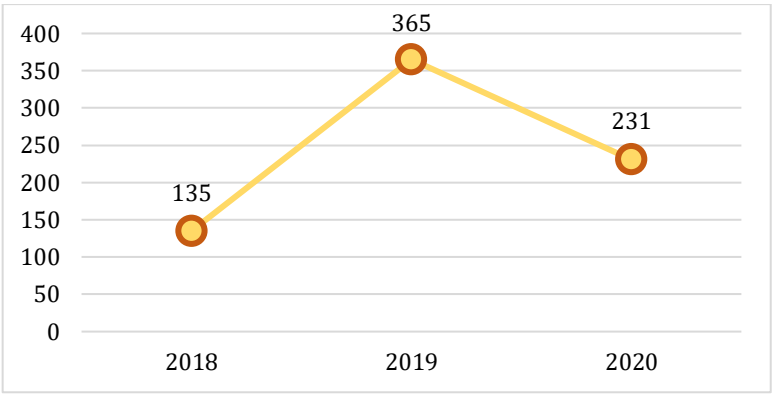
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 5 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Kecamatan	2018	2019	2020	Satuan
Kecamatan Bangil	10	29	41	Unit
Kecamatan Beji	10	13	20	Unit
Kecamatan Gempol	8	18	30	Unit
Kecamatan Gondang Wetan	7	10	4	Unit
Kecamatan Grati	-	20	20	Unit
Kecamatan Kejayan	6	10	5	Unit
Kecamatan Kraton	-	20	3	Unit
Kecamatan Lekok	10	10	4	Unit
Kecamatan Nguling	9	15	-	Unit
Kecamatan Pandaan	8	37	35	Unit
Kecamatan Pohjentrek	5	2	-	Unit
Kecamatan Prigen	8	15	14	Unit
Kecamatan Purwodadi	5	20	10	Unit
Kecamatan Purwosari	8	18	10	Unit
Kecamatan Rejoso	5	10	4	Unit
Kecamatan Rembang	7	11	2	Unit
Kecamatan Sukorejo	9	28	10	Unit
Kecamatan Tosari	-	27	-	Unit
Kecamatan Tutur	2	25	5	Unit

Kecamatan	2018	2019	2020	Satuan
Kecamatan Winongan	7	15	10	Unit
Kecamatan Wonorejo	11	12	4	Unit
Jumlah	**135**	**365**	**231**	**Pelaku IKM**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

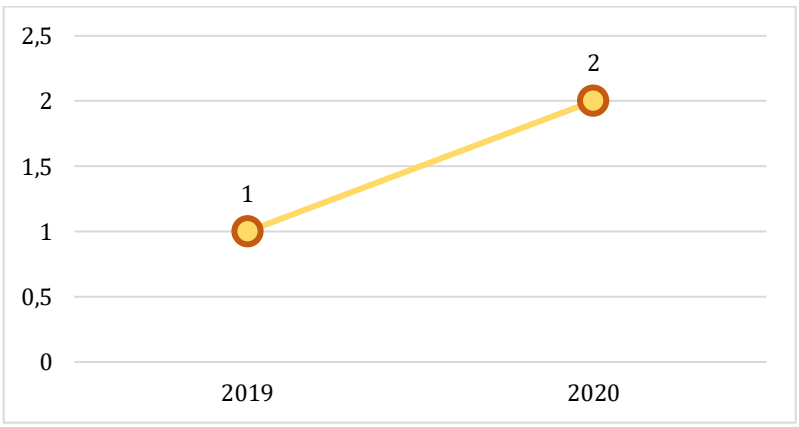


Gambar 8. 8 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 6 Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik

Kecamatan	2019	2020	Satuan
Kecamatan Nguling	1	-	Unit
Kecamatan Pohjentrek	-	1	Unit
Kecamatan Sukorejo	-	1	Unit
Jumlah	1	2	jumlah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



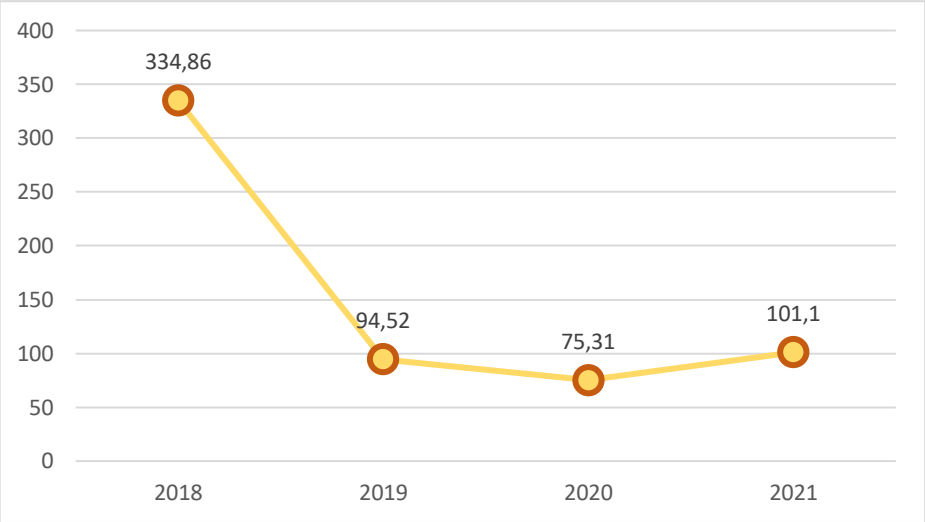
Gambar 8. 9 Jumlah Pasar Rakyat Berbasis Elektronik

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 7 Rasio Pelayanan Tera/Tera Ulang yang Diterbitkan Terhadap Seluruh Pengajuan

Tahun	Rasio Pelayanan Tera/Tera Ulang yang Diterbitkan Terhadap Seluruh Pengajuan	Satuan
2018	334,86	%
2019	94,52	%
2020	75,31	%
2021	101,1	%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



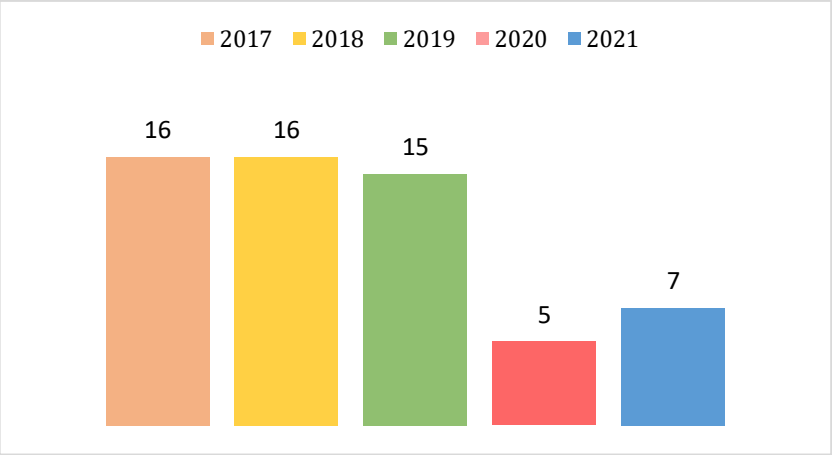
Gambar 8. 10 Rasio Pelayanan Tera/Tera Ulang yang Diterbitkan Terhadap Seluruh Pengajuan

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 8 Meningkatnya Pengelolaan Pasar (Jumlah Pengelolaan Pasar)

Tahun	Jumlah (Unit)
2017	16
2018	16
2019	15
2020	5
2021	7

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



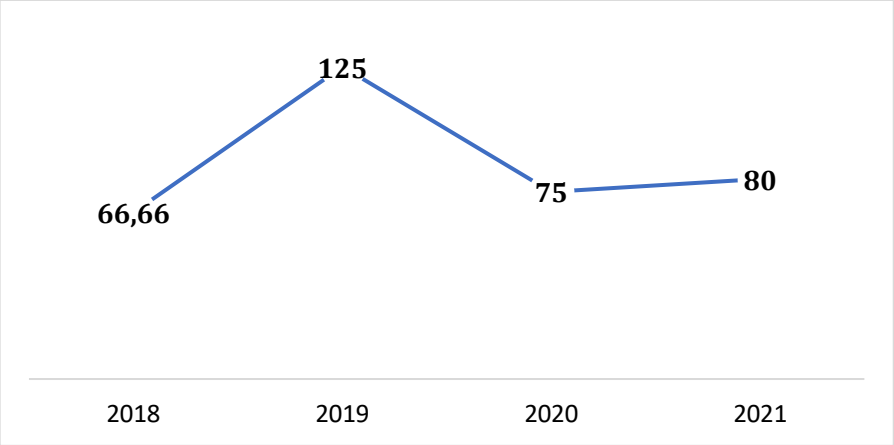
Gambar 8. 11 Meningkatnya Pengelolaan Pasar (Jumlah Pengelolaan Pasar)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 9 Peningkatan Ketertiban PKL dan Asongan

Tahun	Peningkatan Ketertiban PKL dan Asongan
2018	66,66
2019	125
2020	75
2021	80

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



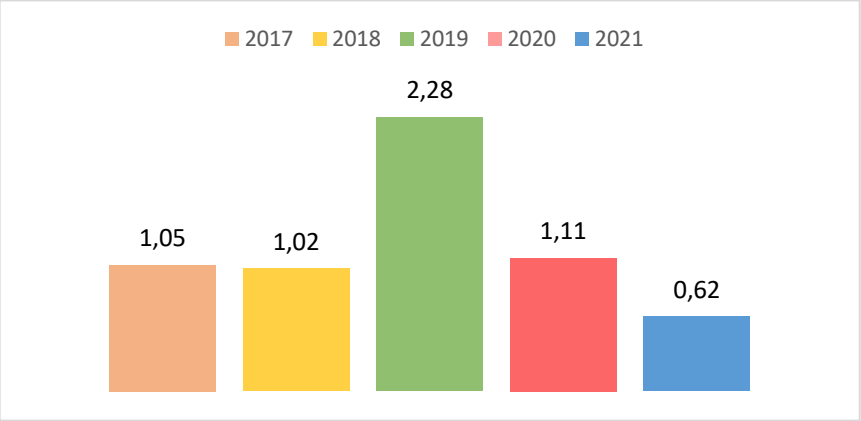
Gambar 8. 12 Persentase Peningkatan IKM yang Terbina

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 10 Persentase Peningkatan IKM yang Terbina

Tahun	Persentase Peningkatan IKM yang Terbina
2017	1,05
2018	1,02
2019	2,28
2020	1,11
2021	0,62

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



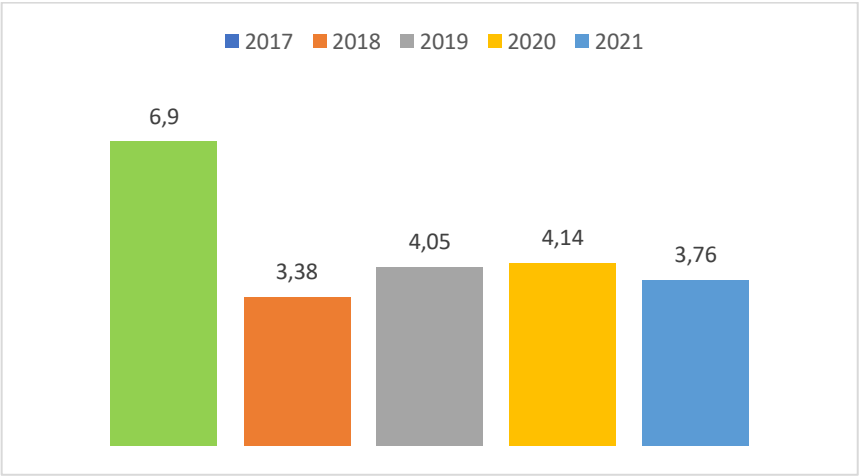
Gambar 8. 13 Persentase Peningkatan IKM yang Terbina

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 11 Persentase IKM yang Terfasilitasi

Tahun	(%)
2017	6,90
2018	3,38
2019	4,05
2020	4,14
2021	3,76

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



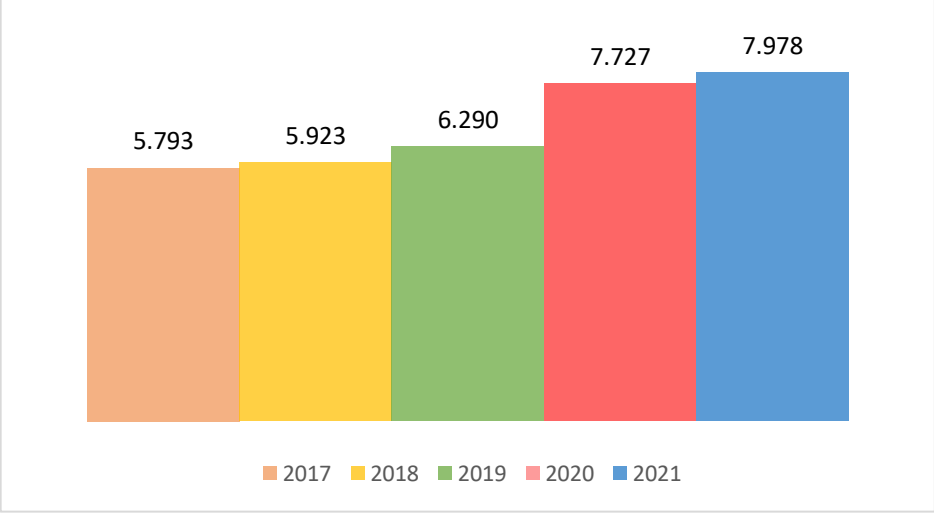
Gambar 8.14 Persentase IKM yang Terfasilitasi

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 12 Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	366	378	448	606	610	Unit
Kecamatan Beji	97	99	140	203	195	Unit
Kecamatan Gempol	103	138	232	267	269	Unit
Kecamatan Gondang Wetan	819	821	885	897	915	Unit
Kecamatan Grati	65	77	81	108	131	Unit
Kecamatan Kejayan	540	541	564	586	600	Unit
Kecamatan Kraton	542	545	586	599	684	Unit
Kecamatan Lekok	118	118	142	152	158	Unit
Kecamatan Lumbang	-	-	23	35	63	Unit
Kecamatan Nguling	58	56	113	165	170	Unit
Kecamatan Pandaan	111	129	208	305	307	Unit
Kecamatan Pasrepan	85	86	143	221	179	Unit
Kecamatan Pohjentrek	214	217	256	285	293	Unit
Kecamatan Prigen	34	45	79	124	120	Unit
Kecamatan Purwodadi	361	366	420	445	449	Unit
Kecamatan Purwosari	305	310	379	383	402	Unit
Kecamatan Puspo	6	6	56	62	65	Unit
Kecamatan Rejoso	54	55	125	143	181	Unit
Kecamatan Rembang	1.219	1.222	1.250	1.278	1.282	Unit
Kecamatan Sukorejo	536	550	553	554	563	Unit
Kecamatan Tosari	1	1	18	25	31	Unit
Kecamatan Tutur	68	71	88	133	144	Unit
Kecamatan Winongan	44	44	75	85	94	Unit
Kecamatan Wonorejo	47	48	56	66	73	Unit
Jumlah	5.793	5.923	6.920	7.727	7.978	Unit

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



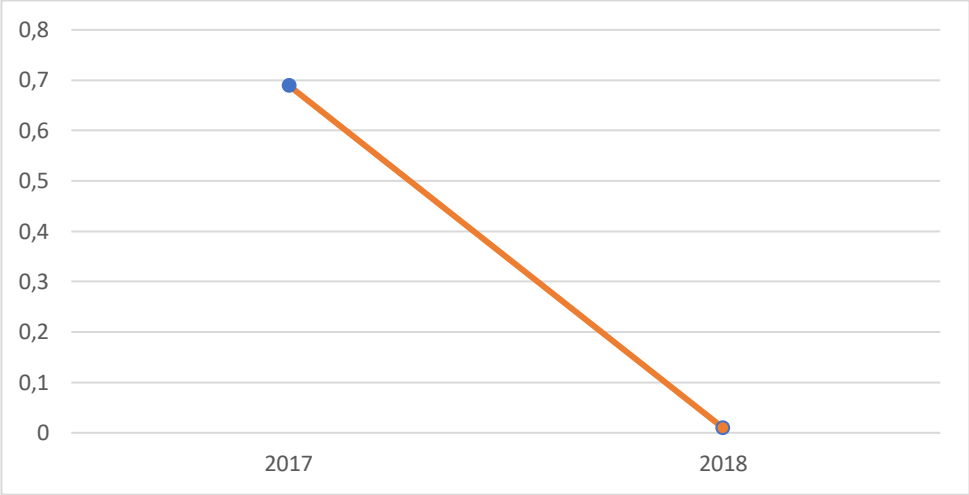
Gambar 8. 15 Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 13 Indeks Daya Beli

Tahun	(Nilai Indeks)
2017	0,69
2018	0,01

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



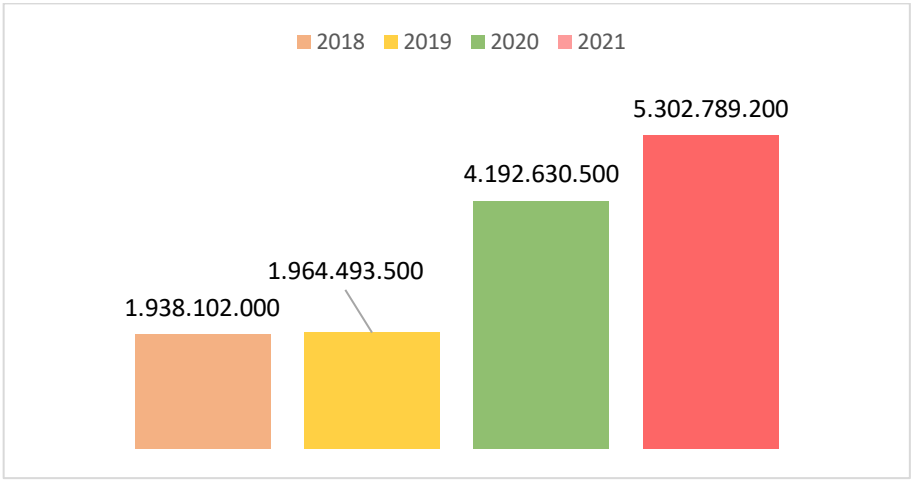
Gambar 8. 16 Indeks Daya Beli

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 14 Nilai Transaksi Perdagangan

Tahun	Jumlah (Rp,)
2018	1.938.102.000
2019	1.964.493.500
2020	4.192.630.500
2021	5.302.789.200

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

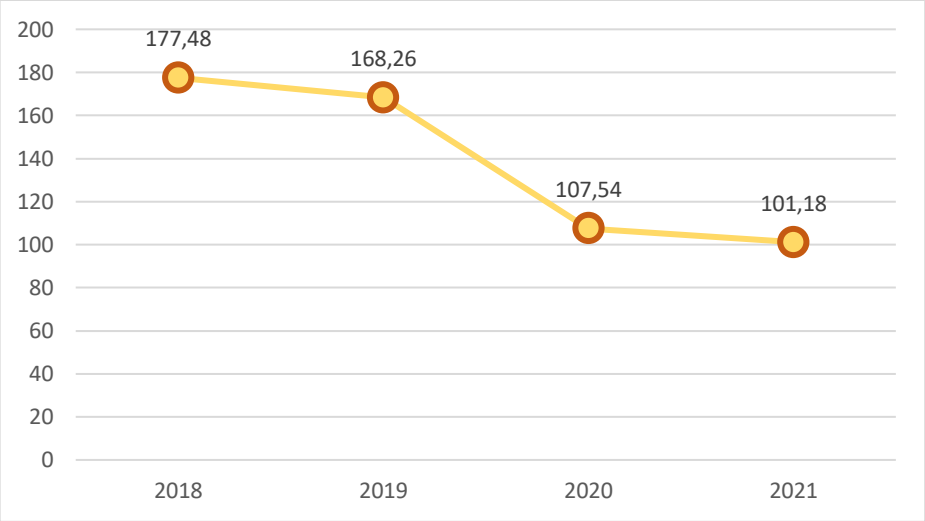


Gambar 8. 17 Nilai Transaksi Perdagangan

Tabel 8. 15 Persentase Alat Ukur yang Terstandarisasi

Tahun	(%)
2018	177,48
2019	168,26
2020	107,54
2021	101,18

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



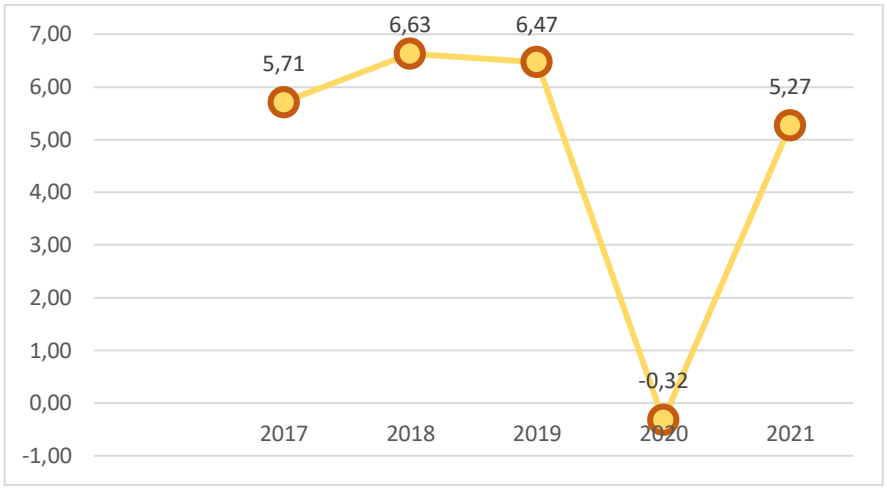
Gambar 8. 18 Persentase alat Ukur yang Terstandarisasi

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 16 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Tahun	Jumlah (%)
2017	5,71
2018	6,63
2019	6,47
2020	-0,32
2021	5,27

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



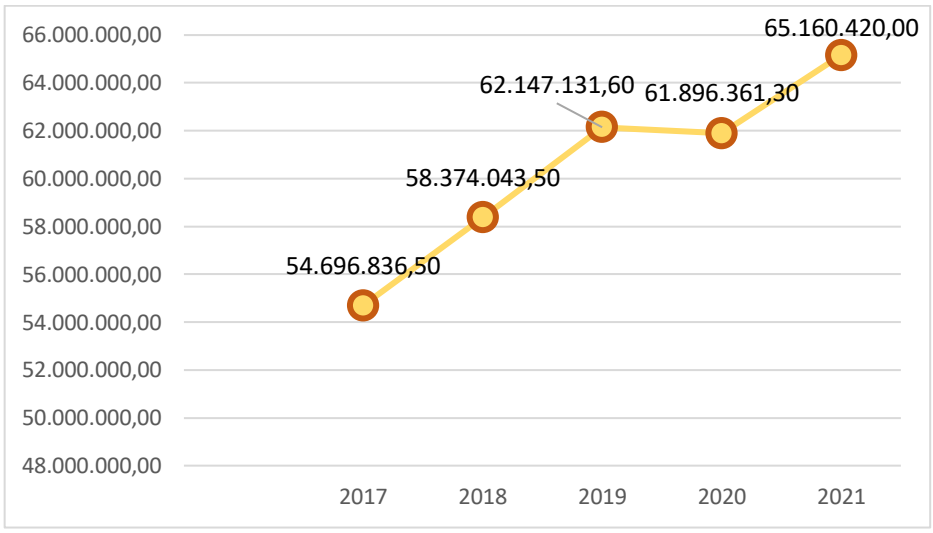
Gambar 8. 19 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 17 Nilai Produksi Sektor Industri

Tahun	Nilai Produksi Sektor Industri
2017	54.696.836,50
2018	58.374.043,50
2019	62.147.131,60
2020	61.896.361,30
2021	65.160.420,00

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Gambar 8. 20 Nilai Produksi Sektor Industri (Juta Rupiah)

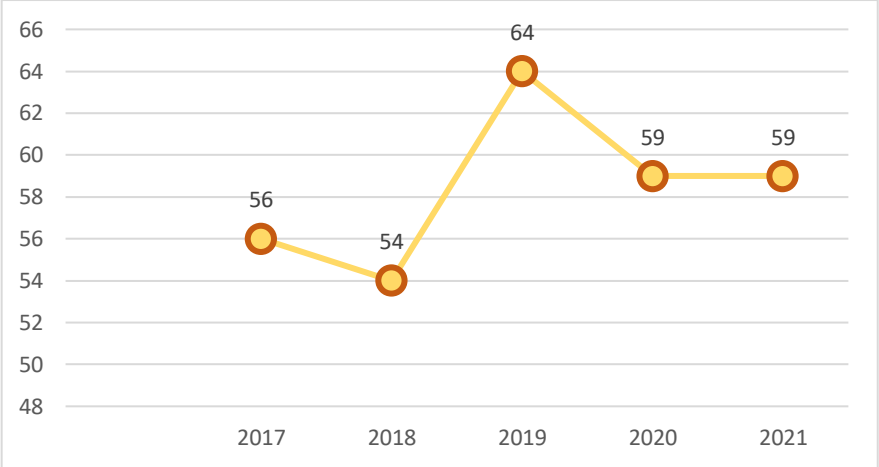
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 18 Perkembangan Industri Kecil Menengah Besar

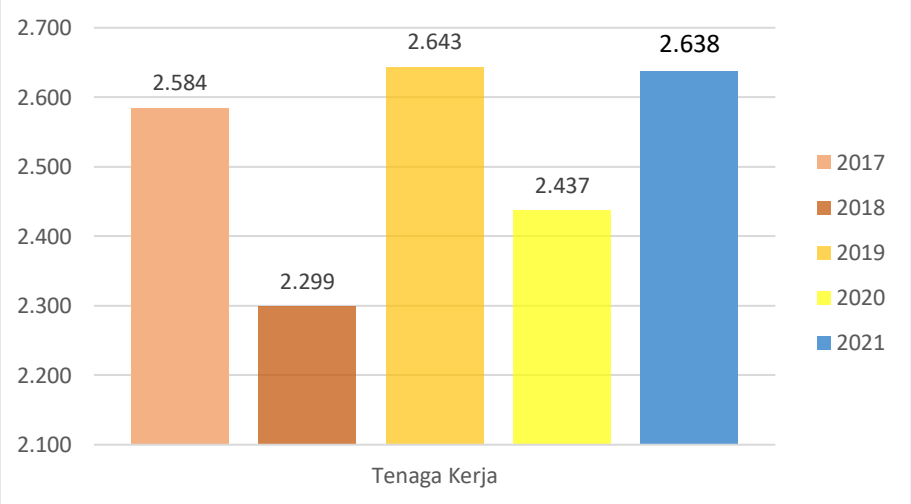
Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	5	4	2	5	5	unit
Kecamatan Beji	2	2	1	2	2	unit
Kecamatan Gempol	5	2	5	8	10	unit
Kecamatan Gondang Wetan	2	6	4	2	2	unit
Kecamatan Grati		1	3	2	2	unit
Kecamatan Kejayan	3	4	3	2	2	unit
Kecamatan Kraton	7	4	2	1	1	unit
Kecamatan Lekok	2	1	3	1	1	unit
Kecamatan Lumbang	-	2	2	-	-	unit
Kecamatan Nguling	1	-	1	-	2	unit
Kecamatan Pandaan	4	1	8	3	3	unit
Kecamatan Pasrepan	-	2	3	2	13	unit
Kecamatan Pohjentrek	-	-	1	1	1	unit
Kecamatan Prigen	-	-	2	3	3	unit
Kecamatan Purwodadi	3	2	2	1	1	unit
Kecamatan Purwosari	1	2	1	-	-	unit
Kecamatan Puspo	1	-	-	-	-	unit
Kecamatan Rejoso	1	5	6	3	3	unit
Kecamatan Rembang	2	3	3	2	2	unit
Kecamatan Sukorejo	1	-	5	-	-	unit
Kecamatan Tosari	-	2	-	-	-	unit
Kecamatan Tutur	2	4	2	-	1	unit
Kecamatan Winongan	4	3	2	2	2	unit
Kecamatan Wonorejo	4	4	3	3	3	unit
Jumlah	56	54	64	59	59	unit
Tenaga Kerja	2.584	2.299	2.643	2.437	2.638	orang

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Nilai Investasi	656.555.215,50	117.700.035	135.355.040	124.797.346	136.423.025	Rp

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

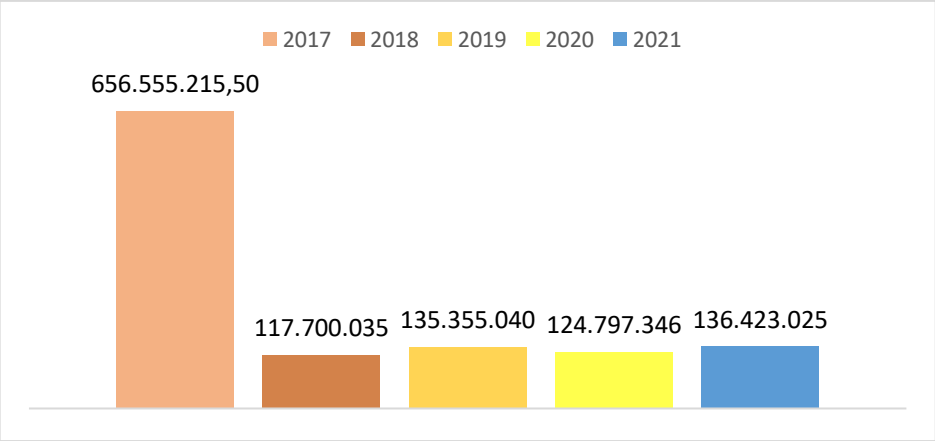


Gambar 8. 21 Jumlah Industri Kecil Menengah Besar



Gambar 8. 22 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah Besar

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



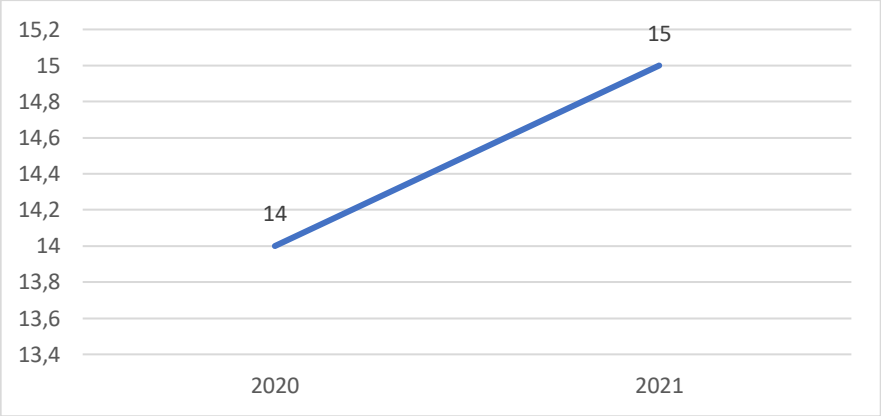
Gambar 8. 23 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah Besar

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8.19 Peningkatan Pengawasan Terhadap Peralatan dan Sarana

Tahun	Unit
2020	14
2021	15

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



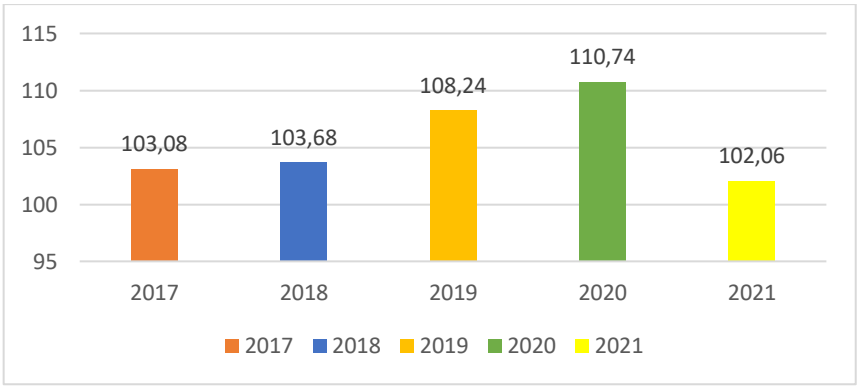
Gambar 8. 24 Peningkatan Pengawasan Terhadap Peralatan dan Sarana

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8.20 Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten

Tahun	(%)	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun n-1
2017	103,08	6.296	6.108
2018	103,68	6.528	6.296
2019	108,24	7.066	6.528
2020	110,74	7.825	7.066
2021	102,06	7.986	7.825

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



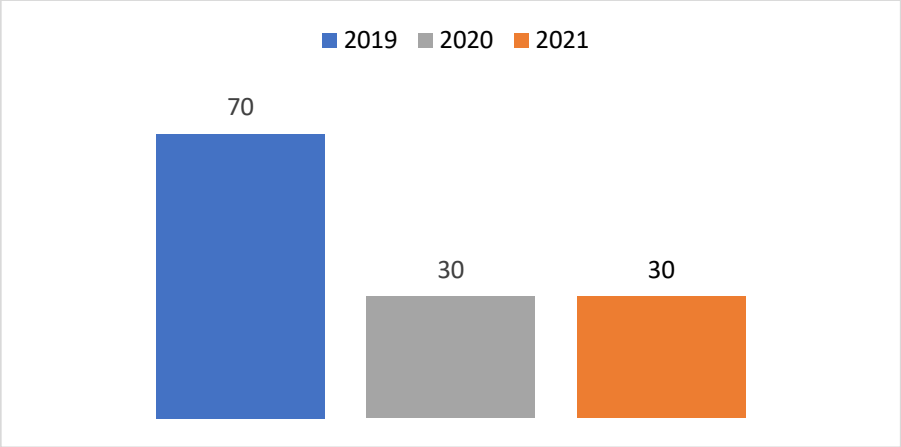
Gambar 8. 25 Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 21 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP

Tahun	(%)
2019	70
2020	30
2021	30

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



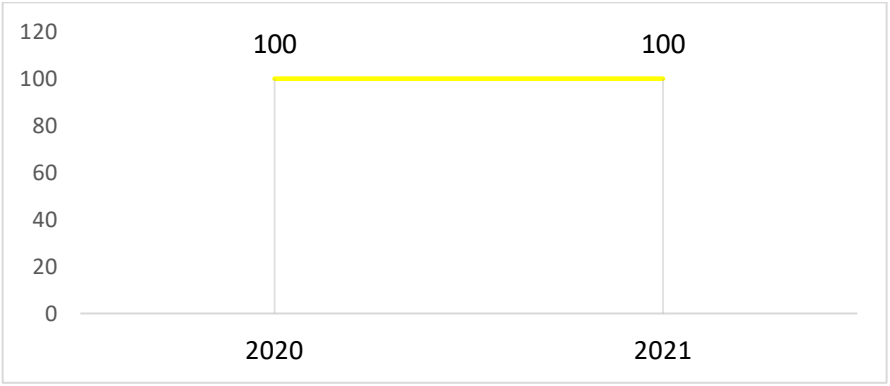
Gambar 8. 26 Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 22 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

Tahun	(%)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Jumlah izin yang dikeluarkan
2020	100	18	18
2021	100	8	8

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Gambar 8. 27 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 23 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

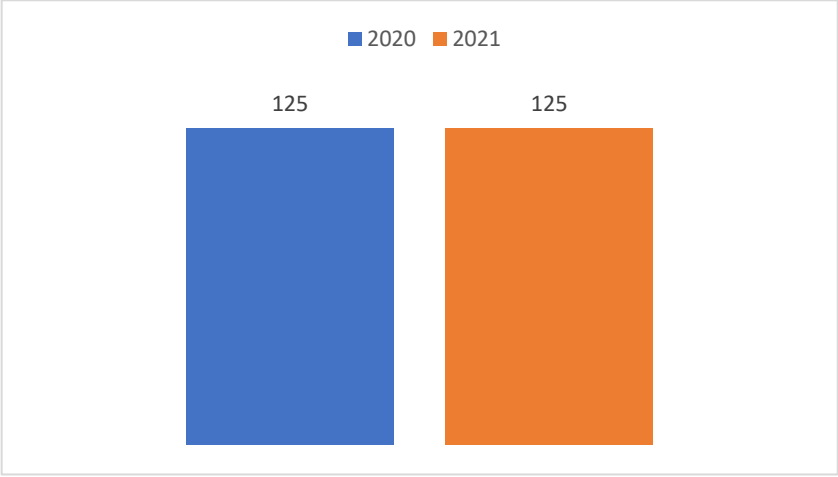
Tahun	(%)	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Jumlah izin yang dikeluarkan
2021	12,5	3	24

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 24 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini

	2020	2021	Satuan
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125	125	%
Keterkinian informasi industri :			
Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan	50	50	%
Tersedianya informasi dengan batas waktu 7-12 bulan	25	25	%
Kelengkapan informasi industri meliputi :			
Informasi produksi dan kapasitas produksi	10	10	%
Informasi bahan baku dan bahan penolong	10	10	%
Informasi bahan bakar / energi	10	10	%
Informasi tenaga kerja	10	10	%
Informasi Investasi	10	10	%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Gambar 8. 28 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (%)

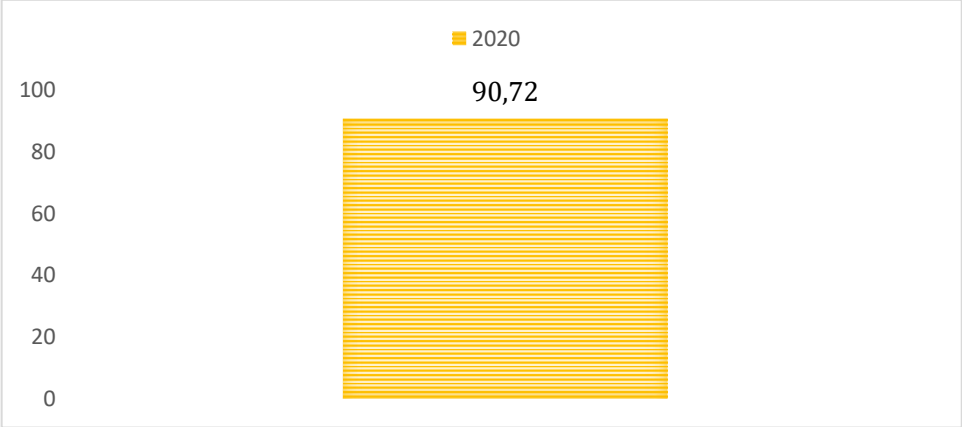
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8.25 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP)

	2020	Satuan
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP)	90,72	%

	2020	Satuan
Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	3.216	Pelaku Usaha
Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	3.545	Pelaku Usaha

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

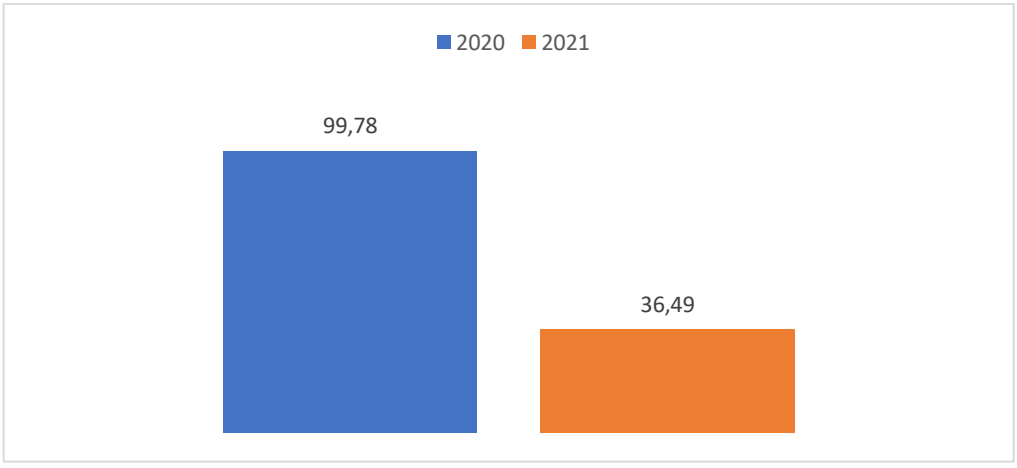


Gambar 8. 29 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP)

Tabel 8. 26 Kinerja Realisasi Pupuk

	2019	2020	Satuan
Kinerja realisasi pupuk	99,78	36,49	%
Realisasi	64.867	51.547,93	rencana terealisasi
RDKK	65.013	141.266,77	jumlah rencana

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



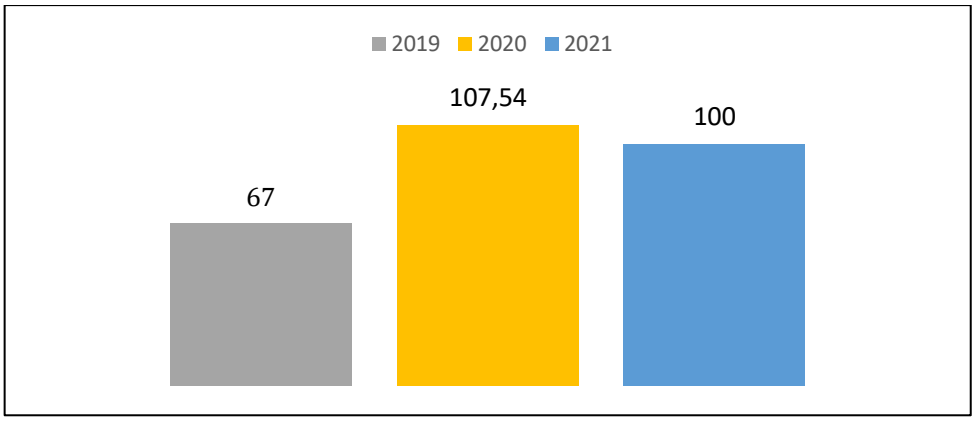
Gambar 8. 30 Kinerja Realisasi Pupuk

Tabel 8. 27 Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku

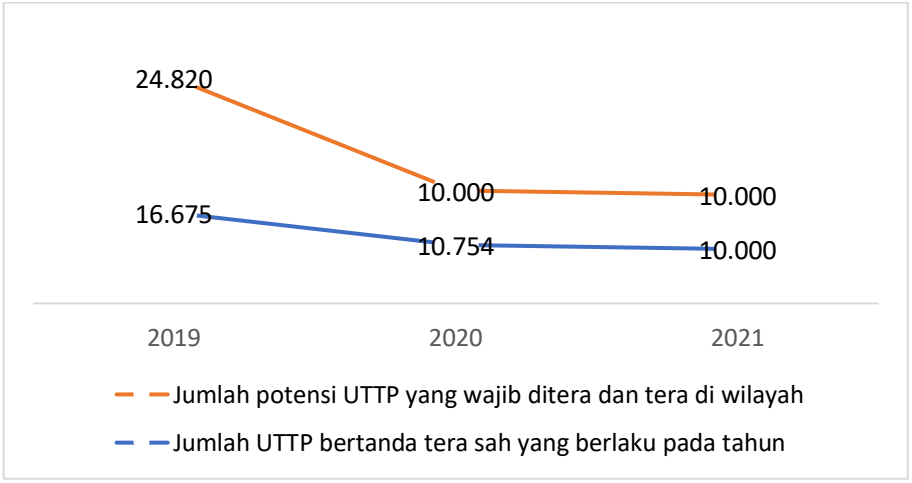
	2019	2020	2021	Satuan

Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	67	107,54	100	%
Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun	16.675	10.754	10.000	UTTP
Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera di wilayah	24.820	10.000	10.000	UTTP

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Gambar 8. 31 Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku



Gambar 8. 32 Jumlah UTTP

Tabel 8. 28 Persentase Peningkatan Hak Sewa Tempat Pasar dan Pusat Perbelanjaan yang Menjadi Kewenangan

Tahun	%
2021	37,91

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 29 Persentase Perusahaan Eksportir yang Dibina

Tahun	%
2021	37,91

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 30 Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Tahun	%
2021	16,14

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 31 Persentase Jumlah Komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Penting yang Harganya Stabil

Tahun	%
2021	98,97

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 32 Persentase Nilai Ekspor

Tahun	%
2021	0,95

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 8. 33 Persentase Layanan Tera Tera Ulang Terhadap Potensi UTTP di Kabupaten

Tahun	%
2021	98,46

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DESKRIPSI

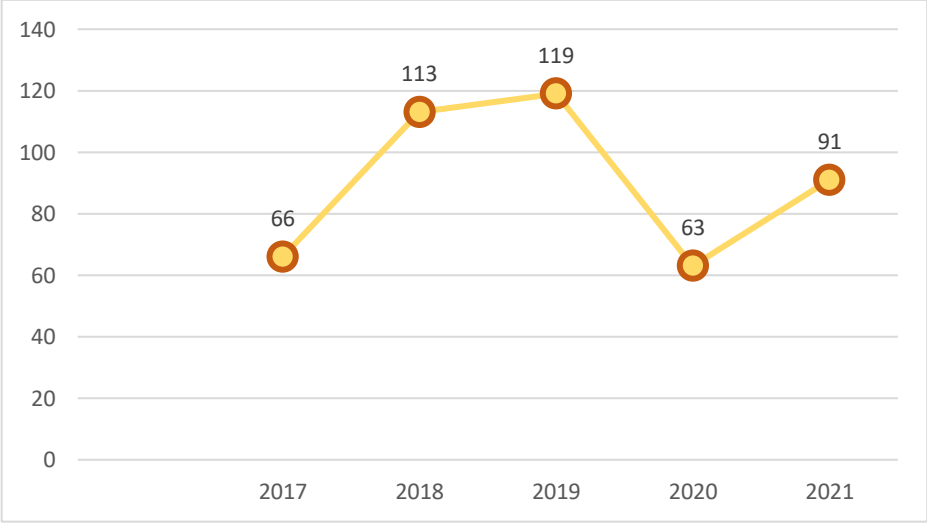
Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan, jumlah kejadian bencana kebakaran terbanyak di wilayah Kabupaten Pasuruan terjadi pada tahun 2019, yaitu 119 kali, dan di tahun 2018 adalah sebanyak 113 kali. Kasus bencana kebakaran terbanyak di tahun 2019 terjadi di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, yaitu sebanyak 18 kali bencana kebakaran. Namun begitu semua kasus kebakaran tersebut selalu ditangani oleh pihak yang berwajib menanggulangi kasus kebakaran. Begitu juga dengan gangguan Tibumtranmas (ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat) yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sudah ditangani secara menyeluruh oleh Satpol PP, dimana kasus terbanyak terjadi pada tahun 2019, yaitu 178 kasus.

Namun dalam hal jumlah anggota linmas di Kabupaten Pasuruan yang sudah terdaftar KTA (Kartu Tanda Anggota) masih sangat sedikit, bahkan di tahun 2020 hanya 3,75 persen anggota linmas yang sudah terdaftar dan memiliki KTA

Tabel 9. 1 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Bangil	11	14	9	13	16	Kali
Kecamatan Beji	11	27	15	7	11	Kali
Kecamatan Gempol	9	11	16	5	8	Kali
Kecamatan Gondang Wetan	1	2	1	-	-	Kali
Kecamatan Grati	1	1	1	-	2	Kali
Kecamatan Kejayan	2	4	2	2	1	Kali
Kecamatan Kraton	4	4	12	3	11	Kali
Kecamatan Lekok	-	-	1	1	-	Kali
Kecamatan Nguling	-	1	-	1	3	Kali
Kecamatan Pandaan	3	11	8	4	3	Kali
Kecamatan Pasrepan	2	2	1	2	1	Kali
Kecamatan Pohjentrek	1	-	3	5	1	Kali
Kecamatan Prigen	-	2	3	1	-	Kali
Kecamatan Purwodadi	-	1	2	-	3	Kali
Kecamatan Purwosari	3	3	-	3	5	Kali
Kecamatan Puspo	-	-	2	-	-	Kali
Kecamatan Rejoso	1	-	-	2	1	Kali
Kecamatan Rembang	10	20	18	4	10	Kali
Kecamatan Sukorejo	3	2	11	4	6	Kali
Kecamatan Tutur	-	-	1	-	-	Kali
Kecamatan Winongan	-	-	4	-	1	Kali
Kecamatan Wonorejo	2	-	5	1	1	Kali
Luar Kabupaten Pasuruan	2	8	4	5	7	Kali
Jumlah	**66**	**113**	**119**	**63**	**91**	**Kali**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

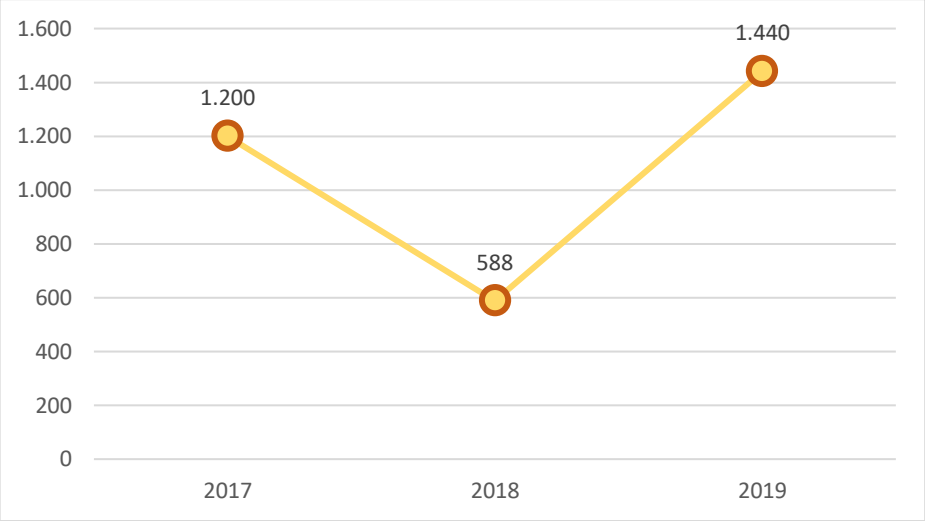


Gambar 9. 1 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Wilayah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Kecamatan

Tabel 9. 2 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Terhadap Masyarakat dan Badan Usaha

	2017	2018	2019	Satuan
Jumlah kegiatan pembinaan dan penyuluhan trantibum terhadap masyarakat dan badan usaha	1.200	588	1.440	Kegiatan

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

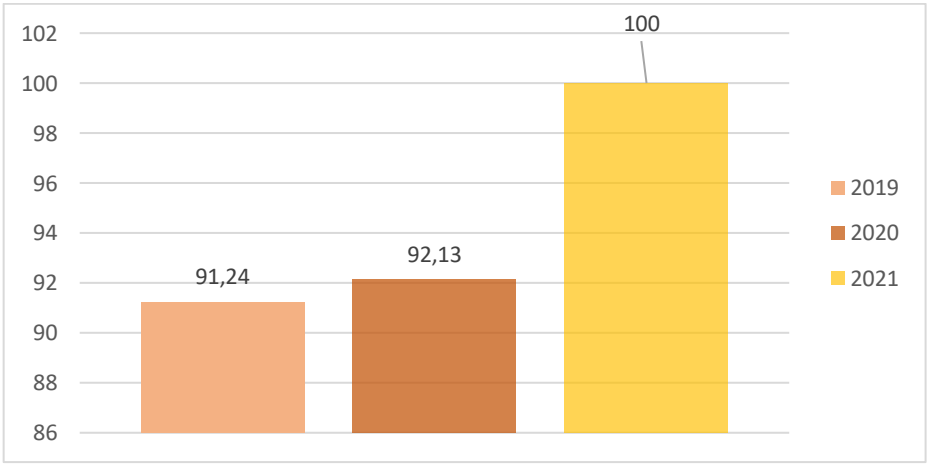


Gambar 9. 2 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum Terhadap Masyarakat dan Badan Usaha

Tabel 9. 3 Pelanggaran Peraturan Daerah

	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penindakan pelanggaran peraturan daerah	91,24	92,13	100,00	%
Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan	990	738	125	Kasus
Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan	1.085	801	125	Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

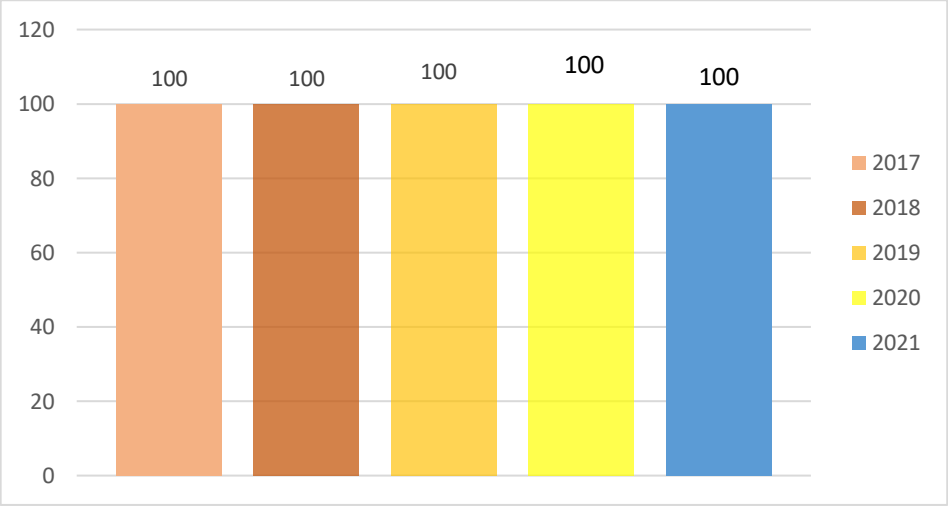


Gambar 9. 3 Persentase penindakan pelanggaran peraturan daerah

Tabel 9. 4 Gangguan Tibumtranmas yang Ditangani

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase gangguan tibumtranmas yang ditangani	100	100	100	100	100	%
Jumlah gangguan tibumtranmas yang ditangani	156	162	178	50	86	Kasus
Jumlah seluruh gangguan tibumtranmas	156	162	178	50	86	Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

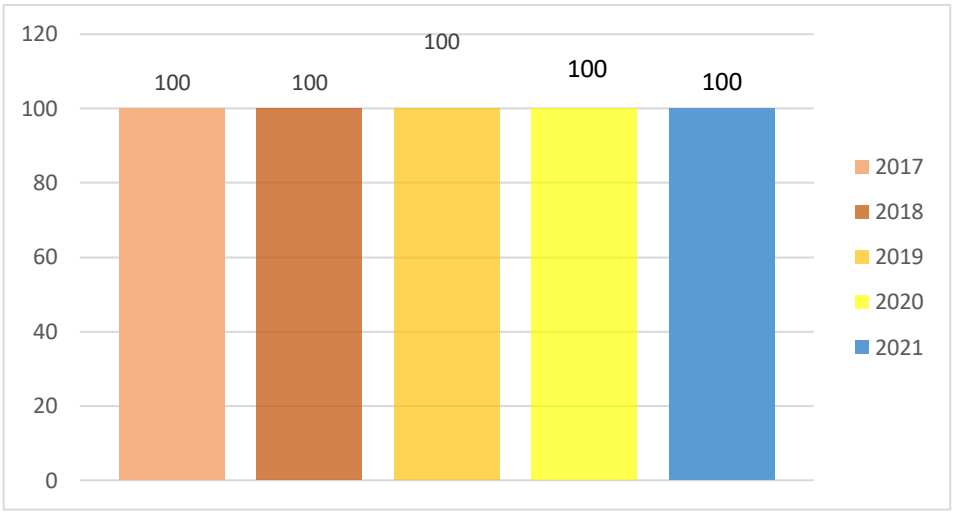


Gambar 9. 4 Persentase gangguan tibumtranmas yang ditangani

Tabel 9. 5 Persentase pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat	100	100	100	100	100	%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

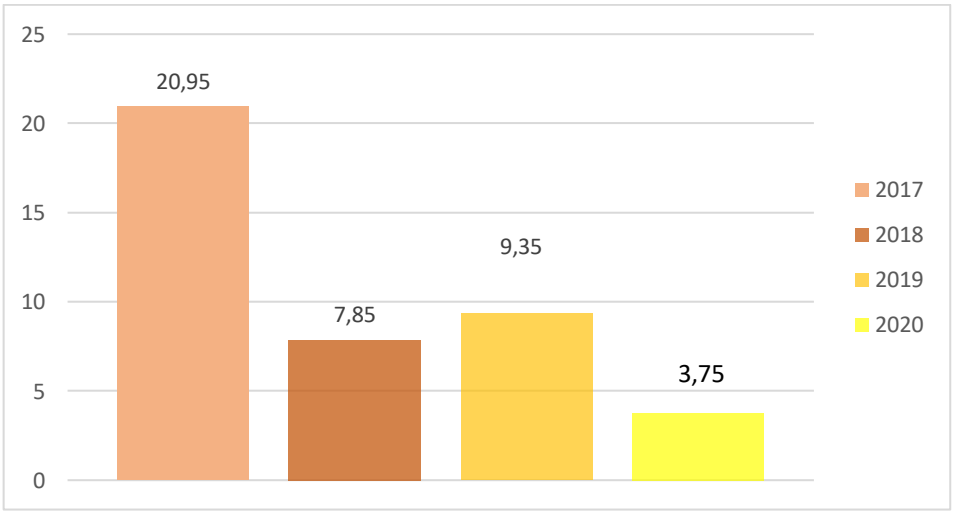


Gambar 9. 5 Persentase pemberdayaan dan perlindungan Masyarakat

Tabel 9. 6 Anggota Linmas yang Teregister KTA

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase anggota linmas yang teregister KTA	20,95	7,85	9,35	3,75	-	%
Jumlah anggota linmas yang teregister KTA	1.794	672	801	321	-	Orang
Jumlah seluruh anggota linmas	8.563	8.563	8.563	8.563	8.563	Orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



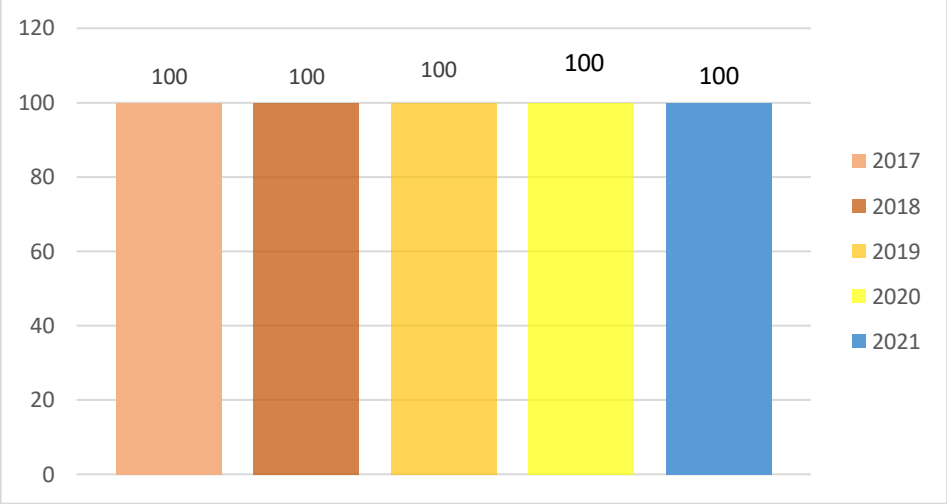
Gambar 9. 6 Persentase anggota linmas yang teregister KTA

Tabel 9. 7 Penanggulangan Kejadian Kebakaran

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penanggulangan kejadian kebakaran	100	100	100	100	100	%

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah penanganan kejadian kebakaran	66	113	119	63	91	Kasus
Jumlah kejadian kebakaran	66	113	119	63	91	Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

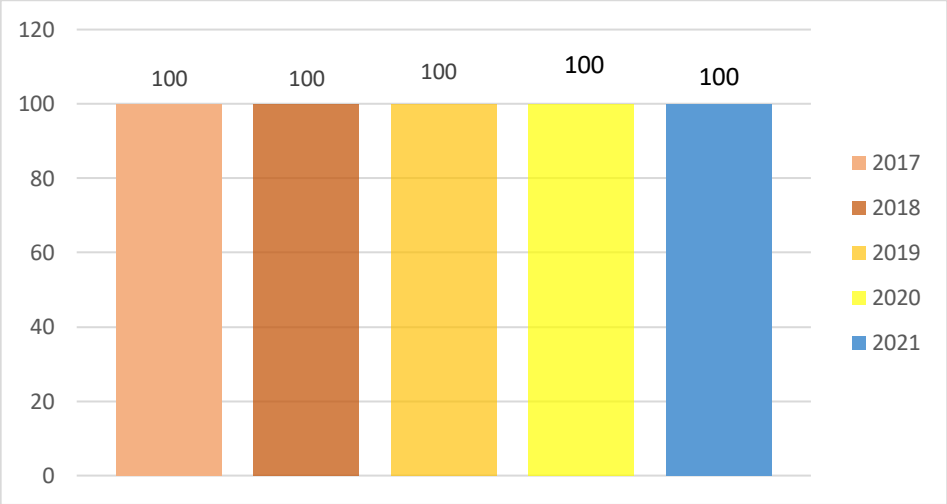


Gambar 9. 7 Penanggulangan Kejadian Kebakaran

Tabel 9. 8 Penanganan Peristiwa Kebakaran

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penanganan peristiwa kebakaran	100	100	100	100	100	%
Jumlah penanganan peristiwa kebakaran	66	113	119	63	91	Kasus
Jumlah peristiwa kebakaran	66	113	119	63	91	Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



Gambar 9. 8 Persentase penanganan kejadian kebakaran

Tabel 9. 9 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

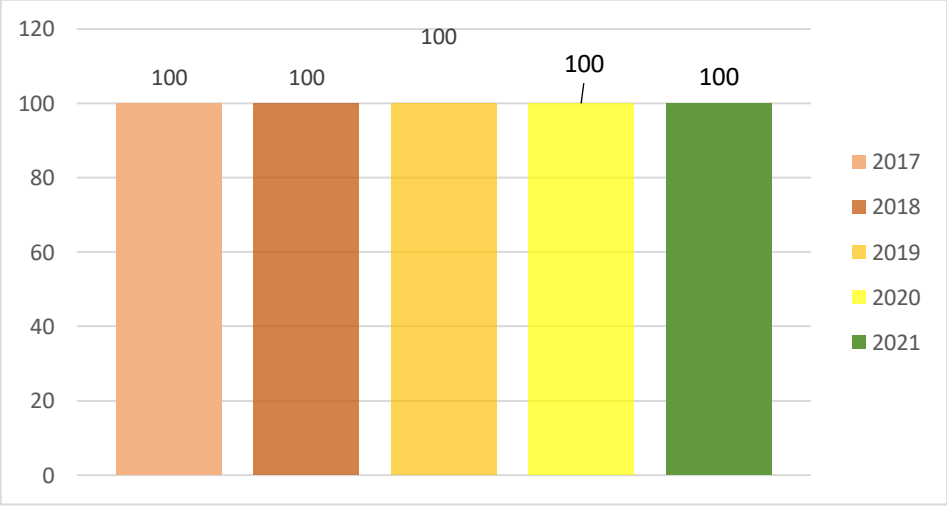
	2017	Satuan
Persentase pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	33,55	%
Jumlah siskamling yang diberdayakan	1.508	Unit
Jumlah Pos Kamling	4.495	Unit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 9. 10 Penegakan Peraturan Daerah

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penegakan perda	100	100	100	100	100	%
Jumlah pelanggaran yang ditindak	272	60	58	2	3	Kasus
Jumlah sasaran penegakan Perda	272	60	58	2	3	Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

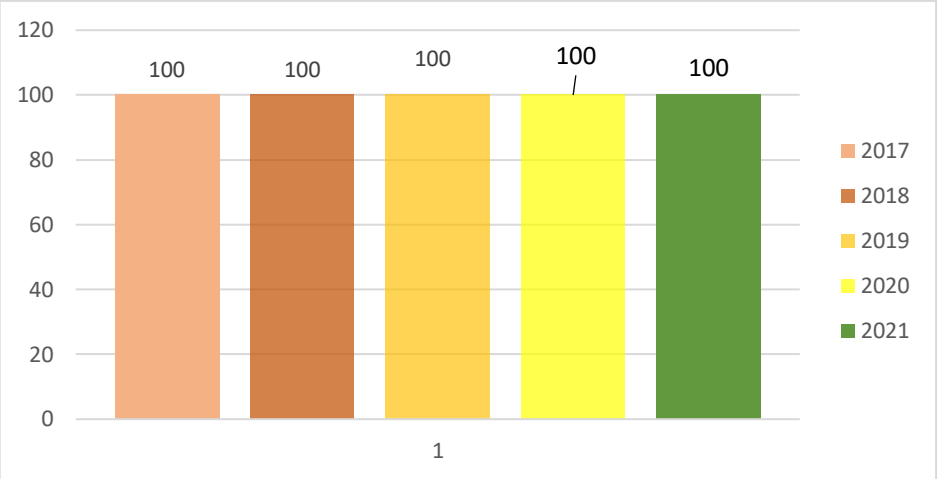


Gambar 9. 9 Persentase Penegakan Perda

Tabel 9. 11 Penegakan Peraturan Daerah

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penegakan Perda	100	100	100	100	100	%
Jumlah pelanggaran Perda yang diselesaikan	82	107	110	95	167	Kasus
Jumlah penindakan pelaggaran Perda	82	107	110	95	167	Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



Gambar 9. 10 Persentase pelanggaran Perda yang diselesaikan

Tabel 9. 12 Personil Satuan Polisi Pamong Praja yang Dilatih

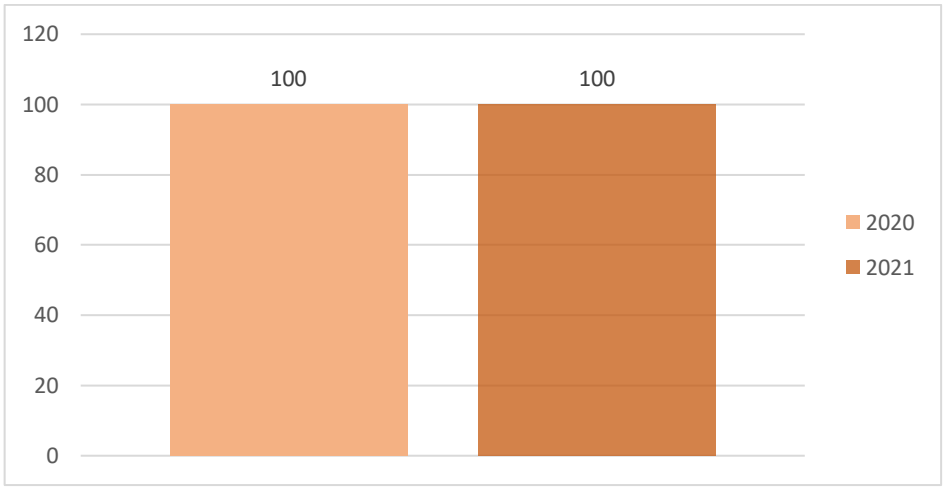
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase personil satuan Polisi Pamong Praja yang dilatih	100	100	100	100	100	%
Jumlah personil satuan Polisi Pamong Praja yang dilatih	226	222	229	228	228	Orang
Jumlah seluruh personil satuan Polisi Pamong Praja	226	222	229	228	228	Orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 9. 13 Sosialisasi di Bidang Cukai

	2020	2021	Satuan
Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi di bidang cukai	100	100	%
Jumlah penjual rokok / pengedar rokok yang mengikuti sosialisasi di bidang cukai	941	4.873	Orang
Jumlah penjual rokok/ pengedar rokok yang akan diberikan sosialisasi dalam 1 tahun	941	4.873	Orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



Gambar 9. 11 Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi di bidang cukai

Tabel 9. 14 Pemberantasan Barang Ilegal

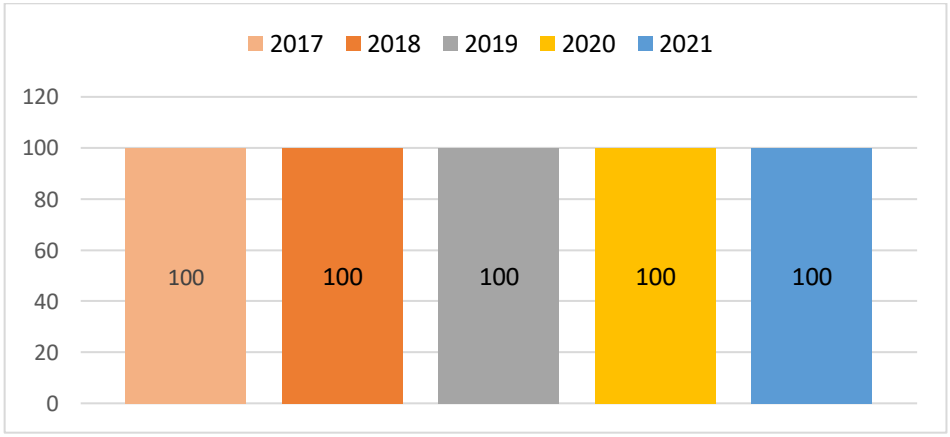
	2020	Satuan
Persentase pengumpulan terhadap pemberantasan barang kena cukai ilegal	100	%
Jumlah penjual / pengedar rokok palsu yang ditemukan	35	Orang
Jumlah penjual rokok / pengedar rokok yang menjadi target operasi	35	Orang

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 9. 15 Penanganan Keamanan Lingkungan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penanganan keamanan lingkungan	100	100	100	100	100	%
Jumlah Obyek vital yang diamankan	5	5	5	5	5	Obyek
Jumlah obyek vital	5	5	5	5	5	Obyek

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

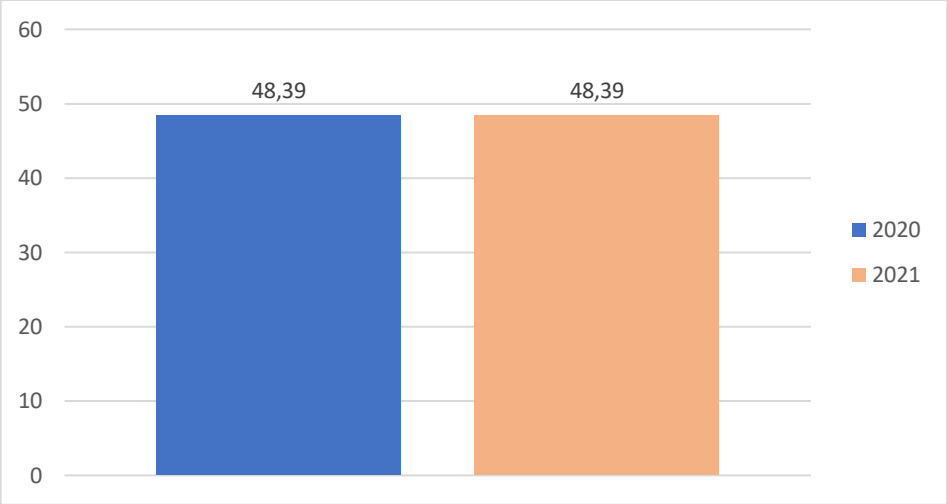


Gambar 9. 12 Persentase penanganan keamanan lingkungan

Tabel 9. 16 Perda dan Perkada yang Ditegakkan

	2020	2021	Satuan
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	48,39	48,39	%
Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	15	15	Perda
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	31	31	Perda

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



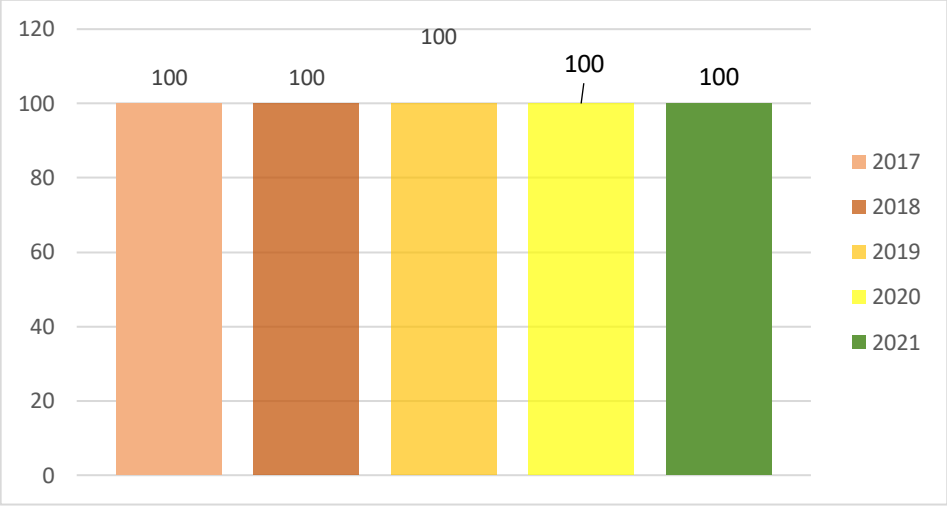
Gambar 9. 13 Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Tabel 9. 17 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	%
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalm tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk da-tau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan	66	113	119	80	137	Layanan

Penyelamatan/Perangkat Daerah						
Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota	66	113	119	63	91	Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja

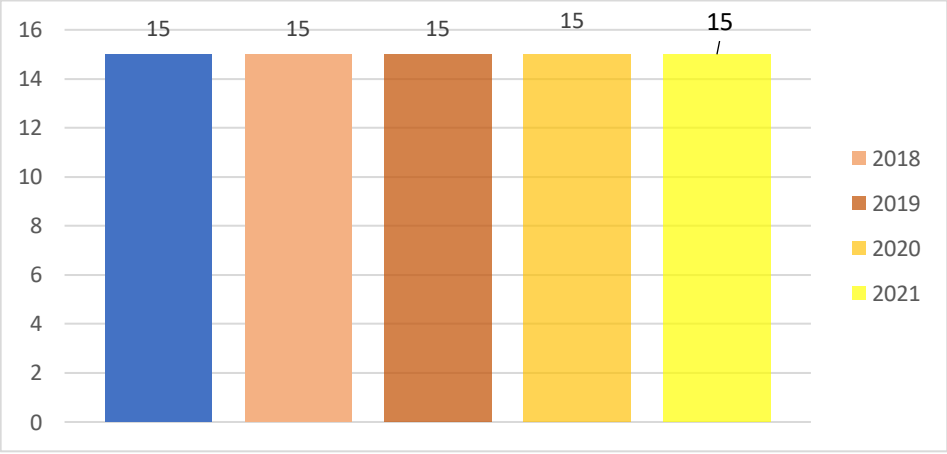


Gambar 9. 14 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 9. 18 Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	15	15	15	15	Menit/7 Km

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja



Gambar 9. 15 Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran

DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

DESKRIPSI

Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari beberapa saluran yakni, saluran primer, sekunder, tersier, dan pembuang. Pada tahun 2017, saluran primer di Kabupaten Pasuruan memiliki panjang 106.270 meter dan mengalami kenaikan hingga pada akhir tahun 2021 sebesar 139.950 meter. Saluran sekunder pada tahun 2017 memiliki panjang 224.135 meter dan mengalami penurunan sebesar 144.432 meter pada tahun 2021. Pada tahun 2017, saluran tersier memiliki panjang 569.272 meter dan mengalami penurunan hingga tahun 2021 sebesar 237.960 meter. Saluran pembuang pada tahun 2017 memiliki panjang sebesar 65.435 meter dan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2021 sebesar 146.776 meter. Kenaikan panjang saluran pada jaringan irigasi tersebut mengindikasikan semakin berkembangnya sektor-sektor pembangunan sehingga perekonomian masyarakat meningkat.

Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 62,10%. Kondisi tersebut terus meningkat hingga tahun 2021 sebesar 66,55%. Kenaikan persentase tersebut menunjukkan semakin baiknya kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Pasuruan.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian. Pada tahun 2017, persentase tersedianya

air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sebesar 75,71% dan terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2021 sebesar 77,68%. Nilai tersebut menunjukkan semakin tinggi persentase. maka semakin meningkat pula produktivitas pertanian di Kabupaten Pasuruan.

Air baku adalah air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum. Jumlah ketersediaan volume air baku di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 sebesar 2.065.9000.104 dan terus meningkat hingga akhir tahun 2021 sebesar 2.069.360.000 volume. Persentase ketersediaan dan pemenuhan air baku di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 52,20% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 52,58%. Peningkatan nilai tersebut mengindikasikan semakin tinggi persentase ketersediaan air baku, maka semakin meningkat kualitas lingkungan hidup masyarakat dan berkurang pula masalah di bidang pengelolaan sumber daya air.

Tabel 10. 1 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan

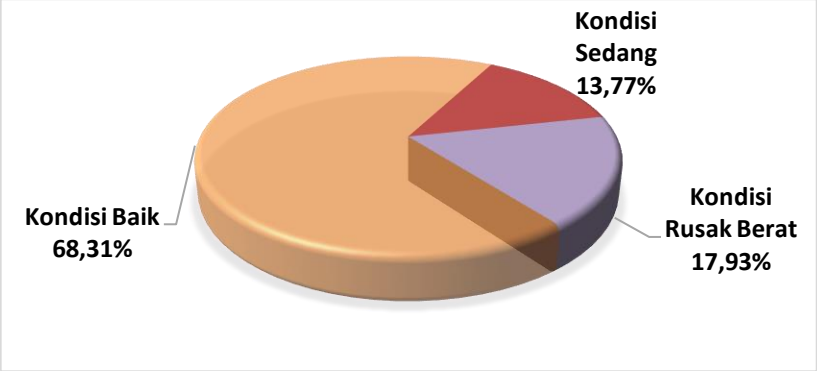
Saluran	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Saluran Primer	212.540	279.900	279.900	279.900	279.901	meter
Saluran Sekunder	448.270	288.864	288.864	288.864	288.864	meter
Saluran Tersier	1.138.544	414.212	475.920	475.920	475.920	meter
Saluran Pembuang	129.870	294.184	294.184	294.184	293.552	meter

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 2 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Primer)

Saluran Primer	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Panjang	106.270	139.950	139.950	139.950	139.950	meter
Kondisi Baik	70.225	89.300	92.326	95.341	95.594	meter
Kondisi Sedang	18.663	16.656	17.092	17.854	19.267	meter
Kondisi Rusak Berat	17.382	33.994	30.532	26.755	25.089	meter

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



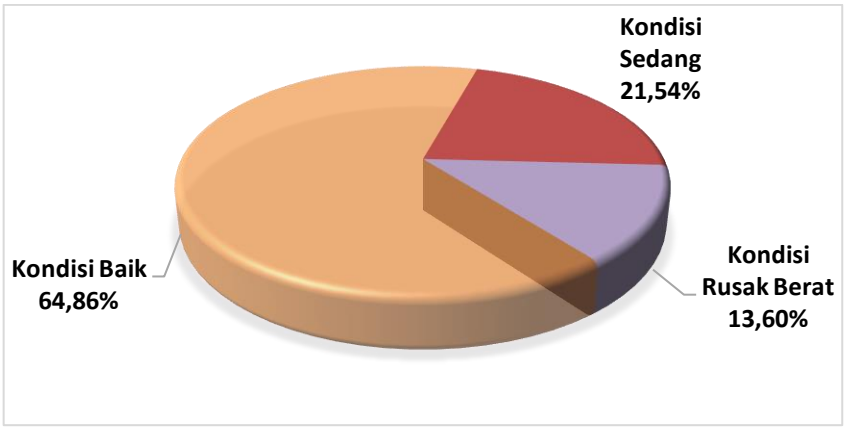
Gambar 10. 1 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Primer) Tahun 2021

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 3 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Sekunder)

Saluran Sekunder	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Panjang	224.135	144.432	144.432	144.432	144.432	meter
Kondisi Baik	136.264	87.223	90.249	93.264	93.680	meter
Kondisi Sedang	36.542	38.622	39.058	39.820	31.108	meter
Kondisi Rusak Berat	51.329	18.587	15.125	11.348	19.645	meter

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



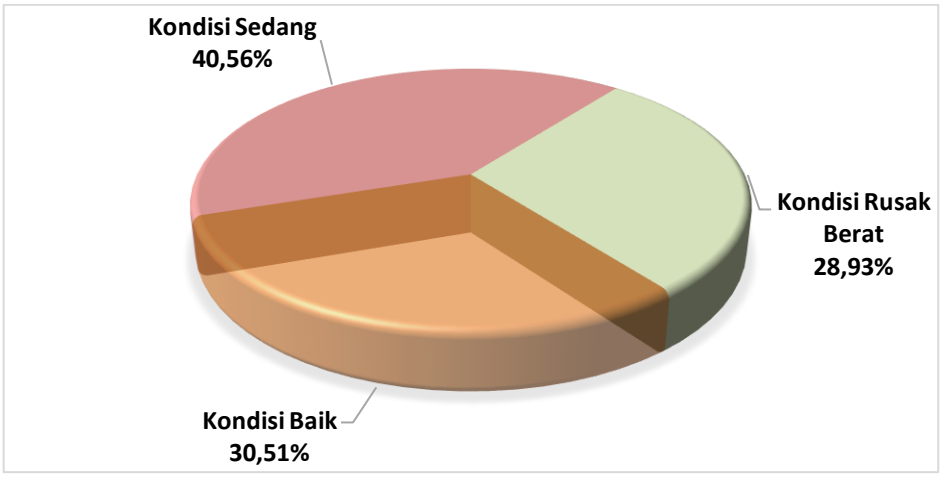
Gambar 10.2 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Sekunder) Tahun 2021

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 4 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Tersier)

Saluran Tersier	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Panjang	569.272	237.960	237.960	237.960	237.960	meter
Kondisi Baik	446.562	66.562	69.588	72.603	72.603	meter
Kondisi Sedang	96.325	95.325	95.761	96.523	96.523	meter
Kondisi Rusak Berat	26.385	14.365	72.611	68.834	68.834	meter

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



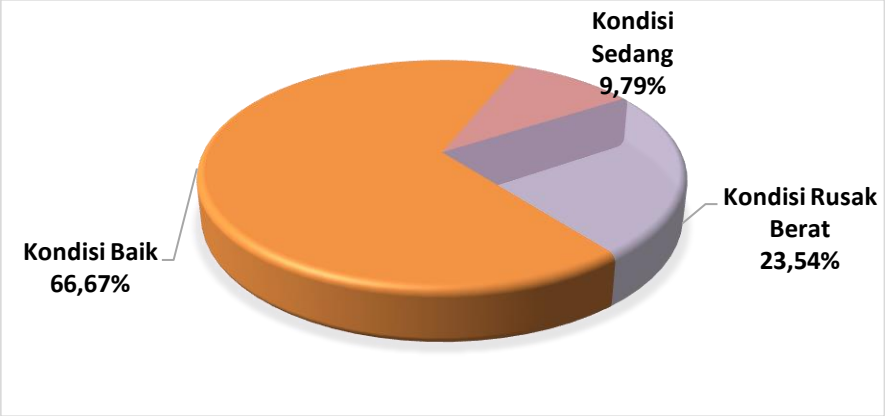
Gambar 10.3 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Tersier) Tahun 2021

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 5 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Pembuang)

Saluran Pembuang	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Panjang	65.435	147.092	147.092	147.092	146.776	meter
Kondisi Baik	24.646	91.332	94.358	97.373	97.863	meter
Kondisi Sedang	14.365	14.365	14.801	15.563	14.370	meter
Kondisi Rusak Berat	25.424	41.395	37.933	34.156	34.544	meter

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



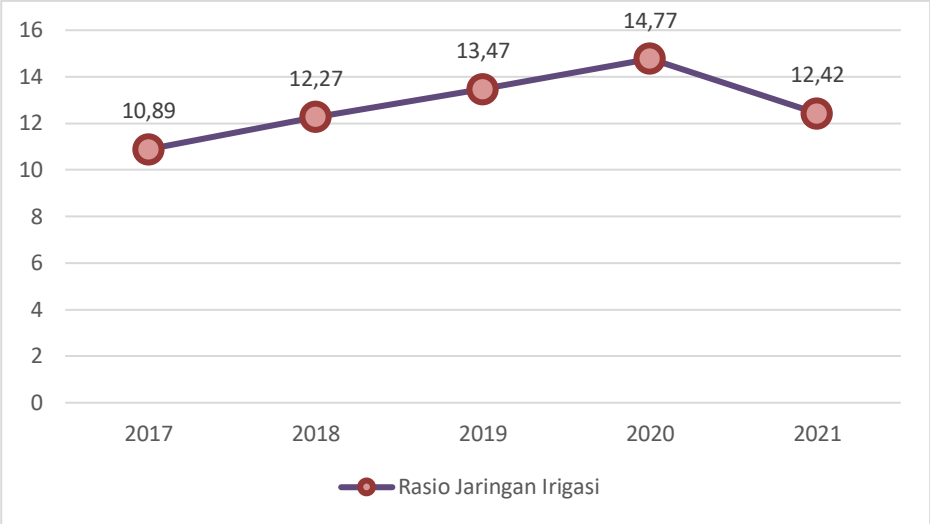
Gambar 10.4 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Pasuruan (Saluran Pembuang)

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 6 Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rasio Jaringan Irigasi	10,89	12,27	13,47	14,77	12,42	%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



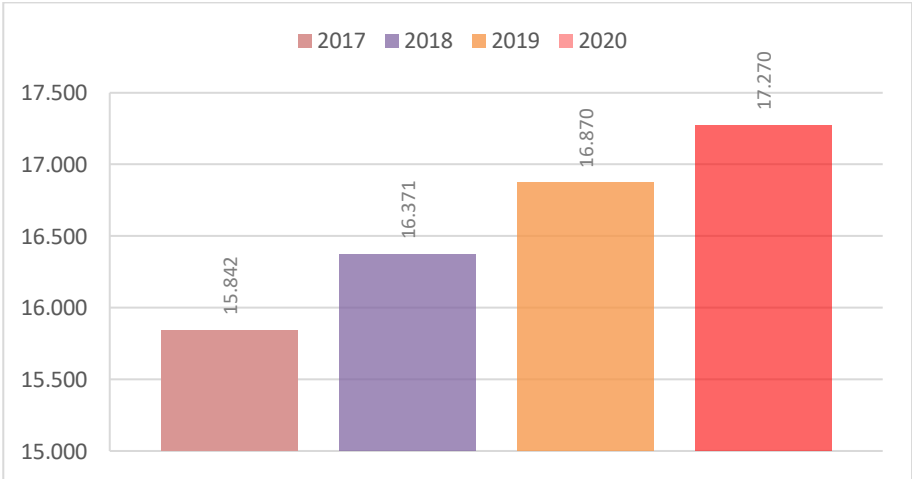
Gambar 10.5 Rasio Jaringan Irigasi

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 7 Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	15.842	16.371	16.870	17.270	Ha

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



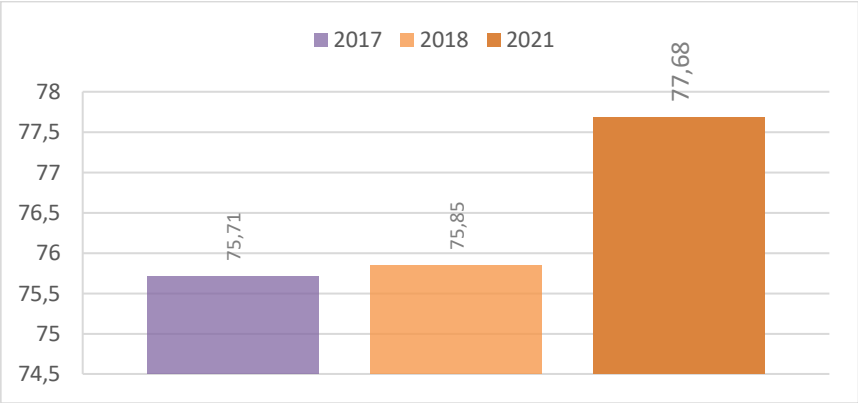
Gambar 10.6 Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 8 Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada

Elemen	2017	2018	2021	Satuan
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	75,71	75,85	77,68	%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



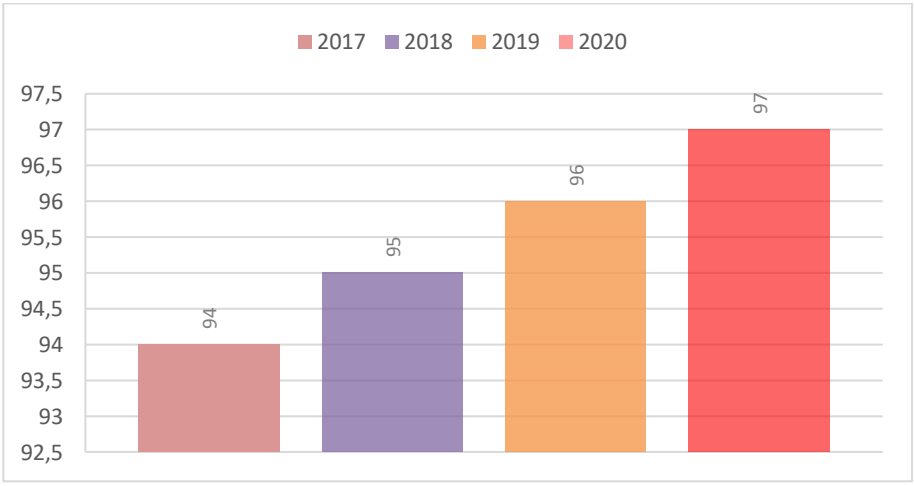
Gambar 10.7 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 9 Penanganan Darurat Bencana Banjir

Penanganan Darurat Bencana Banjir	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase penanganan darurat banjir	94	95	96	97	%
Penanganan darurat banjir	188	190	192	194	lokasi
Penanganan darurat bencana	200	200	200	200	lokasi

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



Gambar 10.8 Persentase penanganan darurat banjir

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 10 Ketersediaan Lahan Untuk Pembangunan Embung

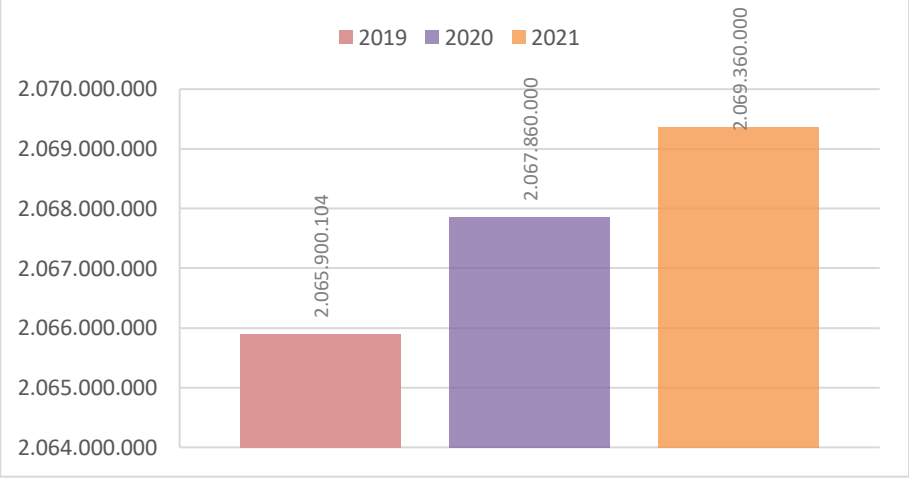
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Ketersediaan lahan untuk pembangunan embung	7	7	7	7	7	Unit

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 11 Jumlah Volume Ketersediaan Air Baku

Volume Ketersediaan Air Baku	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Volume Ketersediaan Air Baku	2.065.900.104	2.067.860.000	2.069.360.000	Volume

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



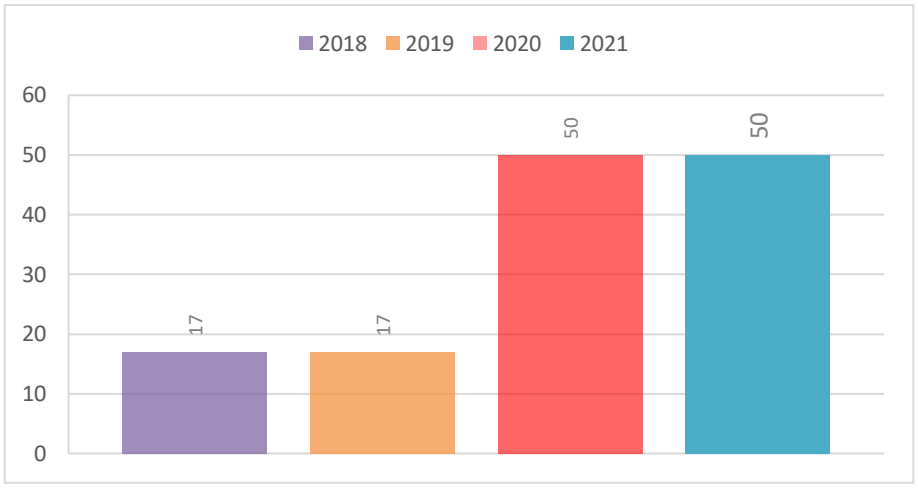
Gambar 10.9 Jumlah Volume Ketersediaan Air Baku

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 12 Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dibutuhkan

Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dibutuhkan	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penyusunan dokumen rencana tata ruang yang dibutuhkan	17	17	50	50	%
Penyusunan dokumen rencana yang dibutuhkan	4	4	4	4	dok
Penyusunan dokumen rencana	24	24	8	8	dok

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



Gambar 10.10 Persentase penyusunan dokumen rencana tata ruang yang dibutuhkan

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 13 Rekomendasi Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang

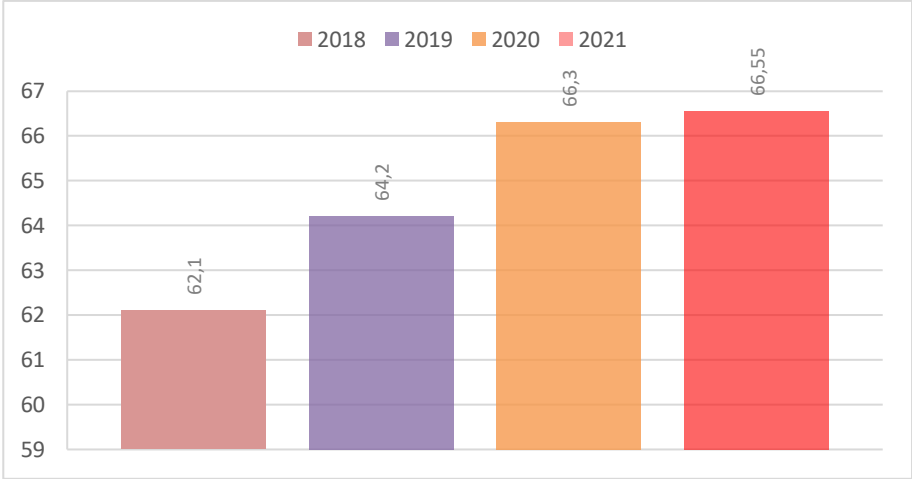
Rekomendasi Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang	2018	2019	2020	Satuan
Persentase rekomendasi pengendalian dan pemanfaatan ruang	25	25	25	%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 14 Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	62,10	64,20	66,30	66,55	%
Jumlah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	267.855	276.933	285.978	287.137	meter
Jumlah jaringan irigasi	431.474	431.474	431.474	431.474	meter

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



Gambar 10.11 Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 15 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang

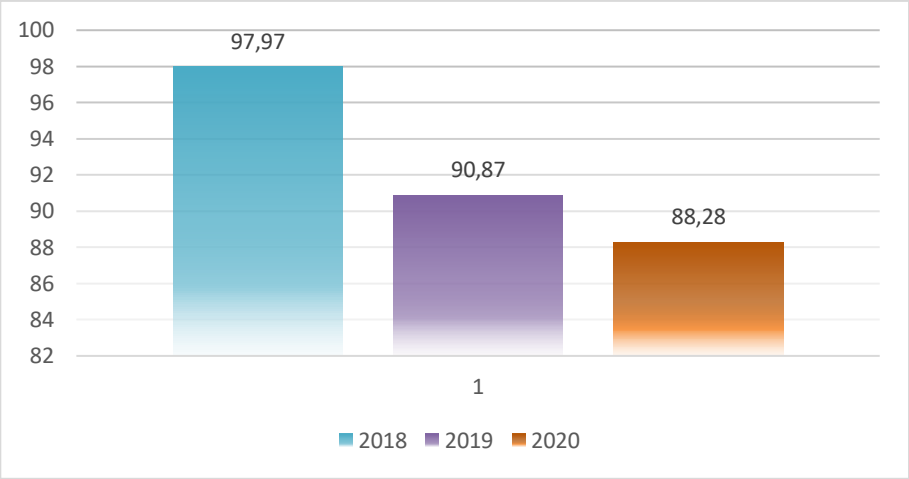
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	2018	2019	2020	Satuan
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	55	55	60	%
Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	-	-	15.172,40	Ha
Rencana tata ruang	-	-	25.287,34	Ha

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 16 Menurunnya luas daerah genangan banjir

Elemen	2018	2019	2020	Satuan
Menurunnya luas daerah genangan banjir	97,97	90,87	88,28	km^2/ha

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



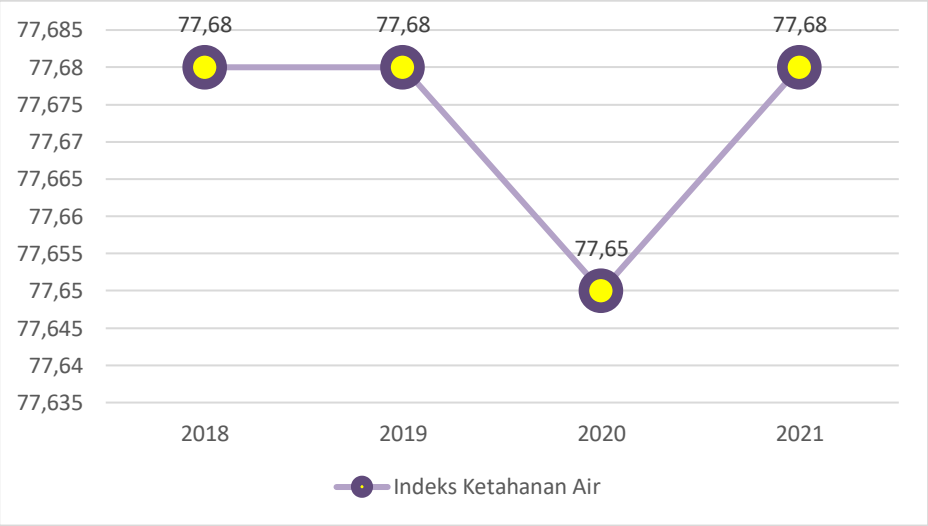
Gambar 10.12 Menurunnya luas daerah genangan banjir

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 17 Indeks Ketahanan Air

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks ketahanan air	77,68	77,68	77,65	77,68	%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



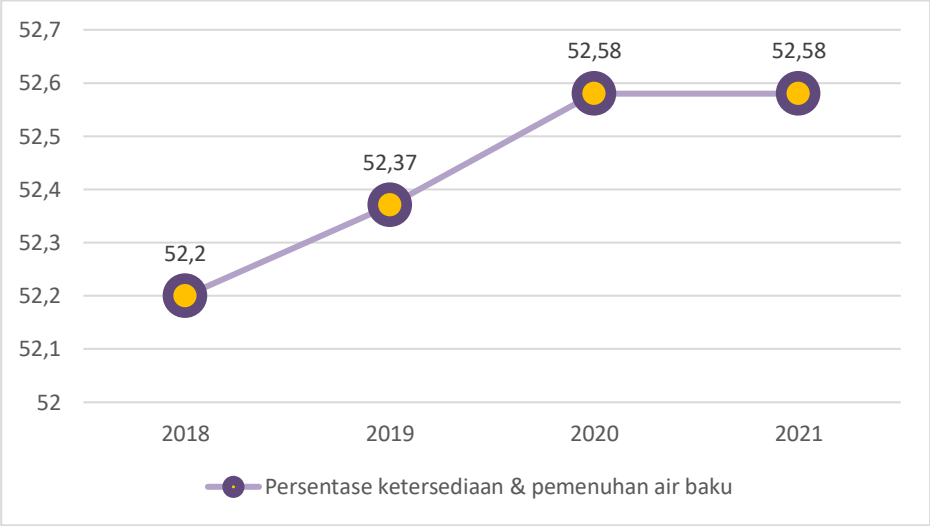
Gambar 10.13 Indeks ketahanan air

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 18 Ketersediaan & Pemenuhan Air Baku

Ketersediaan & Pemenuhan Air Baku	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase ketersediaan & pemenuhan air baku.	52,20	52,37	52,58	52,58	%
Jumlah ketersediaan & pemenuhan air baku.	253	254	255	255	Lokasi/bh
Jumlah total air baku.	485	485	485	485	Lokasi/bh

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



Gambar 10.14 Persentase ketersediaan & pemenuhan air baku

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 19 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

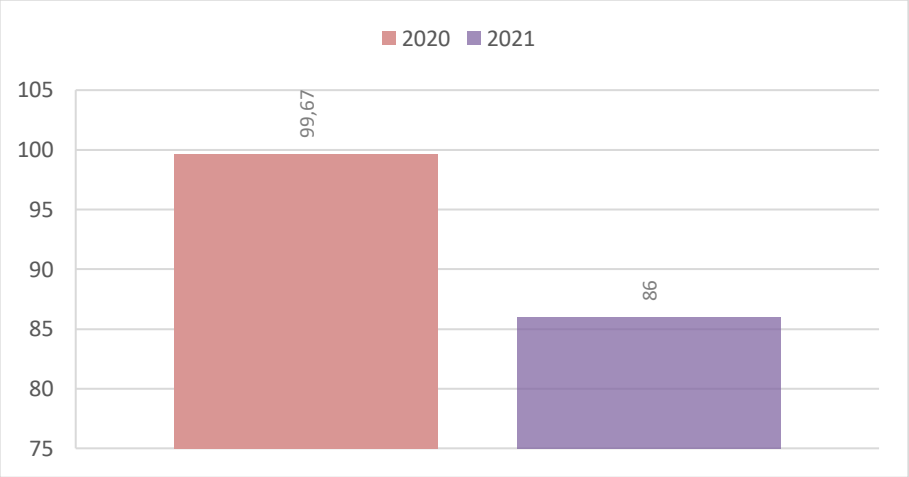
Elemen	2021	Satuan
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.	72,85	%
Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksistingjaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha).	16.687	Ha
Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota.	22.905	Ha

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 20 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.

Pemanfaatan tanah yang sesuai	2020	2021	Satuan
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.	99,67	86	%
Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi.	1.357.609	2.152.853	Ha
Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	1.362.159	2.489.072	Ha

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



Gambar 10. 15 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 21 Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi.

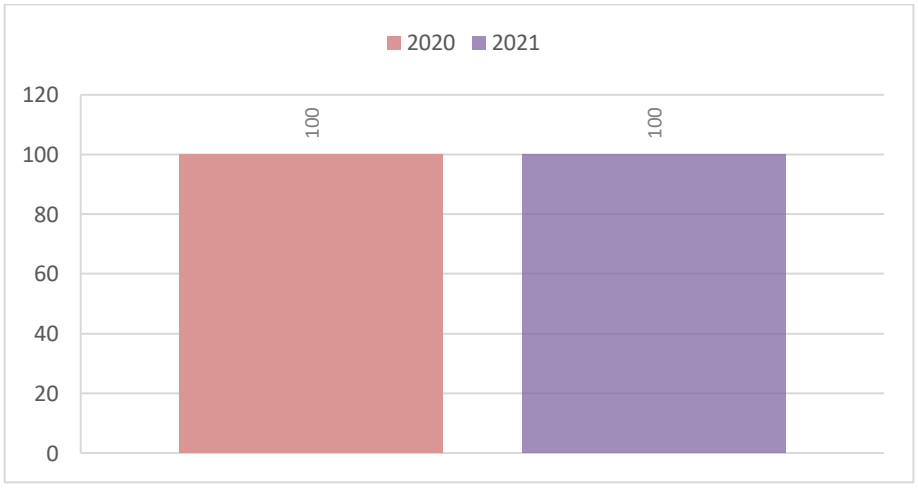
Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	2021	Satuan
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	100	%
Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	18.000	Ha
Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.	18.000	Ha

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 22 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	2020	2021	Satuan
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	100	%
Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya atas izin lokasi	1.357.609	731.701	Ha
Luas izin lokasi yang diterbitkan	1.357.609	731.701	Ha

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang



Gambar 10. 16 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Tabel 10. 23 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	2020	2021	Satuan
Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	100	%
Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	1	3	Kasus
Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	1	3	Kasus

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DESKRIPSI

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. IKM terhadap pelayanan dan penyebarluasan informasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 83,77% dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 86,55%. Berdasarkan peningkatan persentase tersebut, dapat diketahui bahwa semakin tinggi persentase IKM maka semakin baik pula perkembangan kinerja unit pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.

Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks SPBE di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 2,48 dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga akhir tahun 2021 sebesar 2,39. Penurunan indeks SPBE tersebut mengartikan kurangnya peningkatan efisiensi, transparansi, dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat.

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 sebesar 56,5% dan mengalami peningkatan sebesar 5,92%. Hal tersebut mengartikan bahwa semakin besar persentase, maka semakin banyak ODP yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika.

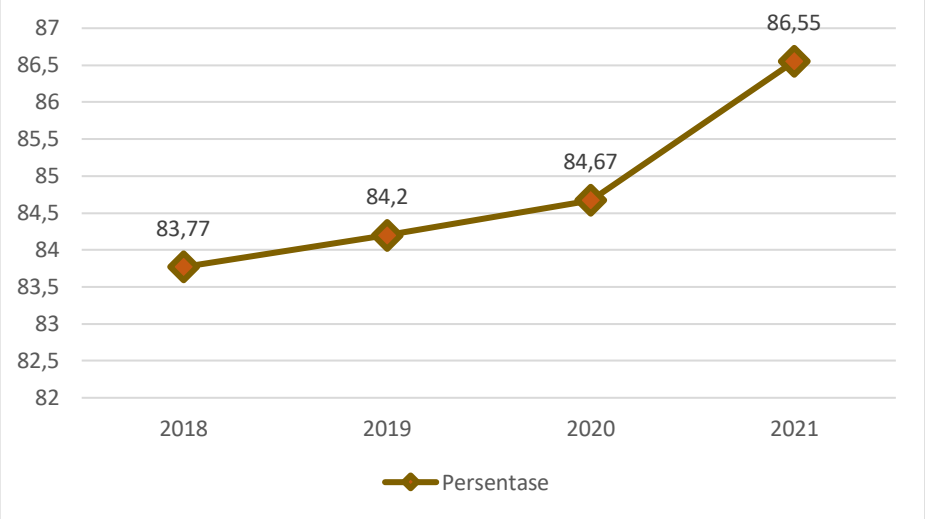
Layanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, Daerah, dan lingkungan Badan Usaha Miliki Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 74% dan 70,89%. Persentase tersebut mengartikan bahwa semakin tinggi persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi semakin sedikit dari keseluruhan jumlah layanan publik.

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 74% dan 70,89%. Persentase nilai tersebut menunjukkan semakin rendah persentase, maka semakin sedikit masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. dari keseluruhan jumlah penduduk.

Tabel 11. 1 IKM Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
IKM Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi	83,77	84,20	84,67	86,55	%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



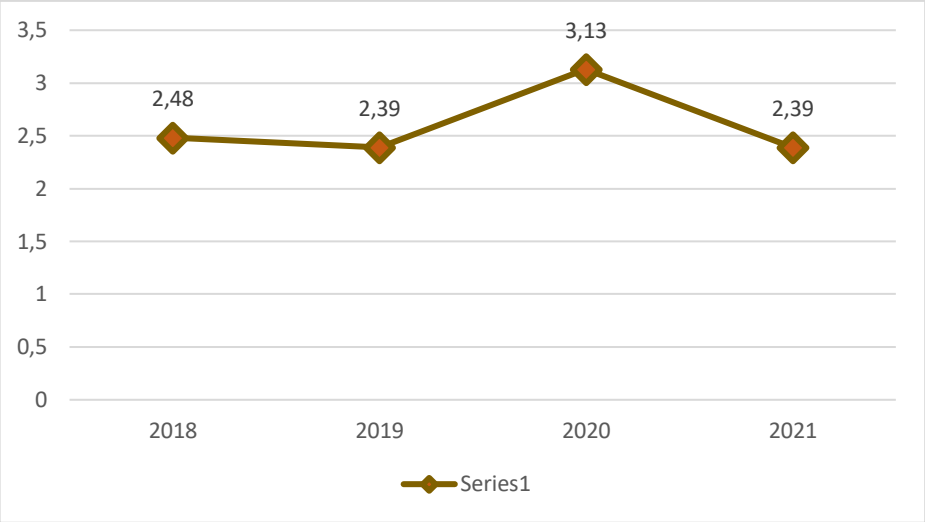
Gambar 11. 1 IKM Terhadap Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - (penilaan KemenPAN-RB)

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - (penilaan KemenPAN-RB)	2,48	2,39	3,13	2,39	%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



Gambar 11. 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - (penilaan KemenPAN-RB)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 3 OPD yang Menerapkan e-Gov

OPD yang Menerapkan e-Gov	2020	Satuan
Persentase OPD yang menerapkan e-Gov	42	%
Jumlag OPD yang menerapkan e-Gov	27	OPD
Jumlah keseluruhan OPD	65	OPD

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 4 Peningkatan Kerjasama dengan Media

Peningkatan Kerjasama dengan Media	2020	Satuan
Persentase peningkatan kerjasama dengan media berkualitas	74,98	%
Jumlah kerjasama dengan media berkualitas	240	Kerjasama

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 5 Pemanfaatan Saluran Media Komunikasi Publik

Pemanfaatan Saluran Media Komunikasi Publik	2019	Satuan
Persentase pemanfaatan saluran media komunikasi publik	55	%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 6 Aplikasi Informatika OPD yang Terintegrasi

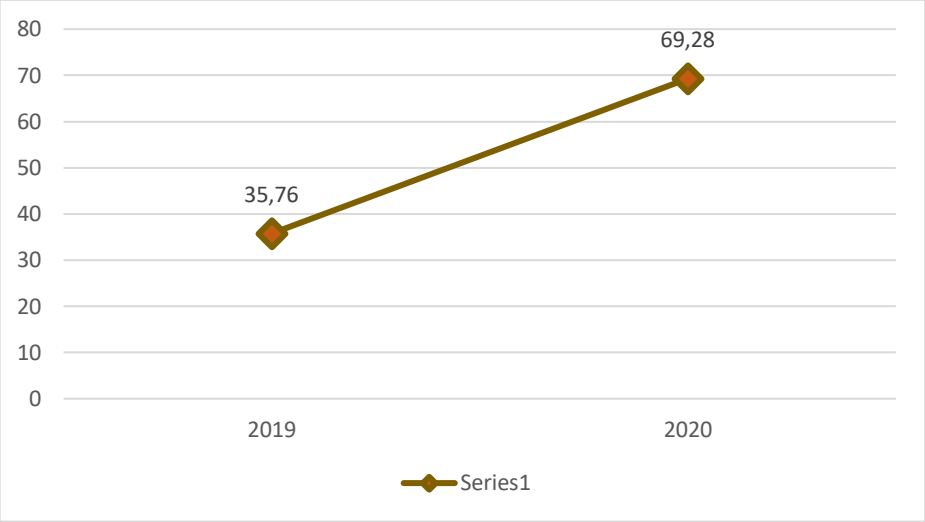
Aplikasi Informatika OPD yang Terintegrasi	2019	Satuan
Persentase aplikasi informatika OPD yang terintegrasi	98,06	%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 7 Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Ketersediaan Data Statistik Sektoral	2019	2020	Satuan
Persentase Ketersediaan data statistik sektoral	35,76	69,28	%
Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	1994	3836	Data
Jumlah seluruh data statistika sektoral yang dibutuhkan	5576	5576	Data

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



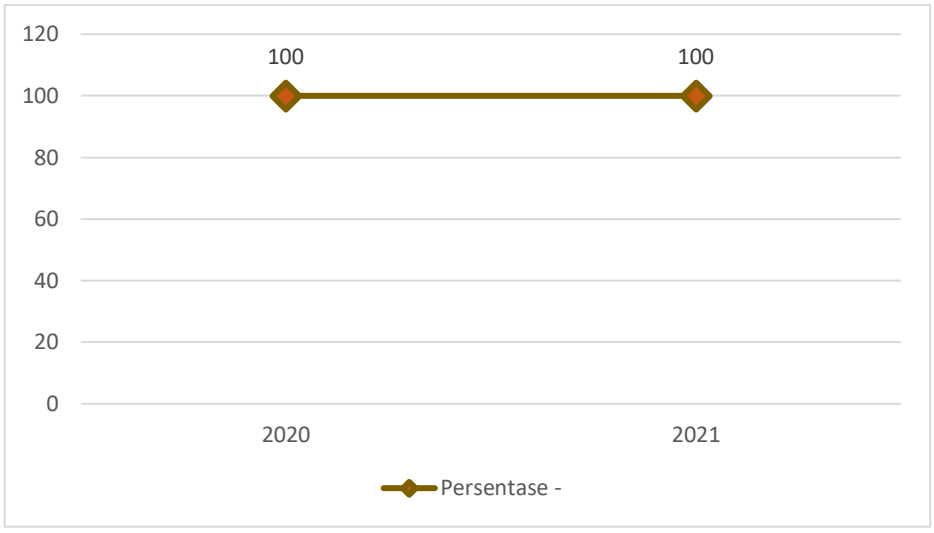
Gambar 11. 3 Persentase Ketersediaan data statistik sektoral

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 8 Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan

Elemen	2020	2021	Satuan
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk Pelayanan	100	100	%
Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.310.000.000	1.662.225.281	Rp
Realisasi berlanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.310.453.500	1.572.541.560	Rp

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



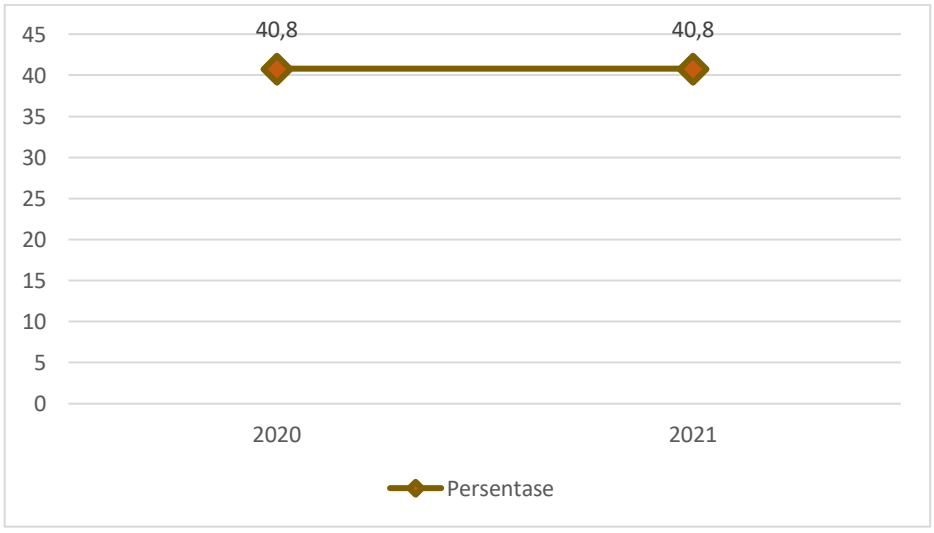
Gambar 11. 4 Informasi Tentang Sumber Daya yang Tersedia untuk Pelayanan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 9 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Elemen	2020	2021	Satuan
Tingkat keamanan informasi pemerintah	40,8	40,8	%
Jumlah nilai per area keamanan informasi	16,03	16,03	Nilai
Jumlah area penilaian	40	40	Area

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



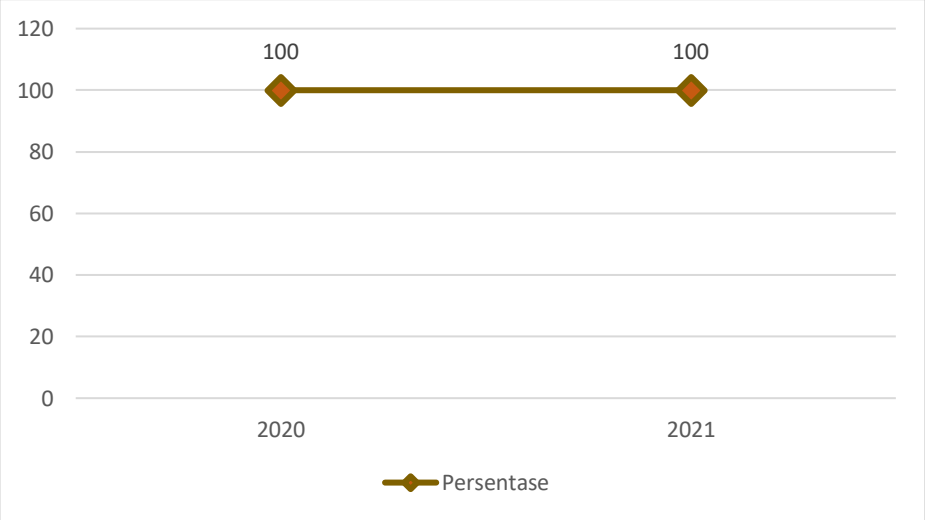
Gambar 11. 5 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 10 Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Daerah

Elemen	2020	2021	Satuan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan daerah	100	100	%
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	70	55	OPD
Jumlah OPD	70	55	OPD

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



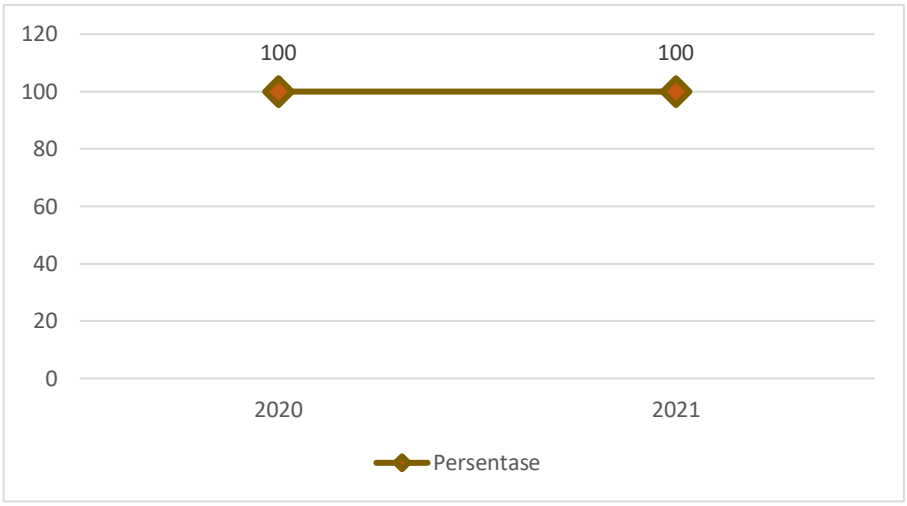
Gambar 11. 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Daerah

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 11 Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

Elemen	2020	2021	Satuan
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	%
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	70	55	OPD
Jumlah OPD	70	55	OPD

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



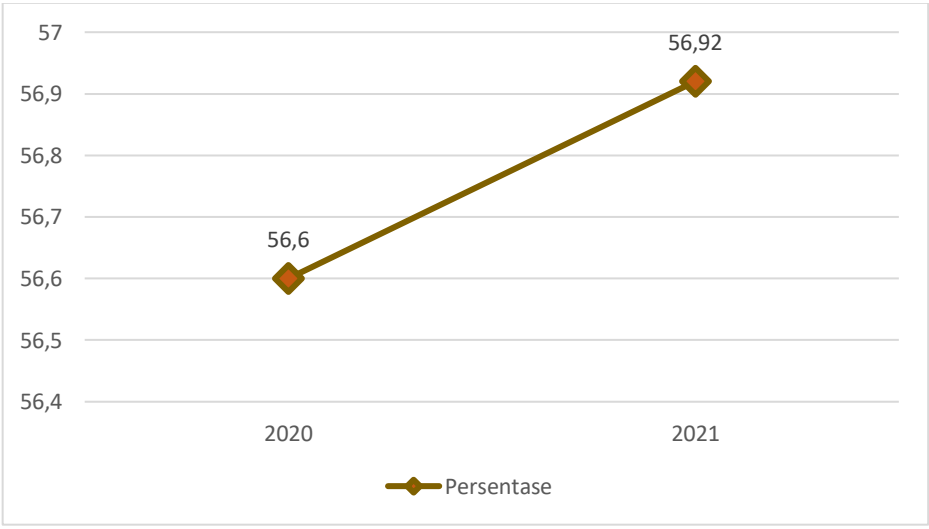
Gambar 11. 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 12 Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

Elemen	2020	2021	Satuan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	56,6	56,92	%
Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	37	37	OPD
Jumlah OPD	66	65	OPD

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



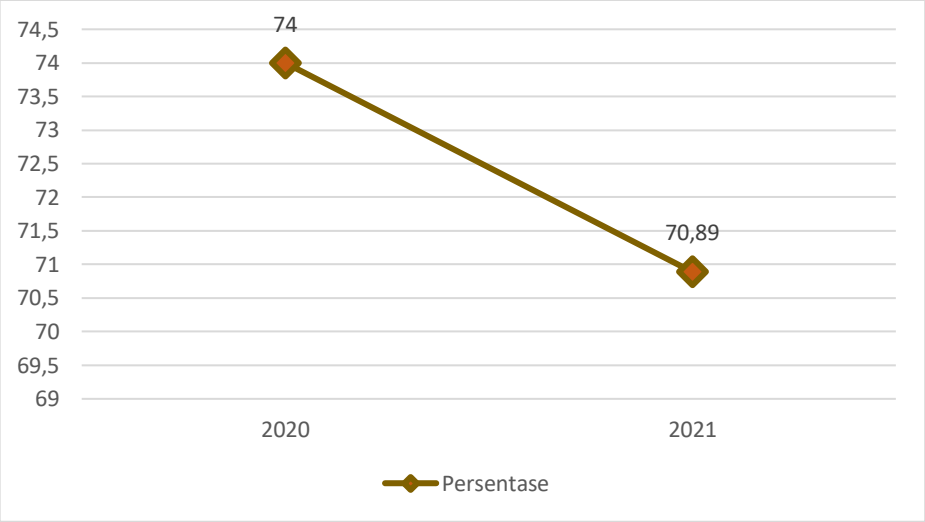
Gambar 11. 8 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 13 Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

Elemen	2020	2021	Satuan
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	74	70,89	%
Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	74	56	Unit
Jumlah Layanan Publik	100	79	Unit

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



Gambar 11. 9 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

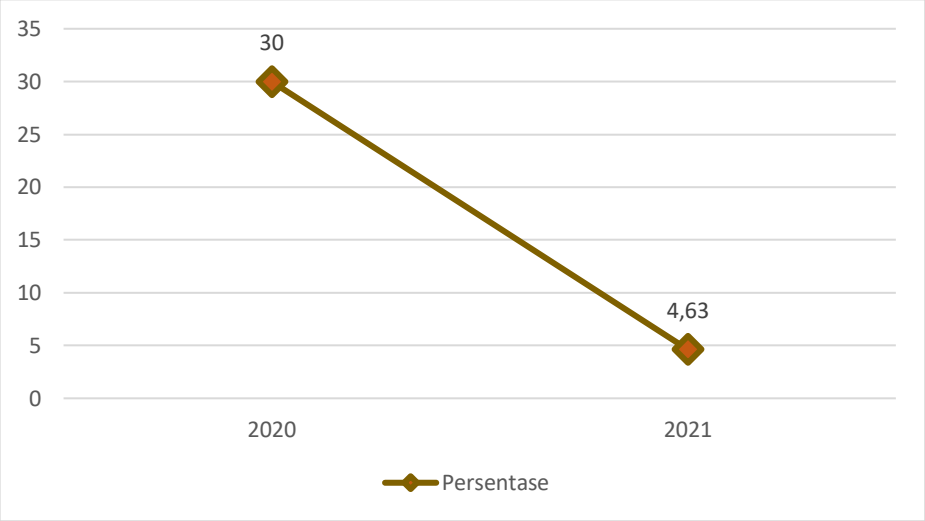
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 14 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Elemen	2020	2021	Satuan
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota	30	4,63	%
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	450.000	62.544	Orang

Elemen	2020	2021	Satuan
kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota			
Jumlah penduduk	1.500.000	1.350.000	Orang

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika



Gambar 11. 10 Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 11. 15 Website Milik Pemerintah Daerah

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	Ada/tidak

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DESKRIPSI

Produksi peternakan merupakan barang yang dihasilkan dari sektor peternakan. Produksi peternakan di Kabupaten Pasuruan meliputi daging, telur, dan susu. Pada tahun 2017, produksi daging di Kabupaten Pasuruan sebesar 25.657 ton. Produksi tersebut mengalami perubahan secara fluktuatif hingga menjadi 26.510 ton pada tahun 2021. Kondisi yang sama juga terjadi pada produksi telur dan juga susu.

Jumlah populasi ternak menggambarkan banyaknya hewan ternak yang dipelihara di Kabupaten Pasuruan. Populasi ternak terbagi menjadi tiga sektor, yakni ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. Hewan yang termasuk pada sektor ternak besar di Kabupaten Pasuruan adalah sapi potong dan sapi perah. Jumlah populasi ternak yang dihasilkan sektor ternak besar pada rentan tahun 2017 hingga 2021 cenderung mengalami peningkatan. Pada sektor ternak kecil, yang terdiri dari kambing dan domba, jumlah populasi yang dihasilkan pada tahun 2017 hingga 2021cenderung mengalami perubahan yang tidak signifikan. Sedangkan pada sektor ternak unggas terdiri dari ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Jumlah populasi yang dihasilkan sektor ternak unggas cenderung mengalami perubahan secara fluktuatif dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

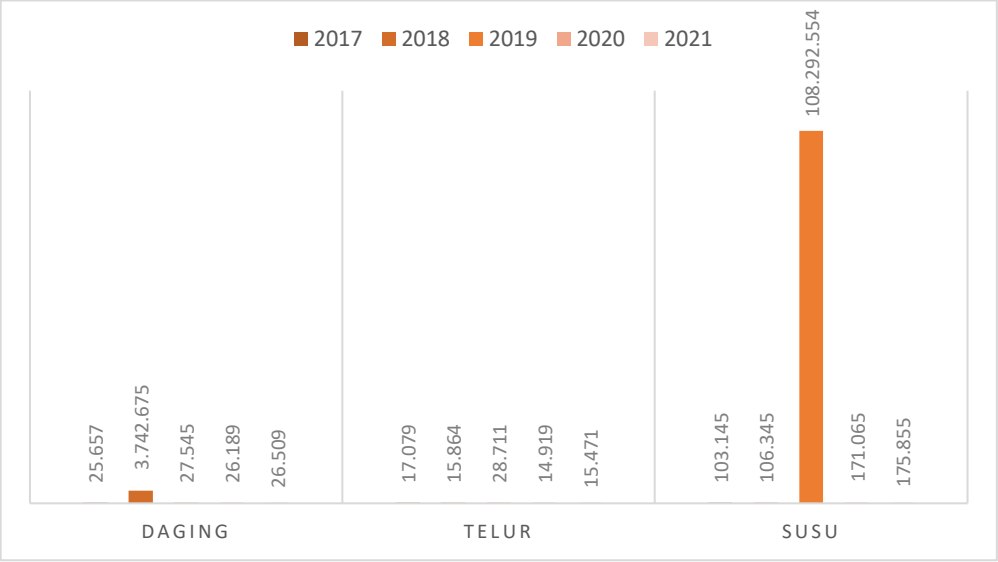
Tabel 12. 1 Jumlah Produksi Peternakan

Jumlah Produksi Peternakan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Daging	25.657	3.742.675	27.545	26.189	26.509	Ton
Kecamatan Bangil	335	102	325.17	431	437	Ton
Kecamatan Beji	406	293	1.640.13	406	411	Ton
Kecamatan Gempol	683	1.467	376.79	254	257	Ton
Kecamatan Gondang Wetan	854	82.472	586.98	580	587	Ton
Kecamatan Grati	1.816	367.263	2.234.15	1.479	1.497	Ton
Kecamatan Kejayan	2.819	577.129	3.351	4.277	4.329	Ton
Kecamatan Kraton	376	19.869	280.42	312	316	Ton
Kecamatan Lekok	5.505	430.238	2.433.05	2.238	2.266	Ton
Kecamatan Lumbang	645	9.251	400	687	696	Ton
Kecamatan Nguling	568	34.306	692	689	697	Ton
Kecamatan Pandaan	907	114.718	879	1.026	1.038	Ton
Kecamatan Pasrepan	1.700	651.532	3.475	2.483	2.513	Ton
Kecamatan Pohjentrek	91	40	47	41	41	Ton
Kecamatan Prigen	2.175	537.839	3.177	3.222	3.261	Ton
Kecamatan Purwodadi	783	319.893	1.874	543	550	Ton
Kecamatan Purwosari	1.053	105.882	1.048	769	778	Ton
Kecamatan Puspo	63	60	0	58	58	Ton
Kecamatan Rejoso	276	148	235	316	320	Ton
Kecamatan Rembang	510	34.086	325	415	420	Ton
Kecamatan Sukorejo	906	49.199	834	1.374	1.391	Ton
Kecamatan Tosari	125	80	109	85	86	Ton
Kecamatan Tutur	1.565	182.504	1.573	1.336	1.352	Ton
Kecamatan Winongan	455	32.263	412	493	499	Ton
Kecamatan Wonorejo	1.041	192.041	1.239	2.676	2.708.65	Ton
Telur	**17.079**	**15.864**	**28.711**	**14.919**	**15.471**	Ton
Kecamatan Bangil	55	59	67	56	58	Ton
Kecamatan Beji	175	293	328	275	285	Ton
Kecamatan Gempol	1.455	1.467	1.640	1.376	1.425	Ton
Kecamatan Gondang Wetan	67	67	587	64	66	Ton
Kecamatan Grati	1.816	210	2.234	198	205	Ton

Jumlah Produksi Peternakan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Kejayan	1.172	1.173	3.351	1.101	1.140	Ton
Kecamatan Kraton	83	79	280	75	78	Ton
Kecamatan Lekok	24	25	2.433	24	25	Ton
Kecamatan Lumbang	87	110	400	105	109	Ton
Kecamatan Nguling	63	62	692	60	81	Ton
Kecamatan Pandaan	345	409	879	387	401	Ton
Kecamatan Pasrepan	16	51	3.475	49	51	Ton
Kecamatan Pohjentrek	55	53	47	52	54	Ton
Kecamatan Prigen	1.535	1.543	1.726	1.448	1.500	Ton
Kecamatan Purwodadi	521	522	1.874	491	509	Ton
Kecamatan Purwosari	2.043	2.104	2.353	1.974	2.045	Ton
Kecamatan Puspo	2	5	81	7	7	Ton
Kecamatan Rejoso	160	188	211	177	183	Ton
Kecamatan Rembang	12	20	27	23	24	Ton
Kecamatan Sukorejo	2.281	2.285	2.556	2.144	2.221	Ton
Kecamatan Tosari	7	7	109	12	12	Ton
Kecamatan Tutur	4.574	4.573	1.573	4.293	4.446	Ton
Kecamatan Winongan	476	490	549	461	477	Ton
Kecamatan Wonorejo	55	69	1.239	67	69	Ton
Susu	**103.145**	**106.345**	**108.292.554**	**171.065**	**175.855**	Ton
Kecamatan Bangil	39	41	-	50	51	Ton
Kecamatan Beji	51	54	23.291	39	40	Ton
Kecamatan Gempol	9	10	-	-	-	Ton
Kecamatan Gondang Wetan	53	56	1.456	-	-	Ton
Kecamatan Grati	6.087	6.630	3.418.520	5.470	5.623	Ton
Kecamatan Kejayan	17	18	15.511	25	25	Ton
Kecamatan Kraton	6	7	-	-	-	Ton
Kecamatan Lekok	27.017	26.681	15.198.128	20.291	20.859	Ton
Kecamatan Lumbang	10.848	11.490	17.308.419	30.549	31.405	Ton

Jumlah Produksi Peternakan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Nguling	1.700	1.631	3.305.744	5.416	5.568	Ton
Kecamatan Pandaan	7	10	-	-	-	Ton
Kecamatan Pasrepan	3.883	4.118	3.253.447	5.775	5.937	Ton
Kecamatan Pohjentrek	26	28	62	-	-	Ton
Kecamatan Prigen	73	78	-	-	-	Ton
Kecamatan Purwodadi	8.198	10.129	7.999.426	15.840	16.284	Ton
Kecamatan Purwosari	89	760	3.536.420	13.241	13.611	Ton
Kecamatan Puspo	12.866	11.526	17.489.946	21.708	22.315	Ton
Kecamatan Rejoso	596	629	303	540	555	Ton
Kecamatan Rembang	-	-	-	-	-	Ton
Kecamatan Sukorejo	210	222	70.806	121	124	Ton
Kecamatan Tosari	5.011	5.314	1.950.226	3.325	3.418	Ton
Kecamatan Tutur	26.270	26.825	34.613.069	48.491	49.848	Ton
Kecamatan Winongan	79	78	98.986	169	174	Ton
Kecamatan Wonorejo	10	10	8.794	15	15	Ton

Sumber: Dinas Peternakan



Gambar 12. 1 Jumlah Produksi Peternakan

Tabel 12. 2 Jumlah Populasi Ternak

Jumlah Populasi Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Ternak besar dan kecil						
Sapi Potong	**112.327**	**115.769**	**116.342**	**116.544**	**117.679**	Ekor
Kecamatan Bangil	259	206	144	84	192	Ekor
Kecamatan Beji	1.072	1.174	1.332	1.412	1.261	Ekor
Kecamatan Gempol	5.733	5.601	4.017	3.895	3.355	Ekor
Kecamatan Gondang Wetan	1.138	1.113	1.169	1.121	1.057	Ekor
Kecamatan Grati	9.723	1.284	11.786	12.152	12.460	Ekor
Kecamatan Kejayan	8.408	8.853	9.421	9.670	9.893	Ekor
Kecamatan Kraton	2.308	2.382	2.028	2.057	1.920	Ekor
Kecamatan Lekok	2.990	2.908	2.198	2.084	2.018	Ekor
Kecamatan Lumbang	4.003	4.023	4.598	4.546	4.538	Ekor
Kecamatan Nguling	17.035	17.823	12.488	12.970	13.353	Ekor
Kecamatan Pandaan	2.173	2.061	2.216	2.067	1.625	Ekor
Kecamatan Pasrepan	4.852	4.862	3.977	3.900	3.905	Ekor
Kecamatan Pohjentrek	191	137	199	143	68	Ekor
Kecamatan Prigen	12.673	12.905	18.537	17.553	18.832	Ekor
Kecamatan Purwodadi	8.090	8.190	5.580	5.525	5.432	Ekor
Kecamatan Purwosari	9.964	9.785	8.749	8.386	7.984	Ekor
Kecamatan Puspo	46	136	112	39	47	Ekor
Kecamatan Rejoso	396	350	645	582	468	Ekor
Kecamatan Rembang	3.826	4.109	4.761	4.966	5.109	Ekor
Kecamatan Sukorejo	6.867	7.113	4.487	4.636	4.612	Ekor
Kecamatan Tosari	115	122	2.192	2.117	2.105	Ekor
Kecamatan Tutur	1.180	1.687	423	902	1.022	Ekor
Kecamatan Winongan	3.187	3.296	3.160	3.195	3.204	Ekor
Kecamatan Wonorejo	6.098	6.649	12.123	12.542	13.219	Ekor
Sapi Perah	**90.817**	**152.929**	**70.081**	**94.107**	**97.102**	Ekor
Kecamatan Bangil	35	38	45	45	45	Ekor
Kecamatan Beji	45	49	22	22	22	Ekor
Kecamatan Gempol	8	9	-	-	-	Ekor
Kecamatan Gondang Wetan	47	51	-	-	-	Ekor
Kecamatan Grati	5.647	66.080	3.244	3.345	3.245	Ekor

Jumlah Populasi Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Kejayan	15	15	15	15	47	Ekor
Kecamatan Kraton	6	6	-	-	-	Ekor
Kecamatan Lekok	23.718	21.679	14.481	12.586	13.418	Ekor
Kecamatan Lumbang	9	10.299	15.913	15.751	15.699	Ekor
Kecamatan Nguling	1.491	1.420	3.050	2.859	2.799	Ekor
Kecamatan Pandaan	7	9	-	2	2	Ekor
Kecamatan Pasrepan	3.418	3.705	3.121	3.132	3.296	Ekor
Kecamatan Pohjentrek	23	25	-	-	7	Ekor
Kecamatan Prigen	65	70	-	-	99	Ekor
Kecamatan Purwodadi	9.374	10.202	7.045	7.782	7.910	Ekor
Kecamatan Purwosari	67	1.993	3.251	7.157	7.299	Ekor
Kecamatan Puspo	8.963	8.637	15.282	14.509	15.122	Ekor
Kecamatan Rejoso	522	566	290	291	130	Ekor
Kecamatan Rembang	-	-	-	-	1	Ekor
Kecamatan Sukorejo	185	201	68	68	67	Ekor
Kecamatan Tosari	4.409	4.784	1.871	1.867	1.788	Ekor
Kecamatan Tutur	23.150	23.012	2.280	24.572	26.004	Ekor
Kecamatan Winongan	64	70	95	95	93	Ekor
Kecamatan Wonorejo	9	9	8	9	9	Ekor
Kambing	**71.880**	**72.000**	**72.265**	**79.477**	**72.163**	Ekor
Kecamatan Bangil	834	241	195	237	1.219	Ekor
Kecamatan Beji	3.069	3.266	3.289	3.266	3.443	Ekor
Kecamatan Gempol	1.916	2.845	2.409	2.845	2.798	Ekor
Kecamatan Gondang Wetan	3.468	3.209	3.190	3.209	3.272	Ekor
Kecamatan Grati	3.147	2.866	2.636	2.866	2.992	Ekor
Kecamatan Kejayan	5.481	5.520	5.961	5.520	4.147	Ekor
Kecamatan Kraton	3.043	2.882	2.762	2.882	3.066	Ekor
Kecamatan Lekok	5.010	5.107	5.562	12.586	5.420	Ekor
Kecamatan Lumbang	13.042	12.727	13.301	12.728	8.186	Ekor
Kecamatan Nguling	2.484	2.190	2.375	2.190	2.224	Ekor
Kecamatan Pandaan	1.515	1.575	894	1.575	1.055	Ekor
Kecamatan Pasrepan	7.293	7.394	8.035	7.394	6.551	Ekor

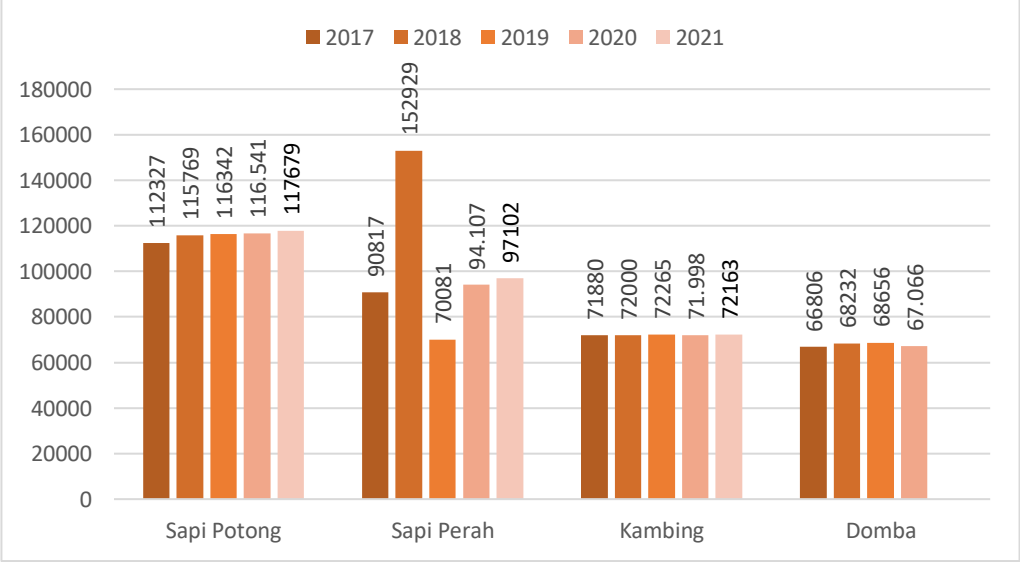
Jumlah Populasi Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Pohjentrek	155	212	124	212	629	Ekor
Kecamatan Prigen	4.618	4.442	4.353	4.442	5.371	Ekor
Kecamatan Purwodadi	833	1.045	1.008	1.045	1.934	Ekor
Kecamatan Purwosari	1.615	1.582	992	1.582	2.834	Ekor
Kecamatan Puspo	1.777	1.789	1.932	1.789	1.878	Ekor
Kecamatan Rejoso	119	316	187	316	740	Ekor
Kecamatan Rembang	2.193	2.243	2.398	2.243	2.009	Ekor
Kecamatan Sukorejo	1.732	1.755	1.430	1.755	1.866	Ekor
Kecamatan Tosari	1.648	1.679	1.833	1.679	1.734	Ekor
Kecamatan Tutur	2.464	2.911	3.373	2.912	4,.412	Ekor
Kecamatan Winongan	1.748	1.539	1.328	1.539	1.605	Ekor
Kecamatan Wonorejo	2.676	2.665	2.698	2.665	2.778	Ekor
Domba	**66.806**	**68.232**	**68.656**	**68.273**	**68.763**	Ekor
Kecamatan Bangil	938	268	80	268	266	Ekor
Kecamatan Beji	5.591	5.560	5.424	5.560	5.076	Ekor
Kecamatan Gempol	1,421	127	405	127	382	Ekor
Kecamatan Gondang Wetan	3.433	3.800	3.886	3.800	4.070	Ekor
Kecamatan Grati	3947	4.319	4.462	4.349	4.310	Ekor
Kecamatan Kejayan	4.283	4.670	4.710	4.670	3.529	Ekor
Kecamatan Kraton	5.689	6.123	6.193	6.123	6.008	Ekor
Kecamatan Lekok	4.174	4.525	4.606	4.535	4.858	Ekor
Kecamatan Lumbang	1.609	1.803	1.869	1.803	2.003	Ekor
Kecamatan Nguling	3.917	4.425	4.640	4.425	4.771	Ekor
Kecamatan Pandaan	1.274	856	537	856	819	Ekor
Kecamatan Pasrepan	50	85	160	85	1.450	Ekor
Kecamatan Pohjentrek	354	92	126	92	259	Ekor
Kecamatan Prigen	1.042	459	631	459	1.067	Ekor
Kecamatan Purwodadi	4.373	4.758	4.768	4.758	4.684	Ekor
Kecamatan Purwosari	1.439	1.579	1.611	1.580	1.743	Ekor
Kecamatan Puspo	738	713	680	713	643	Ekor
Kecamatan Rejoso	3.012	2.983	2.780	2.983	1.232	Ekor
Kecamatan Rembang	4.796	5.158	5.217	5.158	5.308	Ekor

Jumlah Populasi Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Sukorejo	116	117	26	117	395	Ekor
Kecamatan Tosari	4.759	5.146	5.109	5.146	5.147	Ekor
Kecamatan Tutur	3.134	3.402	3.455	3.402	3.156	Ekor
Kecamatan Winongan	2.901	3.227	3.294	3.227	3.439	Ekor
Kecamatan Wonorejo	3.816	4.037	3.987	4.037	4.147	Ekor
Ternak Unggas						
Ayam Petelur	**1.393.931**	**1.459.123**	**3.039.570**	**1.450.406**	**1.771.183**	Ekor
Kecamatan Bangil	-	1.000	3.600	1.000	31.000	Ekor
Kecamatan Beji	22.000	22.000	44.000	22.000	26.400	Ekor
Kecamatan Gempol	148.357	32.357	127.428	32.357	32.357	Ekor
Kecamatan Gondang Wetan	-	1.000	3.600	1.000	1.000	Ekor
Kecamatan Grati	16.056	2.456	4.912	2.456	44.206	Ekor
Kecamatan Kejayan	126.719	47.719	94.238	47.719	111.719	Ekor
Kecamatan Kraton	-	3.300	12.800	3.300	13.300	Ekor
Kecamatan Lekok	-	0	0	-	-	Ekor
Kecamatan Lumbang	2.100	5.900	19.400	5.900	6.680	Ekor
Kecamatan Nguling	4.216	216	432	199	216	Ekor
Kecamatan Pandaan	25.638	212.938	547.752	212.938	212.938	Ekor
Kecamatan Pasrepan	7.000	10.000	16.000	10.000	10.000	Ekor
Kecamatan Pohjentrek	-	0	0	-	5.140	Ekor
Kecamatan Prigen	140.854	160.854	379.416	154.854	154.854	Ekor
Kecamatan Purwodadi	44.126	25.078	50.156	25.078	25.078	Ekor
Kecamatan Purwosari	200.846	113.846	235.534	113.846	113.846	Ekor
Kecamatan Puspo	-	0	0	-	-	Ekor
Kecamatan Rejoso	2.040	6.980	21.840	6.980	6.260	Ekor
Kecamatan Rembang	-	110.000	42.6000	111.500	111.050	Ekor
Kecamatan Sukorejo	214.677	329.677	384.858	329.677	329.677	Ekor
Kecamatan Tosari	-	0	0	-	-	Ekor
Kecamatan Tutur	401.035	348.035	636.070	346.835	346.835	Ekor
Kecamatan Winongan	34.267	25.767	31.534	22.767	22.767	Ekor
Kecamatan Wonorejo	4.000	0	0	-	165.860	Ekor

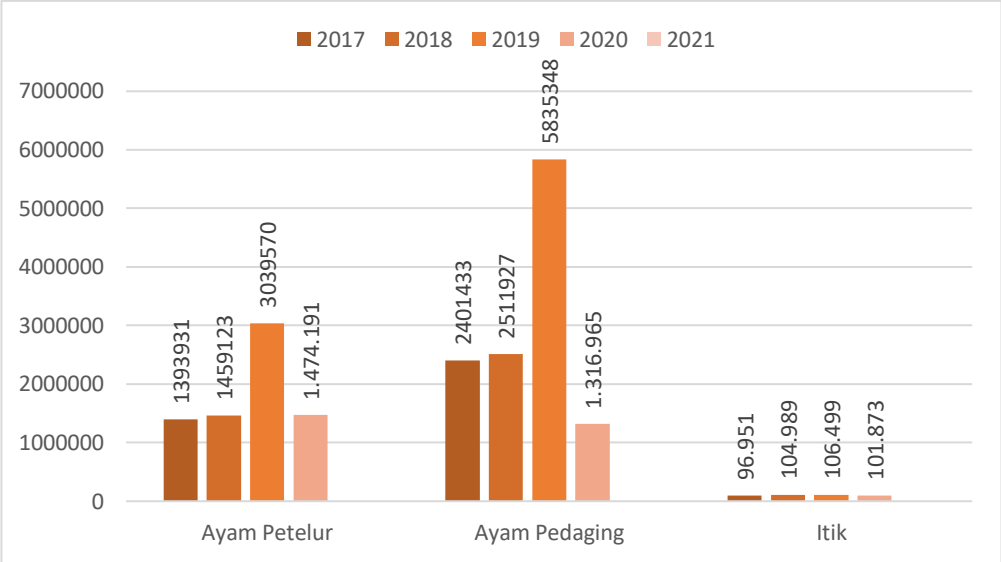
Jumlah Populasi Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Ayam Pedaging	**2.401.433**	**2.511.927**	**5.835.348**	**2.334.036**	**1.929.377**	Ekor
Kecamatan Bangil	-	0	44.349	36.597	3.735	Ekor
Kecamatan Beji	16.854	23.119	74.121	23.119	326.378	Ekor
Kecamatan Gempol	-	0	0	-	-	Ekor
Kecamatan Gondang Wetan	58.219	61.666	18.8820	61.666	16.497	Ekor
Kecamatan Grati	187.917	247.311	565.792	247.311	95.106	Ekor
Kecamatan Kejayan	431.533	461.948	104.5157	364.008	224.682	Ekor
Kecamatan Kraton	8.421	9.023	35.257	9.020	88.598	Ekor
Kecamatan Lekok	840.098	63.102	123.144	10	30.549	Ekor
Kecamatan Lumbang	19.760	18.150	116.857	18.150	13.050	Ekor
Kecamatan Nguling	21.740	41.081	91.194	75.622	7.870	Ekor
Kecamatan Pandaan	53.639	176.101	414.347	140.839	86.342	Ekor
Kecamatan Pasrepan	233.183	479.295	719.022	426.563	37.108	Ekor
Kecamatan Prigen	235.904	317.566	718.494	317.566	273.494	Ekor
Kecamatan Purwodadi	85.058	90.935	286.258	90.935	67.893	Ekor
Kecamatan Purwosari	8.927	57.365	177.576	57.365	140.476	Ekor
Kecamatan Puspo	-	0	0	-	6.609	Ekor
Kecamatan Rejoso	-	0	0	-	17.350	Ekor
Kecamatan Rembang	26.764	27.758	104.885	27.758	12.321	Ekor
Kecamatan Sukorejo	22.443	149.876	376.320	149.876	107.498	Ekor
Kecamatan Tutur	83.064	88.203	276.090	88.203	211.837	Ekor
Kecamatan Winongan	23.066	24.993	786.78	24.993	7.970	Ekor
Kecamatan Wonorejo	44.843	17.4435	398.987	174.435	154.013	Ekor
Itik	**96.951**	**104.989**	**106.499**	**139.492**	**106.839**	Ekor
Kecamatan Bangil	1.719	3.655	4.262	5.318	5.005	Ekor
Kecamatan Beji	10.837	5.480	2.542	1.311	1.291	Ekor
Kecamatan Gempol	13.067	10.446	6.708	5.614	14.066	Ekor
Kecamatan Gondang Wetan	7.921	6.172	4.092	3.222	9.078	Ekor
Kecamatan Grati	7.014	4.405	1.779	578	927	Ekor
Kecamatan Kejayan	1.312	1.823	1.900	2.297	11.678	Ekor
Kecamatan Kraton	14.469	9.957	5.808	3.587	3.941	Ekor
Kecamatan Lekok	1.422	900	514	283	409	Ekor
Kecamatan Nguling	732	695	586	594	466	Ekor

Jumlah Populasi Ternak	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kecamatan Pandaan	3.199	2.229	1.385	958	1.657	Ekor
Kecamatan Pohjentrek	1.040	8.606	6.683	6.140	7.157	Ekor
Kecamatan Prigen	1.857	1.159	488	249	563	Ekor
Kecamatan Purwodadi	615	2.200	2.879	3.225	11.032	Ekor
Kecamatan Purwosari	993	3.425	4.161	5.471	5.457	Ekor
Kecamatan Rejoso	16.362	30.483	52.363	90.155	21.568	Ekor
Kecamatan Rembang	2.070	1.348	642	484	2.436	Ekor
Kecamatan Sukorejo	4.410	4.660	4.041	4.277	3.467	Ekor
Kecamatan Tutur	519	309	189	157	218	Ekor
Kecamatan Winongan	6.566	5.248	3.268	2.879	3.380	Ekor
Kecamatan Wonorejo	827	1.789	2.209	2.694	3.043	Ekor

Sumber: Dinas Peternakan



Gambar 12. 2 Jumlah Popolasi Ternak Besar dan Kecil



Gambar 12. 3 Jumlah Popolasi Ternak Unggas

Tabel 12. 3 Rasio Ketersediaan Pangan Dibanding Dengan Kebutuhan Bahan Pangan

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Telur	1,82	4,48	4,35	2,58	Rasio
Daging	2,53	1,47	3,09	2,83	Rasio

Sumber: Dinas Peternakan

Tabel 12. 4 Peningkatan Produksi Peternakan

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Daging	2	2,1	0,18	1,22	%
Telur	3	3,15	0,18	1,17	%
Susu	2	2,15	0,02	26,65	%

Sumber: Dinas Peternakan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DESKRIPSI

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 berjumlah 360.768 rumah tangga dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 berjumlah 411. 167 rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih, maka semakin tinggi pula tingkat hidup bersih masyarakat sehingga kesehatan masyarakat semakin baik.

Sanitasi adalah suatu usaha dalam menyediakan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti feses dan urine yang memenuhi persyaratan kesehatan. Jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi pada tahun 2017 berjumlah 332.692 rumah tangga dengan persentase sebesar 75,01% dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 berjumlah 393.220 rumah tangga dengan persentase 83,28%. Peningkatan persentase tersebut mengindikasikan semakin banyak jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi, maka semakin sehat lingkungan hidup masyarakat, semakin terjaga sumber daya alam (seperti air dan tanah) di Kabupaten Pasuruan, dan menurunnya tingkat penularan penyakit, terutama melalui jalur fecal oral.

Kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2019, persentase pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten

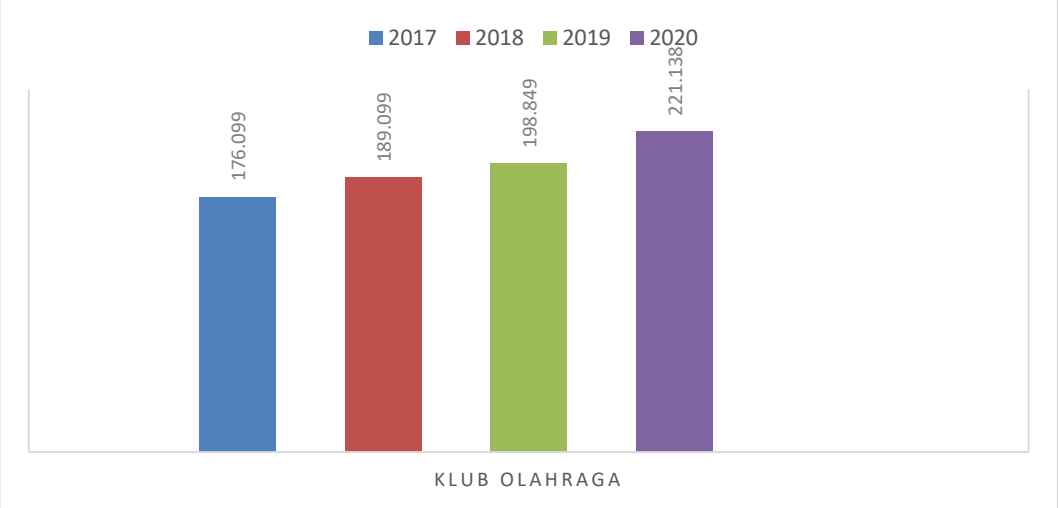
Pasuruan sebesar 9,87% dan mengalami kenaikan hingga akhir 2021 sebesar 37,19%. Hal tersebut mengartikan semakin tinggi persentase pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Pasuruan, maka semakin kecil luas kawasan di Kabupaten Pasuruan.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. Persentase bangunan gedung yang terstandarisasi SLF pada tahun 2019 sebesar 0,002% dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 0,010%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak gedung yang telah terstandarisasi SLF. maka semakin baik pengendalian penggunaan lahan dan tata ruang di Kabupaten Pasuruan sehingga berdampak baik pada lingkungan.

Tabel 13. 1 Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan	176.098,79	189.098,79	198.849,23	221.138,23	m

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Gambar 13. 1 Tersedia dan terpeliharanya jalan lingkungan perkotaan

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 2 Rumah Tidak Layak Huni

Rumah Tidak Layak Huni	2020	Satuan
Persentase rumah tidak layak huni	5,58	%
Jumlah rumah tidak layak huni	27.428	Unit
Jumlah seluruh rumah	491.970	Unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	Satuan
Bangil	0,021	%
Beji	0,020	%
Gempol	0,017	%
Gondang Wetan	0,028	%
Grati	0,034	%
Kejayan	0,080	%
Kraton	0,052	%
Lekok	0,074	%
Lumbang	0,050	%
Nguling	0,047	%

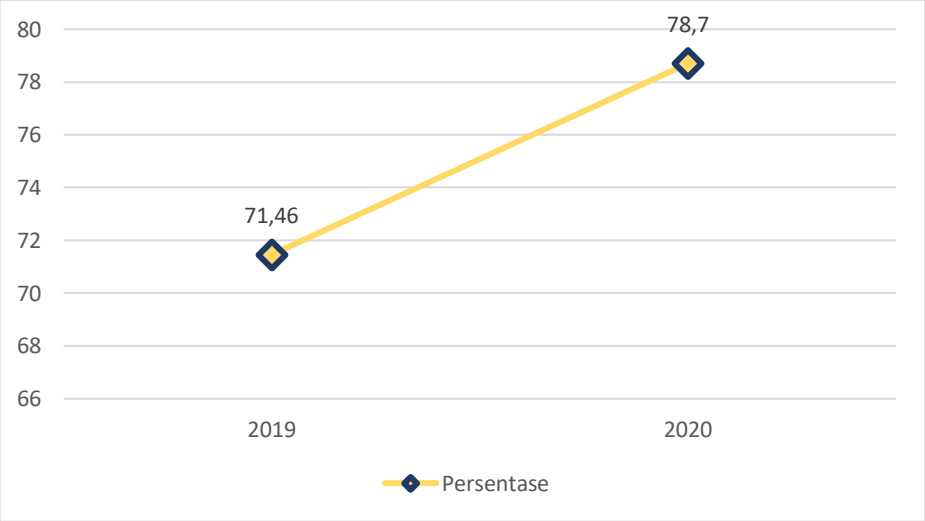
Kecamatan	2020	Satuan
Pandaan	0,015	%
Pasrepan	0,112	%
Pohjentrek	0,016	%
Prigen	0,012	%
Purwodadi	0,043	%
Purwosari	0,021	%
Puspo	0,055	%
Rejoso	0,025	%
Rembang	0,062	%
Sukorejo	0,025	%
Tosari	0,013	%
Tutur	0,065	%
Winongan	0,062	%
Wonorejo	0,050	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 4 Indeks Permukiman Layak Huni

Elemen	2019	2020	Satuan
Indeks Permukiman Layak Huni	71,46	78,7	Nilai

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



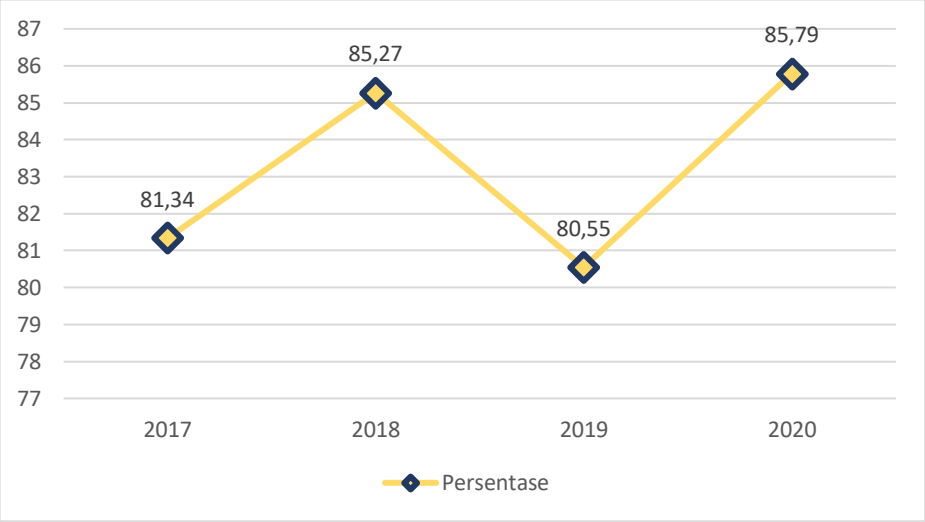
Gambar 13. 2 Persentase RT yang Terlayani Air Bersih

Tabel 13. 5 RT yang Terlayani Air Bersih

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase RT yang terlayani air bersih	81,34	85,27	80,55	85,79	-	%
Jumlah RT yang terlayani air bersih	360.768	380.784	377.528	405.070	411.167	KK

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah seluruh RT	443.530	446.587	468.682	472.172	-	KK

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

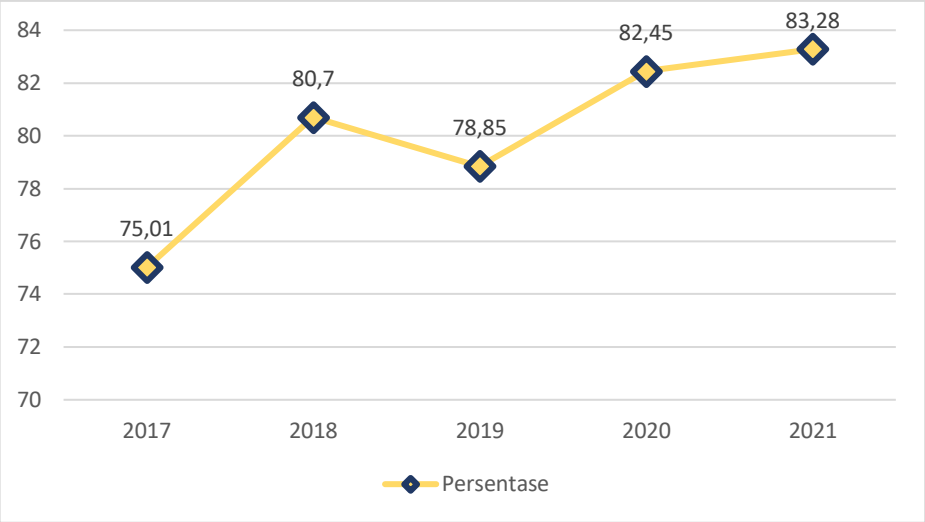


Gambar 13. 3 Persentase RT yang Terlayani Air Bersih

Tabel 13. 6 Persentase RT yang Terlayani Sanitasi

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase RT yang terlayani sanitasi	75,01	80,7	78,85	82,45	83,28	%
Jumlah RT yang terlayani sanitasi	332.692	360.395	369.579	389.305	393,220	KK
Jumlah seluruh RT	443.530	446.587	468.682	472.172	-	KK

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



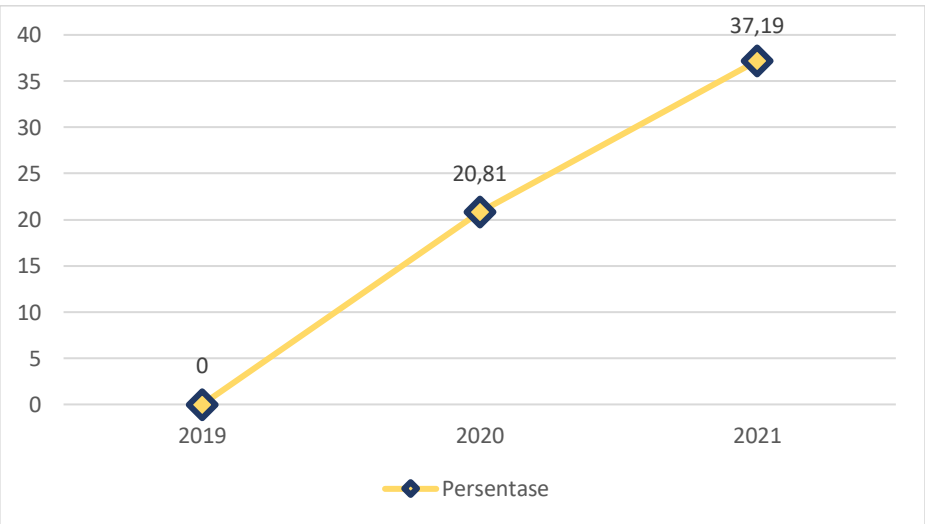
Gambar 13. 4 Persentase RT yang Terlayani Sanitasi

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 7 Pengurangan Kawasan Kumuh

Pengurangan Kawasan Kumuh	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pengurangan kawasan kumuh	9,87	20,81	37,19	%
Luas kawasan kumuh pada tahun t	200,35	180,58	158,66	Ha
Luas kawasan kumuh pada tahun t-1	200,35	180,58	-	Ha

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

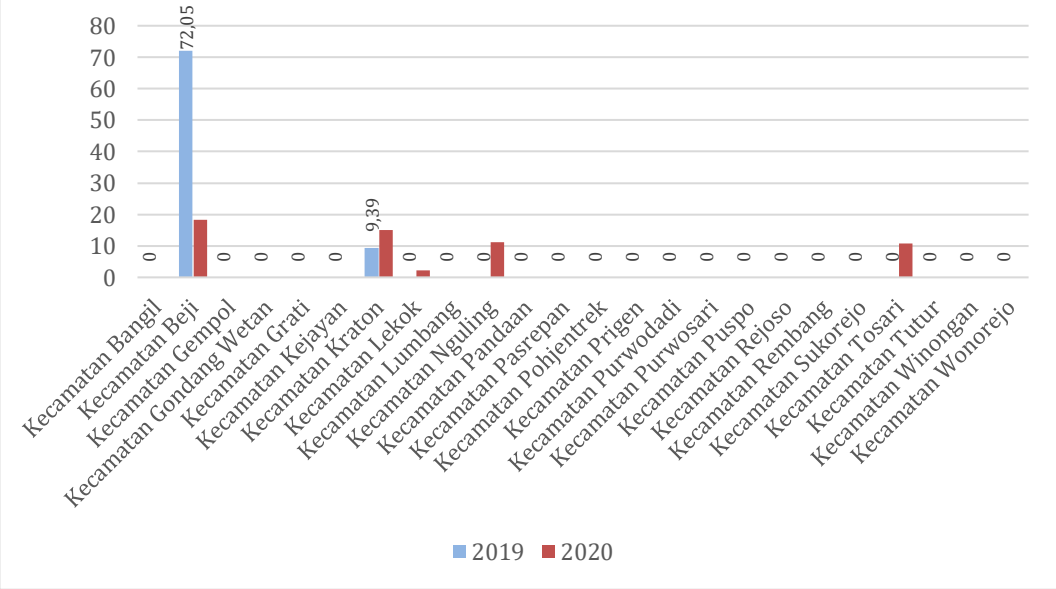


Gambar 13. 5 Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh

Tabel 13. 8 Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh Menurut Kecamatan

Kecamatan	2019	2020	Satuan
Bangil	13,04	17,74	%
Beji	72,05	18,25	%
Gempol	0,00	0,00	%
Gondang Wetan	0,00	0,00	%
Grati	0,00	0,00	%
Kejayan	0,00	0,00	%
Kraton	9,39	15,14	%
Lekok	0,00	2,27	%
Lumbang	0,00	0,00	%
Nguling	0,00	11,17	%
Pandaan	0,00	0,00	%
Pasrepan	0,00	0,00	%
Pohjentrek	0,00	0,00	%
Prigen	0,00	0,00	%
Purwodadi	0,00	0,00	%
Purwosari	0,00	0,00	%
Puspo	0,00	0,00	%
Rejoso	0,00	0,00	%
Rembang	0,00	0,00	%
Sukorejo	0,00	0,00	%
Tosari	0,00	10,72	%
Tutur	0,00	0,00	%
Winongan	0,00	0,00	%
Wonorejo	0,00	0,00	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Gambar 13. 6 Persentase pengurangan kawasan kumuh Menurut Tahun 2019-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 9 Rumah Layak Huni

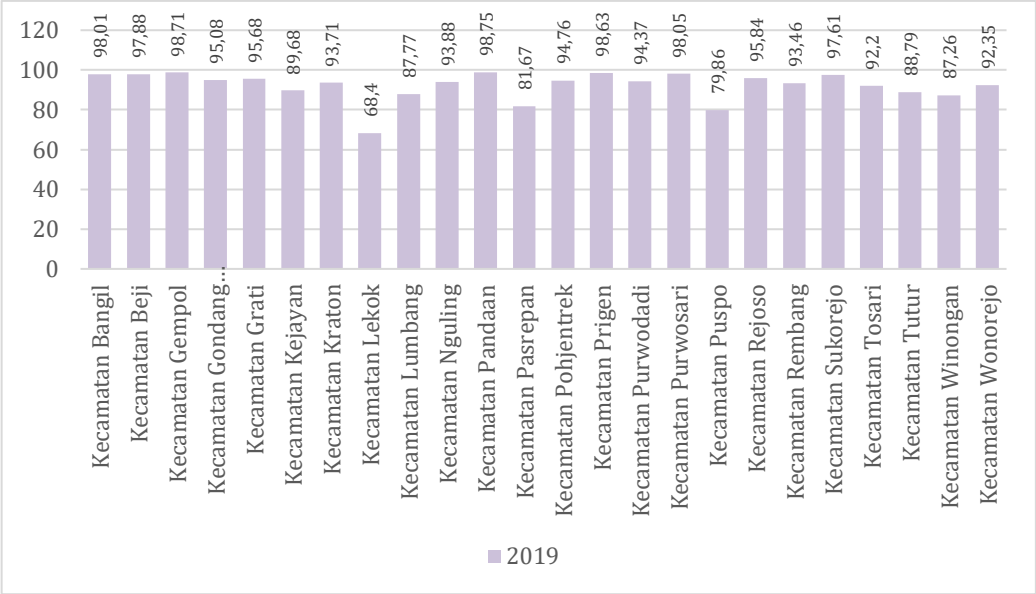
Rumah Layak Huni	2020	Satuan
Persentase rumah layak huni	93,28	**%**
Jumlah rumah layak huni	458.888	Unit
Jumlah seluruh rumah	491.970	Unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 10 Persentase Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan

Kecamatan	2020	Satuan
Bangil	98,01	%
Beji	97,88	%
Gempol	98,71	%
Gondang Wetan	95,08	%
Grati	95,68	%
Kejayan	89,68	%
Kraton	93,71	%
Lekok	68,40	%
Lumbang	87,77	%
Nguling	93,88	%
Pandaan	98,75	%
Pasrepan	81,67	%
Pohjentrek	94,76	%
Prigen	98,63	%
Purwodadi	94,37	%
Purwosari	98,05	%
Puspo	79,86	%
Rejoso	95,84	%
Rembang	93,46	%
Sukorejo	97,61	%
Tosari	92,20	%
Tutur	88,79	%
Winongan	87,26	%
Wonorejo	92,35	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



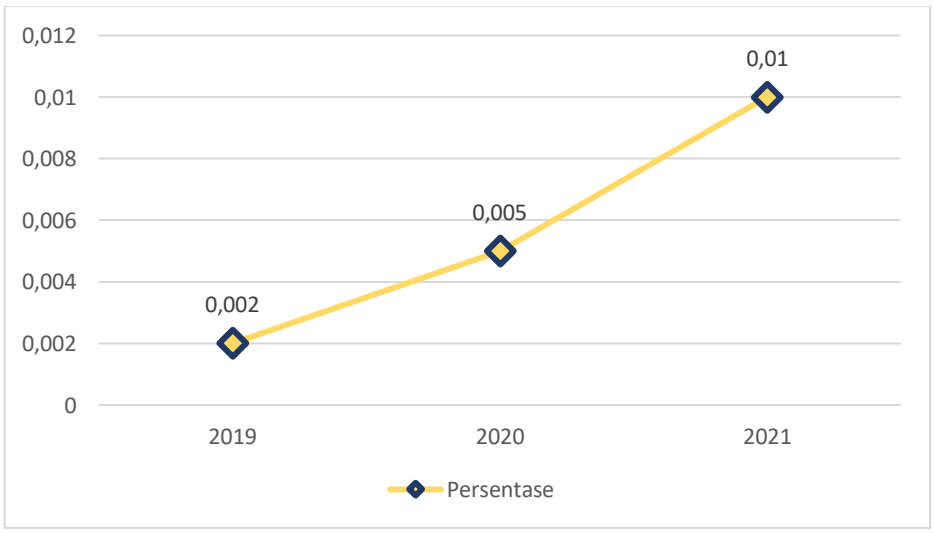
Gambar 13. 7 Persentase Rumah Layak Huni Menurut Tahun 2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 11 Bangunan Gedung yang Terstandarisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Persentase bangunan gedung yang terstandarisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi)	0,002	0,005	0,010	%
Jumlah gedung yang terstandarisasi SLF	10	18	41	Unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Gambar 13. 8 Persentase Bangunan Gedung yang Terstandarisasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi)

Tabel 13. 12 Jalan lingkungan perkotaan yang ditangani

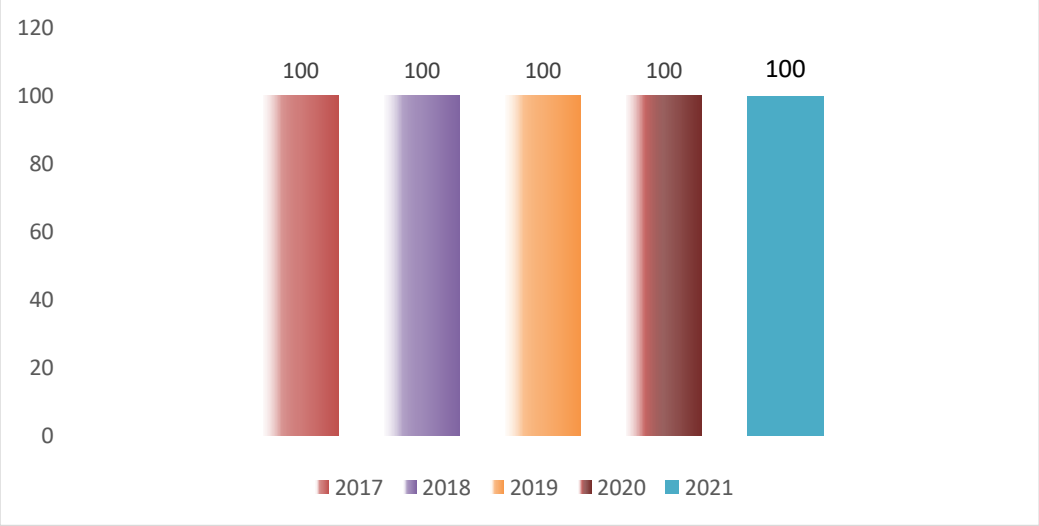
Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Panjang jalan lingkungan perkotaan yang ditangani	176.098,79	189.098,79	198.849,23	221.138,23	Meter

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 13 Penanganan Rumah Akibat Bencana Alam/ Sosial

Penanganan Rumah Akibat Bencana Alam/ Sosial	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penanganan rumah akibat bencana alam/ sosial	100	100	100	100	100	%
Jumlah penanganan rumah akibat bencana alam/ sosial	194	92	117	180	183	Penanganan
Jumlah seluruh rumah yang tertimpa bencana alam/sosial	194	92	117	180	183	Rumah

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



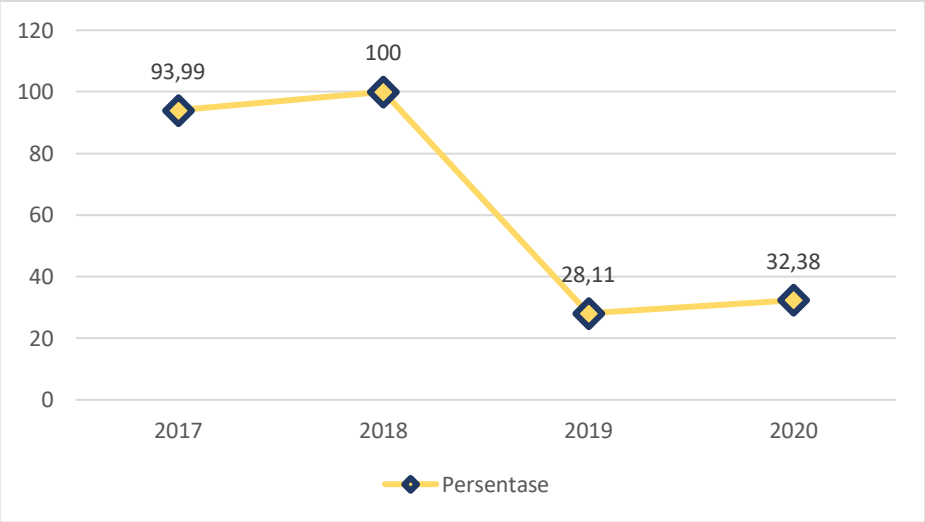
Gambar 13. 9 Persentase Penanganan Rumah Akibat Bencana Alam/ Sosial

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 14 Pengembangan Rumah Swadaya

Pengembangan Rumah Swadaya	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase pengembangan rumah swadaya	93,99	100	28,11	32,38	%
Jumlah rumah swadaya yang dikembangkan	1.950	2.093	2.692	2.412	Unit
Jumlah rumah seluruh swadaya	27.428	27.428	27.428	27.428	Unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



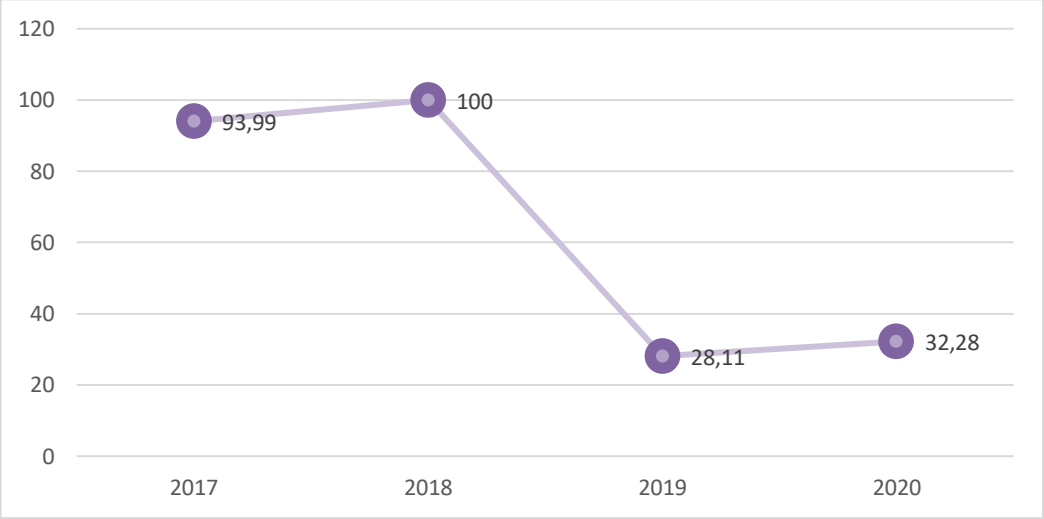
Gambar 13. 10 Persentase Pengembangan Rumah Swadaya

Tabel 13. 15 Persentase Pengembangan Rumah Swadaya Menurut Kecamatan

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Bangil	6,75	9,77	7,99	6,39	%
Beji	5,86	0,37	0,92	3,66	%
Gempol	10,17	8,69	3,60	6,36	%
Gondang Wetan	8,88	6,40	7,96	12,66	%
Grati	6,25	27,44	26,69	26,91	%
Kejayan	5,47	6,51	9,43	13,94	%
Kraton	6,27	7,05	7,75	10,08	%
Lekok	4,07	2,60	4,12	5,49	%
Lumbang	19,97	9,03	15,35	8,37	%
Nguling	7,53	5,75	6,06	9,16	%
Pandaan	6,86	10,29	2,70	0,49	%
Pasrepan	3,05	13,52	5,30	5,33	%
Pohjentrek	2,46	3,58	7,83	10,29	%
Prigen	16,46	8,23	20,43	12,80	%
Purwodadi	6,53	8,82	14,59	7,63	%
Purwosari	13,80	11,24	12,78	8,52	%

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Puspo	3,76	3,23	16,77	2,44	%
Rejoso	11,27	13,03	13,91	18,45	%
Rembang	4,46	4,05	6,69	7,22	%
Sukorejo	9,94	9,21	7,02	7,16	%
Tosari	64,61	12,08	16,29	24,16	%
Tutur	2,69	2,86	3,19	8,06	%
Winongan	4,95	5,24	23,04	7,25	%
Wonorejo	4,27	5,06	6,07	7,23	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



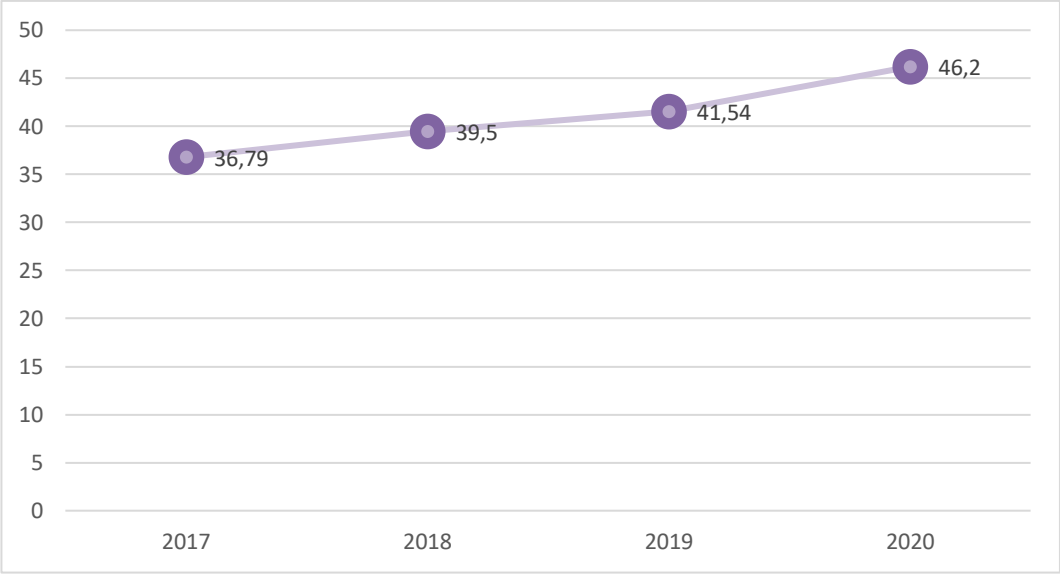
Gambar 13. 11 Persentase Pengembangan Rumah Swadaya

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 16 Tersedianya Infrastruktur Permukiman

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase tersedianya infrastruktur permukiman	36,79	39,50	41,54	46,20	%
Jumlah infrastruktur permukiman yang tersedia	176.099	189.099	198.849	221.138	Meter
Jumlah infrastruktur permukiman yang dibutuhkan	478.700	478.700	478.700	478.700	Meter

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Gambar 13. 12 Persentase Tersedianya Infrastruktur Permukiman

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 17 Bangunan Gedung yang Dibangun/Direhab

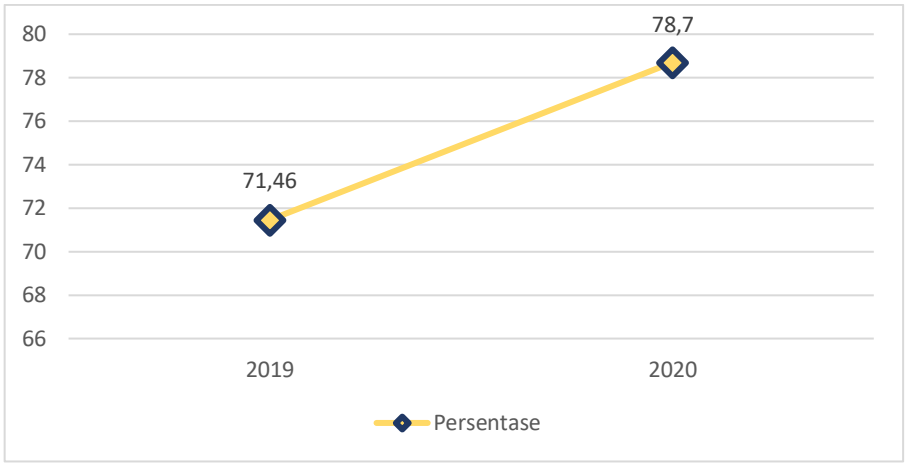
Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah gedung yang dibangun/rehab	41	8	17	40	73	Unit
Jumlah seluruh gedung	504.663	504.663	504.663	504.663	-	Unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 18 Capaian Lingkungan Permukiman yang Layak Huni

Capaian Lingkungan Permukiman yang Layak Huni	2019	2020	Satuan
Persentase capaian lingkungan permukiman yang layak huni	71,46	78,7	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



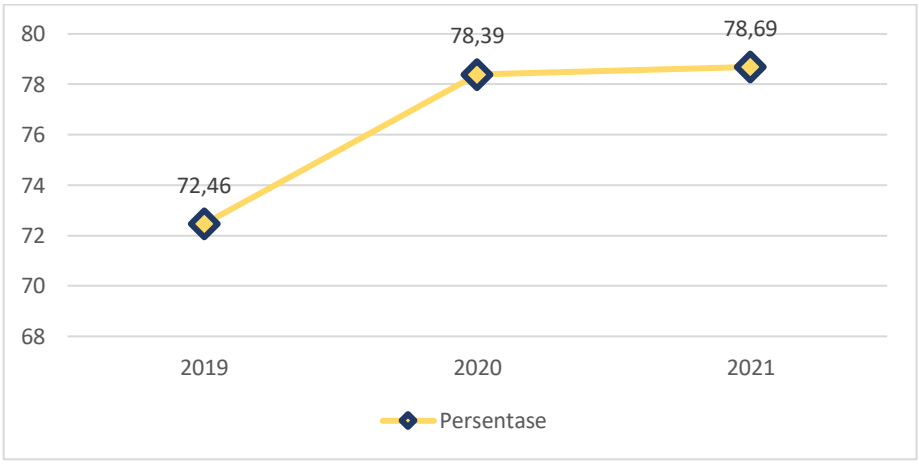
Gambar 13. 13 Persentase Capaian Lingkungan Permukiman yang Layak Huni

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 19 Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman	2019	2020	2021	Satuan
Persentase ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman	72,46	78,39	78,69	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Gambar 13. 14 Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 20 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Elemen	2021	Satuan
Jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapair minum melalui SPAM jaringan perpipaan	393,220	Rumah Tangga

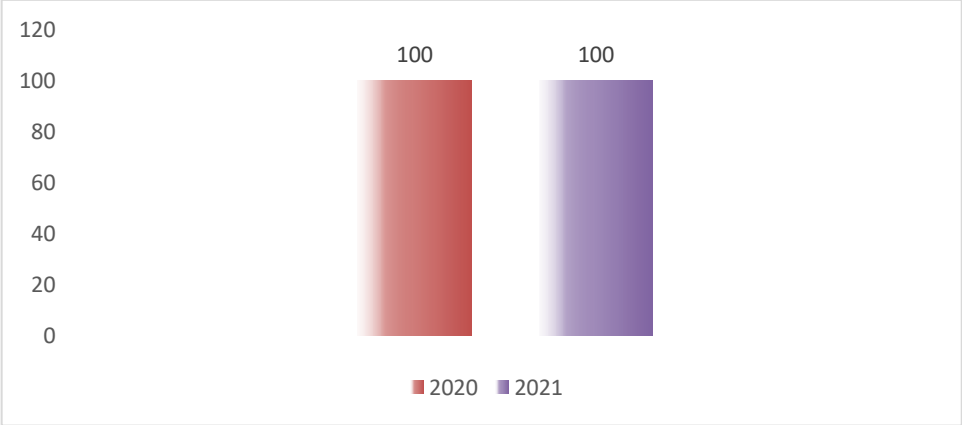
Elemen	2021	Satuan
dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota		
Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	472.172	Rumah Tangga

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 21 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Elemen	2020	2021	Satuan
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	%
Jumlah total bencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	180	183	Unit
Jumlah total bencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	180	183	Unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Gambar 13. 15 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

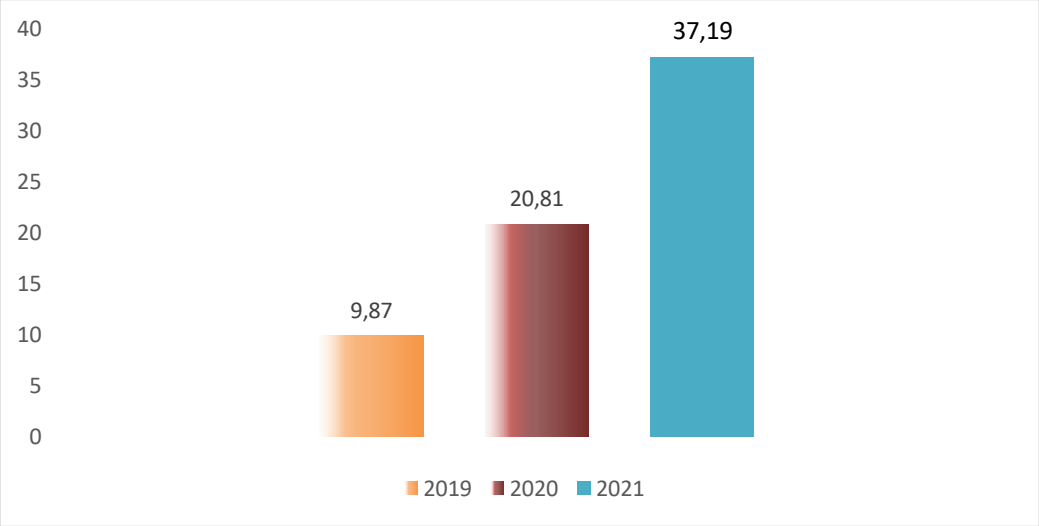
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 22 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	9,87	20,81	37,19	%

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 yang di tangani ha	19,77	41,69	74,51	Ha
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	200,35	200,35	200,35	Ha

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



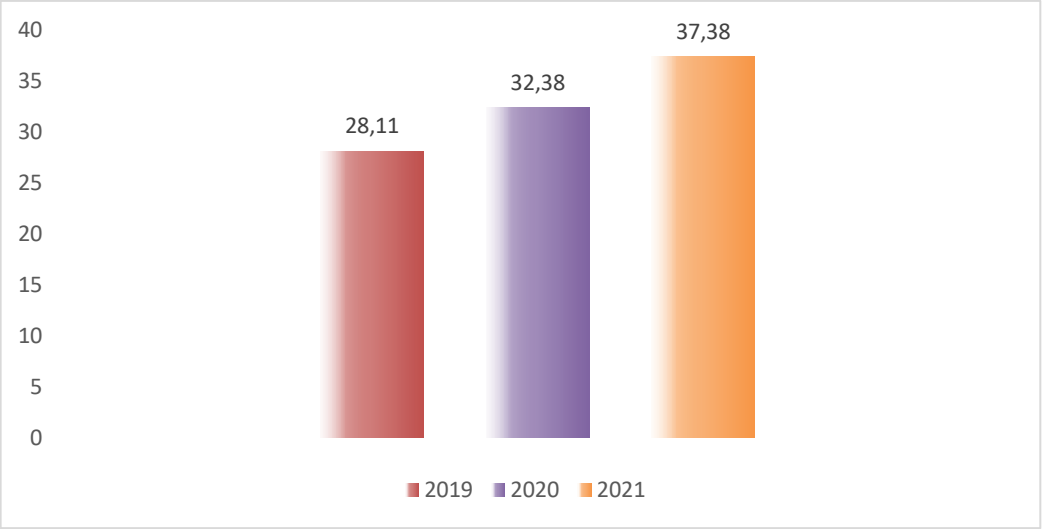
Gambar 13. 16 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 23 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	28,11	32,38	37,38	%
Jumlah unit rumah tidak layak huni	11.986	13.806	15.936	Unit
Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	42.634	42.634	42.634	Unit

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Gambar 13. 17 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 24 Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	100	100	100	

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

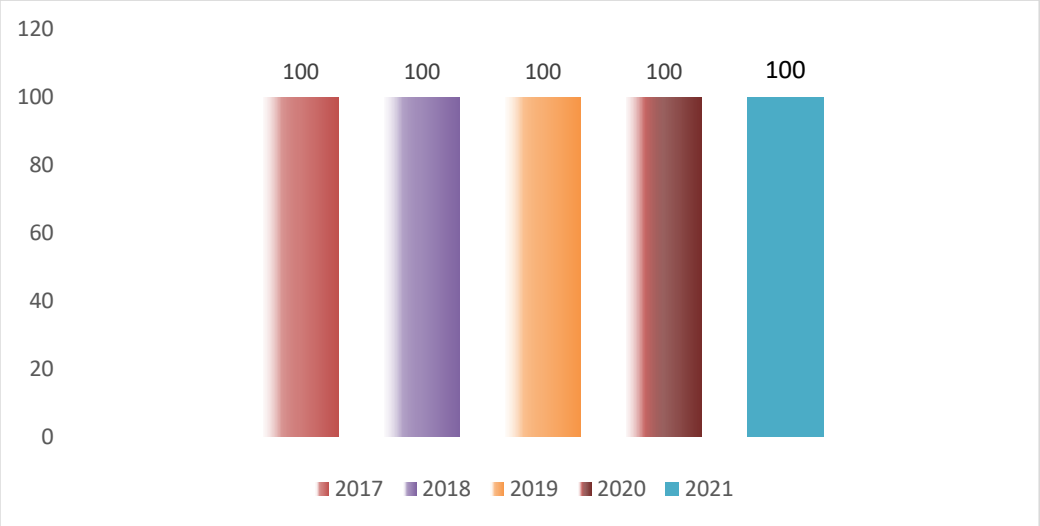


Gambar 13. 18 Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Tabel 13. 25 Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Gambar 13. 19 Persentase Penanganan Kasus dan Sengketa Pertanahan

Tabel 13. 26 Persentase tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Elemen	2021	Satuan
Persentase tercapainya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	87,08	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 27 Prosentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah

Elemen	2021	Satuan
Prosentase tercapainya pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah	83,28	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 13. 28 Persentase tercapainya pengembangan kawasan permukiman

Elemen	2021	Satuan
Persentase tercapainya pengembangan kawasan permukiman	8,66	%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

DESKRIPSI

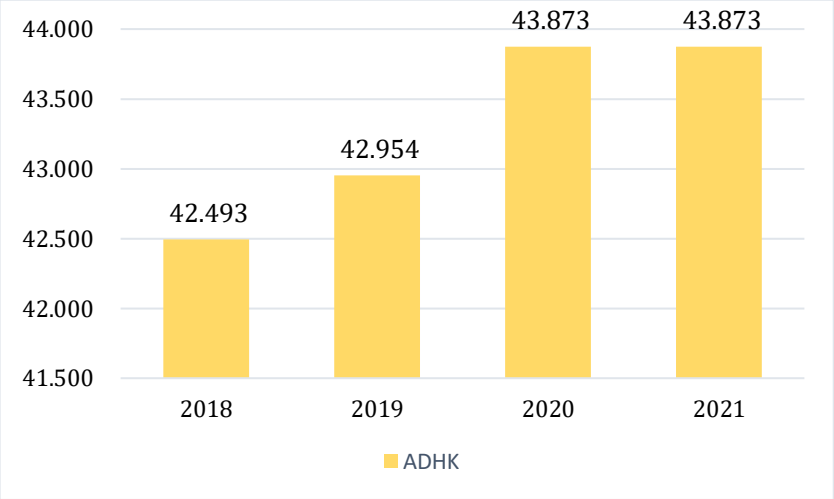
Kondisi hasil bumi di Kabupaten Pasuruan dapat diukur melalui produksi dari tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Pasuruan tahun 2018, yaitu 1.102.068 ton, kemudian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga menjadi sebanyak 1.364.734 ton di tahun 2021. Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan terbesar dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017 – 2021) terjadi pada tahun 2018, yaitu 25,93 persen, sedangkan peningkatan di tahun 2021 hanya sebesar 0,51 persen.

Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Pasuruan juga selalu meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, yang awalnya 824,67 Kg/Ha di tahun 2017, menjadi 1.699,42 Kg/Ha di tahun 2021. Dalam hal ini yang termasuk tanaman perkebunan adalah Tebu, Kelapa, Kopi, Cengkeh, Kapuk Randu dan Kenanga. Total Luas Panen Perkebunan di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah 17.899,89 Ha. Berikut perincian yang diperoleh berdasarkan dari dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.

Tabel 14. 1 PDRB Subsektor Pertanian

PDRB Subsektor Pertanian	2018	2019	2020	2021	Satuan
ADHK	42.493	42.954	43.873	43.873	Juta Rupiah

Sumber: Ketahanan Pangan dan Pertanian



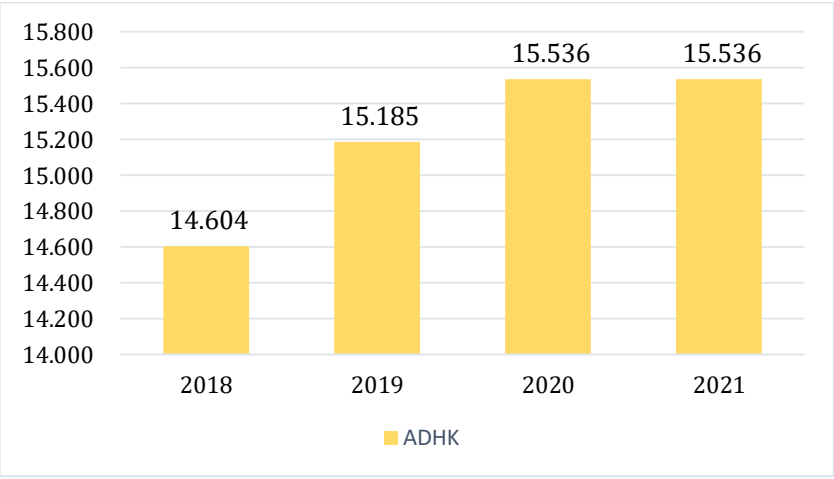
Gambar 14. 1 PDRB Subsektor Pertanian

Sumber: Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 2 PDRB Subsektor Perkebunan

PDRB Subsektor Perkebunan	2018	2019	2020	2021	Satuan
ADHK	14.604	15.185	15.536	15.536	Juta Rupiah

Sumber: Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 2 PDRB Subsektor Perkebunan

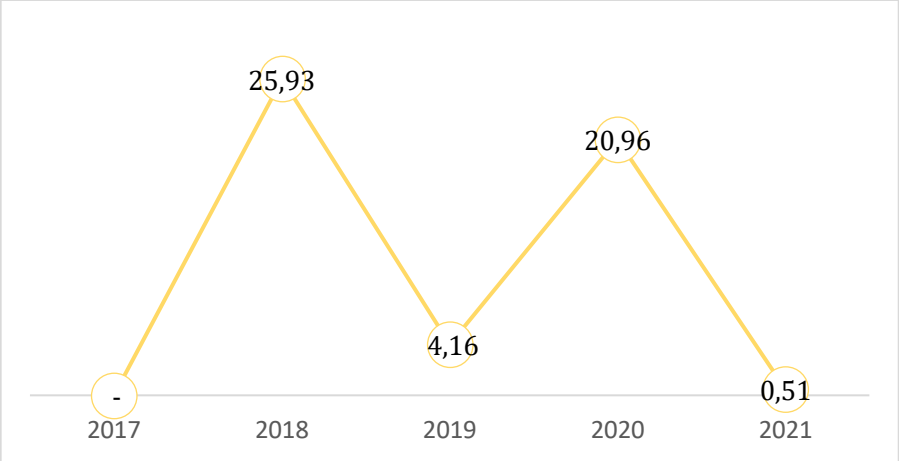
Sumber: Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 3 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	25,93	4,16	20,96	0,51	%
Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	0,79	8,3	17,59	8,09	0,63	%
Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan	1.102.068	1.187.221	1.348.622	1.356.247	1.364.734	ton
Jumlah produksi tanaman pangan	3,55	43,12	0,62	0,48	0,48	%
Persentase Peningkatan produksi tanaman buah tahunan	445.903	638.198	642.912	645.924	648.951	ton
Jumlah produksi tanaman buah	1,05	61,04	1,16	0,56	0,56	Unit
Persentase Peningkatan produksi tanaman sayur	147.096	236.880	238.205	239.822	241.440	ton
Jumlah produksi tanaman sayur	-	12,18	0,60	0,36	0,36	%
Persentase Peningkatan produksi tanaman hias	162.919.692	182.758.293	183.844.466	184.512.245	184.577.678	Tangkai
Jumlah produksi tanaman hias	-	5,0	0,82	0,99	0,54	%
Persentase Peningkatan produksi	32.033,41	31.888,05	32.146,47	32.473,42	34.472,38	ton

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
tanaman perkebunan						
Jumlah produksi tanaman perkebunan	-	-	28,57	28,57	28,57	%
Persentase produk hasil pertania-gribisnis yang terstandarisasi	-	25,93	4,16	20,96	0,51	%

Sumber: Ketahanan Pangan dan Pertanian



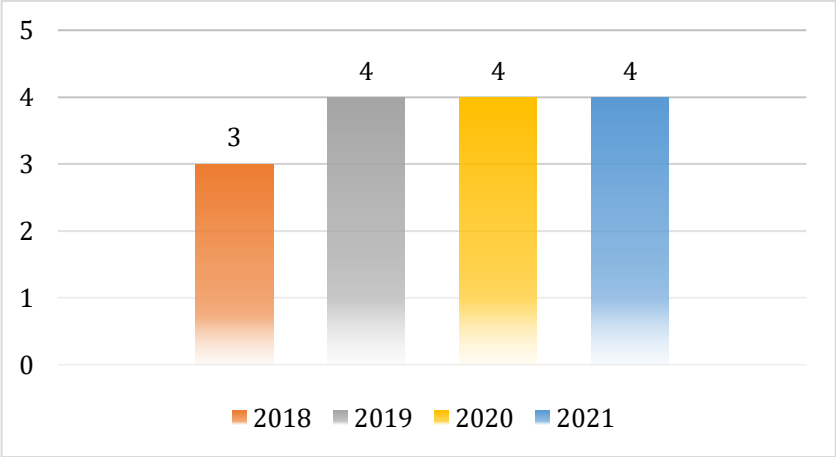
Gambar 14. 3 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%)

Sumber: Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 4 Jumlah Produk Hasil Pertania-gribisnis yang Terstandarisasi

	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah produk hasil pertania-gribisnis yang terstandarisasi	3	4	4	4	macam

Sumber: Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 4 Jumlah Produk Hasil Pertania-gribisnis yang Terstandarisasi

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 5 Jumlah Petani Tembakau yang Terlatih

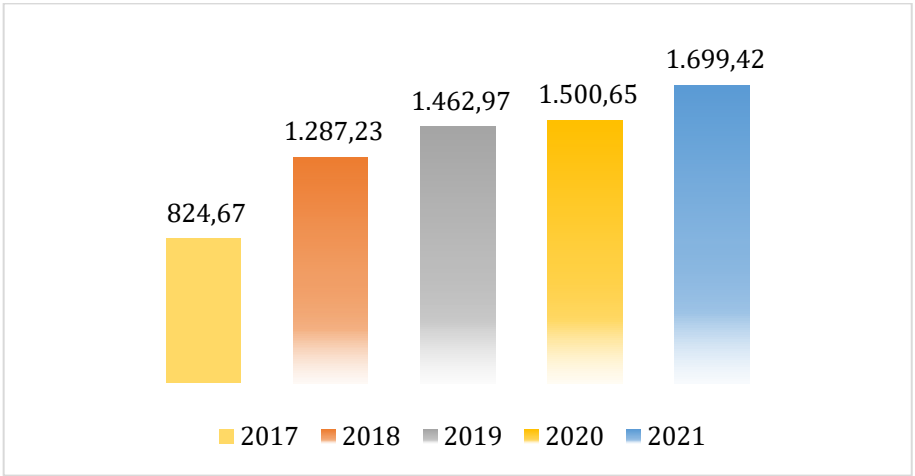
	2018	Satuan
Persentase Peningkatan kelompok tani agribisnis	46,88	%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 6 Produktivitas Perkebunan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Produktivitas Perkebunan	824,67	1.287,23	1.462,97	1.500,65	1.699,42	Kg/Ha

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



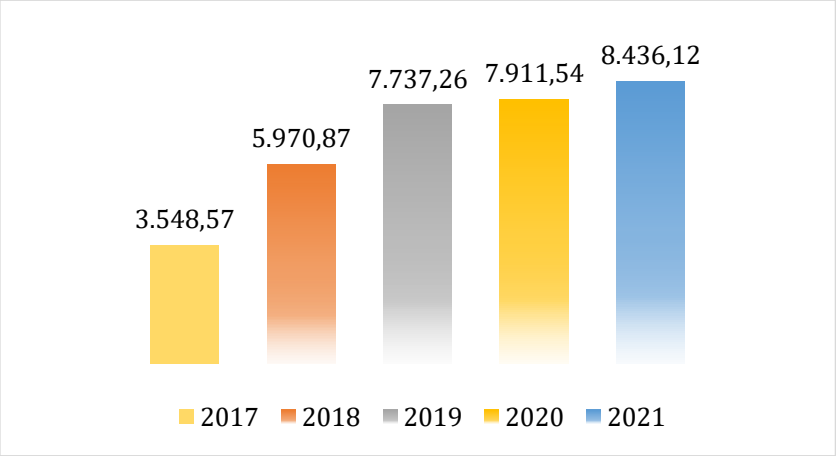
Gambar 14. 5 Produktivitas Perkebunan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 7 Mitra Perusahaan Produktivitas Tebu

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**Kg/Ha**
Tutur	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Puspo	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Tosari	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Lumbang	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Pasrepan	2.403,01	2.438,72	3.092,89	604,96	604,96	Kg/Ha
Kejayan	1.934,38	1.540,44	2.123,58	1.540,60	1.625,94	Kg/Ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Purwosari	1.709,51	4.843,98	7.739,91	6.853,12	6.853,12	Kg/Ha
Prigen	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Sukorejo	2.658,49	2.780,08	2.780,08	3.892,40	3.892,40	Kg/Ha
Pandaan	1.227,76	1.253,68	1.253,68	1.253,68	1.253,68	Kg/Ha
Gempol	1.708,40	5.317,88	8.794,39	10.551,66	10.551,66	Kg/Ha
Beji	3.108,71	3.186,63	3.186,63	3.186,63	3.186,63	Kg/Ha
Bangil	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Rembang	3.375,51	3.296,18	3.296,18	3.490,61	3.667,81	Kg/Ha
Kraton	7.240,80	8.153,06	8.153,06	8.153,06	8.153,06	Kg/Ha
Pohjentrek	4.756,68	4.904,04	4.904,04	4.904,04	4.904,04	Kg/Ha
Gondangwetan	4.969,51	4.151,34	8.617,19	59.311,18	59.311,18	Kg/Ha
Rejoso	3.328,82	3.444,05	3.914,78	4.170,58	5.613,81	Kg/Ha
Winongan	3.686,37	4.019,51	3.638,50	3.759,47	3.570,37	Kg/Ha
Grati	1.625,50	3.574,07	4.592,45	5.385,16	6.630,97	Kg/Ha
Lekok	4.012,08	1.805,01	2.263,44	7.102,15	7.102,15	Kg/Ha
Nguling	2.427,64	7.987,38	10.438,79	10.331,84	12.959,45	Kg/Ha
Produktivitas Tebu	**3.548,57**	**5.970,87**	**7.737,26**	**7.911,54**	**8.436,12**	**Kg/Ha**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



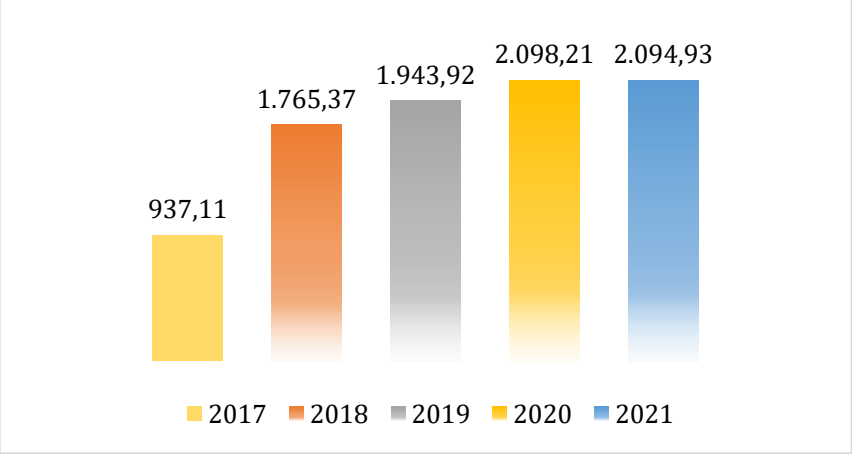
Gambar 14. 6 Mitra Perusahaan Produktivitas Tebu (Kg/Ha)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 8 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kelapa

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	509,60	2.975,39	3.688,75	4.256,01	4.122,81	Kg/Ha
Tutur	1.059,22	1.237,64	1.252,09	1.252,09	1.252,09	Kg/Ha
Puspo	778,91	1.681,42	4.321,74	4.321,74	4.321,74	Kg/Ha
Tosari	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Lumbang	1.005,42	984,90	447,82	579,56	579,56	Kg/Ha
Pasrepan	1.170,48	2.732,14	7.282,19	6.786,29	6.786,29	Kg/Ha
Kejayan	749,78	1.717,04	3.355,19	3.355,19	3.355,19	Kg/Ha
Wonorejo	1.182,07	1.169,72	1.559,98	1.557,69	1.557,69	Kg/Ha
Purwosari	1.375,45	1.323,28	719,84	859,66	859,66	Kg/Ha
Prigen	1.076,70	1.155,60	1.155,60	1.155,60	1.155,60	Kg/Ha
Sukorejo	925,36	919,66	(199,19)	264,49	264,49	Kg/Ha
Pandaan	739,58	877,25	877,25	877,25	877,25	Kg/Ha
Gempol	1.023,79	1.213,94	963,76	1.035,43	1.057,43	Kg/Ha
Beji	597,22	769,02	940,75	940,75	940,75	Kg/Ha
Bangil	1.029,41	1.028,96	1.028,96	739,36	739,36	Kg/Ha
Rembang	1.014,93	1.297,61	1.297,61	925,93	925,93	Kg/Ha
Kraton	1.255,10	1.245,16	1.245,16	1.245,16	1.245,16	Kg/Ha
Pohjentrek	1.046,51	1.887,60	1.887,60	1.887,60	1.887,60	Kg/Ha
Gondangwetan	856,74	1.383,49	986,75	1.146,15	1.118,86	Kg/Ha
Rejoso	1.339,94	2.220,85	(35,52)	634,77	634,77	Kg/Ha
Winongan	1.278,08	5.386,96	6.849,48	8.419,09	8.419,09	Kg/Ha
Grati	886,89	1.062,05	1.062,05	1.110,38	1.110,38	Kg/Ha
Lekok	864,63	875,84	875,84	875,84	875,84	Kg/Ha
Nguling	1.051,14	1.037,18	688,61	688,61	688,61	Kg/Ha
Produktivitas Kelapa	**937,11**	**1.765,37**	**1.943,92**	**2.098,21**	**2.094,93**	**Kg/Ha**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



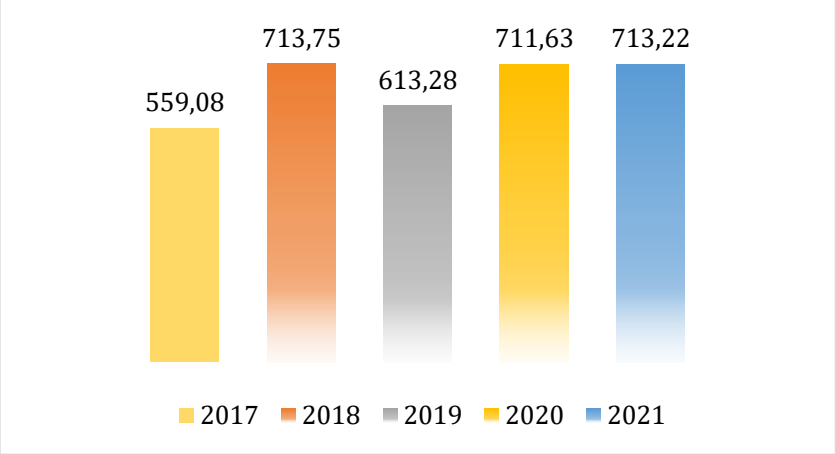
Gambar 14. 7 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 9 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kopi

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	571,00	576,47	55,66	111,07	122,71	Kg/Ha
Tutur	565,02	923,85	818,56	956,83	956,83	Kg/Ha
Puspo	540,53	495,22	332,31	525,19	519,49	Kg/Ha
Tosari	391,45	228,61	289,44	272,85	272,85	Kg/Ha
Lumbang	504,85	584,33	657,49	725,55	725,55	Kg/Ha
Pasrepan	501,07	478,86	568,47	568,94	597,18	Kg/Ha
Kejayan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Purwosari	273,10	1.772,39	5.034,35	4.575,60	4.575,60	Kg/Ha
Prigen	715,78	866,56	1.081,07	1.172,64	1.178,23	Kg/Ha
Sukorejo	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Pandaan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Gempol	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Beji	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Bangil	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Rembang	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Kraton	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Rejoso	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Winongan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Grati	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Lekok	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Nguling	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Produktivitas Kopi	**559,08**	**713,75**	**613,28**	**711,63**	**713,22**	**Kg/Ha**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



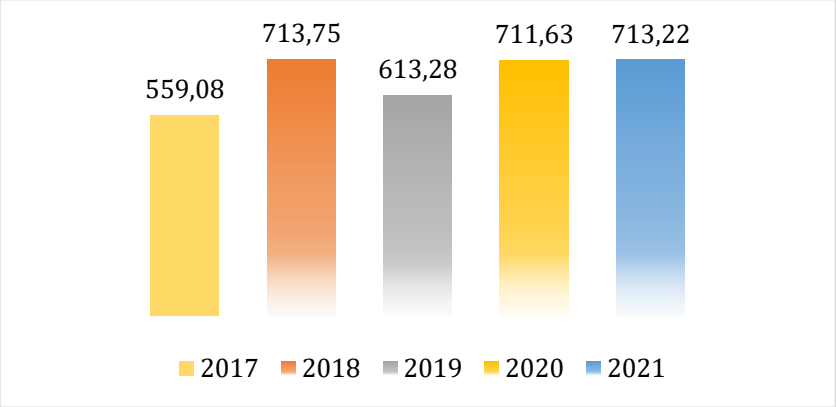
Gambar 14. 8 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kopi (Kg/Ha)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 10 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Cengkeh

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	382,80	396,29	396,29	111,07	402,78	Kg/Ha
Tutur	302,91	405,76	405,76	956,83	409,96	Kg/Ha
Puspo	323,49	832,10	831,87	525,19	825,03	Kg/Ha
Tosari	294,95	284,32	284,32	272,85	12,63	Kg/Ha
Lumbang	291,12	349,93	349,93	725,55	365,08	Kg/Ha
Pasrepan	335,50	398,89	407,11	568,94	407,11	Kg/Ha
Kejayan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Purwosari	236,14	262,78	265,18	4.575,60	287,96	Kg/Ha
Prigen	394,42	425,12	442,73	1.172,64	437,56	Kg/Ha
Sukorejo	358,97	499,18	499,18	0	499,18	Kg/Ha
Pandaan	226,43	250,32	264,71	0	264,71	Kg/Ha
Gempol	229,97	182,86	182,86	0	182,86	Kg/Ha
Beji	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Bangil	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Rembang	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Kraton	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Rejoso	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Winongan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Grati	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Lekok	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Nguling	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Produktivitas Cengkeh	**319,08**	**432,66**	**436,48**	**711,63**	**424,97**	**Kg/Ha**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



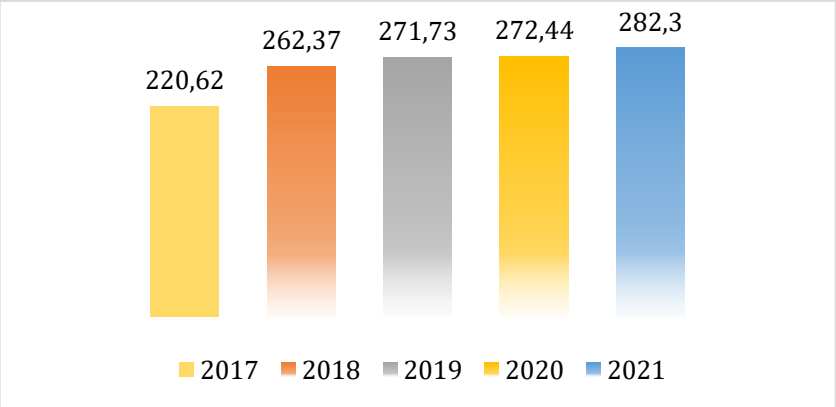
Gambar 14. 9 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Cengkeh (Kg/Ha)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 11 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kapuk Randu

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	241,58	242,47	242,47	242,47	242,47	Kg/Ha
Tutur	179,55	179,55	179,55	179,55	179,55	Kg/Ha
Puspo	234,78	234,36	234,36	234,36	279,82	Kg/Ha
Tosari	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Lumbang	310,51	310,51	310,51	310,51	310,51	Kg/Ha
Pasrepan	205,87	249,96	266,69	269,08	269,60	Kg/Ha
Kejayan	204,90	390,01	390,01	390,01	450,84	Kg/Ha
Wonorejo	221,42	221,42	221,42	221,42	221,42	Kg/Ha
Purwosari	171,39	183,97	149,99	158,00	158,00	Kg/Ha
Prigen	205,64	230,98	222,70	222,70	222,70	Kg/Ha
Sukorejo	242,92	235,00	235,00	235,00	235,00	Kg/Ha
Pandaan	237,02	237,02	237,02	237,02	237,02	Kg/Ha
Gempol	140,67	152,33	467,16	467,16	467,16	Kg/Ha
Beji	263,66	263,66	263,66	263,66	263,66	Kg/Ha
Bangil	44,19	44,19	44,19	44,19	44,19	Kg/Ha
Rembang	239,45	396,65	404,56	404,56	404,56	Kg/Ha
Kraton	344,36	367,19	360,12	360,12	360,12	Kg/Ha
Pohjentrek	214,98	362,64	1.157,89	1.157,89	1.157,89	Kg/Ha
Gondangwetan	391,01	391,01	391,01	391,01	391,01	Kg/Ha
Rejoso	321,81	321,81	321,81	321,81	321,81	Kg/Ha
Winongan	175,76	169,10	297,70	269,37	269,37	Kg/Ha
Grati	490,94	532,51	532,51	532,51	532,51	Kg/Ha
Lekok	251,56	251,56	251,56	251,56	251,56	Kg/Ha
Nguling	300,84	300,84	300,84	300,84	300,84	Kg/Ha
Produktivitas Kapuk Randu	**220,62**	**262,37**	**271,73**	**272,44**	**282,30**	**Kg/Ha**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



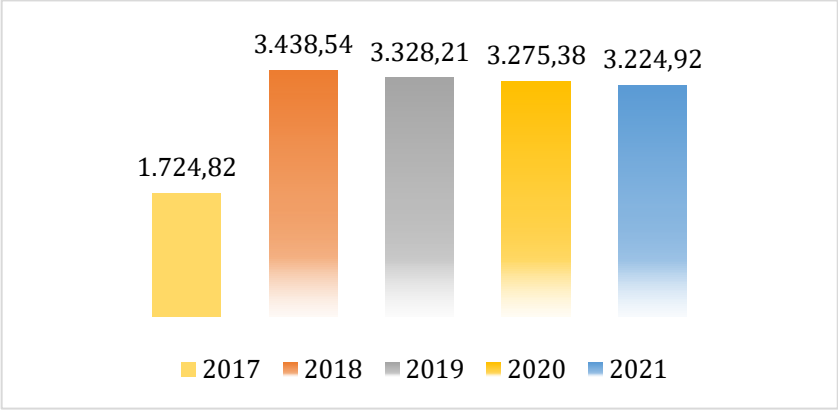
Gambar 14. 10 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kapuk Randu (Kg/Ha)

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 12 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kapuk Kenanga

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	1.867,80	4.843,62	4.734,13	4.586,38	4.373,68	Kg/Ha
Tutur	1.117,65	1.498,86	1.498,86	1.498,86	1.498,86	Kg/Ha
Puspo	2.346,94	3.826,53	3.826,53	3.826,53	3.826,53	Kg/Ha
Tosari	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Lumbang	1.007,75	2.200,47	1.852,49	1.852,49	1.852,49	Kg/Ha
Pasrepan	2.625,00	4.159,76	5.710,84	6.650,60	6.650,60	Kg/Ha
Kejayan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Purwosari	1.805,61	4.844,21	4.127,41	4.453,25	4.453,25	Kg/Ha
Prigen	1.974,52	3.128,63	3.323,48	3.128,63	3.128,63	Kg/Ha
Sukorejo	3.200,00	3.940,89	3.940,89	3.940,89	3.940,89	Kg/Ha
Pandaan	996,76	954,02	982,80	943,62	971,34	Kg/Ha
Gempol	3.750,00	4.532,02	4.532,02	4.532,02	4.532,02	Kg/Ha
Beji	1.559,06	1.975,89	1.975,89	1.975,89	1.975,89	Kg/Ha
Bangil	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Rembang	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Kraton	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Rejoso	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Winongan	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Grati	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Lekok	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Nguling	0	0	0	0	0	Kg/Ha
Produktivitas Kenanga	**1.724,82**	**3.438,54**	**3.328,21**	**3.275,38**	**3.224,92**	**Kg/Ha**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



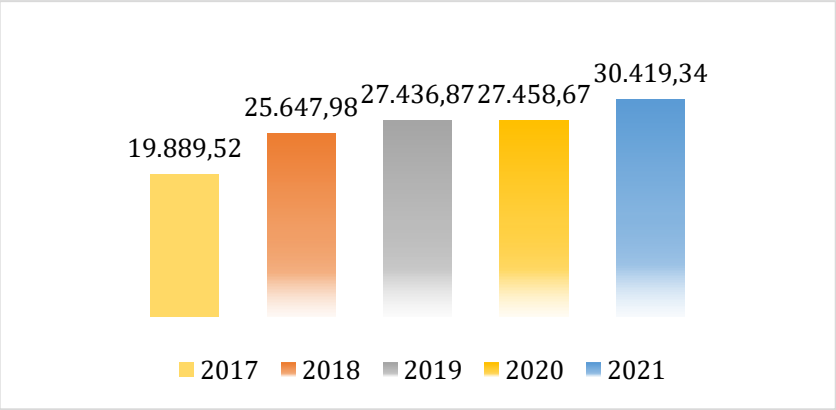
Gambar 14. 11 Non Mitra Perusahaan Produktivitas Kenanga (Kg/Ha)

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 13 Produksi Perkebunan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Produksi Perkebunan	19.889,52	25.647,98	27.436,87	27.458,67	30.419,34	Ton

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 12 Produksi Perkebunan

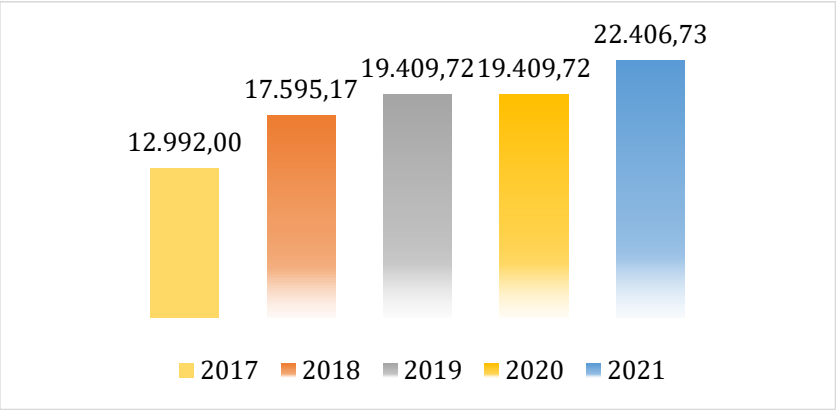
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 14 Mitra Perusahaan Produksi Tebu (Ton)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	Ton
Tutur	0	0	0	0	0	Ton
Puspo	0	0	0	0	0	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	0	0	0	0	0	Ton
Pasrepan	471,80	73,33	19,00	19,00	19,00	Ton
Kejayan	536,00	49,90	49,90	49,90	49,90	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Purwosari	298,03	855,14	1.209,83	1.209,83	1.209,83	Ton
Prigen	0	0	0	0	0	Ton
Sukorejo	482,28	531,86	531,86	531,86	531,86	Ton
Pandaan	56,40	58,28	58,28	58,28	58,28	Ton
Gempol	874,26	2.834,11	4.070,09	4.070,09	4.070,09	Ton
Beji	350,66	366,46	366,46	366,46	366,46	Ton
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	926,87	946,22	946,22	946,22	921,34	Ton
Kraton	168,27	189,47	189,47	189,47	189,47	Ton
Pohjentrek	227,75	240,20	240,20	240,20	240,20	Ton
Gondangwetan	1.678,38	552,65	392,64	392,64	392,64	Ton
Rejoso	697,44	335,19	64,89	64,89	64,89	Ton
Winongan	2.066,56	1.775,76	1.373,46	1.373,46	1.373,46	Ton
Grati	2.045,83	4.520,54	5.084,76	5.084,76	6.360,54	Ton
Lekok	281,03	36,42	13,21	13,21	13,21	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Nguling	1.830,45	4.229,65	4.799,45	4.799,45	6.545,56	Ton
Produksi Tebu	**12.992,00**	**17.595,17**	**19.409,72**	**19.409,72**	**22.406,73**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 13 Mitra Perusahaan Produksi Tebu (Ton)

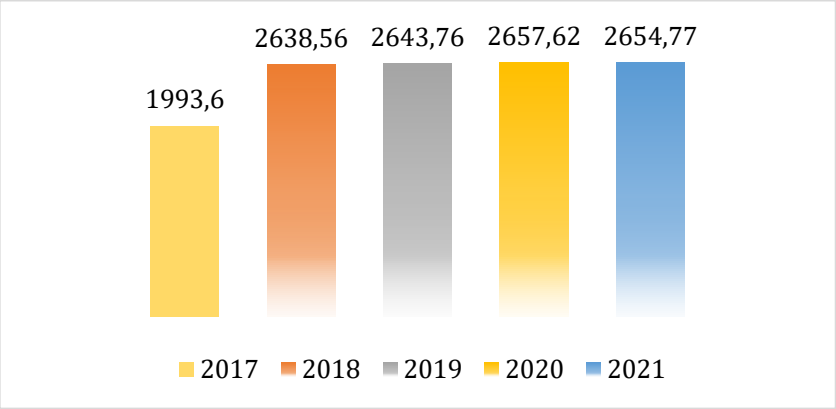
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 15 Non Mitra Perusahaan Produksi Kelapa (Ton)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	204,84	382,85	451,81	447,87	447,87	Ton
Tutur	78,70	102,60	104,80	104,80	104,80	Ton
Puspo	78,00	154,22	187,65	187,65	187,65	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	85,30	67,85	30,85	30,85	30,85	Ton
Pasrepan	95,23	249,80	222,71	362,32	362,32	Ton
Kejayan	78,12	89,20	93,14	93,14	93,14	Ton
Wonorejo	93,62	98,21	94,41	103,15	103,15	Ton
Purwosari	95,80	83,79	55,58	55,68	55,68	Ton
Prigen	36,50	42,63	42,63	42,63	42,63	Ton
Sukorejo	99,80	50,14	35,66	11,04	11,04	Ton
Pandaan	28,40	37,45	37,45	37,45	37,45	Ton
Gempol	92,96	87,10	69,15	77,16	75,86	Ton
Beji	43,00	56,20	68,75	68,75	68,75	Ton
Bangil	35,00	35,53	35,53	25,53	25,53	Ton
Rembang	68,00	69,02	69,02	49,25	49,25	Ton
Kraton	61,50	62,42	62,42	62,42	62,42	Ton
Pohjentrek	45,00	45,68	45,68	45,68	45,68	Ton
Gondangwetan	104,12	104,44	74,49	65,09	63,54	Ton
Rejoso	183,32	190,06	202,11	46,96	46,96	Ton
Winongan	251,27	485,43	523,66	617,22	617,22	Ton
Grati	53,32	75,99	86,32	73,03	73,03	Ton
Lekok	14,18	14,39	14,39	14,39	14,39	Ton
Nguling	67,62	53,56	35,56	35,56	35,56	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Produksi Kelapa	**1993,60**	**2638,56**	**2643,76**	**2657,62**	**2654,77**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



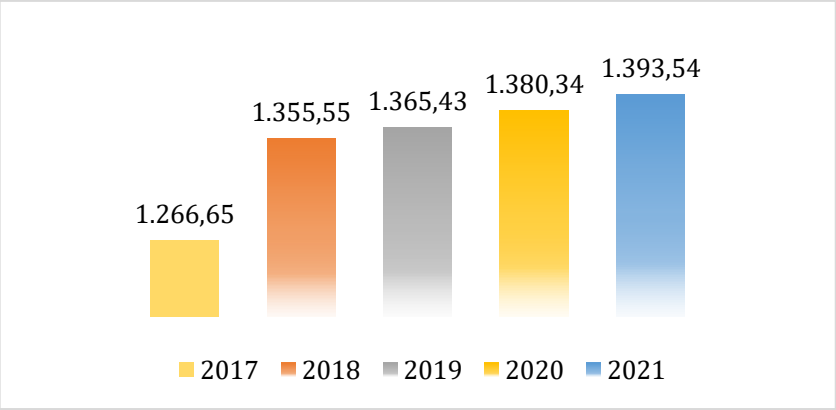
Gambar 14. 14 Non Mitra Perusahaan Produksi Kelapa (Ton)

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 16 Non Mitra Perusahaan Produksi Kopi (Ton)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	241,00	256,90	44,49	50,39	56,26	Ton
Tutur	664,27	658,36	688,47	679,05	679,05	Ton
Puspo	173,05	162,26	88,20	167,76	167,76	Ton
Tosari	22,90	18,30	45,02	22,00	22,00	Ton
Lumbang	43,16	59,66	88,98	82,85	82,85	Ton
Pasrepan	37,29	35,11	63,53	33,01	36,90	Ton
Kejayan	0	0	0	0	0	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Purwosari	4,67	55,21	163,47	142,53	142,53	Ton
Prigen	80,31	109,75	183,27	202,75	206,19	Ton
Sukorejo	0	0	0	0	0	Ton
Pandaan	0	0	0	0	0	Ton
Gempol	0	0	0	0	0	Ton
Beji	0	0	0	0	0	Ton
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Ton
Rejoso	0	0	0	0	0	Ton
Winongan	0	0	0	0	0	Ton
Grati	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Produksi Kopi	**1.266,65**	**1.355,55**	**1.365,43**	**1.380,34**	**1.393,54**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



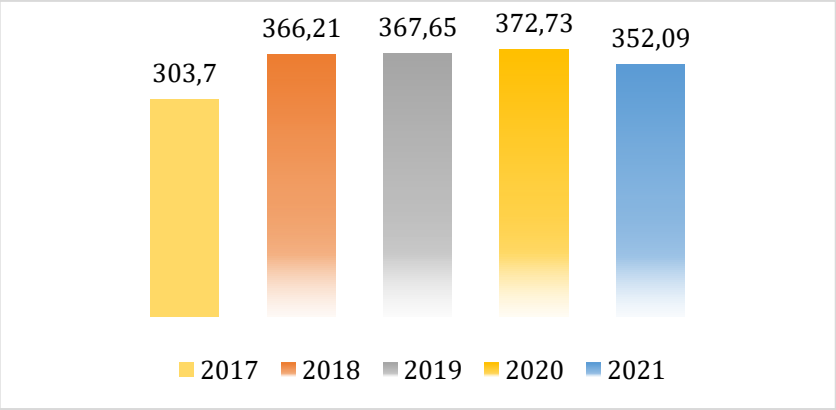
Gambar 14. 15 Non Mitra Perusahaan Produksi Kopi (Ton)

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 17 Non Mitra Perusahaan Produksi Cengkeh (Ton)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	37,40	38,83	38,83	38,83	38,83	Ton
Tutur	85,98	119,12	119,12	122,23	115,76	Ton
Puspo	77,80	89,19	89,19	88,19	84,78	Ton
Tosari	11,09	11,26	11,26	11,26	0,50	Ton
Lumbang	10,00	11,89	11,89	12,77	12,77	Ton
Pasrepan	10,82	17,10	17,46	17,46	17,46	Ton
Kejayan	0	0	0	0	0	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Purwosari	14,18	16,02	16,02	17,01	17,01	Ton
Prigen	43,26	47,86	48,16	49,26	49,26	Ton
Sukorejo	1,40	1,52	1,52	1,52	1,52	Ton
Pandaan	10,88	12,72	13,50	13,50	13,50	Ton
Gempol	0,89	0,70	0,70	0,70	0,70	Ton
Beji	0	0	0	0	0	Ton
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Ton
Rejoso	0	0	0	0	0	Ton
Winongan	0	0	0	0	0	Ton
Grati	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Produksi Cengkeh	**303,70**	**366,21**	**367,65**	**372,73**	**352,09**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



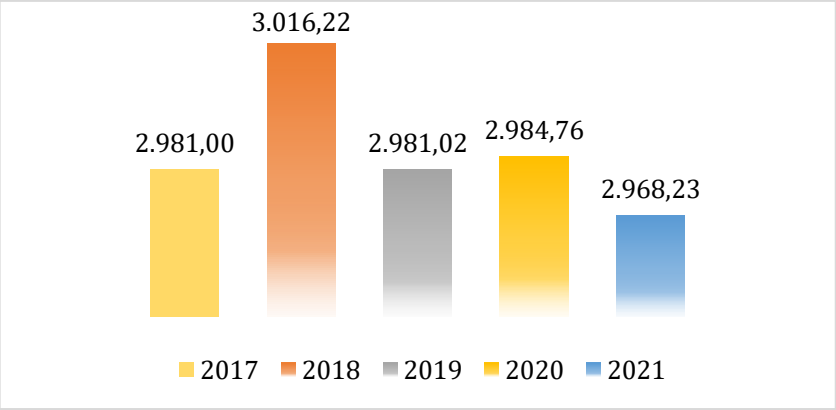
Gambar 14. 16 Non Mitra Perusahaan Produksi Cengkeh (Ton)

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 18 Non Mitra Perusahaan Produksi Kapuk Randu (Ton)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	162,90	131,20	131,20	131,20	131,20	Ton
Tutur	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	Ton
Puspo	347,04	276,53	276,53	276,53	269,87	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	287,81	287,81	287,81	287,81	287,81	Ton
Pasrepan	689,50	674,80	674,80	676,87	673,88	Ton
Kejayan	393,80	562,28	562,28	562,28	555,40	Ton
Wonorejo	96,85	96,85	96,85	96,85	96,85	Ton
Purwosari	138,50	125,63	102,43	107,90	107,90	Ton
Prigen	161,16	176,04	164,04	164,04	164,04	Ton
Sukorejo	144,15	144,15	144,15	144,15	144,15	Ton
Pandaan	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	Ton
Gempol	70,80	45,80	45,80	45,80	45,80	Ton
Beji	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	Ton
Bangil	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	Ton
Rembang	28,70	46,63	46,63	46,63	46,63	Ton
Kraton	20,30	22,08	22,08	22,08	22,08	Ton
Pohjentrek	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	Ton
Gondangwetan	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	Ton
Rejoso	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	Ton
Winongan	59,43	39,93	39,93	36,13	36,13	Ton
Grati	57,20	63,64	63,64	63,64	63,64	Ton
Lekok	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	Ton
Nguling	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	Ton
Produksi Kapuk Randu	**2.981,00**	**3.016,22**	**2.981,02**	**2.984,76**	**2.968,23**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



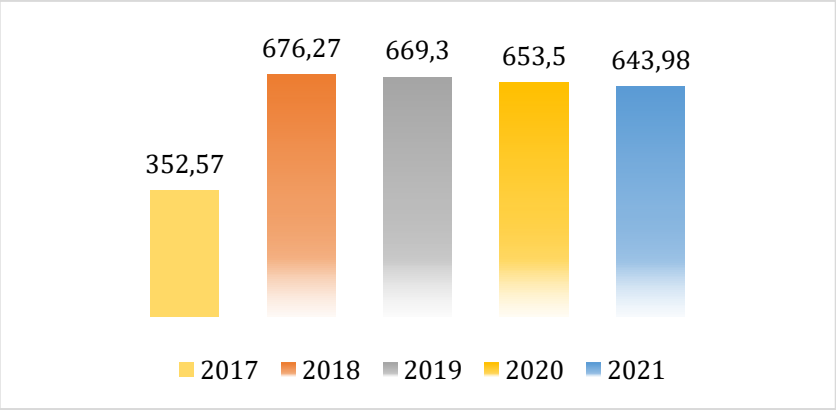
Gambar 14. 17 Non Mitra Perusahaan Produksi Kapuk Randu (Ton)

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 19 Non Mitra Perusahaan Produksi Kenanga (Ton)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	223,80	441,69	440,70	419,70	411,17	Ton
Tutur	1,90	4,60	4,60	4,60	4,60	Ton
Puspo	6,90	8,70	8,70	8,70	8,70	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	3,90	10,80	10,80	10,80	10,80	Ton
Pasrepan	4,20	5,52	4,74	5,52	5,52	Ton
Kejayan	0	0	0	0	0	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Purwosari	44,40	97,95	90,06	97,17	97,17	Ton
Prigen	6,20	14,29	15,18	14,29	14,29	Ton
Sukorejo	3,20	4,00	4,00	4,00	4,00	Ton
Pandaan	24,62	43,35	45,15	43,35	42,36	Ton
Gempol	3,75	4,60	4,60	4,60	4,60	Ton
Beji	29,70	40,77	40,77	40,77	40,77	Ton
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Ton
Rejoso	0	0	0	0	0	Ton
Winongan	0	0	0	0	0	Ton
Grati	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Produksi Kenanga	**352,57**	**676,27**	**669,30**	**653,50**	**643,98**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



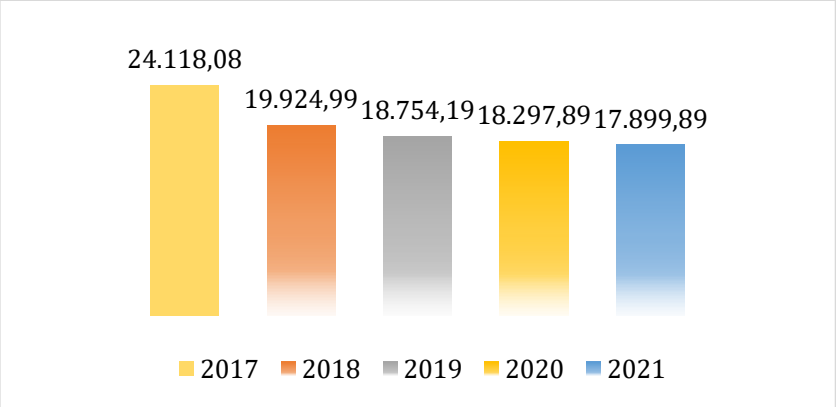
Gambar 14. 18 Non Mitra Perusahaan Produksi Kenanga (Ton)

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 20 Luas Panen Perkebunan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Luas Panen Perkebunan	24.118,08	19.924,99	18.754,19	18.297,89	17.899,89	Ha

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 19 Luas Panen Perkebunan

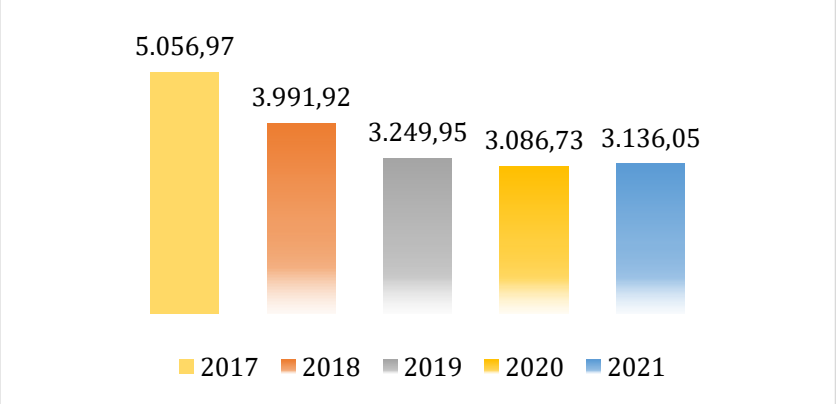
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 21 Mitra Perusahaan Luas Panen Tebu (Ha)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	0	0	0	0	0	Ha
Tutur	0	0	0	0	0	Ha
Puspo	0	0	0	0	0	Ha
Tosari	0	0	0	0	0	Ha
Lumbang	0	0	0	0	0	Ha
Pasrepan	196,34	30,07	42,39	31,41	31,41	Ha
Kejayan	277,09	32,39	32,39	32,39	30,69	Ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwosari	174,34	176,54	176,54	176,54	176,54	Ha
Prigen	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	Ha
Sukorejo	181,41	191,31	162,41	136,64	136,64	Ha
Pandaan	45,93	46,48	46,48	46,48	46,48	Ha
Gempol	511,74	532,94	486,95	385,73	385,73	Ha
Beji	112,80	115,00	115,00	115,00	115,00	Ha
Bangil	19,36	19,36	19,36	19,36	19,36	Ha
Rembang	274,59	287,07	271,08	271,08	251,20	Ha
Kraton	23,24	23,24	23,24	23,24	23,24	Ha
Pohjentrek	47,88	48,98	48,98	48,98	48,98	Ha
Gondangwetan	337,74	133,13	6,62	6,62	6,62	Ha
Rejoso	209,52	97,33	15,56	15,56	11,56	Ha
Winongan	560,60	441,79	304,79	365,33	384,68	Ha
Grati	1.258,59	1.264,82	1.030,01	944,22	959,22	Ha
Lekok	70,05	20,18	1,86	1,86	1,86	Ha
Nguling	754,00	529,54	464,53	464,53	505,08	Ha
Luas Panen Tebu	**5.056,97**	**3.991,92**	**3.249,95**	**3.086,73**	**3.136,05**	**Ha**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 20 Mitra Perusahaan Luas Panen Tebu (Ha)

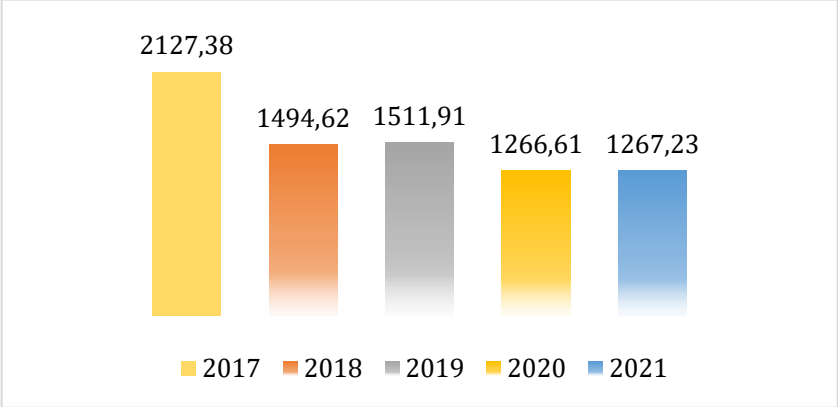
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 22 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kelapa (Ha)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	401,96	128,67	232,67	105,23	108,63	Ha
Tutur	74,30	82,90	83,70	83,70	83,70	Ha
Puspo	100,14	91,72	43,42	43,42	43,42	Ha
Tosari	0	0	0	0	0	Ha
Lumbang	84,84	68,89	68,89	53,23	53,23	Ha
Pasrepan	81,36	91,43	51,95	53,39	53,39	Ha
Kejayan	104,19	51,95	27,76	27,76	27,76	Ha
Wonorejo	79,20	83,96	60,52	66,22	66,22	Ha
Purwosari	69,65	63,32	63,32	64,77	64,77	Ha
Prigen	33,90	36,89	36,89	36,89	36,89	Ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Sukorejo	107,85	54,52	44,52	41,74	41,74	Ha
Pandaan	38,40	42,69	42,69	42,69	42,69	Ha
Gempol	90,80	71,75	71,75	74,52	71,74	Ha
Beji	72,00	73,08	73,08	73,08	73,08	Ha
Bangil	34,00	34,53	34,53	34,53	34,53	Ha
Rembang	67,00	53,19	53,19	53,19	53,19	Ha
Kraton	49,00	50,13	50,13	50,13	50,13	Ha
Pohjentrek	43,00	24,20	24,20	24,20	24,20	Ha
Gondangwetan	121,53	75,49	75,49	56,79	56,79	Ha
Rejoso	136,81	85,58	93,68	73,98	73,98	Ha
Winongan	196,60	90,11	129,31	73,31	73,31	Ha
Grati	60,12	71,55	82,15	65,77	65,77	Ha
Lekok	16,40	16,43	16,43	16,43	16,43	Ha
Nguling	64,33	51,64	51,64	51,64	51,64	Ha
Luas Panen Kelapa	**2127,38**	**1494,62**	**1511,91**	**1266,61**	**1267,23**	**Ha**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 21 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kelapa (Ha)

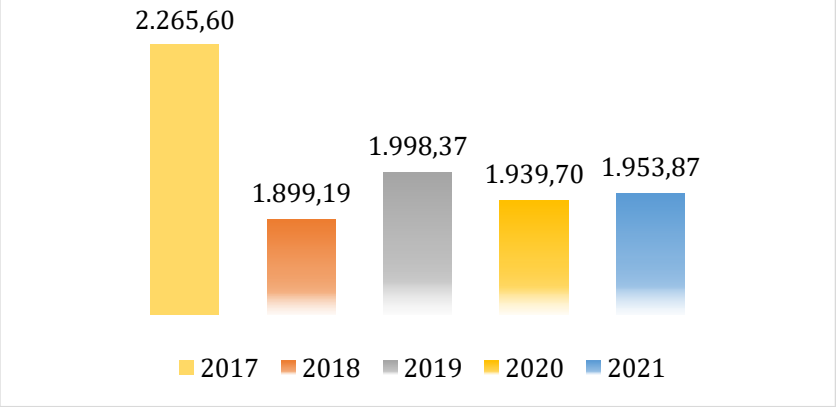
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 23 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kopi (Ha)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	422,07	445,64	444,38	453,69	458,49	Ha
Tutur	1.175,67	712,63	780,11	709,69	709,69	Ha
Puspo	320,15	327,65	263,65	319,43	322,93	Ha
Tosari	58,50	80,05	80,05	80,63	80,63	Ha
Lumbang	85,49	102,10	102,10	114,19	114,19	Ha
Pasrepan	74,42	73,32	73,32	58,02	61,79	Ha
Kejayan	0	0	0	0	0	Ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ha
Purwosari	17,10	31,15	72,81	31,15	31,15	Ha
Prigen	112,20	126,65	181,95	172,90	175,00	Ha
Sukorejo	0	0	0	0	0	Ha
Pandaan	0	0	0	0	0	Ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Gempol	0	0	0	0	0	Ha
Beji	0	0	0	0	0	Ha
Bangil	0	0	0	0	0	Ha
Rembang	0	0	0	0	0	Ha
Kraton	0	0	0	0	0	Ha
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ha
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Ha
Rejoso	0	0	0	0	0	Ha
Winongan	0	0	0	0	0	Ha
Grati	0	0	0	0	0	Ha
Lekok	0	0	0	0	0	Ha
Nguling	0	0	0	0	0	Ha
Luas Panen Kopi	**2.265,60**	**1.899,19**	**1.998,37**	**1.939,70**	**1.953,87**	**Ha**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 22 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kopi (Ha)

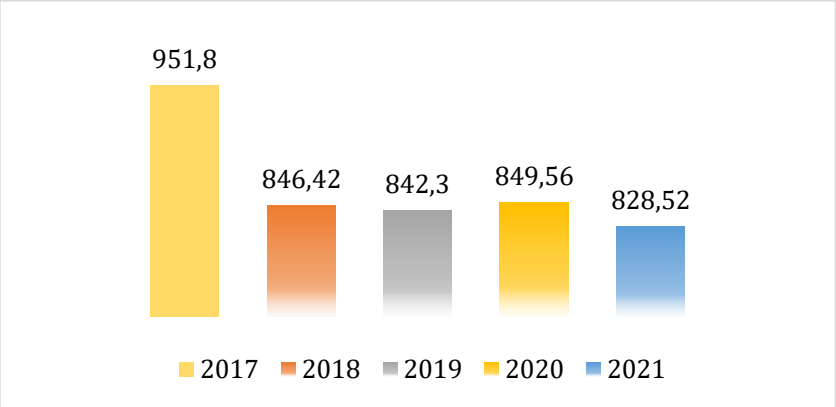
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 24 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Cengkeh (Ha)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	97,70	97,99	97,99	97,99	96,41	Ha
Tutur	283,85	293,58	293,58	298,26	282,37	Ha
Puspo	240,50	107,18	107,21	106,33	102,76	Ha
Tosari	37,60	39,59	39,59	39,59	39,59	Ha
Lumbang	34,35	33,99	33,99	34,99	34,99	Ha
Pasrepan	32,25	42,88	42,88	42,88	42,88	Ha
Kejayan	0	0	0	0	0	Ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ha
Purwosari	60,05	60,95	60,40	59,06	59,06	Ha
Prigen	109,68	112,58	108,78	112,58	112,58	Ha
Sukorejo	3,90	3,05	3,05	3,05	3,05	Ha
Pandaan	48,05	50,80	51,00	51,00	51,00	Ha
Gempol	3,87	3,83	3,83	3,83	3,83	Ha
Beji	0	0	0	0	0	Ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0		Ha
Rembang	0	0	0	0	0	Ha
Kraton	0	0	0	0	0	Ha
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ha
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Ha
Rejoso	0	0	0	0	0	Ha
Winongan	0	0	0	0	0	Ha
Grati	0	0	0	0	0	Ha
Lekok	0	0	0	0	0	Ha
Nguling	0	0	0	0	0	Ha
Luas Panen Cengkeh	**951,80**	**846,42**	**842,30**	**849,56**	**828,52**	**Ha**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 23 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Cengkeh (Ha)

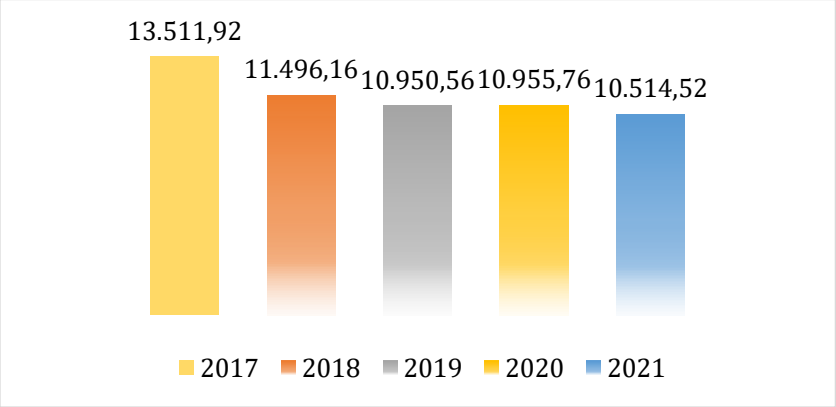
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 25 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kapuk Randu (Ha)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	674,30	541,10	541,10	541,10	541,10	Ha
Tutur	491,22	491,22	491,22	491,22	491,22	Ha
Puspo	1.478,15	1.179,94	1.179,94	1.179,94	964,44	Ha
Lumbang	926,90	926,90	926,90	926,90	926,90	Ha
Pasrepan	3.349,20	2.699,57	2.530,27	2.515,47	2.499,50	Ha
Kejayan	1.921,91	1.441,69	1.441,69	1.441,69	1.231,92	Ha
Wonorejo	437,40	437,40	437,40	437,40	437,40	Ha
Purwosari	808,10	682,90	682,90	682,90	682,90	Ha
Prigen	783,70	762,15	736,60	736,60	736,60	Ha
Sukorejo	593,40	613,40	613,40	613,40	613,40	Ha
Pandaan	273,40	273,40	273,40	273,40	273,40	Ha
Gempol	503,30	300,67	98,04	98,04	98,04	Ha
Beji	286,58	286,58	286,58	286,58	286,58	Ha
Bangil	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	Ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rembang	119,86	117,56	115,26	115,26	115,26	Ha
Kraton	58,95	60,13	61,31	61,31	61,31	Ha
Pohjentrek	61,40	36,40	11,40	11,40	11,40	Ha
Gondangwetan	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	Ha
Rejoso	46,30	46,30	46,30	46,30	46,30	Ha
Winongan	338,13	236,13	114,13	134,13	134,13	Ha
Grati	116,51	119,51	119,51	119,51	119,51	Ha
Lekok	44,92	44,92	44,92	44,92	44,92	Ha
Nguling	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	Ha
Luas Panen Kapuk Randu	**13.511,92**	**11.496,16**	**10.950,56**	**10.955,76**	**10.514,52**	**Ha**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 24 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kapuk Randu (Ha)

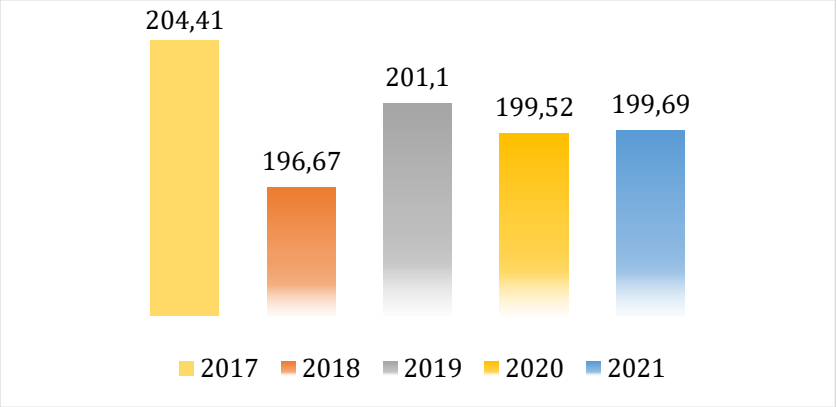
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 26 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kenanga (Ha)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	119,82	91,19	93,09	91,51	94,01	Ha
Tutur	1,70	3,07	3,07	3,07	3,07	Ha
Puspo	2,94	2,27	2,27	2,27	2,27	Ha
Tosari	0	0	0	0	0	Ha
Lumbang	3,87	4,91	5,83	5,83	5,83	Ha
Pasrepan	1,60	1,33	0,83	0,83	0,83	Ha
Kejayan	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	Ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ha
Purwosari	24,59	20,22	21,82	21,82	21,82	Ha
Prigen	3,14	4,57	4,57	4,57	4,57	Ha
Sukorejo	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	Ha
Pandaan	24,70	45,44	45,94	45,94	43,61	Ha
Gempol	1,00	1,02	1,02	1,02	1,02	Ha
Beji	19,05	20,63	20,63	20,63	20,63	Ha
Bangil	0	0	0	0	0	Ha
Rembang	0	0	0	0	0	Ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kraton	0	0	0	0	0	Ha
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ha
Gondangwetan	0	0	0	0	0	Ha
Rejoso	0	0	0	0	0	Ha
Winongan	0	0	0	0	0	Ha
Grati	0	0	0	0	0	Ha
Lekok	0	0	0	0	0	Ha
Nguling	0	0	0	0	0	Ha
Luas Panen Kenanga	**204,41**	**196,67**	**201,10**	**199,52**	**199,69**	**Ha**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 25 Non Mitra Perusahaan Luas Panen Kenanga (Ha)

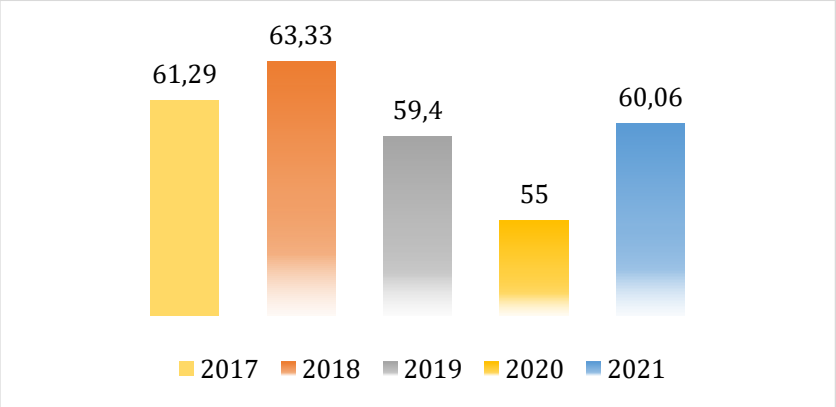
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 27 Produktivitas Tanaman Pangan Padi per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	60,34	61,69	53,58	51,79	-	Kw/ha
Tutur	0	0	0	0	-	Kw/ha
Puspo	0	0	0	0	-	Kw/ha
Tosari	0	0	0	0	-	Kw/ha
Lumbang	43,97	46,20	39,54	39,92	-	Kw/ha
Pasrepan	50,06	53,51	54,98	48,77	-	Kw/ha
Kejayan	60,09	65,22	59,32	50,84	-	Kw/ha
Wonorejo	62,37	68,29	61,33	59,24	-	Kw/ha
Purwosari	63,27	66,90	62,48	57,25	-	Kw/ha
Prigen	70,76	70,11	66,88	59,53	-	Kw/ha
Sukorejo	62,42	69,49	64,54	57,24	-	Kw/ha
Pandaan	68,50	72,52	67,10	60,63	-	Kw/ha
Gempol	68,56	66,90	65,45	59,60	-	Kw/ha
Beji	60,52	67,48	64,15	57,37	-	Kw/ha
Bangil	60,07	70,10	65,98	61,12	-	Kw/ha
Rembang	59,06	57,88	51,90	52,14	-	Kw/ha
Kraton	61,97	65,69	61,82	57,57	-	Kw/ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Pohjentrek	56,58	58,70	57,50	53,09	-	Kw/ha
Gondangwetan	58,45	57,70	55,65	53,37	-	Kw/ha
Rejoso	60,55	58,25	53,04	52,27	-	Kw/ha
Winongan	59,60	54,98	55,86	51,25	-	Kw/ha
Grati	60,28	55,34	59,54	54,77	-	Kw/ha
Lekok	58,66	62,07	61,29	59,20	-	Kw/ha
Nguling	59,48	55,69	53,56	50,89	-	Kw/ha
Produktivitas Padi	**61,29**	**63,33**	**59,40**	**55,00**	**60,06**	**Kw/ha**

Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 26 Produktivitas Tanaman Pangan Padi per Hektar

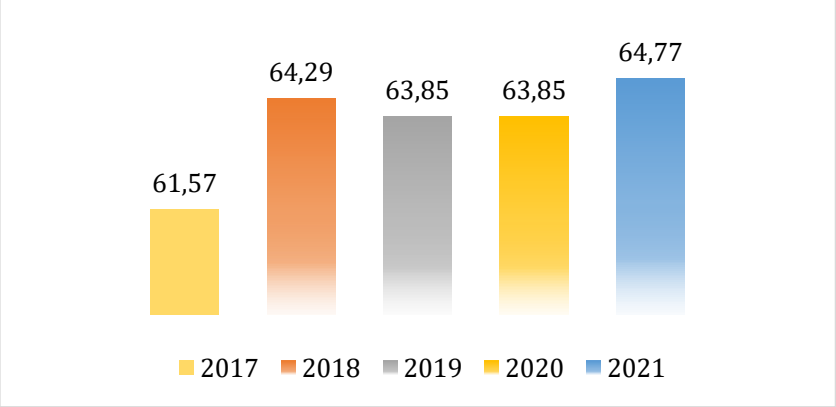
Sumber: Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 28 Produktivitas Tanaman Pangan Jagung per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	65,66	64,55	66,49	62,64	-	Kw/ha
Tutur	55,10	55,47	54,37	51,81	-	Kw/ha
Puspo	51,28	49,27	44,58	48,98	-	Kw/ha
Tosari	54,97	53,88	57,12	53,03	-	Kw/ha
Lumbang	53,08	49,36	56,01	50,85	-	Kw/ha
Pasrepan	53,15	53,61	54,09	56,09	-	Kw/ha
Kejayan	66,72	67,29	66,64	64,92	-	Kw/ha
Wonorejo	62,99	61,99	66,72	64,71	-	Kw/ha
Purwosari	67,06	79,11	72,60	72,90	-	Kw/ha
Prigen	72,29	79,99	80,76	83,57	-	Kw/ha
Sukorejo	70,98	86,12	73,09	70,26	-	Kw/ha
Pandaan	67,44	68,82	72,46	74,23	-	Kw/ha
Gempol	68,30	70,46	70,05	68,10	-	Kw/ha
Beji	56,31	69,73	68,29	64,87	-	Kw/ha
Bangil	53,72	55,49	57,48	57,51	-	Kw/ha
Rembang	61,23	59,23	62,47	60,82	-	Kw/ha
Kraton	64,40	65,41	65,39	64,47	-	Kw/ha
Pohjentrek	61,88	86,55	71,44	59,49	-	Kw/ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Gondangwetan	62,39	62,86	64,12	61,93	-	Kw/ha
Rejoso	66,39	71,69	60,53	66,57	-	Kw/ha
Winongan	62,31	67,38	64,14	65,11	-	Kw/ha
Grati	70,47	74,27	70,10	69,55	-	Kw/ha
Lekok	66,29	60,38	57,82	68,30	-	Kw/ha
Nguling	70,13	75,84	74,16	71,43	-	Kw/ha
Produktivitas Jagung	**61,57**	**64,29**	**63,85**	**63,85**	**64,77**	**Kw/ha**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 27 Produktivitas Tanaman Pangan Jagung per Hektar

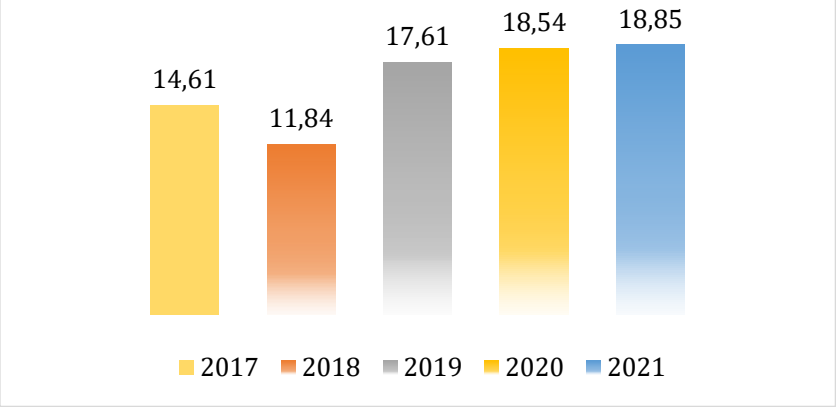
Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 29 Produktivitas Tanaman Pangan Kedelai per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	0	10,52	15,22	12,21	-	Kw/ha
Pasrepan	0	0	0	11,36	-	Kw/ha
Kejayan	15,22	13,54	13,93	13,38	-	Kw/ha
Wonorejo	14,46	11,82	17,81	15,37	-	Kw/ha
Purwosari	0	8,31	14,25	16,37	-	Kw/ha
Prigen	0	0	0	17,23	-	Kw/ha
Sukorejo	15,69	14,51	11,69	17,06	-	Kw/ha
Pandaan	15,55	10,50	19,30	15,36	-	Kw/ha
Gempol	18,41	12,53	18,47	15,21	-	Kw/ha
Beji	11,54	7,85	16,24	13,47	-	Kw/ha
Bangil	0	12,95	15,22	12,25	-	Kw/ha
Rembang	11,66	10,21	18,34	14,39	-	Kw/ha
Kraton	0	15,30	17,85	15,22	-	Kw/ha
Pohjentrek	0	7,61	0	13,14	-	Kw/ha
Gondangwetan	0	8,36	12,70	13,94	-	Kw/ha
Rejoso	0	0	12,38	13,82	-	Kw/ha
Winongan	0	8,32	15,32	14,33	-	Kw/ha
Grati	0	11,00	0	13,89	-	Kw/ha
Lekok	0	9,51	0	13,74	-	Kw/ha

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Nguling	0	10,87	0	15,27	-	Kw/ha
Produktivitas Kedelai	**14,61**	**11,84**	**17,61**	**18,54**	**18,85**	**Kw/ha**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



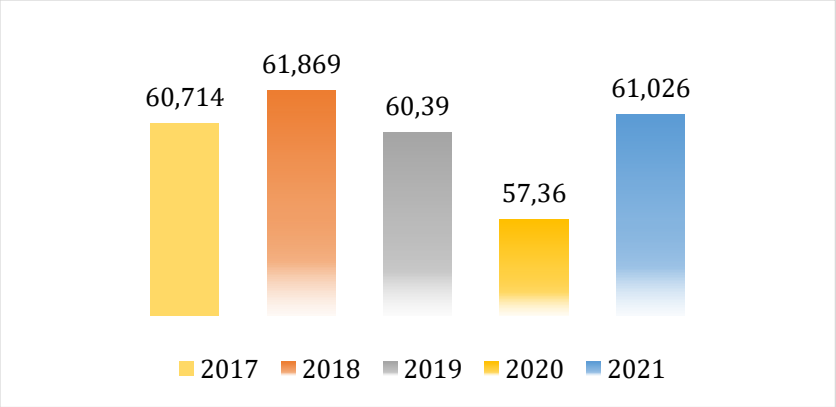
Gambar 14. 28 Produktivitas Tanaman Pangan Kedelai per Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 30 Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	**60,714**	**61,869**	**60,390**	**57,360**	**61,026**	**Kw/Ha**
Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	1.014.078	1.098.735	1.297.483	1.304.853	1.308.214	Ton
Luas panen	167.026	177.591	214.852	227.485	214.370	Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



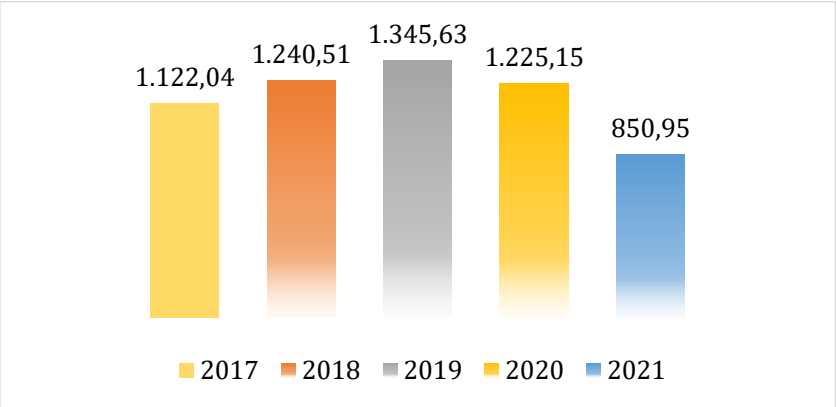
Gambar 14. 29 Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 31 Produktivitas Tanaman Hortikultura Kentang per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Kw/ha
Beji	0	0	0	0	0	Kw/ha
Gempol	0	0	0	0	0	Kw/ha
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Grati	0	0	0	0	0	Kw/ha
Kejayan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Kraton	0	0	0	0	0	Kw/ha
Lekok	0	0	0	0	0	Kw/ha
Lumbang	314,33	267,55	290,92	295,65	97,74	Kw/ha
Nguling	0	0	0	0	0	Kw/ha
Pandaan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Pasrepan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Kw/ha
Prigen	0	0	0	0	0	Kw/ha
Purwodadi	0	0	0	0	0	Kw/ha
Purwosari	0	0	0	0	0	Kw/ha
Puspo	297,94	310,89	326,66	243,64	231,58	Kw/ha
Rejoso	0	0	0	0	0	Kw/ha
Rembang	0	0	0	0	0	Kw/ha
Sukorejo	0	0	0	0	0	Kw/ha
Tosari	296,56	347,97	366,13	362,88	325,30	Kw/ha
Tutur	213,21	314,10	361,92	322,98	196,33	Kw/ha
Winongan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Kw/ha
Produktivitas Kentang	**1.122,04**	**1.240,51**	**1.345,63**	**1.225,15**	**850,95**	**Kw/ha**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



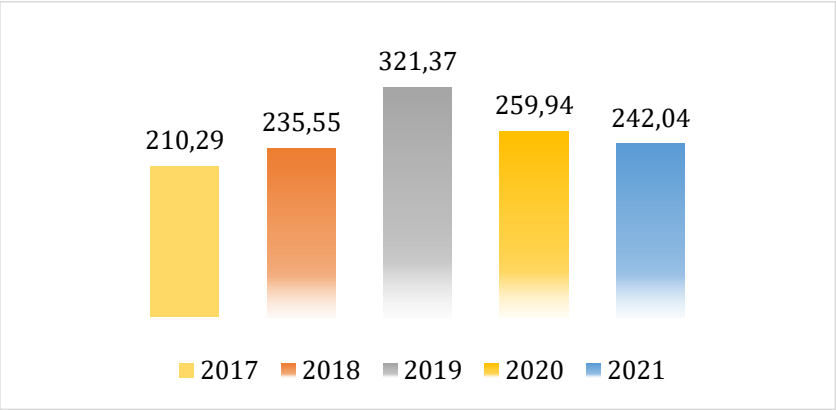
Gambar 14. 30 Produktivitas Tanaman Hortikultura Kentang per Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 32 Produktivitas Tanaman Hortikultura Paprika per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Kw/ha
Beji	0	0	0	0	0	Kw/ha
Gempol	0	0	0	0	0	Kw/ha
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Grati	0	0	0	0	0	Kw/ha
Kejayan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Kraton	0	0	0	0	0	Kw/ha
Lekok	0	0	0	0	0	Kw/ha
Lumbang	0	0	0	0	0	Kw/ha
Nguling	0	0	0	0	0	Kw/ha
Pandaan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Pasrepan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Kw/ha
Prigen	0	0	0	0	0	Kw/ha
Purwodadi	0	0	0	0	0	Kw/ha
Purwosari	0	0	0	0	0	Kw/ha
Puspo	0	0	0	0	0	Kw/ha
Rejoso	0	0	0	0	0	Kw/ha
Rembang	0	0	0	0	0	Kw/ha
Sukorejo	0	0	0	0	0	Kw/ha
Tosari	0	0	0	0	0	Kw/ha
Tutur	210,29	235,55	321,37	259,94	242,04	Kw/ha
Winongan	0	0	0	0	0	Kw/ha
Wonorejo	0	0	0	0	0	Kw/ha
Produktivitas Paprika	**210,29**	**235,55**	**321,37**	**259,94**	**242,04**	**Kw/ha**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



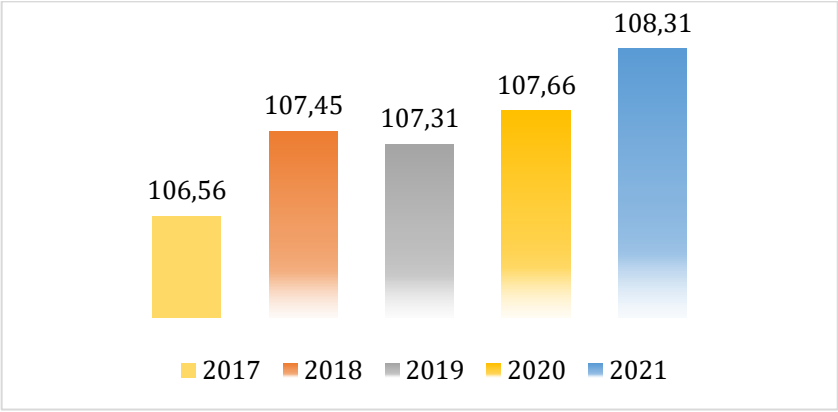
Gambar 14. 31 Produktivitas Tanaman Hortikultura Paprika per Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 33 Produktivitas Tanaman Hortikultura Durian per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Beji	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Gempol	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Gondang Wetan	151,96	151,99	151,97	168,65	169,30	Kg/pohon
Grati	0	151,75	0	0	0	Kg/pohon
Kejayan	147,50	152,00	68,10	285,33	285,33	Kg/pohon
Kraton	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Lekok	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Lumbang	107,62	92,00	109,65	110,89	110,90	Kg/pohon
Nguling	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Pandaan	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Pasrepan	149,35	152,00	117,02	94,94	95,67	Kg/pohon
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Prigen	88,61	60,00	120,11	118,76	87,40	Kg/pohon
Purwodadi	150,49	151,99	119,40	91,85	97,81	Kg/pohon
Purwosari	99,05	152,00	114,73	111,56	117,35	Kg/pohon
Puspo	112,60	149,62	97,10	91,26	111,77	Kg/pohon
Rejoso	12,02	151,84	151,84	249,60	409,60	Kg/pohon
Rembang	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Sukorejo	111,31	151,98	128,51	108,74	108,74	Kg/pohon
Tosari	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Tutur	75,83	137,80	88,43	84,75	85,40	Kg/pohon
Winongan	16,00	151,87	151,35	241,44	241,44	Kg/pohon
Wonorejo	130,91	0	0	0	0	Kg/pohon
Produktivitas Durian	**106,56**	**107,45**	**107,31**	**107,66**	**108,31**	**Kg/pohon**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



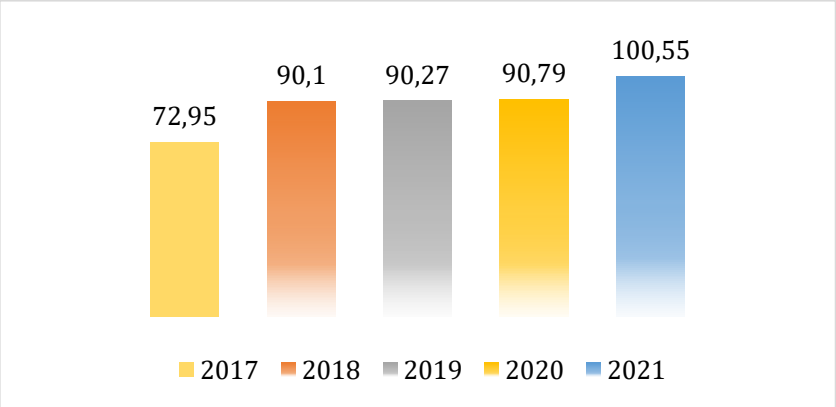
Gambar 14. 32 Produktivitas Tanaman Hortikultura Durian per Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 34 Produktivitas Tanaman Hortikultura Mangga per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	20,06	136,99	123,47	99,47	121,55	Kg/pohon
Beji	60,38	135,25	88,25	96,37	97,67	Kg/pohon
Gempol	98,44	0	137,00	114,22	234,50	Kg/pohon
Gondang Wetan	96,51	79,93	56,25	70,49	59,29	Kg/pohon
Grati	30,24	137,00	96,04	51,88	54,91	Kg/pohon
Kejayan	42,04	137,00	115,85	94,90	211,07	Kg/pohon
Kraton	59,34	109,50	76,44	78,64	85,76	Kg/pohon
Lekok	47,26	136,94	134,44	94,99	136,53	Kg/pohon
Lumbang	98,08	35,83	136,99	77,66	149,99	Kg/pohon
Nguling	28,00	50,29	40,26	79,97	135,44	Kg/pohon
Pandaan	34,14	92,47	71,52	71,52	65,89	Kg/pohon
Pasrepan	88,80	80,46	137,00	95,86	106,93	Kg/pohon
Pohjentrek	103,98	137,00	65,09	58,20	68,37	Kg/pohon
Prigen	80,00	64,33	33,61	40,04	43,49	Kg/pohon
Purwodadi	0	137,00	137,00	91,27	140,07	Kg/pohon
Purwosari	0	108,22	137,00	116,44	149,80	Kg/pohon
Puspo	80,46	91,69	136,99	47,01	151,26	Kg/pohon
Rejoso	71,08	136,31	65,29	72,39	88,08	Kg/pohon
Rembang	77,52	90,71	64,77	128,35	115,92	Kg/pohon
Sukorejo	102,00	125,52	120,94	113,21	110,08	Kg/pohon
Tosari	0	0	100,00	50,00	150,00	Kg/pohon
Tutur	85,69	20,00	136,97	62,50	212,50	Kg/pohon
Winongan	30,00	133,12	128,58	68,69	152,39	Kg/pohon
Wonorejo	93,41	103,97	61,23	61,23	64,65	Kg/pohon
Produktivitas Mangga	**72,95**	**90,10**	**90,27**	**90,79**	**100,55**	**Kg/pohon**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



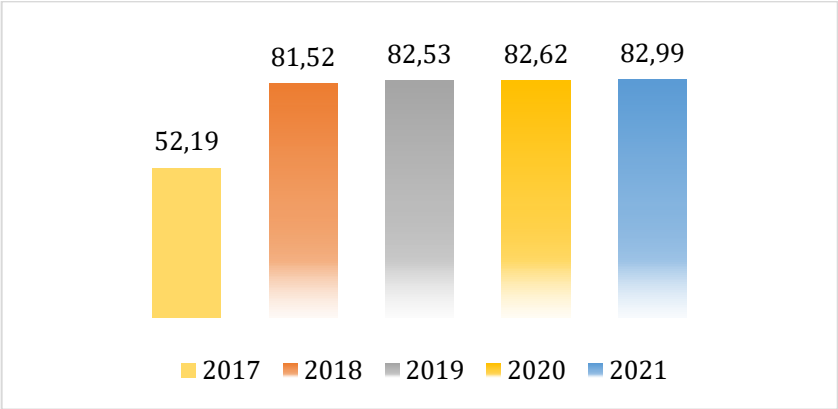
Gambar 14. 33 Produktivitas Tanaman Hortikultura Mangga per Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 35 Produktivitas Tanaman Hortikultura Apel per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Beji	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Gempol	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Grati	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Kejayan	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Kraton	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Lekok	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Lumbang	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Nguling	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Pandaan	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Pasrepan	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Prigen	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Purwodadi	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Purwosari	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Puspo	72,66	55,80	89,29	105,94	108,67	Kg/pohon
Rejoso	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Rembang	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Sukorejo	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Tosari	84,05	101,50	67,21	93,20	148,63	Kg/pohon
Tutur	50,85	82,50	82,46	82,15	82,15	Kg/pohon
Winongan	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Wonorejo	0	0	0	0	0	Kg/pohon
Produktivitas Apel	**52,19**	**81,52**	**82,53**	**82,62**	**82,99**	**Kg/pohon**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



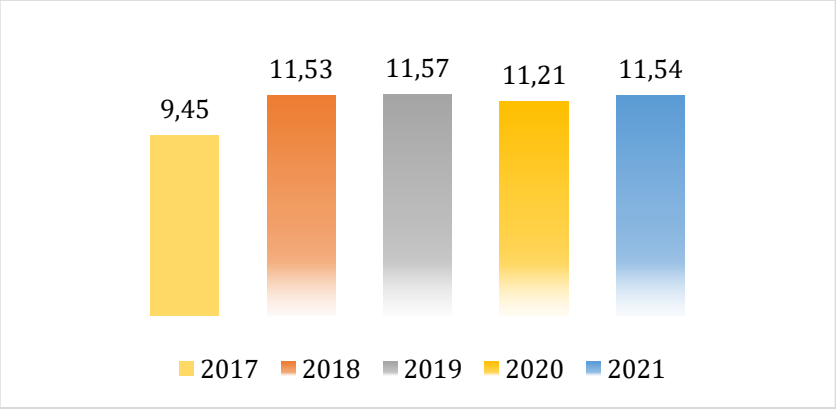
Gambar 14. 34 Produktivitas Tanaman Hortikultura Apel per Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 36 Produktivitas Tanaman Hortikultura Bunga Sedap Malam per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	7,22	19,54	17,17	17,18	19,92	tangkai/m2
Beji	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Gempol	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Grati	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Kejayan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Kraton	0	0	0	5,73	0	tangkai/m2
Lekok	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Lumbang	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Nguling	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Pandaan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Pasrepan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Pohjentrek	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Prigen	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Purwodadi	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Purwosari	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Puspo	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Rejoso	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Rembang	9,73	10,52	10,87	10,46	10,46	tangkai/m2
Sukorejo	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Tosari	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Tutur	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Winongan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Wonorejo	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Produktivitas Bunga Sedap Malam	**9,45**	**11,53**	**11,57**	**11,21**	**11,54**	**tangkai/m2**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



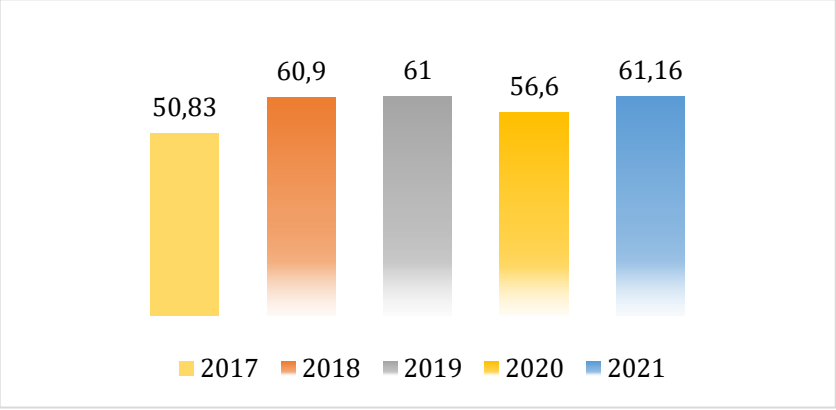
Gambar 14. 35 Produktivitas Tanaman Hortikultura Bunga Sedap Malam per Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 37 Produktivitas Tanaman Hortikultura Krisan per Hektar

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Beji	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Gempol	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Grati	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Kejayan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Kraton	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Lekok	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Lumbang	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Nguling	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Pandaan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Pasrepan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Pohjentrek	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Prigen	12,00	0	0	0	0	tangkai/m2
Purwodadi	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Purwosari	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Puspo	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Rejoso	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Rembang	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Sukorejo	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Tosari	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Tutur	50,85	60,90	61,00	56,60	61,16	tangkai/m2
Winongan	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Wonorejo	0	0	0	0	0	tangkai/m2
Produktivitas Krisan	**50,83**	**60,90**	**61,00**	**56,60**	**61,16**	**tangkai/m2**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



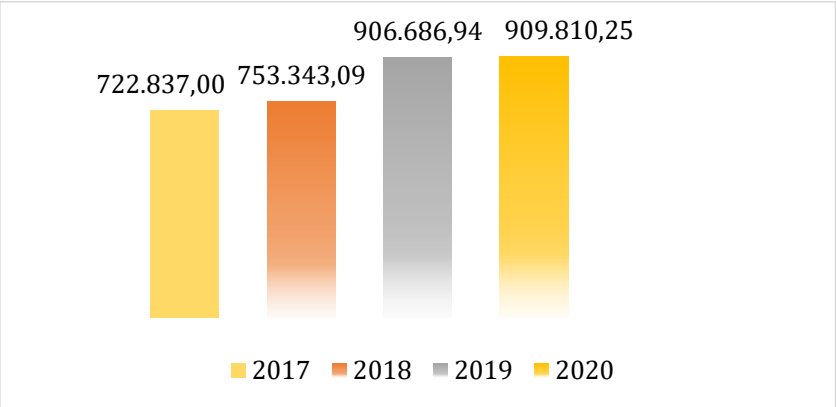
Gambar 14. 36 Produktivitas Tanaman Hortikultura Krisan per Hektar

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 38 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Bangil	20.495	26.283	29.885	26.480	Ton
Beji	47.698	44.633	45.449	38.946	Ton
Gempol	40.060	42.883	50.393	51.799	Ton
Gondang Wetan	39.530	38.263	45.559	50.327	Ton
Grati	26.588	23.094	39.982	48.231	Ton
Kejayan	72.151	72.594	72.357	75.143	Ton
Kraton	42.020	47.204	58.876	60.712	Ton
Lekok	7.662	10.448	12.159	11.808	Ton
Lumbang	8.543	5.104	6.810	4.721	Ton
Nguling	15.833	27.716	37.732	42.146	Ton
Pandaan	49.512	42.628	59.417	50.796	Ton
Pasrepan	18.894	30.493	40.630	36.279	Ton
Pohjentrek	15.190	16.821	20.436	21.083	Ton
Prigen	36.142	38.996	43.179	39.200	Ton
Purwodadi	28.923	38.078	43.406	45.432	Ton
Purwosari	49.932	50.930	62.405	60.230	Ton
Puspo	0	0	0	0	Ton
Rejoso	40.784	29.688	43.145	42.478	Ton
Rembang	37.274	37.547	45.312	48.665	Ton
Sukorejo	55.680	65.947	66.036	61.047	Ton
Tosari	0	0	0	0	Ton
Tutur	0	0	0	0	Ton
Winongan	36.147	29.739	33.508	33.473	Ton
Wonorejo	33.779	34.253	50.012	60.816	Ton
Produksi Padi	**722.837,00**	**753.343,09**	**906.686,94**	**909.810,25**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



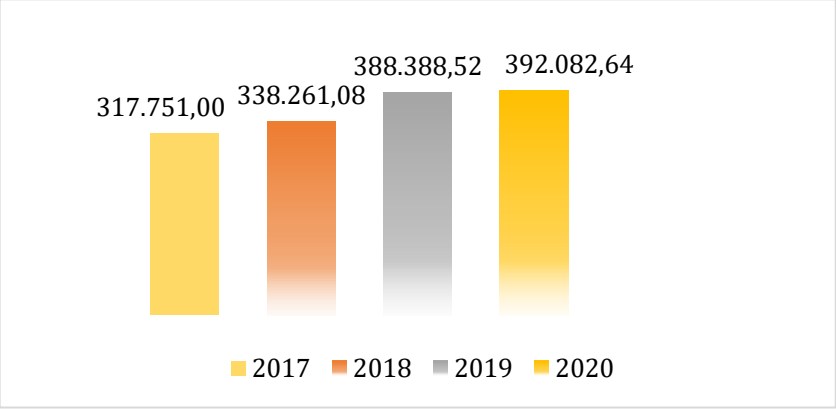
Gambar 14. 37 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 39 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jagung

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Bangil	33.250	2.892	2.937	4.144	Ton
Beji	789	1.453	5.474	4.414	Ton
Gempol	8.093	11.906	9.624	15.298	Ton
Gondang Wetan	3.711	7.984	15.249	16.198	Ton
Grati	23.706	14.778	25.185	20.103	Ton
Kejayan	30.556	36.164	34.193	40.349	Ton
Kraton	13.921	19.694	24.659	27.047	Ton
Lekok	6.940	8.851	10.170	7.565	Ton
Lumbang	19.023	12.089	13.642	18.235	Ton
Nguling	30.735	38.854	40.158	47.284	Ton
Pandaan	3.012	10.585	12.124	6.394	Ton
Pasrepan	26.653	20.836	22.262	19.046	Ton
Pohjentrek	1.681	5.379	382	810	Ton
Prigen	8.357	4.375	7.249	13.684	Ton
Purwodadi	9.392	18.403	12.915	13.798	Ton
Purwosari	11.901	20.328	31.155	28.981	Ton
Puspo	31.321	27.190	25.587	5.623	Ton
Rejoso	45	3.881	2.709	7.354	Ton
Rembang	7.949	13.050	21.606	21.377	Ton
Sukorejo	15.372	16.673	23.799	25.613	Ton
Tosari	11.269	13.766	15.234	5.430	Ton
Tutur	7.576	6.229	8.504	6.741	Ton
Winongan	3.253	5.546	4.069	10.689	Ton
Wonorejo	9.246	17.355	19.503	25.907	Ton
Produksi Jagung	**317.751,00**	**338.261,08**	**388.388,52**	**392.082,64**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



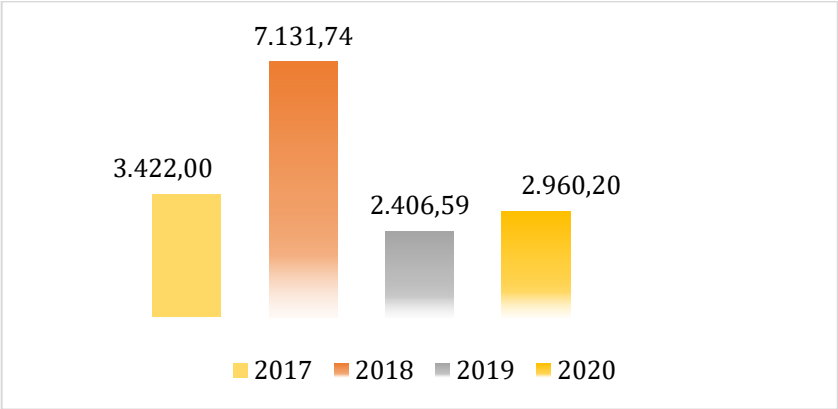
Gambar 14. 38 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jagung

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 40 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kedelai

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Bangil	0	28	2	58	Ton
Beji	89	135	2	22	Ton
Gempol	30	538	2	472	Ton
Gondang Wetan	0	30	3	28	Ton
Grati	0	185	0	6	Ton
Kejayan	192	1.895	457	588	Ton
Kraton	0	459	61	1.023	Ton
Lekok	0	11	0	3	Ton
Lumbang	0	0	0	0	Ton
Nguling	0	1	0	32	Ton
Pandaan	1.948	913	1.366	6	Ton
Pasrepan	0	0	0	12	Ton
Pohjentrek	0	96	0	14	Ton
Prigen	0	0	0	69	Ton
Purwodadi	0	12	9	52	Ton
Purwosari	0	11	1	106	Ton
Puspo	0	0	0	0	Ton
Rejoso	0	0	1	79	Ton
Rembang	437	1.116	35	33	Ton
Sukorejo	114	652	5	202	Ton
Tosari	0	0	0	0	Ton
Tutur	0	0	0	0	Ton
Winongan	0	96	4	17	Ton
Wonorejo	612	953	460	138	Ton
Produksi Kedelai	**3.422,00**	**7.131,74**	**2.406,59**	**2.960,20**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



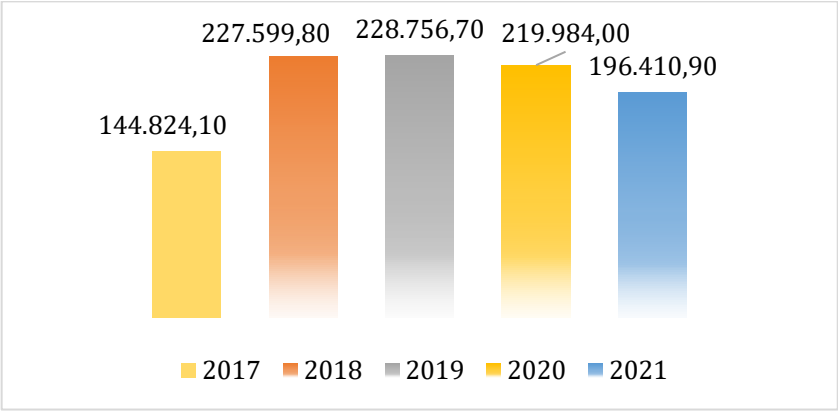
Gambar 14. 39 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kedelai

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 41 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kentang

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Beji	0	0	0	0	0	Ton
Gempol	0	0	0	0	0	Ton
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Ton
Grati	0	0	0	0	0	Ton
Kejayan	0	0	0	0	0	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	3.049,00	6.956,40	14.662,40	1.893,00	1.974,40	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Pandaan	0	0	0	0	0	Ton
Pasrepan	0	0	0	0	0	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Prigen	0	0	0	0	0	Ton
Purwodadi	0	0	0	0	0	Ton
Purwosari	0	0	0	0	0	Ton
Puspo	15.790,90	38.518,70	41.747,70	37.785,90	23.435,80	Ton
Rejoso	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Sukorejo	0	0	0	0	0	Ton
Tosari	110.825,00	146.285,60	129.206,30	154.280,60	148.108,10	Ton
Tutur	15.159,20	35.839,10	43.140,30	26.024,50	22.892,60	Ton
Winongan	0	0	0	0	0	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Produksi Kentang	**144.824,10**	**227.599,80**	**228.756,70**	**219.984,00**	**196.410,90**	**Ton**

Sumber: Dinas Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 40 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kentang

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 42 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Paprika

Kecamatan	2017	Satuan
Bangil	0	Ton
Beji	0	Ton
Gempol	0	Ton
Gondang Wetan	0	Ton
Grati	0	Ton
Kejayan	0	Ton
Kraton	0	Ton
Lekok	0	Ton
Lumbang	0	Ton
Nguling	0	Ton
Pandaan	0	Ton
Pasrepan	0	Ton
Pohjentrek	0	Ton
Prigen	0	Ton
Purwodadi	0	Ton
Purwosari	0	Ton
Puspo	0	Ton
Rejoso	0	Ton
Rembang	0	Ton
Sukorejo	0	Ton
Tosari	0	Ton
Tutur	1.619	Ton
Winongan	0	Ton
Wonorejo	0	Ton
Produksi Paprika	**1.619,00**	**Ton**

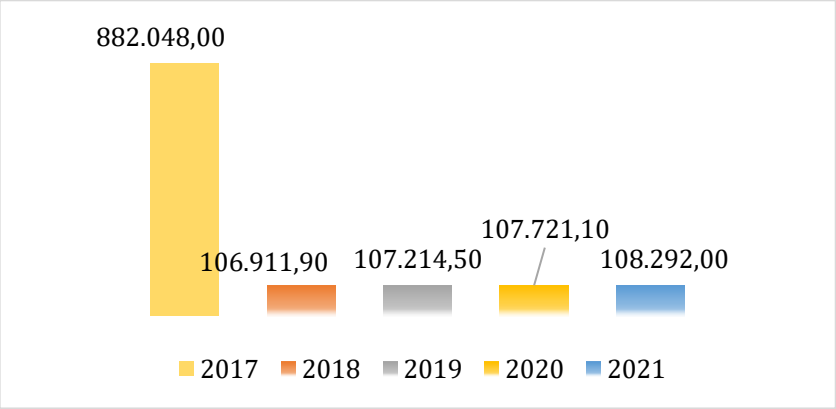
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 43 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Durian

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Beji	0	0	0	0	0	Ton
Gempol	0	0	0	0	0	Ton
Gondang Wetan	1.433	221	69	152	77	Ton
Grati	0	78	0	0	0	Ton
Kejayan	590	3.753	3.541	3.541	3.541	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	576.094	62.958	58.190	62.239	62.242	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Pandaan	0	0	0	0	0	Ton
Pasrepan	96.670	9.193	17.117	13.947	14.055	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Prigen	27.180	1.090	6.271	6.266	4.612	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	16.593	1.129	984	1.317	1.402	Ton
Purwosari	28.977	5.799	6.062	5.976	6.286	Ton
Puspo	34.008	5.529	8.301	7.806	9.560	Ton
Rejoso	28	198	50	51	51	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Sukorejo	18.011	2.169	1.231	1.214	1.214	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Tutur	82.304	14.708	5.382	5.185	5.225	Ton
Winongan	16	86	17	27	27	Ton
Wonorejo	144	0	0	0	0	Ton
Produksi Durian	**882.048,00**	**106.911,90**	**107.214,50**	**107.721,10**	**108.292,00**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 41 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Durian

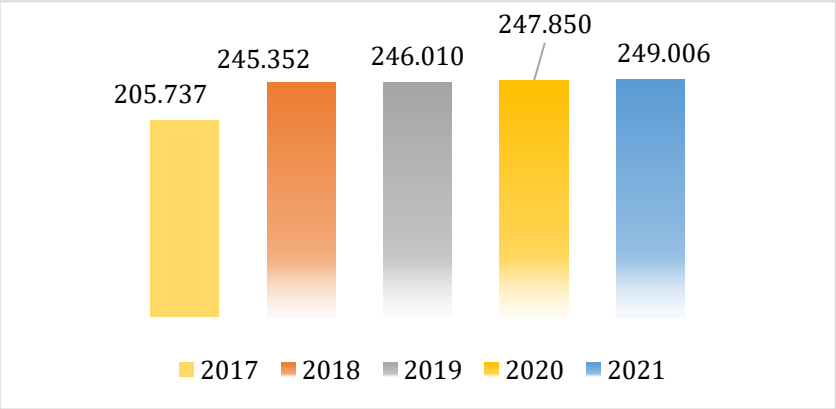
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 44 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Mangga

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	20	2.029	4.787	4.832	4.832	Ton
Beji	2.531	571	5.044	5.365	5.365	Ton
Gempol	13.722	0	7.438	7.478	7.468	Ton
Gondang Wetan	14.575	1.434	7.553	7.598	7.904	Ton
Grati	19.816	47.993	34.410	18.560	18.560	Ton
Kejayan	672	11.341	15.883	16.175	16.175	Ton
Kraton	1.876	10.081	8.823	8.932	8.933	Ton
Lekok	4.261	14.495	10.538	10.539	10.539	Ton
Lumbang	17.924	22.190	6.647	6.688	6.688	Ton
Nguling	2.454	6.715	3.527	3.527	3.527	Ton
Pandaan	1.270	6.881	6.381	6.381	5.550	Ton
Pasrepan	16.011	20.674	27.168	20.121	20.121	Ton
Pohjentrek	21.254	4.479	3.157	3.156	3.309	Ton
Prigen	1.513	1.877	1.598	2.001	2.001	Ton
Purwodadi	0	2.132	3.690	3.929	4.367	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwosari	0	2.904	7.025	7.025	7.025	Ton
Puspo	2.487	2.624	1.945	1.966	1.966	Ton
Rejoso	2.003	5.719	3.513	3.625	3.620	Ton
Rembang	26.887	37.290	36.808	63.774	64.755	Ton
Sukorejo	42.661	21.461	31.584	28.245	28.245	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Tutur	600	322	566	2	2	Ton
Winongan	450	7.140	4.739	4.746	4.871	Ton
Wonorejo	12.750	15.000	13.184	13.184	13.184	Ton
Produksi Mangga	**205.737**	**245.352**	**246.010**	**247.850**	**249.006**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 42 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Mangga

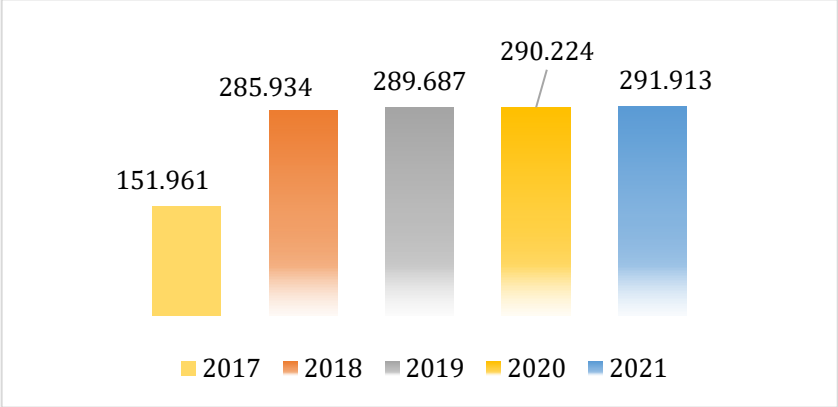
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 45 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Apel

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Beji	0	0	0	0	0	Ton
Gempol	0	0	0	0	0	Ton
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Ton
Grati	0	0	0	0	0	Ton
Kejayan	0	0	0	0	0	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	0	0	0	0	0	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Pandaan	0	0	0	0	0	Ton
Pasrepan	0	0	0	0	0	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Prigen	0	0	0	0	0	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	0	0	0	0	0	Ton
Purwosari	0	0	0	0	0	Ton
Puspo	11.128	7.780	5.559	6.595	6.904	Ton
Rejoso	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Sukorejo	0	0	0	0	0	Ton
Tosari	1.475	1.145	906	1.478	2.858	Ton
Tutur	139.358	277.009	283.222	282.151	282.151	Ton
Winongan	0	0	0	0	0	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Produksi Apel	**151.961**	**285.934**	**289.687**	**290.224**	**291.913**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 43 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Apel

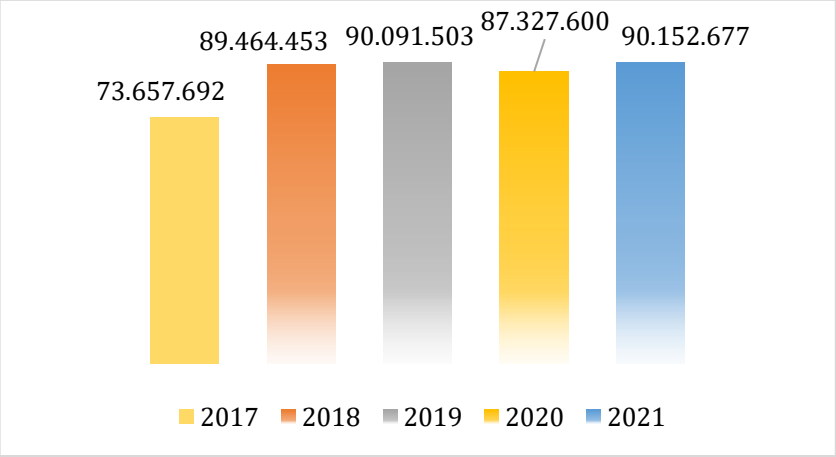
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 46 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bunga Sedap Malam

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	6.339.892	17.079.553	14.815.178	14.894.066	17.719.206	Tangkai
Beji	0	0	0	0	0	Tangkai
Gempol	0	0	0	0	0	Tangkai
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Tangkai
Grati	0	0	0	0	0	Tangkai
Kejayan	0	0	0	0	0	Tangkai
Kraton	0	0	0	63	0	Tangkai
Lekok	0	0	0	0	0	Tangkai
Lumbang	0	0	0	0	0	Tangkai
Nguling	0	0	0	0	0	Tangkai
Pandaan	0	0	0	0	0	Tangkai
Pasrepan	0	0	0	0	0	Tangkai
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Tangkai

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Prigen	0	0	0	0	0	Tangkai
Purwodadi	0	0	0	0	0	Tangkai
Purwosari	0	0	0	0	0	Tangkai
Puspo	0	0	0	0	0	Tangkai
Rejoso	0	0	0	0	0	Tangkai
Rembang	67.317.800	72.384.900	75.276.325	72.433.471	72.433.471	Tangkai
Sukorejo	0	0	0	0	0	Tangkai
Tosari	0	0	0	0	0	Tangkai
Tutur	0	0	0	0	0	Tangkai
Winongan	0	0	0	0	0	Tangkai
Wonorejo	0	0	0	0	0	Tangkai
Produksi Bunga Sedap Malam	**73.657.692**	**89.464.453**	**90.091.503**	**87.327.600**	**90.152.677**	**Tangkai**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 44 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bunga Sedap Malam

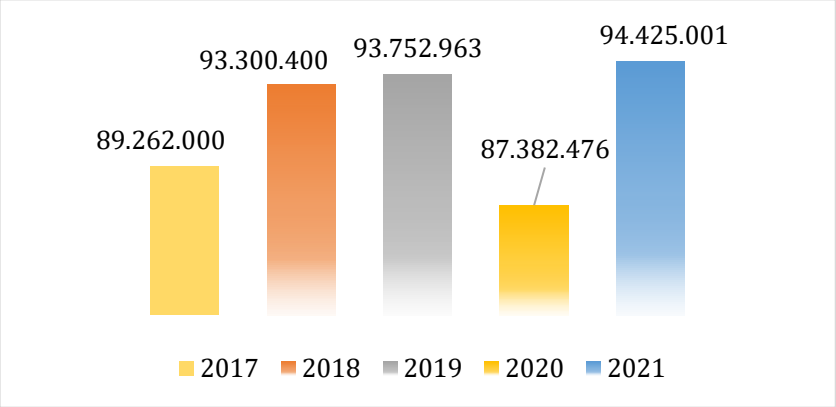
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 47 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Krisan

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Tangkai
Beji	0	0	0	0	0	Tangkai
Gempol	0	0	0	0	0	Tangkai
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Tangkai
Grati	0	0	0	0	0	Tangkai
Kejayan	0	0	0	0	0	Tangkai
Kraton	0	0	0	0	0	Tangkai
Lekok	0	0	0	0	0	Tangkai
Lumbang	0	0	0	0	0	Tangkai
Nguling	0	0	0	0	0	Tangkai
Pandaan	0	0	0	0	0	Tangkai
Pasrepan	0	0	0	0	0	Tangkai

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Tangkai
Prigen	12.000	0	0	0	0	Tangkai
Purwodadi	0	0	0	0	0	Tangkai
Purwosari	0	0	0	0	0	Tangkai
Puspo	0	0	0	0	0	Tangkai
Rejoso	0	0	0	0	0	Tangkai
Rembang	0	0	0	0	0	Tangkai
Sukorejo	0	0	0	0	0	Tangkai
Tosari	0	0	0	0	0	Tangkai
Tutur	89.250.000	93.300.400	93.752.963	87.382.476	94.425.001	Tangkai
Winongan	0	0	0	0	0	Tangkai
Wonorejo	0	0	0	0	0	Tangkai
Produksi Krisan	**89.262.000**	**93.300.400**	**93.752.963**	**87.382.476**	**94.425.001**	**Tangkai**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 45 Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Krisan

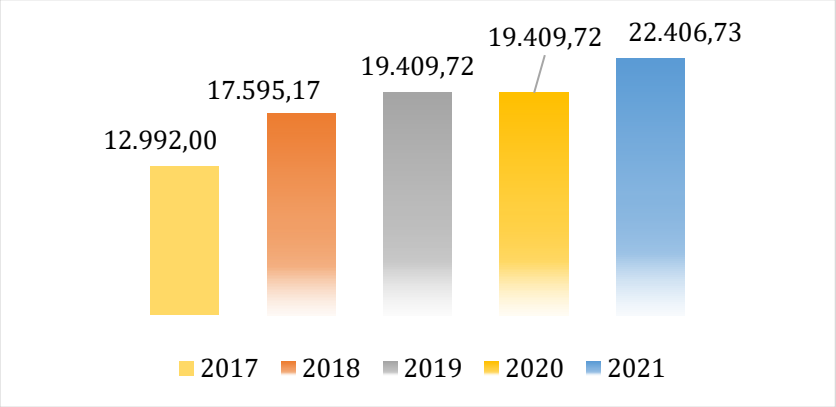
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 48 Jumlah Produksi Perkebunan Mitra Perusahaan Tebu

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Beji	350,66	366,46	366,46	366,46	366,46	Ton
Gempol	874,26	2.834,11	4.070,09	4.070,09	4.070,09	Ton
Gondang Wetan	1.678,38	552,65	392,64	392,64	392,64	Ton
Grati	2.045,83	4.520,54	5.084,76	5.084,76	6.360,54	Ton
Kejayan	536,00	49,90	49,90	49,90	49,90	Ton
Kraton	168,27	189,47	189,47	189,47	189,47	Ton
Lekok	281,03	36,42	13,21	13,21	13,21	Ton
Lumbang	0	0	0	0	0	Ton
Nguling	1.830,45	4.229,65	4.799,45	4.799,45	6.545,56	Ton
Pandaan	56,40	58,28	58,28	58,28	58,28	Ton
Pasrepan	471,80	73,33	19,00	19,00	19,00	Ton
Pohjentrek	227,75	240,20	240,20	240,20	240,20	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Prigen	0	0	0	0	0	Ton
Purwodadi	0	0	0	0	0	Ton
Purwosari	298,03	855,14	1.209,83	1.209,83	1.209,83	Ton
Puspo	0	0	0	0	0	Ton
Rejoso	697,44	335,19	64,89	64,89	64,89	Ton
Rembang	926,87	946,22	946,22	946,22	921,34	Ton
Sukorejo	482,28	531,86	531,86	531,86	531,86	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Tutur	0	0	0	0	0	Ton
Winongan	2.066,56	1.775,76	1.373,46	1.373,46	1.373,46	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Tebu	**12.992,00**	**17.595,17**	**19.409,72**	**19.409,72**	**22.406,73**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 46 Jumlah Produksi Perkebunan Mitra Perusahaan Tebu

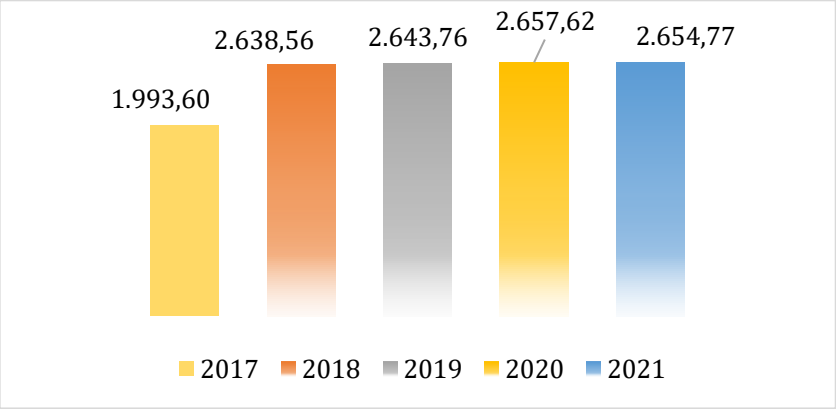
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 49 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kelapa

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	35,00	35,53	35,53	25,53	25,53	Ton
Beji	43,00	56,20	68,75	68,75	68,75	Ton
Gempol	92,96	87,10	69,15	77,16	75,86	Ton
Gondang Wetan	104,12	104,44	74,49	65,09	63,54	Ton
Grati	53,32	75,99	86,32	73,03	73,03	Ton
Kejayan	78,12	89,20	93,14	93,14	93,14	Ton
Kraton	61,50	62,42	62,42	62,42	62,42	Ton
Lekok	14,18	14,39	14,39	14,39	14,39	Ton
Lumbang	85,30	67,85	30,85	30,85	30,85	Ton
Nguling	67,62	53,56	35,56	35,56	35,56	Ton
Pandaan	28,40	37,45	37,45	37,45	37,45	Ton
Pasrepan	95,23	249,80	222,71	362,32	362,32	Ton
Pohjentrek	45,00	45,68	45,68	45,68	45,68	Ton
Prigen	36,50	42,63	42,63	42,63	42,63	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	204,84	382,85	451,81	447,87	447,87	Ton
Purwosari	95,80	83,79	55,58	55,68	55,68	Ton
Puspo	78,00	154,22	187,65	187,65	187,65	Ton
Rejoso	183,32	190,06	202,11	46,96	46,96	Ton
Rembang	68,00	69,02	69,02	49,25	49,25	Ton
Sukorejo	99,80	50,14	35,66	11,04	11,04	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Tutur	78,70	102,60	104,80	104,80	104,80	Ton
Winongan	251,27	485,43	523,66	617,22	617,22	Ton
Wonorejo	93,62	98,21	94,41	103,15	103,15	Ton
Kelapa	**1.993,60**	**2.638,56**	**2.643,76**	**2.657,62**	**2.654,77**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 47 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kelapa

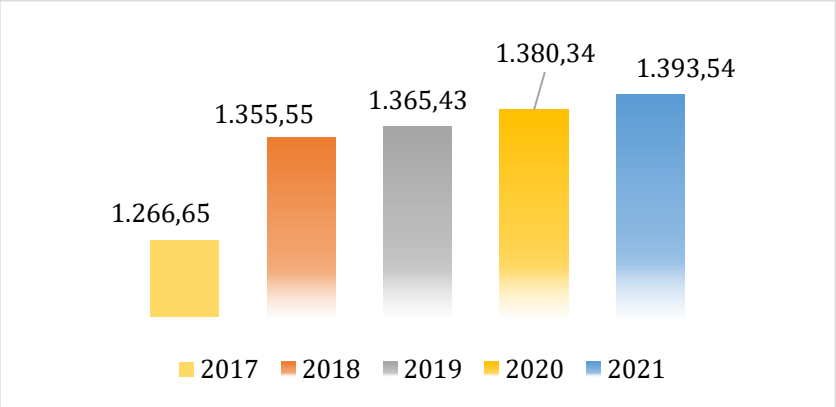
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 50 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kopi

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Beji	0	0	0	0	0	Ton
Gempol	0	0	0	0	0	Ton
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Ton
Grati	0	0	0	0	0	Ton
Kejayan	0	0	0	0	0	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	43,16	59,66	88,98	82,85	82,85	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Pandaan	0	0	0	0	0	Ton
Pasrepan	37,29	35,11	63,53	33,01	36,90	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Prigen	80,31	109,75	183,27	202,75	206,19	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwodadi	241,00	256,90	44,49	50,39	56,26	Ton
Purwosari	4,67	55,21	163,47	142,53	142,53	Ton
Puspo	173,05	162,26	88,20	167,76	167,76	Ton
Rejoso	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Sukorejo	0	0	0	0	0	Ton
Tosari	22,90	18,30	45,02	22,00	22,00	Ton
Tutur	664,27	658,36	688,47	679,05	679,05	Ton
Winongan	0	0	0	0	0	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Kopi	**1.266,65**	**1.355,55**	**1.365,43**	**1.380,34**	**1.393,54**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 48 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kopi

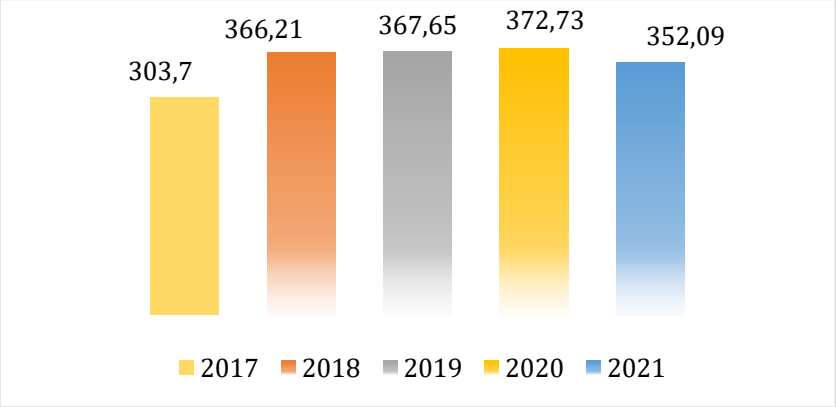
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 51 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Cengkeh

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Beji	0					Ton
Gempol	0,89	0,70	0,70	0,70	0,70	Ton
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Ton
Grati	0	0	0	0	0	Ton
Kejayan	0	0	0	0	0	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	10,00	11,89	11,89	12,77	12,77	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Pandaan	10,88	12,72	13,50	13,50	13,50	Ton
Pasrepan	10,82	17,10	17,46	17,46	17,46	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Prigen	43,26	47,86	48,16	49,26	49,26	Ton
Purwodadi	37,40	38,83	38,83	38,83	38,83	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwosari	14,18	16,02	16,02	17,01	17,01	Ton
Puspo	77,80	89,19	89,19	88,19	84,78	Ton
Rejoso	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Sukorejo	1,40	1,52	1,52	1,52	1,52	Ton
Tosari	11,09	11,26	11,26	11,26	0,50	Ton
Tutur	85,98	119,12	119,12	122,23	115,76	Ton
Winongan	0	0	0	0	0	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Cengkeh	**303,70**	**366,21**	**367,65**	**372,73**	**352,09**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 49 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Cengkeh

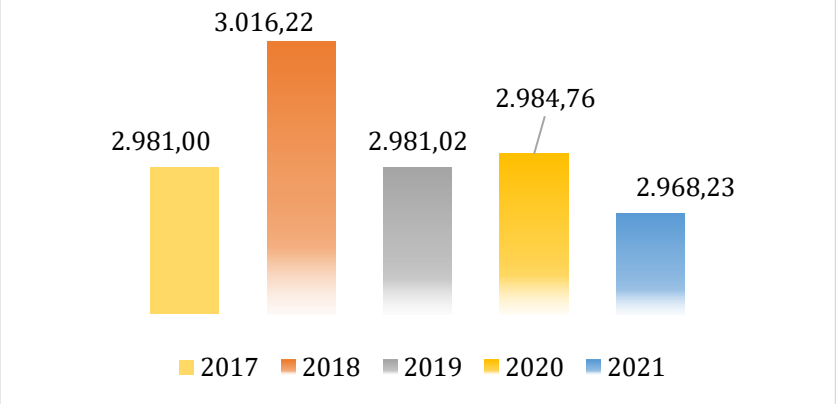
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 52 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kapuk Randu

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	Ton
Beji	75,56	75,56	75,56	75,56	75,56	Ton
Gempol	70,80	45,80	45,80	45,80	45,80	Ton
Gondang Wetan	34,80	34,80	34,80	34,80	34,80	Ton
Grati	57,20	63,64	63,64	63,64	63,64	Ton
Kejayan	393,80	562,28	562,28	562,28	555,40	Ton
Kraton	20,30	22,08	22,08	22,08	22,08	Ton
Lekok	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	Ton
Lumbang	287,81	287,81	287,81	287,81	287,81	Ton
Nguling	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	Ton
Pandaan	64,80	64,80	64,80	64,80	64,80	Ton
Pasrepan	689,50	674,80	674,80	676,87	673,88	Ton
Pohjentrek	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	Ton
Prigen	161,16	176,04	164,04	164,04	164,04	Ton
Purwodadi	162,90	131,20	131,20	131,20	131,20	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwosari	138,50	125,63	102,43	107,90	107,90	Ton
Puspo	347,04	276,53	276,53	276,53	269,87	Ton
Rejoso	14,90	14,90	14,90	14,90	14,90	Ton
Rembang	28,70	46,63	46,63	46,63	46,63	Ton
Sukorejo	144,15	144,15	144,15	144,15	144,15	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Tutur	88,20	88,20	88,20	88,20	88,20	Ton
Winongan	59,43	39,93	39,93	36,13	36,13	Ton
Wonorejo	96,85	96,85	96,85	96,85	96,85	Ton
Kapuk Randu	**2.981,00**	**3.016,22**	**2.981,02**	**2.984,76**	**2.968,23**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 50 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kapuk Randu

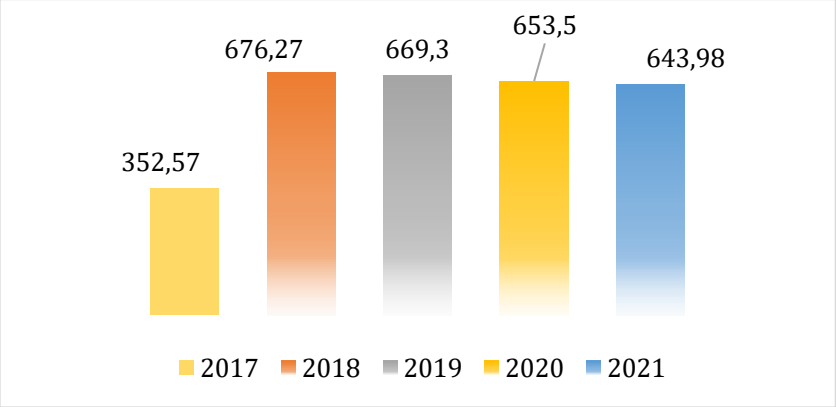
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 53 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kenanga

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Bangil	0	0	0	0	0	Ton
Beji	29,70	40,77	40,77	40,77	40,77	Ton
Gempol	3,75	4,60	4,60	4,60	4,60	Ton
Gondang Wetan	0	0	0	0	0	Ton
Grati	0	0	0	0	0	Ton
Kejayan	0	0	0	0	0	Ton
Kraton	0	0	0	0	0	Ton
Lekok	0	0	0	0	0	Ton
Lumbang	3,90	10,80	10,80	10,80	10,80	Ton
Nguling	0	0	0	0	0	Ton
Pandaan	24,62	43,35	45,15	43,35	42,36	Ton
Pasrepan	4,20	5,52	4,74	5,52	5,52	Ton
Pohjentrek	0	0	0	0	0	Ton
Prigen	6,20	14,29	15,18	14,29	14,29	Ton
Purwodadi	223,80	441,69	440,70	419,70	411,17	Ton

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Purwosari	44,40	97,95	90,06	97,17	97,17	Ton
Puspo	6,90	8,70	8,70	8,70	8,70	Ton
Rejoso	0	0	0	0	0	Ton
Rembang	0	0	0	0	0	Ton
Sukorejo	3,20	4,00	4,00	4,00	4,00	Ton
Tosari	0	0	0	0	0	Ton
Tutur	1,90	4,60	4,60	4,60	4,60	Ton
Winongan	0	0	0	0	0	Ton
Wonorejo	0	0	0	0	0	Ton
Kenanga	**352,57**	**676,27**	**669,30**	**653,50**	**643,98**	**Ton**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Gambar 14. 51 Jumlah Produksi Perkebunan Non Mitra Perusahaan Kenanga

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 54 Persentase Penyediaan Sarana Pertanian

	2021	Satuan
Persentase penyediaan sarana pertanian	1,96%	%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 55 Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian

	2021	Satuan
Persentase penyediaan prasarana pertanian	75%	%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 56 Persentase Serangan OPT yang Dapat Ditanggulangi

	2021	Satuan
Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi	75%	%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 14. 57 Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Izin Usaha

	2021	Satuan
Persentase usaha pertanian yang memiliki izin usaha	75%	%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

DESKRIPSI

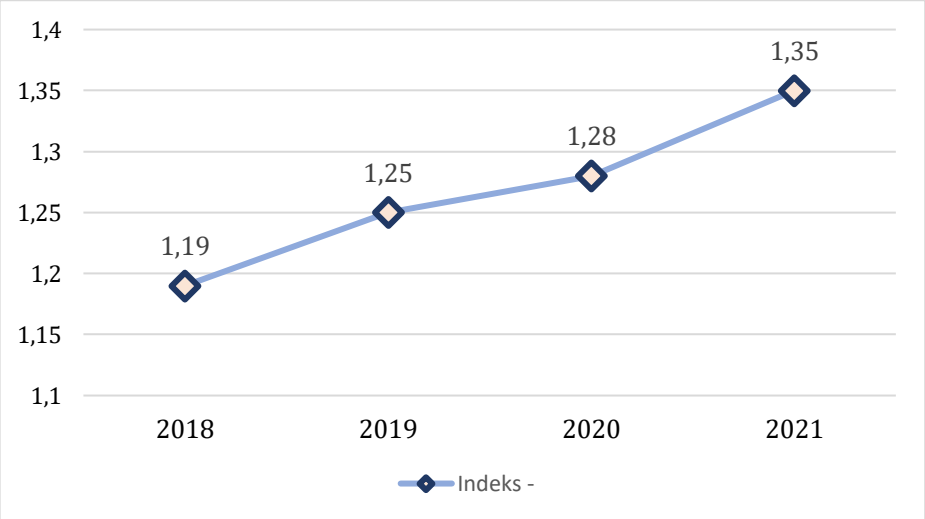
Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, indeks aksesibilitas wilayah di Kabupaten Pasuruan selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Hal tersebut diindikasikan oleh panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) di Kabupaten Pasuruan selalu meningkat mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Persentase jembatan dalam kondisi baik juga menjadi indikator bagus atau tidaknya infrastruktur, persentase jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah 88, 33 persen. Selanjutnya persentase drainase dalam kondisi baik dan tidak terjadi penyumbatan saluran pembuangan air adalah 28,35 persen di tahun 2021. Persentase kondisi Turap/Talud/Bronjong dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 menjadi 51,60 persen.

Sedangkan total panjang jalan aspal di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 adalah 1166,48 Km, dimana Kecamatan Prigen memiliki jalan aspal terpanjang, yaitu 77,98 Km. Total panjang jalan cor beton di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah 284,12 Km, dimana Kecamatan Gempol memiliki jalan cor beton terpanjang, yaitu 58,14 Km. Selanjutnya total panjang jalan berbatu pada tahun 2021 adalah 83,71 Km. Daerah yang memiliki jalan berbatu terpanjang adalah Kecamatan Puspo, yaitu 18,07 Km. Kemudian Daerah yang memiliki jalan tanah terpanjang adalah Kecamatan Tosari, yaitu sepanjang 2,76 Km. Namun begitu total panjang jalan tanah di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 hanyalah 6,37 Km.

Tabel 15. 1 Indeks Aksesibilitas Wilayah

	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,19	1,25	1,28	1,35	Nilai
Panjang Jalan Kondisi Mantap	1.760,08	1.841,13	1.881,13	1.962,19	Km
Luas Wilayah Kabupaten Pasuruan	1.474,00	1.474,00	1.474,00	1.474,00	Km^2

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



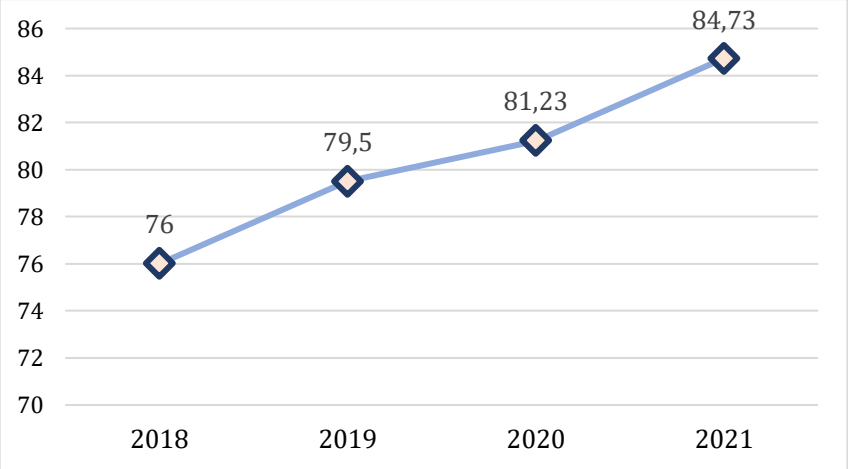
Gambar 15. 1 Indeks Aksesibilitas Wilayah

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 2 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang

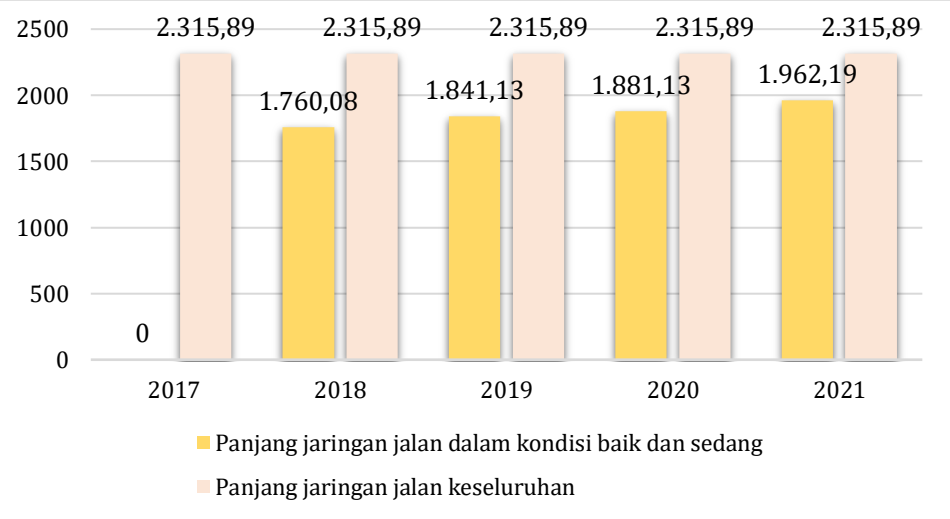
	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik dan sedang	76,00	79,50	81,23	84,73	%
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	1.760,08	1.841,13	1.881,13	1.962,19	Km
Panjang jaringan jalan keseluruhan	2.315,89	2.315,89	2.315,89	2.315,89	Km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



Gambar 15. 2 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



Gambar 15. 3 Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang (Km)

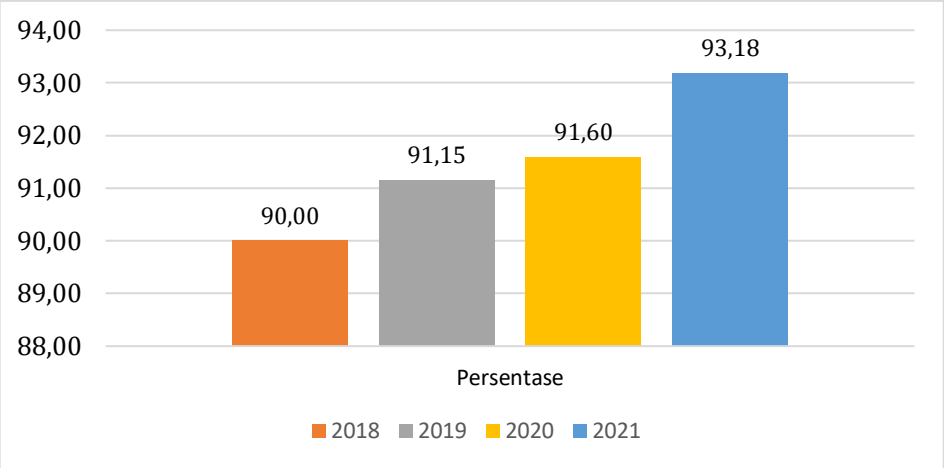
Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 3 Persentase Infrastruktur Pendukung Jalan dalam Kondisi Baik

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Infrastruktur pendukung jalan dalam kondisi baik	-	90,00	91,15	91,60	93,18	%
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	99,73	100	81,47	83,09	88,33	%

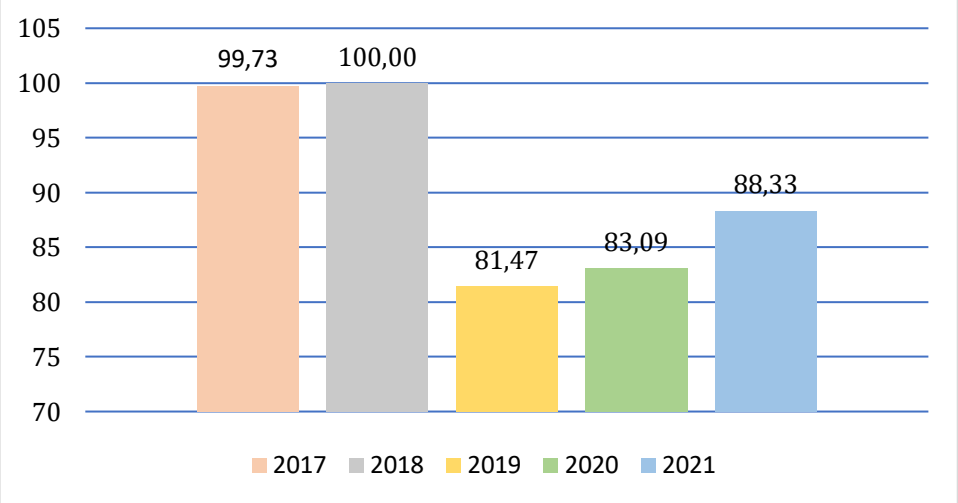
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah jembatan kondisi baik	-	449,00	475,00	495,00	515,00	buah
Jumlah jembatan dalam kondisi baik	-	449,00	475,00	495,00	515,00	buah
Persentase Drainasi dalam Kondisi Baik	25,87	26,00	26,72	26,92		%
Panjang drainase kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat	-	99,84	102,63	105,64	108,88	km
Panjang drainase secara keseluruhan	-	384,00	384,00	384,00	384,00	km
Persentase Kondisi Turap / Talud / Bronjong dalam kondisi Baik	-	48,00	49,25	50,45	51,60	%
Panjang turap/talud/bronjong kondisi baik	-	457,44	469,34	480,80	491,80	km
Panjang turap/talud/bronjong keseluruhan	-	-	-	-	-	-
Persentase Lampu Penerangan Jalan / Fasilitas Umum	-	90,00	91,15	92,22	93,18	%
Panjang yang sudah ada lampu penerangan jalan/fasilitas umum dalam kondisi baik	-	2293,00	2322,00	2349,00	2374,00	km
Panjang jalan keseluruhan yang membutuhkan lampu penerangan jalan/fasilitas umum	-	2.315,89	2.315,89	2.315,89	2.315,89	km
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	79,68	84,00	-	-	-	%
Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	km
Panjang jaringan jalan keseluruhan	2.315,89	2.315,89	2.315,89	2.315,89	2.315,89	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



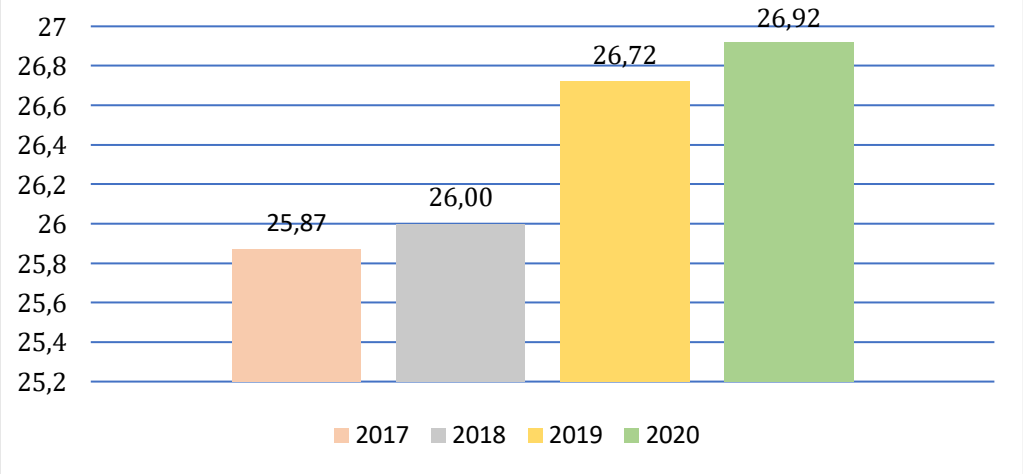
Gambar 15. 4 Persentase Infrastruktur Pendukung Jalan dalam Kondisi Baik

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



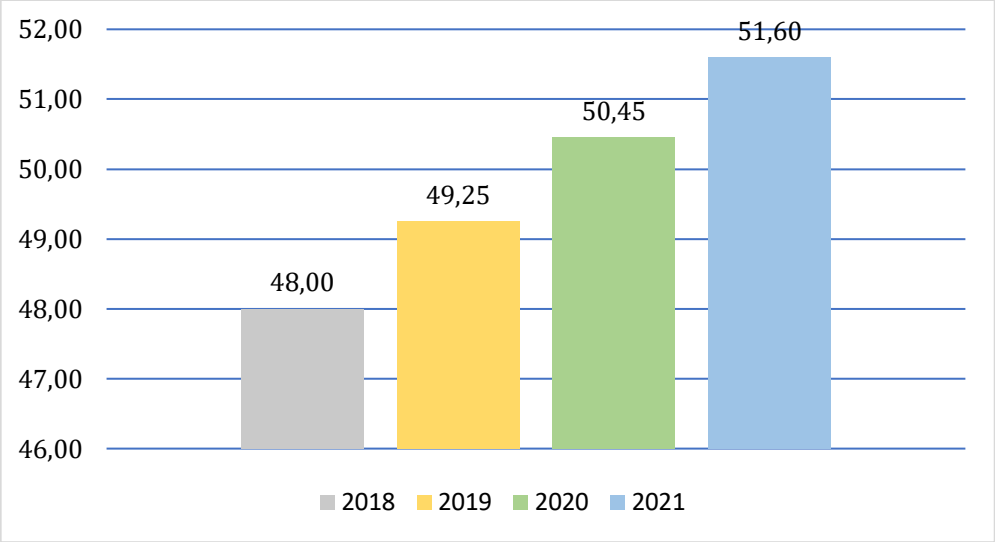
Gambar 15. 5 Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



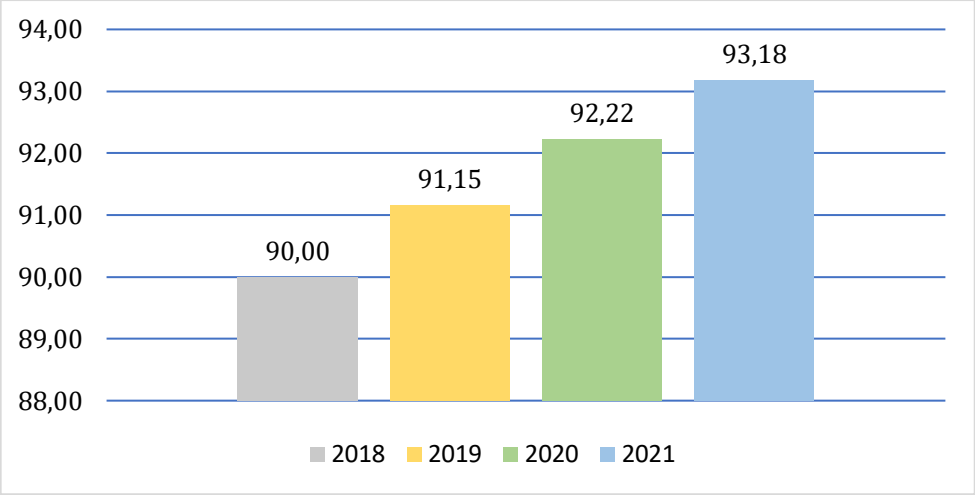
Gambar 15. 6 Persentase Drainasi dalam Kondisi Baik

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



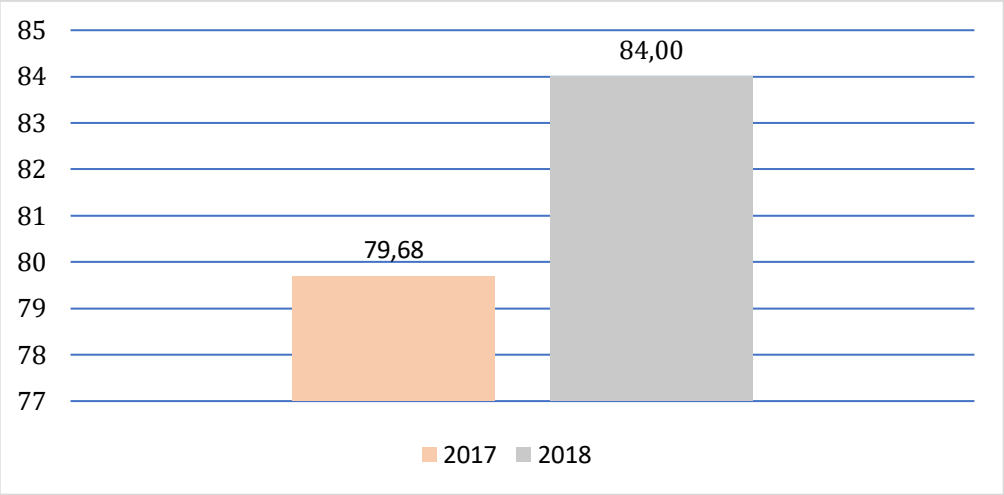
Gambar 15. 7 Persentase Kondisi Turap / Talud / Bronjong dalam Kondisi Baik

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



Gambar 15. 8 Persentase Lampu Penerangan Jalan / Fasilitas Umum

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



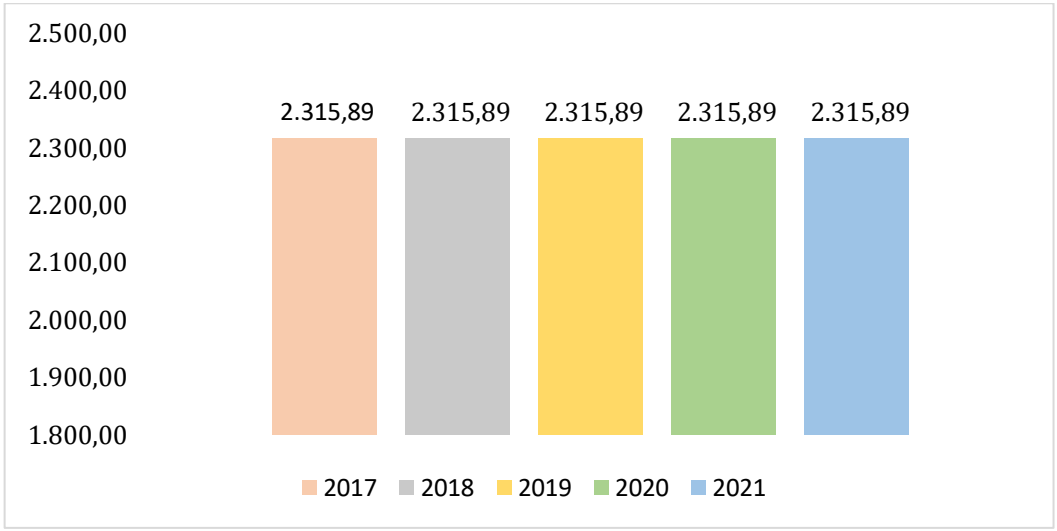
Gambar 15. 9 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 4 Panjang Jaringan Jalan Keseluruhan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Panjang jaringan jalan keseluruhan	2.315,89	2.315,89	2.315,89	2.315,89	2.315,89	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



Gambar 15. 10 Panjang Jaringan Jalan Keseluruhan

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 5 Persentase Panjang Jaringan Jalan Berkategori Rusak yang Dilakukan Pemeliharaan

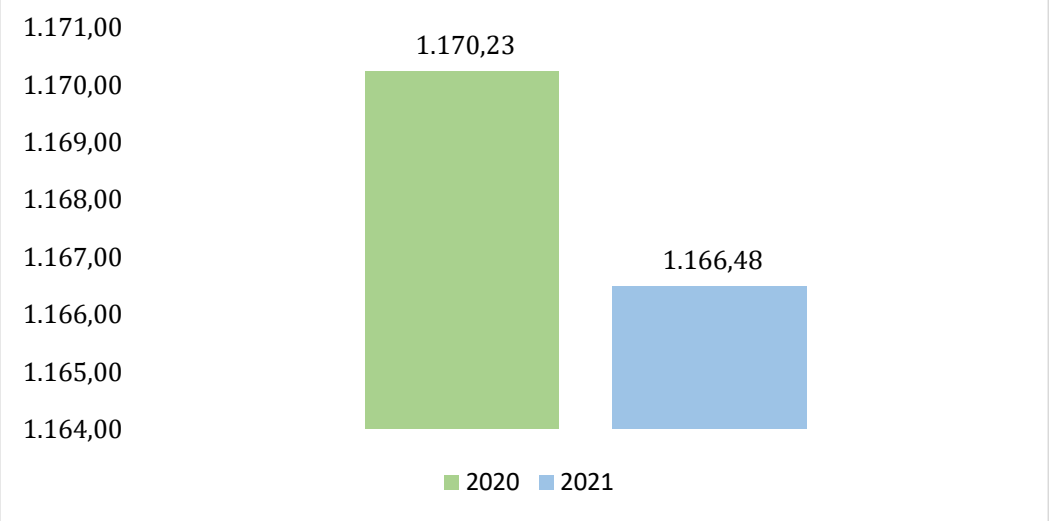
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Panjang jaringan jalan keseluruhan	2.315,89	2.315,89	2.315,89	2.315,89	2.315,89	Km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 6 Panjang Jalan Berdasarkan Material Aspal (Km)

	2020	2021	Satuan
Aspal	1170,23	1166,48	km
Kecamatan Bangil	38,33	39,13	km
Kecamatan Beji	37,95	37,55	km
Kecamatan Gempol	36,84	34,94	km
Kecamatan Gondang Wetan	41,61	41,61	km
Kecamatan Grati	37,7	37,7	km
Kecamatan Kejayan	56,51	56,51	km
Kecamatan Kraton	47,13	40,59	km
Kecamatan Lekok	30,81	30,81	km
Kecamatan Lumbang	65,07	65,07	km
Kecamatan Nguling	37,31	39,61	km
Kecamatan Pandaan	77,74	77,57	km
Kecamatan Pasrepan	53,27	54,07	km
Kecamatan Pohjentrek	22,52	22,52	km
Kecamatan Prigen	78,18	77,98	km
Kecamatan Purwodadi	57,24	57,44	km
Kecamatan Purwosari	55,71	55,71	km
Kecamatan Puspo	33,11	31,78	km
Kecamatan Rejoso	34,41	34,41	km
Kecamatan Rembang	47,86	51	km
Kecamatan Sukorejo	51,83	53,24	km
Kecamatan Tosari	49,1	49,1	km
Kecamatan Tutur	80,25	77,79	km
Kecamatan Winongan	37,87	38,87	km
Kecamatan Wonorejo	61,88	61,48	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



Gambar 15. 11 Panjang Jalan Berdasarkan Material Aspal (Km)

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 7 Panjang Jalan Berdasarkan Material Berbatu (Km)

	2021	Satuan
Berbatu	83,71	km
Kecamatan Bangil	0,2	km
Kecamatan Beji	0	km
Kecamatan Gempol	0,4	km
Kecamatan Gondang Wetan	4,56	km
Kecamatan Grati	0	km
Kecamatan Kejayan	3	km
Kecamatan Kraton	2,2	km
Kecamatan Lekok	4,29	km
Kecamatan Lumbang	9,05	km
Kecamatan Nguling	1	km
Kecamatan Pandaan	1,15	km
Kecamatan Pasrepan	12,71	km
Kecamatan Pohjentrek	0	km
Kecamatan Prigen	0,55	km
Kecamatan Purwodadi	1,6	km
Kecamatan Purwosari	2,39	km
Kecamatan Puspo	18,07	km
Kecamatan Rejoso	1,4	km
Kecamatan Rembang	2,01	km
Kecamatan Sukorejo	0,8	km
Kecamatan Tosari	4,14	km
Kecamatan Tutur	12,39	km
Kecamatan Winongan	0,2	km
Kecamatan Wonorejo	1,6	km

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Tabel 15. 8 Panjang Jalan Berdasarkan Material Hotmix (Aspal Beton)

	2020	Satuan
Hotmix (Aspal Beton)	16,24	km
Kecamatan Bangil	0,40	km
Kecamatan Beji	0,00	km
Kecamatan Gempol	2,40	km
Kecamatan Gondang Wetan	0,00	km
Kecamatan Grati	4,31	km
Kecamatan Kejayan	0,00	km
Kecamatan Kraton	0,20	km
Kecamatan Lekok	0,00	km
Kecamatan Lumbang	0,00	km
Kecamatan Nguling	2,14	km
Kecamatan Pandaan	0,00	km
Kecamatan Pasrepan	0,00	km
Kecamatan Pohjentrek	0,00	km
Kecamatan Prigen	1,07	km
Kecamatan Purwodadi	0,00	km
Kecamatan Purwosari	1,60	km
Kecamatan Puspo	0,80	km
Kecamatan Rejoso	0,00	km
Kecamatan Rembang	2,92	km
Kecamatan Sukorejo	0,40	km
Kecamatan Tosari	0,00	km
Kecamatan Tutur	0,00	km
Kecamatan Winongan	0,00	km
Kecamatan Wonorejo	0,00	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 9 Panjang Jalan Berdasarkan Material Cor Beton

	2021	Satuan
Cor Beton	284,12	km
Kecamatan Bangil	6,89	km
Kecamatan Beji	0,4	km
Kecamatan Gempol	58,14	km
Kecamatan Gondang Wetan	0	km
Kecamatan Grati	8,71	km
Kecamatan Kejayan	15,05	km
Kecamatan Kraton	17,39	km
Kecamatan Lekok	6,24	km
Kecamatan Lumbang	2,2	km
Kecamatan Nguling	7,07	km
Kecamatan Pandaan	11,38	km
Kecamatan Pasrepan	11,72	km
Kecamatan Pohjentrek	0	km

	2021	Satuan
Kecamatan Prigen	8,5	km
Kecamatan Purwodadi	16,23	km
Kecamatan Purwosari	10,52	km
Kecamatan Puspo	14,75	km
Kecamatan Rejoso	4,78	km
Kecamatan Rembang	4,52	km
Kecamatan Sukorejo	14,17	km
Kecamatan Tosari	17,76	km
Kecamatan Tutur	30,853	km
Kecamatan Winongan	13,15	km
Kecamatan Wonorejo	3,7	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 10 Panjang Jalan Berdasarkan Material Kerikil

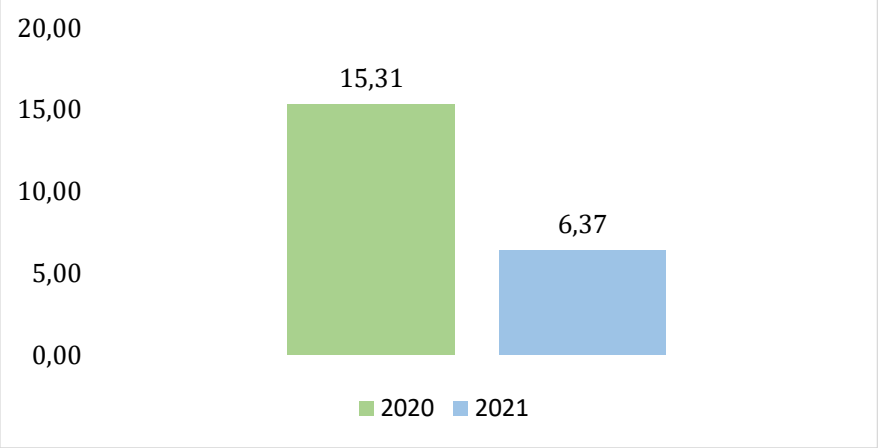
	2020	Satuan
Kerikil	92,75	km
Kecamatan Bangil	0,20	km
Kecamatan Beji	0,00	km
Kecamatan Gempol	3,60	km
Kecamatan Gondang Wetan	3,74	km
Kecamatan Grati	0,00	km
Kecamatan Kejayan	3,00	km
Kecamatan Kraton	2,60	km
Kecamatan Lekok	4,29	km
Kecamatan Lumbang	9,05	km
Kecamatan Nguling	0,20	km
Kecamatan Pandaan	1,15	km
Kecamatan Pasrepan	12,31	km
Kecamatan Pohjentrek	0,00	km
Kecamatan Prigen	0,78	km
Kecamatan Purwodadi	1,60	km
Kecamatan Purwosari	3,19	km
Kecamatan Puspo	17,14	km
Kecamatan Rejoso	1,40	km
Kecamatan Rembang	5,15	km
Kecamatan Sukorejo	3,61	km
Kecamatan Tosari	4,94	km
Kecamatan Tutur	12,20	km
Kecamatan Winongan	0,80	km
Kecamatan Wonorejo	1,80	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 11 Panjang Jalan Berdasarkan Material Tanah

	2020	2021	Satuan
Tanah	15,31	6,37	km
Kecamatan Bangil	0,80	0	km
Kecamatan Beji	0,00	0	km
Kecamatan Gempol	1,22	0	km
Kecamatan Gondang Wetan	0,82	0	km
Kecamatan Grati	0,00	0	km
Kecamatan Kejayan	0,00	0	km
Kecamatan Kraton	0,00	0	km
Kecamatan Lekok	0,00	0	km
Kecamatan Lumbang	0,00	0	km
Kecamatan Nguling	3,10	0	km
Kecamatan Pandaan	0,40	0	km
Kecamatan Pasrepan	1,20	0	km
Kecamatan Pohjentrek	0,00	0	km
Kecamatan Prigen	0,00	0	km
Kecamatan Purwodadi	0,20	0	km
Kecamatan Purwosari	1,36	1,36	km
Kecamatan Puspo	1,28	1,28	km
Kecamatan Rejoso	0,00	0	km
Kecamatan Rembang	0,00	0	km
Kecamatan Sukorejo	0,00	0	km
Kecamatan Tosari	2,76	2,76	km
Kecamatan Tutur	1,97	0,97	km
Kecamatan Winongan	0,20	0	km
Kecamatan Wonorejo	0,00	0	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



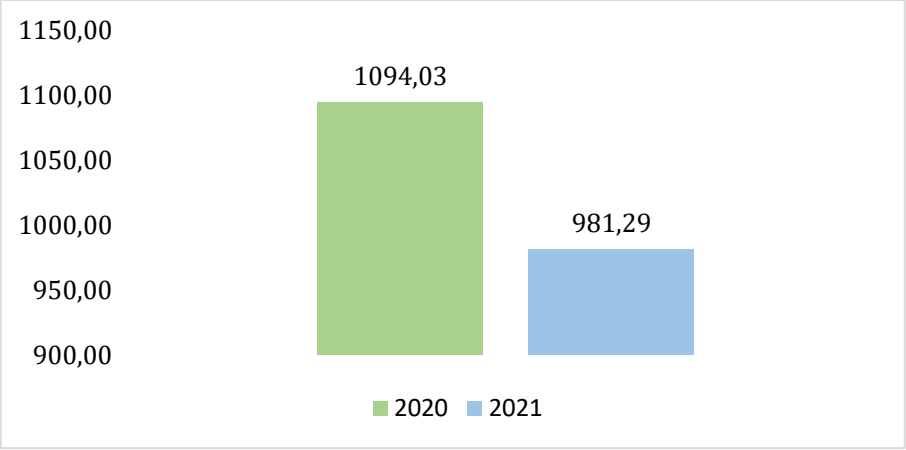
Gambar 15. 12 Panjang Jalan Berdasarkan Material Tanah

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 12 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Baik)

	2020	2021	Satuan
Jalan Baik	1094,03	981,29	km
Kecamatan Bangil	40,70	39,25	km
Kecamatan Beji	35,12	34,92	km
Kecamatan Gempol	38,14	42,1	km
Kecamatan Gondang Wetan	37,85	37,85	km
Kecamatan Grati	26,33	25,76	km
Kecamatan Kejayan	51,51	44,11	km
Kecamatan Kraton	45,66	36,19	km
Kecamatan Lekok	34,85	22,21	km
Kecamatan Lumbang	45,53	43,33	km
Kecamatan Nguling	30,22	31,26	km
Kecamatan Pandaan	79,03	71,04	km
Kecamatan Pasrepan	30,06	29,26	km
Kecamatan Pohjentrek	21,30	21,12	km
Kecamatan Prigen	73,53	74,06	km
Kecamatan Purwodadi	61,51	56,91	km
Kecamatan Purwosari	55,83	48,64	km
Kecamatan Puspo	17,08	9,47	km
Kecamatan Rejoso	32,97	30,19	km
Kecamatan Rembang	45,54	45,11	km
Kecamatan Sukorejo	57,77	53,45	km
Kecamatan Tosari	58,95	38,25	km
Kecamatan Tutur	87,37	64,813	km
Kecamatan Winongan	44,84	40,1	km
Kecamatan Wonorejo	42,34	41,9	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



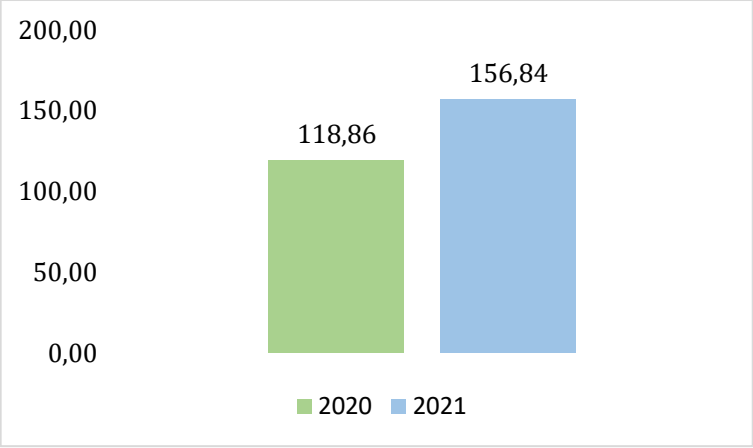
Gambar 15. 13 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Baik)

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 13 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Sedang)

	2020	2021	Satuan
Jalan Sedang	118,86	156,84	km
Kecamatan Bangil	3,52	2,89	km
Kecamatan Beji	2,43	2,63	km
Kecamatan Gempol	16,57	6,78	km
Kecamatan Gondang Wetan	3,16	3,16	km
Kecamatan Grati	12,27	11,67	km
Kecamatan Kejayan	6,22	8,12	km
Kecamatan Kraton	5,60	10	km
Kecamatan Lekok	0,40	3,43	km
Kecamatan Lumbang	3,91	6,28	km
Kecamatan Nguling	1,40	2,86	km
Kecamatan Pandaan	4,59	13,04	km
Kecamatan Pasrepan	14,61	11,98	km
Kecamatan Pohjentrek	0,40	0,4	km
Kecamatan Prigen	3,78	3,18	km
Kecamatan Purwodadi	4,05	2,6	km
Kecamatan Purwosari	3,91	5,11	km
Kecamatan Puspo	5,29	7,45	km
Kecamatan Rejoso	2,55	4,13	km
Kecamatan Rembang	3,60	4,83	km
Kecamatan Sukorejo	1,40	5,075	km
Kecamatan Tosari	0,65	9,44	km
Kecamatan Tutur	3,60	21,02	km
Kecamatan Winongan	4,30	3,4	km
Kecamatan Wonorejo	10,65	7,36	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



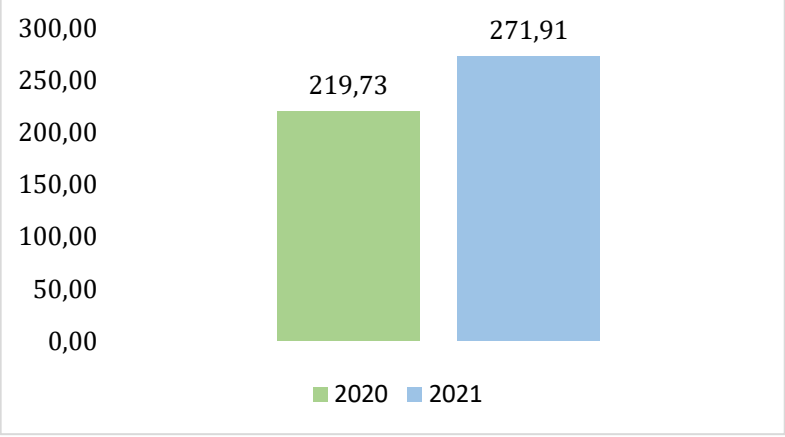
Gambar 15. 14 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Sedang)

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 14 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Rusak Ringan)

	2020	2021	Satuan
Jalan Rusak Ringan	219,73	271,91	km
Kecamatan Bangil	1,00	3,08	km
Kecamatan Beji	0,40	0,4	km
Kecamatan Gempol	33,95	38,95	km
Kecamatan Gondang Wetan	0,60	0,6	km
Kecamatan Grati	7,81	7,49	km
Kecamatan Kejayan	13,83	14,83	km
Kecamatan Kraton	6,32	9,38	km
Kecamatan Lekok	1,80	11,41	km
Kecamatan Lumbang	17,83	19,03	km
Kecamatan Nguling	12,76	12,56	km
Kecamatan Pandaan	4,93	4,87	km
Kecamatan Pasrepan	20,32	23,75	km
Kecamatan Pohjentrek	0,82	1	km
Kecamatan Prigen	8,94	9,36	km
Kecamatan Purwodadi	7,91	13,96	km
Kecamatan Purwosari	5,69	11,48	km
Kecamatan Puspo	25,09	21,63	km
Kecamatan Rejoso	3,67	4,27	km
Kecamatan Rembang	3,24	4,58	km
Kecamatan Sukorejo	5,43	7,875	km
Kecamatan Tosari	6,46	13,17	km
Kecamatan Tutur	16,86	17,09	km
Kecamatan Winongan	2,08	5,82	km
Kecamatan Wonorejo	11,99	15,32	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



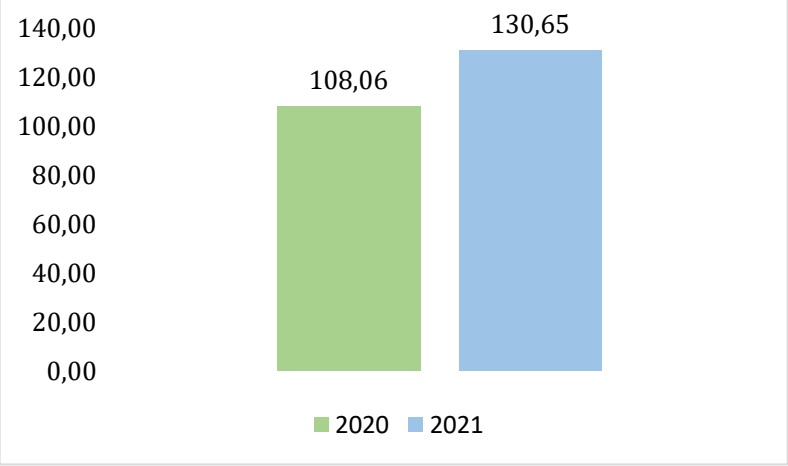
Gambar 15. 15 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Rusak Ringan)

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Tabel 15. 15 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Rusak Berat)

	2020	2021	Satuan
Jalan Rusak Berat	108,06	130,65	km
Kecamatan Bangil	1,00	1,00	km
Kecamatan Beji	0,00	0,00	km
Kecamatan Gempol	4,82	5,65	km
Kecamatan Gondang Wetan	4,56	4,56	km
Kecamatan Grati	0,00	1,49	km
Kecamatan Kejayan	3,00	7,50	km
Kecamatan Kraton	2,60	4,61	km
Kecamatan Lekok	4,29	4,29	km
Kecamatan Lumbang	9,05	7,68	km
Kecamatan Nguling	3,30	1,00	km
Kecamatan Pandaan	1,55	1,15	km
Kecamatan Pasrepan	13,51	13,51	km
Kecamatan Pohjentrek	0,00	0,00	km
Kecamatan Prigen	0,78	0,43	km
Kecamatan Purwodadi	1,80	1,80	km
Kecamatan Purwosari	4,55	4,75	km
Kecamatan Puspo	18,42	27,33	km
Kecamatan Rejoso	1,40	2,00	km
Kecamatan Rembang	5,15	3,01	km
Kecamatan Sukorejo	3,61	1,81	km
Kecamatan Tosari	7,70	12,90	km
Kecamatan Tutur	14,17	19,08	km
Kecamatan Winongan	1,00	2,90	km
Kecamatan Wonorejo	1,80	2,20	km

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi



Gambar 15. 16 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi (Jalan Rusak Berat)

Sumber: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

DINAS PERHUBUNGAN

DESKRIPSI

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga atau tidak disengaja dengan melibatkan kendaraan atau tanpa pengguna jalan lain yang berakibat adanya korban manusia da-tau kerugian harta benda. Angka kecelakaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 809 kecelakaan dan mengalami peningkatan hingga akhir 2021 sebesar 892 kecelakaan. Nilai tersebut mengindikasikan semakin tinggi angka kecelakaan, maka semakin tinggi pula tingkat kemacetan, jumlah Over Dimension and Over Load (ODOL), dan kerusakan infrastruktur.

Fasilitas LLAJ atau fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah suatu prasarana berupa fasilitas yang diperuntukkan bagi perpindahan orang da-tau barang menggunakan kendaraan. Fasilitas LLAJ yang terpasang di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 berjumlah 9767 unit dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 11.377 unit. Berdasarkan nilai tersebut diketahui semakin tinggi jumlah fasilitas LLAJ yang terpasang, maka semakin tinggi tingkat ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas.

Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku wajib di uji untuk menentukan kelaikan jalan. Pada tahun 2017, jumlah kendaraan yang wajib uji di Kabupaten Pasuruan berjumlah 21.018 kendaraan dan mengalami penurunan hingga akhir 2021 sebesar 18.283 kendaraan. Berdasarkan nilai tersebut diketahui semakin turun jumlah kendaraan yang wajib uji, maka semakin

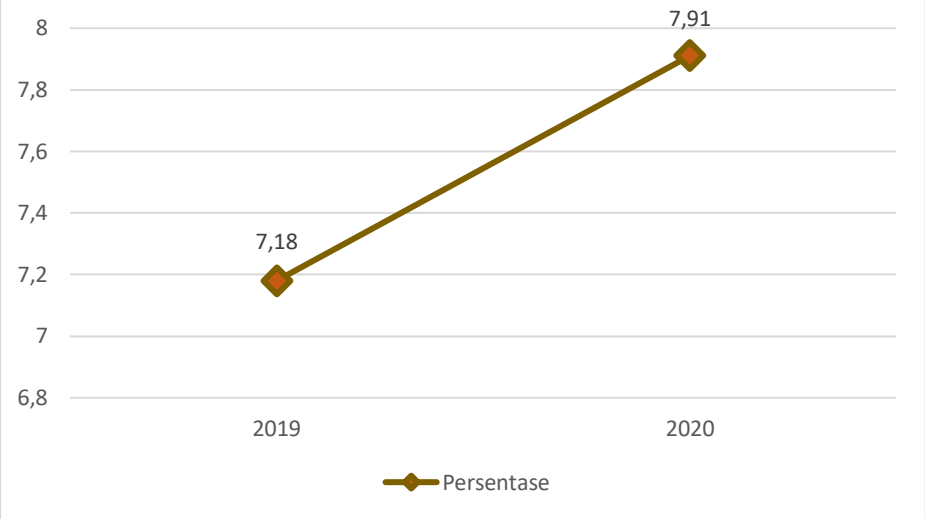
turun pula tingkat kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan wajib uji.

Jumlah orang yang tersangkut angkutan umum (di terminal) pada tahun 2017 berjumlah 8519 orang dari 4 terminal yang ada di Kabupaten Pasuruan. Hingga akhir tahun 2021, jumlah orang yang tersangkut angkutan umum (di terminal) mengalami penurunan sebesar 1030 orang. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa minat dan kebutuhan masyarakat dalam penggunaan angkutan umum (di terminal) semakin rendah.

Tabel 16. 1 Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum

Wilayah yang Terkoneksi Angkutan Umum	2019	2020	Satuan
Persentase wilayah yang terkoneksi angkutan umum	7,18	7,91	%
Wilayah yang terkoneksi angkutan umum	49	54	Ruas
Total wilayah	682	682	Ruas

Sumber: Dinas Perhubungan



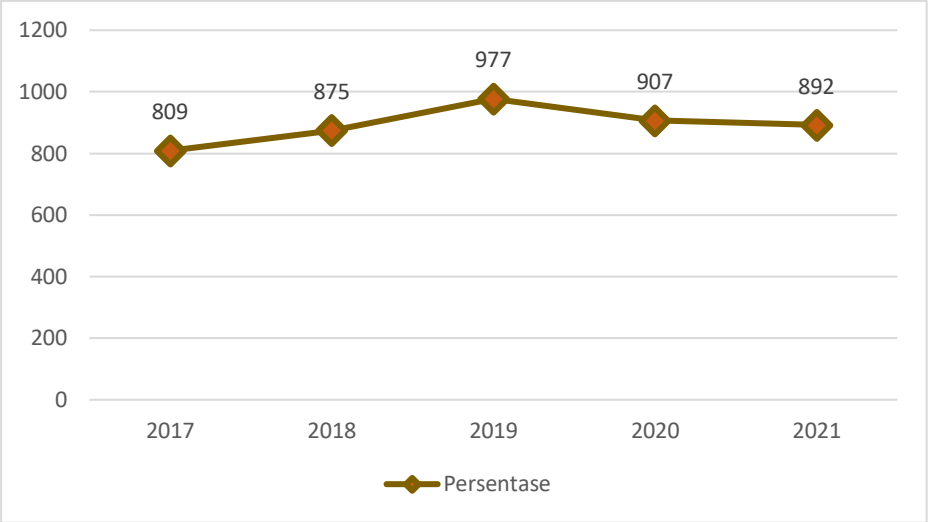
Gambar 16. 1 Persentase wilayah yang terkoneksi angkutan umum

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 16. 2 Penurunan Angka Kecelakaan

Penurunan Angka Kecelakaan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka kecelakaan	809	875	977	907	892	Kecelakaan

Sumber: Dinas Perhubungan



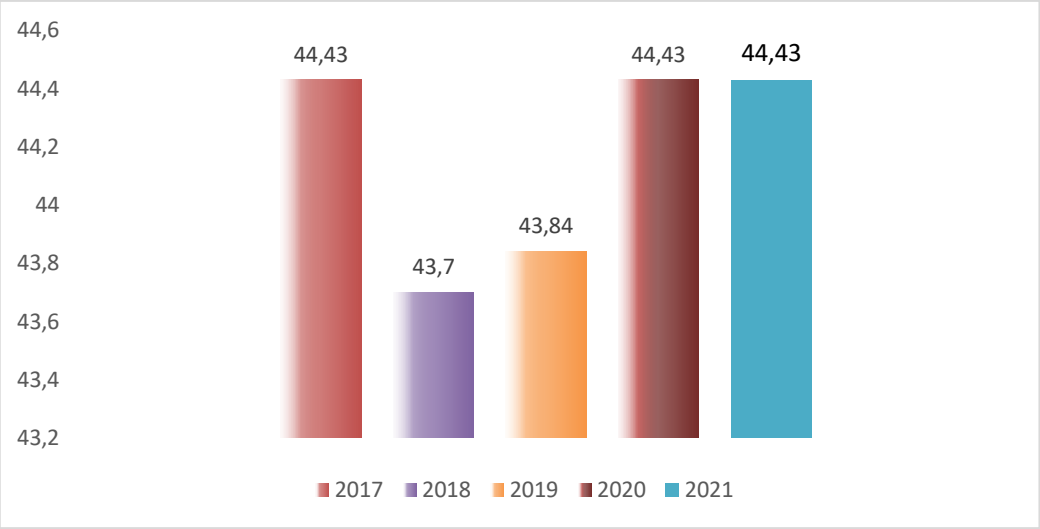
Gambar 16. 2 Penurunan Angka Kecelakaan

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 16. 3 Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	44,43	43,70	43,84	44,43	44,43	%
Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah kabupaten/ kota	303	298	299	303	303	Angkutan umum
jumlah keseluruhan wilayah kabupaten/ kota	682	682	682	682	682	Ruas

Sumber: Dinas Perhubungan



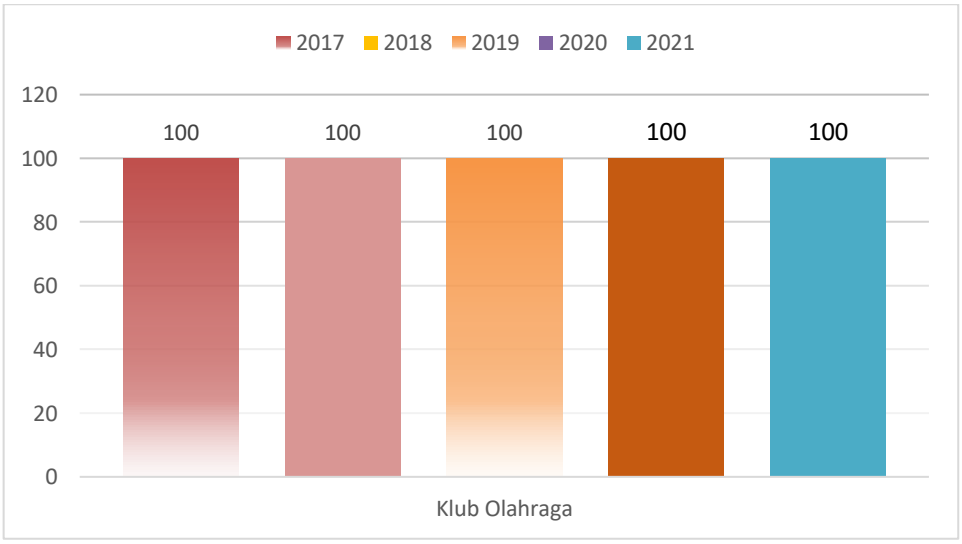
Gambar 16. 3 Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 16. 4 Fasilitas LLAJ yang Terpasang

Fasilitas LLAJ yang Terpasang	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase fasilitas LLAJ yang terpasang	100	100	100	100	100	%
Fasilitas LLAJ yang terpasang	9767	5546	5369	93	11377	Unit
Total fasilitas LLAJ	9767	5546	5369	93	11377	Unit

Sumber: Dinas Perhubungan



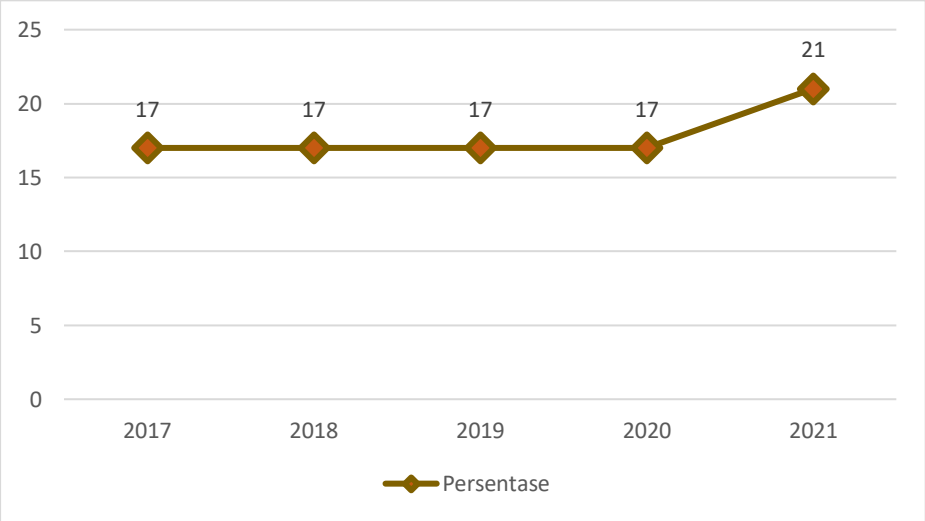
Gambar 16. 4 Persentase Fasilitas LLAJ yang Terpasang

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 16. 5 Sarana dan Prasarana Perhubungan

Sarana dan Prasarana Perhubungan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah	17	17	17	17	21	Unit

Sumber: Dinas Perhubungan



Gambar 16. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tabel 16. 6 Jumlah Kendaraan yang Uji

Jumlah Kendaraan yang Uji	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah kendaraan yang di uji	21018	20992	21058	17261	18283	Kendaraan
Total keseluruhan kendaraan	21005	21542	21546	17266	16953	Kendaraan

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 16. 7 Kendaraan Izin Trayek

Kendaraan Izin Trayek	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Kendaraan yang telah melakukan izin trayek	180	192	131	191	70	Kendaraan
Jumlah total keseluruhan kendaraan	303	298	299	303	303	Kendaraan

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 16. 8 Jumlah Terminal

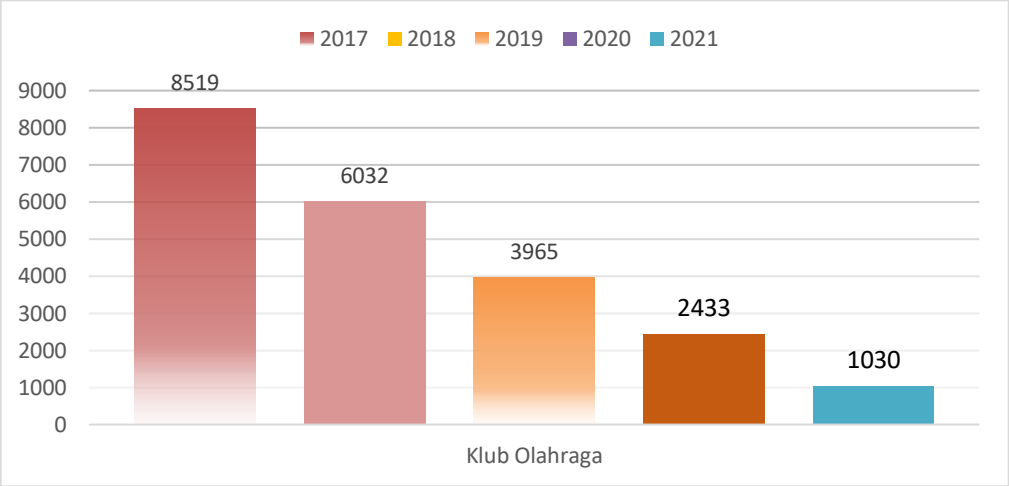
Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Terminal	4	4	4	4	4	Unit

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 16. 9 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Orang yang Terangkut Angkutan Umum	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah	8519	6032	3965	2433	1030	Orang

Sumber: Dinas Perhubungan



Gambar 16. 5 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum

Sumber: Dinas Perhubungan

Tabel 16. 10 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	39	39	39	39	Fasilitas
Jumlah fasilitasi penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	96	96	96	96	Fasilitas

Sumber: Dinas Perhubungan

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DESKRIPSI

Pemuda berprestasi adalah wujud nyata dari kualitas dan kuantitas yang diperoleh seseorang untuk upaya yang telah mereka capai. Rasio pemuda berprestasi per 10.000 penduduk menggambarkan banyaknya pemuda berprestasi dari 10.000 penduduk. Pada Tahun 2021, rasio pemuda berprestasi di Kabupaten Pasuruan sebesar 0,4. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10.000 penduduk terdapat 1 pemuda berprestasi.

Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dari padanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Persentase pemuda yang aktif berwirausaha menggambarkan perbandingan antara pemuda yang aktif berwirausaha dengan total keseluruhan pemuda. Pada tahun 2017, persentase pemuda yang aktif berwirausaha di Kabupaten Pasuruan sebesar 7,947%. Nilai tersebut mengalami peningkatan secara fluktuatif, hingga pada tahun 2021 persentase pemuda yang berwirausaha meningkat menjadi 9,0528%.

Mandiri adalah kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Persentase pemuda mandiri merupakan nilai yang menggambarkan perbandingan banyaknya pemuda mandiri terhadap total keseluruhan pemuda. Besar persentase pemuda mandiri Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 7,947% dan pada tahun 2021 sebesar 9,0528%.

Atlet adalah seseorang yang mahir dalam olahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Jumlah atlet yang dibina menunjukkan banyaknya atlet yang

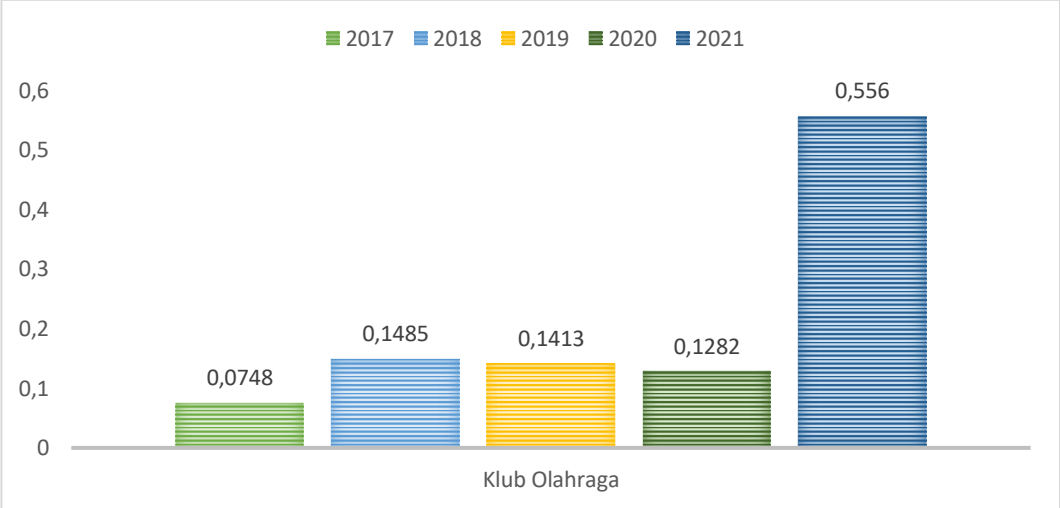
dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Tercatat bahwa terdapat 418 orang atlet yang dibina.

Atlet berprestasi adalah Individu yang memiliki keunikan dan memiliki bakat tersendiri serta keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu. Tercatat bahwa pada tahun 2019 terdapat 84 atlet berprestasi dan pada tahun 2021 terdapat 50 atlet berprestasi.

Tabel 17. 1 Klub Olahraga

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Klub Olah Raga per 10.000	0,0748	0,1485	0,1413	0,1282	0,5556	Per 10,000 Penduduk
Jumlah Klub Olahraga	12	24	23	21	91	Klub
Jumlah Penduduk	1.605.307	1.616.578	1.627.396	1.637.682	1.637.682	Jiwa

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



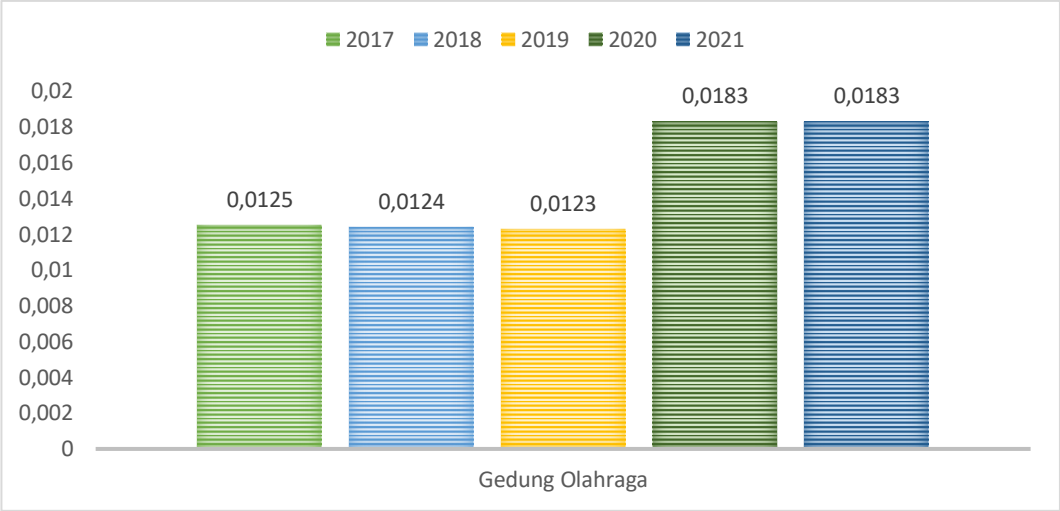
Gambar 17. 1 Jumlah Klub Olahraga Per 10.000 Penduduk

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 2 Gedung Olahraga

Gedung Olahraga	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 penduduk	0,0125	0,0124	0,0123	0,0183	0,0183	Per 10.000 Penduduk
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	3	3	Klub
Jumlah Penduduk	1.605.307	1.616.578	1.627.396	1.637.682	1.637.682	Jiwa

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



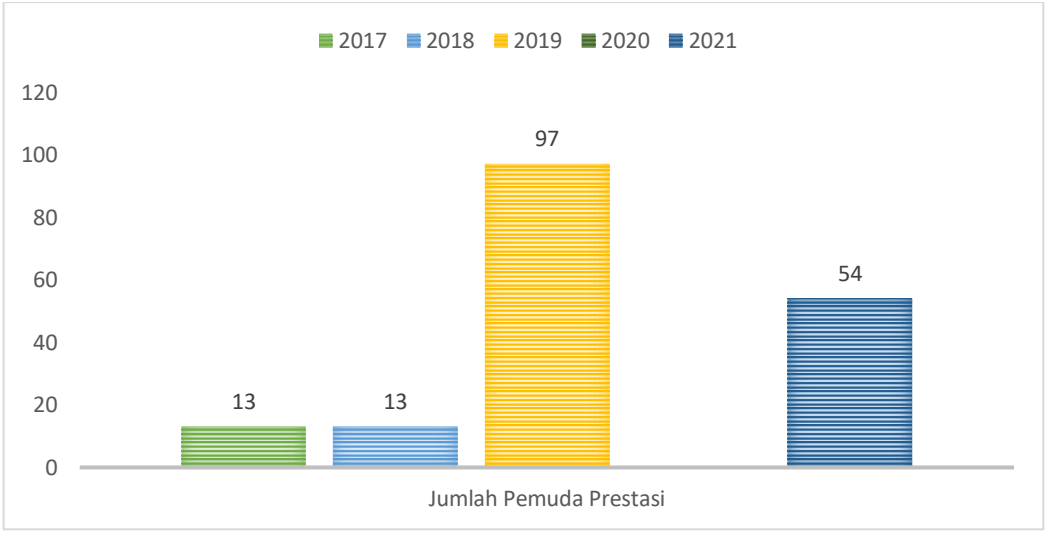
Gambar 17. 2 Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 3 Pemuda Berprestasi

Pemuda Berprestasi	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Rasio Pemuda Berprestasi	0.58	0.58	0.58	0.4	0.4	
Jumlah Pemuda Prestasi (atlet dan non atlet)	13	13	97	-	54	Orang
Jumlah Pemuda Usia 16-30 Tahun	362859	381957	402060	307632	323823	Orang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



Gambar 17. 3 Jumlah Pemuda Prestasi (atlet dan non atlet)

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 4 Jumlah Organisasi Pemuda Aktif

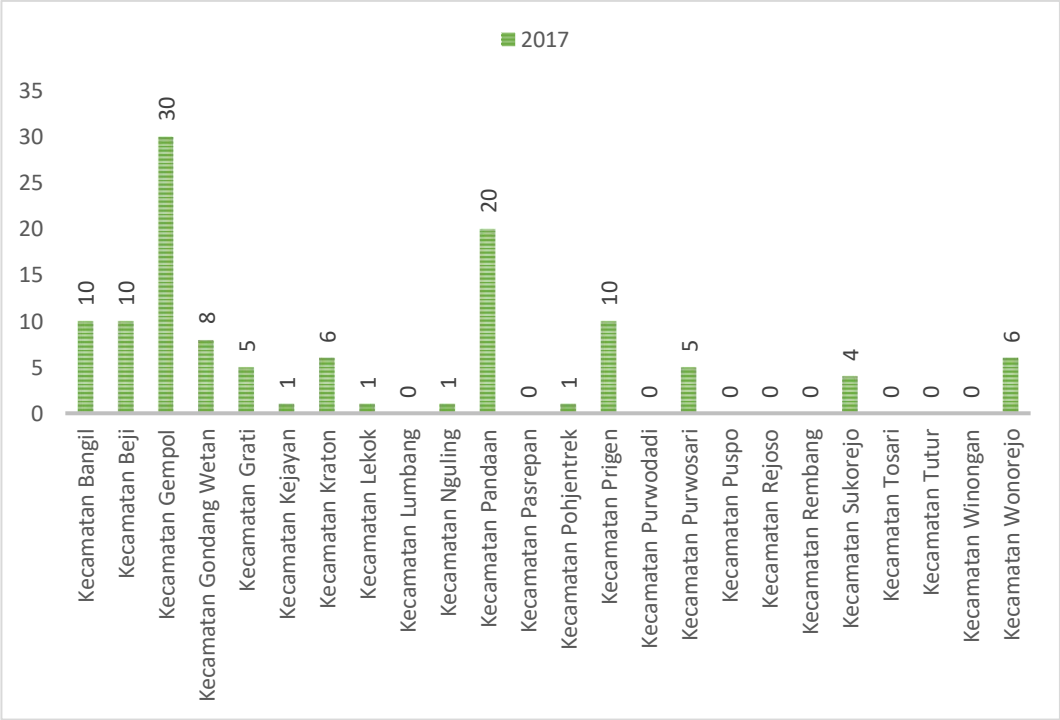
Organisasi Pemuda Aktif	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah	20	20	20	20	20	Organisasi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 5 Jumlah Atlet Berprestasi

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Kecamatan Bangil	10	18	20	20	Orang
Kecamatan Beji	10	12	14	18	Orang
Kecamatan Gempol	30	36	38	46	Orang
Kecamatan Gondang Wetan	8	10	10	11	Orang
Kecamatan Grati	5	6	6	6	Orang
Kecamatan Kejayan	1	1	1	1	Orang
Kecamatan Kraton	6	6	6	7	Orang
Kecamatan Lekok	1	1	1	1	Orang
Kecamatan Lumbang	-	-	-	-	Orang
Kecamatan Nguling	1	1	1	1	Orang
Kecamatan Pandaan	20	28	30	33	Orang
Kecamatan Pasrepan	-	-	-	-	Orang
Kecamatan Pohjentrek	1	4	4	4	Orang
Kecamatan Prigen	10	12	16	17	Orang
Kecamatan Purwodadi	-	-	-	-	Orang
Kecamatan Purwosari	5	6	7	8	Orang
Kecamatan Puspo	-	-	-	-	Orang
Kecamatan Rejoso	-	3	3	3	Orang
Kecamatan Rembang	-	-	-	-	Orang
Kecamatan Sukorejo	4	8	13	17	Orang
Kecamatan Tosari	-	-	-	-	Orang
Kecamatan Tutur	-	-	-	-	Orang
Kecamatan Winongan	-	-	-	-	Orang
Kecamatan Wonorejo	6	3	1	1	Orang
Jumlah	**118**	**155**	**171**	**194**	**Orang**

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



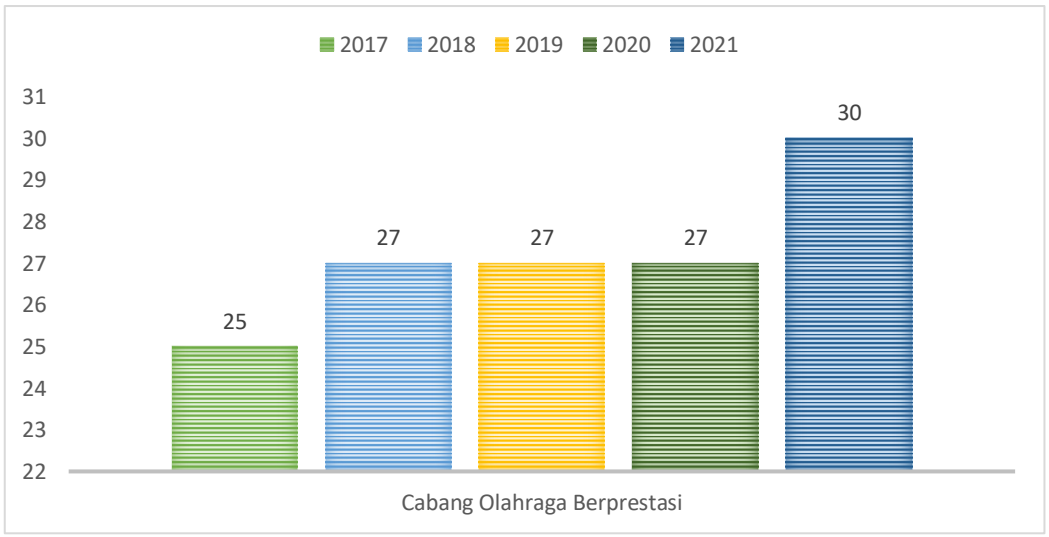
Gambar 17. 4 Jumlah Atlet Berprestasi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 6 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi

Cabang Olahraga Berprestasi	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah	25	27	27	27	30	Cabang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



Gambar 17. 5 Jumlah Cabang Olahraga Berprestasi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 7 Organisasi Kepemudaan yang Dibina

Organisasi Kepemudaan yang Dibina	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase organisasi kepemudaan yang dibina	65	65	65	65	65	%
Organisasi kepemudaan yang dibina	13	13	13	13	13	Organisasi
Total keseluruhan organisasi kepemudaan	20	20	20	20	20	Organisasi

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 8 Pemuda yang Aktif Berwirausaha

Pemuda yang Aktif Berwirausaha	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pemuda yang aktif berwirausaha	7,9466096	7,5806963	7,2315077	9,4902397	9,052785	%
Jumlah pemuda yang aktif berwirausaha	28.835	28.955	29.075	29.195	29.315	Orang
Jumlah pemuda usia 16-30 tahun	362.858	381.957	402.060	307.631	323.823	Orang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 9 Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	100	100	100	100	%
Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	2	2	2	2	Kegiatan
Total keseluruhan pelatihan kewirausahaan	2	2	2	2	Kegiatan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 10 Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas

Sarana dan Prasarana Olahraga yang Berkualitas	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang berkualitas	100	100	100	100	100	%
Sarana dan Prasarana olahraga yang berkualitas	2	2	2	3	5	Unit
Total keseluruhan sarana dan prasarana olahraga	2	2	2	3	5	Unit

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 11 Kualitas Organisasi Pemuda

Kualitas Organisasi Pemuda	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase kualitas organisasi pemuda	65	65	65	65	65	%
Kualitas organisasi pemuda	13	13	13	13	13	
Total keseluruhan organisasi pemuda	20	20	20	20	20	Orang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 12 Pemuda Mandiri

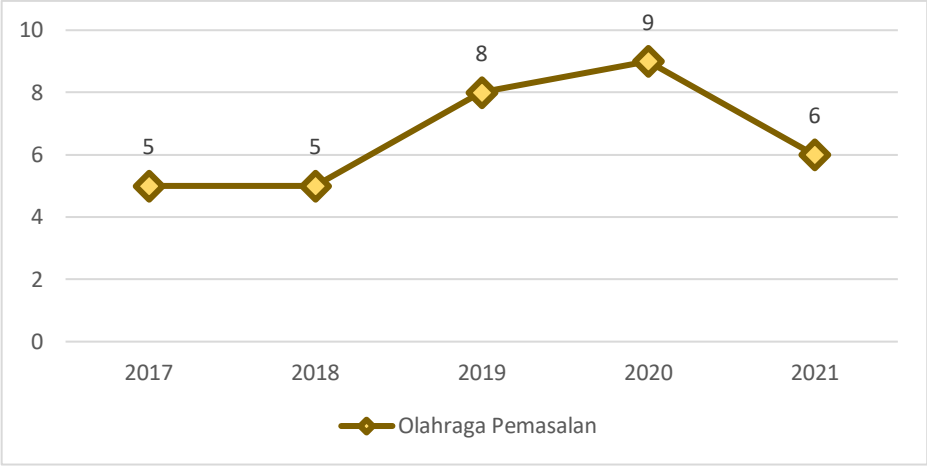
Pemuda Mandiri	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pemuda mandiri	7,9466096	7,5806963	7,2315077	9,4902397	9,052785	%
Jumlah pemuda mandiri	28.835	28.955	29.075	29.195	29.315	Orang
Jumlah pemuda usia 16-30 tahun	362.858	381.957	402.060	307.631	323.823	Orang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 13 Olahraga Pemasalan

Olahraga Pemasalan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Olahraga pemasalan	5	5	8	9	6	Olahraga

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



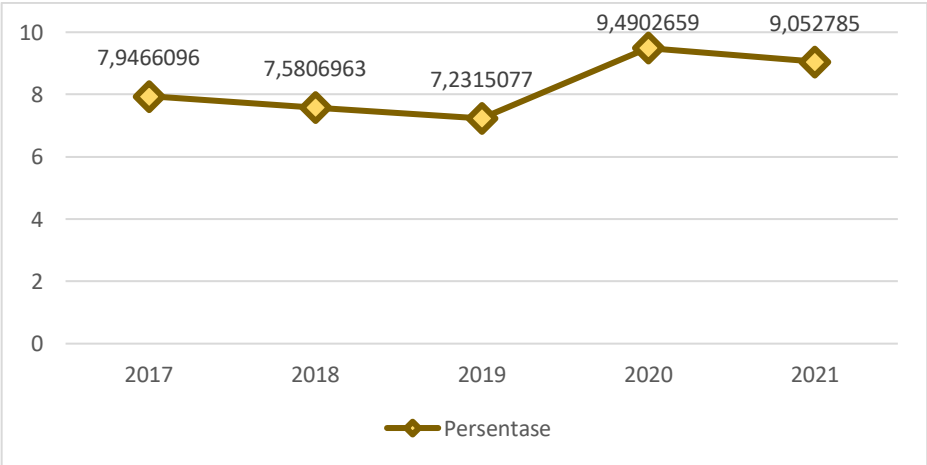
Gambar 17. 6 Persentase olahraga pemasalan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 14 Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	7,95	7,58	7,23	9,49	9,05	%
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi	28.835	28.955	29.075	29.195	29.315	Pemuda
Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten / Kota	362.858	381.957	402.060	307.631	323.823	Pemuda

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



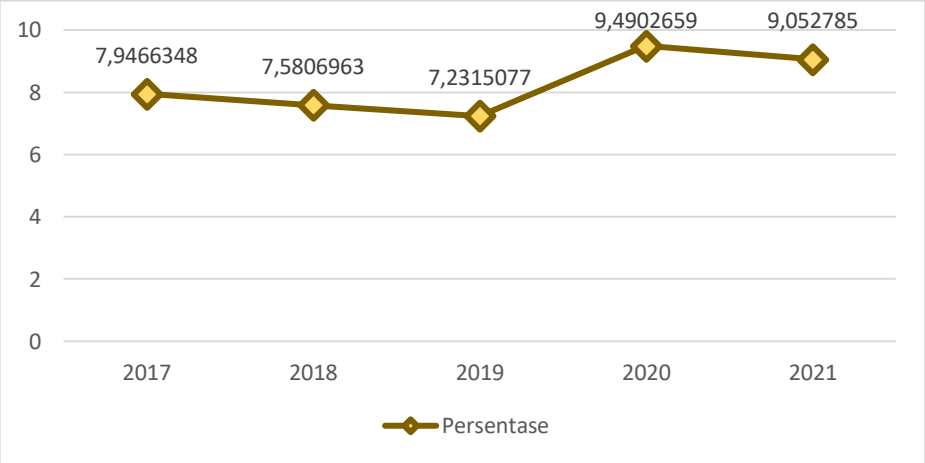
Gambar 17. 7 Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 15 Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	7,95	7,58	7,23	9,49	9,05	%
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten/Kota	28.835	28.955	29.075	29.195	29.315	Pemuda
Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten / Kota	362.858	381.957	402.060	307.631	323.823	Pemuda

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



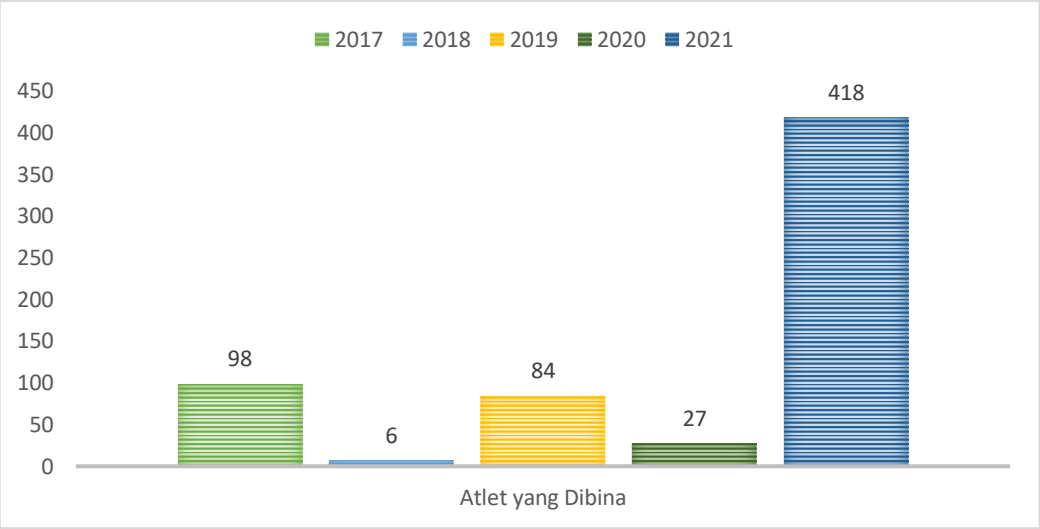
Gambar 17. 8 Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 16 Jumlah Atlet yang Dibina

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah atlet yang dibina	98	6	84	27	418	Cabang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



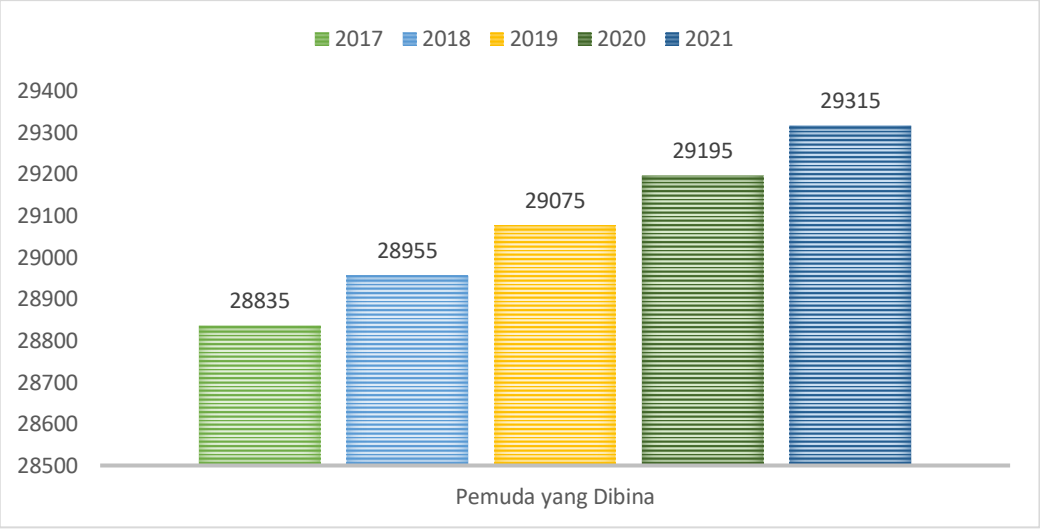
Gambar 17. 9 Jumlah Atlet yang Dibina

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 17 Jumlah Pemuda yang Dibina

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah pemuda yang dibina	28.835	28.955	29.075	29.195	29.315	Cabang

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga



Gambar 17. 10 Jumlah Atlet yang Dibina

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 18 Atlet Berprestasi yang Dibina

Atlet Berprestasi yang Dibina	2019	2021	Satuan
Jumlah atlet berprestasi yang dibina	84	50	Pemuda
Jumlah seluruh atlet berprestasi	84	50	Pemuda

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 17. 19 Pengurus Organisasi Pramuka Daerah yang Aktif

Atlet Berprestasi yang Dibina	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase pengurus organisasi pramuka daerah yang aktif	100	100	100	100	100	%
Jumlah pengurus organisasi pramuka daerah yang aktif	84	84	84	84	84	Pemuda
Jumlah pengurus organisasi pramuka daerah	84	84	84	84	84	Pemuda

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

DESKRIPSI

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah suatu tindak kekerasan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. KDRT tidak memandang jenis kelamin dan bisa menimpa suami, istri, atau anak-anak. Kekerasan yang dialami korban pun bisa mencakup tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi, psikologis, atau ancaman. Persentase rasio KDRT di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 0,0055%. Nilai tersebut mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2021, nilai persentase KDRT menjadi 0,0017%. Hal ini menunjukkan bahwasanya semakin kecil nilai persentase KDRT, maka semakin kecil pula KDRT yang dilakukan dari total seluruh rumah tangga yang ada.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan). Pada tahun 2017, banyaknya penduduk Kabupaten Pasuruan yang tercatat sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah 339.475 KK. Jumlah tersebut mengalami peningkatan disetiap tahunnya hingga mencapai 359.716 KK pada tahun 2021.

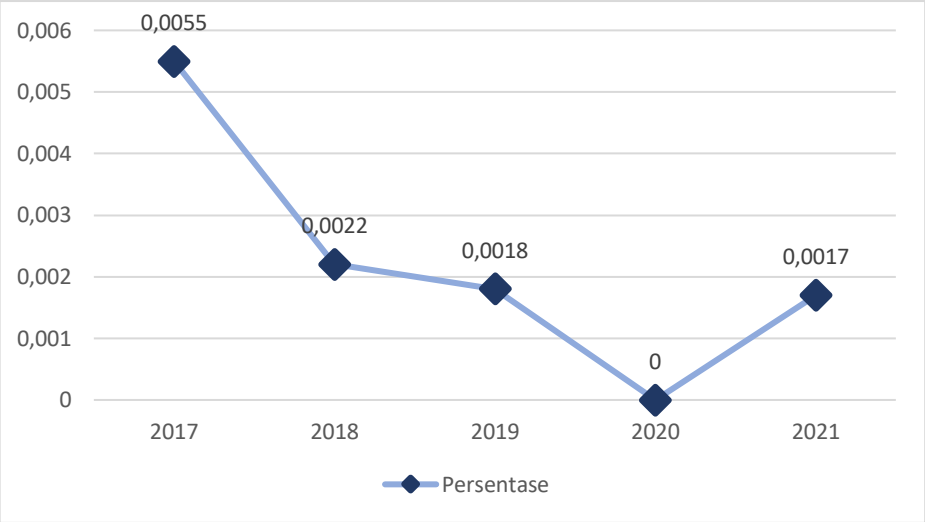
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kabupaten Pasuruan memiliki nilai IPG sebesar 90,65 pada tahun 20117. Nilai tersebut berubah secara fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2021, nilai IPG yang dimiliki Kabupaten Pasuruan

sebesar 90,89. Semakin kecil jarak nilai IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Tabel 18. 1 KDRT

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Rasio KDRT	0,0055	0,0022	0,0018	-	0,0017	%
Jumlah KDRT	24	10	8	4	8	Orang
Jumlah Rumah Tangga	435.099	439.441	441.074	0	481	Rumah Tangga

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



Gambar 18. 1 Persentase Rasio KDRT

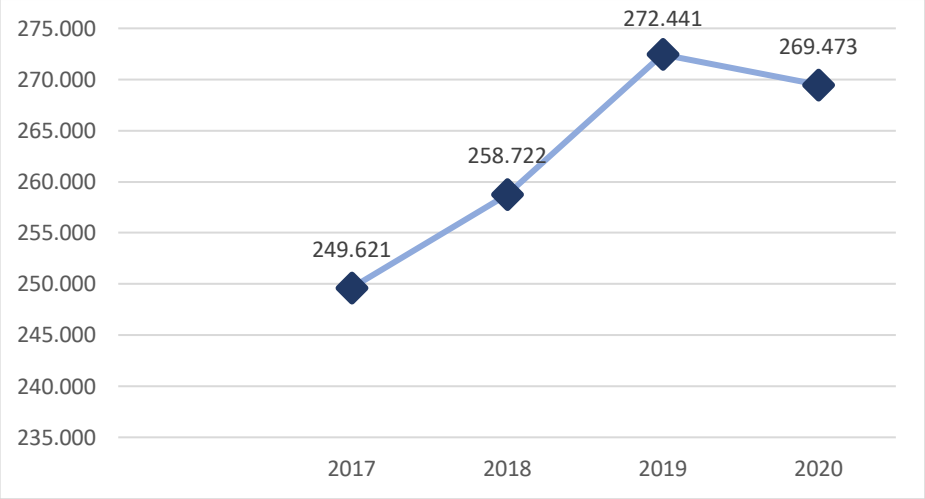
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 2 Jumlah Peserta KB Aktif

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Purwodadi	7.487	7.781	7.767	9.377	Akseptor
Tutur	10.380	10.804	0	12.822	Akseptor
Puspo	5.115	5.528	5.697	5.778	Akseptor
Lumbang	7.807	8.141	8.591	8.892	Akseptor
Pasrepan	10.624	11.941	11.761	12.419	Akseptor
Kejayan	9.874	9.665	10.502	9.582	Akseptor
Wonorejo	9.119	9.241	9.759	9.477	Akseptor
Purwosari	12.989	13.395	12.951	13.816	Akseptor
Sukorejo	13.795	14.206	14.443	14.198	Akseptor
Prigen	14.460	13.310	13.618	14.592	Akseptor
Pandaan	15.883	17.072	18.373	18.677	Akseptor
Gempol	20.057	22.315	20.650	22.359	Akseptor
Beji	11.206	11.662	21.763	12.483	Akseptor
Bangil	9.318	9.591	10.049	10.186	Akseptor
Rembang	10.464	10.866	10.403	10.932	Akseptor

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Kraton	14.426	14.514	14.326	15.083	Akseptor
Pohjentrek	4.741	4.610	4.627	4.646	Akseptor
Gondangwetan	9.257	10.206	10.831	11.256	Akseptor
Winongan	6.665	6.400	6.442	6.418	Akseptor
Grati	13.359	13.402	13.799	14.059	Akseptor
Nguling	7.405	7.847	8.070	8.259	Akseptor
Lekok	14.082	14.840	27.848	13.209	Akseptor
Rejoso	6.521	6.633	6.234	6.754	Akseptor
Tosari	4.587	4.752	3.937	4.199	Akseptor
Jumlah	**249.621**	**258.722**	**272.441**	**269.473**	**Akseptor**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



Gambar 18. 2 Jumlah Peserta KB Aktif

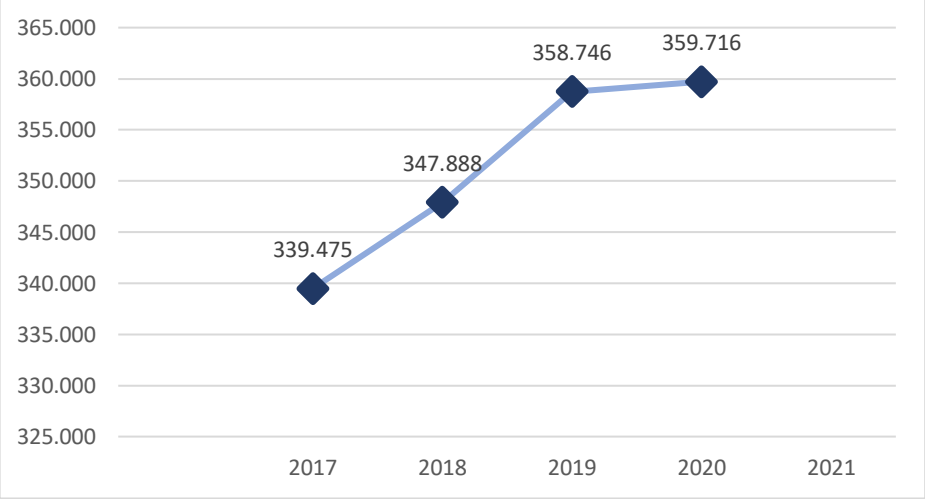
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 3 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Purwodadi	10.444	10.423	10.171	12.486	KK
Tutur	14.511	14.978	0	15.461	KK
Puspo	7.029	7.298	7.578	7.754	KK
Lumbang	10.296	10.541	10.947	11.210	KK
Pasrepan	14.595	16.117	16.501	16.712	KK
Kejayan	13.381	13.436	13.780	13.612	KK
Wonorejo	12.827	13.016	13.072	13.409	KK
Purwosari	17.398	17.892	17.550	17.898	KK
Sukorejo	17.100	17.801	18.170	18.021	KK
Prigen	18.988	21.062	19.289	18.821	KK
Pandaan	23.328	23.113	23.790	24.197	KK

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	Satuan
Gempol	27.721	28.293	28.798	29.504	KK
Beji	16.107	16.330	26.554	17.125	KK
Bangil	13.508	13.508	13.833	13.933	KK
Rembang	14.230	14.588	14.309	18.008	KK
Kraton	19.985	20.036	20.024	20.034	KK
Pohjentrek	6.207	5.605	5.729	5.886	KK
Gondangwetan	12.222	13.594	14.311	14.729	KK
Winongan	9.127	8.852	8.868	8.556	KK
Grati	17.415	17.501	17.911	18.086	KK
Nguling	11.253	11.253	11.423	11.536	KK
Lekok	17.830	18.694	32.292	18.378	KK
Rejoso	8.769	8.604	8.480	8.732	KK
Tosari	5.204	5.353	5.366	5.628	KK
Jumlah	339.475	347.888	358.746	359.716	KK

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



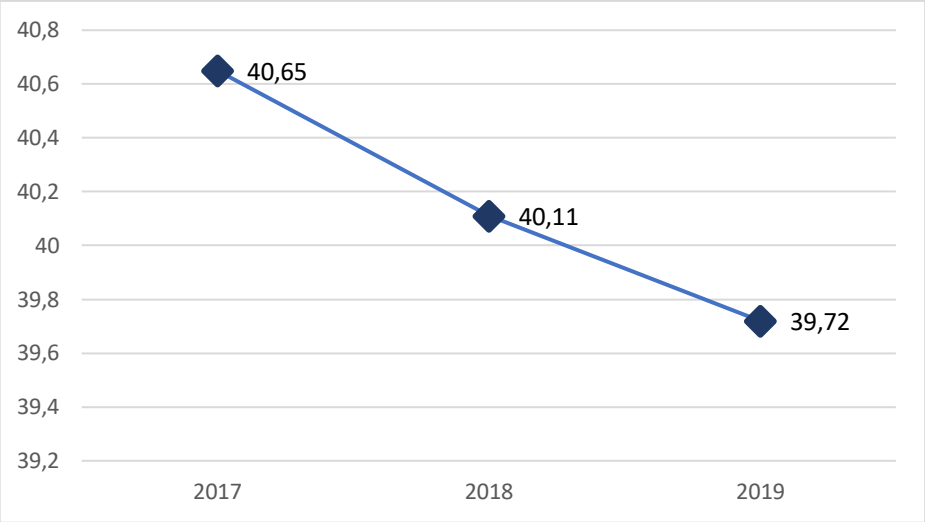
Gambar 18. 3 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 4 Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I	40,65	40,11	39,72		%
Jumlah keluarga Pra-S dan KS-I	249.621	258.722	272.441	269.473	KK
Jumlah Keluarga	487.957	494.414	497.809	0	KK

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



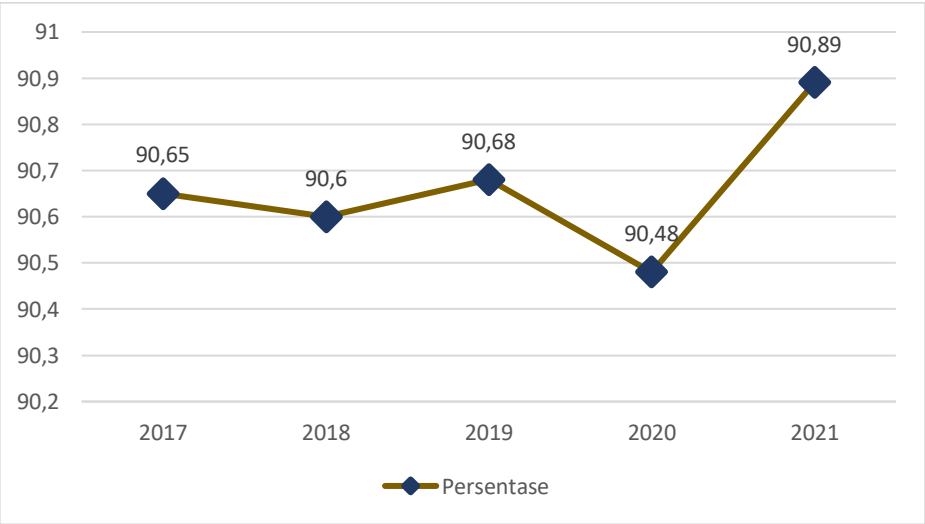
Gambar 18. 4 Persentase Tahapan Keluarga Sejahtera yang Pra-S dan KS-I

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	90,65	90,6	90,68	90,48	90,89	Nilai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



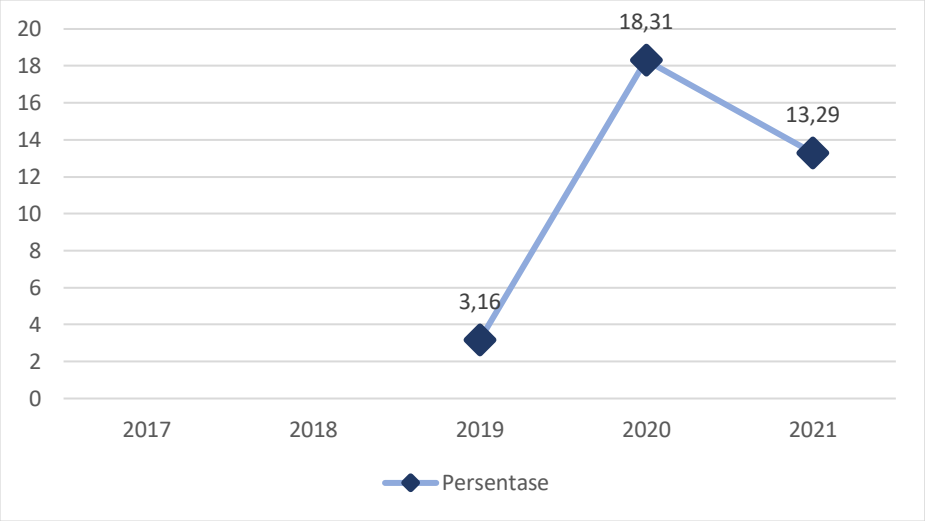
Gambar 18. 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 6 Anggaran yang Responsif Gender

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Persentase anggaran yang responsif gender	3,16	18,31	13,29	%
Jumlah anggaran yang responsif gender	37.996.522.084	277.769.419.428	201.640.145.930	Rp,
Jumlah anggaran belanja langsung	1.201.692.208.820	1.516.839.718.422	1.516.839.718.422	Rp

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



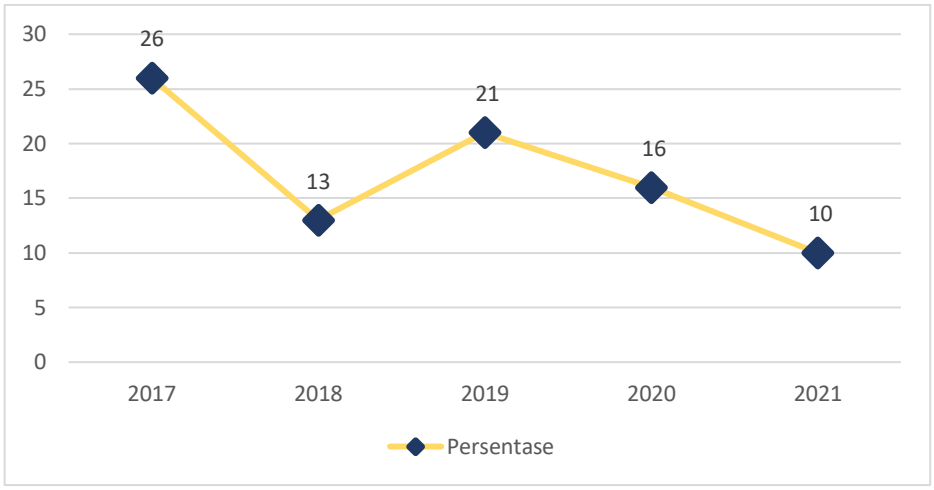
Gambar 18. 6 Persentase Anggaran yang Responsif Gender

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 7 Kekerasan Perempuan dan Anak yang Terselesaikan

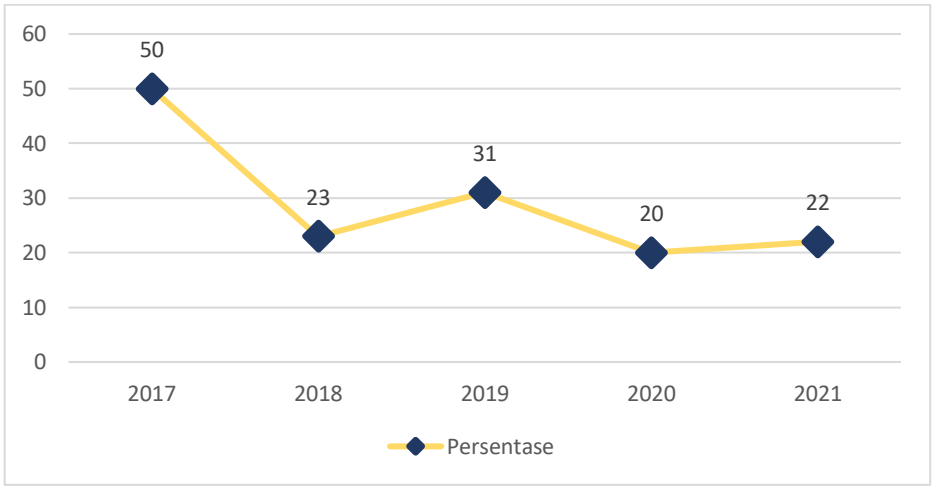
Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah kasus kekerasan perempuan yang terselesaikan	26	13	21	16	10	kasus
Jumlah kasus kekerasan anak yang terselesaikan	50	23	31	20	22	kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



Gambar 18. 7 Jumlah Kekerasan Perempuan yang Terselesaikan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



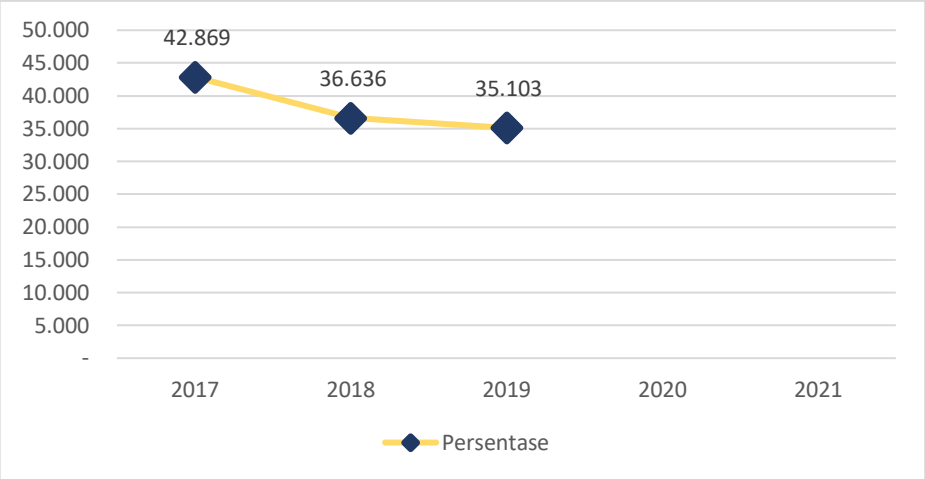
Gambar 18. 8 Jumlah Kekerasan Anak yang Terselesaikan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 8 Peningkatan Jumlah Akseptor KB Baru

Elemen	2017	2018	2019	Satuan
Persentase peningkatan jumlah akseptor KB baru	42.869	36.636	35.103	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



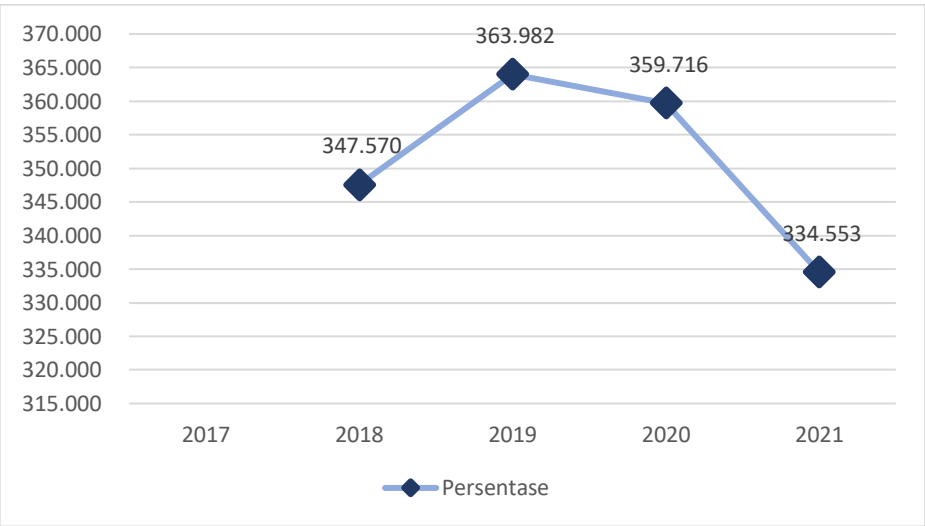
Gambar 18. 9 Peningkatan Jumlah Akseptor KB Baru

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 9 mCPR

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah pasangan usia subur		347.570	363.982	359.716	334.553	Pasangan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



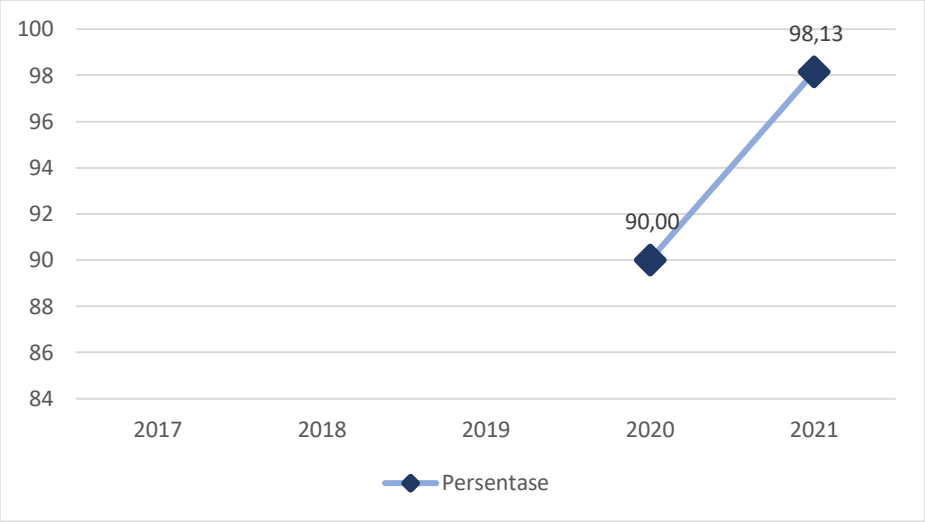
Gambar 18. 10 Jumlah Pasangan Usia Subur

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tabel 18. 10 Dokumen PPRG Yang Disampaikan

	2020	2021	Satuan
Persentase dokumen PPRG yang disampaikan	90	98,18	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana



Gambar 18. 11 Persentase Dokumen PPRG Yang Disampaikan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

DINAS RARIWISATA

DESKRIPSI

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebanyak 2.390.496 orang dan mengalami penurunan jumlah secara fluktuatif hingga akhir tahun 2021 sebanyak 1.358.385 orang. Penurunan tersebut menunjukkan semakin rendah jumlah kunjungan wisatawan, maka semakin rendah penerimaan negara yang diperoleh dari sektor pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang da-tau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pelaku usaha pariwisata adalah kegiatan masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata. Jumlah pelaku usaha pariwisata yang telah tersertifikasi berjumlah 100 orang pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 berjumlah 105 orang. Jumlah tersebut menunjukkan, semakin banyak pelaku usaha pariwisata, maka semakin baik pendapatan serta strategi penghidupan masyarakat pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Pasuruan.

Seni dan Budaya adalah produk dari kreatifitas manusia yang digunakan sebagai alat ekspresi keinginan, pemikiran, dan pemahaman terhadap alam lingkungan yang memuat unsur keindahan dan kebenaran subjektif maupun universal. Jumlah seni dan budaya yang terpelihara di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 berjumlah 17 jenis dan mengalami

penurunan secara fluktuatif hingga 2020 sebesar 16 jenis. Hal tersebut menunjukkan, semakin rendah jumlah seni dan budaya yang terpelihara. maka semakin rendah pelestarian seni dan budaya yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan.

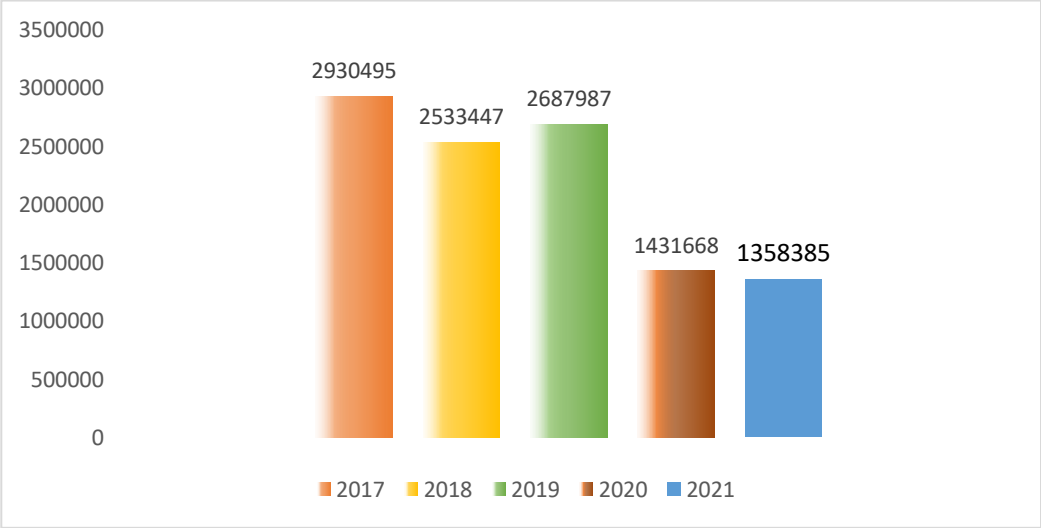
Kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan mempunyai tujuan yang bersama. Pelestarian dan pengembangan kelompok seni budaya di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 berjumlah 419 kelompok seni dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebanyak 422 kelompok seni. Peningkatan tersebut menunjukkan, semakin tinggi jumlah kelompok seni, maka semakin tinggi kecintaan seni budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan agar Budaya, Struktur cagar budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat da-tau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendudukan, agama, da-tau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 berjumlah 1 unit dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2020 sebanyak 16 unit. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi jumlah unit, maka semakin baik pelestarian yang telah dillakukan pada benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 19. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.390.496	2.533.447	2.687.987	185.312	1.358.385	Orang

Sumber: Dinas Pariwisata



Gambar 19. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 2 Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Terstandarisasi

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang Terstandarisasi	-	-	7	4	ODTW

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 3 Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang Tersertifikasi	-	-	100	105	Orang

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 4 Jumlah Masyarakat/Pelaku yang Mengikuti Pembinaan Kepariwisataan

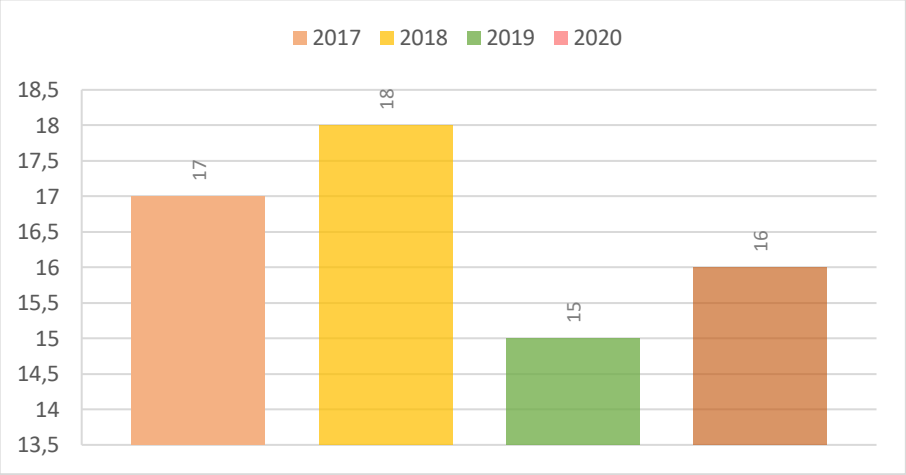
	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Masyarakat/Pelaku yang Mengikuti Pembinaan Kepariwisataan	-	-	100	105	Orang

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 5 Jumlah Seni dan Budaya yang Terpelihara

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Seni dan Budaya yang Terpelihara	17	18	15	16	Jenis

Sumber: Dinas Pariwisata



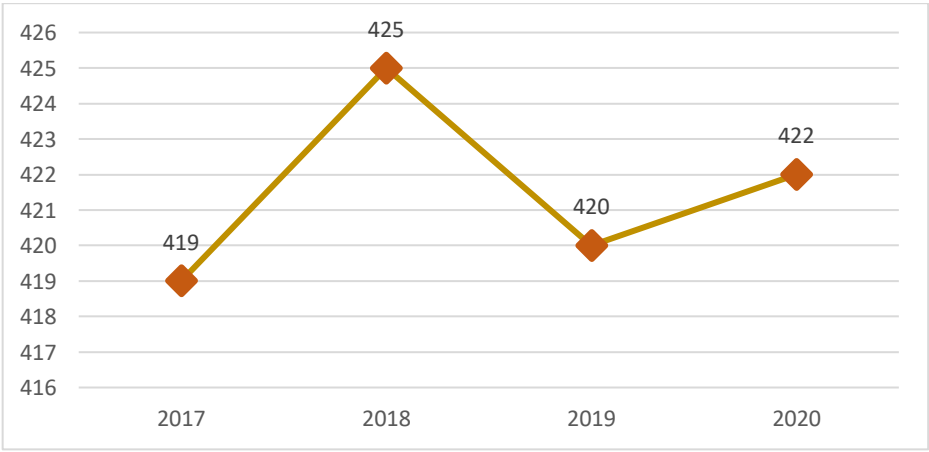
Gambar 19. 2 Jumlah Seni dan Budaya yang Terpelihara

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 6 Pelestarian Dan Pengembangan Kelompok Seni Budaya

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah kelompok seni dan budaya yang dilestarikan	419	425	420	422	Kel Seni
Jumlah keseluruhan kelompok seni	419	425	420	422	Kel Seni

Sumber: Dinas Pariwisata



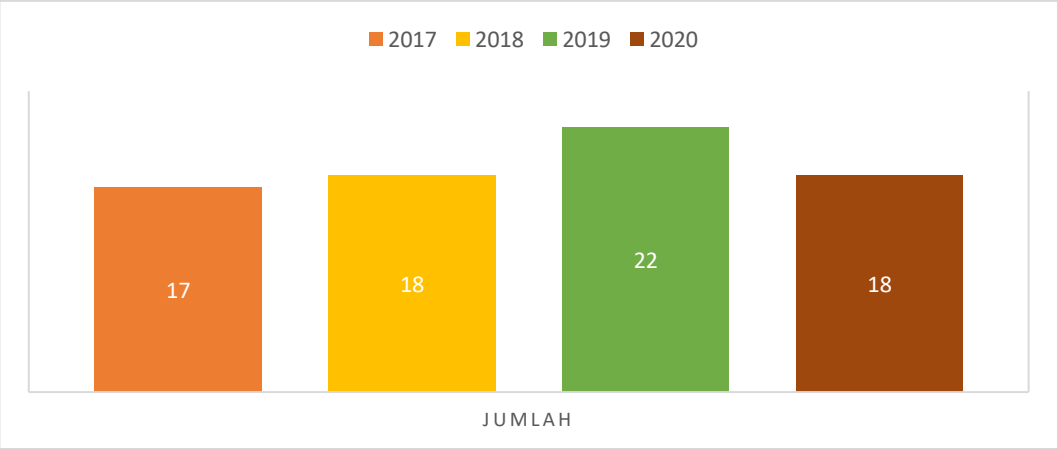
Gambar 19. 3 Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang Dilestarikan

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 7 Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya	17	18	22	18	Kali

Sumber: Dinas Pariwisata



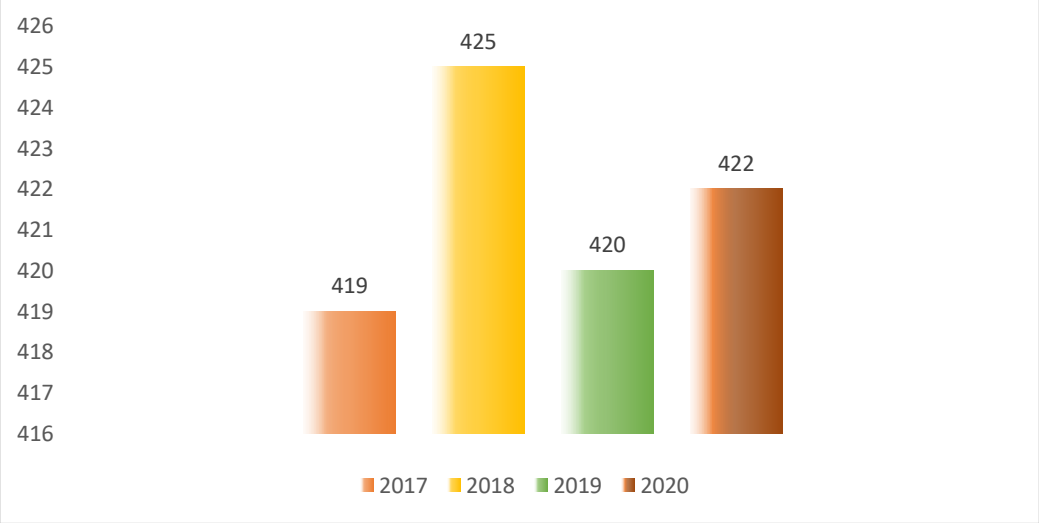
Gambar 19. 4 Penyelenggaraan Even Seni dan Budaya

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 8 Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional	419	425	420	422	Kel Seni

Sumber: Dinas Pariwisata



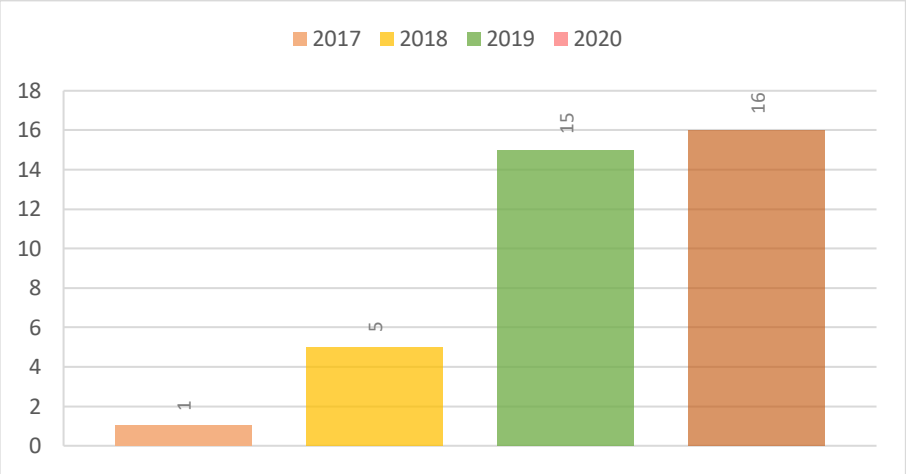
Gambar 19. 5 Jumlah Kelompok Kesenian Tradisional

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 9 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	1	5	15	16	Unit

Sumber: Dinas Pariwisata



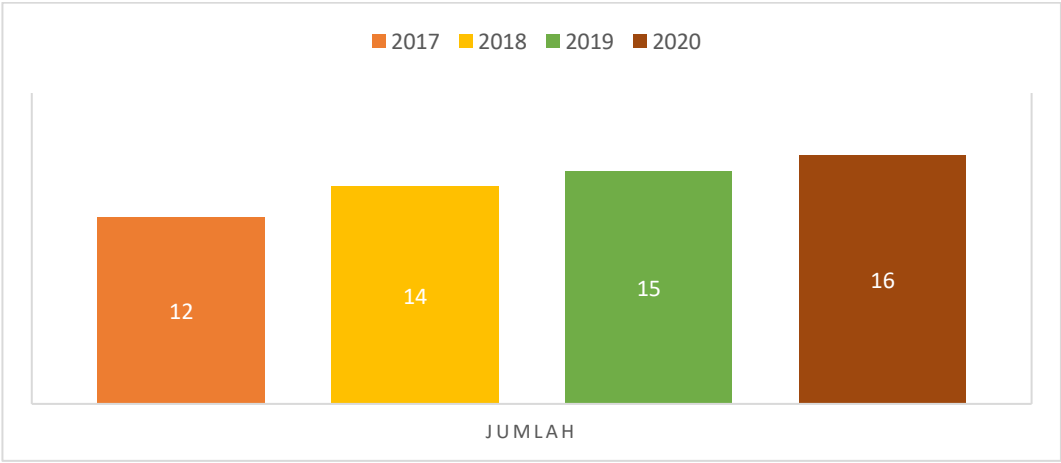
Gambar 19. 6 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 10 Karya Budaya yang Direvitalisasi

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi	12	14	15	16	Jenis

Sumber: Dinas Pariwisata



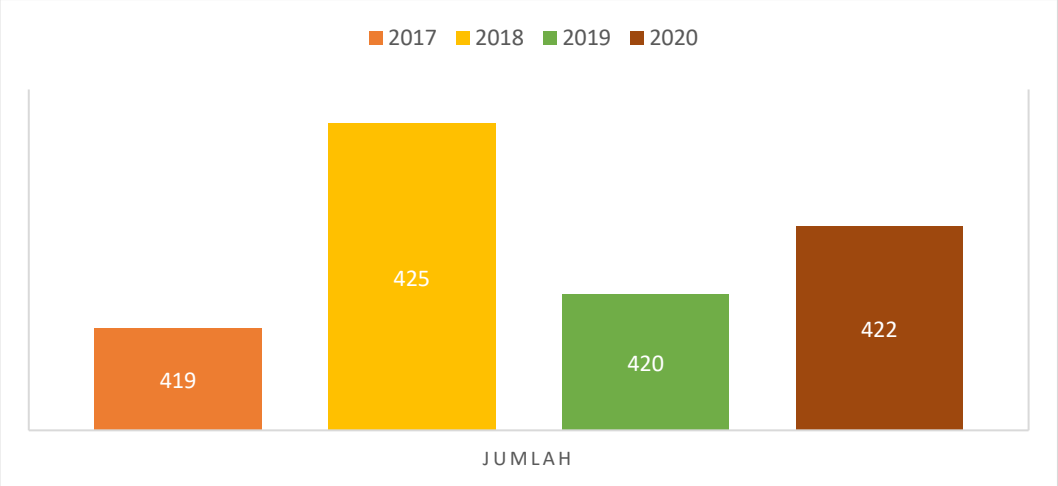
Gambar 19. 7 Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi

Sumber: Dinas Pariwisata

Tabel 19. 11 Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi	419	425	420	422	Kelompok

Sumber: Dinas Pariwisata



Gambar 19. 8 Jumlah Karya Budaya yang Diinventarisasi

Sumber: Dinas Pariwisata

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DESKRIPSI

Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Sedangkan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah. Pada tahun 2017, di Kabupaten Pasuruan sebanyak 5794 dan terus mengalami peningkatan jumlah hingga akhir tahun 2021 sebanyak 7.978 IKM. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah IKM, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan sertifikat asal barang, yang mana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor. SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, da-tau diolah di Indonesia. Pada tahun 2017, penerbitan SKA di Kabupaten Pasuruan berjumlah 2.860 dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga tahun 2021 sebanyak 2.675 SKA. Hal tersebut menunjukkan semakin banyak jumlah SKA yang diterbitkan, maka semakin tinggi pula nilai ekspor non migas (US$ dalam juta).

Industri adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan/pembuatan bahan baku da-tau barang jadi menjadi barang

dengan nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pada tahun 2017, pertumbuhan PDRB sektor industri di Kabupaten Pasuruan sebesar 5,71% dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga tahun 2021 sebesar 5,27%. Nilai tersebut menunjukkan semakin rendah persentase, maka semakin lambat pertumbuhan PDRB sektor industri di Kabupaten Pasuruan.

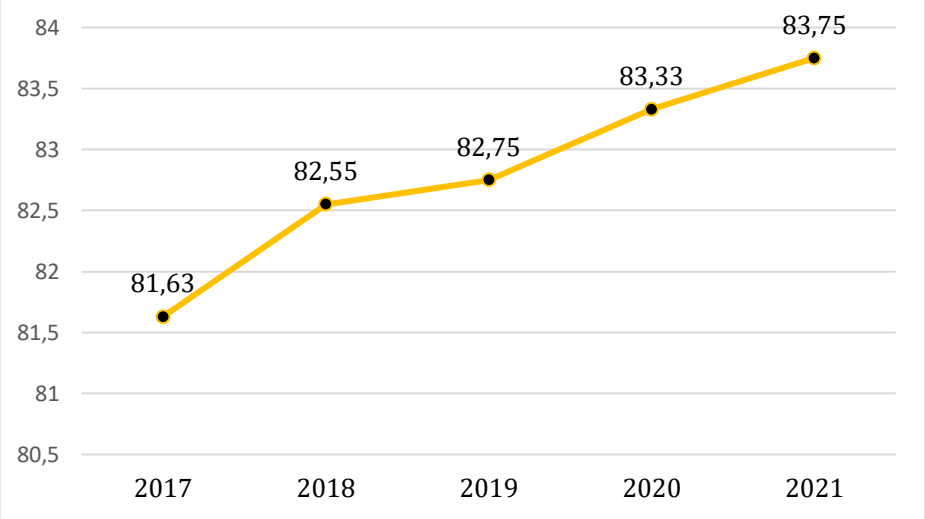
Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kegiatan. Nilai produksi sektor industri di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar Rp54.696.836,50 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar Rp65.160.420,00. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tinggi nilai, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diproduksi di Kabupaten Pasuruan.

Tenaga kerja adalah orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsungd alam proses produksi barang/jasa. Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Pasuruan sebanyak 2.584 orang dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 mencapai 2.638 orang. Nilai tersebut menunjukkan semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak pula

Tabel 20. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan	81,63	82,55	82,75	83,33	83,75	Nilai

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



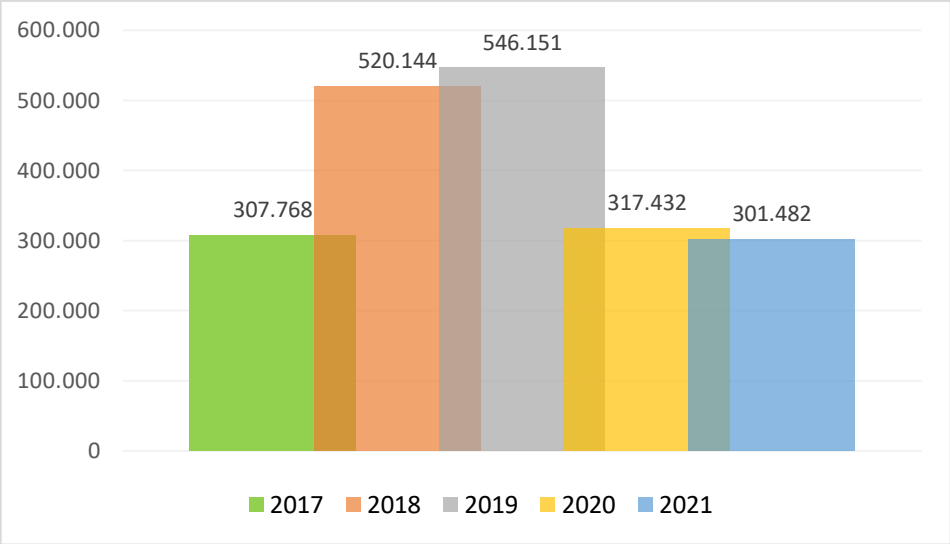
Gambar 20. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perpustakaan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 2 Pengunjung Perpustakaan Menurut Layanan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah pengunjung perpustakaan menurut layanan	307.768	520.144	546.151	317.432	301.482	Orang
PU Tosari	6.504	15.799	18.695	11.059	10.060	Orang
PU Pandaan	21.158	30.894	39.091	21.894	20.974	Orang
PU Grati	36.130	40.330	45.942	28.231	27.335	Orang
PU Nguling	25.130	28.130	30.354	19.691	18.595	Orang
PU Bangil	15.683	16.758	18.130	11.730	10.530	Orang
PU Gdwetan	26.330	28.905	31.552	20.233	19.133	Orang
PU Purwosari	40.174	43.399	45.909	30.379	27.688	Orang
PU Rembang	-	3.400	3.949	2.380	1.932	Orang
Keliling	136.659	312.529	312.529	171.835	165.235	Orang

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



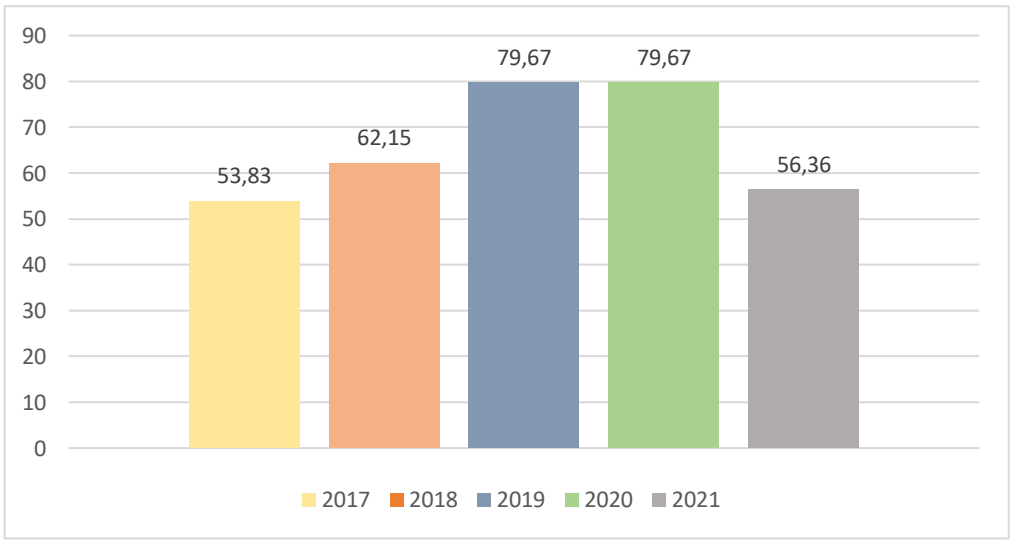
Gambar 20. 2 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Layanan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 3 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan	53,83	62,15	79,67	79,67	56,36	Nilai

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Gambar 20. 3 Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 4 Perpustakaan yang Terakreditasi A

Perpustakaan yang Terakreditasi A	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah perpustakaan yang terakreditasi A	-	-	-	6	4	Unit
Jumlah seluruh perpustakaan	839	843	844	844	1.594	Unit

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 5 Perpustakaan yang Memenuhi Standar Minimal

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase perpustakaan yang memenuhi standar minimal	-	-	5	-	-	%
Jumlah perpustakaan yang memenuhi standart minimal	-	-	5	-	1.594	Unit
Jumlah seluruh perpustakaan	839	843	844	844	1.594	Unit

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 6 Kategori Pengelolaan Arsip Statis

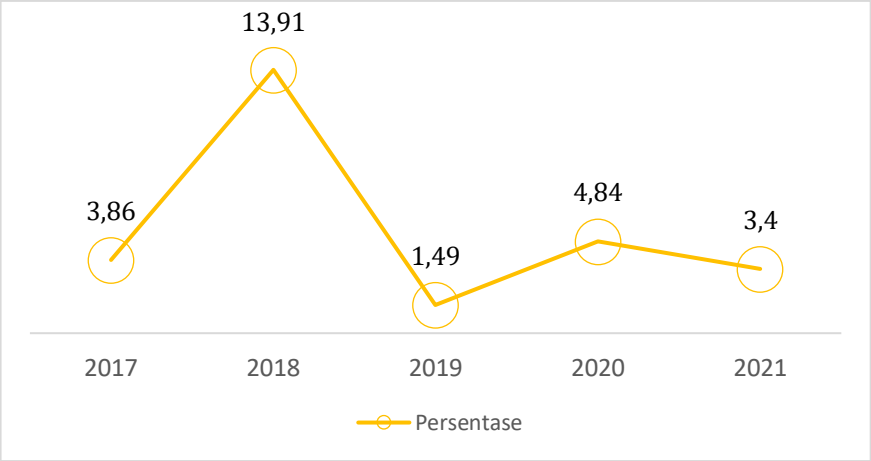
	2018	2019	Satuan
Kategori Pengelolaan Arsip Statis	580	205	Kategori

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 7 Persentase Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsi Daerah

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah	3,86	13,91	1,49	4,84	3,40	%
Jumlah penyelamatan dan pelestarian arsip daerah pada tahun t	387	1.392	150	485	349	Kali

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Gambar 20. 4 Persentase Meningkatnya Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 8 Persentase Arsip Daerah Tersimpan Dalam Keadaan Baik

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase arsip daerah tersimpan dalam keadaan baik	100	100	100	100	100	%
Jumlah arsip daerah tersimpan dalam keadaan baik	387	1.392	150	485	349	Arsip
Jumlah seluruh arsip daerah yang tersimpan	387	1392	150	485	349	Arsip

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Gambar 20. 5 Arsip Daerah Tersimpan dalam Keadaan Baik

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 9 Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	100	100	100	100	%
Jumlah unit kerja yang menerapkan arsip secara baku	149	149	149	149	OPD
Jumlah unit kerja yang dibina	149	149	149	149	OPD

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Gambar 20. 6 Pengelolaan Arsip Unit Kerja Secara Baku

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 10 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Tahun	Nilai
2021	62,18

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 11 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

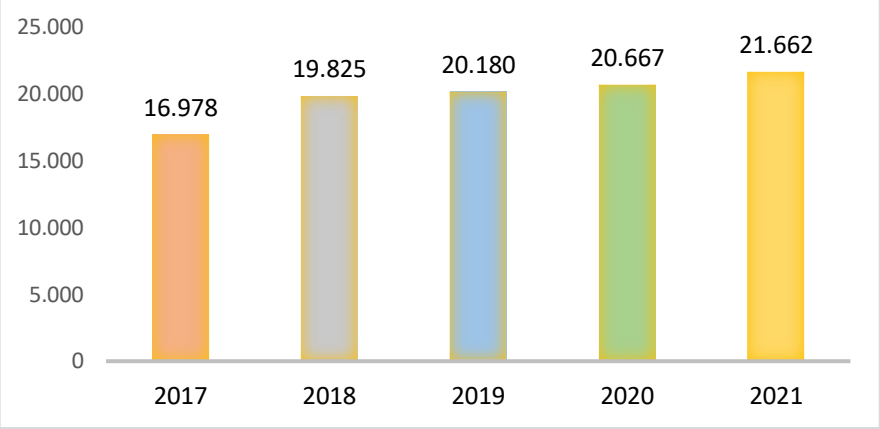
	Nilai
2021	8

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 12 Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	100	100	100	100	%
Jumlah Arsip yang telah dibuatkan daftar arsip	16.978	19.825	20.180	20.667	21.662	Arsip
Jumlah Seluruh Arsip	16.978	19.825	20.180	20.667	21.662	Arsip

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Gambar 20. 7 Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 13 Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan Dalam SIKN Melalui JIKN

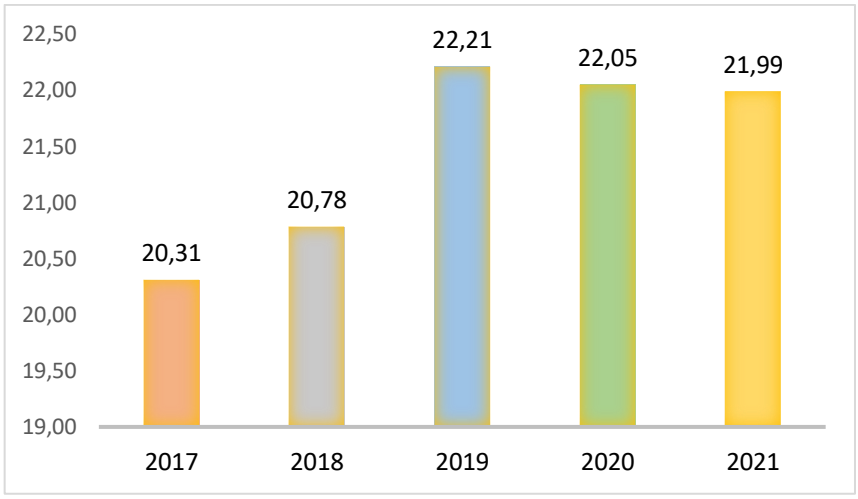
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN Melalui JIKN	-	-	0,01	-	-	%
Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	-	-	2	-	-	Arsip
Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis	387	1.972	355	485	349	Arsip

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 14 Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah
2017	20,31
2018	20,78
2019	22,21
2020	22,05
2021	21,99

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

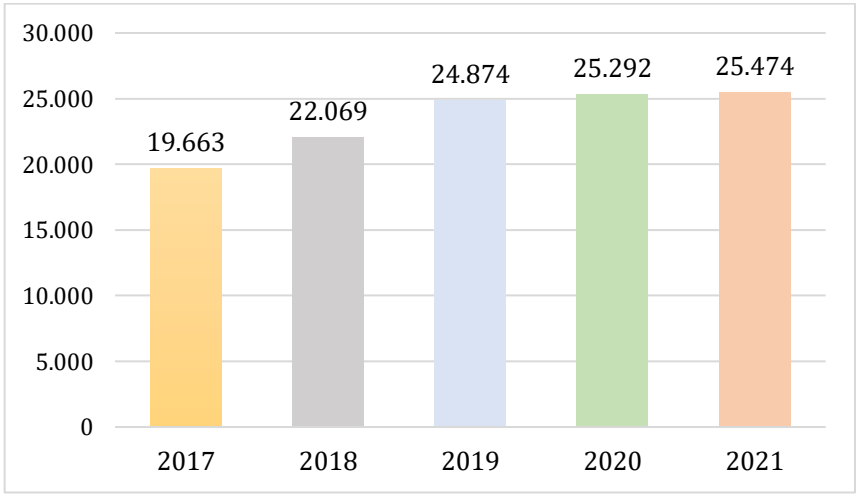


Gambar 20. 8 Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Tabel 20. 15 Jumlah Judul Buku

	Jumlah Judul Buku
2017	19.663
2018	22.069
2019	24.874
2020	25.292
2021	25.474

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



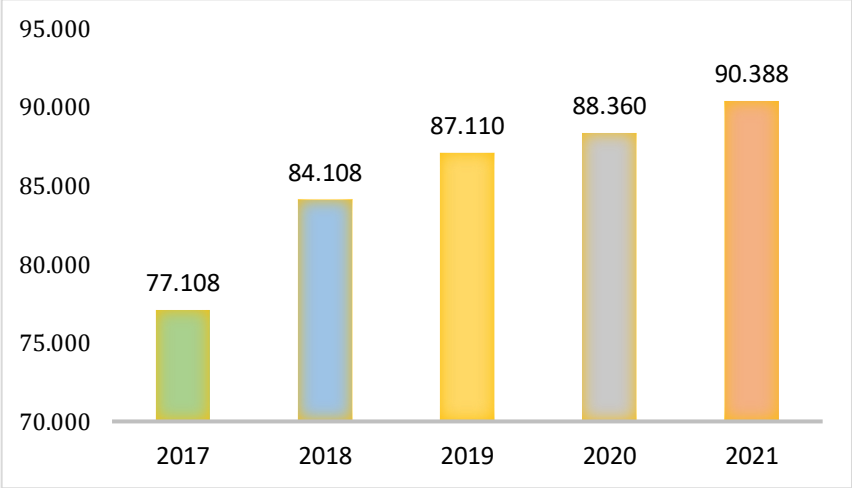
Gambar 20. 9 Jumlah Judul Buku

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 16 Jumlah Koleksi Buku

	Jumlah Koleksi Buku
2017	77.108
2018	84.108
2019	87.110
2020	88.360
2021	90.388

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



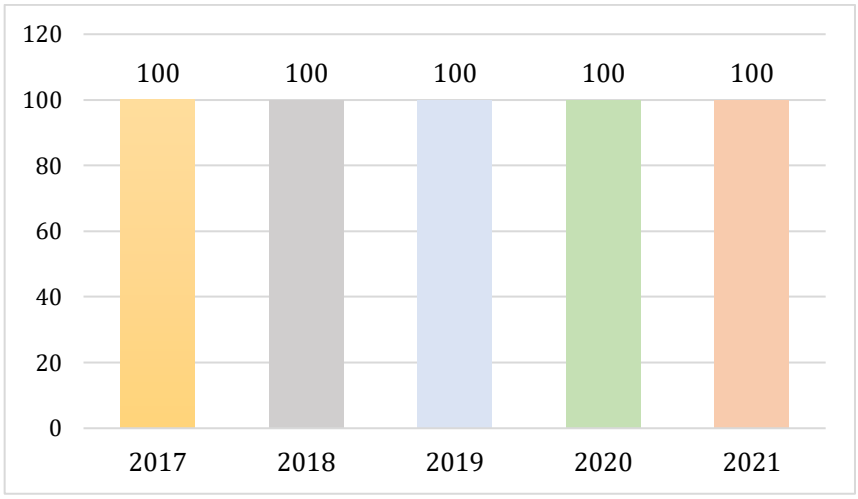
Gambar 20. 10 Jumlah Koleksi Buku

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 20. 17 Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

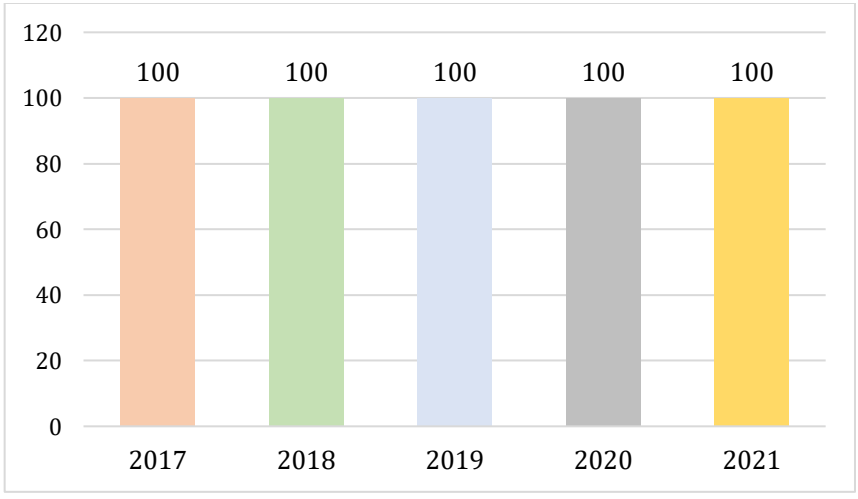


Gambar 20. 11 Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Tabel 20. 18 Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban

	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Gambar 20. 12 Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DESKRIPSI

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) haruslah memiliki suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Persentase OPD yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik merupakan suatu nilai yang menggambarkan seberapa banyak OPD yang memiliki dokumen perencanaan yang baik dari keseluruhan OPD yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 84% OPD sudah memiliki dokumen perencanaan yang baik. Nilai tersebut terus mengalami peningkatan hingga mencapai 94,64% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya semakin banyaknya OPD yang memiliki dokumen perencanaan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Nilai SAKIP perencanaan Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 22,75. Nilai tersebut mengalami perubahan secara fluktuatif, hingga didapat nilai sebesar 24,5 pada tahun 2021.

Indeks Kesalehan Sosial (IKS) adalah kegiatan pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kesalehan sosial. Hasil pengukuran dari Indeks Kesalehan Sosial berupa angka yang ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Nilai IKS Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 72,2.

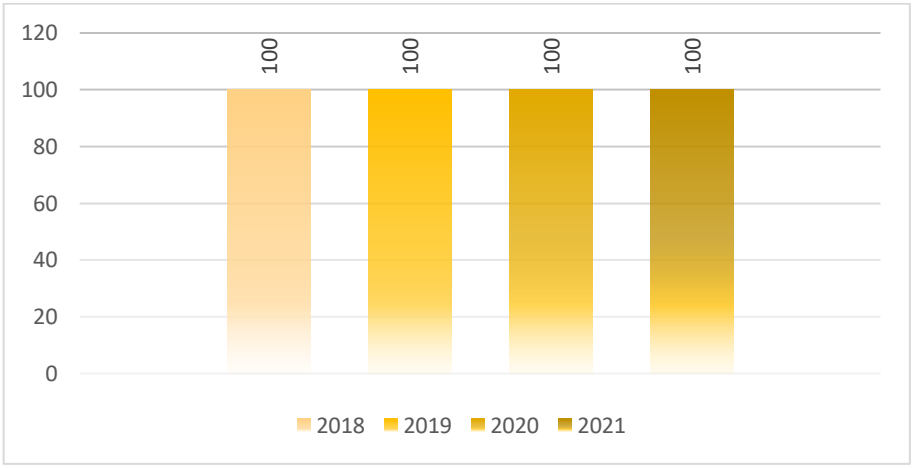
Mengalami peningkatan menjadi 76,6 pada tahun berikutnya dan menjadi 78 pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada rentan waktu 2018 hingga 2021, Kabupaten Pasuruan memiliki nilai IKS pada rentan 60,01≤x≤80 yang mana nilai tersebut termasuk dalam kategori tinggi.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson (IW) menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Dasar perhitungan indeks williamson adalah pendapatan regional per kapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Kabupaten Pasuruan memiliki nilai indeks williamson sebesar 0,254 pada tahun 2017. Nilai tersebut mengalami peningkatan disetiap tahunnya, hingga mencapai 0,272 pada tahun 2021. Nilai indeks williamson Kabupaten Pasuruan mendekati 0 (nol), yang mana menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Kabupaten Pasuruan semakin kecil.

Tabel 21. 1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai dengan Regulasi

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan regulasi	100	100	100	100	%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai regulasi	2	3	2	3	Dokumen
Jumlah seluruh dokumen perencanaan	2	3	2	3	Dokumen

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



Gambar 21. 1 Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Sesuai Dengan Regulasi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 2 Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Ekonomi yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik

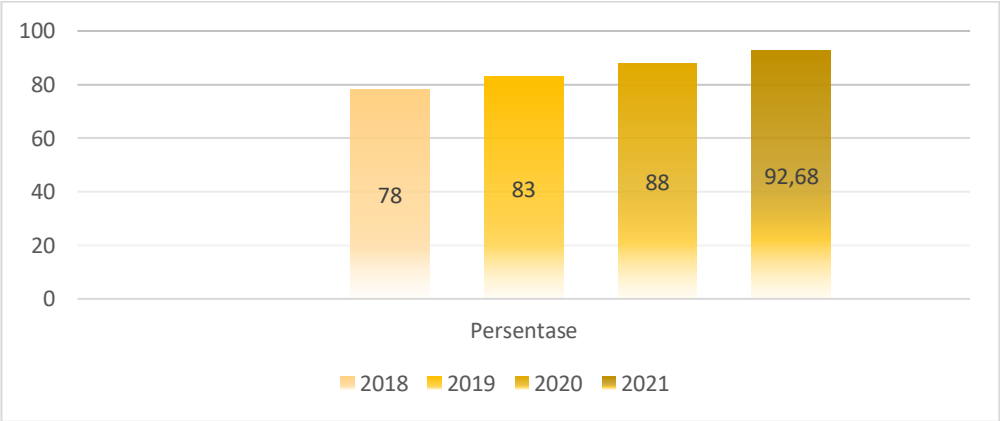
Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang ekonomi yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	89	89	89	100	%
Jumlah OPD lingkup bidang ekonomi yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	8	8	8	9	OPD
Jumlah seluruh OPD lingkup bidang ekonomi	9	9	9	9	OPD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 3 Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Sosial Budaya yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	78	83	88	92.68	%
Jumlah OPD lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	32	34	36	38	OPD
Jumlah seluruh OPD lingkup bidang sosial	41	41	41	41	OPD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



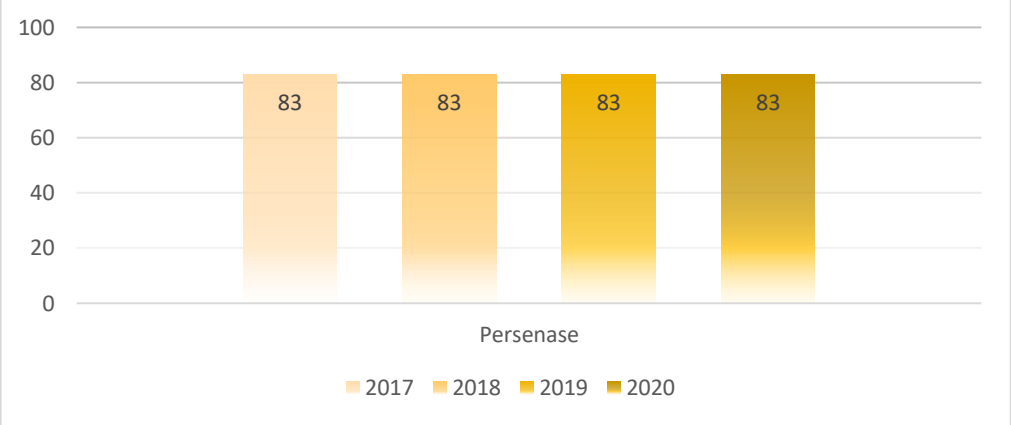
Gambar 21. 2 Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 4 Persentase Perangkat Daerah Lingkup Bidang Prasarana Wilayah yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	83	83	83	83	%
Jumlah OPD lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	5	5	5	5	OPD
Jumlah seluruh OPD lingkup bidang prasarana wilayah	6	6	6	6	OPD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



Gambar 21. 3 Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 5 Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Dokumen Perencanaan yang Baik

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Perangkat Daerah lingkup bidang prasarana wilayah yang mempunyai dokumen perencanaan yang baik	-	84	88	94.64	%
Jumlah seluruh OPD	56	56	56	56	OPD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 6 Persentase Kesuaian Penyusunan Dokumen Perencanaan Sesuai Ketentuan

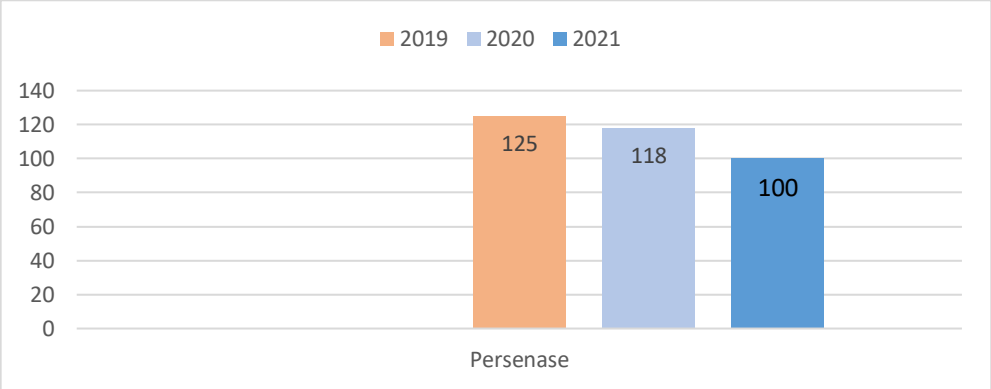
Elemen	2021	Satuan
Persentase kesuaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	100	%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 7 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	125	118	100	%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

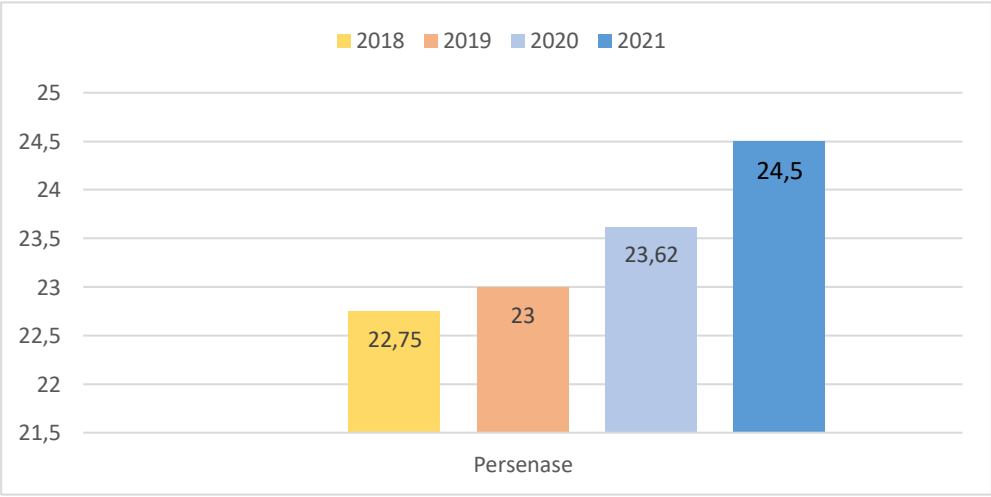


Gambar 21. 4 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 8 Nilai SAKIP Perencanaan

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Nilai SAKIP Perencanaan	22,75	23	23,62	24,5	%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



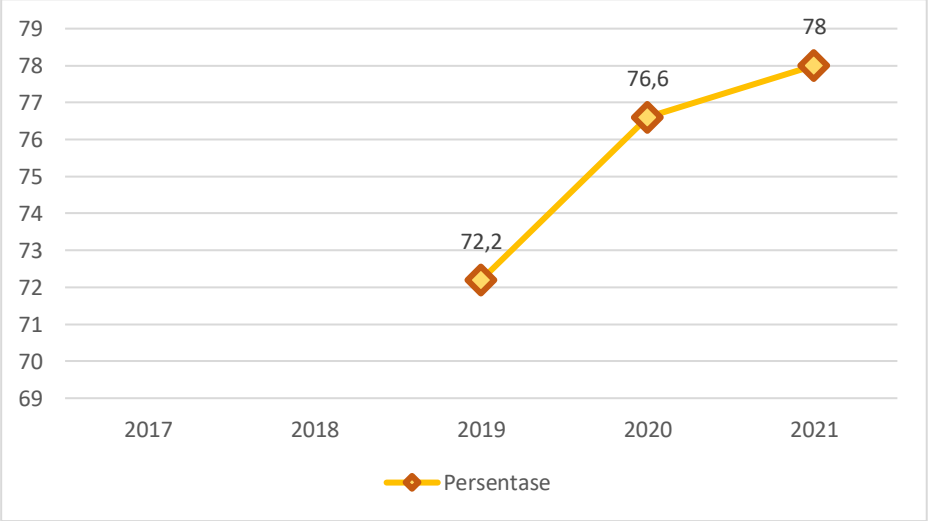
Gambar 21. 5 Nilai SAKIP Perencanaan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 9 Indeks Kesalehan Sosial

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kesalehan Sosial	72,2	76,6	78	%
Dimensi Kepedulian Sosial	41,2	41,4	36,6	%
Dimensi Kepedulian Lingkungan	31	35,2	41,4	%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



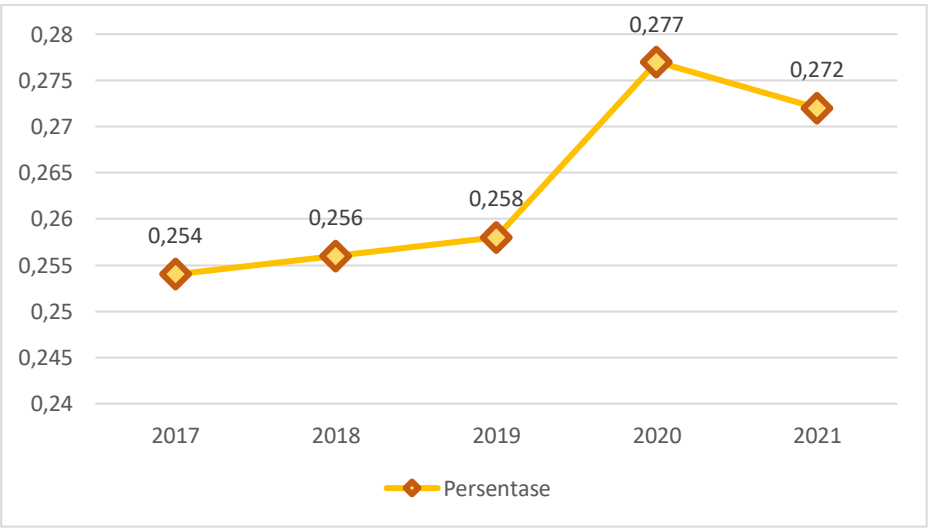
Gambar 21. 6 Indeks Kesalehan Sosial

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 10 Indeks Williamson

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Williamson	0,254	0,256	0,258	0,277	0,272	Nilai

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah



Gambar 21. 7 Indeks Williamson

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 11 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	2	2	2	2	Dokumen

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 12 Prosentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Prsasarana Wilayah dan Tata Ruang yang Memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Baik

Elemen	2020	2021	Satuan
Prosentase perangkat daerah bidang ekonomi, sosial budaya, prasarana wilayah dan tata ruang yang memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang baik	100	100	%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

Tabel 21. 13 Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan

Elemen	2021	Satuan
Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100	%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah

DINAS SOSIAL

DESKRIPSI

Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan telah menyelenggarakan pendataan terkait beberapa elemen yang dapat digunakan untuk mengukur bagaimana keadaan sosial di Kabupaten Pasuruan. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 adalah sebanyak 165.757 orang. Menindaklanjuti hal tersebut diadakan penanganan dan dilakukan pelayanan terhadap lebih dari 90 persen PMKS sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan sosial agar PMKS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tercatat kurang lebih 3.160 orang telah menerima bantuan.

Selain masalah kesejahteraan sosial, terdata sekitar 151430 penduduk miskin di Kapbupaten Pasuruan pada tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2020 adalah 6,24 persen.

Tabel 22. 1 Persentase Jumlah PMKS

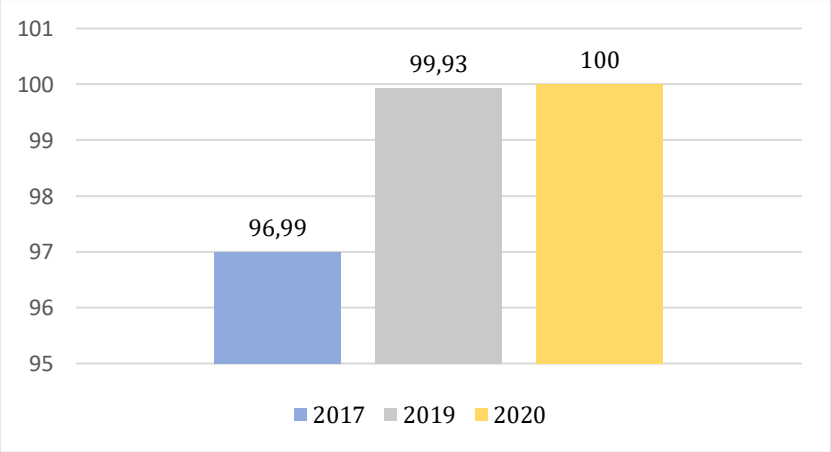
	Jenis Kelamin	Jumlah PMKS
Satuan		Orang
2017	Laki-Laki	59582
	Perempuan	61975
	Total	121379
2018	Laki-Laki	1265
	Perempuan	110745
	Total	112010
2019	Laki-Laki	1004
	Perempuan	110345
	Total	111511
2020	Laki-Laki	320
	Perempuan	87453
	Total	87777
2021	Laki-Laki	1120
	Perempuan	164637
	Total	165757

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 2 Persentase Penanganan PMKS

	Jenis Kelamin	Persentase Penanganan PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan	Jumlah PMKS yang ada
Satuan		%	Orang	Jiwa
2017	Total	96,99	112029	115502
2019	Total	99,93	114659	114747
2020	Total	100	88076	88076

Sumber: Dinas Sosial



Gambar 22. 1 Persentase Penanganan PMKS

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 3 Persentase Pilar-Pilar yang Aktif dalam Penanganan PMKS

	Jenis Kelamin	Jumlah pilar yang aktif dalam penanganan PMKS
Satuan		Pilar
2017	Laki-Laki	182
	Perempuan	34
	Total	216
2018	Laki-Laki	85
	Perempuan	22
	Total	107
2019	Laki-Laki	65
	Perempuan	25
	Total	90
2020	Laki-Laki	69
	Perempuan	25
	Total	94
2021	Laki-Laki	69
	Perempuan	25
	Total	94

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 4 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

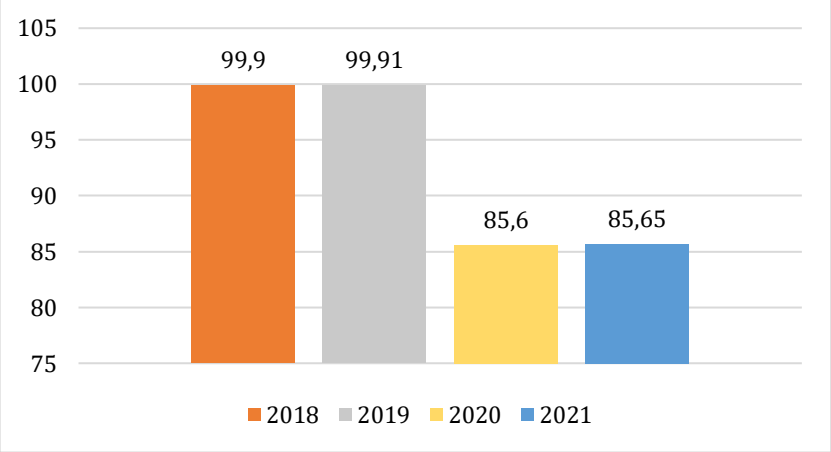
	Jenis Kelamin	Jumlah PMKS yang memproleh bantuan Sosial
Satuan		Orang
2017	Laki-Laki	12
	Perempuan	14
	Total	26
2018	Laki-Laki	6
	Perempuan	4
	Total	10
2019	Laki-Laki	10
	Perempuan	10
	Total	20
2020	Laki-Laki	13
	Perempuan	8
	Total	21
2021	Laki-Laki	40
	Perempuan	36
	Total	76

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 5 Jumlah PMKS yang Tertangani

	Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yang tertangani
Satuan	%	Orang
2018	99,9	2.893
2019	99,91	-
2020	85,6	-
2021	85,65	-

Sumber: Dinas Sosial



Gambar 22. 2 Jumlah PMKS yang Tertangani

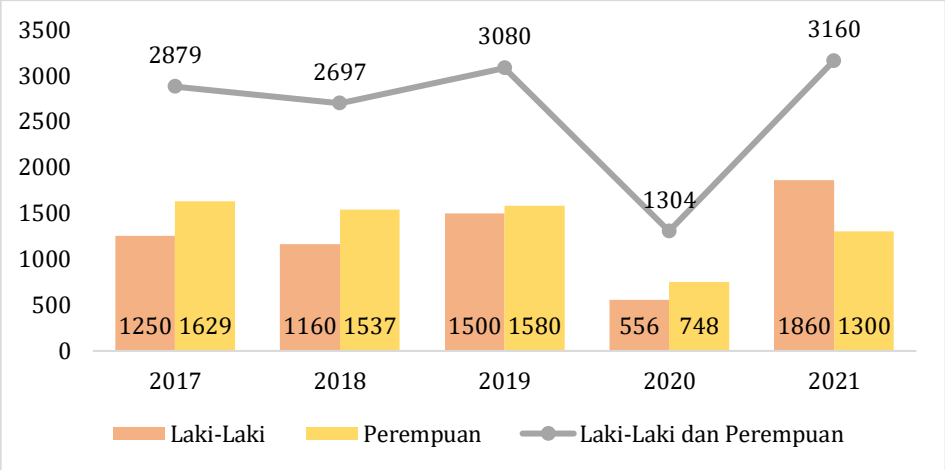
Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 6 Persentase PMKS Skala yang Memproleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya

Jenis Kelamin		Jumlah PMKS yang memproleh bantuan sosial skala yang memproleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
Satuan		**Orang**
2017	Laki-Laki	1250
	Perempuan	1629
	Total	2879
2018	Laki-Laki	1160
	Perempuan	1537
	Total	2697
2019	Laki-Laki	1500
	Perempuan	1580
	Total	3080
2020	Laki-Laki	556
	Perempuan	748
	Total	1304

Jenis Kelamin		Jumlah PMKS yang memproleh bantuan sosial skala yang memproleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
Satuan		Orang
2021	Laki-Laki	1860
	Perempuan	1300
	Total	3160

Sumber: Dinas Sosial



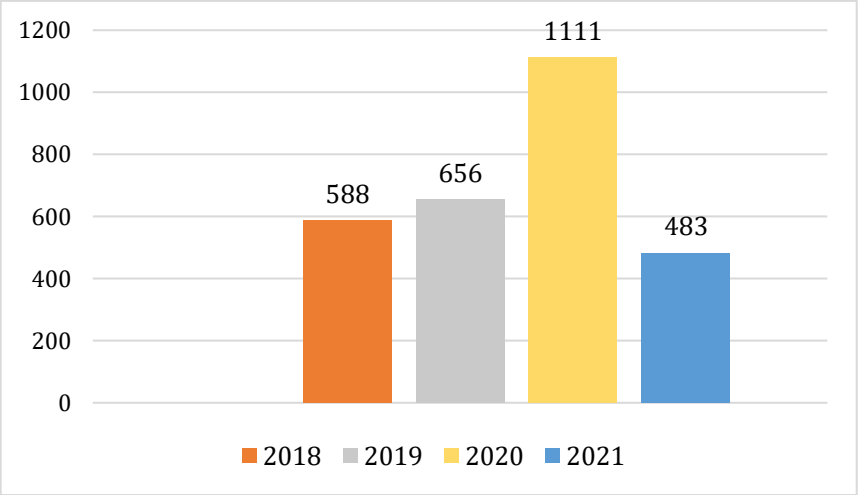
Gambar 22. 3 Jumlah PMKS yang Memproleh Bantuan Sosial Skala yang Memproleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasarnya

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 7 Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Graduasi

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase keluarga penerima manfaat yang graduasi	588	656	1111	483	%

Sumber: Dinas Sosial



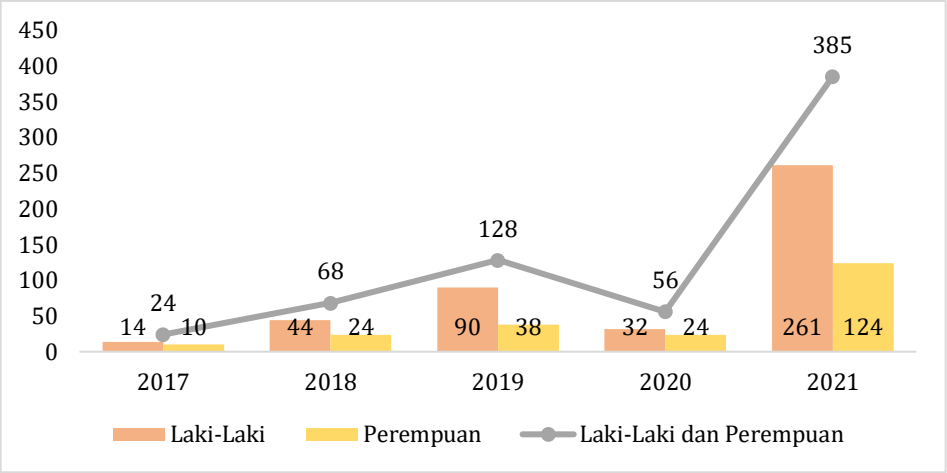
Gambar 22. 4 Persentase Keluarga Penerima Manfaat yang Graduasi

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 8 Persentase PMKS yang Direhabilitasi

Jenis Kelamin		Jumlah PMKS yang direhabilitasi
Satuan		Orang
2017	Laki-Laki	14
	Perempuan	10
	Total	24
2018	Laki-Laki	44
	Perempuan	24
	Total	68
2019	Laki-Laki	90
	Perempuan	38
	Total	128
2020	Laki-Laki	32
	Perempuan	24
	Total	56
2021	Laki-Laki	261
	Perempuan	124
	Total	385

Sumber: Dinas Sosial



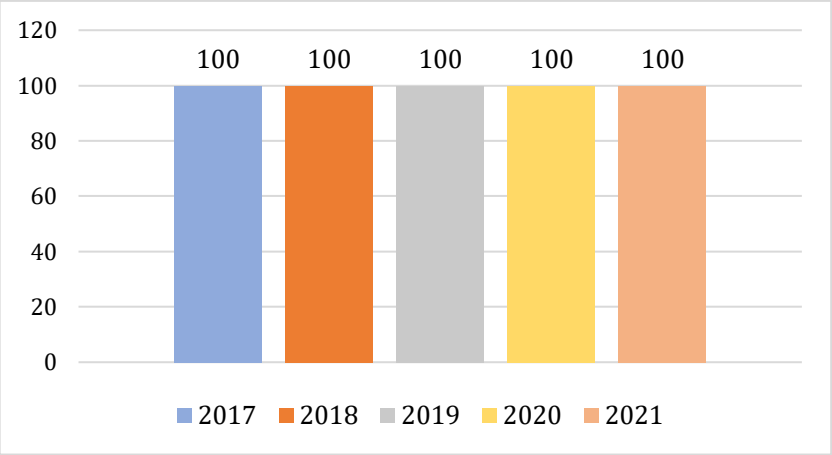
Gambar 22. 5 Persentase PMKS yang Direhabilitasi

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 9 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Darurat

	Jenis Kelamin	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Darurat	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa darurat	Jumlah seluruh korban bencana
Satuan		**%**	**Orang**	**Orang**
2017	Total	100	20000	20000
2018	Total	100	15000	15000
2019	Total	100	7000	7000
2020	Total	100	51296	51296
2021	Total	100	12246	12246

Sumber: Dinas Sosial



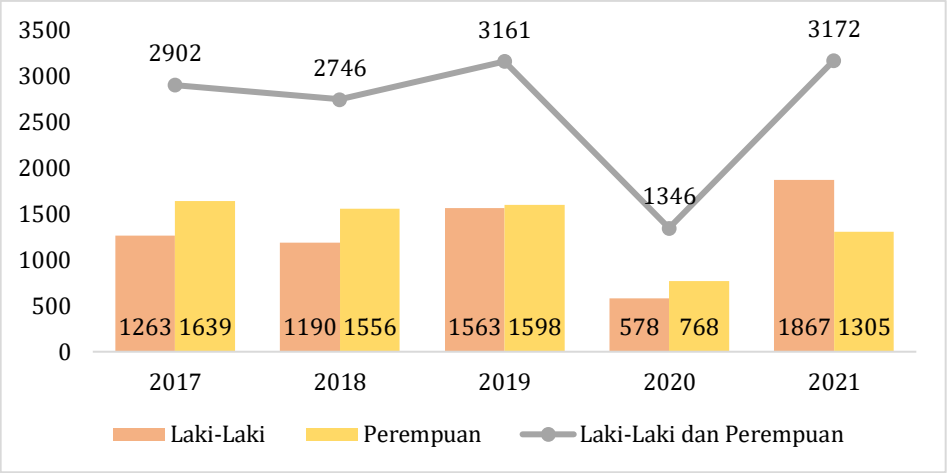
Gambar 22. 6 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Darurat

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 10 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)

Jenis Kelamin		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Satuan		Orang
2017	Laki-Laki	1263
	Perempuan	1639
	Total	2902
2018	Laki-Laki	1190
	Perempuan	1556
	Total	2746
2019	Laki-Laki	1563
	Perempuan	1598
	Total	3161
2020	Laki-Laki	578
	Perempuan	768
	Total	1346
2021	Laki-Laki	1867
	Perempuan	1305
	Total	3172

Sumber: Dinas Sosial



Gambar 22. 7 Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 11 Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota

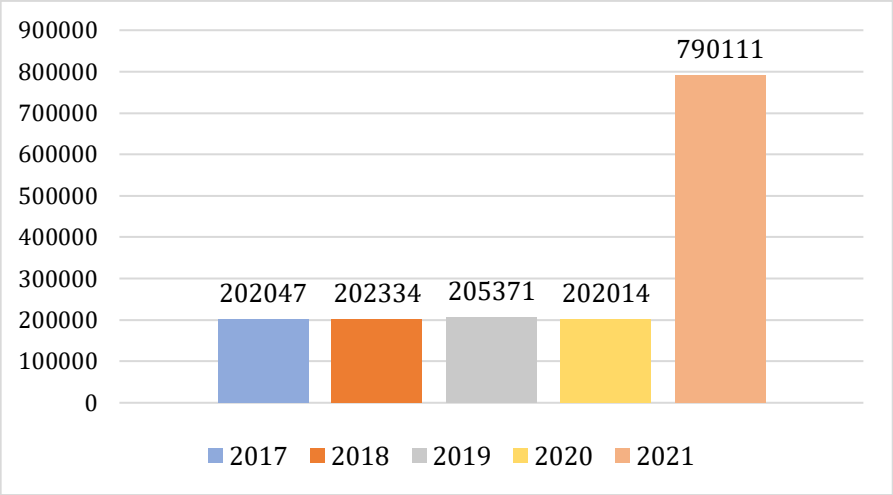
	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota
Satuan	**%**	**Orang**	**Orang**
2017	100	20000	20000
2018	100	15000	15000
2019	100	7000	7000
2020	100	51296	51296
2021	100	12246	12246

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 12 Angka Kemiskinan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Angka Kemiskinan	**202047**	**202334**	**205371**	**202014**	**790111**	%

Sumber: Dinas Sosial



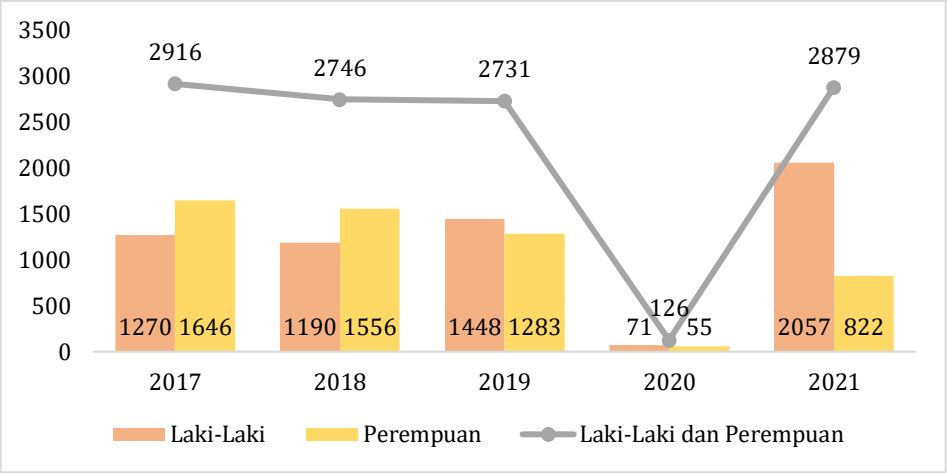
Gambar 22. 8 Angka Kemiskinan

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 13 Persentase PMKS yang Dibina

Jenis Kelamin Satuan		Persentase PMKS yang Dibina %
2017	Laki-Laki	1270
	Perempuan	1646
	Total	2916
2018	Laki-Laki	1190
	Perempuan	1556
	Total	2746
2019	Laki-Laki	1448
	Perempuan	1283
	Total	2731
2020	Laki-Laki	71
	Perempuan	55
	Total	126
2021	Laki-Laki	2057
	Perempuan	822
	Total	2879

Sumber: Dinas Sosial



Gambar 22. 9 Persentase PMKS yang Dibina

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 14 Persentase PMKS yang Berdaya

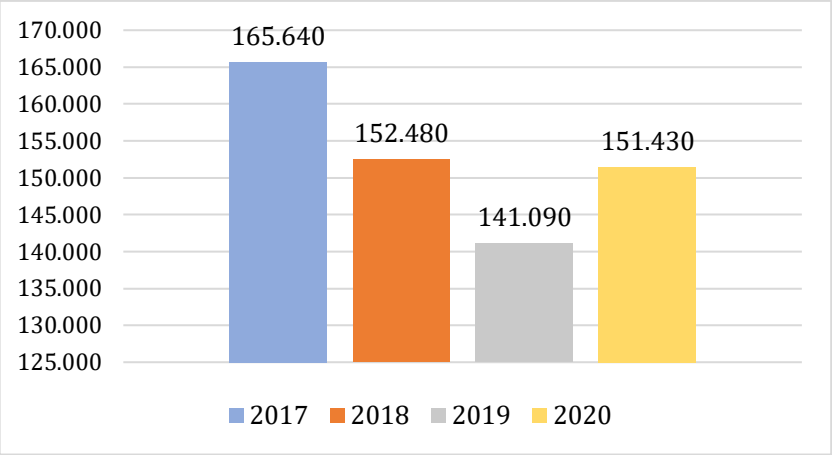
Jenis Kelamin Satuan		Persentase PMKS yang Berdaya %
2017	Laki-Laki	1270
	Perempuan	1646
	Total	2916
2018	Laki-Laki	1190
	Perempuan	1556
	Total	2746
2019	Laki-Laki	1448
	Perempuan	1283
	Total	2731
2020	Laki-Laki	71
	Perempuan	55
	Total	126
2021	Laki-Laki	2057
	Perempuan	822
	Total	2879

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 15 Jumlah Penduduk Miskin

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Jumlah Penduduk Miskin	165640	152480	141090	151430	Jiwa

Sumber: Dinas Sosial



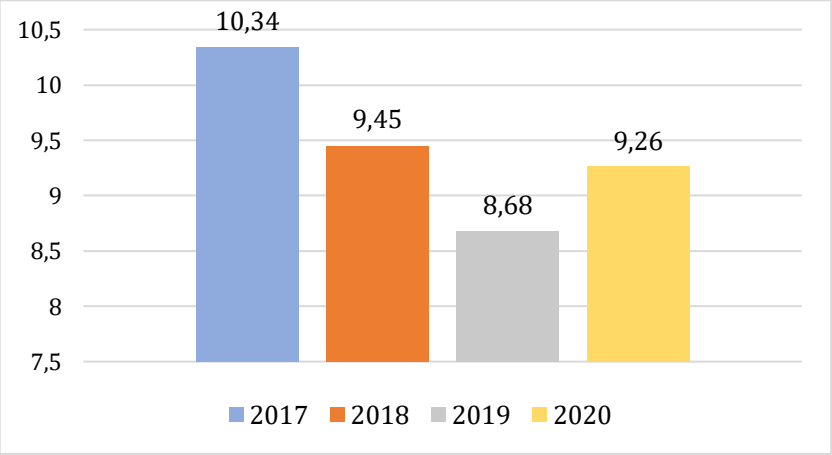
Gambar 22. 10 Jumlah Penduduk Miskin

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 16 Persentase Penduduk Miskin

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase Penduduk Miskin	10,34	9,45	8,68	9,26	Jiwa

Sumber: Dinas Sosial



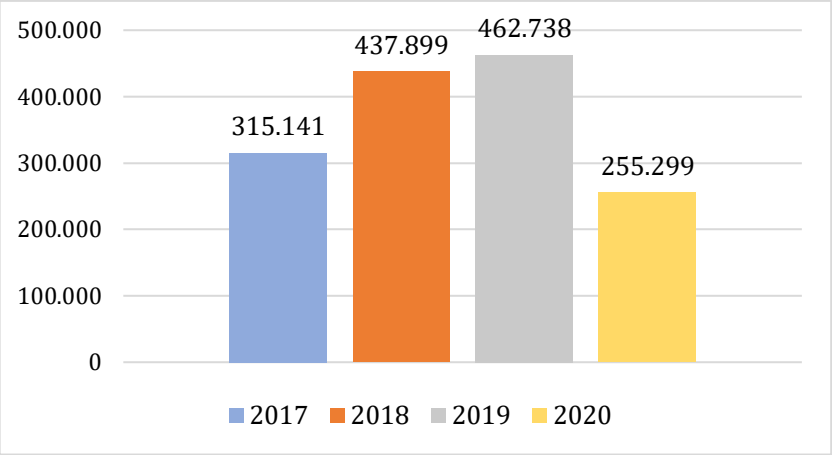
Gambar 22. 11 Persentase Penduduk Miskin

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 17 Garis Kemiskinan

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Garis Kemiskinan	315.141	437.899	462.738	255.299	Rupiah/kapita/bulan

Sumber: Dinas Sosial



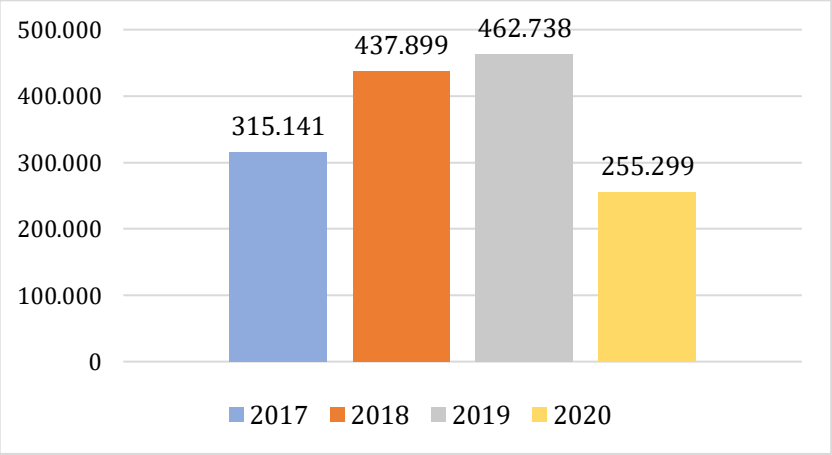
Gambar 22. 12 Garis Kemiskinan

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 18 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,67	1,5	1,56	1,15	Indeks

Sumber: Dinas Sosial



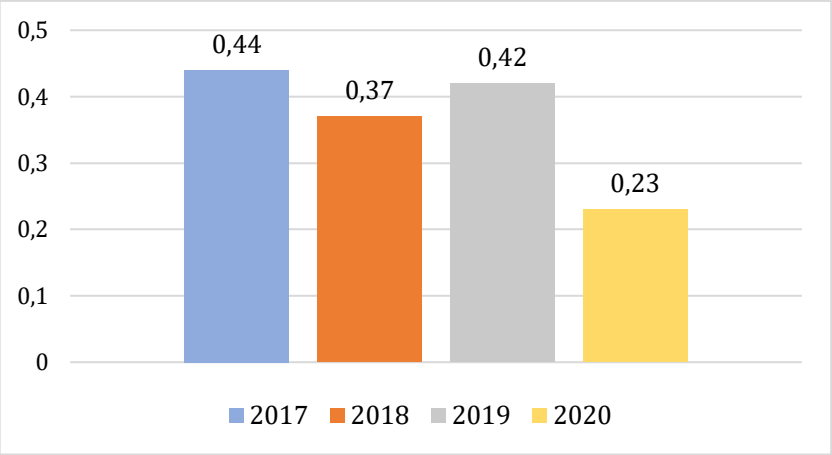
Gambar 22. 13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 19 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,44	0,37	0,42	0,23	Indeks

Sumber: Dinas Sosial



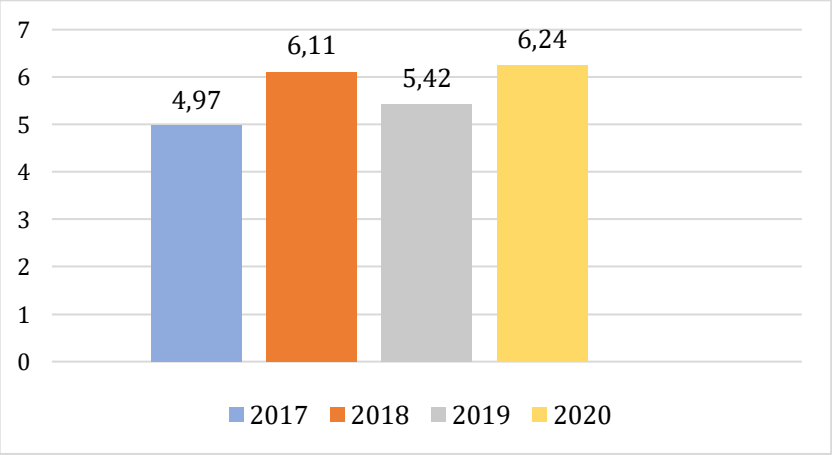
Gambar 22. 14 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sumber: Dinas Sosial

Tabel 22. 20 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	4,97	6,11	5,42	6,24	%

Sumber: Dinas Sosial



Gambar 22. 15 Tingkat pengangguran terbuka (TPT)

Sumber: Dinas Sosial

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DESKRIPSI

Lembaga kemasyaratan desa/kelurahan yang aktif artinya lembaga kemasyarakatan tersebut sesuai struktur dan siap melayani masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa. Di Kabupaten Pasuruan, persentase lemabaga kemasyarakatan desa yang aktif mulai tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat 10,85 persen, meningkat menjadi 97,29 persen.

Indeks Pembangunan Desa adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa, dengan skala 0-100. Indeks Pembangunan Desa menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal (kurang dari sama dengan 50), berkembang (lebih dari 50 namun kurang dari sama dengan 75), dan mandiri (lebih dari 75). Jumlah keseluruhan desa di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 sebanyak 341 desa dimana sebanyak 11 desa berstatus desa mandiri, 117 desa berstatus desa maju, 213 desa berstatus desa berkembang, dan sudah tidak ada jumlah desa tertinggal di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 23. 1 Jumlah Binaan Lembaga Ekonomi Pedesaan

No	Elemen	2017	2018	Satuan
1	Persentase jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan	90,72	100	%
	jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan	176	117	unit
	jumlah lembaga ekonomi pedesaan	194	117	unit

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 2 Jumlah sarana prasarana pasar desa

No	Elemen	2017	2018	Satuan
2	Jumlah sarana prasarana pasar desa	74	102	Unit

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 3 Binaan Lembaga Masyarakat

No	Elemen	2017	2018	Satuan
3	Persentase binaan lembaga masyarakat	98,10	100	%
	Jumlah binaan lembaga masyarakat	144	269	Unit
	Jumlah lembaga masyarakat	147	269	Unit

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 4 Binaan Kelompok Masyarakat

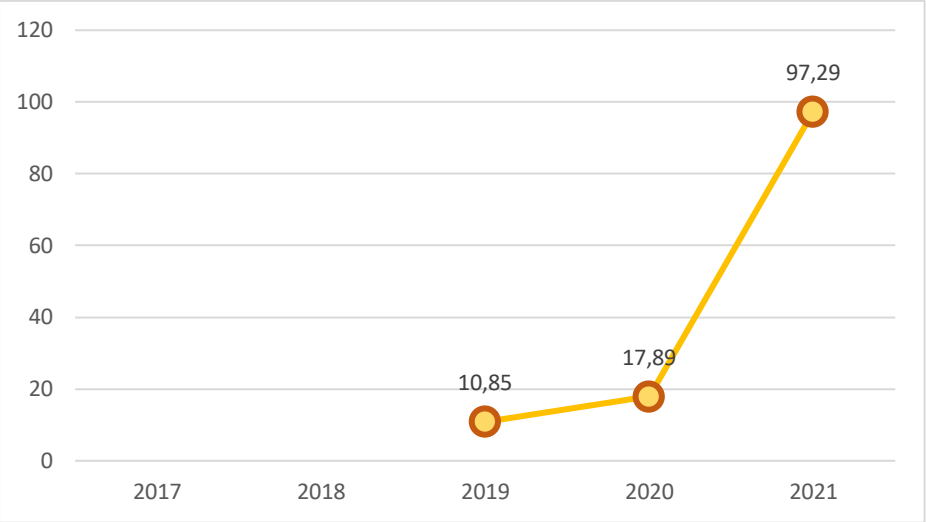
No	Elemen	2017	2018	Satuan
4	Persentase binaan kelompok masyarakat	77,67	100	%
	Jumlah binaan kelompok masyarakat	400	255	Unit
	Jumlah kelompok masyarakat	515	255	unit

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 5 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif

No	Elemen	2019	2020	2021	Satuan
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif	10,85	17,89	97,29	%
	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa yang Aktif	37	61	13.483	lembaga
	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa	341	341	13.858	unit

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



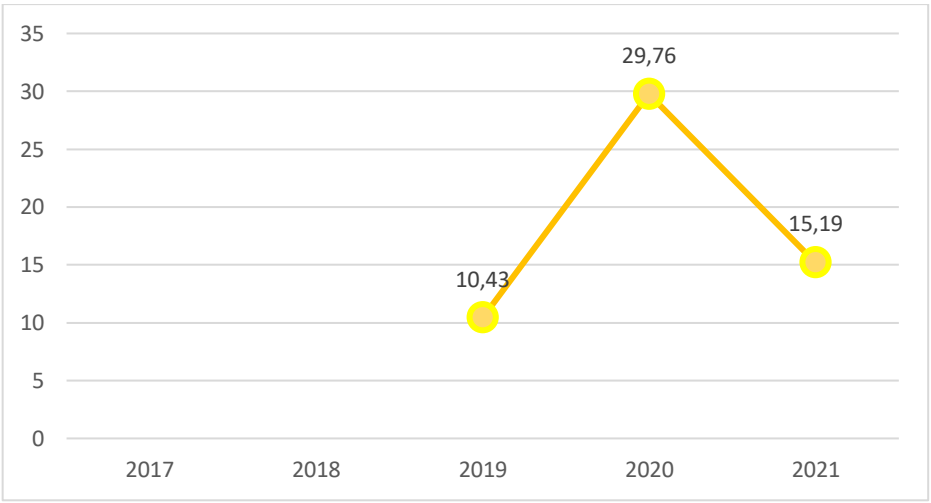
Gambar 23. 1 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 6 Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif (BUMDES)

No	Elemen	2019	2020	2021	Satuan
6	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif (BUMDES)	10,43	29,76	15,19	%
	Jumlah BUMDes yang aktif	17	50	24	Desa
	Jumlah BUMDES	163	168	158	unit

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



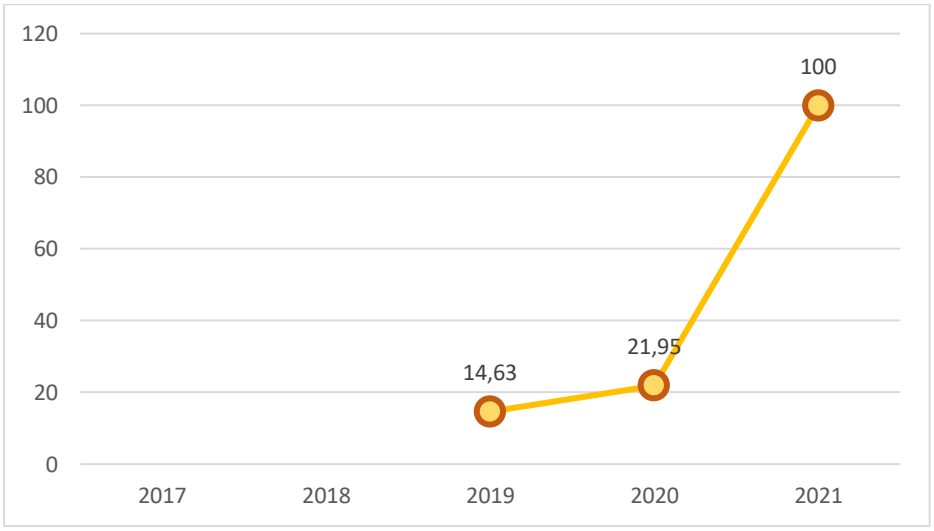
Gambar 23. 2 Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif (BUMDES)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 7 Kinerja Desa yang Baik (Persentase Pemerintah Desa yang berkualitas)

No	Elemen	2019	2020	2021	Satuan
7	Persentase kinerja desa yang baik (Persentase Pemerintah Desa yang berkualitas)	14,63	21,95	100	%
	Jumlah Desa yang memiliki Kinerja Pemerintahan Desa yang baik	6	9	341	Desa
	Jumlah Seluruh Desa	41	41	341	Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



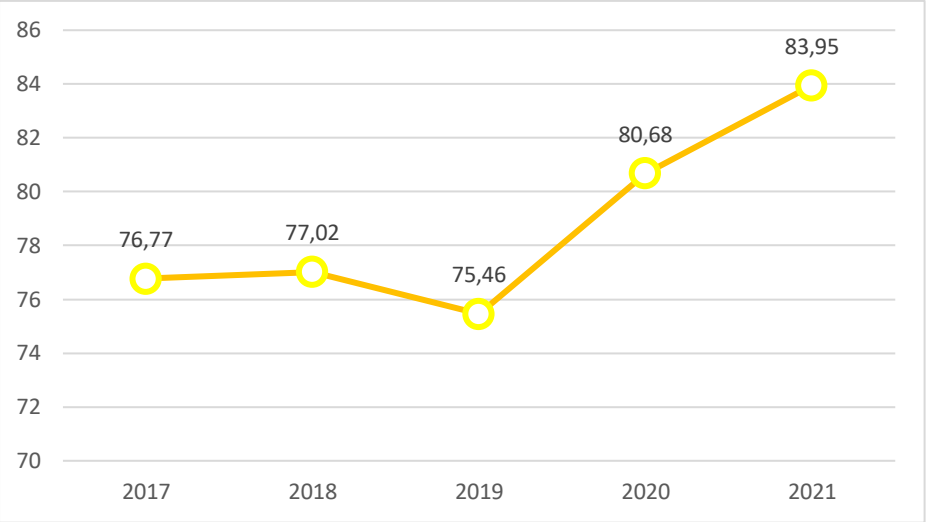
Gambar 23. 3 Persentase Kinerja Desa yang Baik (Persentase Pemerintah Desa yang Berkualitas)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 8 Persentase Partisipasi Masyarakat

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
8	Persentase Partisipasi masyarakat	76,77	77,02	75,46	80,68	83,95	%
	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	836	848	827	810	790	Orang
	Jumlah masyarakat yang terundang	1089	1101	1096	1004	941	Orang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



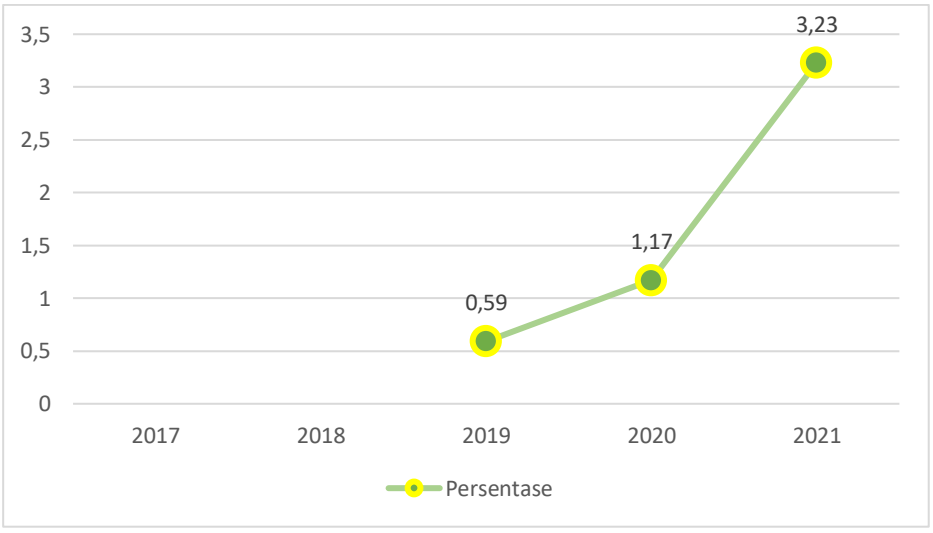
Gambar 23. 4 Persentase Partisipasi Masyarakat

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 9 Desa Mandiri

No	Elemen	2019	2020	2021
9	Persentase Desa Mandiri	0,59	1,17	3,23
	Jumlah Desa Mandiri	2	4	11
	Jumlah Desa	341	341	341

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 23. 5 Persentase Desa Mandiri

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 10 Pengentasan Desa Tertinggal

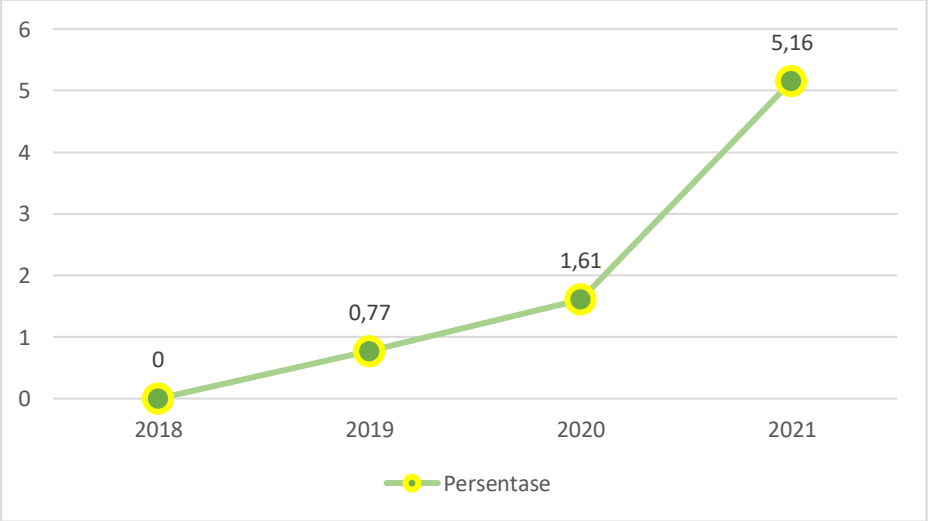
No	Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
10	Persentase pengentasan desa tertinggal	158,54	684,21			%
	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per-tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	195	260	248	213	Desa
	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	123	38	0	0	Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 11 Peningkatan Status Desa Mandiri

No	Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
11	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	0,77	1,61	5,16	%
	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasar IDM per tahun	0	2	4	11	Desa
	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	195	260	248	213	Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



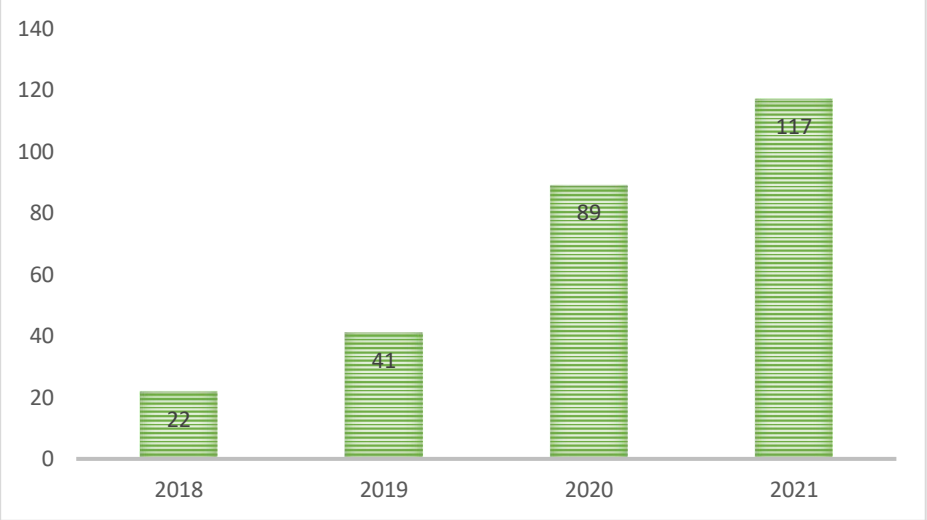
Gambar 23. 6 Peningkatan Status Desa Mandiri

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 12 Jumlah Desa Maju

No	Elemen	Tahun				Satuan
		2018	2019	2020	2021	
12	Jumlah Desa Maju	22	41	89	117	Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Gambar 23. 7 Jumlah Desa Maju

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 13 Prosentase Desa Yang Sarana Prasarananya Difasilitasi

No	Elemen	2021	Satuan
13	Prosentase Desa yang sarana prasarananya difasilitasi	44	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 14 Prosentase Desa Yang Membentuk Kerjasama

No	Elemen	2021	Satuan
14	Prosentase Desa yang membentuk kerjasama	0,04	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 15 Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi Perencanaan Dan Perkembangan Desa

No	Elemen	2021	Satuan
15	Prosentase Desa yang Tertib administrasi perencanaan dan perkembangan Desa	100	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 16 Prosentase Desa Yang Memiliki BUMDES Bermitra Dan Profil Desa Yang Update

No	Elemen	2021	Satuan
16	Prosentase Desa yang memiliki BUMDes bermitra dan profil desa yang update	100	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 17 Prosentase Desa Yang Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa

No	Elemen	2021	Satuan
17	Prosentase Desa yang tertib administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	100	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 18 Prosentase Desa Tertib Administrasi Keuangan Desa Yang Akuntabel

No	Elemen	2021	Satuan
18	Prosentase Desa tertib administrasi keuangan desa yang akuntabel	100	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 23. 19 Prosentase Lembaga Ekonomi Perdesaan Yang Meningkat Volume Usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) Dan Pemanfaatan TTG

No	Elemen	2021	Satuan
20	Prosentase Lembaga Ekonomi Perdesaan yang meningkat volume usahanya (Pasar Desa, KUB, UMKM) dan Pemanfaatan TTG	100	%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

DESKRIPSI

Aset merupakan salah satu elemen yang dapat menentukan besarnya nilai keuangan di suatu daerah. Sedangkan nilai aset tersusun atas aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya yang tidak termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Selama kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2017 – 2021, jumlah aset di Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan yang awalnya senilai Rp 3.686.529.772.742,77 pada tahun 2017, menjadi sebesar Rp 4.373.811.204.267,72 di tahun 2020, namun setelah itu terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 4.350.293.789.323,61. Selain nilai aset, terdapat Pendapatan Total yang termasuk dalam penyusun besarnya keuangan di Kabupaten Pasuruan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta Pendapatan yang Sah Lainnya. Nilai Total Pendapatan di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 bersifat cukup fluktuatif, dimana mengalami perubahan naik turun pada beberapa tahun. Rincian nilai Total Aset dan Total Pendapatan beserta unsur penyusun lainnya terdapat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 24. 1 Jumlah Aset Lancar

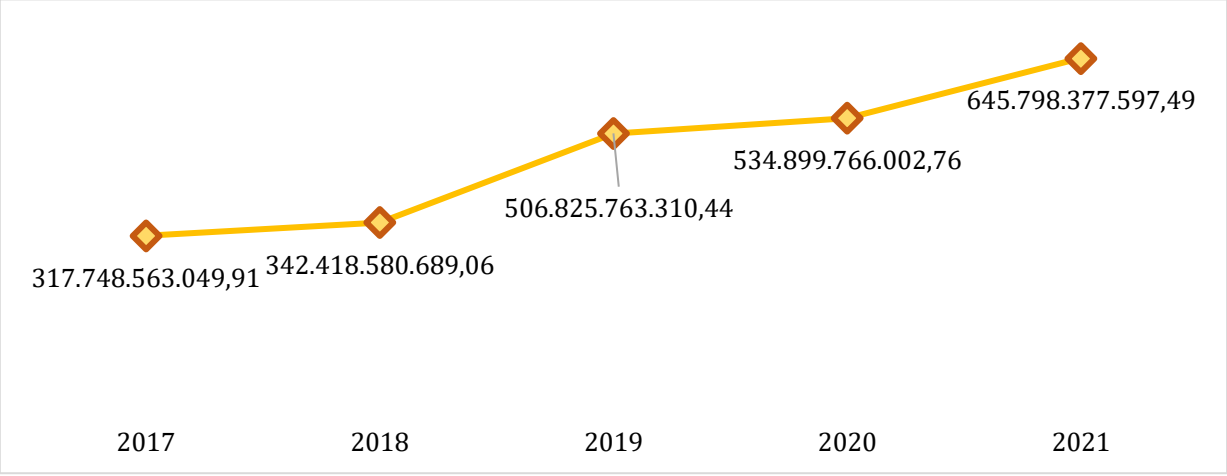
Aset Lancar	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
K a s	**141.727.207.620,84**	**178.121.228.156,39**	**302.842.907.853,09**	**281.153.738.094,43**	**372.253.088.153,04**	Rp
Kas di Kas Daerah	98.976.683.891,18	126.713.276.711,52	28.503.507.346,42	180.488.385.687,57	221.740.740.484,93	Rp
Kas di BLUD	7.587.237.599,03	26.369.051.008,90	33.803.062.991,64	86.390.542.131,60	139.996.988.585,10	Rp
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	30.373.347.426,19	22.836.899.394,36	17.282.427.778,71	11.987.057.628,70	7.457.483.623,07	Rp
Kas di Bendahara Pengeluaran - UYHD	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp
Kas di Bendahara Pengeluaran – Non UYHD	81.900,00	86.695.781,00	2.747.728,00	0,00	44.427.740,00	Rp
Kas lainnya - BOS	4.775.765.704,18	2.112.421.260,61	3.233.995.002,32	2.235.222.761,04	2.999.137.981,55	Rp
Kas di Bendahara Penerimaan	14.091.100,00	2.884.000,00	17.167.006,00	52.455.961,00	6.888.380,00	Rp
Setara Kas			220.000.000.000,00	0,00	0,00	Rp
Kas Lainnya				73.924,52	7.421.358,39	Rp
Piutang	**128.472.682.066,85**	**106.953.089.471,12**	**153.987.671.736,91**	**157.694.124.966,75**	**174.952.789.560,91**	Rp
Piutang Pajak	126.500.928.304,03	134.288.405.299,96	149.738.221.089,40	171.109.294.464,39	181.526.393.231,11	Rp

Aset Lancar	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Penyisihan Piutang Pajak	-78.323.495.881,49	-84.108.661.862,07	-91.171.442.709,96	0,00	0,00	Rp
Piutang Pajak (Netto)	**48.177.432.422,54**	**50.179.743.437,89**	**58.566.778.379,44**	**171.109.294.464,39**	**181.526.393.231,11**	Rp
Piutang Retribusi	13.069.416.097,49	18.754.959.781,83	26.395.883.541,82	25.250.973.685,48	28.948.170.254,52	Rp
Penyisihan Piutang Retribusi	-3.684.114.035,62	-6.070.514.468,61	-8.806.230.221,90	0,00	0,00	Rp
Piutang Retribusi (Netto)	**9.385.302.061,87**	**12.684.445.313,22**	**17.589.653.319,92**	**25.250.973.685,48**	**28.948.170.254,52**	Rp
Piutang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp
Penyisihan Piutang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rp
Piutang Bunga (Netto)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Rp
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	43.138.085.645,97	40.071.792.052,65	40.298.628.228,20	60.597.264.471,15	84.978.141.837,41	Rp
Penyisihan Piutang Lain-lain	-6.840.288.748,53	-6.931.096.714,64	-7.395.114.057,65	0,00	0,00	Rp

Aset Lancar	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
PAD Yang Sah						
Piutang Lain-lain (Netto)	**36.297.796.897,44**	**33.140.695.338,01**	**32.903.514.170,55**	**60.597.264.471,15**	**84.978.141.837,41**	Rp
Piutang Dana Bagi Hasil	34.612.150.685,00	10.948.205.382,00	44.927.725.867,00	21.997.837.122,00	12.497.171.657,00	Rp
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	0,00		0,00	0,00	0,00	Rp
Piutang Dana Bagi Hasil (Netto)	**34.612.150.685,00**	**10.948.205.382,00**	**44.927.725.867,00**	**21.997.837.122,00**	**12.497.171.657,00**	Rp
Piutang Lain-Lain				152.786.666,00	182.775.978,00	Rp
Penyisihan Piutang Lain-lain				0,00	0,00	Rp
Piutang Lain-lain (Netto)				**152.786.666,00**	**182.775.978,00**	Rp
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		**0,00**	**0,00**	**-121.414.031.442,27**	**-133.179.863.397,13**	Rp

Aset Lancar	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		0,00	0,00	-121.414.031.442,27	-133.179.863.397,13	Rp
Beban Dibayar Dimuka	**330.078.573,92**	**345.184.647,83**	**474.457.724,33**	**604.361.449,44**	**326.601.501,08**	Rp
Persediaan	**47.218.594.788,30**	**56.999.078.413,72**	**49.520.725.996,11**	**95.447.541.492,14**	**98.265.898.382,46**	Rp
JUMLAH ASET LANCAR	**317.748.563.049,91**	**342.418.580.689,06**	**506.825.763.310,44**	**534.899.766.002,76**	**645.798.377.597,49**	Rp

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



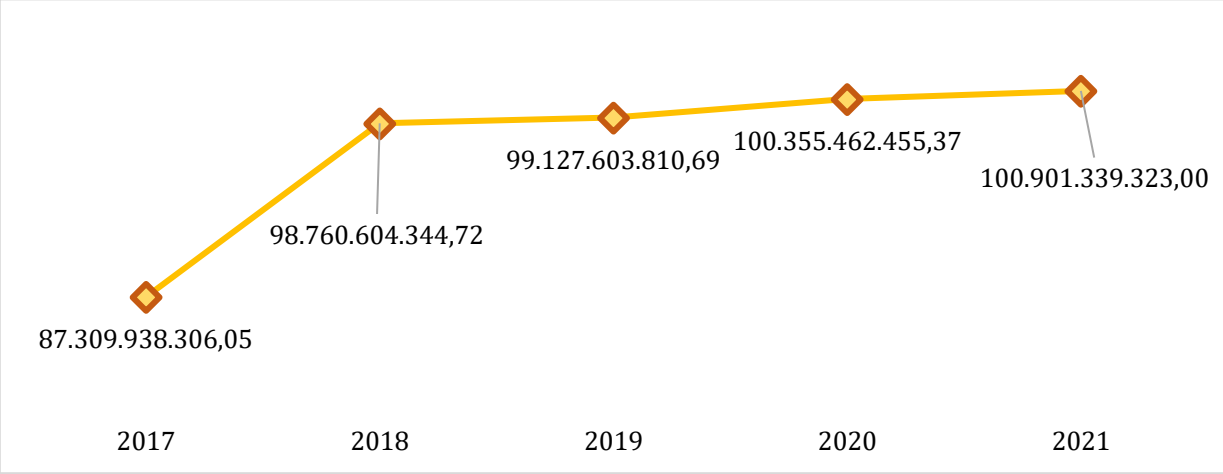
Gambar 24. 1 Jumlah Aset Lancar

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 2 Jumlah Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	2017	2018	2019	2020	2021
Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	**87.309.938.306,05**	**98.760.604.344,72**	**99.127.603.810,69**	**100.355.462.455,37**	**100.901.339.323,00**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	87.309.938.306,05	98.760.604.344,72	99.127.603.810,69	100.355.462.455,37	100.901.339.323,00
Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**87.309.938.306,05**	**98.760.604.344,72**	**99.127.603.810,69**	**100.355.462.455,37**	**100.901.339.323,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Gambar 24. 2 Jumlah Investasi Jangka Panjang

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

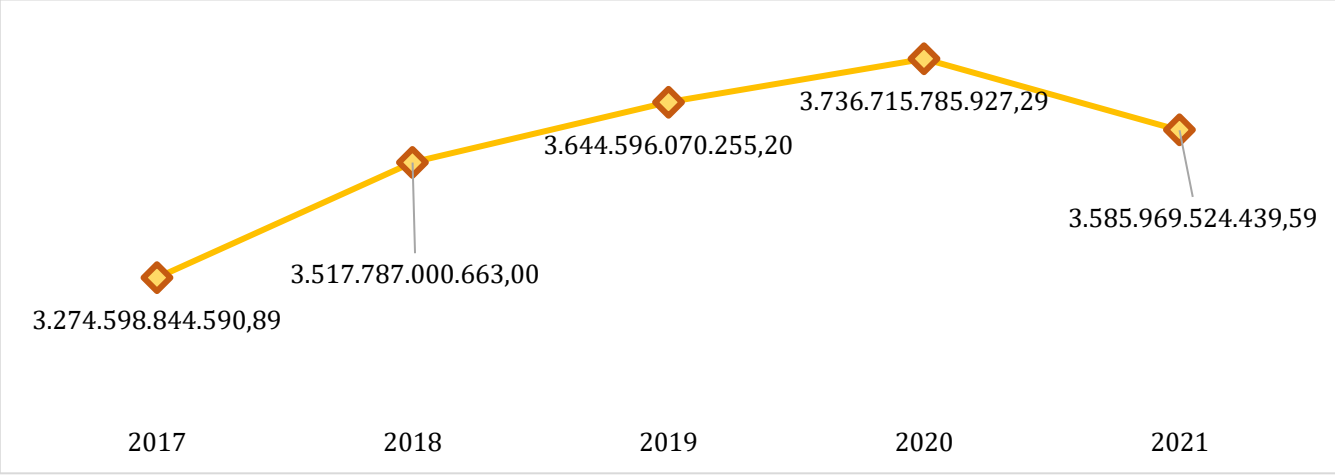
Tabel 24. 3 Jumlah Aset Tetap

Aset Tetap	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah	**920.071.876.969,83**	**1.026.832.975.639,33**	**1.029.451.916.603,33**	**1.032.222.721.482,33**	**1.085.214.474.182,33**
Peralatan dan Mesin	**877.107.160.881,00**	**950.319.724.114,00**	**1.061.137.230.510,00**	**1.201.864.635.828,73**	**1.332.180.138.311,63**
Alat-alat Berat	29.724.431.138,60	31.857.081.438,60	33.046.861.528,60	30.848.231.528,60	31.963.299.866,60
Alat-alat Angkutan	179.004.635.350,00	189.577.195.475,00	195.904.273.575,00	203.331.727.375,00	214.263.825.178,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.707.926.865,98	31.102.218.217,98	32.409.956.309,98	29.856.756.336,98	37.961.416.949,98
Alat Pertanian	6.484.502.563,00	7.029.443.563,00	8.205.942.563,00	9.160.297.872,76	9.245.350.872,76
Alat Kantor dan Rumah Tangga	341.392.433.461,62	372.893.348.475,62	421.909.064.771,62	479.211.592.033,55	309.130.139.054,83

Aset Tetap	2017	2018	2019	2020	2021
Alat Studio dan Alat Komunikasi	34.466.572.409,00	38.598.378.804,00	44.438.293.860,00	52.115.480.188,00	58.101.496.490,00
Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	203.445.480.981,40	221.939.965.268,40	261.612.006.376,40	320.743.910.144,60	357.323.651.305,60
Alat Laboratorium	50.682.553.132,40	54.348.537.292,40	60.201.192.833,40	72.279.317.598,24	77.927.400.935,24
Alat Persenjataan/Keamanan	2.198.624.979,00	2.973.555.579,00	3.409.638.692,00	4.317.322.751,00	842.132.958,00
Komputer	-	-	-	-	210.363.886.409,87
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	-	-	-	-	15.984.000,00
Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	329.788.700,00
Alat Peraga	-	-	-	-	6.400.000,00
Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	17.034.600,00
Rambu-rambu	-	-	-	-	23.329.408.398,75
Peralatan Olahraga	-	-	-	-	1.358.922.592,00
Gedung dan Bangunan	**1.487.621.579.680,88**	**1.589.219.780.325,31**	**1.757.771.052.781,94**	**1.876.455.512.362,07**	**1.973.119.909.223,32**
Bangunan Gedung	1.467.668.385.744,13	1.567.843.671.309,56	1.734.652.999.766,19	1.852.893.377.846,32	1.946.006.095.681,19
Monumen dan Tugu	19.953.193.936,75	21.376.109.015,75	23.118.053.015,75	23.562.134.515,75	557.232.356,00
Bangunan Menara	-	-	-	-	1.362.437.895,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-	25.194.143.291,13
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.612.699.966.909,41**	**1.876.735.057.542,02**	**2.038.114.053.287,47**	**2.174.110.996.475,18**	**2.303.954.449.616,18**
Jalan dan Jembatan	1.250.823.979.505,92	1.394.144.193.220,69	1.512.815.941.509,69	1.595.134.476.329,69	1.666.129.251.319,69
Bangunan Air/Irigasi	295.663.027.169,08	347.813.200.809,08	378.443.198.716,53	423.096.883.610,53	463.827.854.206,53
Instalasi	8.594.999.466,00	50.267.257.043,84	50.772.433.862,84	51.483.562.650,55	54.612.419.405,55
Jaringan	57.617.960.768,41	84.510.406.468,41	96.082.479.198,41	104.396.073.884,41	119.384.924.684,41
Aset Tetap Lainnya	**62.524.349.384,10**	**65.941.302.932,10**	**67.110.721.582,10**	**67.585.775.389,18**	**66.864.164.447,18**

Aset Tetap	2017	2018	2019	2020	2021
Buku dan Perpustakaan	57.267.197.653,36	59.119.505.303,36	59.929.828.753,36	60.533.321.651,44	60.982.559.001,44
Barang Bercorak Seni dan Budaya	4.845.557.703,58	5.042.030.003,58	5.474.212.703,58	5.595.098.612,58	4.447.050.320,58
Hewan Ternak dan Tanaman	411.594.027,16	1.779.767.625,16	1.706.680.125,16	1.457.355.125,16	1.434.555.125,16
Konstruksi dalam Pengerjaan	**9.989.546.362,86**	**18.837.688.411,87**	**5.520.517.344,00**	**6.377.434.985,00**	**5.376.280.541,00**
Akumulasi Penyusutan	**-1.695.415.635.597,19**	**-2.010.099.528.301,63**	**-2.314.509.421.853,64**	**-2.621.901.290.595,20**	**-3.180.739.891.882,05**
JUMLAH ASET TETAP	**3.274.598.844.590,89**	**3.517.787.000.663,00**	**3.644.596.070.255,20**	**3.736.715.785.927,29**	**3.585.969.524.439,59**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Gambar 24. 3 Jumlah Aset Tetap

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

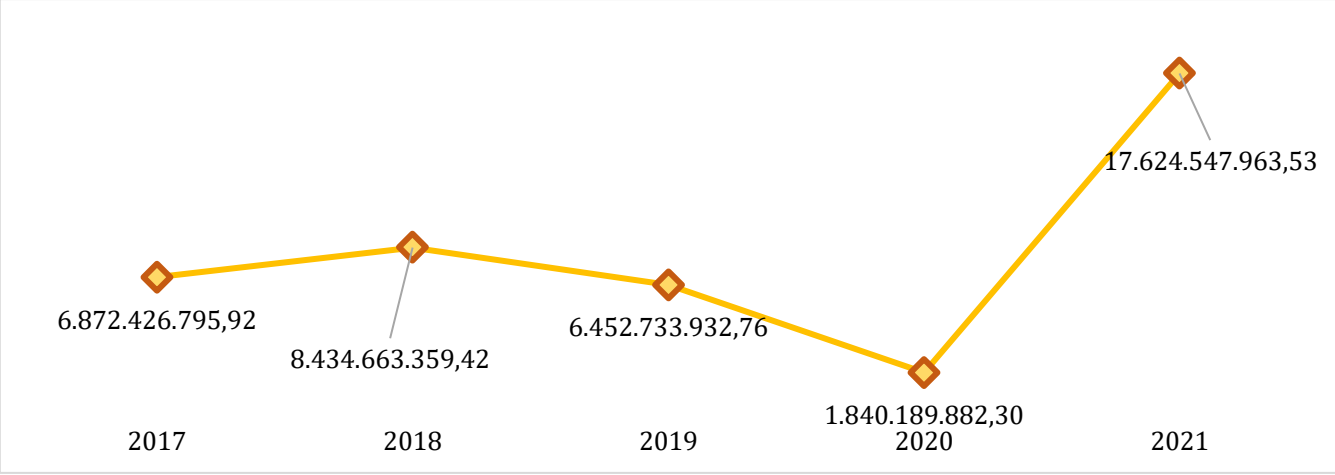
Tabel 24. 4 Jumlah Aset Lainnya

Aset Lainnya	2017	2018	2019	2020	2021
Piutang dalam usulan penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas dalam proses penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Jangka Panjang	**0,00**	**49.611.666,00**	**26.356.469,34**	**4.283.333,67**	**7.756.796,00**
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			**106.462.967,00**	**0,00**	**0,00**
Persediaan Obat (Kadaluarsa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin (Rusak)	**4.384.872.385,22**	**4.604.174.981,22**	**4.310.984.152,22**	**48.613.484,67**	**13.513.987.523,85**
Alat-alat Berat	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	6.818.062,00
Alat-alat Angkutan	461.300.200,00	519.486.000,00	433.968.200,00	10.293.100,00	842.997.900,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	123.434.700,00	123.434.700,00	120.234.700,00	0,00	512.354.645,00
Alat Pertanian	122.669.870,00	122.669.870,00	105.569.870,00	0,00	28.460.000,00
Alat Kantor & Rumah Tangga	2.639.246.883,22	2.766.962.344,22	2.615.429.815,22	18.055.805,00	4.105.549.978,85
Alat Studio dan Alat Komunikasi	432.078.832,00	453.514.332,00	418.478.832,00	0,00	300.553.272,00
Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	537.816.900,00	549.782.735,00	549.782.735,00	19.622.519,67	6.304.084.070,00
Alat Laboratorium	63.475.000,00	63.475.000,00	62.670.000,00	642.060,00	1.411.969.596,00
Alat-alat Persenjataan/Keamanan				0,00	1.200.000,00
Gedung & Bangunan (Rusak)	**524.640.001,50**	**2.142.229.003,00**	**353.445.535,00**	**877.748.150,59**	**1.959.926.628,68**
Gedung dan Bangunan	524.640.001,50	2.142.229.003,00	353.445.535,00	877.748.150,59	1.959.926.628,68
Monumen dan Tugu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aset Lainnya	2017	2018	2019	2020	2021
Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rusak)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.006.413,37**	**180.004.110,00**
Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Air/Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300.000,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	9.829.280,00	77.055.165,00
Jaringan				27.177.133,37	77.648.945,00
Aset Tetap Lainnya (Rusak)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.000,00**	**6.200.000,00**
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.200.000,00
Aset yang akan diserahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KDP Dalam Usulan Penghapusan	**0,00**	**34.685.000,00**	**34.685.000,00**	**34.685.000,00**	**1.621.841.705,00**
Barang yang akan dihibahkan kepada Masyarakat	**189.424.009,20**	**181.424.009,20**	**181.424.009,20**	**0,00**	**0,00**
Peralatan dan Mesin (Dalam Penelusuran)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Kantor & Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aset Lainnya	2017	2018	2019	2020	2021
Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sertifikasi Manajemen Mutu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	**4.624.250.750,50**	**4.711.670.750,50**	**5.012.461.750,50**	**5.012.461.750,50**	**3.902.827.500,50**
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-2.850.760.350,50	-3.289.132.050,50	-3.573.085.950,50	-4.180.908.250,50	-3.567.996.300,50
Aset Tak Berwujud (Netto)	**1.773.490.400,00**	**1.422.538.700,00**	**1.439.375.800,00**	**831.553.500,00**	**334.831.200,00**
JUMLAH ASET LAINNYA	**6.872.426.795,92**	**8.434.663.359,42**	**6.452.733.932,76**	**1.840.189.882,30**	**17.624.547.963,53**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



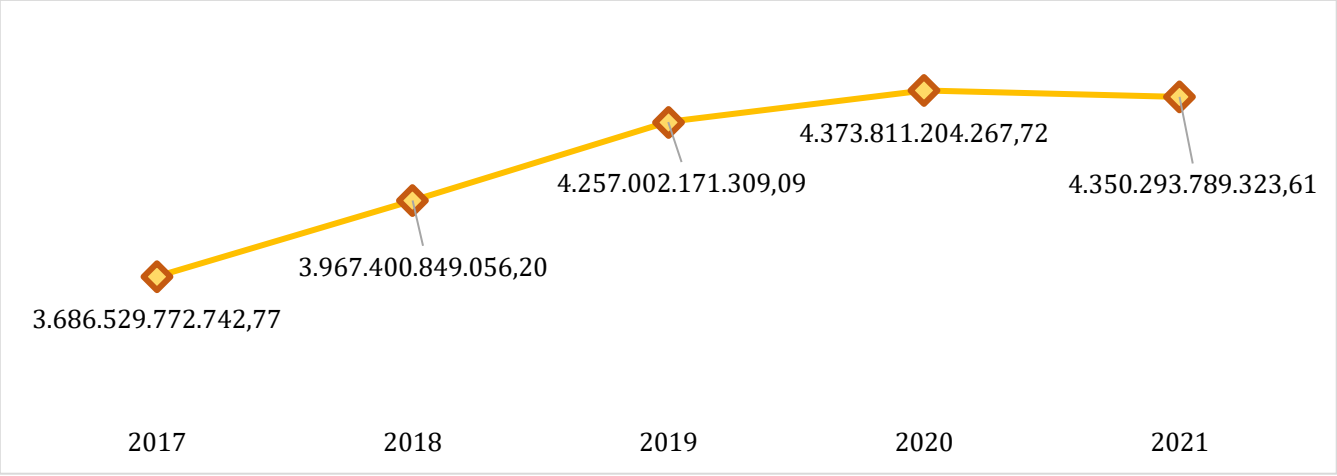
Gambar 24. 4 Jumlah Aset Lainnya

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 5 Jumlah Aset Keseluruhan

ASET LAINNYA	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Aset Keseluruhan	3.686.529.772.742,77	3.967.400.849.056,20	4.257.002.171.309,09	4.373.811.204.267,72	4.350.293.789.323,61

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



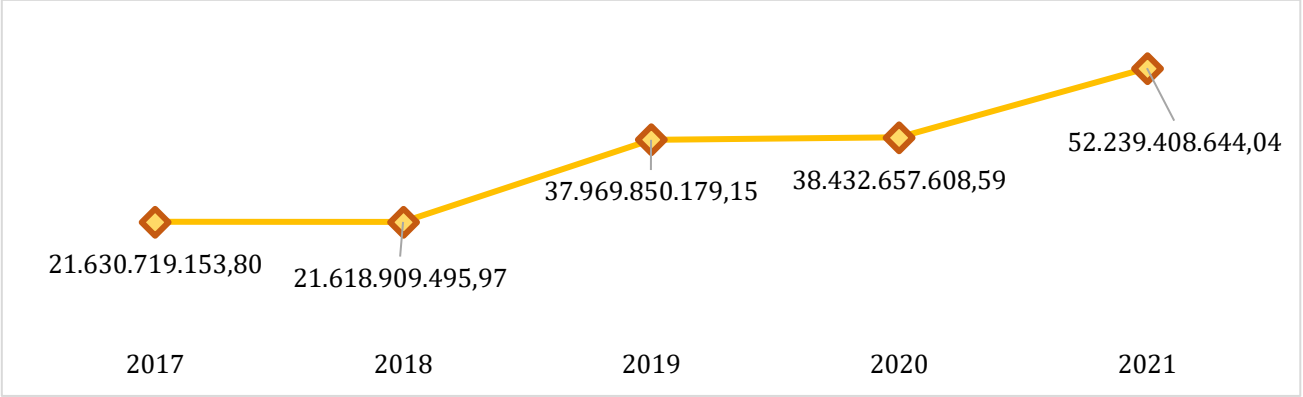
Gambar 24. 5 Jumlah Aset Keseluruhan

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 6 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2017	2018	2019	2020	2021
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.781.570.562,00	152.029.095,19	392.161.071,82	4.506.618,00	7.420.331,00
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.590.898.308,00	2.186.771.286,00	332.948.572,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	2.804.027.922,80	3.357.462.309,18	3.087.002.311,73	2.609.872.810,99	2.176.478.612,90
Utang Beban	14.364.150.061,00	14.380.439.255,00	28.531.000.842,00	33.983.925.398,00	46.712.635.272,00
Utang Transfer	90.072.300,00	1.542.207.550,60	5.626.737.381,60	1.834.352.781,60	3.342.874.428,14
Utang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**21.630.719.153,80**	**21.618.909.495,97**	**37.969.850.179,15**	**38.432.657.608,59**	**52.239.408.644,04**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Gambar 24. 6 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 7 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	2017	2018	2019	2020	2021
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 8 Jumlah Kewajiban Keseluruhan

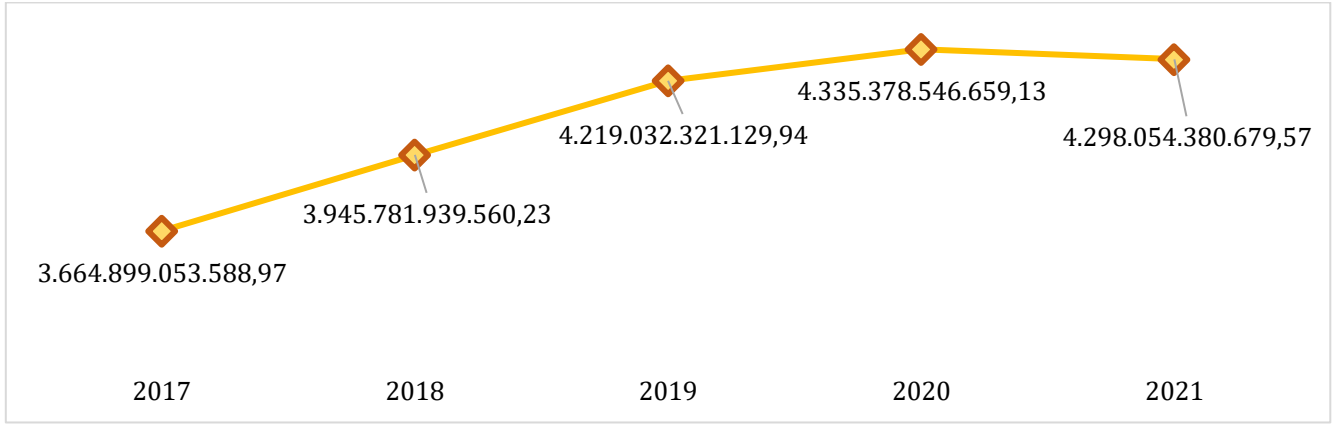
	2017	2018	2019	2020	2021
JUMLAH KEWAJIBAN	21.630.719.153,80	21.618.909.495,97	37.969.850.179,15	38.432.657.608,59	52.239.408.644,04

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 9 Jumlah Ekuitas Dana

	2017	2018	2019	2020	2021
JUMLAH EKUITAS DANA	3.664.899.053.588,97	3.945.781.939.560,23	4.219.032.321.129,94	4.335.378.546.659,13	4.298.054.380.679,57

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



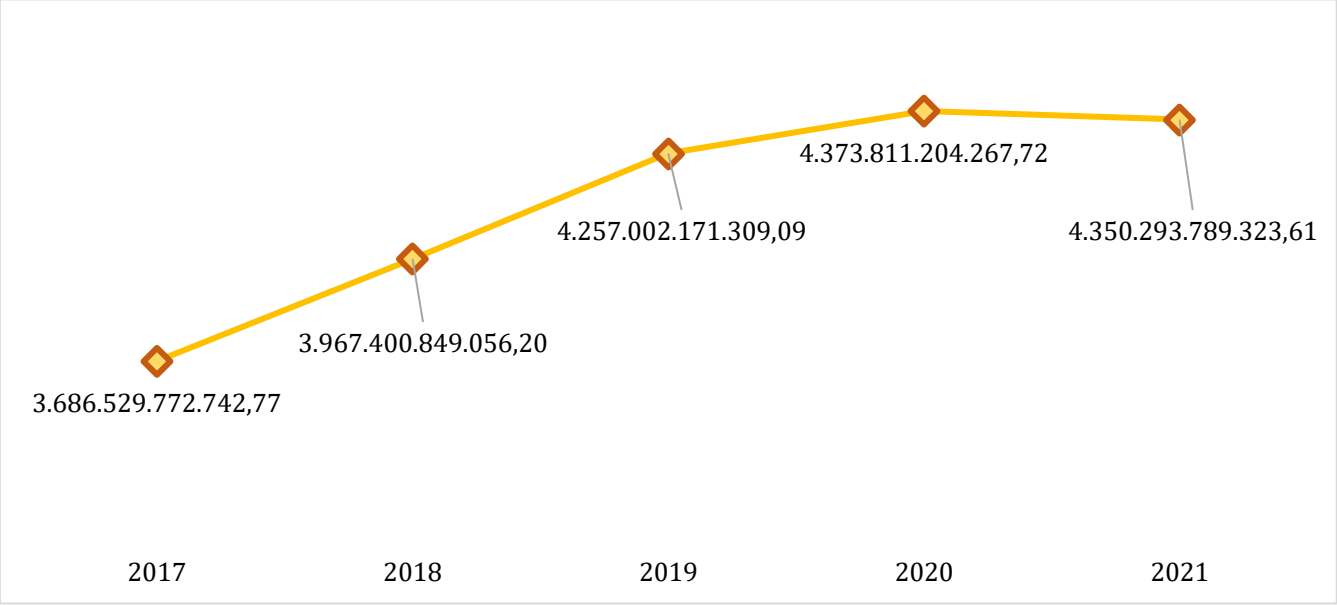
Gambar 24. 7 Jumlah Ekuitas Dana

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 10 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

	2017	2018	2019	2020	2021
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.686.529.772.742,77	3.967.400.849.056,20	4.257.002.171.309,09	4.373.811.204.267,72	4.350.293.789.323,61

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Gambar 24. 8 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

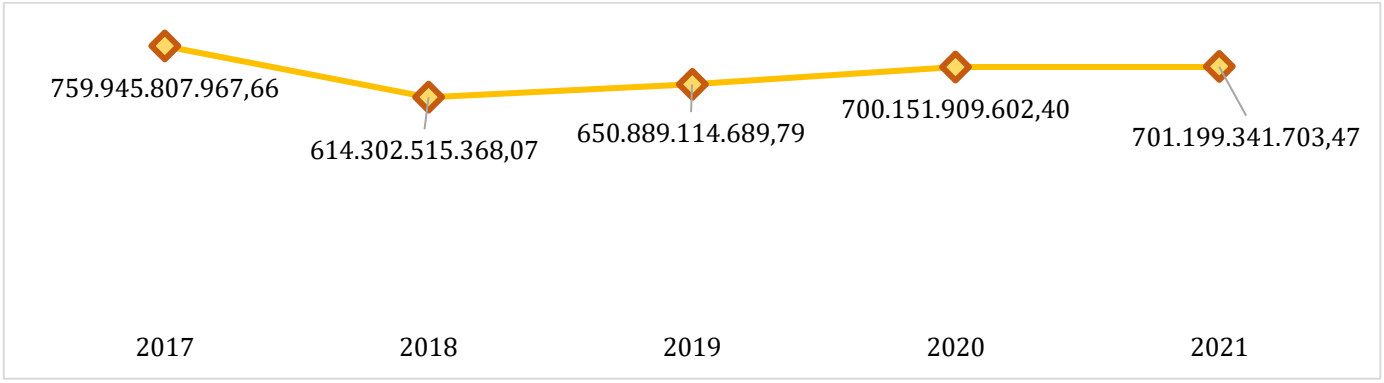
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 11 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

PENDAPATAN ASLI DAERAH	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Pajak Daerah	383.743.763.642,93	357.264.301.332,79	364.181.321.493,99	360.889.758.442,02	393.593.785.426,11
Hasil Retribusi Daerah	41.354.143.308,33	40.328.017.626,33	51.893.891.085,33	34.236.693.406,00	30.094.738.924,33

PENDAPATAN ASLI DAERAH	2017	2018	2019	2020	2021
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.532.637.901,00	4.437.658.869,00	4.654.760.005,00	4.724.719.096,00	4.777.764.881,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	330.315.263.115,40	212.272.537.539,95	230.159.142.105,47	300.300.738.658,38	272.733.052.472,03
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**759.945.807.967,66**	**614.302.515.368,07**	**650.889.114.689,79**	**700.151.909.602,40**	**701.199.341.703,47**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



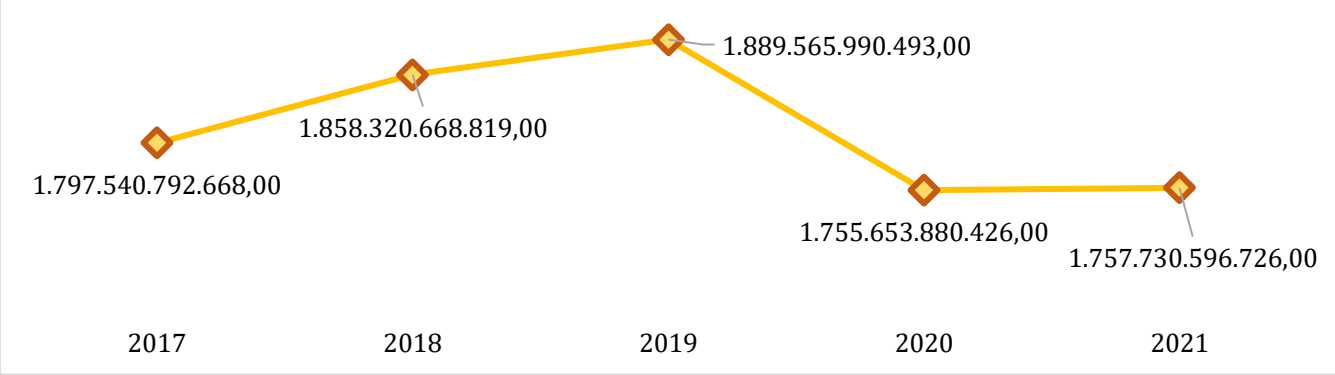
Gambar 24. 9 Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 12 Jumlah Dana Perimbangan

DANA PERIMBANGAN	2017	2018	2019	2020	2021
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	244.686.816.268,00	291.469.057.168,00	270.400.507.183,00	271.830.390.452,00	366.103.289.336,00
Dana Alokasi Umum	1.179.520.941.000,00	1.179.777.625.000,00	1.218.496.788.000,00	1.103.294.454.000,00	1.096.817.576.000,00
Dana Alokasi Khusus	373.333.035.400,00	387.073.986.651,00	400.668.695.310,00	380.529.035.974,00	294.809.731.390,00
JUMLAH DANA PERIMBANGAN	**1.797.540.792.668,00**	**1.858.320.668.819,00**	**1.889.565.990.493,00**	**1.755.653.880.426,00**	**1.757.730.596.726,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



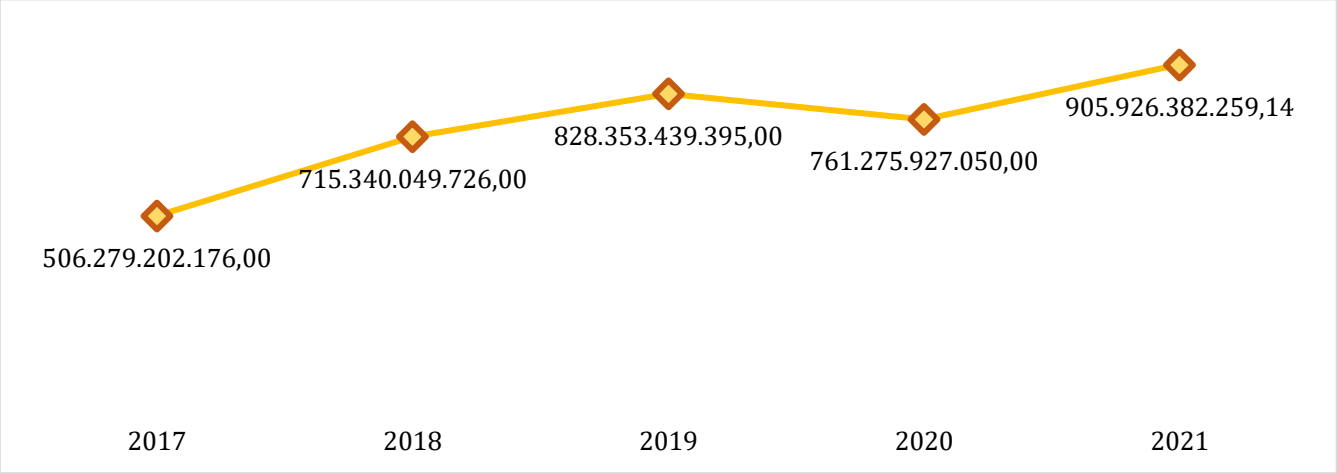
Gambar 24. 10 Jumlah Dana Perimbangan

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 13 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Hibah	7.706.787.975,00	122.826.560.000,00	158.508.091.610,00	164.679.420.467,00	27.286.176.486,00
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	193.641.375.201,00	189.220.318.826,00	230.460.466.285,00	171.461.978.633,00	242.754.115.501,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	282.762.239.000,00	326.777.884.400,00	417.525.416.000,00	381.611.699.200,00	418.248.920.370,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	22.168.800.000,00	76.515.286.500,00	21.859.465.500,00	43.522.828.750,00	33.900.858.357,14
Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundangan					183.736.311.545,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**506.279.202.176,00**	**715.340.049.726,00**	**828.353.439.395,00**	**761.275.927.050,00**	**905.926.382.259,14**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



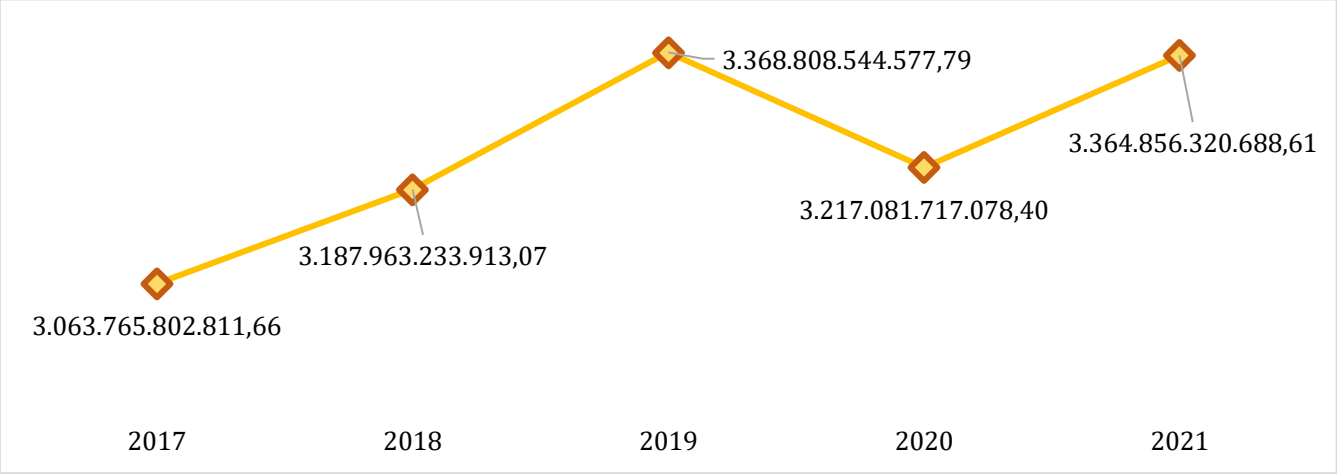
Gambar 24. 11 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 14 Pendapatan Total

	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN TOTAL	3.063.765.802.811,66	3.187.963.233.913,07	3.368.808.544.577,79	3.217.081.717.078,40	3.364.856.320.688,61

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Gambar 24. 12 Pendapatan Total

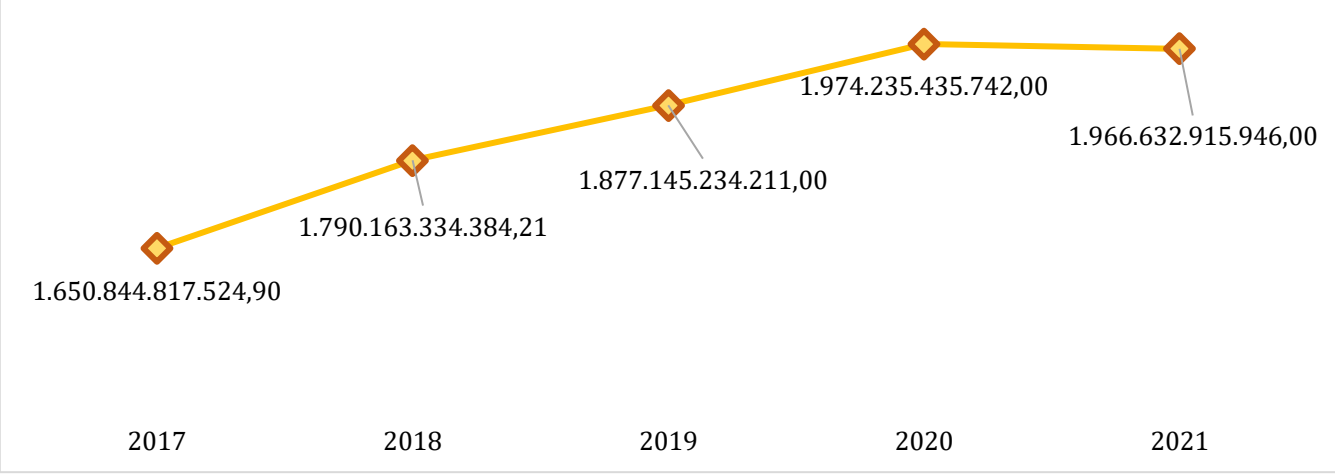
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 15 Jumlah Belanja Tidak Langsung

BELANJA TIDAK LANGSUNG	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	1.006.646.904.639,81	1.008.704.137.648,21	1.025.912.267.478,00	997.301.803.350,00	1.107.837.622.596,00
Belanja Hibah	132.214.781.144,09	185.923.583.493,00	158.852.439.992,00	126.307.448.453,00	156.848.191.841,00
Belanja Bantuan Sosial	21.321.974.000,00	25.312.571.930,00	30.531.955.000,00	34.784.875.000,00	32.824.427.624,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa	36.693.623.297,00	40.449.445.359,00	45.764.322.634,00	43.341.894.789,00	40.361.924.322,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	444.044.764.835,00	520.859.079.134,00	605.005.926.200,00	600.400.751.456,00	594.893.000.602,00
Belanja Tidak Terduga	9.922.769.609,00	8.914.516.820,00	11.078.322.907,00	172.098.662.694,00	33.867.748.961,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.650.844.817.524,90**	**1.790.163.334.384,21**	**1.877.145.234.211,00**	**1.974.235.435.742,00**	**1.966.632.915.946,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



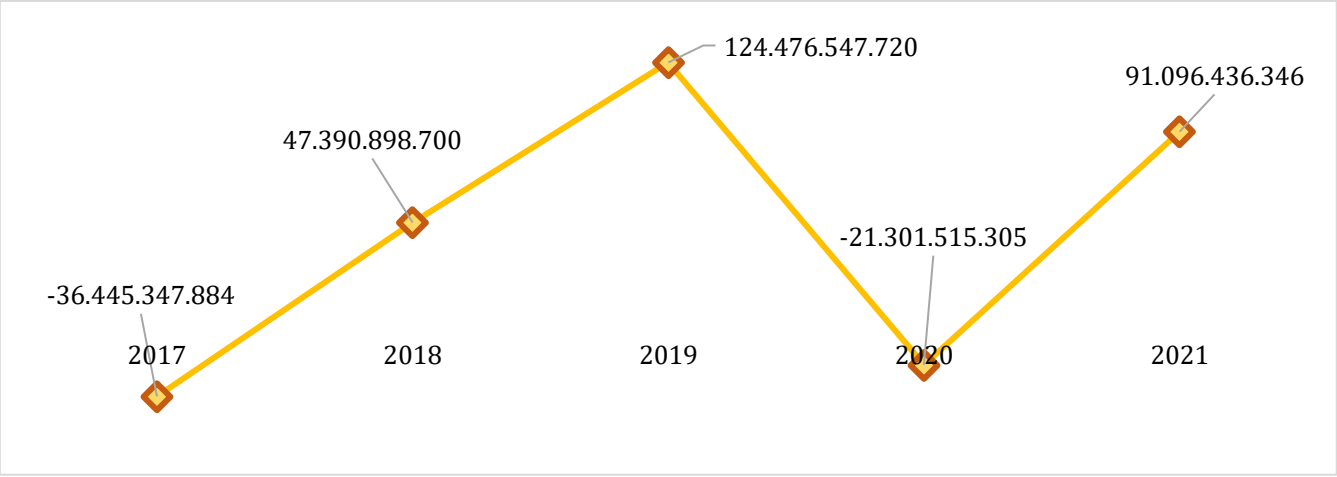
Gambar 24. 13 Jumlah Belanja Tidak Langsung

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 16 Surplus/Defisit

	2017	2018	2019	2020	2021
SURPLUS / DEFISIT	-36.445.347.884	47.390.898.700	124.476.547.720	-21.301.515.305	91.096.436.346

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



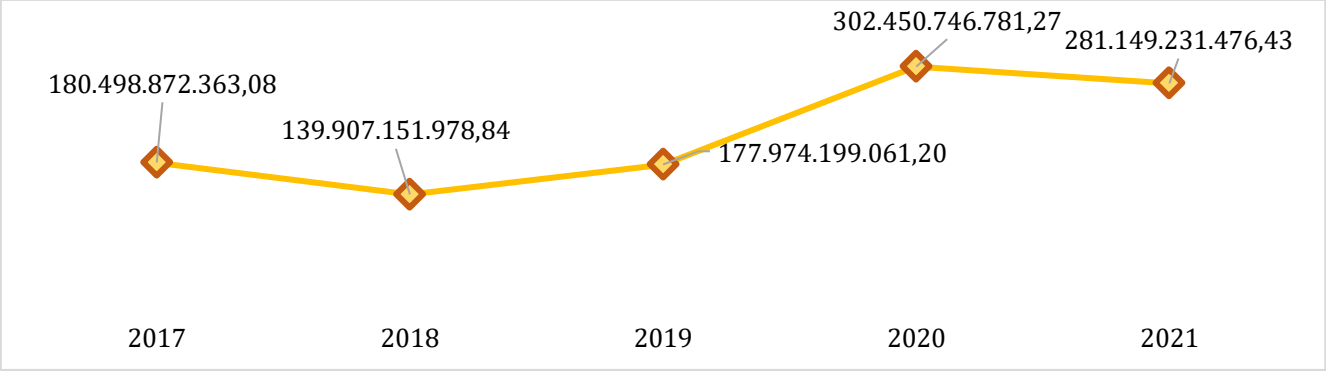
Gambar 24. 14 Surplus/Defisit

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 17 Penerimaan Pembiayaan Daerah

	2017	2018	2019	2020	2021
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	180.498.872.363,08	139.907.151.978,84	177.969.199.061,20	302.450.746.781,27	281.149.231.476,43
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	5.000.000,00	-	-
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**180.498.872.363,08**	**139.907.151.978,84**	**177.974.199.061,20**	**302.450.746.781,27**	**281.149.231.476,43**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



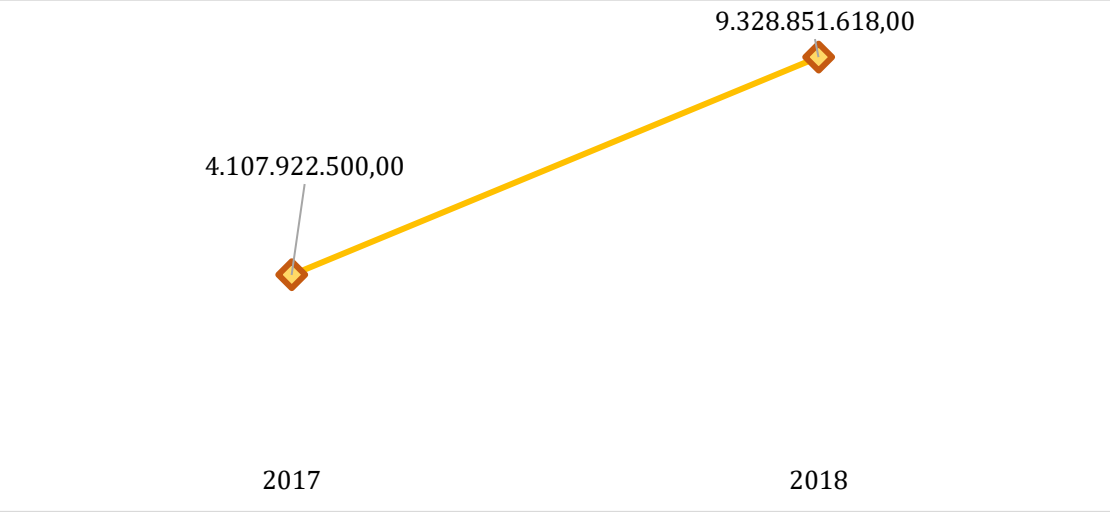
Gambar 24. 15 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 18 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

	2017	2018
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.107.922.500,00	9.328.851.618,00
Pembayaran Pokok Utang		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	**4.107.922.500,00**	**9.328.851.618,00**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



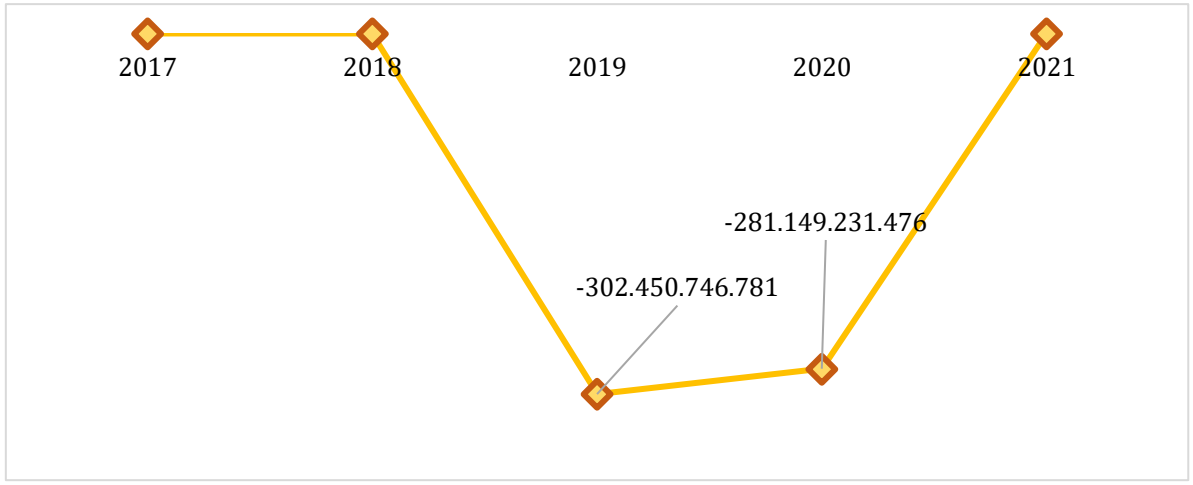
Gambar 24. 16 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 19 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

	2017	2018	2019	2020	2021
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-302.450.746.781	-281.149.231.476	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



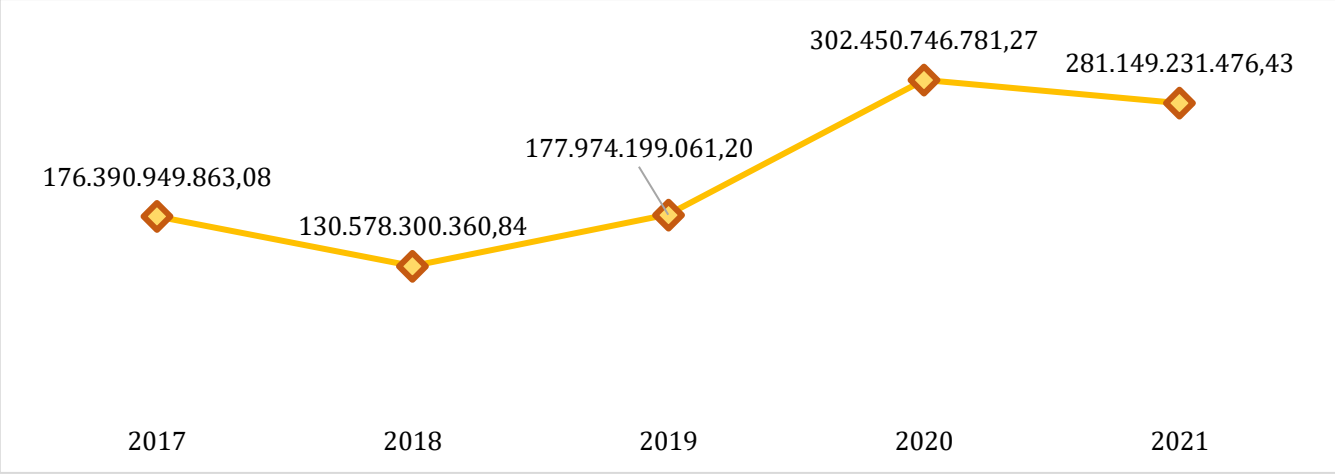
Gambar 24. 17 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 20 Pembiayaan Netto

	2017	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN NETTO	176.390.949.863,08	130.578.300.360,84	177.974.199.061,20	302.450.746.781,27	281.149.231.476,43

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



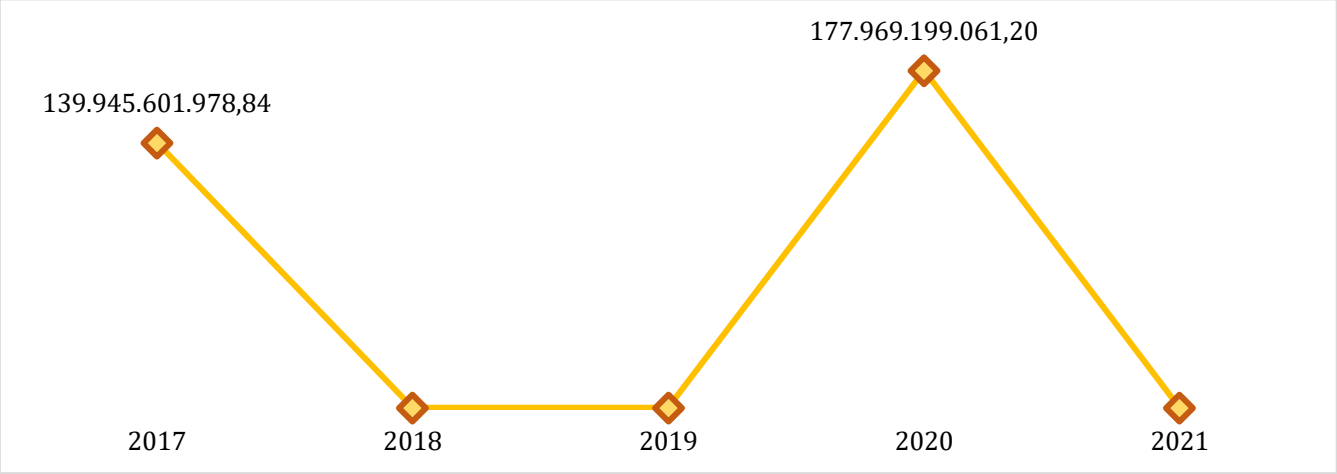
Gambar 24. 18 Pembiayaan Netto

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 24. 21 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

	2017	2018	2019	2020	2021
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	139.945.601.978,84	-	-	177.969.199.061,20	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Gambar 24. 19 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

DINAS PERIKANAN

DESKRIPSI

Kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami tren naik. Pada tahun 2017 sektor perikanan menyumbang PDRB sebesar 648,01 milyar rupiah, meningkat mencapai 825,09 milyar rupiah pada tahun 2021.

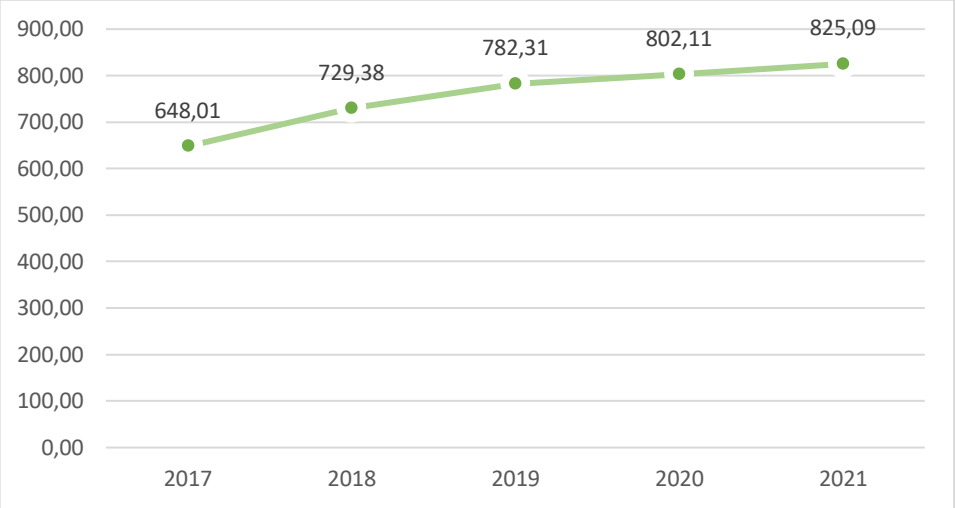
Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 36.579,14 ton mengalami tren naik hingga tahun 2019. Namun menurun pada tahun 2020 menjadi 42.216,06 ton. Pada tahun 2021 jumlah produksi perikanan kembali meningkat menjadi 43.998,27 ton.

Persentase produksi perikanan tangkap dihitung dengan pengurangan produksi tangkap tahun n dikurangi produksi tangkap n-1 dibandingkan produksi tangkap n-1. Jika dilihat persentase produksi perikanan tangkap dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami perubahan yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 persentase produksi perikanan tangkap meningkat namun tidak banyak yakni 0,59 persen. Sementara persentase produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2017 persentase produksi perikanan budidaya sebesar 3,17 persen, meningkat menjadi 8,19 persen pada tahun 2021.

Tabel 25. 1 PDRB sub sektor perikanan

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	PDRB sub sektor perikanan	648,01	729,38	782,31	802,11	825,09	Milyar Rupiah

Sumber: Dinas Perikanan



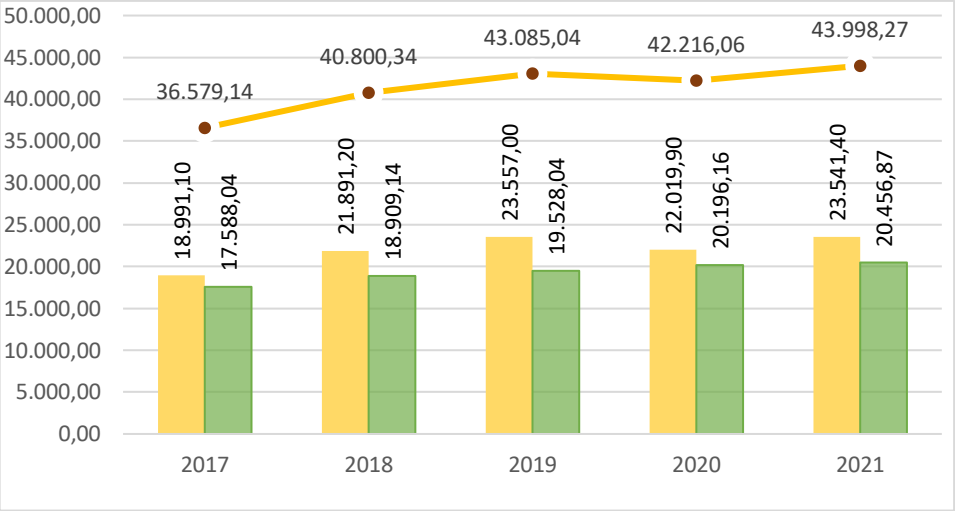
Gambar 25. 1 PDRB sub sektor perikanan (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber: Dinas Perikanan

Tabel 25. 2 Produksi Perikanan

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	Jumlah Produksi Perikanan	36.579,14	40.800,34	43.085,04	42.216,06	43.998,27	ton
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	18.991,100	21.891,200	23.557,000	22.019,900	23.541,400	ton
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	17.588,035	18.909,138	19.528,040	20.196,161	20.456,869	ton

Sumber: Dinas Perikanan



Gambar 25. 2 Jumlah Produksi Perikanan (Dalam Ton)

Sumber: Dinas Perikanan

Tabel 25. 3 Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Mandiri

No	Elemen	2019	2020	2021	Satuan
3	Persentase pelaku usaha perikanan yang mandiri	3,35	4,43	4,72	%

Sumber: Dinas Perikanan



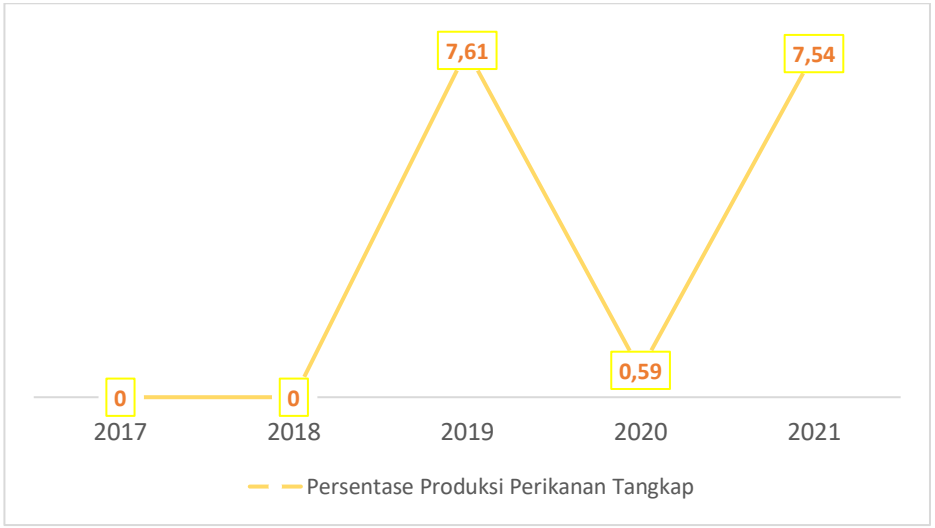
Gambar 25. 3 Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang Mandiri

Sumber: Dinas Perikanan

Tabel 25. 4 Produksi Perikanan Tangkap

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
4	Persentase Produksi Perikanan Tangkap			7,61	0,59	7,54	%
	Jumlah produksi perikanan tangkap	18.991,10	21.891,20	23.557,00	22.019,90	23.541,40	ton
	Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	36.579,14	40.800,34	43.085,04	42.216,06	43.998,27	ton

Sumber: Dinas Perikanan



Gambar 25. 4 Persentase Produksi Perikanan Tangkap

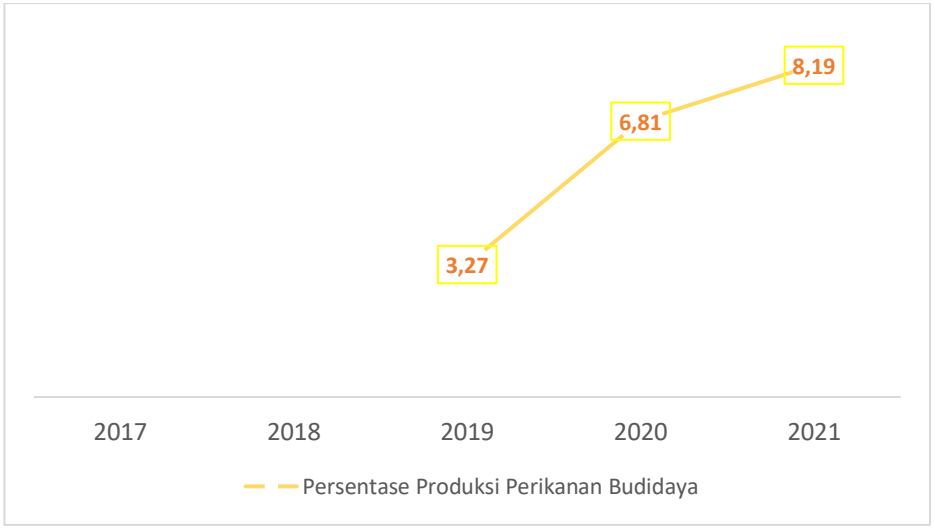
Sumber: Dinas Perikanan

Tabel 25. 5 Produksi Perikanan Budidaya

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
5	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	-	-	3,27	6,81	8,19	%
	Jumlah produksi perikanan budidaya	17.588,035	18.909,14	19.528,04	20.196,16	20.456,869	ton

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
	Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya	36.579,14	40.800,34	43.085,04	42.216,06	43.998,27	ton

Sumber: Dinas Perikanan



Gambar 25. 5 Persentase Produksi Perikanan Budidaya

Sumber: Dinas Perikanan

Tabel 25. 6 Nilai Omzet Pelaku Usaha Perikanan (Rp,)

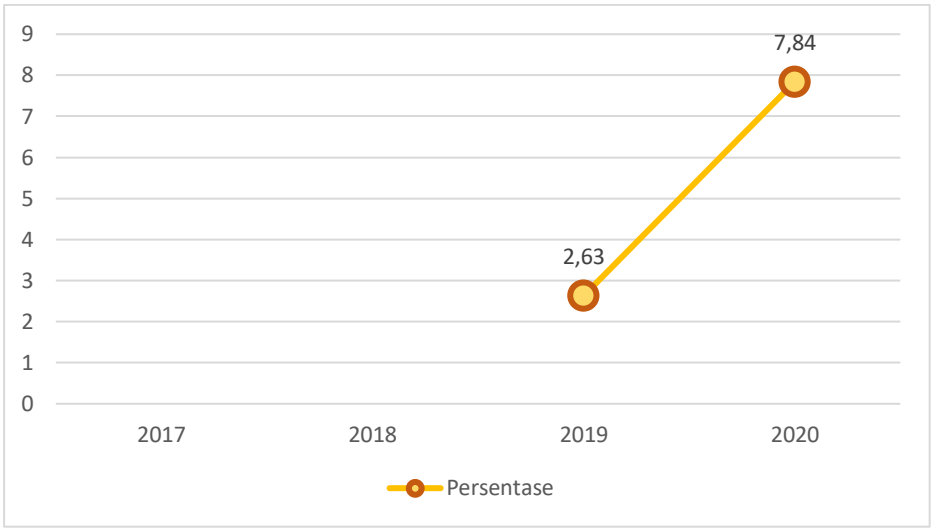
No	Elemen	2020	2021	Satuan
6	Nilai Omzet Pelaku Usaha Perikanan (Rp.)	19.228.650.000	17.000.000.000	Rp

Sumber: Dinas Perikanan

Tabel 25. 7 Peserta Pelatihan Perikanan yang Menjadi Wirausaha Baru

No	Elemen	2019	2020
7	Persentase peserta pelatihan perikanan yang menjadi wirausaha baru	2,63	7,84
	Jumlah peserta pelatihan perikanan yang menjadi wirausaha baru	13,00	20,00
	Jumlah peserta pelatihan perikanan	495,00	255,00

Sumber: Dinas Perikanan



Gambar 25. 6 Persentase peserta pelatihan perikanan yang menjadi wirausaha baru

Sumber: Dinas Perikanan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

DESKRIPSI

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pasuruan yang mengikuti dan lulus ujian jumlanya tidak sama setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 86 orang, cenderung menurun jumlahnya hingga tahun 2019 tercatat 37 orang. Kemudian kembali meningkat hingga tahun 2021 tercatat ada sebanyak 136 orang. Dari total ASN yang mengikuti ujian, semuanya lulus ujian. Selain itu ASN yang mengikuti ujian mayoritas berjenis kelamin laki-laki.

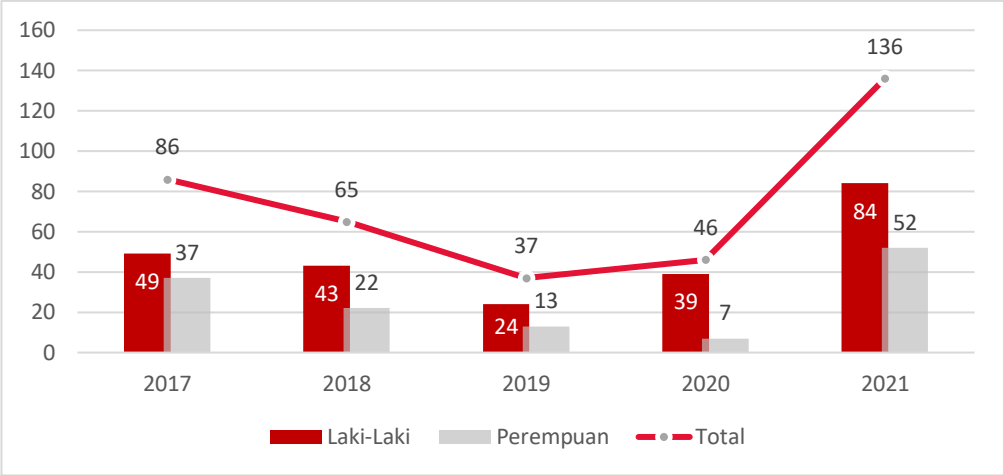
Guna mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran indeks profesionalitas ASN untuk melihat kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan disiplin pegawai ASN dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Nilai Indeks Profesionalitas ASN di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2019 sebesar 70,2 masuk kategori rendah dimana hingga tahun 2021 nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 70,05 masuk kategori rendah.

Pegawai yang mengikuti Diklat assesment jabatan secara keseluruhan dinyatakan lulus Diklat assesment jabatan mulai tahun 2017 hingga 2021. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural pada tahun 2017 sebanyak 41 orang dimana 26 orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural cenderung bertambah setiap tahunnya hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 584 orang dengan 181 orang berjenis kelamin laki-laki dan 403 berjenis kelamin perempuan.

Tabel 26. 1 Jumlah ASN Yang Mengikuti Dan Lulus Ujian

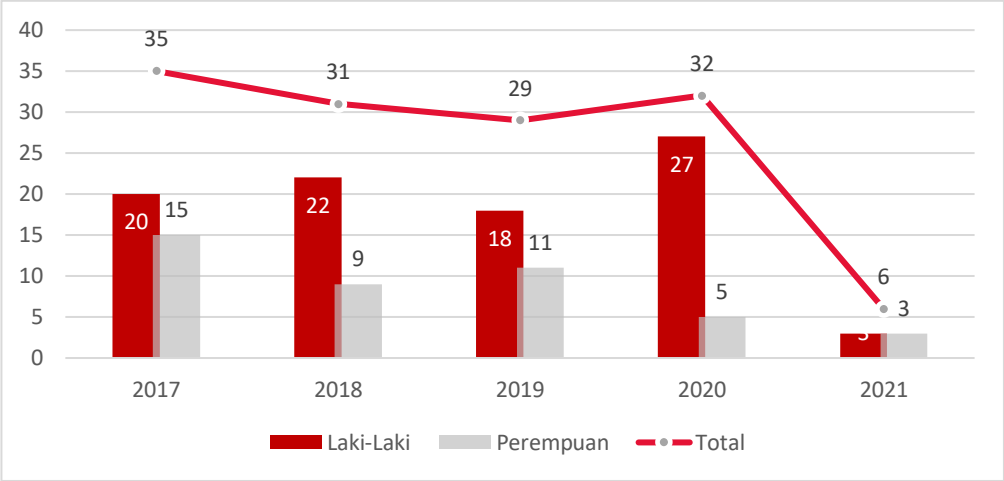
No	Elemen	Tahun															Satuan
		2017			2018			2019			2020			2021			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	ASN yang mengikuti dan lulus ujian	49	37	86	43	22	65	24	13	37	39	7	46	84	52	136	Jumlah
1.1	Persentase ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK I	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	%
	Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK I	20	15	35	22	9	31	18	11	29	27	5	32	3	3	6	Orang
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian UD TK I	20	15	35	22	9	31	18	11	29	27	5	32	3	3	6	Orang
1.2	Persentase ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK II	-	-	-	100	0	100	100	100	100	-	-	-	100	100	100	%
	Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK II	-	-	-	2	0	2	6	2	8	2	2	4	5	3	8	Orang
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian UD TK II	-	-	-	2	0	2	6	2	8	2	2	4	5	3	8	Orang
1.3	Persentase ASN yang lulus mengikuti Ujian PI	100	100	100	100	100	100	-	-	-	100		100	100	100	100	%
	Jumlah ASN yang lulus mengikuti Ujian PI	29	22	51	19	13	32	-	-	-	10	0	10	76	46	122	Orang
	Jumlah ASN yang mengikuti ujian PI	29	22	51	19	13	32	-	-	-	10	0	10	76	46	122	Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



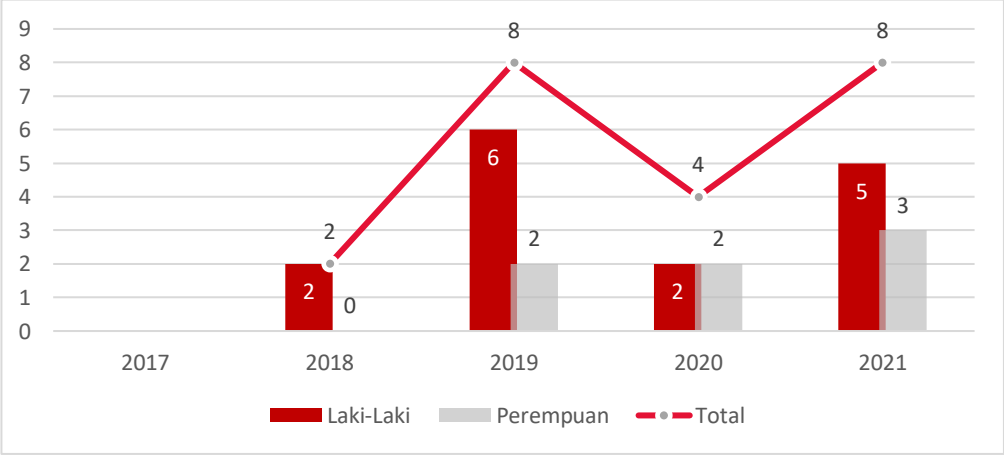
Gambar 26. 1 Jumlah ASN Yang Mengikuti Dan Lulus Ujian

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



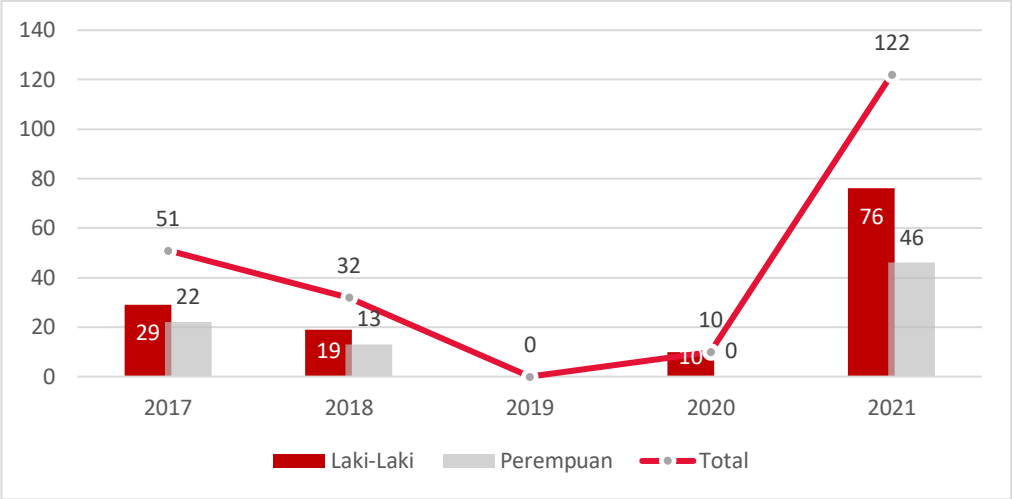
Gambar 26. 2 Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK I

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Gambar 26. 3 Jumlah ASN yang lulus mengikuti ujian UD TK II

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



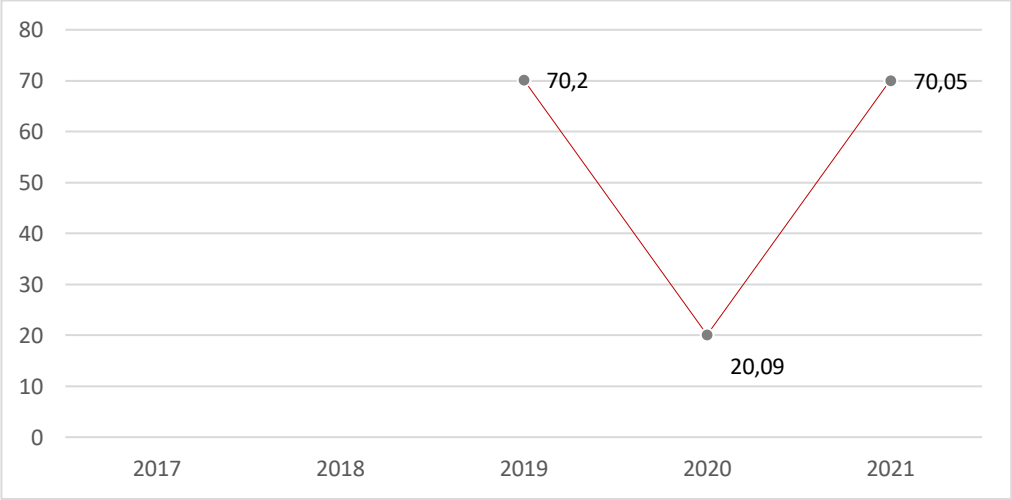
Gambar 26. 4 Jumlah ASN yang lulus mengikuti Ujian PI

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 26. 2 Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara)

	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara)	70,2	20,09	70,05	Indeks

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



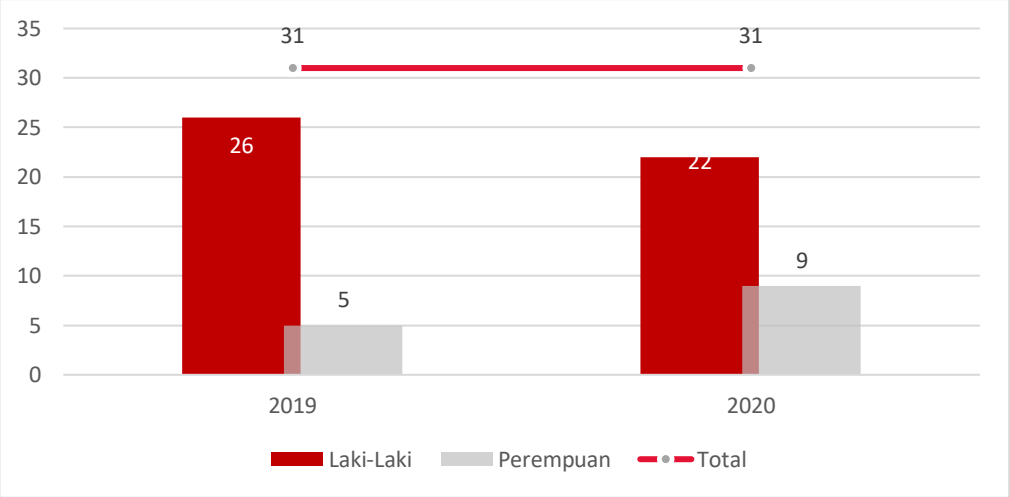
Gambar 26. 5 Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara)

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 26. 3 Pegawai Yang Lulus Diklat Assesment Jabatan

No	Elemen	Tahun						Satuan
		2019			2020			
		L	P	L+P	L	P	L+P	
3	Persentase Pegawai yang lulus Diklat assesment jabatan	100	100	100	100	100	100	%
	Jumlah pegawai yang lulus Diklat assesment jabatan	26	5	31	22	9	31	Orang
	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat assesment jabatan	26	5	31	22	9	31	Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



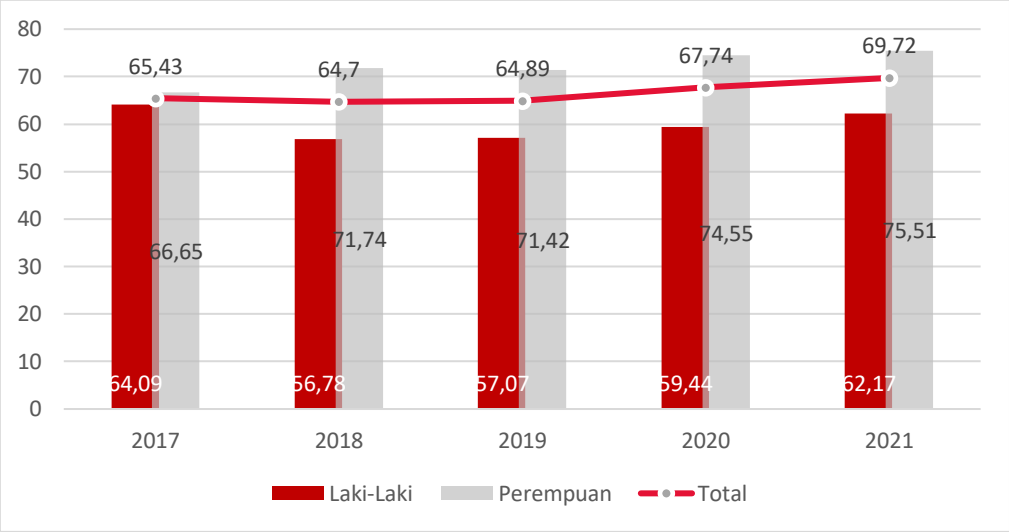
Gambar 26. 6 Jumlah Pegawai Yang Lulus Diklat Assesment Jabatan

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 26. 4 ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3

No	Elemen	Tahun															Satuan
		2017			2018			2019			2020			2021			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
4	Persentase ASN yang memiliki kualifikasi ijazah setara S1/S2/S3	64,09	66,65	65,43	56,78	71,74	64,70	57,07	71,42	64,89	59,44	74,55	67,74	62,17	75,51	69,72	%
	Jumlah ASN yang memiliki kualitas S1 atau S2 atau S3	3219	3660	6879	2705	3845	6550	2607	3903	6510	2506	3834	6340	2603	4128	6731	Orang
	Jumlah ASN	5023	5491	10514	4764	5360	10124	4568	5465	10033	4216	5143	9359	4187	5467	9654	Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



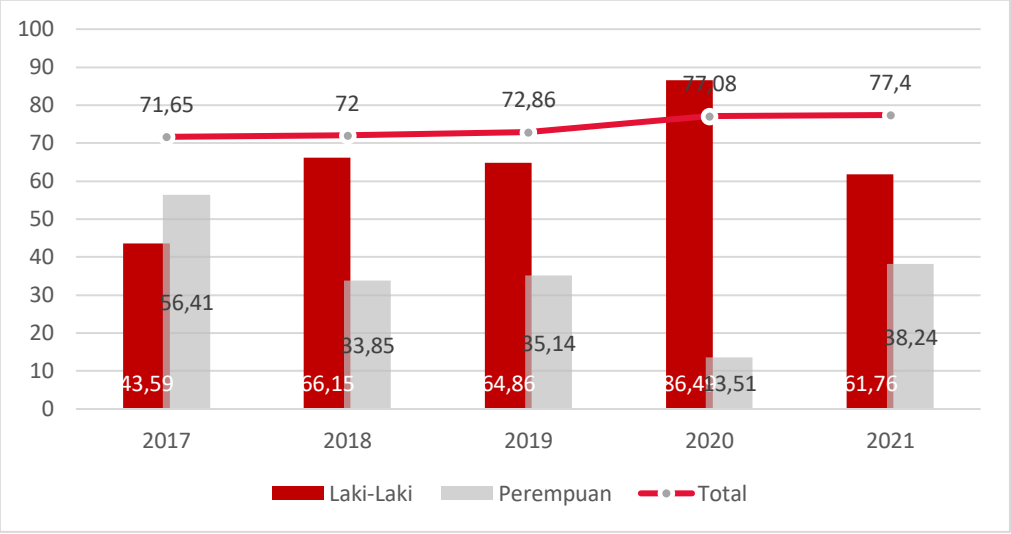
Gambar 26. 7 Persentase ASN Yang Memiliki Kualifikasi Ijazah Setara S1/S2/S3

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 26. 5 Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian Ijazah

No	Elemen	Tahun															Satuan
		2017			2018			2019			2020			2021			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
5	Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian Ijazah	43,59	56,41	71,65	66,15	33,85	72,00	64,86	35,14	72,86	86,49	13,51	77,08	61,76	38,24	77,40	%

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



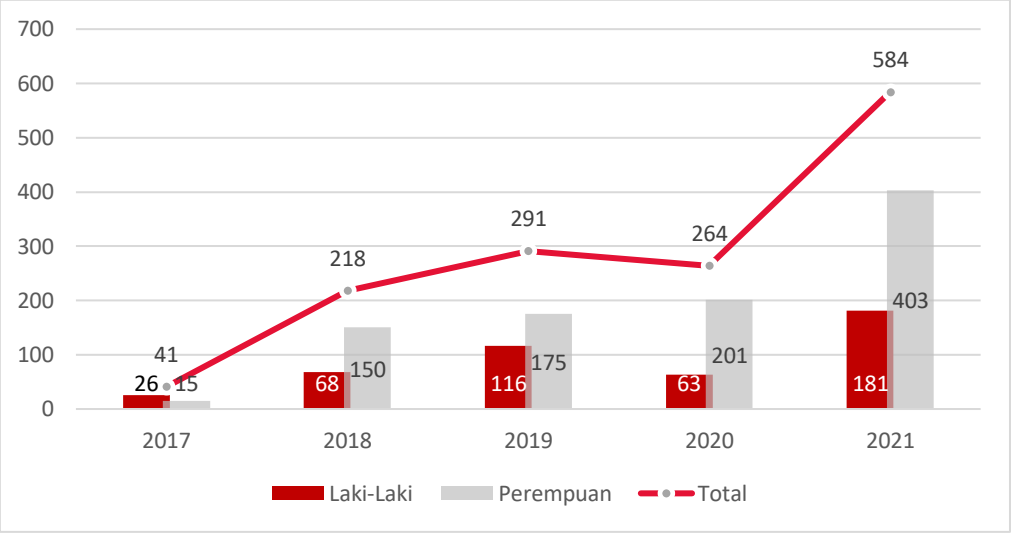
Gambar 26. 8 Persentase ASN yang lulus ujian tingkat 1,2,dan penyesuaian Ijazah

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 26. 6 Jumlah ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Latihan Struktural Dan Jumlah Seluruh Pegawai Struktural

No	Elemen	Tahun															Satuan
		2017			2018			2019			2020			2021			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
6	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural	26	15	41	68	150	218	116	175	291	63	201	264	181	403	584	orang
	Jumlah seluruh Pegawai struktural	749	344	1093	685	321	1006	589	295	884	576	315	891	532	314	846	Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Gambar 26. 9 Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan latihan struktural

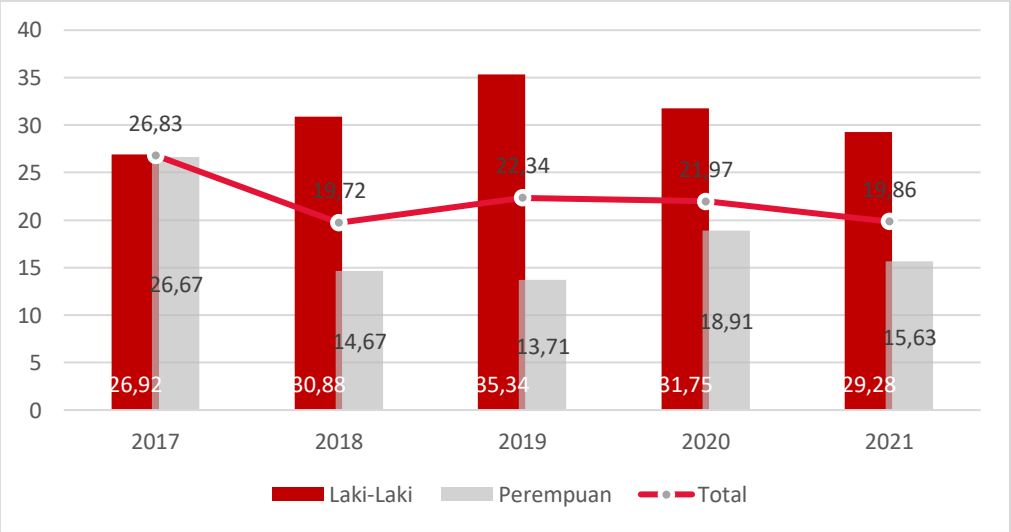
Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 26. 7 Peserta Diklat Aparatur Berpredikat Sangat Memuaskan

No	Elemen	Tahun															Satuan
		2017			2018			2019			2020			2021			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
7	Prosentase peserta diklat aparatur berpredikat sangat memuaskan	26,92	26,67	26,83	30,88	14,67	19,72	35,34	13,71	22,34	31,75	18,91	21,97	29,28	15,63	19,86	%
	Jumlah peserta diklat aparatur	7	4	11	21	22	43	41	24	65	20	38	58	53	63	116	Orang

No	Elemen	Tahun															Satuan
		2017			2018			2019			2020			2021			
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
	berpredikat sangat memuaskan																
	Jumlah peserta diklat aparatur	26	15	41	68	150	218	116	175	291	63	201	264	181	403	584	Orang

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Gambar 26. 10 Peserta Diklat Aparatur Berpredikat Sangat Memuaskan

Sumber: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DESKRIPSI

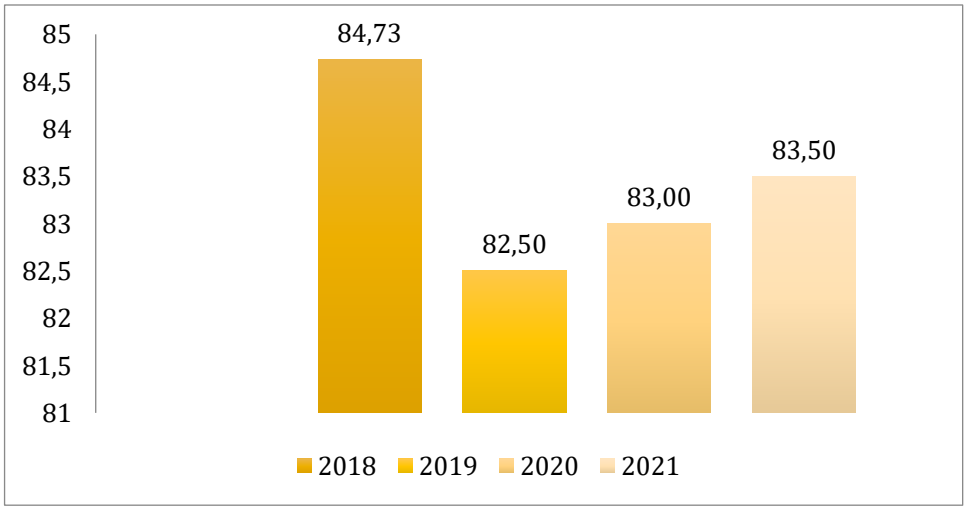
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pasuruan telah melakukan pendataan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal, investasi, dan pelayanan terpadu yang ada di Kabupaten Pasuruan. Tercatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan terpadu (GPP) sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 berada di atas 80 persen. Selama lima tahun terakhir (2017-2021), persentase tertinggi nilai investasi yang terealisasi di Kabupaten Pasuruan adalah pada tahun 2017, sedangkan yang terendah adalah di tahun 2021. Sebagai tambahan, nilai investasi yang terealisasi di tahun 2021 tidak mencapai target nilai investasi.

Persentase perizinan yang diterbitkan di Kabupaten Pasuruan yang terendah adalah pada tahun 2019, hal tersebut disebabkan oleh jumlah permohonan izin yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun lainnya. Selanjutnya terjadi peningkatan persentase perusahaan yang melakukan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) mulai dari tahun 2017 – 2021. Berikut adalah perincian dari penjelasan tersebut

Tabel 27. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Terpadu (GPP)

	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Terpadu (GPP)	84,73	82,50	83	83,50	%
Total dari Nilai Persepsi per Unsur	3,7	3,4	3,6	3,5	Nilai
Total Unsur yang Terisi	9	9	9	9	Nilai

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



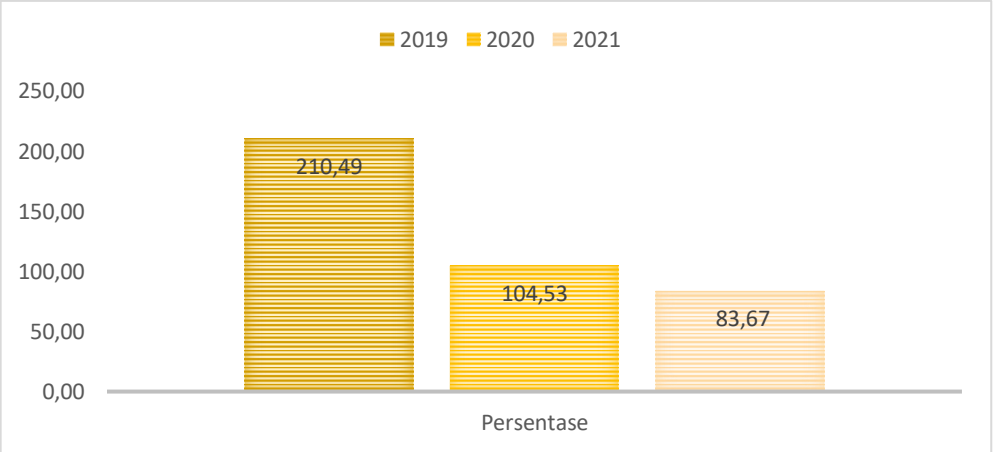
Gambar 27. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Terpadu (GPP)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 2 Persentase Nilai Investasi yang Terealisasi

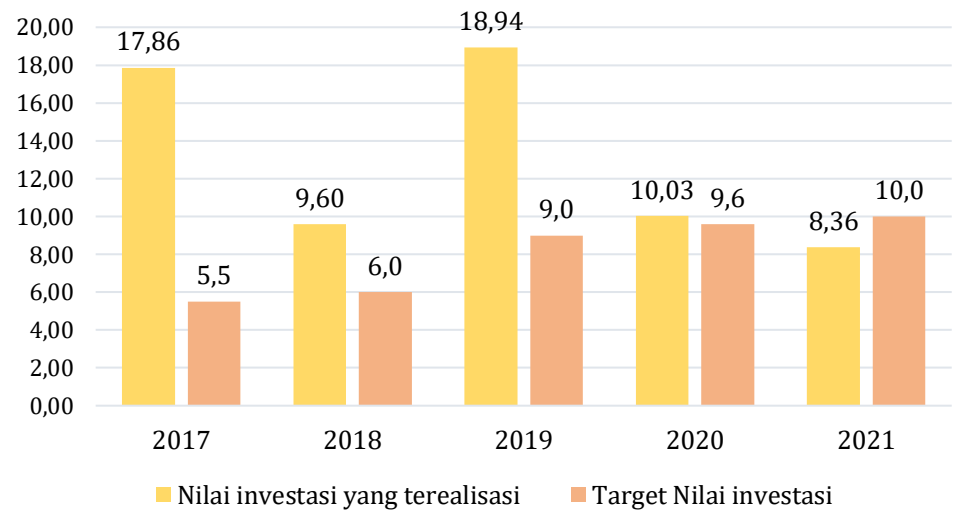
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase nilai investasi yang terealisasi	-	-	210,49	104,53	83,67	%
Nilai investasi yang terealisasi	17,86	9,60	18,94	10,03	8,36	Nilai
Target Nilai investasi	5,5	6,0	9,0	9,6	10,0	Nilai

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 27. 2 Persentase Nilai Investasi yang Terealisasi

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



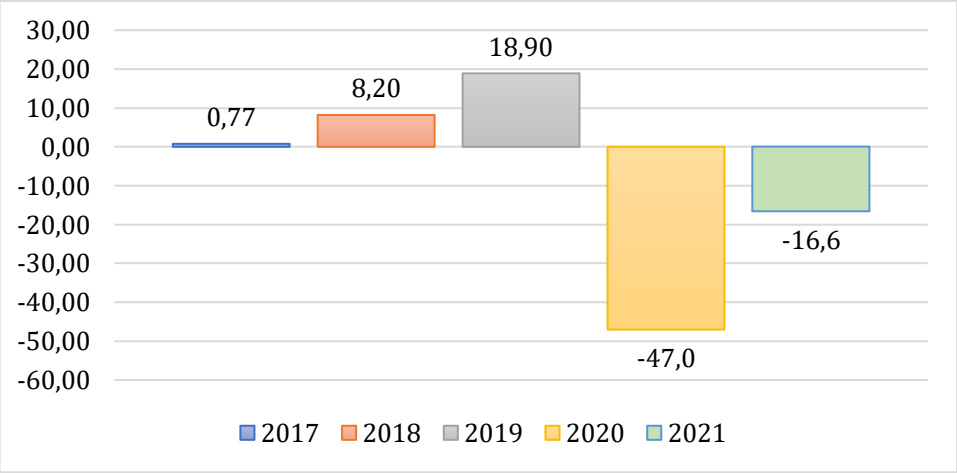
Gambar 27. 3 Target dan Realisasi Nilai Investasi

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 3 Peningkatan Nilai Investasi yang Ditanamkan di Daerah

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Peningkatan Nilai Investasi yang ditanamkan di daerah	0,77	8,20	18,90	-47,0	-16,6	Triliun Rupiah
Jumlah nilai investasi yang ditanamkan	0,77	8,20	18,90	10,35	7,27	Nilai

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



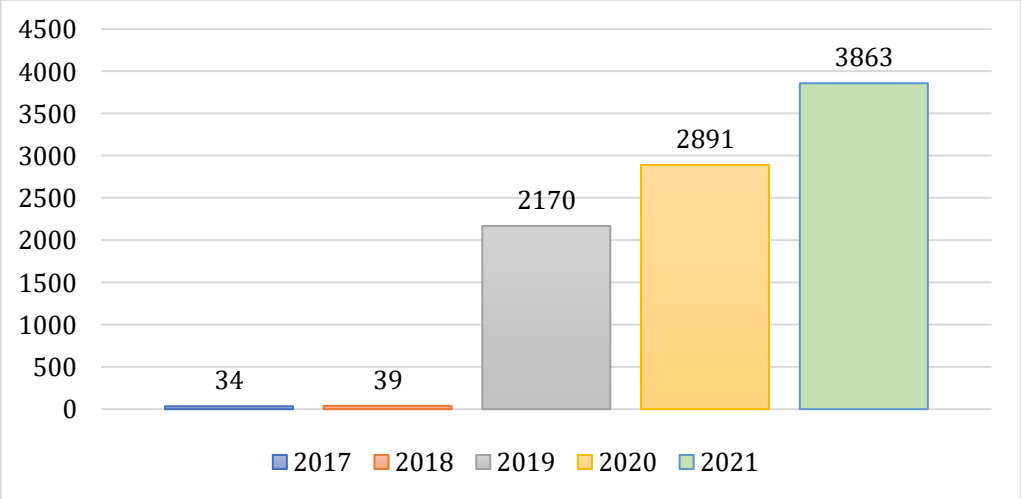
Gambar 27. 4 Peningkatan Nilai Investasi yang Ditanamkan di Daerah

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 4 Jumlah Investasi Berskala Nasional PMDN (Unit)

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Investasi Berskala Nasional PMDN (Unit)	34	39	2170	2891	3863	Unit

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



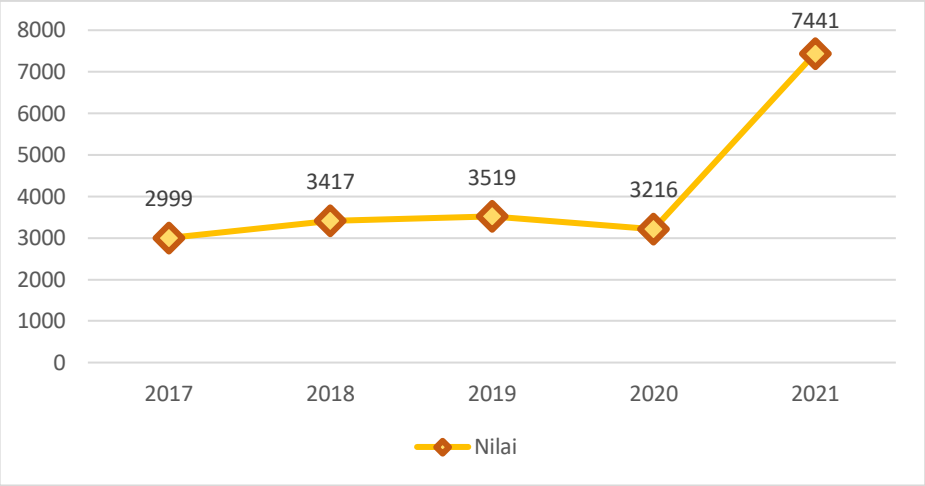
Gambar 27. 5 Jumlah Investasi Berskala Nasional PMDN (Unit)

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 5 Jumlah Penyelesaian Izin

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah	2999	3417	3519	3216	7441	Izin

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 27. 6 Jumlah Penyelesaian Izin

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 6 Jumlah Penyelesaian Izin Prinsip

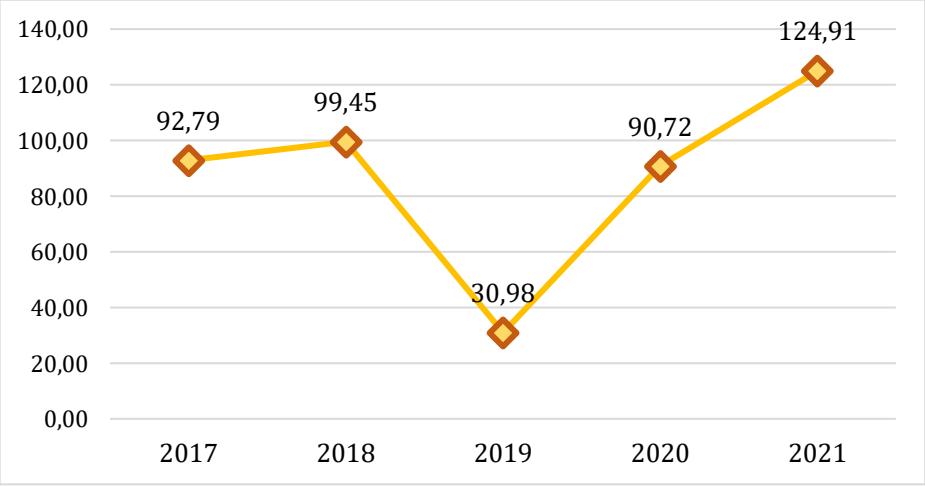
	2017	2018	Satuan
Jumlah Penyelesaian Izin Prinsip	2	1	Izin

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 7 Persentase Izin yang Diterbitkan

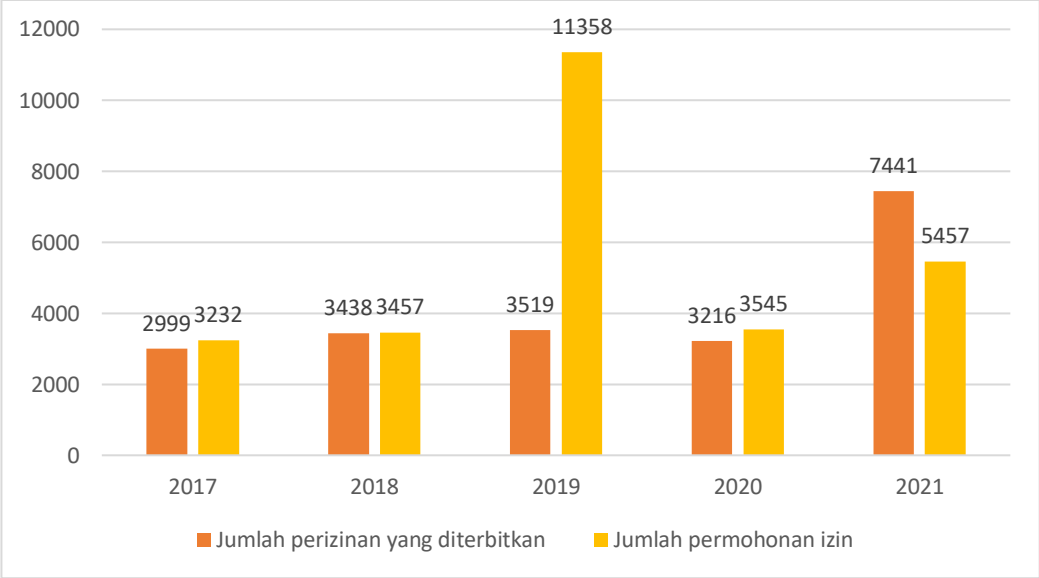
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Izin yang Diterbitkan	92,79	99,45	30,98	90,72	124,91	%
Jumlah Perizinan yang diterbitkan	2999	3438	3519	3216	7441	Izin
Jumlah permohonan Izin	3232	3457	11358	3545	5457	Izin

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 27. 7 Persentase Izin yang Diterbitkan

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

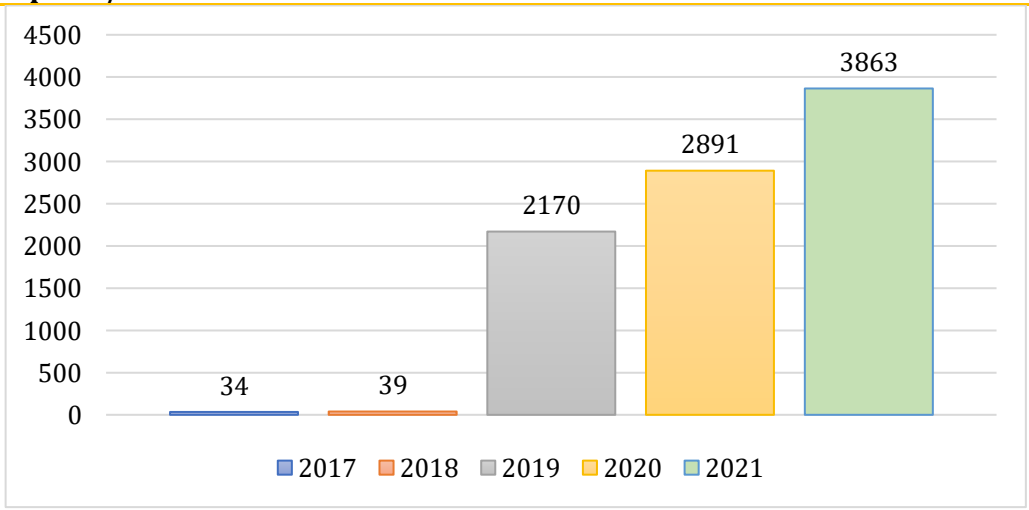


Gambar 27. 8 Jumlah Perizinan yang Diterbitkan dan Jumlah Permohonan Izin

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 8 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	17,87	16,80		-47,03	-16,62	%
Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/Kota	17,09	17,86	9,65			Triliun



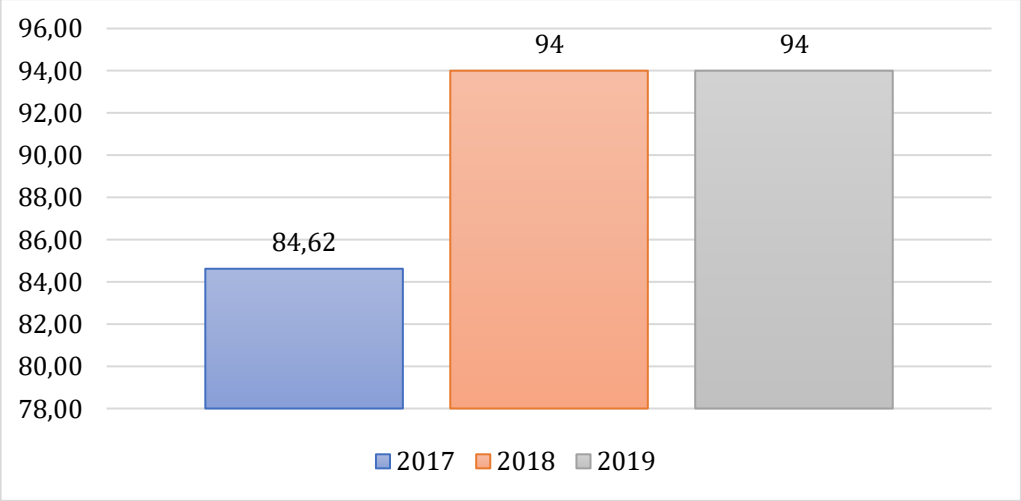
Gambar 27. 9 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 9 Persentase Kepuasan Investor Terhadap Pengembangan Iklim Penanaman Modal

	2017	2018	2019	Satuan
Persentase kepuasan investor terhadap pengembangan iklim penanaman modal	84,62	94	94	%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



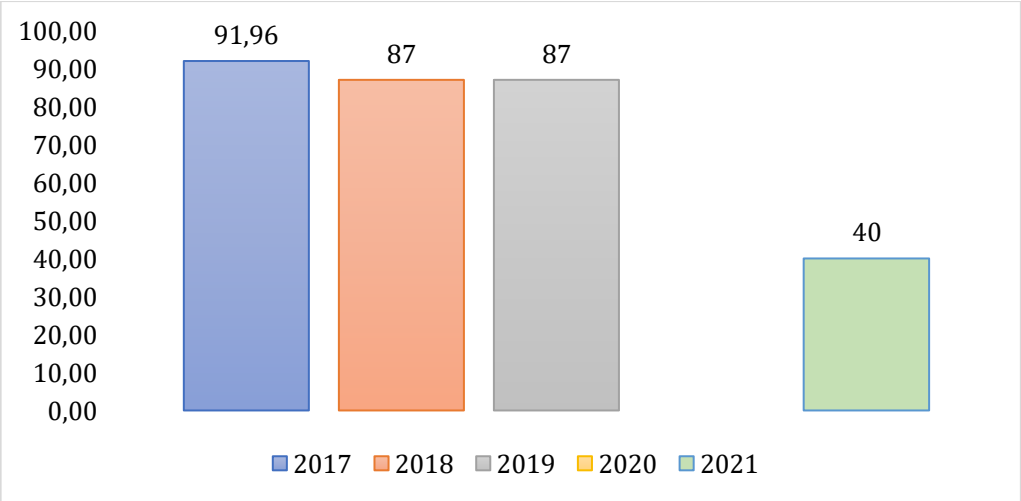
Gambar 27. 10 Persentase Kepuasan Investor Terhadap Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 10 Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase kegiatan promosi penanaman modal	91,96	87	87	-	40	%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



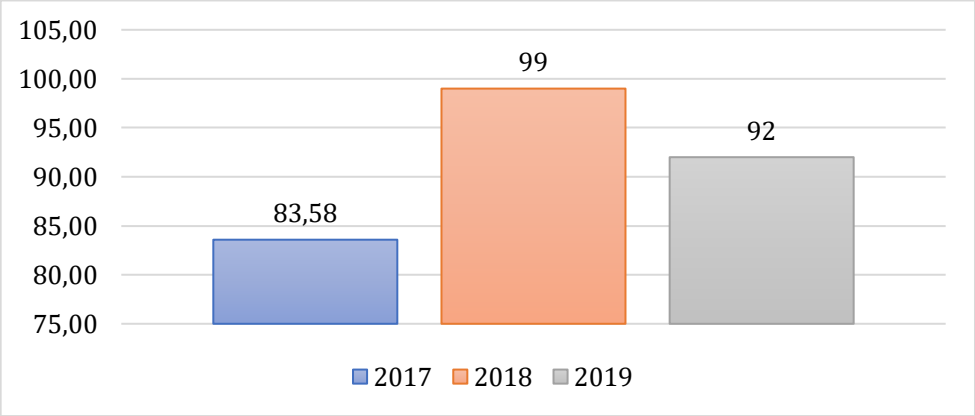
Gambar 27. 11 Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 11 Persentase Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal

	2017	2018	2019	Satuan
Persentase kegiatan pelayanan penanaman modal	83,58	99	92	%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



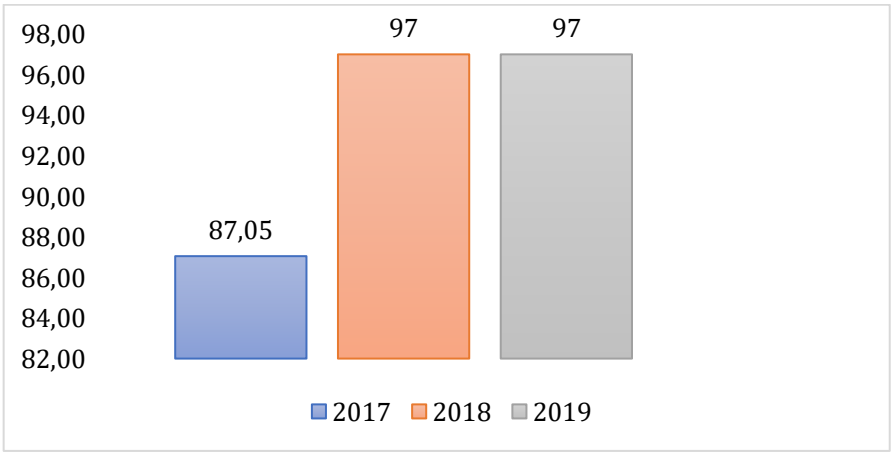
Gambar 27. 12 Persentase Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 12 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal

	2017	2018	2019	Satuan
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	87,05	97	97	%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



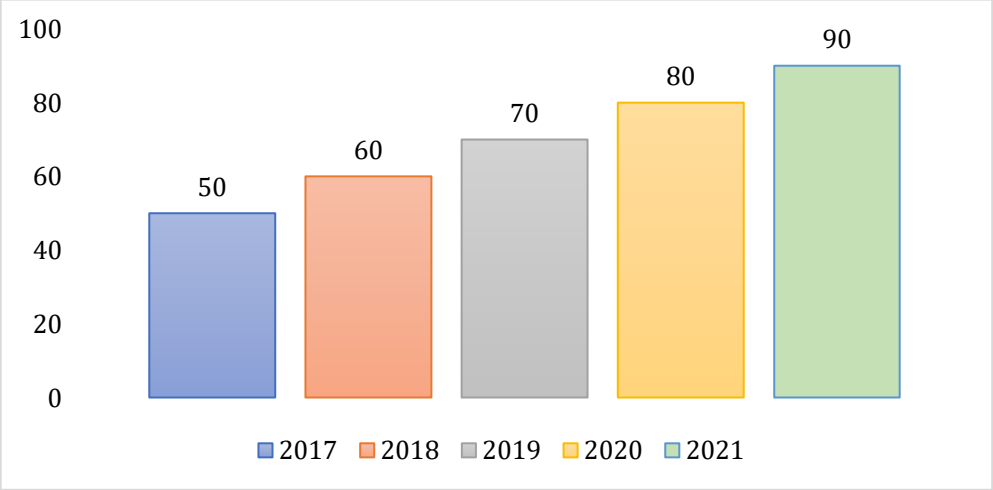
Gambar 27. 13 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 13 Persentase Perusahaan yang Melakukan LKPM

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Perusahaan yang Melakukan LKPM	50	60	70	80	90	%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



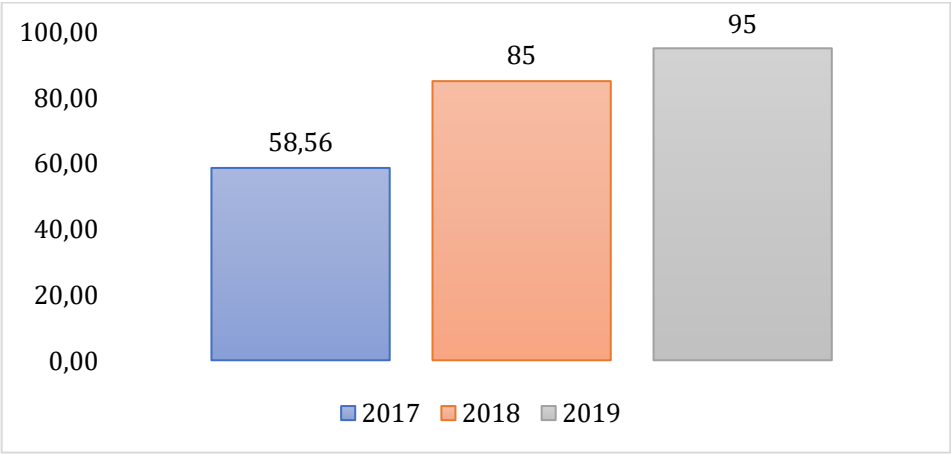
Gambar 27. 14 Persentase Perusahaan yang Melakukan LKPM

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 27. 14 Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal

	2017	2018	2019	Satuan
Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal	58,56	85	95	%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gambar 27. 15 Persentase Tersedianya Data dan Informasi Penanaman Modal

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DESKRIPSI

Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam da-tau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Persentase pengurangan resiko bencana di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 71,01% dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 93,23%. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi persentase, maka semakin berkurang kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari resiko bencana di Kabupaten Pasuruan.

Persentase korban bencana alam yang dievakuasi dan menerima bantuan sosial pada masa tanggap darurat di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 91,335 dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga tahun 2021 sebesar 72,54%. Hal tersebut menunjukkan semakin rendah persentase korban bencana alam yang harus dievakuasi dan menerima bantuan sosial, maka semakin sedikit pula jumlah keseluruhan korban bencana alam saat masa tanggap darurat di Kabupaten Pasuruan.

Indeks Resiko Bencana adalah suatu ukuran untuk mengetahui tingkat resiko bencana tiap-tiap Kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya yang dimiliki atau gabungan dari bahaya tersebut. Pada tahun 2017, indeks resiko bencana di Kabupaten Pasuruan sebesar 214 nilai dan mengalami penurunan secara fluktuatif hingga akhir tahun 2021 sebesar 139,18 nilai. Hal

tersebut menunjukkan semakin rendah indeks resiko bencana, maka semakin rendah pula resiko bencana yang dimiliki Kabupaten Pasuruan.

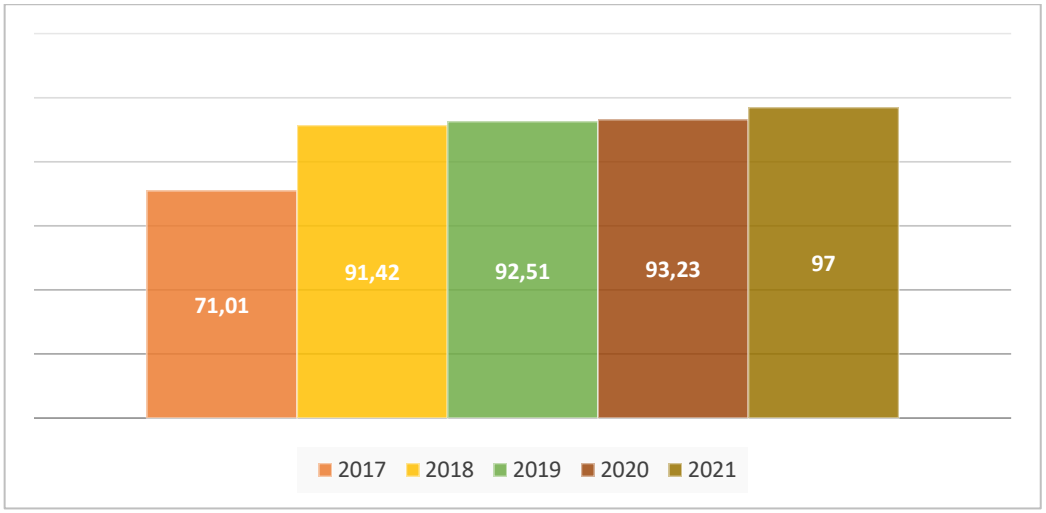
Desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Persentase desa tangguh bencana yang dibentuk di kawasan rawan bencana di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 7,5% dan mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 18,75%. Peningkatan tersebut mengartikan semakin tinggi persentase, maka semakin banyak jumlah desa tangguh bencana dari banyaknya desa rawan bencana sehingga kerugian yang ditimbulkan dari bencana semakin berkurang.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah suatu ukuran untuk mengetahui kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Pada tahun 2018, nilai IKD di Kabupaten Pasuruan sebesar 0,32 dan terus mengalami peningkatan hingga akhir tahun 2021 sebesar 0,72. Hal tersebut menunjukkan semakin tingginya nilai IKD, maka semakin baik penanggulangan bencana dan berkurangnya resiko bencana di Kabupaten Pasuruan.

Tabel 28. 1 Presentase Pengurangan Resiko Bencana

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Pengurangan Resiko Bencana	71,01	91,42	92,51	93,23	97	%
Jumlah Masyarakat yang dapat Informasi dan Pengetahuan Penanggulangan Bencana (KIE)	255.750	330.150	332.100	346.130	347.965	Orang
Jumlah Masyarakat Kabupaten Pasuruan di Daerah Rawan Bencana yang membutuhkan informasi dan Pengetahuan PB	360.140	361.131	358.977	371.253	357.235	Orang

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

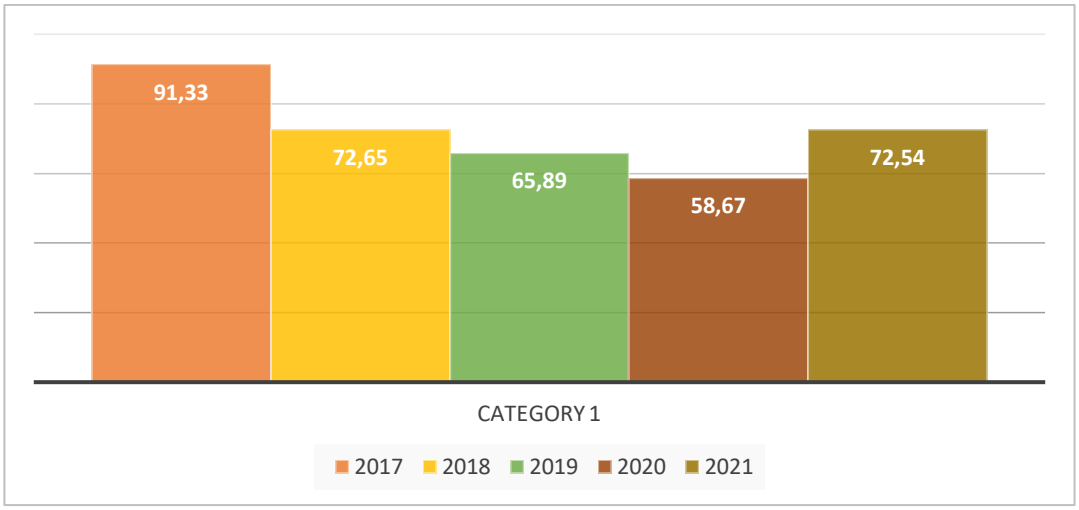


Gambar 28. 1 Persentase Pengurangan Resiko Bencana

Tabel 28. 2 Korban Bencana Alam yang Dievakuasi dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Korban Bencana Alam yang Dievakuasi dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat	91,33	72,65	65,89	58,67	72,54	%
Jumlah Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat	169.866	53,689	79,941	133,362	50,565	Orang
Jumlah Seluruh Korban Bencana	185,985	73,898	121,334	227,298	69,709	Orang

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah



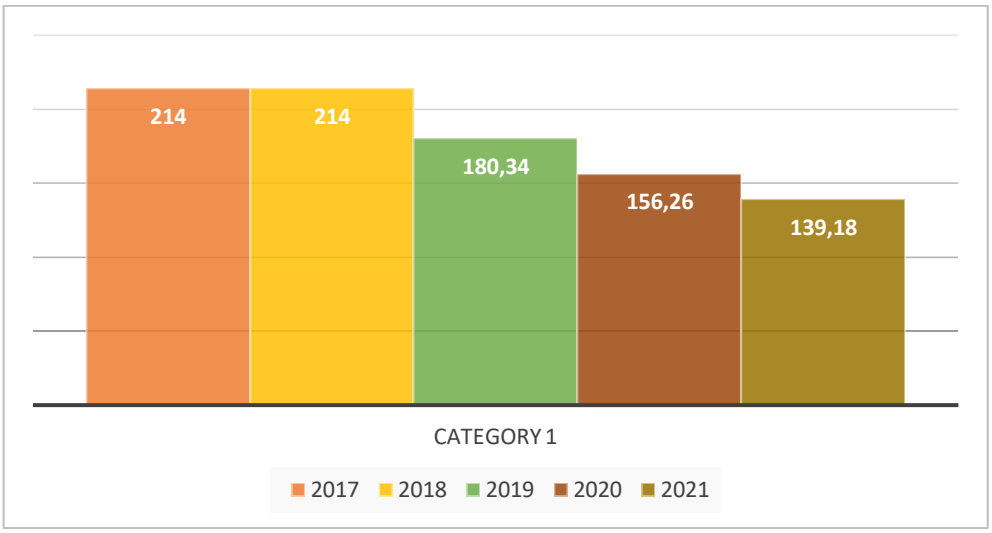
Gambar 28. 2 Persentase Korban Bencana Alam yang Dievakuasi dan Menerima Bantuan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 28. 3 Indeks Resiko Bencana

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Resiko Bencana	214	214	180,34	156,26	139,18	Nilai

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah



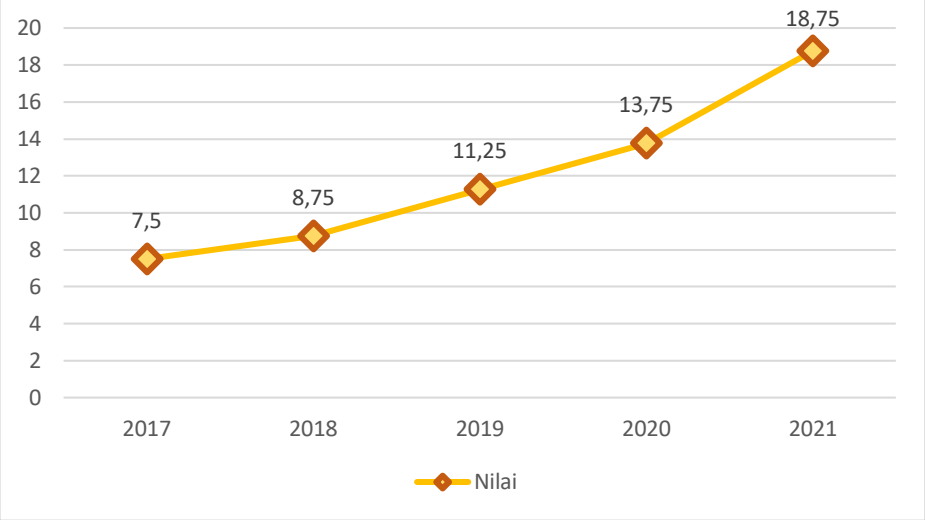
Gambar 28. 3 Indeks Resiko Bencana

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 28. 4 Desa Tangguh Bencana

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk dikawasan rawan bencana	7,5	8,75	11,25	13,75	18,75	%
Jumlah desa tangguh bencana	6	7	9	11	15	desa / kelurahan
Jumlah desa rawan bencana	80	80	80	80	80	desa / kelurahan

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

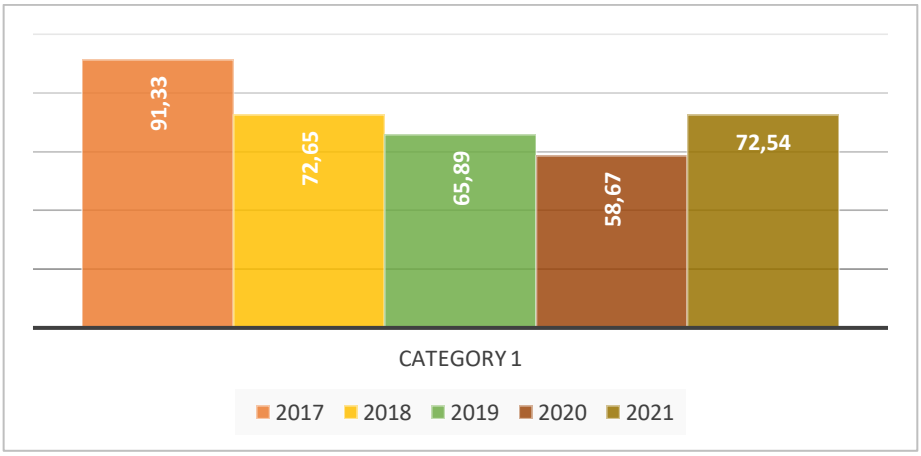


Gambar 28. 4 Persentase Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk Dikawasan Rawan Bencana

Tabel 28. 5 Korban yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	91,33	72,65	65,89	58,67	72,54	Orang
Jumlah korban yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	169.866	53.689	79.941	133.362	50.565	Orang
Jumlah korban bencana	185.985	73.898	121.334	227.298	69.709	Orang

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah



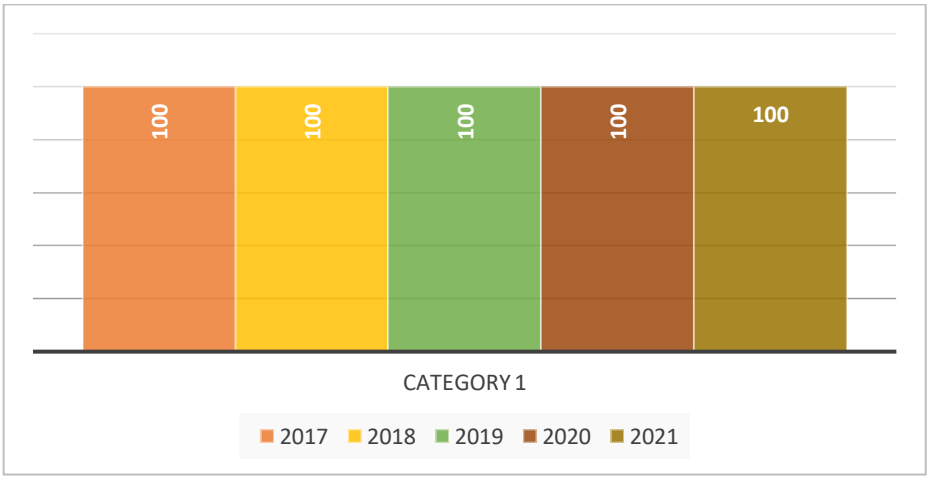
Gambar 28. 5 Persentase Korban yang Menerima Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 28. 6 Persentase Usulan Pemulihan Daerah Terdampak yang Ditindaklanjuti

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	%
Jumlah usulan pemulihan daerah terdampak yang ditindaklanjuti	88	186	28	29	133	Unit
Jumlah usulan pemulihan daerah terdampak	88	186	28	29	133	Unit

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah



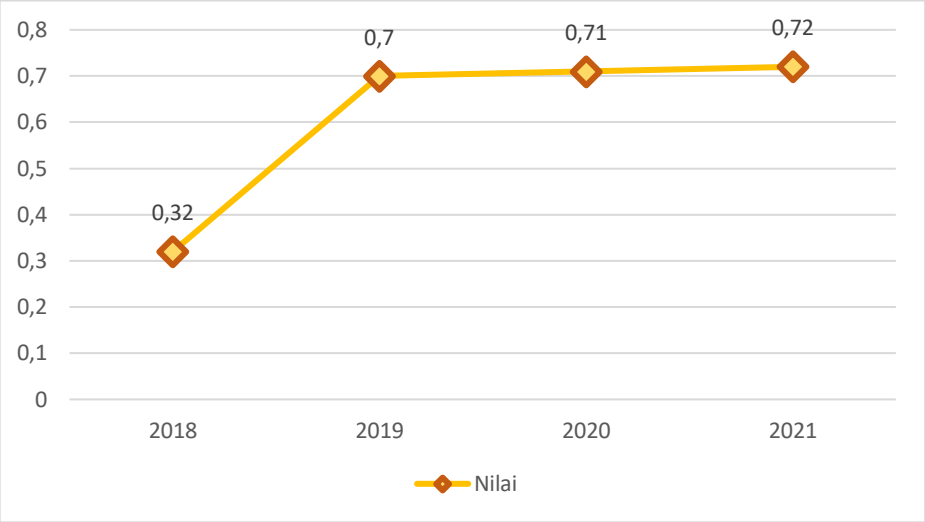
Gambar 28. 6 Persentase Usulan Pemulihan Daerah Terdampak yang Ditindaklanjuti

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 28. 7 Indeks Ketahanan Daerah

Elemen	2018	2019	2020	2021	Satuan
Indeks Ketahanan Daerah	0,32	0,70	0,71	0,72	Nilai

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah



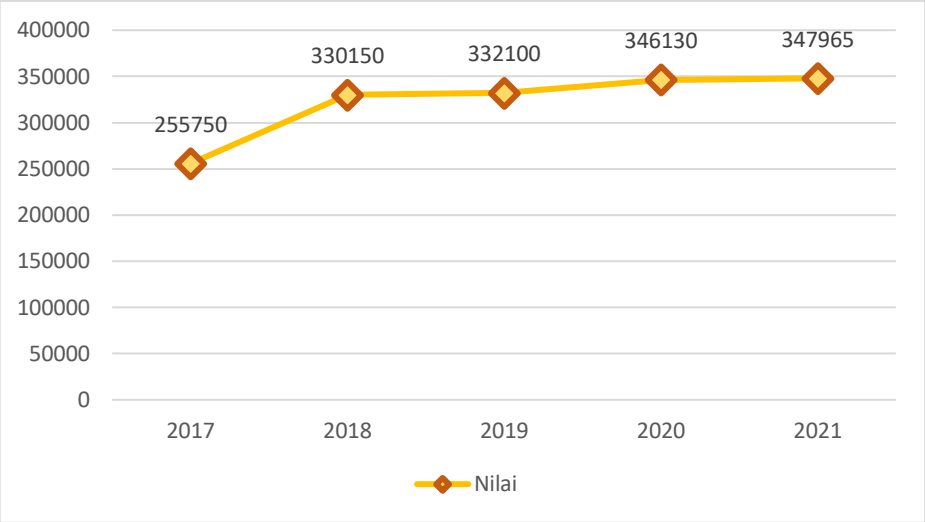
Gambar 28. 7 Indeks Ketahanan Daerah

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 28. 8 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Sosialisasi)

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Sosialisasi)	255,750	330,150	332,100	346,130	347,965	Jiwa

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah



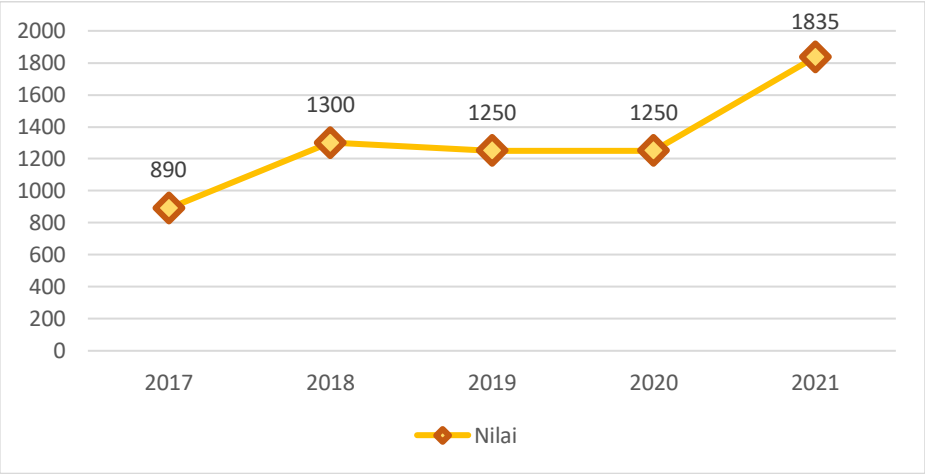
Gambar 28. 8 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (Sosialisasi)

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 28. 9 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Pelatihan, Destana, Gladi)

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (pelatihan, destana, gladi)	890	1300	1250	1250	1835	Jiwa

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah



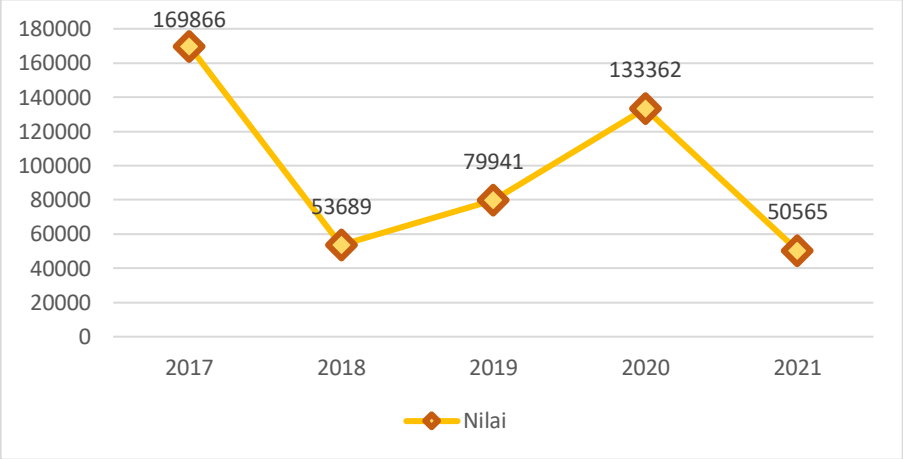
Gambar 28. 9 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (Pelatihan, Destana, Gladi)

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 28. 10 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	169,866	53,689	79,941	133,362	50,565	Jiwa

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah



Gambar 28. 9 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sumber: Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

INSPEKTORAT

DESKRIPSI

Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan (Tindak Lanjut Tuntas (TS)) di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2017 hingga 2021 semakin menurun persentasenya. Tahun 2017 persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan (Tindak Lanjut Tuntas (TS)) sebanyak 100 persen dimana jumlah rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ada 385 dokumen dan keseluruhan berhasil ditindaklanjuti. Pada tahun 2021 persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS)) sebesar 67 persen. Dari 72 dokumen rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan hanya 48 dokumen rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang berhasil ditindaklanjuti.

Opini BPK merupakan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Selama tahun 2017 hingga 2021, Kabupaten Pasuruan masuk kategori WTP artinya sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

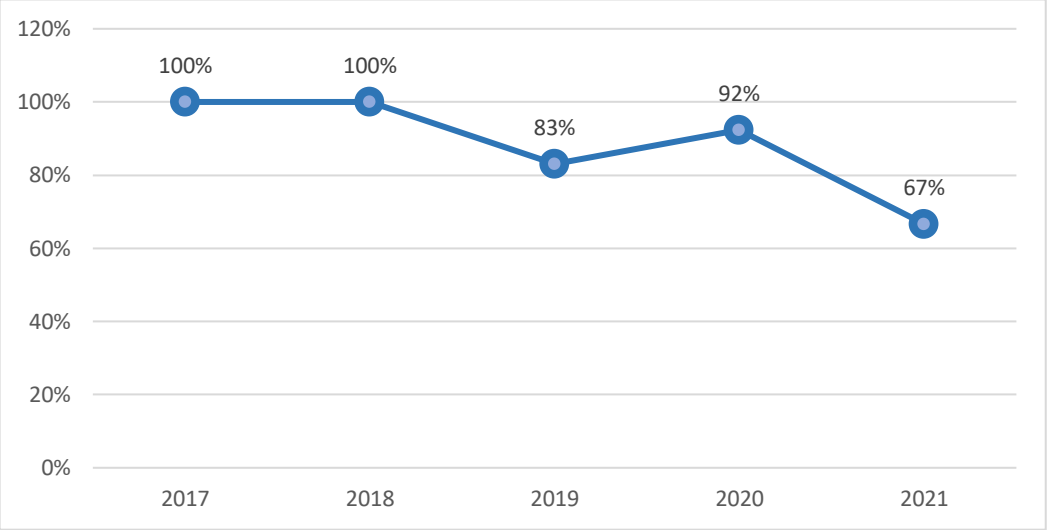
Indeks Persepsi Korupsi merupakan sebuah penilaian indikator korupsi berupa angka yang diperoleh dari kagiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi. Perhitungan Indeks Persepsi Korupsi mulai dilakukan perhitungan di tahun 2018 dengan nilai 6,16 kategori bersih. Pada tahun 2019 hasil penilaian menurun menjadi 5,85 kategori sedang/rata-rata. Kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 7,67 masuk kategori bersih.

Dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 83,33 masuk kategori Sangat Baik. Nilai tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 tercatat 86,95.

Tabel 29. 1 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS)

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS))	100%	100%	83%	92%	67%	%
1.1	Jumlah Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan	385	453	336	117	72	Dokumen
1.2	Jumlah Rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	385	453	279	108	48	Dokumen

Sumber: Inspektorat Daerah



Gambar 29. 1 Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Temuan(Tindak Lanjut Tuntas (TS)

Sumber: Inspektorat Daerah

Tabel 29. 2 Opini BPK

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Nilai

Sumber: Inspektorat Daerah

Tabel 29. 3 Indeks Persepsi Korupsi

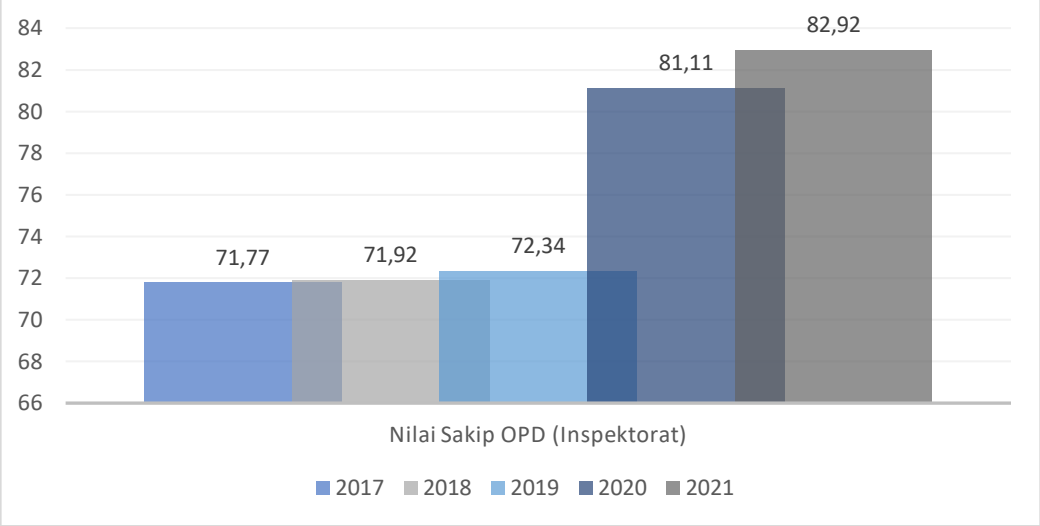
No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
3	Indeks Persepsi Korupsi	-	6,16	5,85	7,67	83,66	Nilai

Sumber: Inspektorat Daerah

Tabel 29. 4 Nilai Sakip OPD (Inspektorat)

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
4	Nilai Sakip OPD (Inspektorat)	71,77	71,92	72,34	81,11	82,92	Nilai

Sumber: Inspektorat Daerah



Gambar 29. 2 Nilai Sakip OPD (Inspektorat)

Sumber: Inspektorat Daerah

Tabel 29. 5 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
5	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2,8	2,8	2,8	3	3	Satuan

Sumber: Inspektorat Daerah

Tabel 29. 6 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
6	Tingkat kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	2	2	2	2	2	Level

Sumber: Inspektorat Daerah

Tabel 29. 7 Persentase terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai

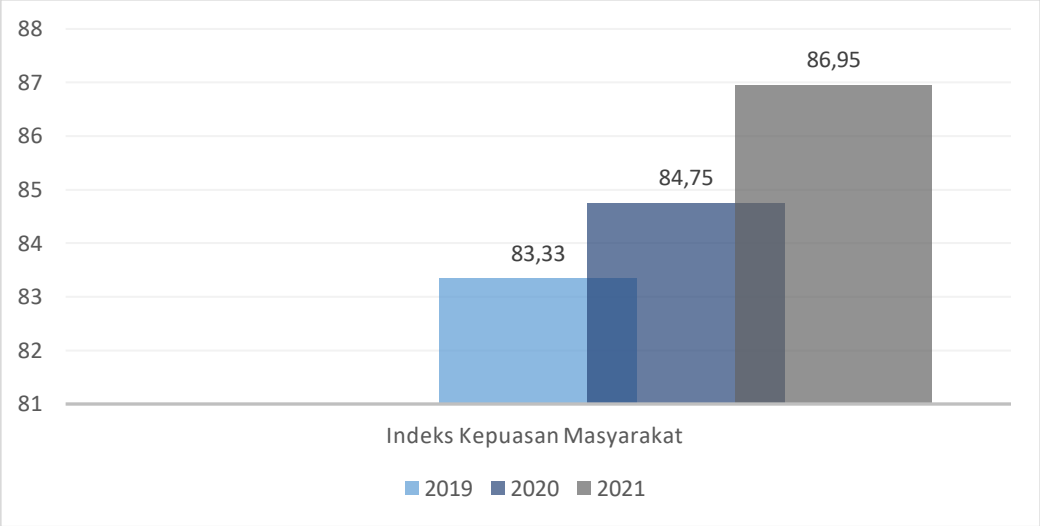
No	Elemen	2020	2021	Satuan
7	Persentase terpenuhinya Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang memadai	100	100	%

Sumber: Inspektorat Daerah

Tabel 29. 8 Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Elemen	2019	2020	2021	Satuan
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,33	84,75	86,95	Indeks

Sumber: Inspektorat Daerah



Gambar 29. 3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Sumber: Inspektorat Daerah

SEKRETARIAT DPRD

DESKRIPSI

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2018 sebesar 88,51. Nilai tersebut meningkat menjadi 88,75 pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 89,35. Nilai IKM yang diperoleh dari tahun 2018 hingga 2021 berada pada rentan $79,17 \leq x \leq 100$, yang mana hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari unit pelayanan sangat baik.

Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda pada tahun 2017 sebesar 66% dari total raperda yang dibuat. Nilai tersebut meningkat menjadi 90% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019, persentase kembali menurun pada angka 71%. Persentase meningkat kembali menjadi 100% pada tahun 2020 dan menjadi 157% pada tahun 2021.

Tabel 30. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD

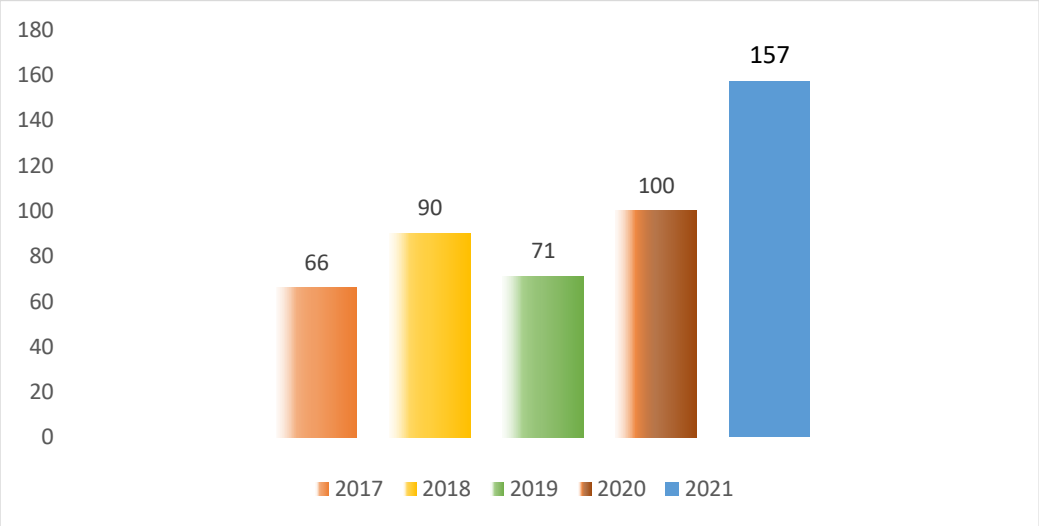
Elemen	2018	2019	2020	Satuan
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD	88,51	88,75	89,35	Nilai

Sumber: Sekretariat DPRD

Tabel 30. 2 Raperda yang Ditetapkan Menjadi Perda

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda	66	90	71	100	157	Nilai

Sumber: Sekretariat DPRD



Gambar 30. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

DESKRIPSI

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebanyak 10 laporan. Pada tahun2018 dan 2019 , jumlah laporan pelaksanaan kegiatan meningkat menjadi 13 laporan. Sementara pada tahun 2020, banyaknya laporan kegiatan hanya berjumlah 2 laporan dan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 23 laporan.

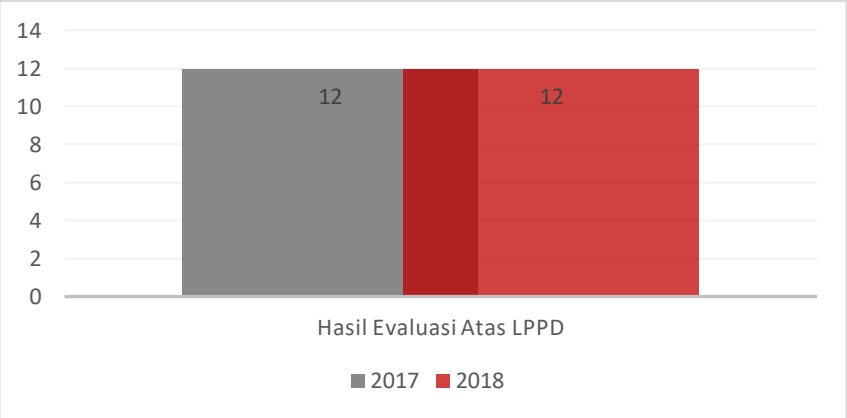
Laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hibah/bantuan sosial yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 170 laporan. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya menjadi 398 laporan dan tetap sama hingga tahun 2021.

Persentase hibah per tahun di Kabupaten Pasuruan cenderung mengalami peningkatan dari rentan tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017, sebesar 88% anggaran hibah dapat terealisasikan. Kemudian meningkat menjadi 91% pada tahun berikutnya. Pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase, namun dapat meningkat kembali pada tahun 2020 dan 2021. Sehingga besar persentase hibah per tahun pada tahun 2021 sebesar 92%.

Tabel 31. 1 Terwujudnya Kegiatan Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Bantuan Sosial Keagamaan

Elemen	2017	2018	Satuan
Terwujudnya kegiatan evaluasi monitoring dan pelaporan bantuan sosial keagamaan	12	12	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat



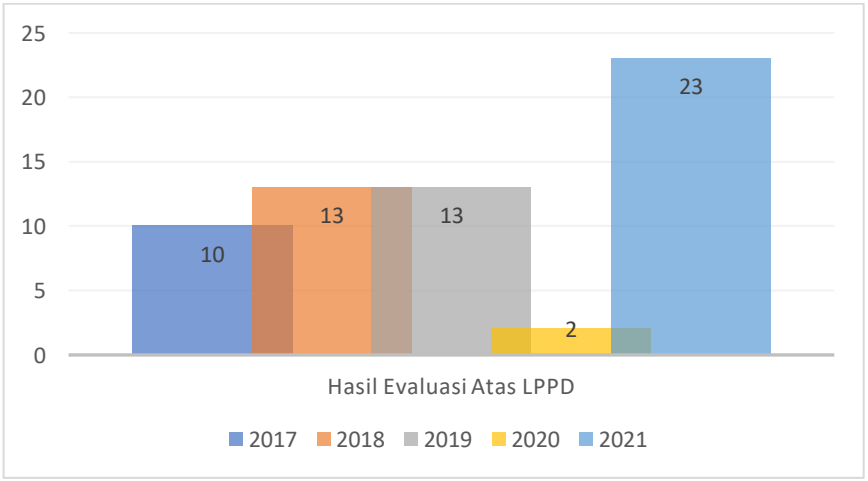
Gambar 31. 1 Terwujudnya Kegiatan Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Bantuan Sosial Keagamaan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya yang Dilaksanakan

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya yang dilaksanakan	10	13	13	2	23	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat



Gambar 31. 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual dan Kegiatan Keagamaan Lainnya yang Dilaksanakan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 3 Jumlah Kegiatan Pelayanan Ibadah haji

Elemen	2017	2018	2019	Satuan
Jumlah kegiatan pelayanan ibadah haji	2	2	2	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 4 Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan MTQ

Elemen	2019	2020	Satuan
Jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan MTQ	3	3	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 5 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Administratif Sosial Budaya

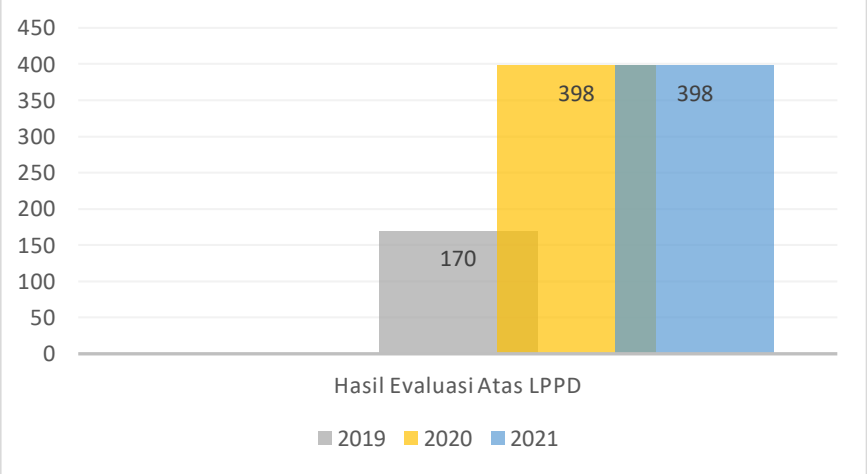
Elemen	2019	2020	Satuan
Jumlah laporan hasil koordinasi administratif sosial budaya	15	15	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 6 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepada Lembaga Penerima Hibah / Bantuan Sosial

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hibah / bantuan sosial	170	398	398	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat



Gambar 31. 3 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepada Lembaga Penerima Hibah / Bantuan Sosial

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 7 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi kesejahteraan Rakyat

Elemen	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada lembaga penerima hibah / bantuan sosial	15	15	15	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 8 Jumlah Laporan Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam

Elemen	2020	Satuan
Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Islam	2	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 9 Jumlah Laporan Kegiatan Hari Santri

Elemen	2020	Satuan
Jumlah laporan kegiatan Hari Santri	1	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 10 Jumlah Laporan Kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad

Elemen	2020	Satuan
Jumlah laporan kegiatan Khotmil Qur'an oleh Khufad	1	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 11 Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Terkait Hibah

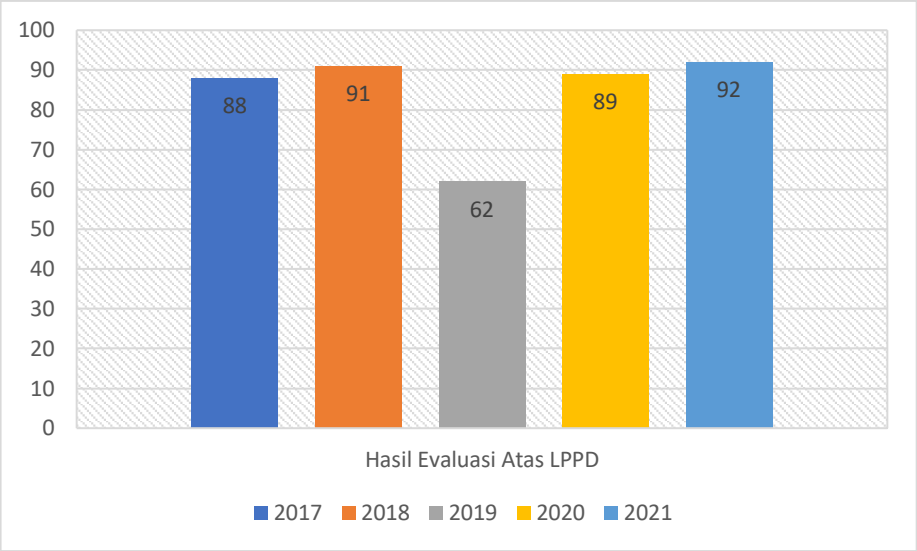
Elemen	2021	Satuan
Jumlah pelaksanaan sosialisasi terkait hibah	20	Laporan

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 31. 12Prosentase Hibah per Tahun

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Prosentase hibah per tahun	88	91	62	89	92	Laporan
Anggaran	Rp3,112,000,000	Rp8,315,500,000	Rp8,435,000,000	Rp12,548,000,000	Rp15,353,500,000	Rp
Realisasi	Rp2,743,000,000	Rp7,555,500,000	Rp5,204,500,000	Rp11,117,500,000	Rp14,131,500,000	Rp

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat



Gambar 31. 4 Prosentase Hibah per Tahun

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat

BAGIAN HUKUM

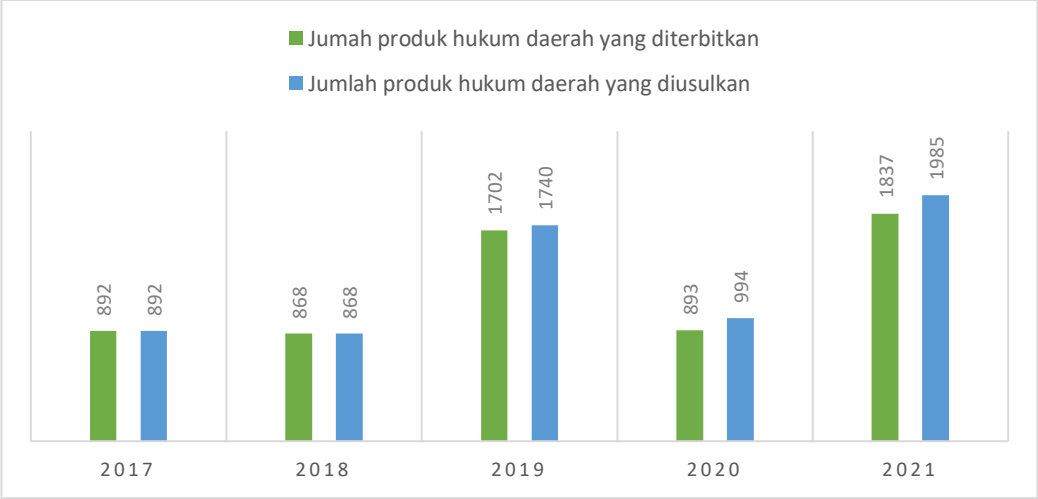
DESKRIPSI

Jumlah produk hukum daerah yang diusulkan pada tahun 2017 sebesar 892 produk hukum yang terdiri 8 Peraturan Daerah, 61 Peraturan Bupati, 823 Surat Keputusan. Adapun semua produk hukum tersebut telah diterbitkan. Hal ini juga terjadi pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 hingga 2021 terdapat beberapa produk hukum yang diusulkan namun tidak diterbitkan.

Tabel 32. 1 Persentase Produk Kebijakan Daerah Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Kebutuhan

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase produk kebijakan daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan	100%	100%	100%	102,50%	97,00%	%
1.1	Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan	892	868	1702	893	1837	Produk Hukum
1.1.1	Peraturan Daerah	8	17	14	5	11	Produk Hukum
1.1.2	Peraturan Bupati	61	63	92	68	937	Produk Hukum
1.1.3	SK	823	788	1596	820	889	Produk Hukum
1.2	Jumlah produk hukum daerah yang diusulkan	892	868	1740	994	1985	Produk Hukum
1.1.1	Peraturan Daerah	8	17	14	5	11	Produk Hukum
1.1.2	Peraturan Bupati	61	63	130	71	987	Produk Hukum
1.1.3	SK	823	788	1596	918	987	Produk Hukum

Sumber: Bagian Hukum



Gambar 32. 1 Jumlah Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Penyebarluasan Informasi Hukum

Sumber: Bagian Hukum

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

DESKRIPSI

Persentase kegiatan yang tertib administrasi di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 67,5%. Nilai persentase naik menjadi 100%pada tahun 2018 dan bertahan hingga tahun 2020. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang di Kabupaten Pasuruan telah tertib dalam bidang administrasi.

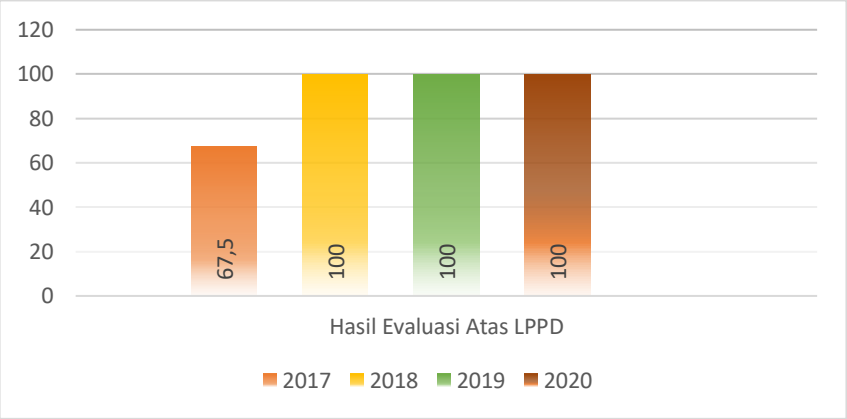
Pada tahun 2017 persentase jumlah proyek yang dimonitoring sebesar 64,38%. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 63,89%. Namun pada tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 80% dan 100%. Semakin besar nilai persentase menunjukkan bahwa semakin banyak pula jumlah proyek yang dimonitoring.

Besar persentase OPD yang realisasi keuangan dan kemajuan fisik pertribulan sesuai rencana dari tahun 2017 hingga 2020 sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa realisasi keuangan dan kemajuan fisik pertribulan semua OPD sesuai dengan rencana.

Tabel 33. 1 Kegiatan yang Tertib Administrasi

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase kegiatan yang tertib administrasi	67,5	100	100	100	%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan



Gambar 33. 1 Kegiatan yang Tertib Administrasi

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 33. 2 Tersedianya Kebijakan dan Data Pembangunan

Elemen	2021	Satuan
Tersedianya kebijakan dan data pembangunan	97,5	%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 33. 3 Meningkatnya Tertib Administrasi Pelaksanaan Pembangunan OPD

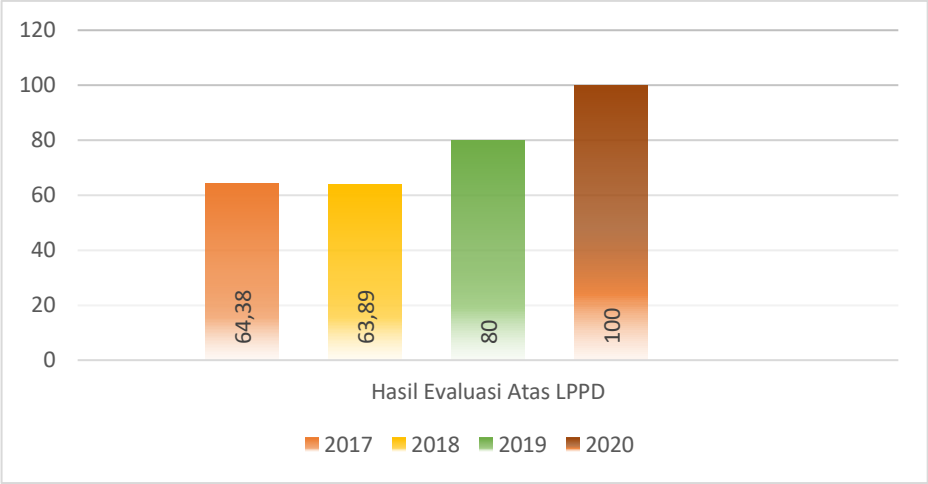
Elemen	2020	Satuan
Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pembangunan OPD	100	%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 33. 4 Jumlah Proyek yang Dimonitoring

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase jumlah proyek yang dimonitoring	64,38	63,89	80	100	%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan



Gambar 33. 2 Jumlah Proyek yang Dimonitoring
Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 33. 5 Terlaksana dan Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Paket Proyek Fisik

Elemen	2021	Satuan
Terlaksana dan tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi paket proyek fisik	92,5	%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 33. 6 OPD yang Realisasi Keuangan dan Kemajuan Fisik Pertribulan Sesuai Rencana

Elemen	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase OPD yang realisasi keuangan dan kemajuan fisik pertribulan sesuai rencana	100	100	100	100	%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 33. 7 Terlaksananya TEPRA dan Tersedianya Laporan Evaluasi Penyerapan Anggaran OPD

Elemen	2021	Satuan
Terlaksananya TEPRA dan tersedianya laporan evaluasi penyerapan anggaran OPD	100	%

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan

BAGIAN
TATA PEMERINTAHAN

DESKRIPSI

Persentase hasil evaluasi IKK yang ditindaklanjuti menunjukkan jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Tercatat bahwa nilai persentase hasil IKK yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 3,3978 dan pada tahun 2018 sebesar 3,4784.

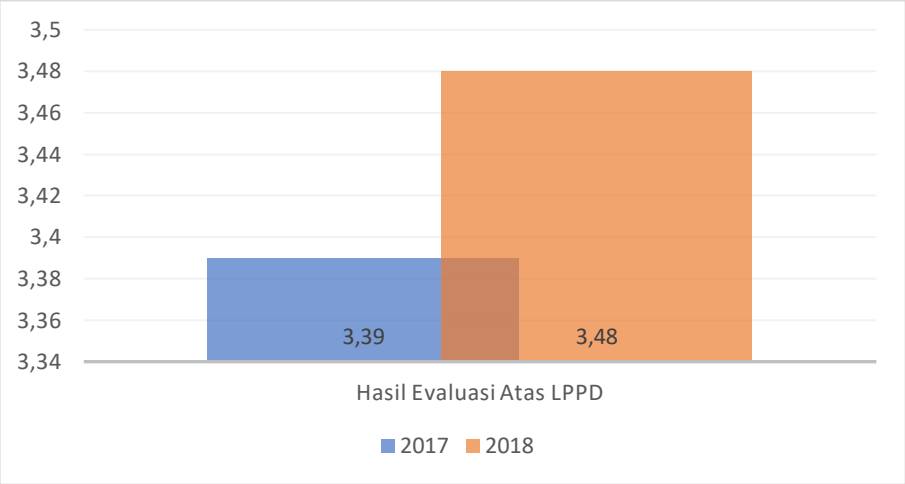
Penetapan dan penegasan batas wilayah berguna untuk menetapkan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Pada tahun 2017 terdapat 1 penetapan dan penegasan batas wilayah, jumlah tersebut mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya, yang mana pada tahun 2018 terdapat 2 wilayah dan tahun 2019 terdapat 3 wilayah.

Persentase jumlah penyusunan LPPD di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa LPPD yang disusun dapat diselesaikan secara tepat waktu dan lengkap.

Tabel 34. 1 Hasil Evaluasi IKK yang Ditindaklanjuti

	2017	2018	Satuan
Persentase Hasil Evaluasi IKK yang Ditindaklanjuti	3,3978	3,4784	Nilai

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan



Gambar 34. 1 Persentase Hasil Evaluasi IKK yang Ditindaklanjuti

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 34. 1 Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah	2017	2018	2019	Satuan
Jumlah	1	2	3	Wilayah

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 34. 2 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 34. 3 Penetapan dan Penegasan Batas Daerah

Penetapan dan Penegasan Batas Daerah	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Penetapan dan Penegasan Batas Daerah	100	100	100	100	100	%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 34. 4 Rupabumi yang dibakukan

Rupabumi yang Dibakukan	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase Rupabumi yang Dibakukan	100	100	100	100	100	%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

Tabel 34. 5 Jumlah Penyusunan LPPD

Penyusunan LPPD	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Penyusunan LPPD	100	100	100	100	100	%

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan

BAGIAN PEREKONOMIAN

DESKRIPSI

Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti merupakan suatu nilai yang menunjukkan banyaknya kebijakan perekonomian yang ditindak lanjuti dibanding dengan seluruh jumlah kebijakan perekonomian yang ada. Pada tahun 2019 tercatat nilai persentase sebesar 75%. Terjadi peningkatan pada tahun berikutnya, sehingga besar persentase menjadi 90,91%. Namun pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan hingga mencapai nilai 85%.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN. Persentase fasilitasi pemanfaatan DBHCHT merupakan suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar DBHCHT yang termanfaatkan terhadap total DBHCH. Pada tahun 2017, di Kabupaten Pasuruan tercatat nilai persentase sebesar 75% dan pada tahun 2018 tercatat sebesar 80%. Sedangkan untuk persentase peningkatan capaian kinerja pelaksanaan DBHCHT oleh perangkat daerah

Pedoman pelaksanaan di bidang perekonomian merupakan suatu dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan di bidang perekonomian. Di Kabupaten Pasuruan tercatat terdapat 1 dokumen pedoman pelaksanaan pada tahun 2017, 3 dokumen pedoman pelaksanaan pada tahun 2018, dan 1 dokumen pedoman pelaksanaan pada tahun 2019.

Tabel 35. 1 Kebijakan Perekonomian yang Ditindak Lanjuti

Kebijakan Perekonomian yang Ditindak Lanjuti	2019	2020	Satuan
Persentase kebijakan perekonomian yang ditindak lanjuti	75	90,91	%
Jumlah kebijakan perekonomian yang ditindak lanjuti	3	10	Kebijakan
Jumlah kebijakan perekonomian	4	11	Kebijakan

Tabel 35. 2 Fasilitasi Pemanfaatan DBHCHT

Fasilitasi Pemanfaatan DBHCHT	2019	2020	Satuan
Persentase fasilitasi pemanfaatan DBHCHT	75	80	%

Sumber: Bagian Perekonomian

Tabel 35. 3 Fasilitasi Pengelolaan Potensi Daerah, Perekonomian Rakyat, dan BUMD

Fasilitasi Pengelolaan Potensi Daerah, Perekonomian Rakyat, dan BUMD	2017	2018	2019	Satuan
Persentase fasilitasi pengelolaan potensi daerah, perekonomian rakyat, dan BUMD	-	-	133,33	%
Tersedianya pedoman pelaksanaan di bidang perekonomian	3	4	-	Dokumen

Sumber: Bagian Perekonomian

BAGIAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA

DESKRIPSI

Persentase paket pengadaan barang atau jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan adalah suatu nilai yang menggambarkan banyaknya paket pengadaan barang atau jasa yang berhasil ditenderkan dari total banyaknya paket pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2020, persentase yang dihasilkan sebesar 73,91%. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, sehingga pada tahun 2021 menjadi 74,49%. Nilai persentase yang semakin mendekati 100% menunjukkan bahwa semakin banyak paket pengadaan barang atau jasa yang berhasil ditenderkan.

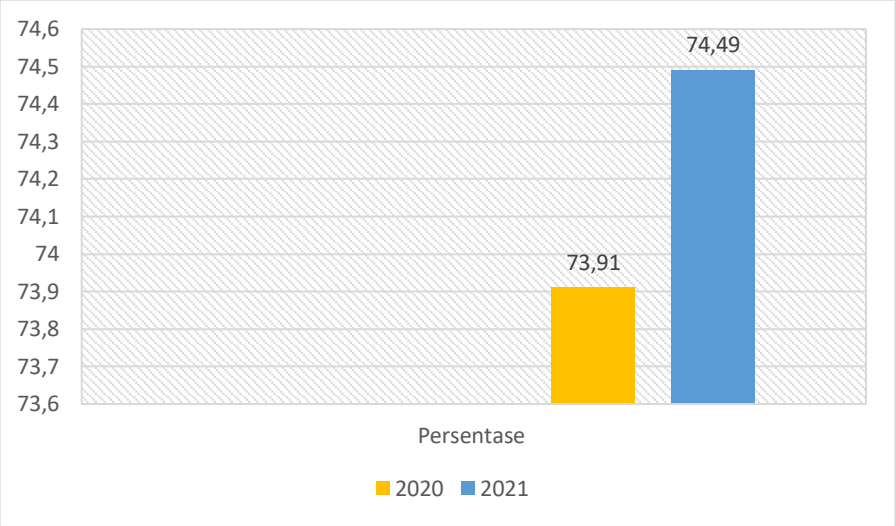
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif merupakan suatu nilai yang membandingkan antara jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dengan pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif. Tercatat pada tahun 2020 nilai persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebesar 11.4%. Pada tahun 2021, nilai persentase tersebut mengalami penurunan hingga mencapai nilai 6%. Semakin kecil nilai persentase yang dihasilkan, maka semakin sedikit pula pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.

Rasio nilai belanja langsung yang melalui pengadaan menunjukkan seberapa besar penggunaan anggaran yang melalui pengadaan jika dibandingkan dengan total belanja langsung. Rasio yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 64,54%. Sedangkan pada tahun 2021, nilai yang dihasilkan sebesar 94,76%. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin besar persentase yang dihasilkan, semakin besar pula nilai belanja langsung yang melalui pengadaan.

Tabel 36. 1 Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berhasil Ditenderkan

Elemen	2020	2021	Satuan
Persentase paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan	73,91%	74,49%	%
Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan	136	146	Tender
Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah	184	196	Tender

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa



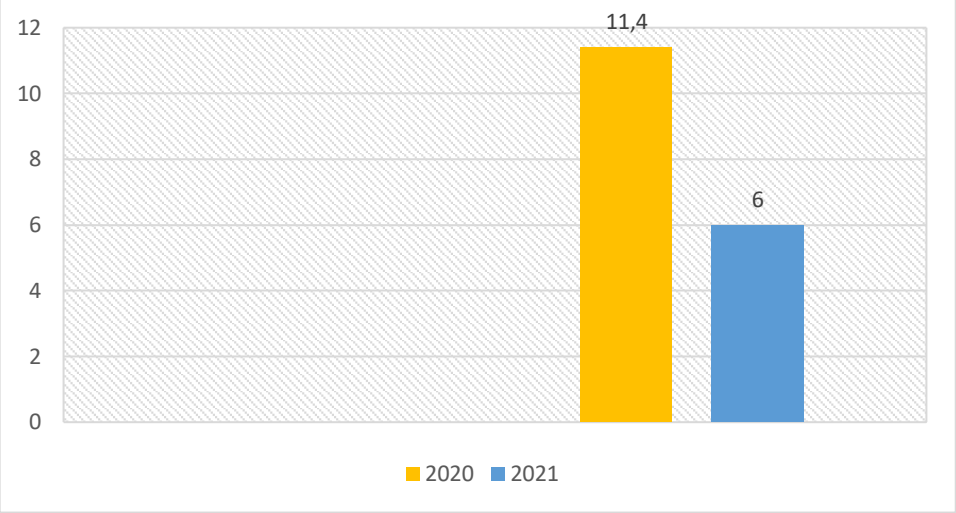
Gambar 36. 1 Persentase dan Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah yang berhasil ditenderkan

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 36. 2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

Elemen	2020	2021	Satuan
Persentase Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	11,4	6	%
Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	274	137	Pengadaan
Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	2395	2282	Pengadaan

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa



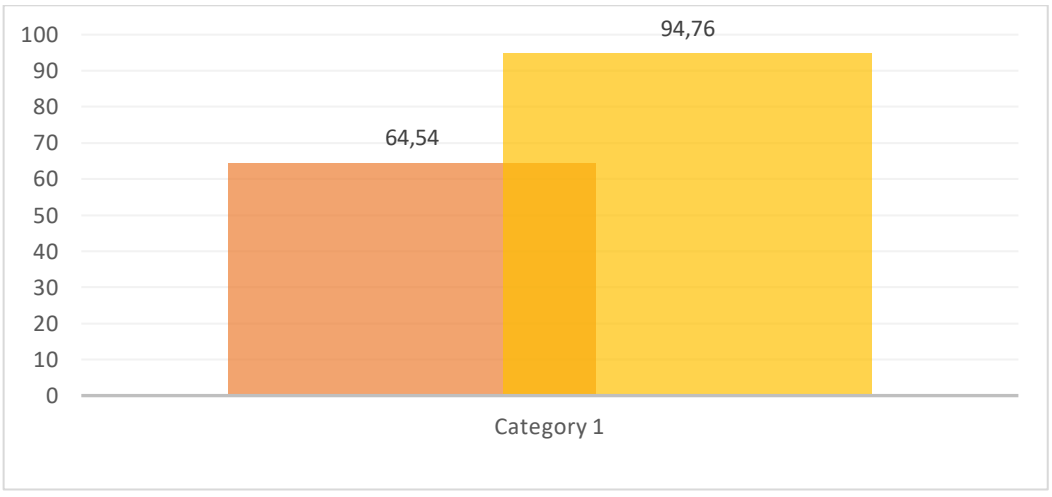
Gambar 36. 1 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 36. 3 Rasio Nilai Belanja Langsung yang Melalui Pengadaan

Elemen	2020	2021	Satuan
Rasio nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	64,54	94,76	%
Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	1.089.453.188.510	241.903.983.292	Rp
Total belanja langsung	1.688.147.593.866	255.274.442.509	Rp

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa



Gambar 36. 2 Rasio Nilai Belanja Langsung yang Melalui Pengadaan

Sumber: Bagian Pengadaan Barang/Jasa

BAGIAN ORGANISASI

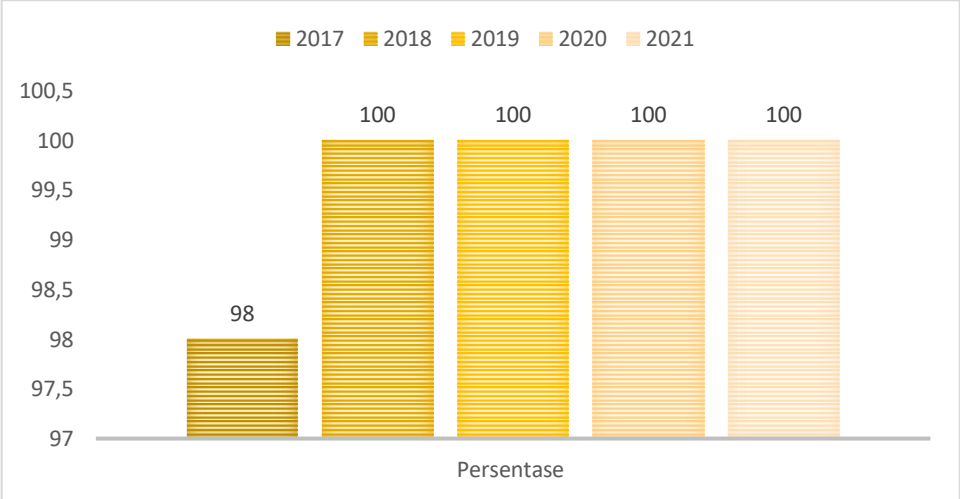
DESKRIPSI

Jumlah perangkat daerah yang mempunyai standart pelayanan tepat waktu pada tahun 2017 sebanyak 55 OPD, bertambah menjadi 56 OPD pada tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlah perangkat daerah yang mempunyai standart pelayanan tepat waktu menjadi 55 OPD. Secara keseluruhan perangkat daerah di Kabupaten Pasuruan sudah tepat fungsi dan tepat ukuran.

Tabel 37. 1 Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu

No	Elemen	Tahun					Satuan
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	98	100	100	100	100	%
1.1	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai standart pelayanan tepat waktu	55	56	56	56	55	OPD
1.2	Jumlah keseluruhan pelaporan kinerja perangkat daerah	56	56	56	56	55	OPD

Sumber: Bagian Organisasi



Gambar 37. 2 Persentase pelaporan kinerja perangkat daerah tepat waktu

Sumber: Bagian Organisasi

Tabel 37. 2 Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

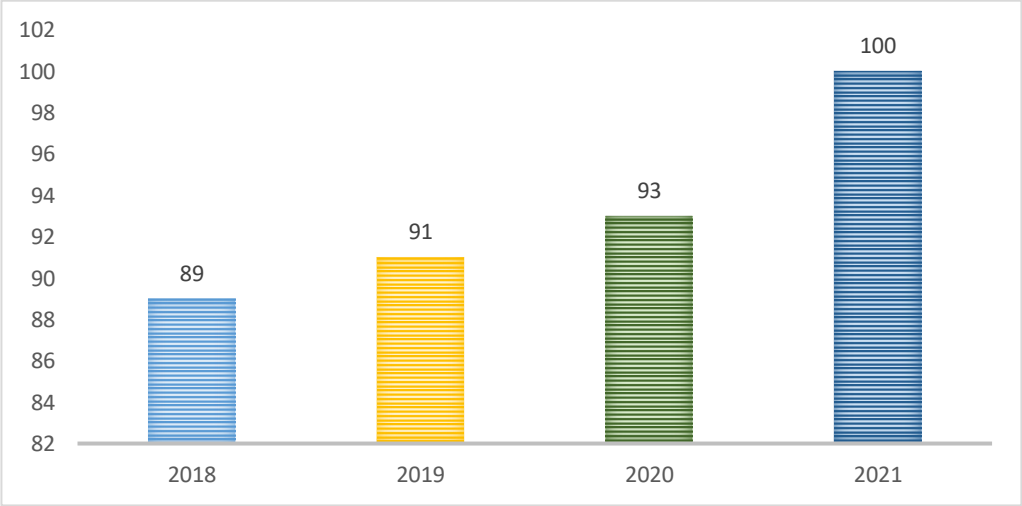
No	Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
2	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	-	-	100	100	%
2.1	Jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	-	-	-	56	55	OPD
2.1	Jumlah keseluruhan perangkat daerah	56	56	56	56	55	OPD

Sumber: Bagian Organisasi

Tabel 37. 3 Perangkat Daerah yang Mempunyai Standar Pelayanan

No	Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
3	Persentase perangkat daerah yang mempunyai standart pelayanan	-	89	91	93	100	%
3.1	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai standar pelayanan	-	50	51	52	55	OPD
3.2	Jumlah keseluruhan perangkat daerah	56	56	56	56	55	OPD

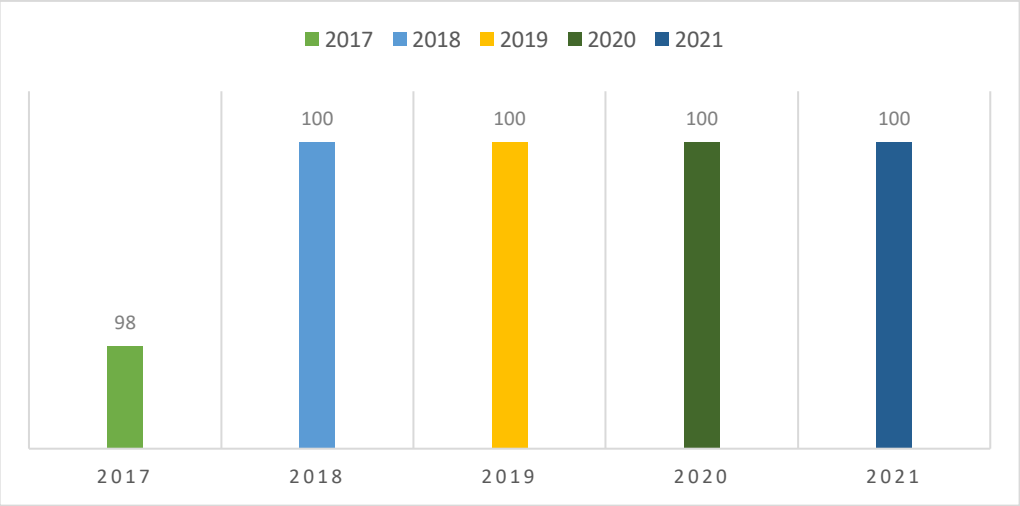
Sumber: Bagian Organisasi



Gambar 37. 3 Persentase Perangat Desa Yang Mempunyai Standar Pelayanan
Sumber: Bagian Organisasi

Tabel 37. 4 LKJIP OPD yang Berkualitas

No	Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
4	Persentase LKJIP OPD yang berkualitas	98%	100%	100%	100%	100%	%
4.1	Jumlah LKJIP OPD yang berkualitas	55	56	56	56	55	OPD
4.2	Jumlah keseluruhan LKJIP OPD	56	56	56	56	55	OPD



Gambar 37. 4 LKJIP OPD yang Berkualitas

Sumber: Bagian Organisasi

Tabel 37. 5 Kelembagaan OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran Sesuai Dengan Perundang-Undangan

No	Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
5	Persentase kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan perundang-undangan	-	100	100	-	100	%
5.1	Jumlah kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan perundang-undangan	-	56	56	-	55	OPD
5.2	Jumlah keseluruhan OPD	56	56	56	56	55	OPD

Sumber: Bagian Organisasi

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

DESKRIPSI

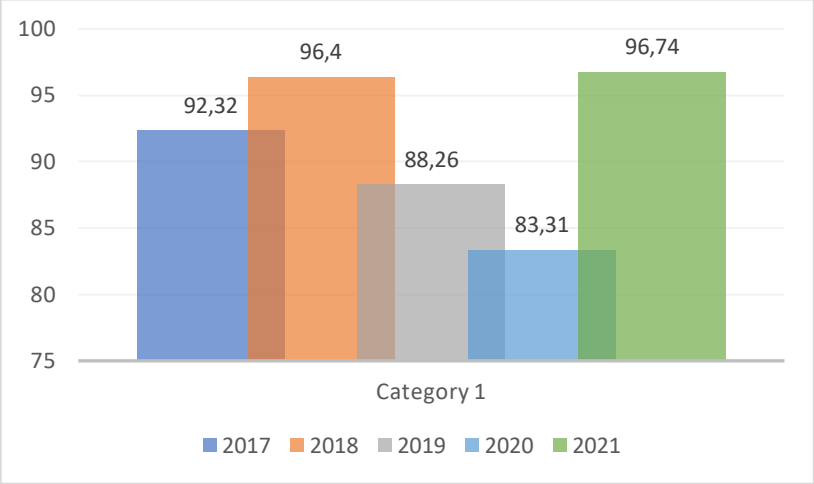
Persentase jumlah realisasi anggaran merupakan nilai yang menunjukkan seberapa besar anggaran yang direalisasikan dibanding dengan anggaran yang yang diperoleh. Pada tahun 2017, persentase jumlah realisasi anggaran di Kabupaten Pasuruan sebesar 92,32%. Jumlah tersebut mengalami penurunan dan juga peningkatan disetiap tahunnya. Hingga pada tahun 2021, nilai persentase jumlah realisasi anggaran mencapai 96,74%. Nilai persentase yang semakin tinggi menunjukkan bahwa anggaran yang diperoleh dapat terealisasikan dengan baik.

Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar penunjang urusan pemerintahan terpenuhi keberadaannya. Tercatat bahwa nilai persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan pada tahun 2021 sebesar 95,75%. Hal ini berarti bahwa dari total anggaran yang disiapkan untuk pemenuhan penunjang urusan pemerintahan, sebanyak 95,75% dapat terealisasi.

Tabel 38. 1 Persentase Jumlah Realisasi Anggaran

Elemen	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase jumlah realisasi anggaran	92,32	96,40	88,26	83,31	96,74	%

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan



Gambar 38. 1 Persentase Jumlah Realisasi Anggaran

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tabel 38. 2 Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan

Elemen	2021	Satuan
Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	95,75%	%

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan

BAGIAN UMUM

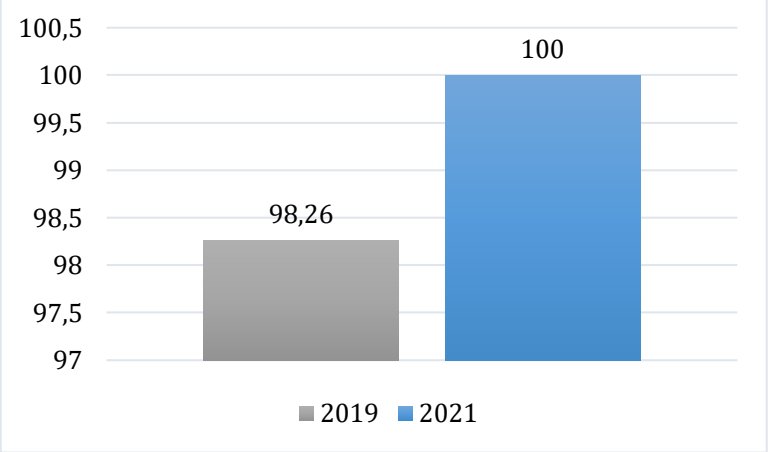
DESKRIPSI

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan pengurus mengenai peralatan dan perlengkapan perkantoran, mulai dari logistik kantor, fasilitas kunjungan tamu, pengadaan kendaraan dinas, dan lain sebagainya. Tercatat bahwa pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor di Kabupaten Pasuruan tahun 2021 sudah terlaksana secara menyeluruh. Kemudian persentase pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya di tahun 2021 adalah sebesar 90 persen. Selanjutnya persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan pemenuhan medical check up Kepada Daaerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2021 terlaksana secara menyeluruh, atau memiliki nilai 100 persen. Berikut adalah grafik nilai dari beberapa elemen yang harus dilaksanakan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Tabel 39. 1 Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	2019	2021	Satuan
Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,26	100,00	%

Sumber: Bagian Umum



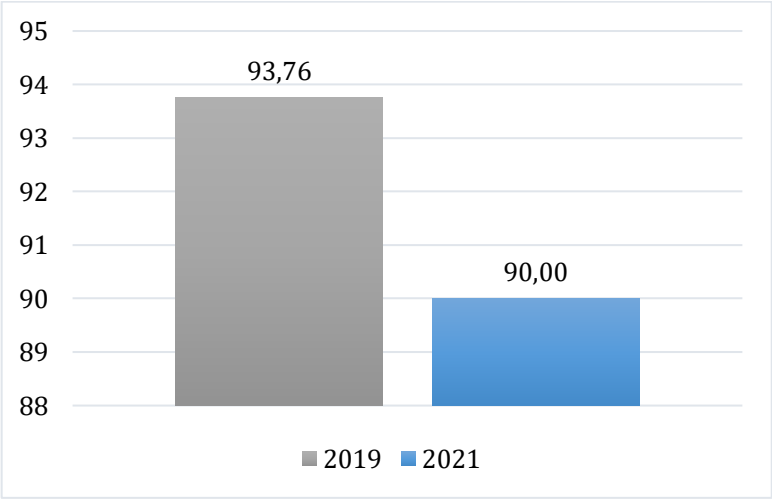
Gambar 39. 1 Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 2 Persentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga

	2019	2021	Satuan
Persentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	93,76	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



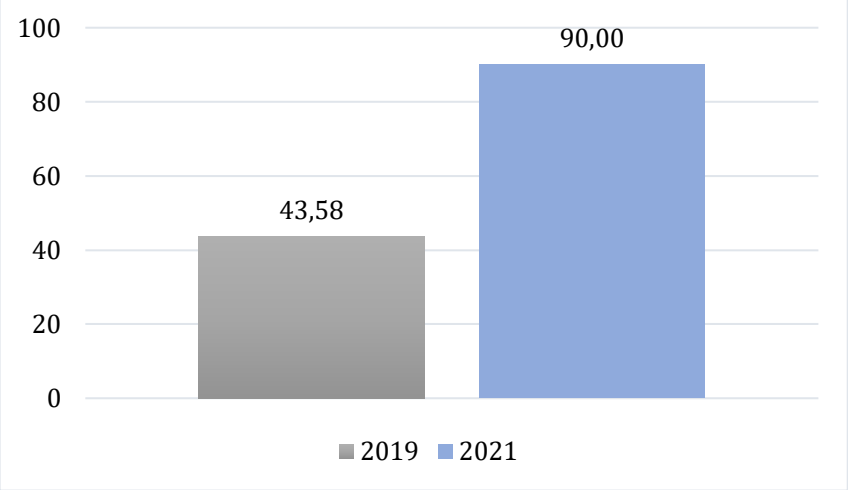
Gambar 39. 2 Persentase Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 3 Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor

	2019	2021	Satuan
Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor	43,58	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



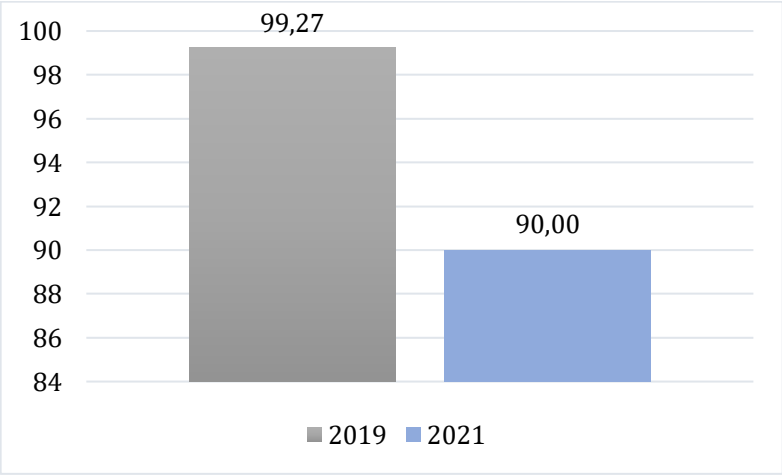
Gambar 39. 3 Persentase Pemenuhan Bahan Logistik Kantor

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 4 Presentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	99,27	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



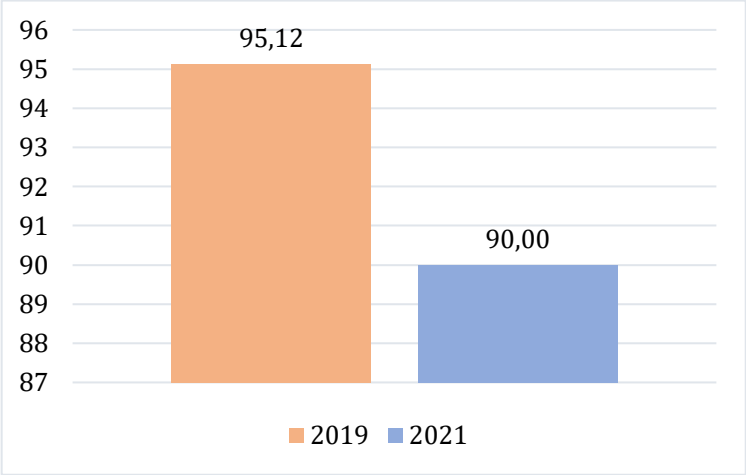
Gambar 39. 4 Presentase Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 5 Presentase Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	95,12	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



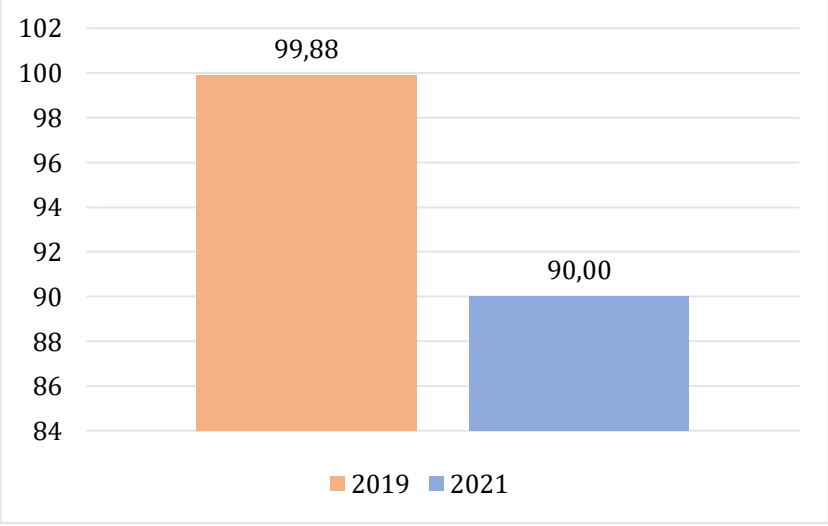
Gambar 39. 5 Presentase Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 6 Presentase Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99,88	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



Gambar 39. 6 Presentase Pemenuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 7 Presentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasonal Atau Lapangan

	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasonal Atau Lapangan	90,00	%

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 8 Presentase Pemenuhan Pengadaan Mebel

	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Pengadaan Mebel	90,00	%

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 9 Presentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,00	%

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 10 Presentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

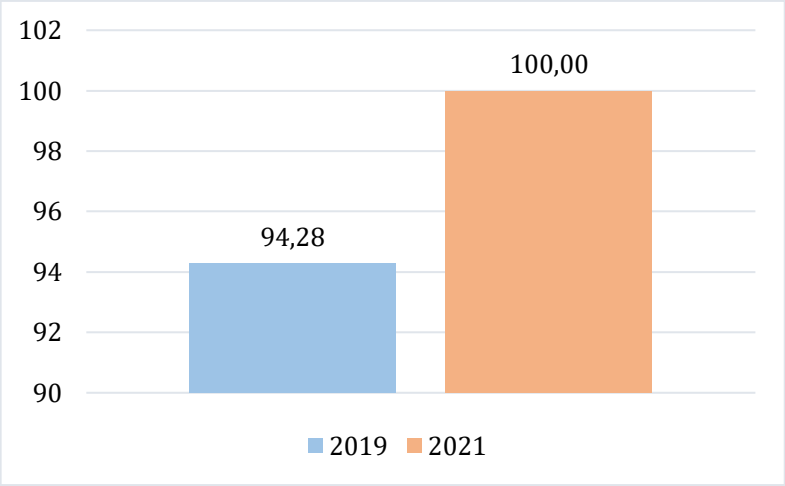
	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,00	%

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 11 Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik

	2019	2021	Satuan
Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	94,28	100,00	%

Sumber: Bagian Umum



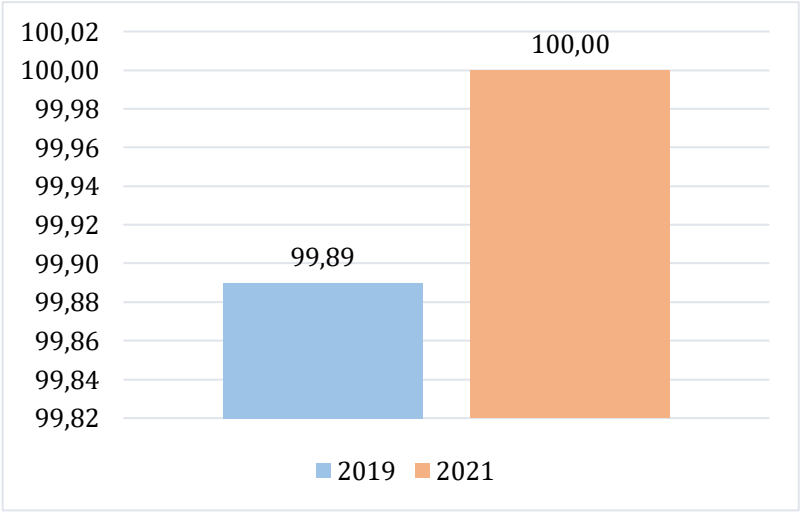
Gambar 39. 7 Presentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 12 Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	2019	2021	Satuan
Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,89	100,00	%

Sumber: Bagian Umum



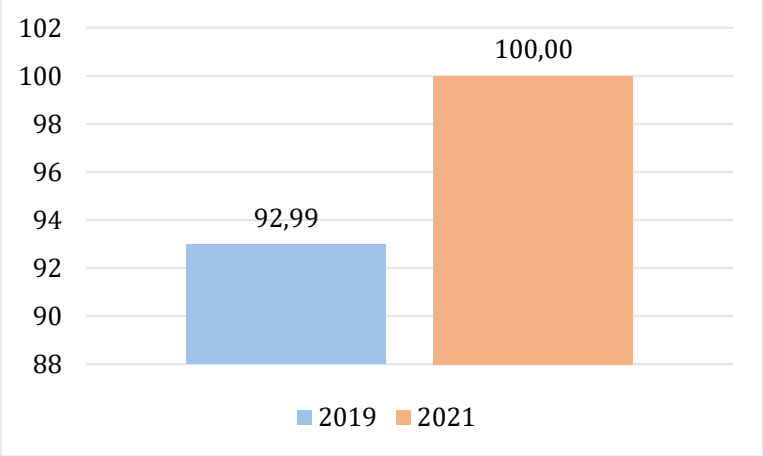
Gambar 39. 8 Presentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 13 Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	2019	2021	Satuan
Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92,99	100,00	%

Sumber: Bagian Umum



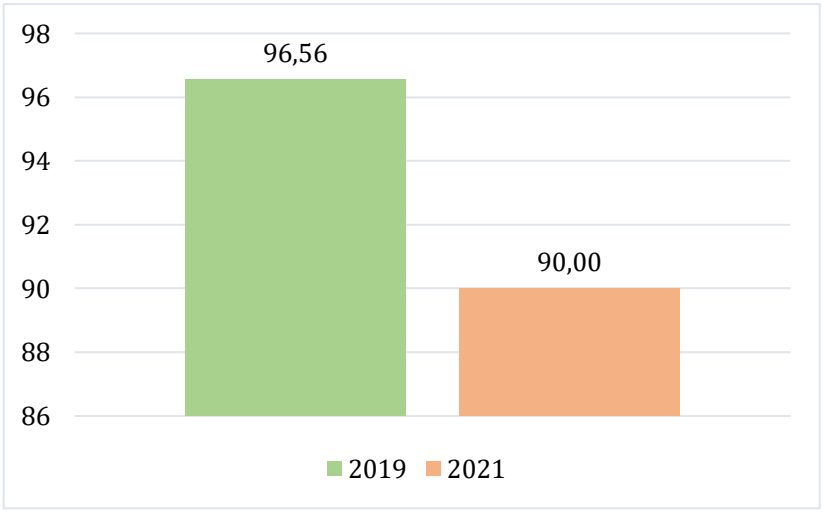
Gambar 39. 9 Presentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 14 Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	2019	2021	Satuan
Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	96,56	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



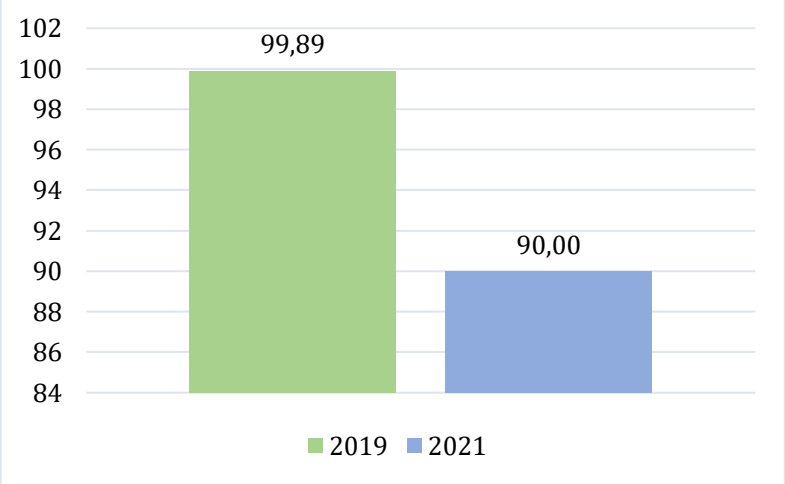
Gambar 39. 10 Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 15 Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	2019	2021	Satuan
Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,89	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



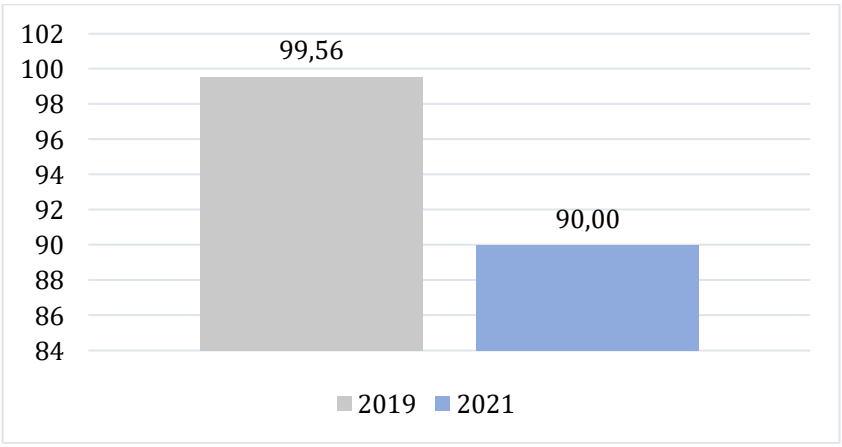
Gambar 39. 11 Presentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 16 Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Mebel

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Mebel	99,56	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



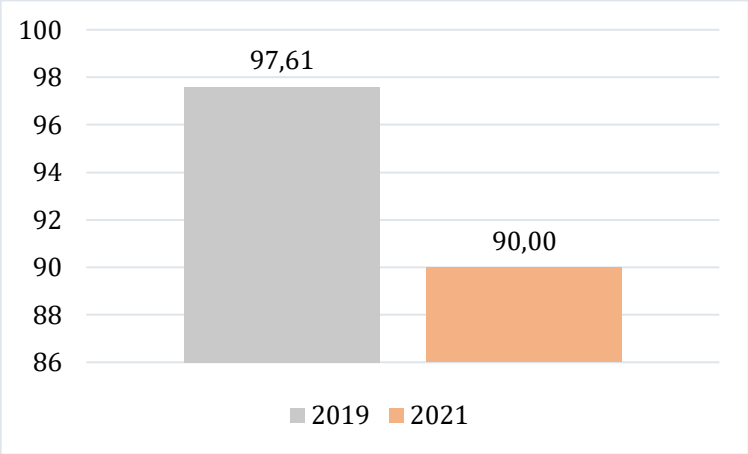
Gambar 39. 12 Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Mebel

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 17 Presentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97,61	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



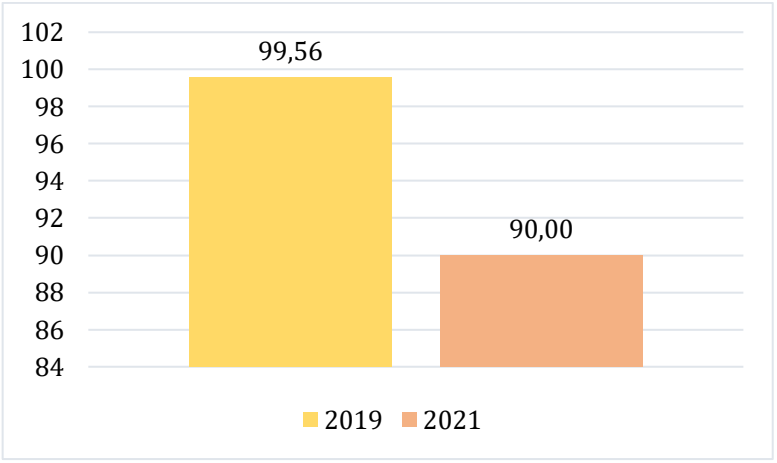
Gambar 39. 13 Presentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 18 Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,56	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



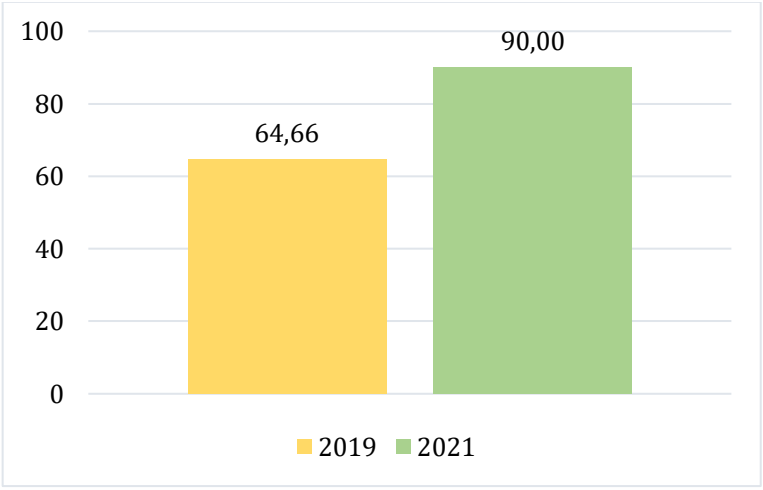
Gambar 39. 14 Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 19 Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	64,66	90,00	%

Sumber: Bagian Umum



Gambar 39. 15 Presentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 20 Presentase Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

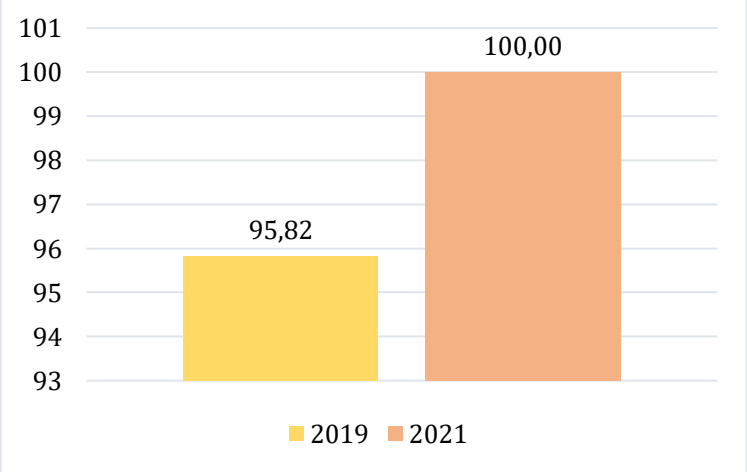
	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	%

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 21 Presentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	95,82	100,00	%

Sumber: Bagian Umum



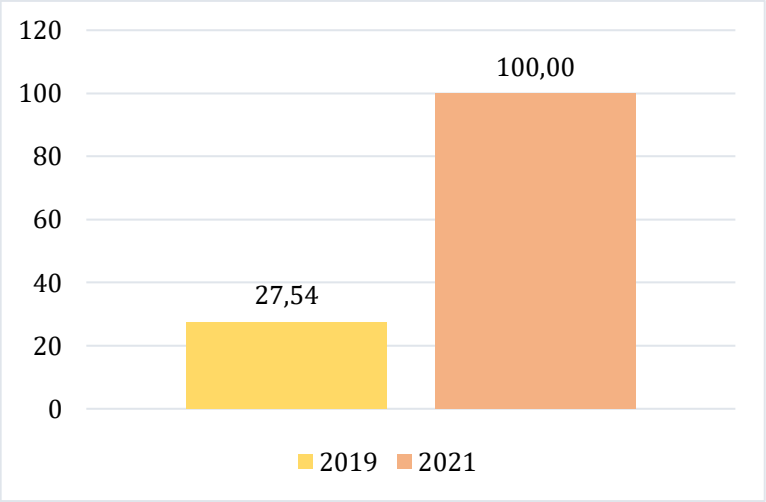
Gambar 39. 16 Presentase Pemenuhan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 22 Presentase Pemenuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	2019	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	27,54	100,00	%

Sumber: Bagian Umum



Gambar 39. 17 Presentase Pemenuhan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 23 Presentase Pemenuhan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	%

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 24 Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100,00	%

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 25 Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100,00	%

Sumber: Bagian Umum

Tabel 39. 26 Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

	2021	Satuan
Presentase Pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100,00	%

Sumber: Bagian Umum

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

DESKRIPSI

Pada tahun 2021, tercatat bahwa persentase peningkatan pelayanan di bidang keprotokolan Kabupaten Pasuruan sebesar 100%. Kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi pada tahun 2021 sebanyak 2552 kegiatan. Sedangkan untuk kegiatan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi pada tahun 2021 ada 30 kegiatan. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat pula 710 kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan yang terfasilitasi.

Tabel 40. 1 Persentase Peningkatan Pelayanan di Bidang Keprotokolan

Elemen	2021	Satuan
Persentase peningkatan pelayanan di bidang keprotokolan	100	%

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 40. 2 Jumlah Kegiatan Keprotokolan yang Terfasilitasi

Elemen	2021	Satuan
Jumlah kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	552	Kegiatan

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 40. 3 Jumlah Kegiatan Komunikasi Pimpinan yang Terfasilitasi

Elemen	2021	Satuan
Jumlah kegiatan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi	30	Kegiatan

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 40. 4 Jumlah Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang Terfasilitasi

Elemen	2021	Satuan
Jumlah kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan yang terfasilitasi	710	Kegiatan

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DSKRIPSI

Konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) adalah suatu kekerasan yang dilatarbelakangi sentimental antar suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Dampak dari SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Persentase konflik SARA dari tahun 2017 hingga 2021 berada pada persentase 100%. Hal tersebut mengartikan konflik SARA dari tahun ke tahun di Kabupaten Pasuruan masih tetap ada.

Narkotika dan Obat-obatan atau yang biasa disebut Narkoba adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Minuman keras (miras) adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dalam konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Narkoba/Minuman keras dalam konsumsinya tidak memberikan dampak positif bagi tubuh sehingga perlu dilakukan penyuluhan. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan pemberian ketrampilan tertentu yang sifatnya khusus pada batas waktu tertentu. Jumlah kegiatan penyuluhan Narkoba/Minuman keras di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebanyak 35 kali dan mengalami penurunan kegiatan hingga akhir tahun 2021 tidak dilaksanakan kegiatan di masa pandemi COVID-19.

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Persentase kelompok masyarakat yang memahami hukum dan HAM di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 80% dan terus mengalami peningkatan hingga akhir 2020 sebanyak 91%. Pada tahun 2021, kegiatan tidak dilaksanakan karena terdapat pemotongan anggaran untuk pandemi COVID-19.

Pancasila yang terdiri dari lima sila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakter kebangsaan adalah gambaran keseluruhan kebiasaan, perilaku, perasaan, kecenderungan, pandangan, pemikiran, motif dan standar, kepercayaan, gagasan, harapan, dan aspirasi dari setiap individu warga negara yang memiliki kesamaan dengan mayoritas warga negara lainnya. Nilai-nilai kebangsaan menjadi unsur utama dalam membangun karakter kebangsaan dalam bernegara. Persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 75% dan terus mengalami peningkatan hingga akhir 2021 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan semakin tinggi.

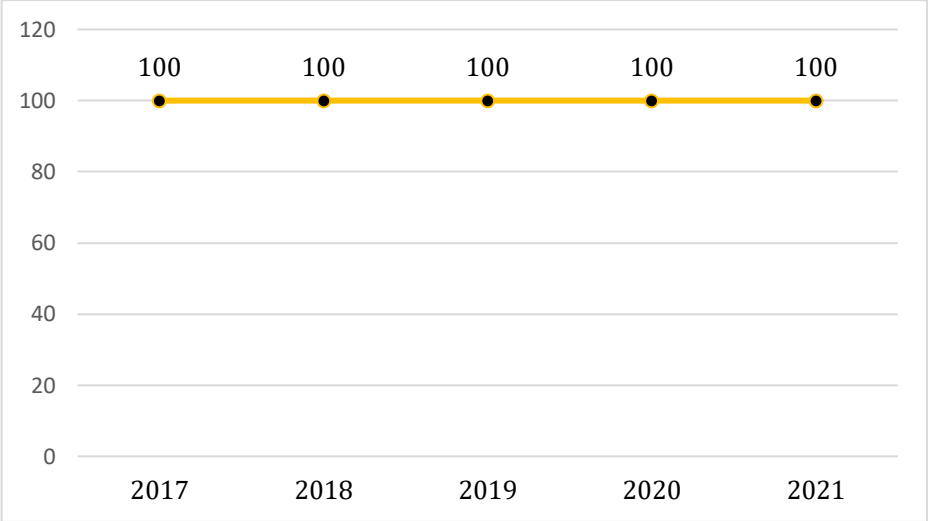
Toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang “tidak menyimpang dari hukum yang berlaku” di suatu negara, yang mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain

selama masih dalam batasan tertentu. Persentase peserta yang memahami arti dan makna adanya toleransi antar umat beragama dan antar etnis di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 83% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga akhir tahun 2021 tidak dilaksanakan kegiatan karena terdapat pemotongan anggaran untuk COVID-19. Peningkatan tersebut menunjukkan masyarakat di Kabupaten Pasuruan yang memahami arti dan makna adanya toleransi semakin tinggi.

Tabel 41. 1 Persentase Konflik SARA

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase konflik SARA	100	100	100	100	100	%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



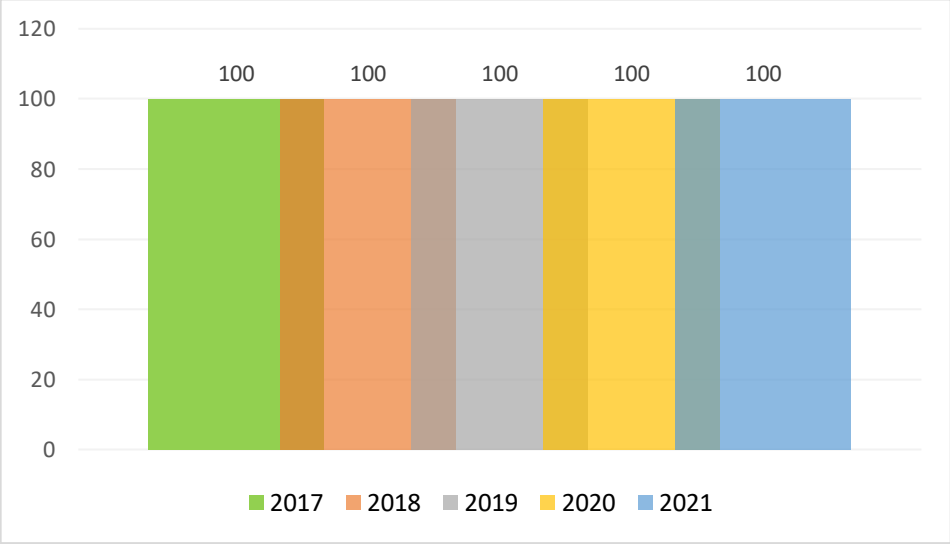
Gambar 41. 1 Persentase konflik SARA

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 2 Persentase Penurunan Konflik Sosial

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase penurunan konflik sosial	100	100	100	100	100	%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



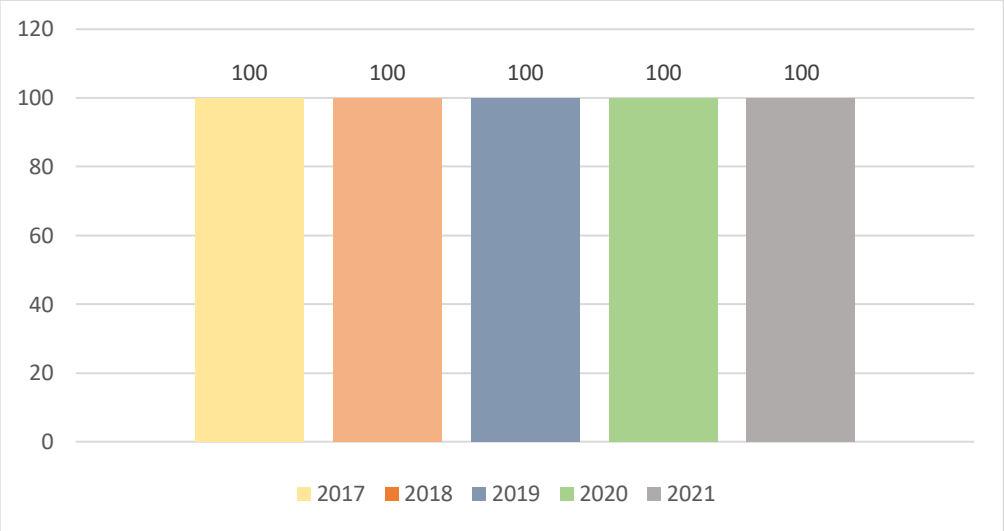
Gambar 41. 2 Persentase Penurunan Konflik Sosial

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 3 Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase potensi konflik yang dapat dicegah	100	100	100	100	100	%
Jumlah potensi konflik yang diselesaikan	1	1	0	1	5	konflik
Jumlah potensi konflik yang ada	1	1	0	1	5	Konflik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Gambar 41. 3 Persentase Potensi Konflik yang Dapat Dicegah

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 4 Persentase Konflik yang Dapat Diselesaikan Melalui Musyawarah Mufakat

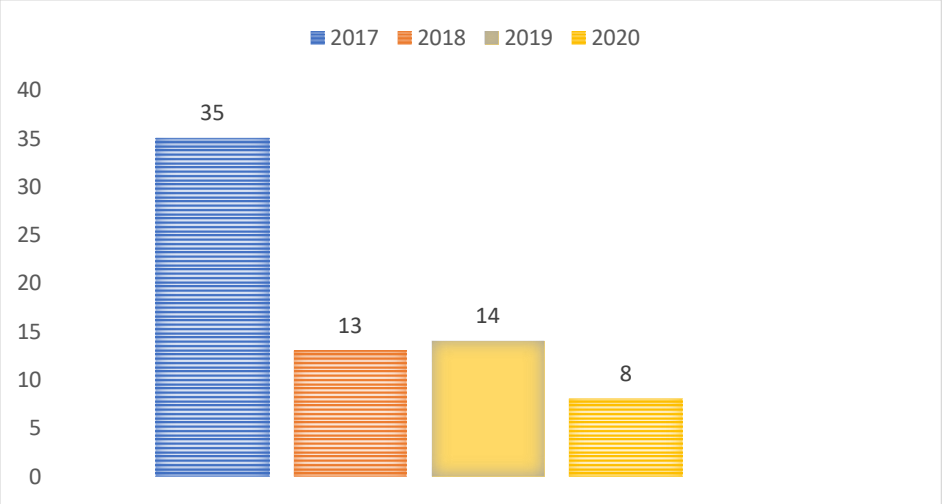
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat	100	100	100	100	100	%
Jumlah konflik yang dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat	2	1	2	1	4	konflik
Jumlah keseluruhan konflik	2	1	2	1	4	konflik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 5 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba/Minuman Keras (kali)

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba/Minuman Keras (kali)	35	13	14	8	-	Kegiatan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



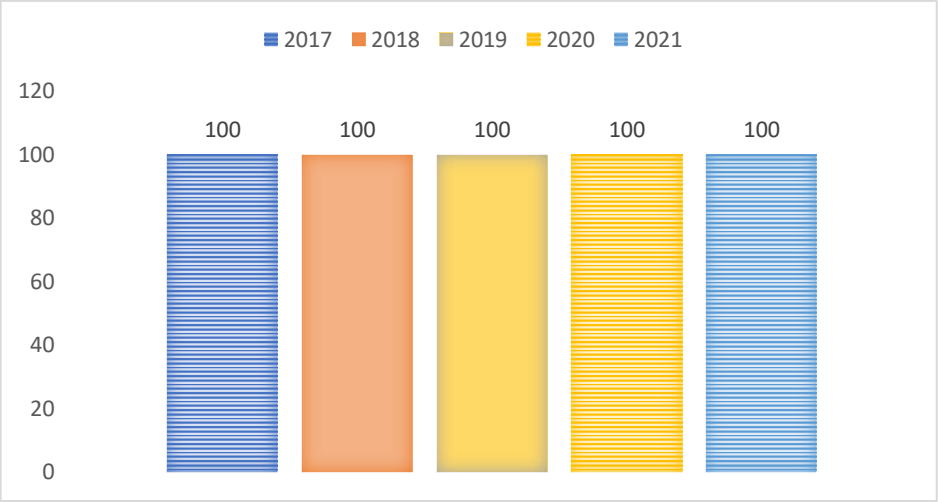
Gambar 41. 4 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Narkoba/Minuman Keras (kali)

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 6 Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terbina

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase daerah rawan konflik yang terbina	100	100	100	100	100	%
Jumlah daerah rawan konflik yang terbina	3	2	2	2	3	desa/kelurahan
Jumlah daerah rawan konflik	3	2	2	2	3	desa/kelurahan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



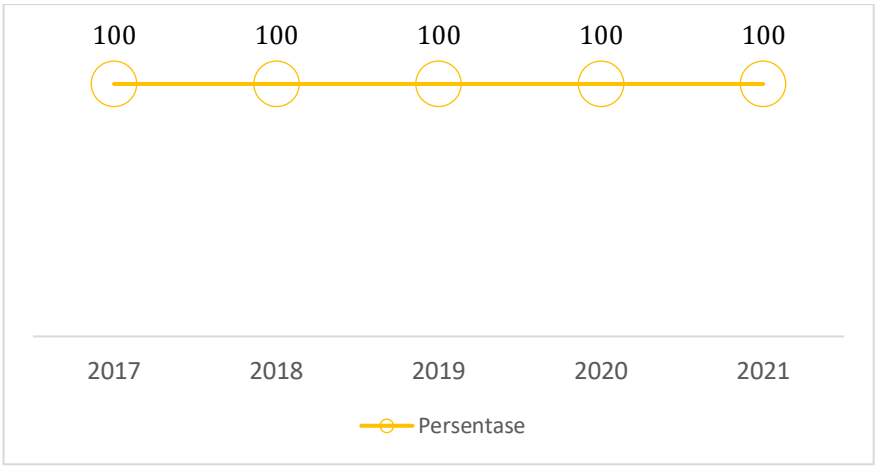
Gambar 41. 5 Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terbina

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 7 Persentase Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Konflik yang Terfasilitasi

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan konflik yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	%
Jumlah kelompok masyarakat di daerah rawan konflik yang terfasilitasi	3	2	2	2	3	kelompok
Jumlah kelompok masyarakat di daerah rawan konflik	3	2	2	2	3	kelompok

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Gambar 41. 6 Persentase Kelompok Masyarakat di Daerah Rawan Konflik yang Terfasilitasi

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 8 Persentase Arsip Daerah Tersimpan Dalam Keadaan Baik

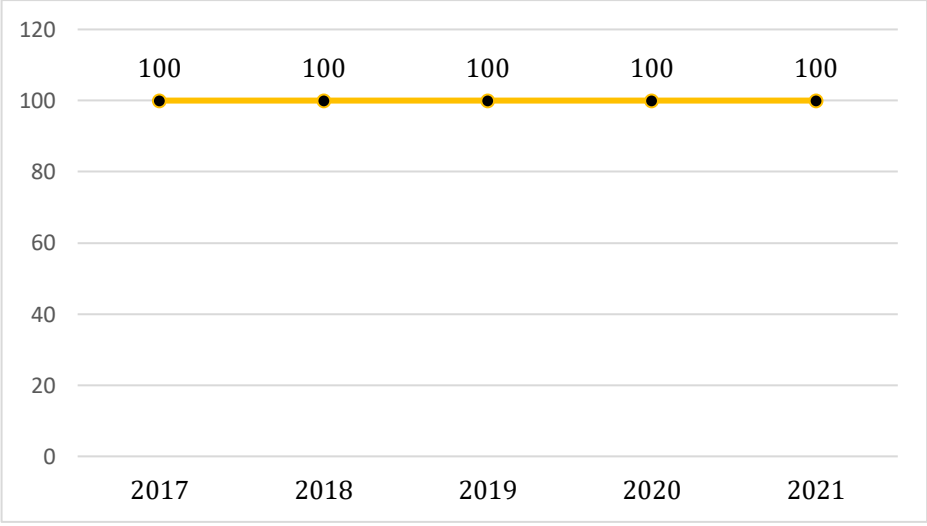
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase arsip daerah tersimpan dalam keadaan baik	100	100	100	100	100	%
Jumlah arsip daerah tersimpan dalam keadaan baik	387	1.392	150	485	349	Arsip
Jumlah seluruh arsip daerah yang tersimpan	387	1392	150	485	349	Arsip

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 9 Persentase peserta sosialisasi yang memahami deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase peserta sosialisasi yang memahami deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	100	100	100	100	100	%
Jumlah peserta sosialisasi yang memahami deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat	600	500	300	200	200	peserta
Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti	600	500	300	200	200	peserta

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



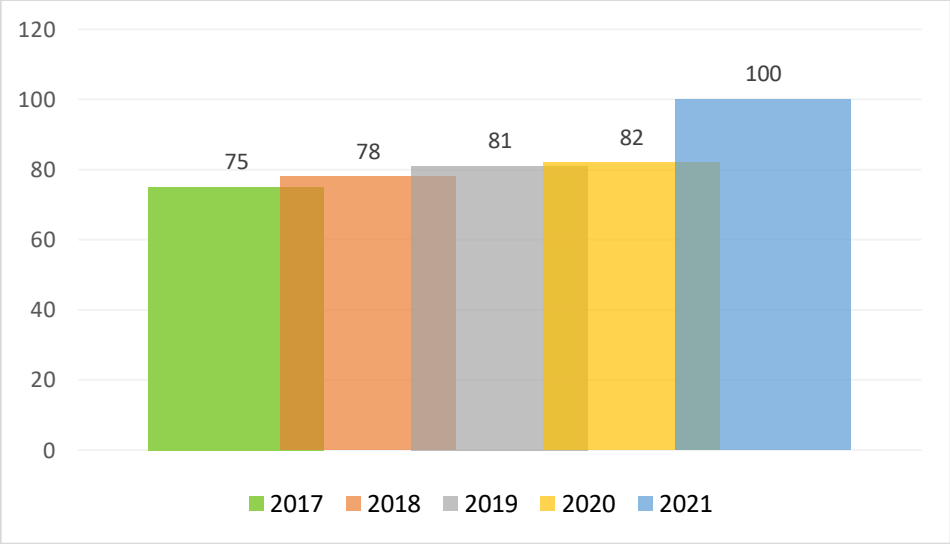
Gambar 41. 7 Persentase peserta sosialisasi yang memahami deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik masyarakat

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 10 Persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	75	78	81	82	100	%
Jumlah masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	750	1100	700	140	150	peserta
Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	1000	1400	800	170	150	peserta

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



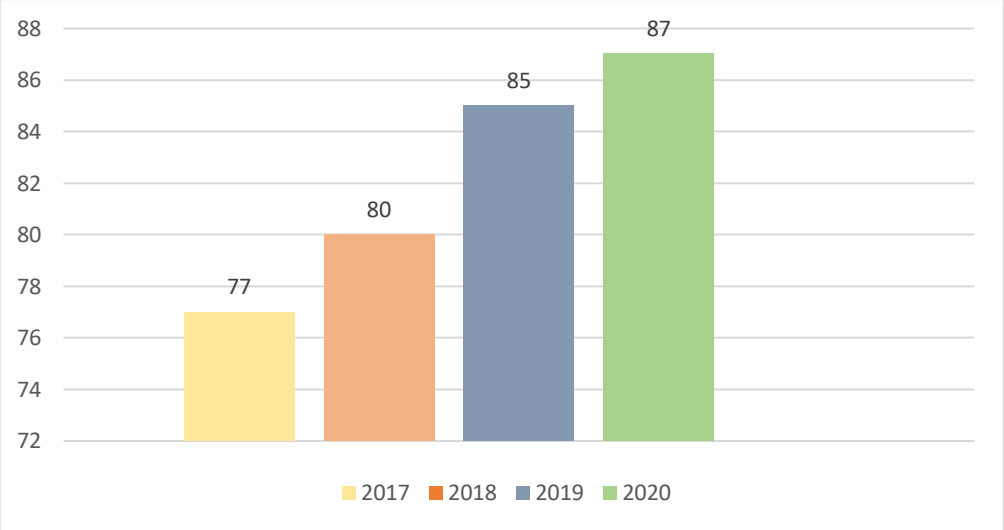
Gambar 41. 8 Persentase masyarakat yang memahami ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 11 Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	77	80	85	87	%
Jumlah peserta sosialisasi yang memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba	2700	1050	1200	700	peserta
Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti	3500	1300	1400	800	peserta

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



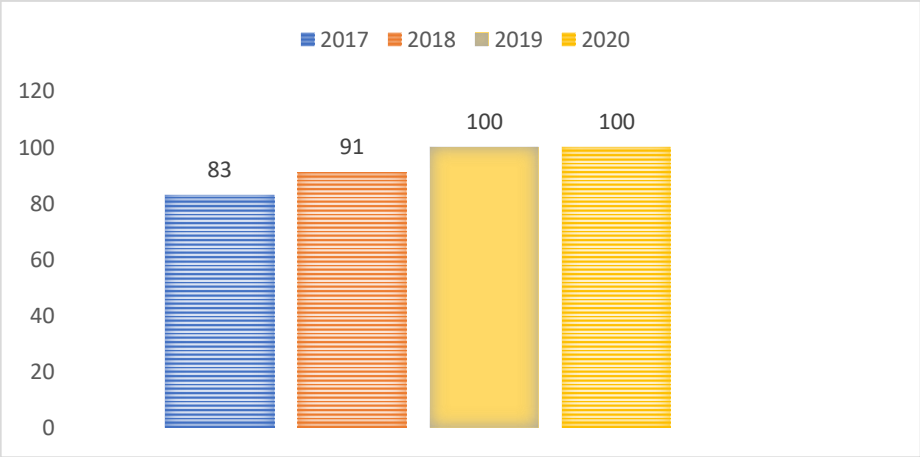
Gambar 41. 9 Persentase peserta sosialisasi yang memahami tentang bahaya penyalahgunaan narkoba

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 12 Persentase peserta yang memahami arti dan makna adanya toleransi antar umat beragama dan antar etnis

	2017	2018	2019	2020	Satuan
Persentase peserta yang memahami arti dan makna adanya toleransi antar umat beragama dan antar etnis	83	91	100	100	%
Jumlah peserta yang memahami arti dan makna adanya toleransi antar umat beragama dan antar etnis	500	550	600	400	peserta
Jumlah keseluruhan peserta yang mengikuti	600	600	600	400	peserta

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Gambar 41. 10 Persentase peserta yang memahami arti dan makna adanya toleransi antar umat beragama dan antar etnis

Tabel 41. 13 Persentase konflik Sosial Politik yang tertangani

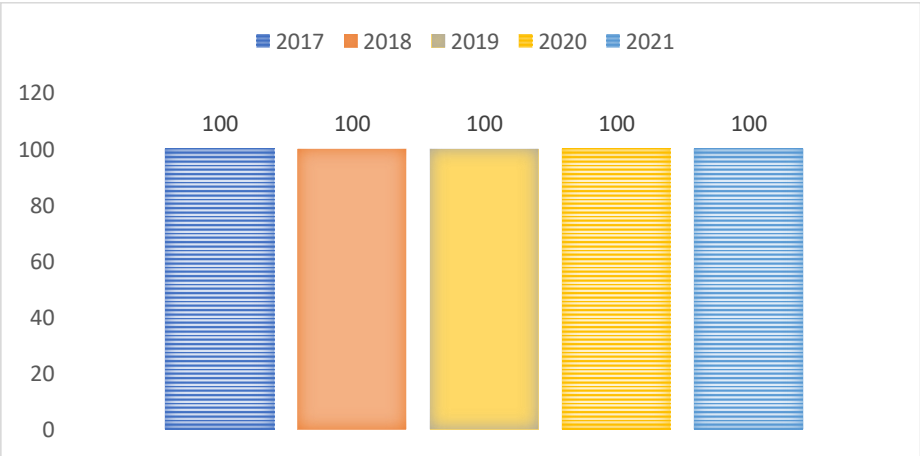
	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase konflik Sosial Politik yang tertangani	100	100	100	100	100	%
Jumlah Konflik Sosial Politik yang Tertangani	3	2	2	2	9	Konflik
Jumlah Keseluruhan Konflik Sosial Politik	3	2	2	2	9	konflik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 41. 14 Persentase organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi

	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
Persentase organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100	%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Gambar 41. 11 Persentase organisasi kemasyarakatan yang terfasilitasi

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Pasuruan